



Tumbuh & Berkembang Bersama UMKMK

Grow and Develop Together with SMEs

Tema
Theme



Tumbuh & Berkembang Bersama UMKMK

Grow and Develop Together with SMEs

Perum Jamkrindo mengemban misi untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dengan adanya penjaminan, maka UMKM dan Koperasi tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan.

Perum Jamkrindo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk penjaminan bagi UMKM dan Koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Perum Jamkrindo ingin terus tumbuh dan berkembang bersama UMKM dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Perum Jamkrindo has a mission to support Government policies and programs in the area of economy and national development, especially on Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives (SMEs and Cooperatives). With the existence of guarantee, SMEs and Cooperatives can still enjoy banking credit, even though some of the requirements set by banks cannot be fulfilled.

Perum Jamkrindo continuously strives to improve the quality of service and product guarantee for SMEs and Cooperatives to encourage the growth of people based economy. Perum Jamkrindo wants to grow and develop together with SMEs and contribute to national development.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity



**Kerja Nyata Bersama UMKMK,
Memajukan Ekonomi Kerakyatan**
*Concrete Work Together With SMEs &
Cooperatives, to Driving The People
Based Economy Forward*

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) hadir dan terfokus pada kegiatan penjaminan kredit untuk mendukung pengembangan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), yang berperan sangat penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Penjaminan perlu diberikan karena banyak UMKMK yang mengalami kesulitan mendapatkan tambahan modal. Walau mempunyai prospek usaha yang bagus, namun banyak di antara mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.

Dengan adanya penjaminan, maka UMKMK tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan. Kerja nyata itu berbuah manis. Sejalan dengan UMKMK yang terus berkembang dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, kinerja Perum Jamkrindo pun mencatatkan kinerja positif dari tahun ke tahun.

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) is present and focus on credit guarantee activities to support the development of Micro, Small, Medium and Cooperative Enterprise (SMEs & Cooperatives) activities, which performs an important role in driving the people's economy. Guarantee is a necessity to be provided because many SMEs & Cooperatives are having difficulty getting additional capital. Despite having good business prospects, many of them are unable to meet the requirements set by the bank.

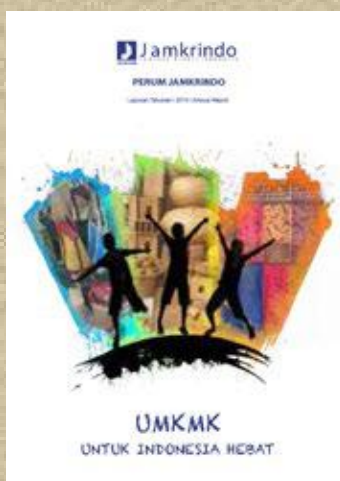
With the guarantee, SMEs & Cooperatives can still utilize bank loan, even though it cannot meet some of the requirements set by banks. Concrete work generates satisfaction outcome. In line with SMEs & Cooperatives continuous growth and driving the people based economy, Perum Jamkrindo performance also recorded positive performance from year to year.



**Membangun UMKMK & Koperasi
yang Kuat untuk Indonesia Sejahtera**
*Building Strong SMEs & Cooperative
for a Prosperous Indonesia*

Sebagai perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo ingin memberikan kontribusi nyata untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada segmen UMKMK dan Koperasi.

As a state-owned enterprise, Perum Jamkrindo has a desire to make a real contribution to the success of national economic development, especially in the segment of SMEs and Cooperatives.



UMKMK Untuk Indonesia Hebat
*SMEs and Cooperatives for Great
Indonesia*

UMKMK merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Perum Jamkrindo berupaya untuk terus mendukung perkembangan segmen UMKMK untuk mewujudkan Indonesia yang hebat dari aspek ekonomi.

SMEs and Cooperatives is the main pillar of national economic growth. Perum Jamkrindo strives to continue to support the development of SMEs and Cooperatives segment to create a great Indonesia from the economic aspect.

Kilas Kinerja

Performance Highlights



9,47%

Aset Perum Jamkrindo tahun 2017 tumbuh 9,47% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp14.678 miliar.

The assets of Perum Jamkrindo in 2017 grew 9.47% compared to the previous year to IDR14,678 billion.



RP801
MILIAR | BILLION

Laba bersih Perum Jamkrindo tahun 2017, meningkat 15,87% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya.

The net income of Perum Jamkrindo in 2017 increased 15.87% compared to the previous year's net income.

Indeks kepuasan Pelanggan Perum
Jamkrindo tahun 2017.



83,00

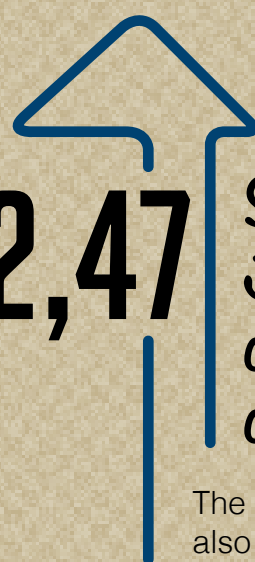
Customer satisfaction index of Perum Jamkrindo in 2017.



Nilai KPKU Perum Jamkrindo tahun 2017 dengan kategori Good Performance, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di mana Nilai KPKU Perum Jamkrindo adalah 536,00 dengan kategori “Good Performance”.

557,25

The Assessment Criteria of Superior Performance (KPKU) of Perum Jamkrindo in 2017 is in the category of Good Performance. This is an improvement when compared to the previous year where the value of KPKU of Perum Jamkrindo is 536.00 with the category “Good Performance”.



92,47

Skor *Assessment GCG* Perum Jamkrindo tahun 2017, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor 92,12.

The GCG Assessment Score on Perum Jamkrindo in 2017 has also increased compared to the previous year with a score of 92.12.

Daftar Isi

Table of Content

Tema	
Theme	2
Kesinambungan Tema	
Theme Continuity	3
Kilas Kinerja	
Performance Highlights	4

Penghargaan dan Sertifikasi	
Awards and Certifications	8
Peristiwa Penting 2017	
2017 Event Highlights	10

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan	
Statements of Financial Position	16
Laporan Laba Rugi	
Profit (Loss) Statements	18
Rasio Keuangan	

Financial Ratio	19
Ikhtisar Saham	
Share Highlights	20
Ikhtisar Efek Lainnya	
Other Securities Highlights	21

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

Laporan Dewan Pengawas	
Board of Supervisors' Report	24
Laporan Direksi	
The Board of Directors' Report	30

Surat Pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 Perum Jamkrindo	
Statement of Members of Board of Supervisors and Directors on the Responsibility for the 2017 Annual Report of Perum Jamkrindo	38

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Informasi Umum tentang Jamkrindo	
General Information about Jamkrindo	42
Riwayat Singkat Jamkrindo	
Jamkrindo Brief History	43
Bidang Usaha	
Line of Business	46
Produk Usaha Penjaminan	
Guarantee Business Products	48
Kompetensi Inti	
Core Competence	51
Struktur Organisasi	
Organizational Structure	52
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	
Vision, Mission, and Corporate Culture	54
Makna Branding Logo	
Meaning of Branding Logo	55
Profil Dewan Pengawas	
Board of Supervisors Profile	56
Profil Dewan Pengawas Syariah	
Sharia Board of Supervisors Profile	62
Profil Direksi	
Profile of The Board of Directors	65
Profil Pejabat Eksekutif	
Executive Officers Profile	72
Demografi Karyawan	
Employees Demographic	82

Komposisi Pemegang Saham/Pemilik Modal	
Shareholders/Share Owners Composition	83
Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/joint venture (JV)/special purpose vehicle (SPV)	
List of Subsidiaries and Associated Entities/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)	85
Struktur Grup	
Group Structure	86
Kronologis Penerbitan Saham	
Chronology of Share Listing	87
Kronologis Penerbitan Efek Lainnya	
Chronology of Other Securities Listing	87
Lembaga dan Profesi Penunjang	
Supporting Institution and Profession	88
Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan	
List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/ Representative Offices	90
Informasi pada Situs Web Perusahaan	
Information on Company Website	95
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	
Education and/or Training of Board of Supervisors, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit	96

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Kondisi Ekonomi Indonesia Tahun 2017 <i>Indonesia's Economic Condition in 2017</i>	104	Tinjauan per Segmen Usaha <i>Review of Business Segments</i>	117
Tinjauan Operasional <i>Operational Review</i>	108	Tinjauan Keuangan <i>Financial Review</i>	140
Aspek Pemasaran <i>Marketing Aspect</i>	116		

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Business Support Function

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi <i>Human Resources and Competency Development</i>	160	Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>	178

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance

Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>General Principles of Good Corporate Governance</i>	184	Kode Etik <i>Code of Ethics</i>	353
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perum Jamkrindo <i>The Development of Good Corporate Governance Application in Perum Jamkrindo</i>	186	Pengendalian Gratifikasi <i>Gratification Control</i>	364
Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Organization Structure</i>	224	Kebijakan Anti Korupsi <i>Anti-Corruption Policies</i>	365
Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>	333	Whistleblowing System <i>Whistleblowing System</i>	366
Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>	348	Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi <i>Diversity of the Composition of the Board of Supervisors and Directors</i>	372
Corporate Social Responsibility <i>Corporate Social Responsibility</i>	349	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara <i>State Administrators' Wealth Report</i>	374
Perkara Penting <i>Significant Cases</i>	349	Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>	376
Akses Informasi dan Data Perusahaan <i>Information Access And Corporate Data</i>	350	Praktik <i>Bad Governance</i> <i>Bad Governance Practice</i>	378

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Bases of Implementation of Corporate Social Responsibility</i>	382	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan <i>Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development</i>	395
Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Practitioner of Corporate Social Responsibility Programs</i>	385	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen <i>Corporate Social Responsibility Relating to The Responsibility to Customers</i>	406
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup <i>Corporate Social Responsibility Concerning The Environment</i>	387		
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja <i>Corporate Social Responsibility Relating to Employment, and Work Health and Safety</i>	390		

LAPORAN KEUANGAN

Financial Report

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



**16 September 2017, Juara 3
Pengembangan Strategi Terbaik dalam
Acara Anugerah BUMN 2017**

*September 16, 2017, 3rd Winner of Best Strategy
Development in the 2017 BUMN Award Event*



**16 September 2017, Juara 3 Transformasi
dalam Acara Anugerah BUMN 2017**

*September 16, 2017, 3rd Winner of Transformation
in the 2017 BUMN Awards event*



**16 September 2017, Juara 2 Pengembangan
SDM Terbaik dalam acara Anugerah BUMN 2017**

*September 16, 2017, 2nd Winner of Best Human
Resources Development in the 2017 BUMN
Anugerah event*



**6 September 2017, Juara 2 Annual Report Kategori BUMN
Keuangan Non Listed, Annual Report Award, OJK, Bank
Indonesia, Kementerian BUMN dan KNKG**

*September 6, 2017, 2nd Winner Annual Report Category of
Non-Listed Financial SOEs, Annual Report Award help by
FSA, Bank Indonesia, Ministry of SOEs and KNKG*



**20 Juli 2017, Kinerja Keuangan
"Sangat Bagus" 2012-2017, Infobank
Golden Trophy 2017, Infobank**
*July 20, 2017, "Very Good" Financial
Performance 2012-2017, Infobank
Golden Trophy 2017, Infobank*



**02 November 2017, Peringkat 4 Kategori
Perusahaan BUMN Non Tbk dalam
acara Indonesia Good Corporate
Governance Award III 2017**
*November 02, 2017, Rating 4 Category
Non-Tbk SOEs, Indonesia Good Corporate
Governance Award III 2017*



**6 November 2017, Good Performance, BUMN Performance
Excellence Award 2017, Forum Ekselen BUMN**
*November 6, 2017, Good Performance, BUMN Performance
Excellence Award 2017, Forum Ekselen BUMN*



**14 Desember 2017, Silver Winner Corporate
Branding kategori Brand Strategi, BUMN
Branding and Marketing Award 2017**
*December 14, 2017, Silver Winner Corporate
Branding, Brand Strategy category, BUMN
Branding and Marketing Award 2017*

Peristiwa Penting 2017

2017 Event Highlights



Januari 15
January 15

Sosialisasi Penjaminan di acara *Car Free Day* di Jalan Sudirman, Jakarta
Socialization of Guarantee in Car Free Day event at Jalan Sudirman, Jakarta



Januari 28
January 28

Peresmian Taman Bacaan sebagai bantuan sarana pendidikan dalam acara HUT Bersama BUMN di SDN 02 & 03 Sembalun, Lombok
The official announcement ceremony of Taman Bacaan as a tools of education in the BUMN's Anniversary Event at SDN 02 & 03 Sembalun, Lombok



Januari 24
January 24

SMS E With Japan



Maret 24
March 24

Kegiatan Aksi Pangan di Padang
'Aksi Pangan' Event in Padang

April 04
April 04

Kunjungan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhard (CGCMB) ke Perum Jamkrindo
Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGCMB) Visits to Perum Jamkrindo



April 12
April 12

Kegiatan Donor Darah dalam rangkaian HUT Perum Jamkrindo ke 47
Blood Donor Activities in 47th Anniversary of Perum Jamkrindo



Mei 17
May 17

Tayang Publik UMKM Berpenjaminan di Perum Jamkrindo
Public Broadcast of Guaranteed SMEs in Perum Jamkrindo



Mei 23
May 23

Kegiatan Aksi Pangan di Dompu
'Aksi Pangan' Event in Dompu



Mei 26
May 26

Diskusi Nasional Start Up
Center di Jakarta
National Discussion of Start
Up Center in Jakarta



Juni 01
June 01

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
The Establishment of 'Pancasila'
Ceremony

Juni 05
June 05

Kegiatan Safari Ramadhan di
Watampone
'Safari Ramadhan' Activities at
Watampone



Juni 12
June 12

Kegiatan Safari Ramadhan
di Tanjung Selor
'Safari Ramadhan' Activities
at Tanjung Selor

June 14
June 14

Kegiatan Bazar Ramadhan di Perum
Jamkrindo
Ramadhan Bazaar Activities in Perum
Jamkrindo



Juli 5
July 5

Pembagian Sembako Gratis dalam
rangkaian HUT Perum Jamkrindo ke-47
Distribution of Free Staple Food in 47th
Anniversary of Perum Jamkrindo



Juli 15
July 15

Family Gathering dalam rangka HUT Perum Jamkrindo ke 47 di Taman Impian Jaya Ancol
Distribution of Free Staple Food in 47th Anniversary of Perum Jamkrindo



Agustus 2
August 2

Pelaksanaan Sosialisasi POJK di Perum Jamkrindo
Implementation of POJK Socialization in Perum Jamkrindo



Juli 18
July 18

Kegiatan Siswa Mengenal Nusantara di Bangka Belitung
'Siswa Mengenal Nusantara' Activity in Bangka Belitung



Agustus 16
August 16

Kegiatan Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim di Perum Jamkrindo
'Buka Bersama' and Donation to the Orphans activities at Perum Jamkrindo

Agustus 7
August 7

Converence Live Sharing di Perum Jamkrindo
Conference Live Sharing at Perum Jamkrindo



Agustus 17
August 17

Upacara HUT RI Bersama Veteran di Bangka Belitung
Indonesia's Independence Day Ceremony with the Veterans in Bangka Belitung



Agustus 17
August 17

Program Bedah Rumah Veteran di Bangka Belitung
Veterans' House Renovation Program in Bangka Belitung



September 07
September 07

Kegiatan Pisah Sambung Direktur Utama dan Direktur Bisnis Penjaminan
Farewell Activities for the former President Director and Guarantee Business Director of Perum Jamkrindo



September 22
September 22

Kegiatan IBD EXPO di Jakarta Convention Center
IBD EXPO at Jakarta Convention Center



Oktober 2
October 2

Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila
Pancasila Supremacy Ceremony

Oktober 27
October 27

Upacara Memperingati Hari Sumpah Pemuda
Youth Pledge Day Ceremony



November 25
November 25

Kopdar Akbar Buka Lapak 2017 di Wisma Aldiron, Pancoran
'Kopdar Akbar Buka Lapak 2017' at Wisma Aldiron, Pancoran

Desember 22
December 22

BUMN Mengajar di SDN Parhitenan Parapat, Kab Simalungun
BUMN Mengajar activities at SDN Parhitenan Parapat, Simalungun District







IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Position

dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
ASET <i>ASSETS</i>					
Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalent</i>	4.711.775	5.196.593	5.594.822	5.723.816	5.418.223
Surat Berharga <i>Securities</i>	1.454.002	2.700.064	2.925.022	3.209.124	4.025.861
Piutang IJP <i>IJP Receivables</i>	1.206.227	1.075.355	1.442.622	2.347.025	2.474.754
Piutang Penjaminan Ulang <i>Re-guarantee Receivables</i>	120.584	69.937	97.538	112.346	120.532
Pinjaman yang diberikan <i>Loans</i>	1.297	973	955	955	776
Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i>	27.596	132.732	58.861	81.728	87.892
Beban dibayar di Muka <i>Prepaid Expenses</i>	553.068	598.764	855.522	1.016.173	1.153.990
Properti Investasi <i>Investment Properties</i>	14.981	14.590	-	-	-
Aset Tetap <i>Fixed Assets</i>	37.841	54.425	396.123	441.995	471.169
Aset Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Assets</i>	148.019	128.607	168.754	174.614	177.252
Aset Lain-lain <i>Other Assets</i>	24.509	57.811	102.774	300.641	747.693
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	8.299.900	10.029.851	11.642.993	13.408.418	14.678.143
LIABILITAS <i>LIABILITIES</i>					
Utang Klaim <i>Claim Payables</i>	45.181	10.197	13.067	11.650	75.925
Utang Pajak <i>Tax Payables</i>	24.242	3.525	29.218	72.812	59.550
Cadangan Klaim <i>Claim Reserves</i>	452.122	396.379	321.871	404.959	427.143
Utang Penjaminan Ulang <i>Co-guarantee Payables</i>	41.713	35.822	63.443	66.604	109.687
Pendapatan Ditangguhkan <i>Deferred Revenues</i>	1.103.428	1.019.708	1.615.781	2.346.247	2.638.598
Utang Lain-lain <i>Other Payable</i>	76.558	137.762	105.288	178.409	204.458
Liabilitas Imbalan Kerja <i>Employment Allowance Liabilities</i>	10.155	21.843	18.124	28.168	38.907
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	1.753.398	1.625.236	2.166.792	3.108.849	3.554.268

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
EKUITAS <i>EQUITY</i>					
Penyertaan Modal Pemerintah <i>Government Capital Investment</i>	5.338.733	6.638.733	7.138.733	7.638.733	7.638.733
Cadangan-cadangan <i>Reserves</i>	757.940	1.130.951	1.515.215	1.828.847	2.471.937
Komponen Ekuitas Lainnya <i>Other Equity Components</i>	(80.745)	(28.284)	196.885	139.930	211.345
Kepentingan Non-Pengendali <i>Non-Controlling Interest</i>	-	13	13	13	14
Saldo Laba <i>Retained Earnings</i>	530.574	663.203	625.354	692.045	801.845
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	6.546.502	8.404.615	9.476.201	10.299.569	11.123.875
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas <i>Total Liabilities and Equity</i>	8.299.900	10.029.851	11.642.993	13.408.418	14.678.143

Laporan Laba Rugi

Profit (Loss) Statements

dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan IJP Bersih <i>IJP Revenues - Net</i>	1.339.639	1.442.570	1.277.488	1.588.441	1.805.686
Beban Klaim <i>Claim Expenses</i>	963.393	1.021.058	922.662	871.583	1.004.610
Penjaminan Bersih <i>Net Guarantee</i>	376.246	421.512	354.825	716.857	801.077
Pendapatan Investasi Bersih <i>Net Investment Income</i>	347.674	531.364	599.525	587.678	601.634
Pendapatan Lain-lain Bersih <i>Other Income - Net</i>	162.647	222.492	307.230	294.070	328.679
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	229.601	329.360	470.528	657.151	708.169
Laba Sebelum Pajak <i>Income Before Tax</i>	656.967	846.007	791.053	941.454	1.023.221
Laba Bersih <i>Net Profit</i>	525.209	663.203	625.354	692.045	801.846
Laba Komprehensif <i>Comprehensive Profit</i>	445.140	715.664	845.163	573.335	859.677

Rasio Keuangan

Financial Ratio

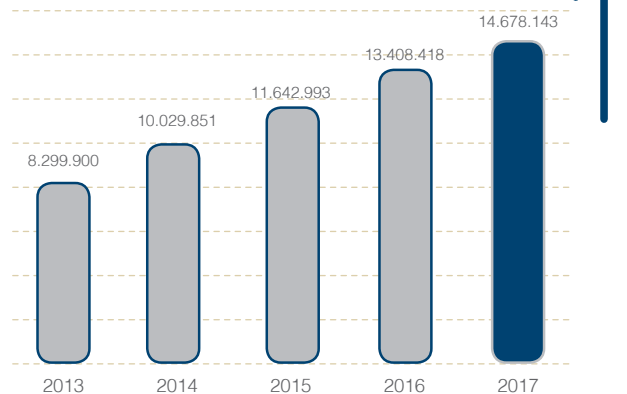
dalam %

in percentage

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
RASIO LIKUIDITAS <i>LIQUIDITY RATIO</i>					
Current Ratio	1010,06%	1351,10%	755,22%	712,07%	769,09%
RASIO SOLVABILITAS <i>SOLVABILITY RATIO</i>					
Hutang terhadap ekuitas <i>Debt to Equity</i>	26,78%	19,34%	22,87%	30,18%	31,95%
RASIO RENTABILITAS <i>PROFITABILITY RATIO</i>					
Margin Laba Kotor <i>Gross Profit Margin</i>	29,36%	31,59%	25,78%	29,75%	28,85%
Margin Laba Penjualan <i>Profit Margin on Sales</i>	39,05%	42,86%	42,14%	43,26%	42,50%
Return on Assets	8,81%	9,23%	7,30%	7,52%	7,29%
Return on Equity	8,10%	7,89%	6,60%	6,72%	7,49%
RASIO AKTIVITAS <i>ACTIVITY RATIO</i>					
Perputaran Aset <i>Assets Turnover</i>	22,56%	21,54%	17,32%	17,37%	17,14%
Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi (dalam jutaan Rupiah) <i>Total Investments in associates entity (in IDR million)</i>	347.674	531.364	599.525	587.678	601.634

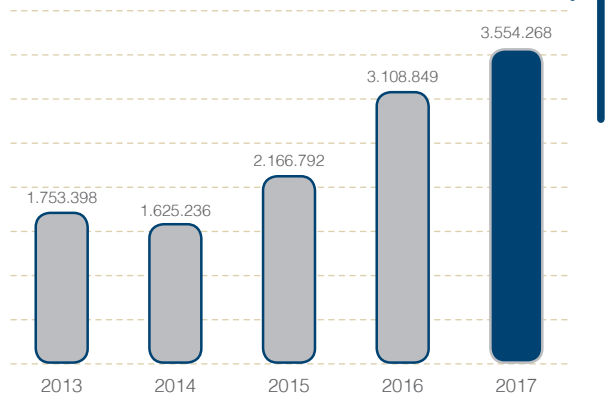
Total Aset Total Assets

(dalam jutaan Rupiah)
(in IDR million)



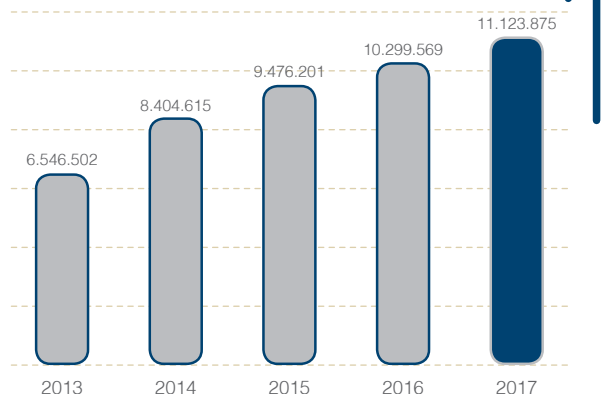
Liabilitas Liability

(dalam jutaan Rupiah)
(in IDR million)



Total Ekuitas Total Equity

(dalam jutaan Rupiah)
(in IDR million)



Ikhtisar Saham

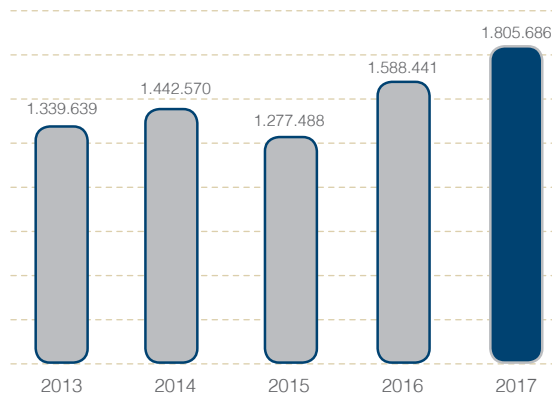
Share Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2017, Jamkrindo belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak terdapat informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan, serta *volume* saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2017, Jamkrindo did not trade shares so there are no information related to the number of shares outstanding, market capitalization, highest share price, lowest share price and closing stock price as well as volume of traded shares.

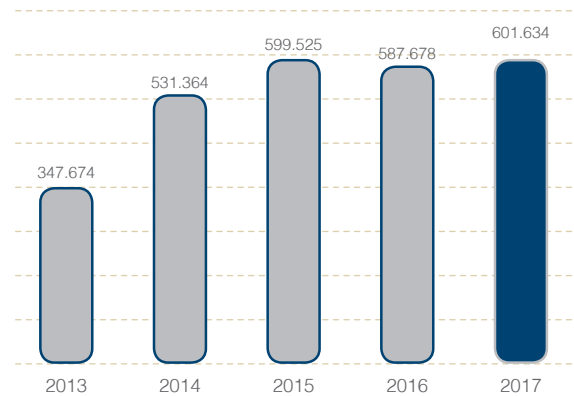
Pendapatan IJP Bersih IJP Revenues-Net

(dalam jutaan Rupiah)
(in IDR million)



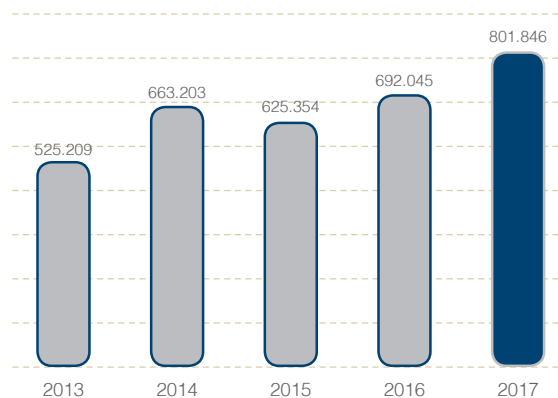
Pendapatan Investasi Bersih Net Investment Income

(dalam jutaan Rupiah)
(in IDR million)



Laba Bersih Net Income

(dalam jutaan Rupiah)
(in IDR million)



Ikhtisar Efek Lainnya

Other Securities Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2017, Jamkrindo tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

As of 31 December 2017, Jamkrindo does not issue bonds, sharia bonds (sukuk) and convertible bonds. Thus, there is no information related to the number of bonds/sukuk/convertible bonds, return/interest rate, maturity date and bond/sukuk rating.





LAPORAN MANAJEMEN

Management Report



Laporan Dewan Pengawas

Board of Supervisors' Report

SRI MULYANTO

Ketua Dewan Pengawas

Head of the Board of Supervisors



Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dewan Pengawas telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada kepada Direksi dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas memastikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perusahaan telah mengacu kepada rencana bisnis yang telah ditetapkan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa Perusahaan telah dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan perannya, Dewan Pengawas senantiasa menjaga obyektivitas dan

Dear Shareholder and Stakeholders,

The Board of Supervisors has undertaken the task of supervising and giving advice to the Board of Directors with full responsibility, as mandated in the Articles of Association and prevailing laws and regulations. In performing its duties, the Board of Supervisors ensures that in conducting its operational activities, the Company has referred to the established business plan, and ensures compliance with all applicable laws and regulations.

The Board of Supervisors always strives to ensure that the Company has been professionally managed, in accordance with the interests of Shareholders and other stakeholders. In carrying out its role, the Board of Supervisors always maintains objectivity and independence. Therefore, the

independensi. Oleh karena itu, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan, kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengawas memiliki komite-komite yang telah menjalankan tugas dengan efektif, yaitu Komite Audit serta Komite Investasi dan Risiko Usaha. Tugas dan wewenang komite-komite penunjang Dewan Pengawas telah didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat berperan secara efektif dalam membantu Dewan Pengawas.

Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap operasional Perusahaan yang dijalankan Dewan Pengawas untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

KONDISI EKSTERNAL PERUSAHAAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 terealisasi sebesar 5,07%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,02%. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut berada di bawah target yang dicanang pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2017 sebesar 5,2%.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 lebih banyak dipicu oleh belanja pemerintah yang tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dan menjalankan program-program lainnya, sedangkan sektor swasta partisipasinya dalam pertumbuhan ekonomi masih relatif stagnan.

Belum optimalnya peran sektor swasta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan kredit perbankan yang relatif lebih rendah, yaitu sebesar 8,35% atau berada di bawah target Bank Indonesia yang menargetkan pertumbuhan kredit perbankan tahun 2017 sebesar 10%-12%.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Sepanjang tahun 2017, realisasi penyaluran KUR hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,4% menjadi Rp96,7 triliun. Pencapaian tersebut berada di bawah target pemerintah yang sebesar Rp110 triliun.

Lambatnya pertumbuhan kredit perbankan dan tidak tercapainya target penyaluran KUR merupakan tantangan tersendiri bagi Perum Jamkrindo. Sebagaimana diketahui, bidang usaha utama Perum Jamkrindo adalah memberikan layanan penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik dalam penyaluran KUR maupun kredit perbankan.

Board of Supervisors is not involved in the operational decision making of the Company, except for matters governed by and stipulated in the Articles of Association and the laws and regulations.

The Board of Supervisors has committees which have performed their duties effectively, namely the Audit Committee and the Investment and Business Risk Committee. The duties and authorities of the Board of Supervisors' supporting committees are clearly defined, so they can play an effective role in assisting the Board of Supervisors.

We herewith convey the report on the performance of the supervisory duties to the Company's operations carried out by the Board of Supervisors for the fiscal year ending 31 December 2017.

EXTERNAL CONDITIONS OF THE COMPANY

Indonesia's economic growth in 2017 was realized at 5.07%, which is slightly higher than the previous year's economic growth of 5.02%. The achievement of economic growth is below the target set by the government on the Revised State Budget (APBN) in 2017 of 5.2%.

The national economic growth of 2017 is mainly triggered by government spending that is intensively conducting infrastructure development in various regions and running other programs, while the private sector participation in economic growth is still relatively stagnant.

The sub-optimal role from the private sector in supporting economic growth can be seen from the relatively low growth of banking credit at 8.35 percent or below the target set by Bank Indonesia in 2017 for bank loan growth of 10-12 percent.

The distribution of People's Business Credit (KUR) is also below the target set by the Government. Throughout the year of 2017, the realization of KUR distribution only grew 2.4% to IDR96.7 trillion. The achievement is below the government target of IDR110 trillion.

The slow growth of bank credit and the non-achievement of the target of KUR is a challenge for Perum Jamkrindo. As is known, the main business of Perum Jamkrindo is providing guarantee services for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) both in the distribution of KUR and banking credit.



PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Di tengah kondisi lingkungan eksternal yang penuh tantangan tersebut, Perum Jamkrindo masih dapat membukukan kinerja yang baik pada tahun 2017. Perusahaan berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih 15,87% menjadi Rp802 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp692 miliar. Peningkatan laba bersih tersebut tak lepas dari peningkatan pendapatan penjaminan yang dibukukan Perusahaan tahun 2017 yang mengalami peningkatan sebesar 13,68% menjadi Rp1.806 miliar.

Perum Jamkrindo juga berhasil membukukan pertumbuhan aset sebesar 9,47% menjadi Rp14.678 miliar, sedangkan ekuitas Perusahaan meningkat menjadi Rp11.124 miliar.

Realisasi penjaminan KUR Jamkrindo tahun 2017 juga berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik mengingat pada tahun 2017 target penyaluran KUR yang ditetapkan pemerintah tidak mencapai target.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Pengawas memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi atas berbagai inisiatif strategis yang telah diambil Direksi dalam menyikapi kondisi lingkungan eksternal dan persaingan di industri penjaminan tahun 2017 yang semakin ketat.

Dewan Pengawas mengapresiasi langkah Direksi dalam melakukan pembenahan di bidang SDM dan organisasi, sehingga Perum Jamkrindo dapat meraih kinerja yang baik dengan organisasi yang bekerja optimal. Pembenahan organisasi merupakan langkah yang sangat tepat agar Perum Jamkrindo dapat terus menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapi.

PENGAWASAN IMPLEMENTASI STRATEGI DAN PEMBERIAN NASIHAT

Pada awal tahun buku, Dewan Pengawas, Direksi dan Pemegang Saham telah menyepakati target dan strategi yang akan dijalankan Perusahaan sepanjang tahun buku 2017 yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017. Penyusunan RKAP tersebut juga disesuaikan dengan rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan dan arahan Pemegang Saham.

Dewan Pengawas mengambil peran aktif mengawasi Direksi dalam mengimplementasikan strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam forum rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi, Dewan Pengawas selalu meminta

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

In the midst of challenging external environment conditions, Perum Jamkrindo can still perform well in 2017. The company managed to record a 15.87% growth in net profit to IDR802 billion from IDR692 billion in the previous year. The increase in net income is due to the increase in guaranteed revenue recorded by the Company in 2017 which increased by 13.68% to IDR1,806 billion.

Perum Jamkrindo also recorded an asset growth of 9.47% to IDR14,678 billion, while the Company's equity increased to IDR11,124 billion

The realization of Jamkrindo's KUR guarantee in 2017 is also above the target which was determined. This is a very good achievement considering that in 2017 the target of KUR disbursement set by the Government did not reach the target.

For the achievement, the Board of Supervisors gives high appreciation to the Board of Directors on various strategic initiatives which have been taken in addressing the external environment and competition in the increasingly tightening guarantee industry in 2017.

The Board of Supervisors appreciates the Board of Directors' actions in improving human resources and the organization so that Perum Jamkrindo can achieve good performance with the optimal organization. Organizational reform is a precise step so that Perum Jamkrindo can continue to adjust to the challenges faced.

SUPERVISION OF STRATEGY IMPLEMENTATION AND ADVICE GIVING

At the beginning of the fiscal year, the Board of Supervisors, Board of Directors and Shareholders have agreed on the targets and strategies which will be implemented by the Company during the fiscal year 2017 as set forth in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) 2017. The RKAP is also adjusted to the Company's medium and long-term plans and Shareholder directives.

The Board of Supervisors takes an active role in overseeing the Board of Directors in implementing strategies to achieve the established targets. In the forum of joint meetings of the Board of Supervisors and Board of Directors, the Board of Supervisors

penjelasan Direksi terhadap strategi yang dijalankan dan tujuan yang hendak dicapai. Pada forum tersebut, Dewan Pengawas menyampaikan pandangan dan nasihat kepada Direksi terkait dengan pencapaian kinerja dan strategi yang dijalankan Direksi.

Sepanjang tahun 2017, Dewan Pengawas telah melakukan 15 kali rapat internal, 13 kali rapat gabungan dengan Direksi, dan 2 kali Rapat Pembahasan Bersama dengan Kementerian BUMN. Pokok-pokok pandangan dan nasihat yang diberikan Dewan Pengawas kepada Direksi sepanjang tahun 2017 antara lain:

1. Melakukan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan penetrasi agar dapat menjangkau UMKM yang lebih besar lagi.
3. Memperkuat sistem dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengembangan produk-produk.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia tahun 2018 diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2017. Perum Jamkrindo menatap tahun 2018 dengan optimisme yang tinggi. Dewan Pengawas telah menyusun target pencapaian tahun 2018 bersama Direksi. Target yang ditetapkan merupakan target yang rasional yang dilandasi pada asumsi-asumsi dari berbagai aspek.

Dewan Pengawas memandang Perusahaan masih memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang. Untuk itu, Dewan Pengawas meminta Direksi untuk menerapkan strategi yang berkesinambungan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan sejumlah inisiatif strategis.

Dewan Pengawas meminta Direksi untuk tetap fokus pada segmen dengan tingkat risiko yang dapat dikendalikan dengan baik dan terus meningkatkan kualitas SDM agar pencapaian tujuan Perusahaan dapat terlaksana dengan baik.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perum Jamkrindo terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Struktur dan mekanisme Tata Kelola Perusahaan terus dilengkapi dan disempurnakan.

Peningkatan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan juga tercermin dari hasil *assessment* yang dilakukan Perusahaan. Tahun 2017, hasil *self assessment*

always asks the Board of Directors for an explanation of the strategy being implemented and the objectives to be achieved. At the forum, the Board of Supervisors conveys the views and advice to the Board of Directors regarding the achievement of the performance and strategy of the Board of Directors.

Throughout the year 2017, the Board of Supervisors has conducted 15 internal meetings, 13 joint meetings with the Board of Directors, and 2 Joint Discussion meetings with the Ministry of SOEs. The points of view and advice given by the Board of Supervisors to the Board of Directors throughout 2017 include:

1. Conducting business development by prioritizing the principle of prudence and compliance with applicable laws and regulations.
2. Increase penetration in order to reach other larger SMEs.
3. Strengthen systems and information technology infrastructure to support product development.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS

Indonesia's economy in 2018 is predicted to experience better growth compared to the year 2017. Perum Jamkrindo is facing the year 2018 with high optimism. The Board of Supervisors has set a target of 2018 achievement with the Board of Directors. The target set is a rational target based on the assumptions of various aspects.

The Board of Supervisors believes that the Company still has enormous potential to grow. To that end, the Board of Supervisors asked the Board of Directors to implement sustainable strategies by implementing a number of strategic initiatives.

The Board of Supervisors requests the Board of Directors to remain focused on segments with a level of risk that can be controlled properly and continue to improve the quality of human resources in order to properly achieve the objectives of the Company.

OUTLOOK ON THE IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of Good Corporate Governance in Perum Jamkrindo continues to show a very good enhancement. The structure and mechanisms of the Company's Corporate Governance are continuously complemented and refined.

Improving quality of the implementation of GCG principles is also reflected in the results of the company's assessment. In 2017, the GCG self-assessment result for the period of



GCG periode tahun 2017 memperoleh skor 92,470, dengan predikat “Sangat Baik”, lebih tinggi dibandingkan hasil *assessment* tahun sebelumnya yang meraih skor 92,12 dengan predikat “Sangat Baik”.

Namun demikian, Dewan Pengawas mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan. Dewan Pengawas melalui Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha secara terus menerus meminta Direksi untuk membangun budaya sadar risiko dan kepatuhan di Perusahaan.

Salah satu fokus perhatian Dewan Pengawas dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan adalah terkait penerapan *Whistleblowing System* (WBS). Dewan Pengawas melalui Komite Audit terus memantau penerapan WBS di lingkungan Perusahaan. Dewan Pengawas memandang WBS merupakan sebuah mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya *fraud*. Untuk itu, Dewan Pengawas mendorong Direksi untuk terus melakukan sosialisasi terkait keberadaan WBS agar sistem tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN PENGAWAS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite di bawah Dewan Pengawas, yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Investasi dan Risiko Usaha

Dewan Pengawas menilai pada tahun 2017, Komite di bawah Dewan Pengawas telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan memberikan masukan dan rekomendasi yang sangat berguna bagi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Pada tahun 2017, komposisi Dewan Pengawas Perum Jamkrindo tidak mengalami perubahan, yaitu:

Susunan Dewan Pengawas pada awal tahun:

Braman Setyo	: Ketua Dewan Pengawas
Nasarudin Umar	: Anggota Dewan Pengawas
Dahlan Siamat	: Anggota Dewan Pengawas

2017 earned a score of 92.470, with a ‘Very Good’ predicate. This is higher than the previous year’s achievement score of 92.12 with a ‘Very Good’ predicate.

However, the Board of Supervisors encourages the Board of Directors to continuously improve the quality of the implementation of the Good Corporate Governance principles. The Board of Supervisors through the Audit Committee and Investment and Business Risk Committee continuously requests the Board of Directors to establish a risk awareness and compliance culture in the Company.

One of the focus of attention of the Board of Supervisors in applying the principles of Good Corporate Governance is related to the application of the Whistleblowing System (WBS). The Board of Supervisors through the Audit Committee continues to monitor the implementation of WBS within the Company. The Board of Supervisors views WBS as a very effective mechanism to prevent fraud. To that end, the Board of Supervisors encourages the Board of Directors to continue to socialize the existence of WBS so that the system can run properly.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEE UNDER THE BOARD OF SUPERVISORS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Supervisors is assisted by a Committee under the Board of Supervisors, i.e:

1. Audit Committee
2. Investment and Business Risk Committee

The Board of Supervisors assesses that in 2017, the Committee under the Board of Supervisors has performed its duties and responsibilities well and provided useful inputs and recommendations to the Board of Supervisors in carrying out the Company’s supervisory management duties.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF SUPERVISORS

In 2017, the composition of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo did not experience any changes:

The composition of the Board of Supervisors at the beginning of the year:

Braman Setyo	: Head of the Board of Supervisors
Nasarudin Umar	: Member of the Board of Supervisors
Dahlan Siamat	: Member of the Board of Supervisors

Subandriyo : Anggota Dewan Pengawas
Noor Ida Khomsiyati : Anggota Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas pada akhir tahun:

Sri Mulyanto : Ketua Dewan Pengawas
Dahlan Siamat : Anggota Dewan Pengawas
Subandriyo : Anggota Dewan Pengawas
Noor Ida Khomsiyati : Anggota Dewan Pengawas
Diah Natalisa : Anggota Dewan Pengawas

APRESIASI

Perum Jamkrindo telah berhasil melalui tahun 2017 yang penuh tantangan dengan kinerja yang cukup baik. Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajaran manajemen Perum Jamkrindo serta seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan kepada Perusahaan.

Dewan Pengawas juga mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sehingga Dewan Pengawas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Tak lupa, atas nama Dewan Pengawas, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah dan mitra kerja Perusahaan. Semoga kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhir kata, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pengawas mengajak seluruh jajaran di Perum Jamkrindo untuk terus memberikan kemampuan terbaiknya, mengingat tantangan usaha ke depan akan semakin berat.

Jakarta, Mei 2018

Subandriyo : Member of the Board of Supervisors
Noor Ida Khomsiyati : Member of the Board of Supervisors

The composition of the Board of Supervisors at the end of the year:

Sri Mulyanto : Head of the Board of Supervisors
Dahlan Siamat : Member of the Board of Supervisors
Subandriyo : Member of the Board of Supervisors
Noor Ida Khomsiyati : Member of the Board of Supervisors
Diah Natalisa : Member of the Board of Supervisors

APPRECIATION

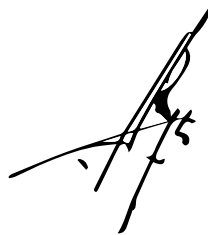
Perum Jamkrindo has been successful in facing the challenging year of 2017 with good performance. The Board of Supervisors gives appreciation to the Board of Directors and the management of Perum Jamkrindo and all employees for their dedication and hard work.

The Board of Supervisors also wishes to thank the Shareholders and stakeholders for their trust and support so that the Board of Supervisors can perform its duties and responsibilities well.

On behalf of the Board of Supervisors, we would also like to express our deepest gratitude to all our customers and partners. Hopefully, the cooperation which has been well established can continue to be improved in the future.

Finally, by thanking the God Almighty, the Board of Supervisors would also like to invite all employees of Perum Jamkrindo to continue performing their best ability since the challenges in the future will be more severe.

Jakarta, May 2018



Sri Mulyanto
Ketua Dewan Pengawas
Head of the Board of Supervisors



Laporan Direksi

The Board of Directors' Report

RANDI ANTO

Direktur Utama
President Director



Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan
yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Perum Jamkrindo dapat melalui tahun 2017 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang baik. Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 bersama laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Dear respected shareholder and stakeholders,

Let us send all praise to God Almighty because due to His blessing and consent, Perum Jamkrindo managed to sail through the year of 2017 with good operational and financial performance. We herewith convey the Company's management report for the financial year ended on 31 December 2017 together with the audited financial statements of the Company by Hertanto, Grace, Karunawan Public Accountant Firm, and obtain a fair opinion in all material respects.

KONDISI MAKRO EKONOMI

Membaiknya harga komoditas dunia memberikan dampak yang cukup besar terhadap membaiknya perekonomian global tahun 2017. Negara-negara maju yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi global mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pada tahun 2017. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,3%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 1,6%.

Setelah terus menerus tertekan selama 7 tahun terakhir, tahun 2017 ekonomi Tiongkok tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 6,9%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 6,7%.

Perbaikan ekonomi di negara maju tersebut meningkatkan permintaan atas produk global menopang kenaikan kinerja ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terjaga dengan baik dan tumbuh sebesar 5,07% di tahun 2017 dibandingkan 5,02% setahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi yang mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 64,0% terhadap PDB Indonesia tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

Penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tren penurunan inflasi, nilai tukar rupiah yang relatif stabil di kisaran Rp13.400/USD, serta kinerja perdagangan internasional yang meningkat seiring dengan perbaikan harga komoditas.

Tahun 2017, Bank Indonesia juga melakukan penurunan BI 7 *days repo rate* yang cukup signifikan dari 5,5% di Mei 2016 menjadi 4,25% di September 2017. Dalam teori ekonomi, penurunan BI 7 *days repo rate* akan juga menurunkan tingkat bunga perbankan. Investor yang mengalami penurunan tingkat *return* di perbankan akan melakukan *switching* ke instrumen investasi lain khususnya saham dan sektor riil.

Hal ini menjadi peluang yang cukup besar bagi industri penjaminan karena sektor riil yang didominasi oleh UMKM berpeluang lebih besar memperoleh pendanaan dari perbankan lebih mudah. Di sinilah Perum Jamkrindo sebagai bagian dari industri penjaminan mendapat keuntungan dari pembiayaan bagi UMKM tersebut yang disalurkan perbankan dan secara tidak langsung berdampak positif bagi bisnis Perum Jamkrindo.

MACRO ECONOMIC CONDITION

The improvement in global commodity prices has had a substantial impact on the improvement of the global economy in 2017. Developed countries which have become the motors of global economic growth have experienced good economic growth in 2017. The US economy grew 2.3%, which is higher than the previous year's economic growth of 1.6%.

After continuously oppressed for the past 7 years, China's economic growth in 2017 grew by 6.9%, which is higher than the 6.7% in the previous year.

Economic enhancements in developed countries are increasing demand for global products supporting economic performance in developing countries, including Indonesia. Indonesia's economic growth was well maintained and grew 5.07% in 2017 compared to 5.02% a year earlier. Consumption spending which contributes an average of 64.0% to Indonesia's GDP remains a major contributor to economic growth.

The strengthening of Indonesia's economy in 2017 was influenced by several factors, including the downward trend in inflation, the relatively stable rupiah exchange rate in the range of IDR13,400/USD, as well as the performance of international trade which increases along with the improvement of commodity prices.

In 2017, Bank Indonesia also reduced the 'BI 7 days repo rate' significantly from 5.5% in May 2016 to 4.25% in September 2017. In economic theory, the 'BI 7 days repo rate' decline will also lower bank interest rate. Investors who experience a decline in the return rate in banks will switch to other investment instruments, especially shares and real sectors.

This is a significant opportunity for the guarantee industry, since the real sector, which is dominated by SMEs, has a greater chance of obtaining funding from banks. In this sector, Perum Jamkrindo, as part of the guarantee industry, can gain advantage from the banking-disbursed financing for SMEs which will indirectly create positive impacts for the business of Perum Jamkrindo.



KINERJA PERUM JAMKRINDO

Tahun 2017, Perum Jamkrindo menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah program penyaluran KUR yang berada di bawah target Pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi penyaluran KUR secara nasional mengalami peningkatan sebesar 2,4% menjadi Rp96,7 triliun, namun pencapaian tersebut berada di bawah target yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar Rp110 triliun. Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan juga berada di bawah target, kendati lebih tinggi dibandingkan tahun sebelum.

Tahun 2017 juga ditandai dengan meningkatnya risiko penjaminan kredit sejalan dengan kenaikan jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan dan adanya ketentuan Pemerintah mengenai perlindungan asuransi jiwa untuk kredit konsumtif, maka untuk meminimalkan tingkat risiko yang dihadapi dan untuk memenuhi ketentuan Pemerintah dimaksud, Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi kerugian dan jiwa dalam bentuk kerja sama *Co-Guarantee*. Selain itu dalam rangka menurunkan *gearing ratio* maka Perusahaan melakukan reasuransi terhadap semua produk.

Perum Jamkrindo juga menghadapi tantangan dalam hal meningkatkan pendapatan *subrogasi* yakni kesulitan bank dalam menagih/mengeksekusi agunan dari kredit macet, terutama untuk usaha mikro dan kecil yang tersebar di pelosok daerah yang usahanya sudah tidak jalan lagi dan keberadaan nasabah sudah tidak diketahui lagi.

Menghadapi tantangan tersebut, manajemen Perum Jamkrindo telah mengambil sejumlah inisiatif strategis, antara lain dengan melakukan:

1. Penguasaan Pangsa Pasar semua produk Perusahaan;
2. Implementasi Sistem TI Terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis Perusahaan;
3. Organisasi dan SDM dengan budaya yang kompetitif dan berorientasi pasar;
4. Inovasi produk baru;
5. Optimalisasi jaringan kerja operasional;
6. Implementasi pemeringkatan UMKMK dan konsultasi manajemen dalam rangka peningkatan pelayanan kepada UMKMK; dan
7. Optimalisasi investasi dalam rangka peningkatan pendapatan investasi.

PERUM JAMKRINDO'S PERFORMANCE

In 2017, Perum Jamkrindo faced a number of challenges, including the KUR distribution program which is under the Government's target. Based on the data from the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the realization of KUR disbursement nationally increased by 2.4% to IDR96.7 trillion, but the achievement was below the target set by the Government which amounted to IDR110 trillion. In addition, the growth of bank credit is also below the target, although higher than the year before.

The year 2017 was also marked by the increased risk of credit guarantee; This is in line with the increase of the amount of credit guaranteed by the Company and the regulations of the Government on the protection of life insurance for consumer credit. Hence to minimize the level of risks encountered and to comply with the Government regulation, the Company has cooperated with the company life and loss insurance in the form of *Co-Guarantee* cooperation. In addition for reducing the gearing ratio, the Company reinsured all products.

Perum Jamkrindo also faced challenges in terms of increasing subrogation income, namely the difficulty of banks in collecting/executing collateral from bad debts, especially for micro and small businesses scattered in remote areas whose business is no longer running and the existence of customers is no longer known.

Faced with these challenges, Perum Jamkrindo management has taken a number of strategic initiatives, such as:

1. Mastering the Market Share of all Company's products;
2. Implementing Integrated IT System to improve the effectiveness of the Company's business processes;
3. Ensuring competitive and market-oriented organizations and human resources;
4. Innovating on new products;
5. Optimizing operational network;
6. Implementing SMEs and Cooperative rating and management consultation in order to improve service to SMEs and Cooperative; and
7. Optimizing investment in order to increase investment income.

Inisiatif strategis tersebut diambil mengingat pada tahun 2017 Perusahaan menghadapi *trend* potensi klaim yang meningkat secara signifikan, yang bersumber dari *outstanding* penjaminan KUR berjalan pada beberapa bank yang tidak lagi mengikuti program KUR. Selain itu juga terdapat program KUR yang baru sehingga Perusahaan harus mencari sumber pendapatan lain untuk menutupinya.

Di samping itu, tingkat persaingan usaha tahun 2017 juga semakin ketat. Oleh karena itu Perum Jamkrindo memfokuskan pada upaya penguatan daya saing melalui efisiensi dan efektivitas bisnis dengan meningkatkan kekuatan sistem manajemen operasional yang optimal, pertumbuhan pendapatan penjaminan untuk *sustainability*, peningkatan pelayanan kepada UMKMK, perluasan jaringan pemasaran dan diversifikasi usaha serta penyertaan langsung.

Dengan strategi tersebut, berhasil membukukan kinerja yang baik. Realisasi penjaminan KUR tahun 2017 berada di atas target yang ditetapkan, yaitu Rp50 triliun sedangkan realisasi penjaminan KUR tahun 2017 mencapai Rp50.473 triliun. Jadi bisa disimpulkan bahwa meskipun realisasi penyaluran KUR nasional tidak mencapai target yang ditetapkan Pemerintah, Perum Jamkrindo dapat bekerja secara efektif dan efisien menunjukkan kinerja sehingga menjadi *leader* mencapai target dalam penjaminan KUR.

Demikian juga dengan penjaminan bank. Walaupun pertumbuhan kredit di tahun 2017 di bawah target perbankan, namun kinerja Perum Jamkrindo pada tahun 2017 cukup baik. Penjaminan yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo mengalami pertumbuhan dibanding pada tahun 2016.

Kinerja keuangan Perum Jamkrindo tahun 2017 juga menunjukkan grafik peningkatan yang baik. Perusahaan berhasil membukukan pendapatan penjaminan sebesar 13,68% dari Rp1.588 miliar tahun 2016 menjadi Rp1.806 miliar tahun 2017. Peningkatan pendapatan penjaminan tersebut merupakan dampak dari peningkatan pendapatan penjaminan dari segmen penjaminan KUR, *Non-KUR*, dan syariah.

The strategic initiative was taken considering the fact that in 2017, the Company faced a significant trend of potential claims, which originated from the outstanding guarantee of the running KUR on several banks which no longer follow the KUR program. There was also a new KUR program so the Company must find other sources of income to cover it.

In addition, the level of business competition in 2017 was also tighter. For that reason, Perum Jamkrindo focused on strengthening competitiveness through efficiency and business effectiveness by increasing the strength of optimal operational management system, guaranteed revenue growth for sustainability, improvement of service to SMEs and Cooperatives, expansion of marketing network, business diversification, and direct participation.

With such strategies, the Company managed to record a good performance. The realization of KUR guarantees in 2017 was above the set target of IDR50 trillion while the realization of KUR guarantee in 2017 reached IDR50,473 trillion. So it can be concluded that although the realization of the national KUR distribution did not reach the target set by the Government, Perum Jamkrindo could still work effectively and efficiently which is shown in the Company's performance that can make Perum Jamkrindo becomes the leader in reaching the target in KUR guarantee.

Such is also the case with bank guarantees. Although loan growth in 2017 was below the target, Perum Jamkrindo's performance in 2017 was quite good. The guarantee transactions made by Perum Jamkrindo experienced a growth when compared to the year 2016.

The financial performance of Perum Jamkrindo in 2017 also showed a good improvement. The Company recorded a guarantee income of 13.68% from IDR1,588 billion in 2016 to IDR1,806 billion in 2017. The increase in revenue is a result of the increase in guaranteed income from KUR, Non-KUR, and sharia guarantee segments.



Perusahaan juga membukukan peningkatan pendapatan investasi sebesar 2,37% menjadi Rp602 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp588 miliar dan pendapatan lain-lain mengalami peningkatan sebesar 11,77% menjadi Rp329 miliar.

Meningkatnya pendapatan yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2017 menjadi faktor utama yang membuat Perum Jamkrindo dapat meraih laba bersih sebesar Rp802 miliar tahun 2017. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,87% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp692 miliar.

Tahun 2017, Perum Jamkrindo juga mencatat pertumbuhan aset sebesar 9,47% menjadi Rp14.678 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp13.270 miliar. Sedangkan jumlah ekuitas Perusahaan tumbuh sebesar 8% menjadi Rp11.124 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp10.300 miliar.

PROSPEK USAHA PERUM JAMKRINDO

Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini akan lebih baik dibandingkan tahun 2017. Pemerintah telah mencanangkan untuk meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2018. Berkaca pada pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 maka target tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Industri penjaminan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi. Penjaminan merupakan salah satu pendukung dalam peningkatan aktivitas ekonomi, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pada gilirannya memperkuat ekonomi nasional. Sehingga sudah pasti prospek usaha Perum Jamkrindo ke depan sangat menjanjikan, apalagi dengan akan berakhirnya masa transisi Undang-Undang Penjaminan No. 1 tahun 2016, maka perusahaan penjaminan akan mengalami peningkatan baik dari segi laba maupun volume penjaminan.

Prospek penjaminan FLPP masih terbuka mengingat masih ada mitra bank penyalur FLPP yang belum menjalin kerja sama dengan Perum Jamkrindo. Dengan adanya potensi tersebut, maka Perum Jamkrindo akan melakukan pendekatan dengan bank penyalur FLPP yang belum menjalin kerja sama agar di tahun depan perjanjian kerja sama dapat ditandatangani dan produksi penjaminan KUR diharapkan dapat meningkat.

The company also recorded an increase in its investment income by 2.37% to IDR602 billion from IDR588 billion in the previous year. Other income also increased by 11.77% to IDR329 billion.

The increased revenue of the Company in 2017 became the main factor which made Perum Jamkrindo can achieve a net profit of IDR802 billion in 2017. The achievement was an increase of 15.87% compared to the previous year of IDR692 billion.

In 2017, Perum Jamkrindo also recorded an asset growth of 9.47% to IDR14.678 billion from the previous year of IDR13,270 billion. The Company's total equity grew 8% to IDR11,124 billion from IDR10,300 billion in the previous year.

BUSINESS PROSPECT OF PERUM JAMKRINDO

In 2018, Indonesia's economic growth is assumed to be better than in 2017. The Government has announced to achieve economic growth of 5.3% in 2018. Reflecting on the national economic growth of 2017 then the target is not impossible to be realized.

Guarantee industry continues to grow in line with the increasing growth of economic activity. Guarantee industry is one of the supporters in increasing the economic activity, especially the Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs) sector which in turn strengthens the national economy. So, it is certain that business prospects of Perum Jamkrindo are very promising, especially with the end of the transition period of Guarantee Act No. 1 year 2016. The guarantee company, then, will experience an increase both in terms of profit and volume.

The prospect of FLPP guarantee is still open since there are still partners of FLPP channeling banks which have not yet cooperated with Perum Jamkrindo. With this potential, Perum Jamkrindo will approach the FLPP channeling banks which have not established cooperation so that next year the cooperation agreement can be signed and the production of KUR guarantee is expected to increase.

Di segmen penjaminan KUR, Perusahaan diharapkan dapat mengalami peningkatan dari Rp50 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp60 triliun di tahun 2018. Dikarenakan target KUR oleh Pemerintah kepada penyalur KUR meningkat sebesar 9% dari target tahun 2017 sebesar Rp110 triliun menjadi Rp120 triliun.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perum Jamkrindo meyakini bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan alat dan metode bagi entitas usaha untuk mengembangkan aspek *non-finansial*, yang pada akhirnya akan membentuk kepercayaan publik kepada entitas usaha dan meningkatkan iklim investasi.

GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika.

Berlandaskan pada kesadaran tersebut, Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan struktur, mekanisme, dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang dimilikinya. Perusahaan melakukan pembaharuan terhadap standar dan kebijakan yang dimiliki untuk memastikan sistem dan prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan *best practice*.

Perum Jamkrindo juga senantiasa memastikan bahwa kualitas prinsip GCG yang diterapkan Perusahaan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan *assessment* penerapan GCG. Hasil *self assessment* GCG periode tahun 2017 memperoleh skor 92,470, dengan predikat "Sangat Baik", lebih tinggi dibandingkan hasil *assessment* tahun sebelumnya yang meraih skor 92,12 dengan predikat "Sangat Baik".

In the KUR guarantee segment, the Company is expected to experience an increase from IDR50 trillion in 2017 to IDR60 trillion in 2018. This is due to the KUR target set by the Government to the KUR dealer which increased by 9% from the 2017 target of IDR110 trillion to IDR120 trillion.

CORPORATE GOVERNANCE

Perum Jamkrindo believes that Good Corporate Governance (GCG) practices provide tools and methods for business entities to develop non-financial aspects, which in turn will establish public confidence in business entities and improve the investment climate.

GCG are principles which underlie the company's management processes and mechanisms based on regulatory compliance and reflection of the ethical business world.

Based on this awareness, the Company continues to work for improving the Corporate Governance structure, mechanisms, and infrastructure. The Company renews its standards and policies to ensure systems and procedures are implemented in accordance with best practice.

Perum Jamkrindo also always ensures that the quality of GCG principles applied by the Company continues to improve from time to time. One of the steps taken is to conduct an assessment of GCG implementation. The GCG self-assessment result for the period of 2017 earned a score of 92.470, with a 'Very Good' predicate, which is higher than the previous year's scoring result of 92.12, also with 'Very Good' predicate.



Dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing Perusahaan juga telah melakukan *assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sesuai Surat Kementerian Negara BUMN No. S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dengan mengadopsi "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*". Tahun 2017, Perusahaan meraih skor 557,25 dengan kategori "*Good Performance*". Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya di mana Perusahaan meraih skor 536,00 dengan kategori "*Good Performance*".

Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan di lingkungan operasional Perusahaan agar dapat memperoleh kepercayaan dari seluruh *stakeholders*.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI.

Pada tahun 2017, komposisi Direksi Perum Jamkrindo mengalami perubahan. Komposisi Direksi pada 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

Diding S. Anwar	: Direktur Utama
Bakti Prasetyo	: Direktur Bisnis Penjaminan
R. Sophia Alizsa	: Direktur Operasional dan Jaringan
Nanang Waskito	: Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
I. Rusdonobanu	: Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko

Komposisi Direksi pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Randi Anto	: Direktur Utama
Amin Mas'udi	: Direktur Bisnis Penjaminan
Kadar Wisnuwarman	: Direktur Operasional dan Jaringan
Sulis Usdoko	: Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
I. Rusdonobanu	: Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko

In order to improve the capability and competitiveness, the Company has also conducted an assessment of Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) in accordance with the Letter of the Ministry of State Owned Enterprise (BUMN) No. S-153/S.MBU/2012 dated July 19, 2012, on Performance Reporting Based on Approach of Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) of SOE by adopting "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*". In 2017, the Company achieved a score of 557.25 with the category of "*Good Performance*". The result is higher than the previous year where the Company scored 536.00 which is also with the category of "*Good Performance*".

The Company is committed to continuously improve the quality of applying the principles of Good Corporate Governance in the Company's operational environment in order to gain the trust of all stakeholders.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS.

In 2017, the composition of the Board of Directors Perum Jamkrindo experienced changes. The composition of the Board of Directors as of January 1, 2017, is as follows:

Diding S. Anwar	: President Director
Bakti Prasetyo	: Business Director of Guarantee Business
R. Sophia Alizsa	: Director of Operational and Networking
Nanang Waskito	: Director of HRM, General Affairs, and Compliance
I. Rusdonobanu	: Director of Finance, Investment and Risk Management

The composition of the Board of Directors as of December 31, 2017, is as follows:

Randi Anto	: President Director
Amin Mas'udi	: Director of Business Guarantee
Wisnuwarman	: Director of Operational and Network
Sulis Usdoko	: Director of HRM, General Affairs, and Compliance
I. Rusdonobanu	: Director of Finance, Investment and Risk Management

APRESIASI

Perum Jamkrindo telah berhasil meraih kinerja yang baik di tengah tantangan ekonomi dan bisnis yang cukup berat. Atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan Perusahaan atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan sehingga Perum Jamkrindo dapat melalui tahun 2017 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atas kearifan, kepercayaan, dan nasihat yang diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh nasabah, mitra bisnis dan regulator di Indonesia, atas dukungan dan kontribusi sepanjang tahun 2017. Kami terus berkomitmen untuk maju mencapai pertumbuhan berkelanjutan demi mewujudkan visi Perusahaan menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

Jakarta, Mei 2018

APPRECIATION

Perum Jamkrindo has achieved good performance amidst considerable economic and business challenges. On behalf of the Board of Directors, we would like to express our appreciation to all employees of the Company for their dedication and hard work which enabled Perum Jamkrindo to successfully faced the challenging year of 2017 with good performance.

We would also like to thank the Board of Commissioners and Shareholders for the wisdom, trust, and advice given. We also sincerely thank all our customers, business partners and regulators in Indonesia for their support and contribution in 2017. We are continuously committed to progress towards sustainable growth in order to realize the Company's vision of becoming a leading Guarantee Company which Supports National Economic Development.

Jakarta, May 2018



Randi Anto
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 Perum Jamkrindo

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jamkrindo tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Mei 2018 | Jakarta, May, 2018

DEWAN PENGAWAS *Board of Supervisors*



Sri Mulyanto

Ketua Dewan Pengawas/Dewan
Pengawas Independen
*Head of Board of Supervisors/
Independent Board of Supervisors*



Dahlan Siamat

Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Independen
*Member of Board of Supervisors/Independent
Board of Supervisors*



Subandriyo

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors



Noor Ida Khomsiyati

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors



Diah Natalisa

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors

Statement of Members of Board of Supervisors and Directors on the Responsibility for the 2017 Annual Report of Perum Jamkrindo

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of Perum Jamkrindo for 2017 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Mei 2018 | Jakarta, May, 2018

DIREKSI

Board of Directors



Randi Anto

Direktur Utama
President Director



Amin Mas'udi

Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Guarantee Business



Kadar Wisnuwarman

Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operational and Network



Sulis Usdoko

Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs, and Compliance



I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment, and Risk Management



The image shows a modern office interior. On a light-colored wooden wall, the company name 'Kreditindo' is displayed in large, blue, three-dimensional letters. Below it, the words 'Kredit Indonesia' are written in smaller, blue, sans-serif capital letters. A white reception desk with a blue base is visible in the foreground. The background wall is made of vertical wooden panels.

Kreditindo
KREDIT INDONESIA

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Informasi Umum tentang Jamkrindo

General Information about Jamkrindo

Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	: Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)
Bentuk dan Status Badan Usaha <i>Form and Status of Business Entity</i>	: Perusahaan Umum (Perum)
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	: 1 Juli 1970 <i>July 1, 1970</i>
Dasar Hukum Perum Jamkrindo <i>Legal Basis of Perum Jamkrindo</i>	: - Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia <i>Government Regulation No. 41 of 2008 on Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia</i>
Dasar Hukum Pelaksanaan Usaha Penjaminan <i>Legal Basis of Guarantee Business</i>	: - Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan - Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang - Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 77 tahun 2009 tentang Penetapan sebagai Perusahaan Penjaminan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.05/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan <i>Law No. 1 of 2016 on Guarantee</i> <i>Government Regulation No. 1 of 2016 on Guarantee Implementing Agency of Warehouse Receipt System</i> <i>The Decree of Minister of Finance (KMK) No. 77 of 2009 on Stipulation as Guarantee Company</i> <i>Regulation of the Financial Services Authority No. 1/POJK.05/ 2017 dated January 11, 2017 on Business Licenses and Institutionalisation of Guarantee Institution</i> <i>Regulation of the Financial Services Authority No. 2/POJK.05 / 2017 About The Operation of Guarantee Business dated January 11, 2017</i> <i>Regulation of the Financial Services Authority No. 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 on good corporate governance for the guarantee institution</i> <i>Financial Services Authority Regulation No. 7/POJK.05/2014 dated 17 April 2014 on Examination of Guarantee Agency</i>
Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	: Penjaminan kredit baik bersifat tunai maupun tidak tunai yang diberikan Bank atau Badan Usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi <i>Cash or non-cash Credit guarantee given to Banks or Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives</i>
Negara Tempat Beroperasi <i>Country of Operation</i>	: Indonesia
Jaringan Usaha <i>Business Network</i>	: 9 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 55 Kantor Cabang, dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 1 Jakarta Special Branch Office, 55 Branch Offices, and 16 Service Unit Offices (KUP) scattered throughout Indonesia</i>
Kepemilikan <i>Ownership</i>	: 100% Negara Republik Indonesia, melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara <i>100% the Republic of Indonesia, through the Government of the Republic of Indonesia/ Ministry of State- Owned Enterprises</i>
Penyertaan Modal Negara <i>State Equity Participation</i>	: Rp7.638.733.365.160 <i>IDR7,638,733,365,160</i>
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	: 1.042 orang <i>1,042 people</i>
Alamat Kantor Pusat <i>Head Office Address</i>	: Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telepon <i>Telephone</i>	: +62 21 6540335
Faksimile <i>Facsimile</i>	: +62 21 6540344, 6540348

Email	:	sekper@jamkrindo.co.id
Website	:	www.jamkrindo.co.id
Media Sosial Social Media	:	Instagram: perum_jamkrindo Facebook: Perum Jamkrindo Twitter: perum_jamkrindo Youtube: Perum Jamkrindo

Riwayat Singkat Jamkrindo

Jamkrindo Brief History

SELAYANG PANDANG SEJARAH PERUM JAMKRINDO

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, atau disebut juga dengan “Perum Jamkrindo” atau “Perusahaan” merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fokus kegiatan usaha pada bidang penjaminan kredit, baik konvensional maupun syariah. Sebagai perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan maupun program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dalam upaya mensejahterakan kehidupan bangsa. Implementasi komitmen tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan konsultasi manajemen berupa pemberian jaminan kredit bersifat tunai maupun non-tunai, yang diberikan oleh bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata dan memudahkan aksesibilitas, Perum Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri serta melakukan perbaikan dan pengembangan pada kualitas layanan.

Jamkrindo didirikan pada pertengahan tahun 1970 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Pada masa itu perkembangan koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

PERUM JAMKRINDO HISTORY AT A GLANCE

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, or also mentioned as “Perum Jamkrindo” or “Company” is a State-Owned Enterprise (SOE) with business activities focusing in credit guarantee, both conventional and Sharia. As an SOE, Perum Jamkrindo is fully committed in implementing and supporting Government policies and programs in national economic and development sectors in order to prosper the life of the nation. The committed implementation is carried out through activities of providing management consultancy support in the form of credit guarantee provision, either Cash and Non-Cash, given by bank or business entity to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (SMEs and Cooperatives). In an effort to improve people’s economy equally and facilitate accessibility, Perum Jamkrindo keeps developing network all over the country and improving and developing the service quality.

Jamkrindo was established in the mid-1970s as a Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK). At that time the development of cooperatives still lags behind compared to state-owned companies and private companies. In its development, LJKK was later changed to Public Corporation Financial Development Cooperative (Perum PKK) through Government Regulation No. 51 of 1981 dated December 23, 1981, which is enhanced by Government Regulation No. 27 of 1985 dated May 31, 1985, concerning Public Corporation Financial Development Cooperative.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, membuat Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup UMKM. Atas usaha tersebut, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat peran Perum PKK melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000 yang sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Terkait dengan perubahan bisnis Perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara tunai kepada UMKM dan Koperasi melalui pola bagi hasil, tetapi berfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKM dan Koperasi, Perum SPU diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah melalui Departemen Keuangan memperkuat dasar hukum pendirian Perusahaan serta perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Melalui regulasi tersebut, Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti aturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan (KMK) No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

Di tahun 2016, Pemerintah meluncurkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penjaminan, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam memayungi dan melembagakan industri penjaminan yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia.

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Kronologi proses perubahan nama Perum Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

The successful implementation of Perum PKK functions and tasks in developing cooperatives through credit guarantee activities makes the Government expand the services reach of Perum PKK to not only be limited to cooperatives, but also to include SMEs. For this effort, the Government issued another policy aiming to strengthen the role of Perum PKK through the issuance of Government Regulation No. 95 of 2000 dated 7 November 2000 which also changed the name of Perum PKK into Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

In 2008, the Government issued Presidential Regulation No. 2 of 2008 dated 26 January 2008 on Guarantee Agency. Regarding changes in Company business which no longer provided cash loan to SMEs and Cooperatives through profit sharing but focused on credit guarantee business of SMEs and Cooperatives, Perum SPU was renamed to be Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) based on Government Regulation No. 41 of 2008 dated 19 May 2008.

As a follow up to the Presidential Regulation implementation, the Government through the Department of Finance strengthened the legal basis of establishment of the Company and other companies with similar business sectors through Minister of Finance Regulation (PMK) No. 222/PMK.010/2008 dated 16 December 2008 as amended by Minister of Finance Regulation No. 99/PMK.010/2011 dated 8 July 2011 on Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company. Through the regulations, Perum Jamkrindo must have a business license as Credit Guarantee Company. Following up the regulation, the Minister of Finance issued a Decree (KMK) No. KEP-77/KM.10/2009 dated 22 April 2009 establishing Perum Jamkrindo's business license as a Credit Guarantee Company.

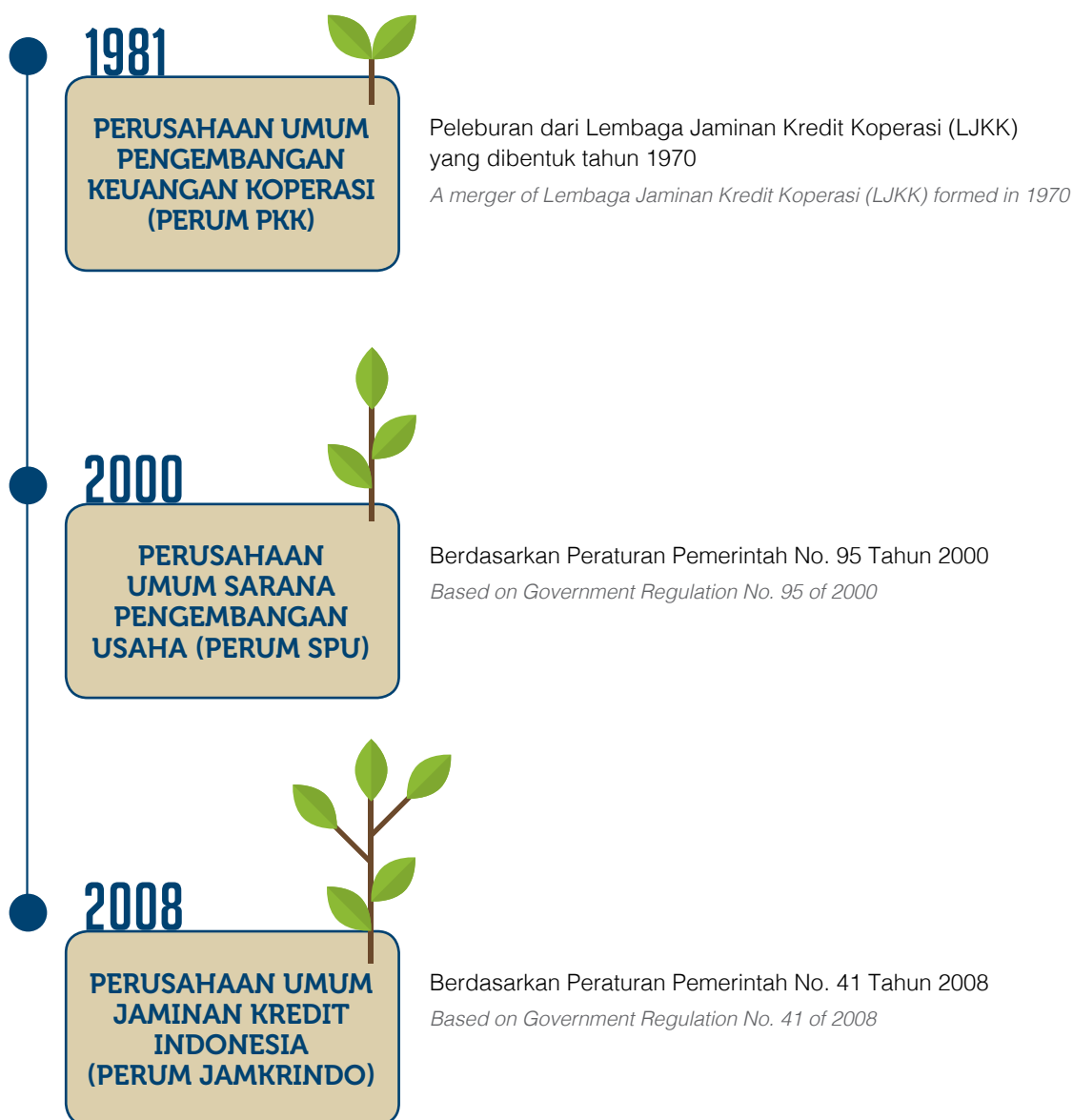
In 2016, the Government issued Law No. 1 of 2016 dated 19 January 2016 on Guarantee, as a form of seriousness of the Government in protecting and instituting guarantee industry which continues to develop in line with the growth of financial services in Indonesia.

CHANGES IN COMPANY NAME

The chronology of changes of Perum Jamkrindo name from its establishment until now as described above is as follows:

1. Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985.
2. Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000.
3. Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) seperti yang dikenal saat ini, melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008.

1. The Company was originally established under the name of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981 which was a merger of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) formed in 1970. The Government Regulation was subsequently refined through Government Regulation No. 27 of 1985.
2. The Company name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No. 95 of 2000.
3. The Company name was changed again, becoming Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) as it is known today, through the issuance of Government Regulation No. 41 of 2008.



Bidang Usaha

Line of Business

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR: PENERIMA JAMINAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang menjadi Anggaran dasar Perusahaan, dalam pasal 6, 7, dan 8 disebutkan bahwa Perusahaan memiliki sifat, maksud, dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.
2. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah, serta Koperasi.

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha untuk mendukung pembiayaan. Berikut disampaikan pelaksanaan kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha yang telah dilakukan.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION: RECIPIENTS OF GUARANTEE

Based on Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesian Credit Guarantee (Jamkrindo) which became the Articles of Association of the Company, in Articles 6, 7, and 8, it is stated that the Company has the following characteristics, purposes, and objectives as follows:

1. Organizing services for public benefit and fostering profits based on the applicable principles of corporate governance.
2. The purposes and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting Government policies and programs in economic and national development sectors, by conducting credit guarantee activities for Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives.

In an effort to achieve these purposes and objectives, the Company may undertake several business activities and business development policies to support financing. The following is the implementation of business activities and business development policies which have been conducted.

Kegiatan Activities	Keterangan Description
Penjaminan kredit baik yang bersifat tunai maupun non-tunai <i>Cash and Non-Cash guarantee</i>	Diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Given by banks or business entities to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives</i>
Penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil <i>Guarantee for lease financing, factoring, consumer financing, and sharing-income financing</i>	Diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Given by financing institutions to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives</i>
Penjaminan pembelian barang secara angsuran <i>Guarantee for purchasing goods through installment</i>	Dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Conducted by Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives</i>
Melakukan Penjaminan Syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai maupun non-tunai <i>Sharia Guarantee for financing both in the form of cash and non-cash</i>	Diberikan bank atau badan usaha syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Given by banks or sharia business entities to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives</i>
Penjaminan atas transaksi kontrak jasa <i>Guarantee for service contract transaction</i>	Dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Conducted by Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives</i>

Kegiatan Activities	Keterangan Description
Kegiatan usaha lainnya <i>Other business activities</i>	Penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan <i>Guarantee for personal loans, consultation services, and management services to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives in accordance with the purposes and objectives of the Company</i>
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, Perusahaan memiliki peluang untuk memperluas kegiatan usaha yang dijalankan dan tidak terbatas pada kegiatan usaha pemberian jasa penjaminan kredit, antara lain: 1. Penjaminan Pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya. 2. Penjaminan Kredit dan/atau Pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL). 3. Penjaminan Penyaluran Uang Pinjaman dengan Jaminan Gadai dan Fidusia. 4. Penjaminan atas Surat Utang. 5. Penjaminan Transaksi Dagang. 6. Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (<i>Surety Bond</i>). 7. Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi. 8. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). 9. Penjaminan <i>Letter of Credit</i> (L/C). 10. Penjaminan Kepabeanan. 11. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan. 12. Penyediaan informasi/<i>database</i> terjamin terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan. 13. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.	As stipulated in Minister of Finance Regulation No. 99/PMK.010/2011 dated 8 July 2011 on Changes of Minister of Finance Regulation No. 222/PMK.010/2008 on Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company, the Company has an opportunity to expand its business activities conducted and not limited to business activities of credit guarantee services provision, such as: 1. Guarantee for Loans distributed by Cooperatives to its members. 2. Credit Guarantee and/or Loans Partnership Program distributed by State-Owned Enterprises for Partnership and Community Development Program (PCDP). 3. Guarantee for Loans Disbursement with Lien and Fiduciary Guarantees. 4. Guarantee for Debt Securities. 5. Guarantee for Trade/Commerce Transactions. 6. Guarantee for Goods and/or Services Procurement (<i>Surety Bond</i>). 7. Counter Bank Credit Guarantee. 8. Guarantee for Domestic Letter of Credit (SKBDN). 9. Guarantee for Letter of Credit (L/C). 10. Guarantee for Customs. 11. Management Consulting Service related to Guarantee Business Activities. 12. Provision of information/<i>database</i> related to Guarantee Business Activities. 13. Other Guarantee after obtaining approval from the Minister.

Produk Usaha Penjaminan

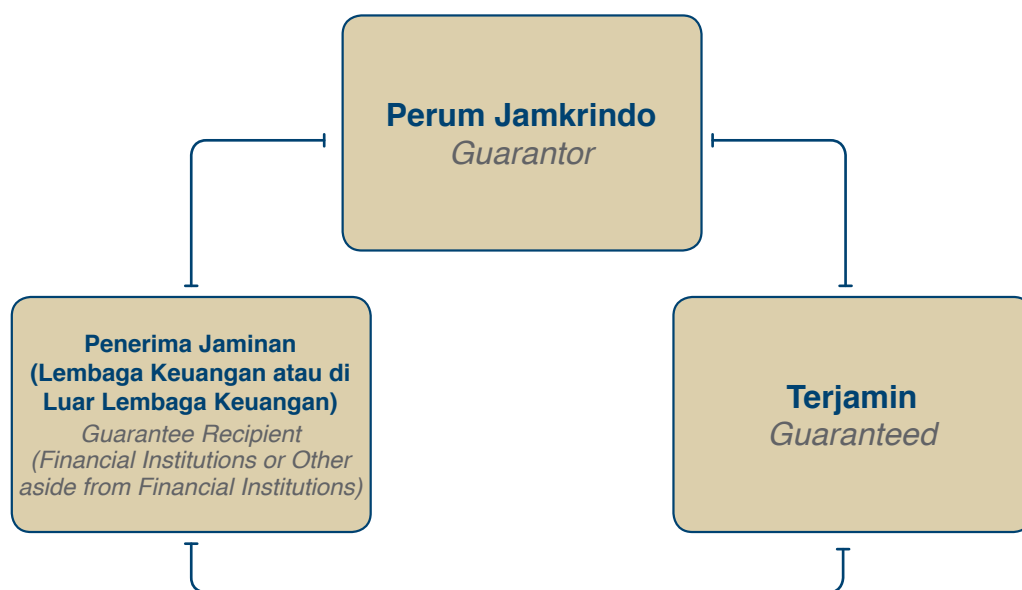
Guarantee Business Products

Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

Credit Guarantee is a guarantee provision activity upon fulfilling financial obligations of the Credit Recipients (Guaranteed) to the Guarantee Recipients. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, which are the credit provider business entity called Guarantee Recipients, credit debtor called Guaranteed, and Credit Guarantee Company known as Guarantor.

Proses Penjaminan Kredit

Credit Guarantee Process



Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambil alihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

The basic principle of Credit Guarantee is the acquisition of the failure risk of the Guaranteed in meeting its financial obligations to the Guarantee Recipient, but does not eliminate the financial obligations of the Guaranteed to the Guarantee Recipient until the Guarantee Recipient declares that the loan is settled.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

Credit Guarantee is required by the Guarantee Recipients at the time the loan application from the Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Recipient, but it has not met the banking credit administration requirements, especially regarding the fulfillment of collateral adequacy (*unbankable*).

Jenis-jenis Produk Usaha Penjaminan antara lain sebagai berikut:

Types of Guarantee Business Products, among others, are as follows:

Kegiatan Activities	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Umum <i>General Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus) <i>Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed for additional Working Capital and/or Investment in order to increase and develop the business of the Guaranteed (Guarantee process is conducted on a case-by-case basis).</i>
Penjaminan Kredit Mikro <i>Micro Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha mikro dan Kecil, untuk keperluan modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah <i>plafond</i> kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan (proses penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat) <i>Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed, Micro and Small Entrepreneurs, for additional Working Capital and/or Investment in order to increase and develop the business of the Guaranteed, with total credit or financing platforms adjusted in accordance with the applicable micro credit provisions of the Guarantee Recipients (guarantee process is conducted in a Conditional Automatic manner).</i>
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi <i>Counter Bank Credit Guarantee</i>	Pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin (<i>Principle</i>). <i>Provision of guarantee in the form of counter guarantee over Bank Guarantee's facilities issued by the Guarantee Recipients to the Guaranteed (Principle).</i>
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa <i>Construction Credit Guarantee & Procurement of Goods/Services</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan <i>Bowheer</i> (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. <i>Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed for additional Working Capital of construction services and procurement of goods/services in accordance with the work contract between the Guaranteed and Bowheer (project owner), in which the sources of repayment are from the State Budget/Regional Budget/SOE or private sectors.</i>
Penjaminan Distribusi Barang <i>Goods Distribution Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin yang mewajibkan Terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu. <i>Guarantee over goods distribution credit from the Guarantee Recipients (goods producers) to the Guaranteed which obliged the Guaranteed to settle the payment within a specific time period.</i>
Penjaminan Kredit Multiguna <i>Multipurpose Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, perorangan (CPNS, PNS, pegawai tetap suatu Perusahaan Swasta/instansi Pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga <i>channeling</i> , yang sumber pengembaliannya berasal dari gaji tetap Terjamin dengan cara memotong gaji tetap Terjamin (Proses Penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat). <i>Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed, individuals (candidate of Civil Servants, Civil Servants, permanent employees of Private Companies/Government Institutions), either the distribution is direct or through a channeling institution where the source of repayment comes from the fixed salary of the Guaranteed (Guarantee Process is conducted in a Conditional Automatic manner).</i>
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>Guarantee for Micro Credit Program (KUR)</i>	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKM dan Koperasi untuk usaha produktif dan layak, namun belum <i>bankable</i> . Penjaminan Perum Jamkrindo untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan <i>plafond</i> sampai dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Mikro sedangkan untuk <i>plafond</i> kredit lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Ritel. <i>Credit/Financing for working capital and/or investment to SMEs & Cooperatives of feasible and productive business but are not yet bankable. Perum Jamkrindo Guarantee for Micro Credit Program (KUR) with platform up to IDR20,000,000 (twenty million rupiah) is included in Micro KUR category, while for credit platform of more than IDR20,000,000 (twenty million rupiah) up to IDR500,000,000 (five hundred million rupiah) is included in Retail KUR category.</i>

Kegiatan Activities	Keterangan Description
<i>Surety Bond</i>	Suatu perjanjian 3 pihak antara <i>Surety</i> (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada <i>Principal</i> (Pihak Kedua) secara bersama-sama berjanji kepada <i>Obligee</i> (Pihak Ketiga) bahwa apabila <i>Principal</i> oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i>, maka <i>Surety</i> akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban <i>Principal</i> tersebut. <i>A three-party agreement among the Surety (First Party) on a trust basis to the Principal (Second Party) in which both parties promise to the Obligee (Third Party) that should the Principal by any reason neglect or fail to perform the duty as stipulated in the agreement with the Obligee, the Surety will be responsible to the Obligee for fulfilling the Principal's obligations.</i>
Penjaminan Kredit BPR/BPRS <i>BPR/BPRS Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan dan/atau badan usaha lainnya kepada BPR. Penjaminan Kredit BPR/BPRS. <i>Guarantee over credit distributed by banking and/or other business entities to BPR. BPR/BPRS Credit Guarantee.</i>
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP <i>KPR Sejahtera FLPP Guarantee</i>	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. <i>Guarantee activities on housing loan distribution, which is a coordination program between the Bank and Ministry of Public Works and Public Housing of Republic of Indonesia with low interest, fixed light installment, and long period of credit for low-income communities.</i>
<i>Customs Bond</i>	Perikatan penjaminan antara tiga pihak, pihak pertama (Penjamin/<i>Customs Company</i>) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak kedua (Terjamin/<i>Principal</i>) terhadap pihak ketiga (Penerima Jaminan/<i>Obligee</i>). <i>Guarantee engagement among three parties; the First Party (Guarantor/Customs Company) is engaged to fulfill obligations arising from the Second Party (Guaranteed/Principal) to the Third Party (Guarantee Recipient/Obligee).</i>
Penjaminan Keagenan Kargo <i>Cargo Agency Guarantee</i>	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/<i>Obligee</i> (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/<i>Principal</i> (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/<i>Obligee</i>. <i>Guarantee given to Guarantee Recipient/Obligee (Transportation Service Provider Company) on the obligation of the Guaranteed/Principal (Cargo Agency) to pay cargo transportation cost to the Guarantee Recipient/Obligee.</i>
Penjaminan Invoice Financing <i>Invoice Financing Guarantee</i>	Adalah fasilitas penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga Keuangan kepada <i>Obligee</i> terkait dengan tagihan <i>Supplier</i> dari <i>Obligee</i>. Penjaminan Keagenan Kargo merupakan salah satu bentuk <i>Payment Bond</i> atau Jaminan Pembayaran lainnya. <i>Guarantee facility over financing given by Financial Institutions to the Obligee in relation with Supplier bills from the Obligee. Cargo Agency Guarantee is a form of Payment Bond or other Financing Guarantee.</i>
Penjaminan Pembiayaan Kendaraan Bermotor <i>Vehicle Financing Guarantee</i>	Penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk kredit kendaraan bermotor. <i>Guarantee over financing given by Financial Institutions for vehicle credit.</i>
Penjaminan Sistem Resi Gudang <i>Warehouse Receipt System Guarantee</i>	Kegiatan pemberian jaminan yang melindungi hak pemegang Resi Gudang dan penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang <i>The activities of providing guarantee which protect the right of the Warehouse Receipt fundholder or the recipient of Guarantee Rights in the event of failure, inability, and or bankruptcy of Warehouse Manager in carrying out its obligations and maintaining the stability and integrity of the Warehouse Receipt System</i>
Penjaminan Fintech <i>Fintech Guarantee</i>	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh <i>Lender</i> melalui penyelenggara (<i>peer to peer lending</i>) kepada <i>borrower</i> <i>Guarantee for IT-based money lending services delivered by Lender through peer to peer lending to the borrower</i>
Penjaminan Pembiayaan KPR <i>KPR Guarantee</i>	Penjaminan atas pembiayaan perumahan yang disalurkan oleh lembaga keuangan (penerima jaminan) kepada terjamin. <i>Guarantees on housing finance channeled by financial institutions (guarantee recipients) to the guaranteed.</i>

Kompetensi Inti

Core Competence

Kompetensi inti berpotensi besar dalam memperkuat *competitive advantage*. Namun demikian, *competitive advantage* yang kuat masih dapat terhalangi oleh faktor-faktor dinamis dalam persaingan pasar, seperti kurangnya kesetiaan pelanggan dan tidak adanya *customer relationship*. Saat ini dan masa yang akan datang, Perusahaan memiliki beberapa tantangan strategis berkaitan dengan faktor-faktor dinamika persaingan pasar yang terkait dengan potensi *moral hazard* pada *customer*.

Core competence has big potential in strengthening the competitive advantage. However, strong competitive advantage may still be obstructed by dynamic factors in the market competition, such as lack of customers' loyalty and lack of customer relationship. In the present and the future, the Company has several strategic challenges related to the dynamic factors of market competition regarding the moral hazard potential on customers.

Kriteria Identifikasi <i>Identification Criteria</i>	<i>Accessibility</i>	Kemampuan mengakses berbagai pasar potensial <i>Ability to access various potential markets</i>
	Unik/Langka <i>Unique/Rare</i>	Peniruan oleh kompetitor sulit dilakukan <i>Imitation by competitors is difficult to do</i>
	<i>Value Creation</i>	Memberi kontribusi besar terhadap manfaat produk, terutama dari perspektif pelanggan <i>Giving big contribution to the product benefits, particularly from the customers' perspective</i>
Risiko <i>Risk</i>	• Peluang untuk pertumbuhan terabaikan • Re-organisasi perusahaan menjadi unit-unit bisnis yang lebih kecil dapat mengakibatkan kompetensi terpecah dan lemah • Kurangnya sensitifitas terhadap tumbuhnya peluang lain yang terkait • Investasi dapat menjadi kurang optimal • Terlalu fokus kepada kinerja periodik, yang sangat dipengaruhi oleh harga jual dan kompetisi pasar. Akibatnya, <i>core competency</i> kurang mendapatkan perhatian	
Kendala <i>Constraints</i>	• Kerugian akibat melemahnya <i>core competency</i> hanya sebagian kecil saja yang dapat dihitung di muka • Tingginya pertumbuhan pasar menimbulkan kinerja cukup bagus yang dapat mengaburkan potensi yang lebih besar jika <i>core competency</i> diperhatikan sepenuhnya	

Sesuai kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam bidang penjaminan kredit UMKM dan Koperasi.
 - a. Kecepatan pembayaran klaim penjaminan kredit.
 - b. Melayani produk sesuai dengan kebutuhan mitra kerja (*customized product*).
2. Sistem informasi yang reintegrasi secara internal maupun eksternal dengan mitra kerja.
3. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari Pemerintah.

Based on the identification criteria above and the improvement result of the Company's business model, the Company's core competence is as follows:

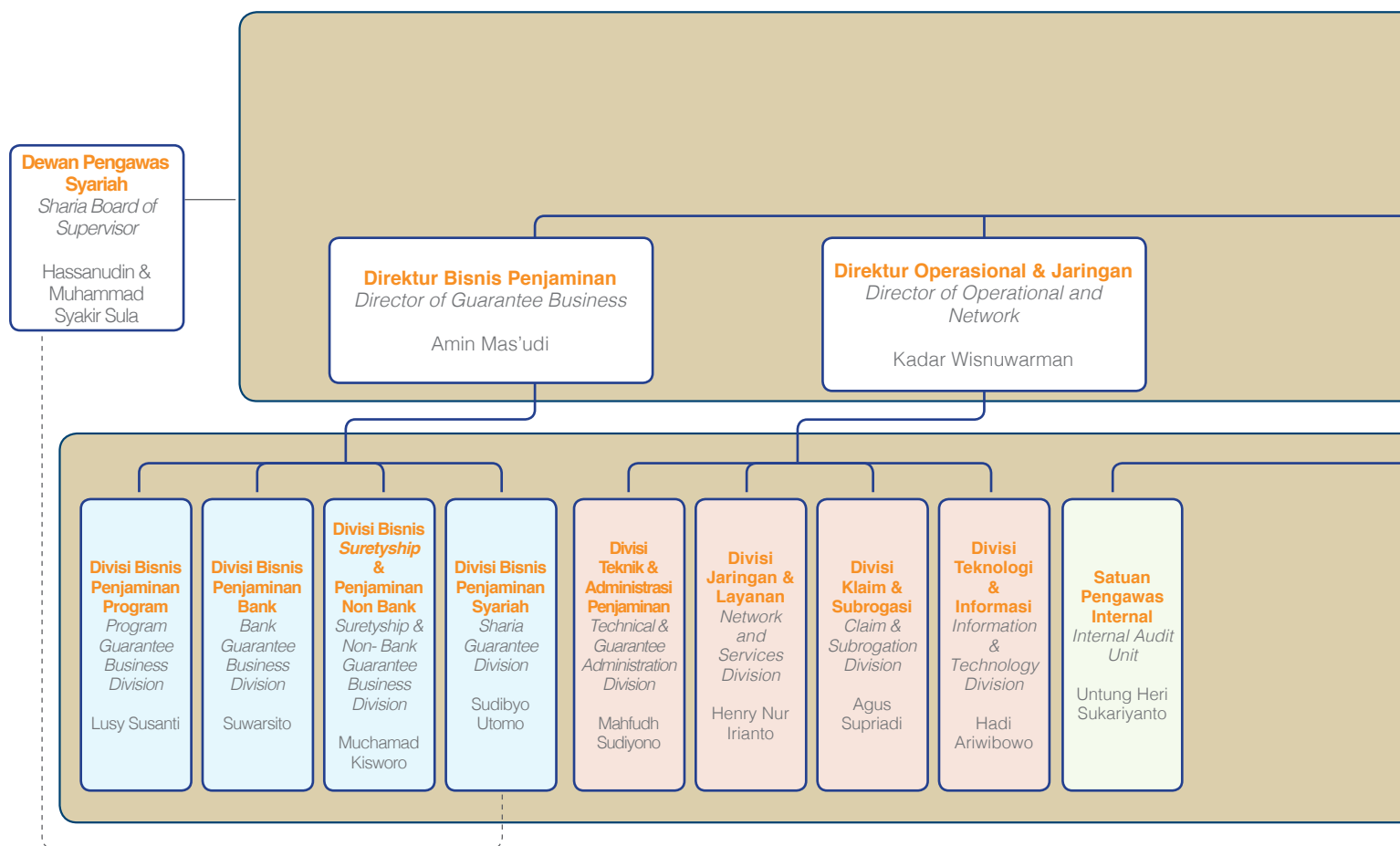
1. Possessing good skills and reputation in credit guarantee sector for SMEs & Cooperatives.
 - a. Fast claim payment for credit guarantee.
 - b. Providing products in accordance with business partner's needs (*customized product*).
2. An information system that is reintegrated internally and externally to the business partners.
3. Possessing big capital and big support from the Government.

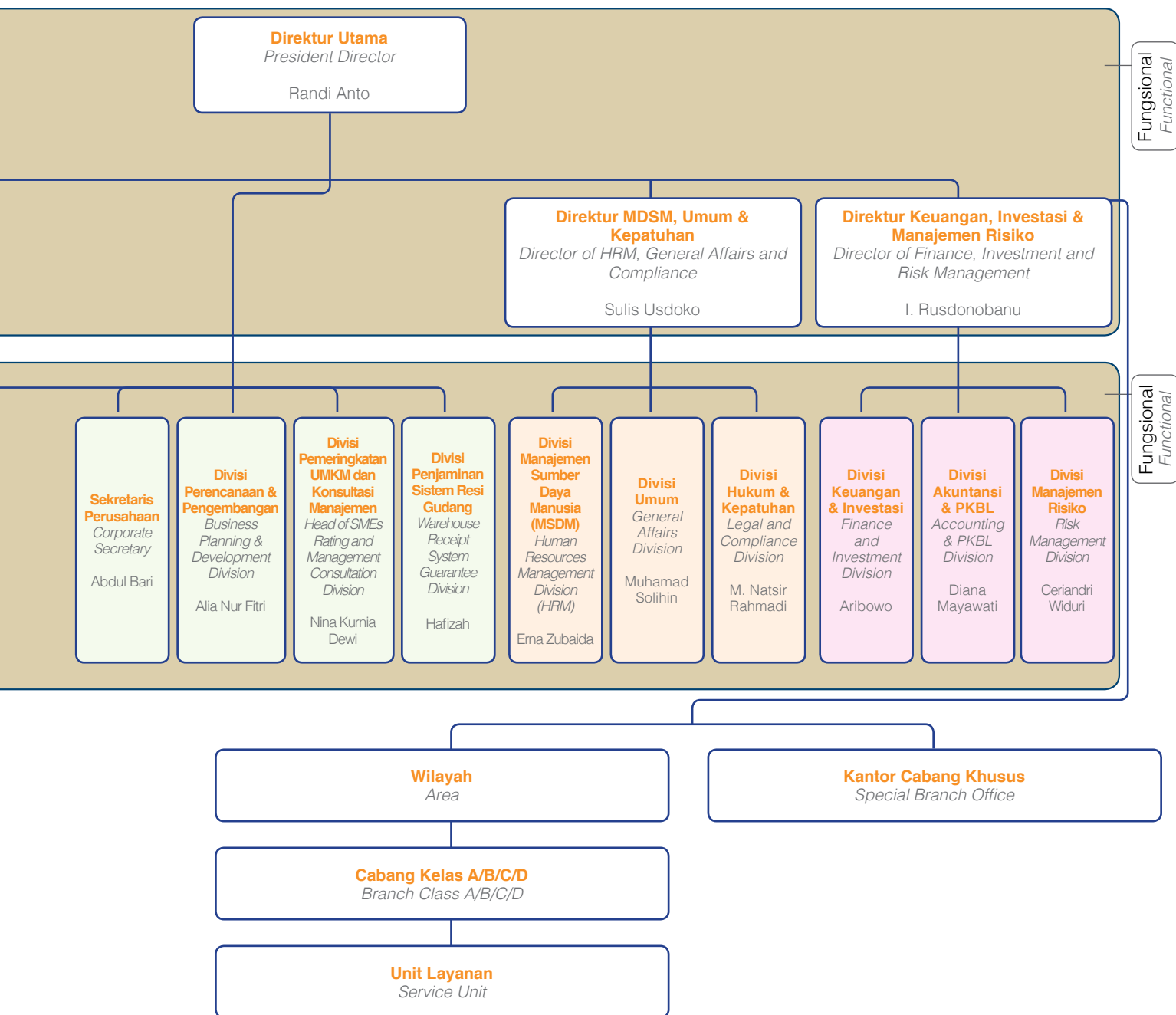
Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 36/Kep-Dir/IV/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Struktur Organisasi.

The Company's Organizational Structure has been validated by the Board of Directors' Decree No. 36/Kep-Dir/IV/2016 dated 20 April 2016 on Organizational Structure.





Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Culture

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No. S-34/MBU/2014 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka Dewan Pengawas dan Direksi menetapkan Misi, dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In order to guarantee professional business conduct based on Validation Letter from the Ministry of SOE No. S-34/MBU/2014 on Company Long Term Plan (RJPP), the Board of Supervisors and Directors establish the Vision, Mission, and Corporate Culture as follows:

Visi Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.	Vision To become a Leading Guarantee Company that Supports the National Economic Development.
Misi Visi Perusahaan dijabarkan ke dalam misi-misi yang merupakan "Tridharma Jamkrindo" sebagai berikut:	Mission The Company's vision is described into missions and is named "Tridharma Jamkrindo" (Jamkrindo Three 'Dharma') which contain the followings:
Dharma Pertama Melakukan kegiatan penjaminan bagi pengembangan bisnis UMKM dan Koperasi.	First 'Dharma' Conducting guarantee activities for business development of SMEs and Cooperatives.
Dharma Kedua Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas.	Second 'Dharma' Providing wider and more qualified services.
Dharma Ketiga Memberikan manfaat bagi <i>stakeholders</i> sesuai prinsip bisnis yang sehat.	Third Dharma Providing interests to the stakeholders in accordance with sound business principles.

KREDO PERUSAHAAN

Kredo perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir, sebagai berikut:

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan.
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan.
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan.
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasan pelanggan.

CORPORATE CREDO

Perum Jamkrindo's Corporate Credo consists of 5 (five) points as follows:

1. Trustworthy in conducting guarantee business.
2. Responsive to business environment changes.
3. Excellent and Professional service.
4. Healthy corporate governance.
5. Reputable in providing customer satisfaction.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "TRUST".

CORPORATE CULTURE

Perum Jamkrindo's Corporate Culture comprises of 5 (five) points of cultural values held by the Company, called "TRUST" culture.

Terpercaya <i>Trust</i>	Responsif <i>Responsive</i>	Unggul <i>Excellent</i>	Sehat <i>Healthy</i>	Terkemuka <i>Reputable</i>
Bekerja jujur dengan integritas tinggi <i>Work honestly with high integrity</i>	Tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap <i>stakeholder</i> <i>Responsive to meet the needs of business partners and all stakeholders</i>	Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan <i>Always improve professionalism to achieve added value for the company</i>	Selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat <i>Always work diligently to support healthy corporate governance</i>	Selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan <i>Always in the forefront in providing services and performances to become the leader in guarantee industry</i>

Substansi yang terkandung di dalam visi, misi, kredo, dan budaya Perusahaan telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perusahaan.

Substances contained in the Company's vision, mission, credo, and corporate culture have been acknowledged and approved by the Board of Supervisors and President Director of the Company.

Makna Branding Logo

Meaning of Branding Logo



Logo Perusahaan terdiri dari akronim nama Perusahaan dan ikon grafis berbentuk bujur sangkar.

Akronim Perusahaan yaitu "JAMKRINDO" merupakan singkatan dari Jaminan Kredit Indonesia. Akronim ini terucap sangat familiar, dengan tujuan membangun "*Brand Awareness*" dan identitas melalui pengucapannya, yang secara psikologis akan terekam dalam otak manusia dan memungkinkan adanya pengucapan berulang-ulang.

Ikon grafis pada logo membentuk konfigurasi huruf "J" yang tegas dan bersudut, yang melambangkan ketegasan Perusahaan, orientasi yang fokus pada tujuan, serta konsistensi pada visi. Huruf "J" tersebut membentuk sebuah kunci berwarna putih, yang bermakna dasar dari motto Perusahaan yaitu "kunci Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) menuju sukses". Huruf "J" pada logo terbentuk dari 3 (tiga) garis tegas berwarna putih, yang melambangkan kesatuan dari inti pelayanan Perusahaan, yaitu Jaminan terhadap UMKM.

Logo Perusahaan dibangun dari 2 (dua) warna, yaitu Biru dan Putih. Warna Biru melambangkan konsentrasi, ketenangan, bekerjasama, dapat menerima segala masukan, peka, cerdas dan bersatu; hal ini sejalan dengan bidang usaha Perusahaan yaitu pelayanan dan kemitraan. Sementara warna Putih merupakan lambang kesucian, kebersihan, dan ketepatan dari Perusahaan untuk mewujudkan visinya. Komposisi kedua warna tersebut memberikan nuansa ketenangan dan kematangan jasa pelayanan yang terbentuk karena keteguhan memegang budaya Perusahaan.

Pemilihan huruf yang tegas, jelas, kokoh, namun sederhana dan dinamis didasari pada visi Perusahaan, yang melambangkan kepemimpinan dengan ketangguhan dan ketegasan. Jenis *bold* atau cetak tebal bertujuan memperkuat makna simbolisasi nama Perusahaan dan konotasi yang relevan terhadap *core* bisnis Perusahaan.

The Company logo consists of acronyms of the Company name and square-shaped graphic icons.

The Company's acronym, "JAMKRINDO", is an abbreviation of Jaminan Kredit Indonesia (Indonesia Credit Guarantee). The acronym is very familiar when pronounced, aiming to build "Brand Awareness" and identity through its pronunciation, which psychologically will be recorded in the human brain and allow for repeated pronunciation.

The graphic icon on the logo forms a firm and angular "J" configuration, which represents the Company's firmness, goal-focused orientation, and consistency in vision. The letter "J" forms a white-colored key, meaning the basis of the Company's motto "the key of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (SMEs) to success". The letter "J" in the logo is made up of 3 (three) firm white lines, symbolizing the unity of the core of the Company's service, which is Guarantee towards SMEs.

The Company logo is built from 2 (two) colors, which are Blue and White. Blue color symbolizes concentration, calmness, cooperation, able to receive all inputs, sensitive, intelligent and united; this is in line with the Company's business sectors, which are service and partnership. While the White color is a symbol of purity, cleanliness, and accuracy of the Company to realize its vision. The composition of these two colors gives a sense of tranquillity and maturity of services formed due to the firmness of holding the Company culture.

The selection of strong, clear, solid, yet simple and dynamic letters is based on the Company's vision, which symbolizes leadership with toughness and firmness. The bold type aims to reinforce the symbolic meaning of the Company's name and the connotations relevant to the Company's core business.

Profil Dewan Pengawas

Board of Supervisors Profile



Subandriyo

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors

Noor Ida Khomsiyati

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors

Sri Mulyanto

Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Independen
Head of Board of Supervisors/Independent Board of Supervisors

Diah Natalisa

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors

Dahlan Siamat

Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Independen
Member of Board of Supervisors/Independent Board of Supervisors



Sri Mulyanto

Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Independen
Head of Board of Supervisors /
Independent Board of Supervisors

Periode Jabatan: 27 Oktober 2017 –
26 Oktober 2022, Periode Pertama
Period of Office: 27 October 2017 –
26 October 2022, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 59 tahun
Kelahiran Klaten, 8 Oktober 1958

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo

Jabatan Ketua Dewan Pengawas diemban sejak 27 Oktober 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik modal Perum Jamkrindo No. SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Ketua Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

(S2) Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (1993); (S1) Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983).

Keahlian

Ekonomi

Riwayat Profesi

Direktur Umum dan SDM PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Komisaris PT Antam (2011-2012), Komisaris PT Jasa Raharja (2008-2012), Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III, Kementerian BUMN (2010), Asisten Deputi Urusan Usaha Asuransi, Kementerian BUMN (2006), Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Konstruksi, Kementerian BUMN (2002).

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Sri Mulyanto tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain/lembaga.

Personal Data

Indonesian citizen.
59 years old.
Born in Klaten, 8 October 1958

Domiciled in

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

History of Appointment into the Board of Supervisor of Perum Jamkrindo

The position of Head of Board of Supervisors has been carried out since 27 October 2017 through the Decree of the Minister of State Owned Enterprises as the Owner of Perum Jamkrindo No. SK-233/MBU/10/2017 dated October 27, 2017, regarding the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. This position as a Head of the Board of Supervisors is the first period.

Education

Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, United States of America (1993); (S1) Bachelor of Economics Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983).

Expertise

Economics

Professional History

Director of General Affairs and Human Resources of PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Commissioner of PT Antam (2011-2012), Commissioner of PT Jasa Raharja (2008-2012), Assistant Deputy of Service Business III, Ministry of SOE (2010), Assistant Deputy Affairs Insurance Business, Ministry of SOEs (2006), Assistant Deputy of Construction Service Business Affairs, Ministry of SOEs (2002).

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Sri Mulyanto does not have concurrent position on other companies/institution.



Dahlan Siamat

Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Independen
Member of Board of Supervisors /
Independent Board of Supervisors

Periode Jabatan: 28 Juni 2013 –
27 Juni 2018, Periode Pertama
Period of Office: 28 June 2013 –
27 June 2018, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 63 tahun
Kelahiran Atapange, 21 April 1954

Domisili

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo

Jabatan Anggota Dewan Pengawas pertama kali diemban pada tanggal 28 Juni 2013. Pada tanggal 3 Mei 2017, Dahlan Siamat kembali diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas sekaligus sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017. Jabatan Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

(S2) Magister Manajemen Keuangan, STIE IPWI, Jakarta (1999); Postgraduate Diploma in International Banking and Financial Studies, Heriot-Watt University, Edinburg, Scotland, UK (1986); (S1) Sarjana Muda Akuntansi, Universitas Jayabaya, Jakarta (1978).

Keahlian

Manajemen Keuangan

Riwayat Profesi

Direktur – Direktorat Pembiayaan Syariah, Ditjen Pengelolaan Utang (2006-2014), Kepala Subdirektorat – Subdirektorat Pengelolaan Transaksi, Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara, Ditjen Perbendaharaan (2004-2006), Kepala Bidang – Bidang Perencanaan dan Kebijakan, Pusat Manajemen Obligasi Negara (2002-2004), Kepala Subbidang – Subbidang Analisis Pasar Keuangan, Pusat Manajemen Obligasi Negara (2001-2002), Kepala Seksi – Seksi Kelembagaan Modal Ventura, Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (1993-2000), Kepala Seksi – Seksi Pasar Uang dan Pasar Modal Direktorat Lembaga Keuangan dan Akuntansi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (1990-1993), Pelaksana – Seksi Bank Asing dan BPD, Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri (1987-1989), Pelaksana – Seksi Bank Swasta Nasional, Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri (1980-1987), Pelaksana – Bagian Pengembangan Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan (1978-1979) anggota dewan Pengawas.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Dahlan Siamat tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain/ lembaga

Pengalaman Organisasi

Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional MUI (2012); wakil Ketua Bidang Pengembangan Moneter, Fiskal dan Publik Islami pada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (2012); Anggota Dewan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) (2012); Anggota Finance and Treasury Association (FTA) Australia (2005).

Personal Data

Indonesian citizen.
63 years old.
Born in Atapange, 21 April 1954.

Domiciled in

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

History of Appointment into the Board of Supervisor of Perum Jamkrindo

The position of Member of Board of Supervisor was first assumed on June 28, 2013. On May 3, 2017, Dahlan Siamat was again appointed as a Member of the Board of Supervisors as well as a Member of the Independent Supervisory Board through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-88/MBU/05/2017 dated May 3, 2017. This position as a Member of Board of Supervisor is the first period.

Education

Master in Financial Management, STIE IPWI, Jakarta (1999); Postgraduate Diploma in International Banking and Financial Studies, Heriot-Watt University, Edinburg, Scotland, UK (1986); Bachelor of Accounting, Jayabaya University, Jakarta (1978).

Expertise

Financial Management

Professional History

Director - Directorate of Sharia Financing, Directorate General of Debt Management (2006-2014), Head of Sub Directorate of Transaction Management, Directorate of Government Debt Management, Directorate General of Treasury (2004-2006), Head of Planning and Policy Division, Central Government Bond Management (2002-2004), Head of Sub-Sectors of Financial Market Analysis, State Bond Management Center (2001-2002), Head of Venture Capital Institutional Section, Directorate of Banking and Financing Business, Directorate General of Financial Institutions (1993-2000), Head of Money Market Section and Capital Market Directorate of Financial Institutions and Accounting, Directorate General of Financial Institutions (1990-1993), Executives - Section of Foreign Banks and BPD, Directorate of Financial Institutions, Directorate General of Domestic Monetary (1987-1989), Executives - National Private Bank Section, Directorate of Financial Institutions, Directorate General of Domestic Monetary (1980-1987), Executor - Development Division of Employment Bureau, Secretariat General of the Ministry of Finance (1978-1979).

Concurrent Position on Other Companies/Institutions Director -

Dahlan Siamat does not have concurrent position on other companies/ institution

Organizational Experience Plenary

Members of the National Sharia Board MUI (2012); Deputy Chairman of Monetary, Fiscal and Islamic Public Sector Development in Sharia Economic Community (MES) (2012); Member of the Board of Trustees of the Association of Islamic Economists (IAEI) (2012); Member of the Finance and Treasury Association (FTA) of Australia (2005).



Subandriyo
Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors

Periode Jabatan: 31 Desember 2013 –
30 Desember 2018, Periode Pertama
*Period of Office: 31 December 2013 –
30 December 2018, First Period*

Data Pribadi:

Warga negara Indonesia
Usia 62 tahun
Kelahiran Demak, 11 Juni 1955

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan

(S1) Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (1981)

Keahlian

Manajemen dan Pertanian

Riwayat Profesi

- PT Jagadtara Unggul kreasi.
2011 - Sekarang : Komisaris Utama
2008 - 2011 : Direktur Utama
- PT Aulia Sakti Internasional
2008 - sekarang : Komisaris utama
- PT Kogas Driyap Konsultan
2010 - Sekarang : Komisaris
1991 - 1997 : Direktur Utama
- Kampsax International A/S, Denmark.
1986 - 1990 : Marketing Manager

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 31 Desember 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode ke-1. Sebelum pengangkatannya di tahun 2013, Subandriyo belum pernah menjabat pada jajaran Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Komisaris PT Jagadtara Unggul Kreasi (2011-sekarang);
Komisaris PT Aulia Sakti Internasional (2010-sekarang); dan
Komisaris PT Kogas Driyap Konsultan (2010-sekarang);

Personal Data

Indonesian citizen.
62 years old.
Born in Demak, 11 June 1955.

Domiciled in

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Education

Graduated on Agriculture faculty, Gadjah Mada University.

Expertise

Management and Agriculture.

Professional History

- PT Jagadtara Unggul kreasi.
2011 - Present: President Commissioner
2008 - 2011 : President Director
- PT Aulia Sakti Internasional
2008 - Present : President Commissioner
- PT Kogas Driyap Konsultan
2010 - Present : Commissioner
1991 - 1997 : President Director
- Kampsax International A/S, Denmark.
1986 - 1990 : Marketing Manager

History of Appointment into the Board of Supervisor of Perum Jamkrindo

The position of Board Member of Supervisor has been carried out since December 31, 2013, through the Decree of State Minister of SOEs as Owner of Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 dated December 31, 2013, on the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. The position of a member of the Board of Supervisors is the 1st period. Prior to his appointment in 2013, Subandriyo had never served on the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Commissioner PT Jagadtara Unggul Kreasi (2011-present);
Commissioner PT Aulia Sakti Internasional (2010-present); and
Commissioner PT Kogas Driyap Konsultan (2010-present);



Noor Ida Khomsiyati

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors

Periode Jabatan: 12 April 2016 –
11 April 2021, Periode Pertama
Period of Office: 12 April 2016 –
11 April 2021, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 46 tahun
Kelahiran Pati, 8 Mei 1971

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 12 April 2016 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

(S2) Magister jurusan Manajemen SDM Universitas Bhayangkara (2006); (S1) Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1995).

Keahlian

Hukum dan Manajemen SDM.

Riwayat Profesi

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014-sekarang); Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I Kementerian BUMN (2012-2014); Kepala Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II C Kementerian BUMN (2010-2012); Kepala Subbagian Pelayanan Hukum Kementerian BUMN (2006-2010).

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014-sekarang).

Personal Data

Indonesian citizen.
46 years old.
Born in Pati, 8 May 1971.

Domiciled in

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

History of Appointment into the Board of Supervisor of Perum Jamkrindo

The position of a Member of Board of Supervisors has been carried out since 12 April 2016 through Decree of State Minister of State Owned Enterprises as Owner of Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 dated April 12, 2016, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position of a Member of the Board of Supervisors is the first period.

Education

Master of Human Resources Management, Universitas Bhayangkara (2006); Bachelor of Law, Universitas Diponegoro Semarang (1995).

Expertise

Legal and Human Resource Management.

Professional History

Head of Legal Aid Bureau of the Secretariat of the Ministry of SOEs (2014-present); Head of Service and Legal Aid Unit I Ministry of SOEs (2012-2014); Head of Legal Services and Aid II C Ministry of SOEs (2010-2012); Head of Legal Services Sub Department of SOEs (2006-2010).

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Head of Legal Aid Bureau of the Secretariat of the Ministry of SOEs (2014-present).



Diah Natalisa

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors

Periode Jabatan: 3 Mei 2017 –
2 Mei 2022, Periode Pertama
Period of Office: 3 May 2017 –
2 May 2022, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun
Kelahiran Palembang, 15 November 1963

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 3 Mei 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

Profesor dan (S3) Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga (1999); Magister Manajemen, University of Kentucky (1992); (S1) jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya (1987).

Keahlian

Manajemen dan ilmu Ekonomi.

Riwayat Profesi

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB (2016-sekarang), Koordinator KOPERTIS Wilayah II Kemdikbud RI (2008-2016), Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB (2016-sekarang).

Personal Data

Indonesian citizen.
54 years old.
Born in Palembang, 15 November 1963.

Domiciled in

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

History of Appointment into the Board of Supervisor of Perum Jamkrindo

The position of a Member of Board of Supervisors has been carried out since 3 May 2017 through Decree of State Minister of State Owned Enterprises as Owner of Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 dated May 3, 2017, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position of a Member of the Board of Supervisors is the first period.

Education

Professor and Doctor in Economics, Airlangga University (1999); Master of Management, University of Kentucky (1992); Bachelor of Management, Sriwijaya University (1987).

Expertise

Management and Economics.

Professional History

Deputy Minister of Public Service Ministry of PANRB (2016-present), Coordinator KOPERTIS Region II Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia (2008-2016), Head of Master of Management Program in Sriwijaya University.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Deputy Minister of Public Service Ministry of PANRB (2016-present).

Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Board of Supervisors Profile



Hasanudin

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Board of Supervisors

Periode Jabatan: 1 Juli 2016 - 30 Juni 2019
Period of Office: 1 July 2016 - 30 June 2019

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 72 tahun
Kelahiran Majalengka, 18 Juli 1945

Domisili

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo

Jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 2006, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Pendidikan

(S3) Doktor bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994);
(S2) Magister bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989);
(S1) Sarjana jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974).

Keahlian

Asuransi Syariah.

Riwayat Profesi

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2010-sekarang);
Anggota Dewan Syariah Nasional MUI (2000-sekarang); Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Niaga Syariah (1998-sekarang); Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria Syariah (1998-sekarang); Guru Besar Tetap Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-sekarang).

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2010-sekarang);
Anggota Dewan Syariah Nasional MUI (2000-sekarang); Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Niaga Syariah (1998-sekarang); Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria Syariah (1998-sekarang).

Personal Data

Indonesian citizen.
72 years old.
Born in Majalengka, 18 July 1945.

Domiciled in

South Tangerang, Banten, Indonesia.

History of Appointment into the Sharia Board of Supervisor of Perum Jamkrindo

The position of a Chairman of Sharia Board of Supervisors has been carried out since 2006 and re-appointed in 2016 through the Decree of the Board of Directors No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016.

Education

Doctorate in Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994); Master of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989); Bachelor of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974).

Expertise

Sharia Insurance.

Professional History

Chairman of Fatwa Commission, Indonesia Ulama Council (MUI) (2010-present); Member of National Sharia Board MUI (2000-present); Member of DPS Bank Niaga Sharia (1998-present); Chairman of DPS Bank Victoria Sharia (1998-present); Full-time Professor at Sharia Faculty, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-present).

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Chairman of Fatwa Commission, Indonesia Ulama Council (MUI) (2010-present); Member of National Sharia Board MUI (2000-present); Member of DPS Bank Niaga Sharia (1998-present); Chairman of DPS Bank Victoria Sharia (1998-present).



Muhammad Syakir Sula Anggota Dewan Pengawas Syariah *Member of Sharia Board of Supervisors*

Periode Jabatan: 1 Juli 2016 - 30 Juni 2019
Period of Office: 1 July 2016 - 30 June 2019

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
 Usia 53 tahun
 Kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1964

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 2009, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Pendidikan

(S1) Sarjana Pertanian di Universitas Padjadjaran, Bandung (1989).

Keahlian

Asuransi Syariah.

Riwayat Profesi

Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (KPJKS-OJK) (2014-sekarang); Dewan Pengawas Syariah PT Nasional Reasuransi (Nasre) (2005-sekarang); Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Panin Life (2005-sekarang); Dewan Pengawas Syariah PT Central Asia Raya (CAR) (2005-sekarang); Wakil Sekjen Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat (2005-sekarang); Sekretaris Komite Ekonomi Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2005-sekarang); Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) (2005-sekarang); Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) (2004-sekarang); Anggota Pengurus Dewan Kehormatan Kode Etik Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) (2004-sekarang); Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (2003-sekarang); Wakil Ketua Komite Tetap Perbankan & Keuangan Syariah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) (2009-2013); Anggota Komite Perbankan Syariah Bank Indonesia (KPS-BI) (2008-2012); Presiden Komisaris Maestro Management (Konsultan Bisnis Syariah) (2008-2012); Deputi Humas & Komunikasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) (2008-2014); Direktur Pemasaran Takaful Group, PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Holding) (2003-2005); Direktur Teknik PT Takaful Umum (General Insurance) (2000-2003); Kepala Divisi Teknik Kantor Pusat PT Takaful Keluarga (Life Insurance) (1997-2000); Supervisor hingga Manajer Pemasaran PT Asuransi Takaful Keluarga (1994-1996).

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (KPJKS-OJK) (2014-sekarang); Dewan Pengawas Syariah PT Nasional Reasuransi (Nasre) (2005-sekarang); Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Panin Life (2005-sekarang); Dewan Pengawas Syariah PT Central Asia Raya (CAR) (2005-sekarang); Wakil Sekjen Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat (2005-sekarang); Sekretaris Komite Ekonomi Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2005-sekarang); Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) (2005-sekarang); Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) (2004-sekarang); Anggota Pengurus Dewan Kehormatan Kode Etik Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) (2004-sekarang); Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (2003-sekarang).

Sertifikat Profesi

FIIS (Fellow of Islamic Insurance Society); AAJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa), QIP (Qualified Insurance Practitioner), CRGP (Certified in Risk Governance Professional).

Personal Data

Indonesian citizen.
 53 years old.
 Born in Palopo, South Sulawesi, 12 February 1964.

Domiciled in

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

History of Appointment into the Sharia Board of Supervisor of Perum Jamkrindo

The position of Member of Sharia Board of Supervisors has been carried out since 2009 and he was reappointed in 2016 through Directors' Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016.

Education

Bachelor of Agriculture at Padjadjaran University, Bandung (1989).

Expertise

Sharia Insurance

Professional History

Member of Sharia Financial Services Development Committee, Financial Service Authority (KPJKS-OJK) (2014-present); Sharia Supervisory Board of PT National Reinsurance (Nasre) (2005-present); Sharia Supervisory Board PT Asuransi Panin Life (2005-present); Sharia Supervisory Board of PT Central Asia Raya (CAR) (2005-present); Deputy Secretary General of the Board of Experts of Indonesian Muslim Intellectuals Association Center (ICMI) (2005-present); Secretary of Economic Committee of Central Executive of Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2005-present); Plenary Members of the National Sharia-MUI Council (DSN-MUI) (2005-present); Vice Chairman of the Association of Islamic Economic Experts (IAEI) (2004-present); Members of the Board of Trustees of the Code of Ethics of the Indonesian Association of Insurance Management Experts (AAMAI) (2004-present); Secretary General of Sharia Economic Society (MES) (2003-present); Deputy Chairman of the Standing Committee on Sharia Banking & Finance Indonesia Chamber of Commerce (Kadin) (2009-2013); Member of Sharia Banking Committee of Bank Indonesia (KPS-BI) (2008-2012); President Commissioner of Maestro Management (Sharia Business Consultant) (2008-2012); Deputy of Public Relations & Communication of Indonesian Waqf Board (BWI) (2008-2014); Marketing Director of Takaful Group, PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Holding) (2003-2005); Technical Director of PT Takaful Umum (General Insurance) (2000-2003); Head of Technical Division of PT Takaful Keluarga (Life Insurance) Head Office (1997-2000); Supervisor to Marketing Manager of PT Asuransi Takaful Keluarga (1994-1996).

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Member of Sharia Financial Services Development Committee, Financial Service Authority (KPJKS-OJK) (2014-present); Sharia Supervisory Board of PT National Reinsurance (Nasre) (2005-present); Sharia Supervisory Board PT Asuransi Panin Life (2005-present); Sharia Supervisory Board of PT Central Asia Raya (CAR) (2005-present); Deputy Secretary General of the Board of Experts of Indonesian Muslim Intellectuals Association Center (ICMI) (2005-present); Secretary of Economic Committee of Central Executive of Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2005-present); Plenary Members of the National Sharia-MUI Council (DSN-MUI) (2005-present); Vice Chairman of the Association of Islamic Economic Experts (IAEI) (2004-present); Members of the Board of Trustees of the Code of Ethics of the Indonesian Association of Insurance Management Experts (AAMAI) (2004-present); Secretary General of Sharia Economic Society (MES) (2003-present);

Professional Certification

FIIS (Fellow of Islamic Insurance Society); AAJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa or Indonesia Jiwa Insurance Expert), QIP (Qualified Insurance Practitioner), CRGP (Certified in Risk Governance Professional).



I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan, Investasi
dan Manajemen Risiko
*Director of Finance, Investment,
and Risk Management*

Sulis Usdoko

Direktur MSDM, Umum
dan Kepatuhan
*Director of HRM, General Affairs,
and Compliance*

Randi Anto

Direktur Utama
President Director

Kadar Wisnuwarman

Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operational and Network

Amin Mas'udi

Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Guarantee Business

Profil Direksi

Profile of The Board of Directors



Randi Anto
Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 21 November 2017 –
20 November 2022, Periode Pertama
Period of Office: 21 November 2017 –
20 November 2022, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun
Kelahiran Semarang, 12 April 1961

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan Sebagai Direksi Perum Jamkrindo

Jabatan Direktur Utama diemban sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur Utama ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

(S2) Perbankan, St Louis University, Amerika Serikat (1994), (S1) Ekonomi Jurusan Ekonomi Perusahaan, Universitas Diponegoro, Semarang (1984)

Keahlian

Ekonomi dan Perbankan

Riwayat Profesi

Direktur Konsumer Bank BRI (2017), Direktur Human Capital & Asset Management Bank BRI (2016), Direktur Credit Risk & Asset Management Bank BRI (2015), Direktur Kepatuhan Bank BRI (2011-2015), Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya manusia Kantor Pusat Bank BRI (2009-2011), Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Palembang Bank BRI (2007-2009), Kepala Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank BRI (2006-2007), Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Kantor Pusat Bank BRI (2004-2006), Pj. Wakadiv Divisi Analisis Risiko Kredit Kantor Pusat Bank BRI (2001-2004), Ka.Desk Stk. Pj.Wakadiv Desk Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank BRI (2000-2001)

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Randi Anto tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain/lembaga.

Personal Data

Indonesian citizen.
56 years old.
Born in Semarang, 12 April 1961.

Domiciled in

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

History of Appointment into the Board of Directors of Perum Jamkrindo

The position of President Director has been carried out since 21 November 2017 through the Decree of Minister of SOEs as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 dated 21 November 2017 on the Dismissal and Appointment of Member of Directors of Perum Jamkrindo. The position of President Director is the 1st period.

Education

Master of Banking, St. Louis University, USA (1994), Bachelor of Corporate Economy, Diponegoro University, Semarang (1984)

Expertise

Economics and Banking

Professional History

Director of Consumer Bank BRI (2017), Director of Human Capital & Asset Management Bank BRI (2016), Director of Credit Risk & Asset Management Bank BRI (2015), Director of Compliance Bank BRI (2011-2015), Head of Human Resource Management Division Bank BRI Head Office (2009-2011), Regional Leader of Palembang Regional Office of Bank BRI (2007-2009), Head of Credit Administration Division of Bank BRI Head Office (2006-2007), Head of Compliance and Risk Management Division of Bank BRI Head Office (2004-2006), Deputy Chairman of Credit Risk Analysis Division of Bank BRI Head Office (2001-2004), Deputy Chairman of Credit Administration Desk Division of Bank BRI Head Office (2000-2001).

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Randi Anto does not have concurrent position on other companies/institution.



Amin Mas'udi

Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Guarantee Business

Periode Jabatan: 7 September 2017 –
6 September 2022, Periode Pertama
Period of Office: 7 September 2017 –
6 September 2022, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 44 tahun
Kelahiran Blora, 24 Juni 1973

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan Sebagai Direksi Perum Jamkrindo

Jabatan Direktur diemban sejak 7 September 2017 sebagai Direktur Bisnis Penjaminan melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

(S2) Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2011); (S1) Manajemen, Universitas Islam Bandung (1996).

Keahlian

Manajemen Agribisnis

Riwayat Profesi

Kepala Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non Bank, Perum Jamkrindo (2013-2017), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Teknologi Informasi, Perum Jamkrindo (2012-2013), Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi, Perum Jamkrindo (2012), Kepala Kantor Cabang Samarinda, Perum Jamkrindo (2010-2012), Kepala Bagian Penjaminan Perum Jamkrindo (2008-2010), Kepala Bagian Pengembangan Usaha, Perum Jamkrindo (2003-2008), Kepala Bagian Pengendalian Penjaminan, Perum Jamkrindo (2002-2003),

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Amin Mas'udi tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain/lembaga.

Personal Data

Indonesian citizen.
44 years old.
Born in Blora, 24 June 1973.

Domiciled in

Bogor, West Java, Indonesia.

History of Appointment into the Board of Directors of Perum Jamkrindo

The position of Director has been carried out since 7 September 2017 through the Decree of Minister of SOEs as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 dated 7 September 2017. The position of Director is the 1st period.

Education

Master in Agribusiness Management, Bogor Institute of Agriculture (2011); Bachelor of Management, Islamic University of Bandung (1996).

Expertise

Agribusiness Management

Professional History

Head of Suretyship and Non Bank Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013-2017), Head of Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Information Technology Division, Perum Jamkrindo (2012-2013), Head of Risk Management and Information Technology Division, Jamkrindo (2012), Head of Samarinda Branch Office, 2010-2012), Head of Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2008-2010), Head of Business Development Division, Perum Jamkrindo (2003-2008), Head of Guarantee Control Division, Perum Jamkrindo (2002-2003).

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Amin Mas'udi does not have concurrent position other companies/institution.



Kadar Wisnuwarman
Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operational and Network

Periode Jabatan: 21 November 2017 –
20 November 2022
Period of Office: 21 November 2017 –
20 November 2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 46 tahun
Kelahiran Malang, 31 Oktober 1971

Domisili

Cibubur, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan Sebagai Direksi Perum Jamkrindo

Jabatan Direktur diemban sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

(S2) Magister Manajemen, Universitas Hasanuddin (2002); (S1) Manajemen, Universitas Airlangga (1996)

Keahlian

Manajemen

Riwayat Profesi

Pranata Utama Perum Jamkrindo untuk ditugaskan sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017), Kepala Kantor Cabang Jakarta Khusus, Perum Jamkrindo (2013-2014), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi, Perum Jamkrindo (2013), Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo (2012-2013), Kepala Kantor Cabang Denpasar, Perum Jamkrindo (2011-2012), Kepala Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2010-2011), Kepala Bagian Penjaminan Kantor Pusat, Perum Jamkrindo (2006-2010), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Jakarta, Perum Jamkrindo (2004-2006), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Bandung, Perum Jamkrindo (2004), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2003-2004).

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Kadar Wisnuwarman tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain/lembaga.

Personal Data

Indonesian citizen.
46 years old.
Born in Malang, 31 October 1971.

Domiciled in

Cibubur, West Java, Indonesia.

History of Appointment into the Board of Directors of Perum Jamkrindo

The position of Director has been carried out since 21 November 2017 through the Decree of Minister of SOEs as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 dated 21 November 2017 on the Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. The position of Director is the 1st period.

Education

Master of Management, Hasanuddin University (2002); Bachelor of Management, Airlangga University (1996)

Expertise

Management

Professional History

Main Institution's Officer of Perum Jamkrindo to be assigned as President Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017), Head of Jakarta Special Branch, Perum Jamkrindo (2013-2014), Head of Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Claim and Subrogation Division, Perum Jamkrindo (2012-2013), Head of Denpasar Branch Office, Perum Jamkrindo (2011-2012), Head of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2010-2011), Head of Guarantee, Perum Jamkrindo Head Office (2006-2010), Head of Operational Division of Jakarta Branch Office, Perum Jamkrindo (2004-2006), Head of Operational Division of Bandung Branch Office, Perum Jamkrindo (2004), Head of Operational Division of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2003-2004).

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Kadar Wisnuwarman does not have concurrent position on other companies/institution.



Sulis Usdoko

Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs, and Compliance

Periode Jabatan: 7 September 2017 – 6 September 2022
Period of Office: 7 September 2017 – 6 September 2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 57 tahun
Kelahiran Semarang, 5 September 1960

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan

(S2) Ekonomi Manajemen, Universitas Brawijaya (2003); (S1) Teknik Sipil, Universitas Brawijaya (1985).

Keahlian

Ekonomi dan Manajemen

Riwayat Profesi

Direktur Bidang Collection Management, Asset Management, Legal dan Dokumen Perkreditan, Bank BTN (2015-2017), Kepala Divisi Bidang Dana Pihak Ketiga Retail dan Jasa-jasa, Bank BTN (2011-2015), Kepala Divisi Teknologi Informasi, Bank BTN (2008-2011), Kepala Kantor Cabang Kelas 1, Kelas 1, dan Kepala Kantor Cabang Utama, Bank BTN (1997-2010), Staf hingga Kepala Bagian, Bank BTN (1986-1995).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi Perum Jamkrindo

Jabatan Direktur diemban sejak 7 September 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode ke-1. Sebelum pengangkatannya di tahun 2017, Sulis Usdoko belum pernah menjabat pada jajaran Direksi Perum Jamkrindo.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Sulis Usdoko tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain/lembaga.

Personal Data

Indonesian citizen.
57 years old.
Born in Semarang, 5 September 1960.

Domiciled in

Bekasi, West Java, Indonesia.

Education

Master of Management Economics, Universitas Brawijaya (2003); Bachelor of Civil Engineering, Universitas Brawijaya (1985).

Expertise

Economics and Management.

Professional History

Director of Collection Management, Asset Management, Legal and Loan Division, Bank BTN (2015-2017), Head of Third Party Funds, Retail, and Services Division, Bank BTN (2011-2015), Head of Information Technology Division, Bank BTN (2008-2011), Head of Branch Office Class 1, Class 1, and Head of Main Branch Office, Bank BTN (1997-2010), Staff to Section Head, Bank BTN (1986-1995).

History of Appointment into the Board of Directors of Perum Jamkrindo

The position of Director has been carried out since 7 September 2017 through the Decree of Minister of SOEs as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 dated 7 September 2017 on the Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. The position of Director is the 1st period. Prior to his appointment in 2017, Sulis Usdoko had never served in the Board of Directors of Perum Jamkrindo.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Sulis Usdoko does not have concurrent position on other companies/institution.



I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment, and Risk Management

Periode Jabatan: 15 Januari 2013 - 14 Januari 2018

Period of Office: 15 January 2013 - 14 January 2018

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun
Kelahiran Balikpapan, 25 Februari 1959

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan Sebagai Direksi Perum Jamkrindo

Jabatan Direktur diemban sejak 15 Januari 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

(S2) *Master Of Science* Jurusan Ekonomi North Eastern University Boston, Amerika Serikat (1995); (S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Pancasila (1988); (S1) Sarjana Muda Akuntansi STAN Jakarta (1981).

Keahlian

Ekonomi dan Manajemen.

Riwayat Profesi

Plt Direktur Utama Perum Jamkrindo (7 September 2017 – 21 November 2017), Asisten Deputy Usaha Jasa II Kementerian Bumn (2010-sekarang); Anggota Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011); Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008-2011); Anggota Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2011); Anggota Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003-2009); Asisten Deputy Usaha Perkebunan II Kementerian Bumn (2006-2010); Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIA Kementerian BUMN (2006); Pj. Kepala Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian Kementerian Bumn (2002-2006).

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga

Asisten Deputy Usaha Jasa II Kementerian BUMN (2010-sekarang).

Indonesian citizen
59 years old
Born in Balikpapan, 25 February 1959

Domiciled in

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

History of Appointment into the Board of Directors of Perum Jamkrindo

The position of Director has been carried out since 15 January 2013 through the Decree of Minister of SOEs as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 dated 15 January 2013 on the Dismissal, Amendment of Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, Decree of Minister of State Owned Enterprise as Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK- 44/MBU/2014 on the Amendment of Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. The position of Director is the first period.

Education

Master of Science majoring in Economics, North Eastern University, Boston, USA (1995); Bachelor of Economics majoring in Corporate Management, Universitas Pancasila (1988); Diploma of STAN Accountancy Jakarta (1981).

Expertise

Economics and Management

Professional History

President Director Ad-Interim Perum Jamkrindo (September 7, 2017 - November 21, 2017, Assistant Deputy Services Business II Ministry of SOE (2010-present); Member of Commissioners of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011); Member of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008-2011); Member of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007- 2011); Member of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003-2009); Assistant Deputy Plantation Business II Ministry of SOE (2006-2010); Head of Plantation Business Division IIA Ministry of SOE (2006); Acting Head of Business Section of Agricultural Production Facility of Ministry of SOE (2002-2006).

Concurrent Position on Other Companies/Institutions

Assistant Deputy of Services Business II Ministry of SOE (2010-present).

Abdul Bari

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Untung Heri Sukariyanto

Kepala Satuan
Pengawasan Intern
Head of Internal Audit
Unit

Hafizah

Kepala Divisi Penjaminan
Sistem Resi Gudang
Head of Warehouse
Receipt System
Guarantee Division

Alia Nur Fitri

Kepala Divisi
Perencanaan dan
Pengembangan
Head of Planning and
Development Division

Nina Kurnia Dewi

Kepala Divisi
Pemeringkatan
UMKM dan Konsultasi
Manajemen
Head of SMEs Rating
and Management
Consultation Division



Agus Supriadi

Kepala Divisi Klaim &
Subrogasi
Head of Claim &
Subrogation Division

Henry Nur Irianto

Kepala Divisi Jaringan
dan Layanan
Head of Network and
Services Division

Hadi Ariwibowo

Kepala Divisi Teknologi
Informasi
Head of Information
Technology Division

Erna Zubaida

Kepala Divisi Manajemen
Sumber Daya Manusia
Head of Human
Resources Management
Division

Muhamad Solihin

Kepala Divisi Umum
Head of General Affairs
Division

Lusy Susanti
Kepala Divisi Bisnis
Penjaminan Program
*Head of Program
Guarantee Business
Division*

Suwarsito
Kepala Divisi Bisnis
Penjaminan Bank
*Head of Bank Guarantee
Business Division*

Muchamad Kisworo
Kepala Divisi Bisnis
Suretyship & Penjaminan
Non Bank
*Head of Suretyship &
Non-Bank Guarantee
Business Division*

Sudibyo Utomo
Kepala Divisi Penjaminan
Syariah
*Head of Sharia Guarantee
Division*

Mahfudh Sudiyo
Kepala Divisi Teknik &
Administrasi Penjaminan
*Head of Technical &
Guarantee Administration
Division*



**Muhammad Natsir
Rahmadi**
Kepala Divisi Hukum dan
Kepatuhan
*Head of Legal and
Compliance Division*



Aribowo
Kepala Divisi Keuangan
dan Investasi
*Head of Finance and
Investment Division*



Diana Mayawati
Kepala Divisi Akuntansi
& PKBL
*Head of Accounting &
PKBL Division*



Ceriandri Widuri
Kepala Divisi Manajemen
Risiko
*Head of Risk
Management Division*

Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officers Profile



Abdul Bari
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 1 Agustus 2016 <i>1 August 2016</i>
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Subang, 29 September 1975 <i>Subang, 29 September 1975</i>
Usia <i>Age</i>	: 42 tahun <i>42 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	: Jakarta Pusat, DKI Jakarta <i>Central Jakarta, DKI Jakarta</i>
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S3 Manajemen SDM Universitas Negeri Jakarta (2014) <i>Doctoral degree in HR Management, Universitas Negeri Jakarta (2014)</i>
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 10 Desember 2015 <i>10 December 2015</i>
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Sekretaris Perusahaan (01 Agustus 2016) • Pranata Utama Direktorat Operasional dan Jaringan (22 April 2016) • Pranata Utama Direktorat Utama (10 Desember 2015) • Pranata Madya Sekretaris Perusahaan (21 Agustus 2015) • Corporate Secretary (01 August 2016) • First Class Official of Directorate of Operations and Network (22 April 2016) • Institution's Main Officer of Primary Directorate (10 December 2015) • Corporate Secretary-Institution's Middle Officer (21 Agustus 2015)



Untung Heri Sukariyanto
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 8 Maret 2017 <i>8 March 2017</i>
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Lumajang, 8 Juli 1971 <i>Lumajang, 8 July 1971</i>
Usia <i>Age</i>	: 46 tahun <i>46 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	: Surabaya, Jawa Timur <i>Surabaya, East Java</i>
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S2 Manajemen Universitas Hasanuddin (2003) <i>Master of Management, Hasanuddin University (2003)</i>
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 1 April 1996 <i>1 April 1996</i>
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Satuan Pengawasan Intern (08 Maret 2017) • Kepala Kantor Wilayah VI Surabaya (22 April 2016) • Kepala Kantor Cabang Surabaya (15 September 2015) • Kepala Kantor Cabang Makassar (24 Maret 2013) • Kepala Kantor Anak Cabang Manado (19 Januari 2012) • Head of the Internal Audit Unit (08 March 2017) • Head of Regional Office VI Surabaya (22 April 2016) • Head of Surabaya Branch Office (15 September 2015) • Head of Makassar Branch Office (24 March 2013) • Head of Manado Branch Office (19 January 2012)



Hafizah
Kepala Divisi Penjaminan
Sistem Resi Gudang
Head of Warehouse Receipt System
Guarantee Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 8 Maret 2017 8 March 2017
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Jakarta, 2 Februari 1966 Jakarta, 2 February 1966
Usia <i>Age</i>	: 51 tahun 51 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Jakarta Timur, DKI Jakarta East Jakarta, DKI Jakarta
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S2 Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI (2002) Master of Management Universitas Persada Indonesia YAI (2002)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 3 September 2014 3 September 2014
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: - Kepala Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang (08 Maret 2017) - Pranata Utama Direktorat Utama (22 April 2016) - Kepala Bagian Hubungan Masyarakat & Komunikasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan (27 Januari 2016) - Kepala Bagian Kesekretariatan, Humas dan Protokol, Sekretaris Perusahaan (03 September 2014) - Head of Warehouse Receipt System Guarantee Division (March 08, 2017) - Main Institution's Main Directorate (April 22, 2016) - Head of Corporate Communications & Communications Division, Corporate Secretary (January 27, 2016) - Head of Secretariat, Public Relations, and Protocol Section, Corporate Secretary (03 September 2014)



Alia Nur Fitri
Kepala Divisi Perencanaan dan
Pengembangan
Head of Planning
and Development Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 19 September 2017 19 September 2017
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Malang, 29 November 1971 Malang, 29 November 1971
Usia <i>Age</i>	: 46 tahun 46 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (1997) Master of Management, Universitas Gadjah Mada (1997)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 3 September 2014 3 September 2014
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: - Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan - Kepala Divisi Manajemen Risiko (30 Agustus 2016) - Pranata Utama Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko (22 April 2016) - Kepala Bagian Investasi, Divisi Keuangan dan Investasi (27 Januari 2016) - Kepala Pengelolaan Investasi, Divisi Keuangan dan Investasi (06 November 2014) - Kepala Seksi Analisa Investasi, Divisi Keuangan dan Investasi (03 September 2014) - Head of Planning and Development Division - Head of Risk Management Division (30 August 2016) - Main Institution's Directorate of Finance, Investment and Risk Management (22 April 2016) - Head of Investment, Finance and Investment Division (27 January 2016) - Head of Investment Management, Finance and Investment Division (06 November 2014) - Section Head of Investment Analysis, Finance and Investment Division (03 September 2014)



Nina Kurnia Dewi
Kepala Divisi Pemeringkatan UMKM dan
Konsultasi Manajemen
Head of SMEs Rating and Management
Consultation Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 10 Desember 2015 <i>10 December 2015</i>
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Pekalongan, 18 Mei 1971 <i>Pekalongan, 18 May 1971</i>
Usia <i>Age</i>	: 46 tahun <i>46 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	: Bogor, Jawa Barat <i>Bogor, West Java</i>
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S2 Bisnis Administrasi Universitas Queensland (2002) <i>Master of Business Administration, University of Queensland (2002)</i>
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 1 April 1996 <i>1 April 1996</i>
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen (10 Desember 2015) • Kepala Kantor Wilayah I Jakarta (15 September 2015) • Kepala Divisi SDM (10 Maret 2014) • Kepala Divisi Penjaminan Program (31 Desember 2013) • Pejabat Pengkaji Utama (15 Januari 2013) • Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan (27 November 2012) • Kepala Divisi Umum (29 Februari 2012) • Head of SMEs Ranking and Management Consultation Division (10 December 2015) • Head of Regional Office I Jakarta (15 September 2015) • Head of HR Division (10 March 2014) • Head of Program Guarantee Division (31 December 2013) • Main Assessor Officer (15 January 2013) • Head of Planning and Development Division (27 November 2012) • Head of General Division (29 February 2012)



Lusy Susanti
Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Program
Head of Program Guarantee Business
Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 10 Desember 2015 <i>10 December 2015</i>
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Batusangkar, 8 Januari 1977 <i>Batusangkar, 8 January 1977</i>
Usia <i>Age</i>	: 40 tahun <i>40 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	: Pekanbaru, Riau <i>Pekanbaru, Riau</i>
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S1 Akuntansi Universitas Andalas (1999) <i>Bachelor of Accounting, Universitas Andalas (1999)</i>
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 11 Januari 2000 <i>11 January 2000</i>
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Program (10 Desember 2015) • Plh Kepala Kantor Cabang Jakarta (19 Januari 2015) • Kepala Bagian Penjaminan Kantor Cabang DKI Jakarta (28 Maret 2014) • Kepala Bagian Operasional 1 Kantor Cabang DKI Jakarta (17 Februari 2014) • Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Kantor Cabang DKI Jakarta (27 November 2012) • Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Kantor Cabang Pekanbaru (06 Juli 2012) • Head of Program Guarantee Business Division (10 December 2015) • Acting Head of Jakarta Branch Office (19 January 2015) • Head of Guarantee Division of DKI Jakarta Branch Office (28 March 2014) • Head of Operational Section 1 Branch Office of DKI Jakarta (17 February 2014) • Head of Administration and Finance of DKI Jakarta Branch Office (27 November 2012) • Head of Administration and Finance Branch Pekanbaru (06 July 2012)



Suwarsito
Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank
Head of Bank Guarantee Business Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 30 Agustus 2016 30 August 2016
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Sragen, 28 Februari 1972 Sragen, 28 February 1972
Usia <i>Age</i>	: 45 tahun 45 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S2 Manajemen Universitas Hasanuddin (2007) Master of Management, Universitas Hasanuddin, Makassar (2007)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 2 Januari 1997 2 January 1997
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank (30 Agustus 2016) • Kepala Kantor Wilayah III Jakarta (22 April 2016) • Kepala Kantor Cabang Jakarta (27 Juni 2013) • Kepala Divisi Umum (27 November 2012) • Kepala Kantor Cabang Bandung (19 Januari 2012) • Head of Bank Guarantee Business Division (30 August 2016) • Head of Regional Office III Jakarta (22 April 2016) • Head of Jakarta Branch Office (27 June 2013) • Head of General Division (27 November 2012) • Head of Bandung Branch Office (19 January 2012)



Muchamad Kisworo
Kepala Divisi Bisnis Suretyship & Penjaminan Non Bank
Head of Suretyship & Non-Bank Guarantee Business Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 19 September 2017 19 September 2017
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Pekalongan, 24 Februari 1974 Pekalongan, 24 February 1974
Usia <i>Age</i>	: 43 tahun 43 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Bandung, Jawa Barat Bandung, West Java
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S2 Manajemen Universitas Sumatera Utara (2010) Master of Management, Universitas Sumatera Utara (2010)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 2 Februari 2000 2 February 2000
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non Bank (19 September 2017) • Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi (08 Maret 2017) • Kepala Divisi Pemasaran PT Jamkrindo Syariah (Pranata Madya Direktorat SDM dan Umum) (13 Oktober 2014) • Kepala Kantor Cabang Bandung PT Jamkrindo Syariah (Pranata Madya Direktorat SDM dan Umum) (13 Oktober 2014) • Kepala Bagian Rekrutmen dan Pengembangan Karir (03 September 2014) • Kepala Kantor Cabang Palangkaraya (25 Maret 2013) • Kepala KAC Palangkaraya (15 Januari 2013) • Head of Suretyship and Non-Bank Business Division (19 September 2017) • Head of Claim and Subrogation Division (08 March 2017) • Head of Marketing Division of PT Jamkrindo Syariah (Middle Institution's Directorate of Human Resources and General) (13 October 2014) • Head of Bandung Branch Office PT Jamkrindo Syariah (Middle Institution's Directorate of Human Resources and General Affairs) (13 October 2014) • Head of Recruitment and Career Development Section (03 September 2014) • Head of Palangkaraya Branch Office (25 March 2013) • Head of KAC Palangkaraya (15 January 2013)



Sudibyo Utomo
Kepala Divisi Penjaminan Syariah
Head of Sharia Guarantee Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	19 September 2017 19 September 2017
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	Surabaya, 5 Juli 1965 Surabaya, 5 July 1965
Usia <i>Age</i>	52 tahun 52 years old
Domisili <i>Domicile</i>	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	S2 Ekonomi STM Labora (2000) Master of Economics, STM Labora (2000)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	1 November 1990 1 November 1990
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	• Kepala Divisi Penjaminan Syariah (19 September 2017) • Kepala Divisi MSDM (15 September 2015) • Kepala Kantor Wilayah III Makassar (6 November 2014) • Kepala Satuan Pengawasan Intern (19 Januari 2012) • Kepala Kantor Cabang Bandung (01 Januari 2011) • Kepala Kantor Cabang Medan (01 Juni 2005) • Head of Sharia Guarantee Division (19 September 2017) • Head of HRM Division (15 September 2015) • Head of Regional Office III Makassar (6 November 2014) • Head of the Internal Audit Unit (19 January 2012) • Head of Bandung Branch Office (01 January 2011) • Head of Medan Branch Office (01 June 2005)



Mahfudh Sudiyo
Kepala Divisi Teknik & Administrasi
Penjaminan
Head of Technical & Guarantee
Administration Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	10 Desember 2015 10 December 2015
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	Jombang, 17 Maret 1973 Jombang, 17 March 1973
Usia <i>Age</i>	44 tahun 44 years old
Domisili <i>Domicile</i>	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	S1 Manajemen Universitas Brawijaya (1998) Bachelor of Management, Universitas Brawijaya (1998)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	2 Januari 1997 2 January 1997
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	• Kepala Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan (10 Desember 2015) • Kepala Divisi Teknik Penjaminan Bank (03 September 2014) • Kepala Divisi Penjaminan Komersial (15 Januari 2013) • Kepala Divisi Penjaminan 1 (27 November 2012) • Kepala Kantor Cabang Jambi (19 Januari 2012) • Head of Technical & Guarantee Administration Division (10 December 2015) • Head of Bank Guarantee Technical Division (03 September 2014) • Head of Commercial Guarantee Division (15 January 2013) • Head of Guarantee 1 Division (27 November 2012) • Head of Jambi Branch Office (19 January 2012)



Agus Supriadi
Kepala Divisi Klaim & Subrogasi
Head of Claim & Subrogation Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 19 September 2017 19 September 2017
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Brebes, 29 Januari 1967 Brebes, 29 January 1967
Usia <i>Age</i>	: 50 tahun 50 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Jakarta Timur, DKI Jakarta East Jakarta, DKI Jakarta
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S2 Universitas Andalas (2002) Master Degree, Universitas Andalas (2002)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 2 Januari 1995 2 January 1995
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi (19 September 2017) • Pranata Utama Direktorat Bisnis Penjaminan (08 Maret 2017) • Kepala Kantor Cabang Surabaya (30 Agustus 2016) • Kepala Kantor Cabang Semarang (22 April 2016) • Kepala Kantor Cabang Samarinda (10 Desember 2015) • Kepala Kantor Cabang Banjarmasin (25 Maret 2013) • Kepala KAC Banjarmasin (27 November 2012) • Head of Claim and Subrogation Division (19 September 2017) • Main Institution's Guarantee Business Directorate (08 March 2017) • Head of Surabaya Branch Office (30 August 2016) • Head of Semarang Branch Office (22 April 2016) • Head of Samarinda Branch Office (10 December 2015) • Head of Banjarmasin Branch Office (25 March 2013) • Head of KAC Banjarmasin (27 November 2012)



Henry Nur Irianto
Kepala Divisi Jaringan dan Layanan
Head of Network and Services Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 8 Maret 2017 8 March 2017
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Magelang, 9 Januari 1966 Magelang, 9 January 1966
Usia <i>Age</i>	: 51 tahun 51 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S2 Manajemen Keuangan STM Labora (1999) Master of Financial Management, STM Labora (1999)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 1 Februari 1991 1 February 1991
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Jaringan dan Layanan (08 Maret 2017) • Kepala Divisi Klaim & Subrogasi (10 Desember 2015) • Kepala Divisi Akuntansi dan TI (10 Maret 2014) • Kepala Divisi Akuntansi (27 Juni 2013) • Kepala Divisi Investasi (27 November 2012) • Kepala Divisi Penjaminan Syariah (29 Februari 2012) • Kepala Divisi Keuangan (29 Desember 2005) • Kepala Kantor Cabang Samarinda (12 Juli 2002) • Head of Network and Services Division (08 March 2017) • Head of Claim & Subrogation Division (10 December 2015) • Head of Accounting and Information Technology Division (10 March 2014) • Head of Accounting Division (27 June 2013) • Head of Investment Division (27 November 2012) • Head of Sharia Guarantee Division (29 February 2012) • Head of Finance Division (29 December 2005) • Head of Samarinda Branch Office (12 July 2002)



Hadi Ariwibowo
Kepala Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 10 Desember 2015 10 December 2015
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Jakarta, 2 Februari 1977 Jakarta, 2 February 1977
Usia <i>Age</i>	: 40 tahun 40 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Jakarta Timur, DKI Jakarta East Jakarta, DKI Jakarta
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia (2002) Bachelor of Civil Engineering, Universitas Indonesia, Jakarta (2002)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 6 Oktober 2008 6 October 2008
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Teknologi Informasi (10 Desember 2015) • Pranata Utama TI (10 Maret 2014) • Plt. Kepala Divisi TI (31 Desember 2013) • Plt. Kepala Bagian Pengembangan Divisi Teknologi Informasi (15 Januari 2013) • Head of Information Technology Division (10 December 2015) • Main Institution's IT (10 March 2014) • Acting Head of IT Division (31 December 2013) • Acting Head of Development of Information Technology Division (15 January 2013)



Erna Zubaida
Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Head of Human Resources Management Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 19 September 2017 19 September 2017
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Purworejo, 27 Februari 1971 Purworejo, 27 February 1971
Usia <i>Age</i>	: 46 tahun 46 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S1 Manajemen Universitas Diponegoro (1995) Bachelor of Economic Management, Universitas Diponegoro, Semarang (1995)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 1 April 1996 1 April 1996
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi MSDM (19 September 2017) • Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan (08 Maret 2017) • Kepala Divisi Jaringan dan Layanan (22 April 2016) • Kepala Divisi Manajemen Risiko (10 Desember 2015) • Wakil Kepala Kantor Wilayah 2 (15 September 2015) • Kepala Divisi Umum (10 Maret 2014) • Kepala Divisi SDM (02 Desember 2013) • Plt. Kepala Divisi Umum (27 Juni 2013) • Plt. Kepala Divisi SDM (15 Januari 2013) • Head of Human Resources Management Division (19 September 2017) • Head of Planning and Development Division (08 March 2017) • Head of Network and Services Division (22 April 2016) • Head of Risk Management Division (10 December 2015) • Vice Head of Regional Office 2 (15 September 2015) • Head of General Division (10 March 2014) • Head of HR Division (02 December 2013) • Acting Head of General Division (27 June 2013) • Acting Head of HR Division (15 January 2013)



Muhamad Solihin
Kepala Divisi Umum
Head of General Affairs Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 22 April 2016 22 April 2016
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Bandung, 18 April 1970 Bandung, 18 April 1970
Usia <i>Age</i>	: 47 tahun 47 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Bandung, Jawa Barat Bandung, West Java
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S1 Manajemen Universitas Padjadjaran (1995) Bachelor of Management, Universitas Padjadjaran (1995)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 1 April 1996 1 April 1996
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Umum (22 April 2016) • Kepala Kantor Cabang Denpasar (03 September 2014) • Kepala Kantor Cabang Surabaya (17 Januari 2014) • Kepala Kantor Cabang Kupang (22 Mei 2013) • Kepala Kantor Cabang Mataram (25 Maret 2013) • Kepala KAC Mataram (15 Januari 2012) • Head of General Division (22 April 2016)) • Head of Denpasar Branch Office (03 September 2014) • Head of Surabaya Branch Office (17 January 2014) • Head of Kupang Branch Office (22 May 2013) • Head of Mataram Branch Office (25 March 2013) • Head of KAC Mataram (15 January 2012)



Muhammad Natsir Rahmadi
Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan
Head of Legal and Compliance Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 1 Agustus 2016 1 August 2016
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Pasuruan, 25 Mei 1972 Pasuruan, 25 May 1972
Usia <i>Age</i>	: 45 tahun 45 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S1 Hukum Universitas Brawijaya (1999) Bachelor of Law, Universitas Brawijaya, Malang (1999)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 1 Juli 2003 1 July 2003
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan (01 Agustus 2016) • Sekretaris Perusahaan (06 November 2014) • Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan, Divisi Hukum dan Kepatuhan (28 Maret 2014) • Kepala Bagian Kepatuhan, Divisi Hukum dan Kepatuhan (27 November 2012) • Kepala Seksi Administrasi & Keuangan KAC Papua (22 Februari 2011) • Head of Legal and Compliance Division (01 August 2016) • Corporate Secretary (06 November 2014) • Head of Legal and Compliance Division (28 March 2014) • Head of Legal and Compliance Division (27 November 2012) • Head of Administration & Finance Section KAC Papua (22 February 2011)



Aribowo
Kepala Divisi Keuangan dan Investasi
Head of Finance and Investment Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 1 Agustus 2016 <i>1 August 2016</i>
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Probolinggo, 06 Juni 1966 <i>Probolinggo, 6 June 1966</i>
Usia <i>Age</i>	: 51 tahun <i>51 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	: Sidoarjo, Jawa Timur <i>Sidoarjo, East Java</i>
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S2 Manajemen Universitas Andalas (2002) <i>Master in Management, Universitas Andalas, Padang (2002)</i>
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 1 Desember 1990 <i>1 December 1990</i>
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (01 Agustus 2016) • Kepala Kantor Wilayah II Palembang (22 April 2016) • Kepala Kantor Wilayah 1 Jakarta (10 Desember 2015) • Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta (03 September 2014) • Kepala Kantor Wilayah 2 Surabaya (10 Maret 2014) • Kepala Divisi Keuangan (15 Januari 2013) • Kepala Divisi SDM (27 November 2012) • Kepala Kantor Cabang Surabaya (10 September 2007) • Kepala Kantor Cabang Samarinda (29 Desember 2005) • Head of Finance and Investment Division (01 August 2016) • Head of Regional II Office of Palembang (22 April 2016) • Head of Regional 1 Office, Jakarta (10 December 2015) • Head of Jakarta Special Branch Office (03 September 2014) • Head of Regional II Office, Surabaya (10 March 2014) • Head of Financial Division (15 January 2013) • Head of HR Division (27 November 2012) • Head of Surabaya Branch Office (10 September 2007) • Head of Samarinda Branch Office (29 December 2005)



Diana Mayawati
Kepala Divisi Akuntansi & PKBL
Head of Accounting & PCDP Division

Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 10 Desember 2015 <i>10 December 2015</i>
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Jakarta, 19 Oktober 1975 <i>Jakarta, 19 October 1975</i>
Usia <i>Age</i>	: 42 tahun <i>42 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	: Bekasi, Jawa Barat <i>Bekasi, West Java</i>
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S1 Akuntansi Universitas Trisakti (1998) <i>Bachelor of Accounting, Universitas Trisakti, Jakarta (1998)</i>
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 30 April 2015 <i>30 April 2015</i>
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Akuntansi & PKBL (10 Desember 2015) • Pejabat Fungsional Madya Divisi Akuntansi dan TI (04 Mei 2015) • Accounting and PKBL Division (10 December 2015) • Functional Officer of Accounting and IT Division (04 May 2015)



Ceriandri Widuri
Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Division

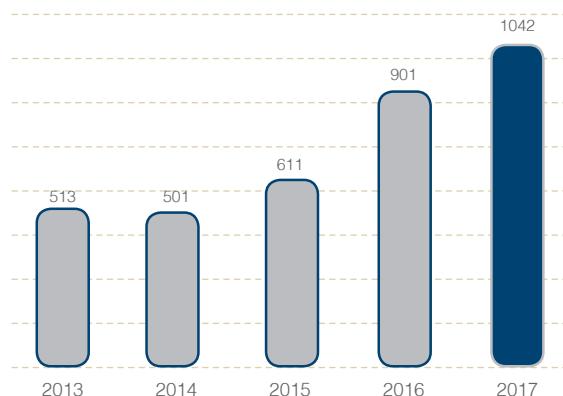
Menjabat Sejak <i>In position Since</i>	: 19 September 2017 19 September 2017
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Semarang, 13 Maret 1972 Semarang, 13 March 1972
Usia <i>Age</i>	: 45 tahun 45 years old
Domisili <i>Domicile</i>	: Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2009) Master of Strategic Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009)
Bergabung di Perum Jamkrindo <i>Joined Perum Jamkrindo</i>	: 2 Januari 1997 2 January 1997
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo <i>Position at Perum Jamkrindo</i>	: • Kepala Divisi Manajemen Risiko (19 September 2017) • Kepala Divisi Penjaminan Syariah (27 November 2012) • Kepala Kantor Cabang Banjarmasin (27 Mei 2011) • Kepala Bagian Penjaminan Syariah I (08 Juli 2010) • Head of Risk Management Division (19 September 2017) • Head of Sharia Guarantee Division (27 November 2012) • Head of Banjarmasin Branch Office (27 May 2011) • Head of Sharia Guarantee Division I (08 July 2010)

Demografi Karyawan

Employees Demographic

Perkembangan Jumlah Karyawan Tahun 2013-2017
Development of Number of Employees Year 2013-2017

(orang)
(in people)



“1.042 karyawan yang berkarya di Perusahaan mendedikasikan dirinya kepada dunia UMKM dan Koperasi melalui 9 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 55 Kantor Cabang, dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia.”

“1,042 employees working in the Company dedicate themselves to the world of SMEs and Cooperatives through 9 Regional Offices, 1 Jakarta Special Branch Office, 55 Branch Offices, and 16 Service Unit Offices (KUP) scattered throughout Indonesia.”

Uraian tentang pengembangan karyawan Perusahaan dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam bagian pembahasan Sumber Daya Manusia.

Description of the Company's employee development can be seen in the Business Support Functions section in the Human Resources discussion section.

Komposisi Pemegang Saham/Pemilik Modal

Shareholders/Share Owners Composition

RINCIAN PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

Perusahaan memiliki bentuk Perusahaan Umum (Perum) yang tidak mengenal saham dalam sistem kepemilikannya. Namun demikian, kepemilikan dalam bentuk penyertaan modal dapat disampaikan sebagai berikut.

Penyertaan Modal pada Perum Jamkrindo
per 31 Desember 2017

Pemilik Modal <i>Equity Owner</i>	Nominal (Rp)/(IDR)	Persentase Kepemilikan <i>Percentage of Ownership (%)</i>
Negara Republik Indonesia (Penyertaan Modal Negara) <i>The Republic of Indonesia (State Equity Participation)</i>	7.638.733.000.000	100,00%

DETAILS OF SHAREHOLDERS/SHARE OWNERS

The Company is a Public Corporation (Perum) which does not recognize shares in its ownership system. However, ownership in the form of equity is presented as follows.

Equity Participation in Perum Jamkrindo
As of 31 December 2017

Komposisi Kepemilikan Perum Jamkrindo

Composition of Perum Jamkrindo Owners



INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pemegang saham utama Perusahaan dalam hal ini adalah Pemilik Modal seluruhnya sebesar 100,00% adalah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Melalui kepemilikan tunggal tersebut, Perusahaan memiliki status hukum Perusahaan Umum dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

INFORMATION ON MAIN SHAREHOLDERS

The main shareholders of the Company, or in this case, the Equity Owners of it, is entirely owned 100.00% by the Republic of Indonesia. This ownership is through the Government of the Republic of Indonesia/Ministry of State-Owned Enterprises. Through sole ownership, the Company has a legal status of Public Corporate and becomes a State-Owned Enterprise (SOE).

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASING-MASING DI BAWAH 5 (LIMA) PERSEN

Hingga 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, dan Program Kepemilikan Saham Manajemen. Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Seluruh kepemilikan modal sesuai dengan penjelasan di atas.

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP BY MANAGEMENT AND SHAREHOLDERS GROUPS EACH BELOW 5 (FIVE) PERCENT

As of 31 December 2017, the Company has no policies on Employee Share Ownership Program and Management Share Ownership Program. The Company does not conduct an Initial Public Offering either which may allow the Company's ownership of shares by public. All equity ownership is in accordance with the above explanation.

Jabatan Position	Nama Name	Jumlah Kepemilikan Perum Jamkrindo Amount of Ownership of Perum Jamkrindo
Ketua Dewan Pengawas Head of the Board of Supervisors	Sri Mulyanto	- Nihil – -No Ownership-
Anggota Dewan Pengawas Member of the Board of Supervisors	Dahlan Siamat	
Anggota Dewan Pengawas Member of the Board of Supervisors	Subandriyo	
Anggota Dewan Pengawas Member of the Board of Supervisors	Noor Ida Khomsiyati	
Anggota Dewan Pengawas Member of the Board of Supervisors	Diah Natalisa	
Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Board of Supervisors	Hasanudin	
Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Sharia Board of Supervisors	Muhammad Syakir Sula	
Direktur Utama President Director	Randi Anto	
Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Amin Masudi	
Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operational and Network	Kadar Wisnuwarman	
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Sulis Usdoko	
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment, and Risk Management	I. Rusdonobanu	

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/joint venture (JV)/special purpose vehicle (SPV)

List of Subsidiaries and Associated Entities/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)

Entitas Anak Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Year of Operations	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)		Jumlah Aset Total Asset (Rp-juta) (IDR-million)		Status Operasi Operations Status
					2017	2016	2017	2016	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah	Jakarta	2014	2014	99,995%	99,995%	354.759	354.759	Beroperasi Operations

“Selain daftar entitas anak di atas, Perum Jamkrindo tidak memiliki entitas asosiasi dan/atau penyertaan saham kepada entitas manapun.”

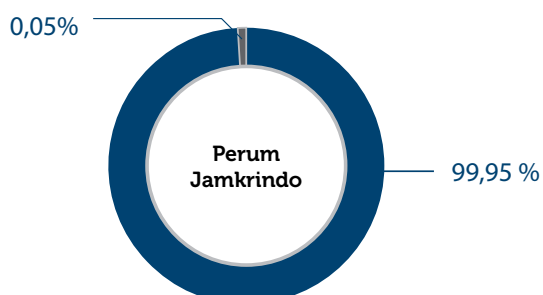
“In addition to the above list of entities, Perum Jamkrindo has no associate entity and/or investment in shares of stock to any entity.”

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH (“JAMSYAR”)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (“Jamsyar”) didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No. 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014; kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, serta Surat OJK No. S-34/nB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung *tagline* “Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, Responsif, dan Inovatif”.

Informasi tentang kepemilikan, kinerja, dan manajemen Jamsyar adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Saham Jamsyar

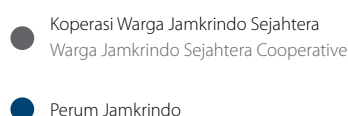


PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH (“JAMSYAR”)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (“Jamsyar”) was established on 16 September 2014 and acquired its operational license on 7 November 2014. Jamsyar was incorporated through Notarial Deed No. 68 by Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. on 19 September 2014 and was registered to the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree of Minister of Law and Human Rights No. AHU-26462.40.10.2014 on Ratification of the Establishment of Legal Entity of Limited Liability Company PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dated 24 September 2014; then, obtained its operational license from the Financial Services Authorities (FSA) through letter No. KEP-134/d.05/2014 dated 7 November 2014 on Granting Business License of Sharia Guarantee Company To PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and FSA Letter No. S-34/nB.223/2015 dated 15 January 2015 on Listing of New Product of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar operates in Sharia Guarantee Services business sector, by using the *tagline* “Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative”.

Information on Jamsyar's ownership, performance, and management are as follows:

Jamsyar's Shares Ownership



Ikhtisar Kinerja Keuangan Jamsyar

Financial Highlights of Jamsyar

Rp-juta IDR-million	2017 (Rp)/(IDR)	2016 (Rp)/(IDR)
Pendapatan <i>Income</i>	73.908.738.231	48.076.164.586
Beban Usaha <i>Operating Expense</i>	40.918.702.236	29.654.284.147
Laba Bersih <i>Net Profit</i>	11.189.244.746	6.810.472.938
Laba Komprehensif <i>Comprehensive Profit</i>	14.352.353.247	5.225.377.938
Aset <i>Assets</i>	469.331.790.157	354.758.611.638
Liabilitas <i>Liabilities</i>	195.472.508.229	93.889.588.369
Ekuitas <i>Equities</i>	273.859.281.928	260.869.023.269

Manajemen Jamsyar

Jamsyar Management

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		
Komisaris Utama	Bakti Prasetyo	<i>President Commissioner</i>
Komisaris Independen	M. Syakir Sula	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris	Aribowo	<i>Commissioner</i>
Direksi <i>Directors</i>		
Direktur Utama (Plh)	Gatot Suprabowo	<i>Acting President Director</i>
Direktur Bisnis	Gatot Suprabowo	<i>Director of Business</i>
Direktur Operasional	Achmad Sonhadji	<i>Director of Operational</i>
Direktur Keuangan, SDM & Umum	Endang Sri Winarni	<i>Director of Finance, HR & General Affair</i>

Struktur Grup

Group Structure



Kronologis Penerbitan Saham

Chronology of Share Listing

Hingga tanggal 31 Desember 2017 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan bukan merupakan Perseroan Terbatas (PT) dan berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa dimana saham Perusahaan dicatatkan.

As of 31 December 2017 and the date of submission of this data / information, the Company is not a Limited Liability Company (PT) and is a Public Company (Perum). The Company also does not conduct an Initial Public Offering and does not trade its shares in any stock exchange. Therefore, there is no information related to the year of share issuance, number of shares, shares' nominal value, shares' offering price for each corporate action, number of shares listed after each corporate action, and the name of the stock exchange where the Company is listed.

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Listing

Hingga tanggal 31 Desember 2017 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan tidak menerbitkan efek apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of 31 December 2017 and the date of submission of this data/information, the Company does not issue any securities. Accordingly, there is no information relating to other securities name, issuance year of other securities, interest rate/return of other securities, and maturity date of other securities; offering value of other securities; name of stock exchange where other securities are listed; and securities ratings.

Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Institution and Profession

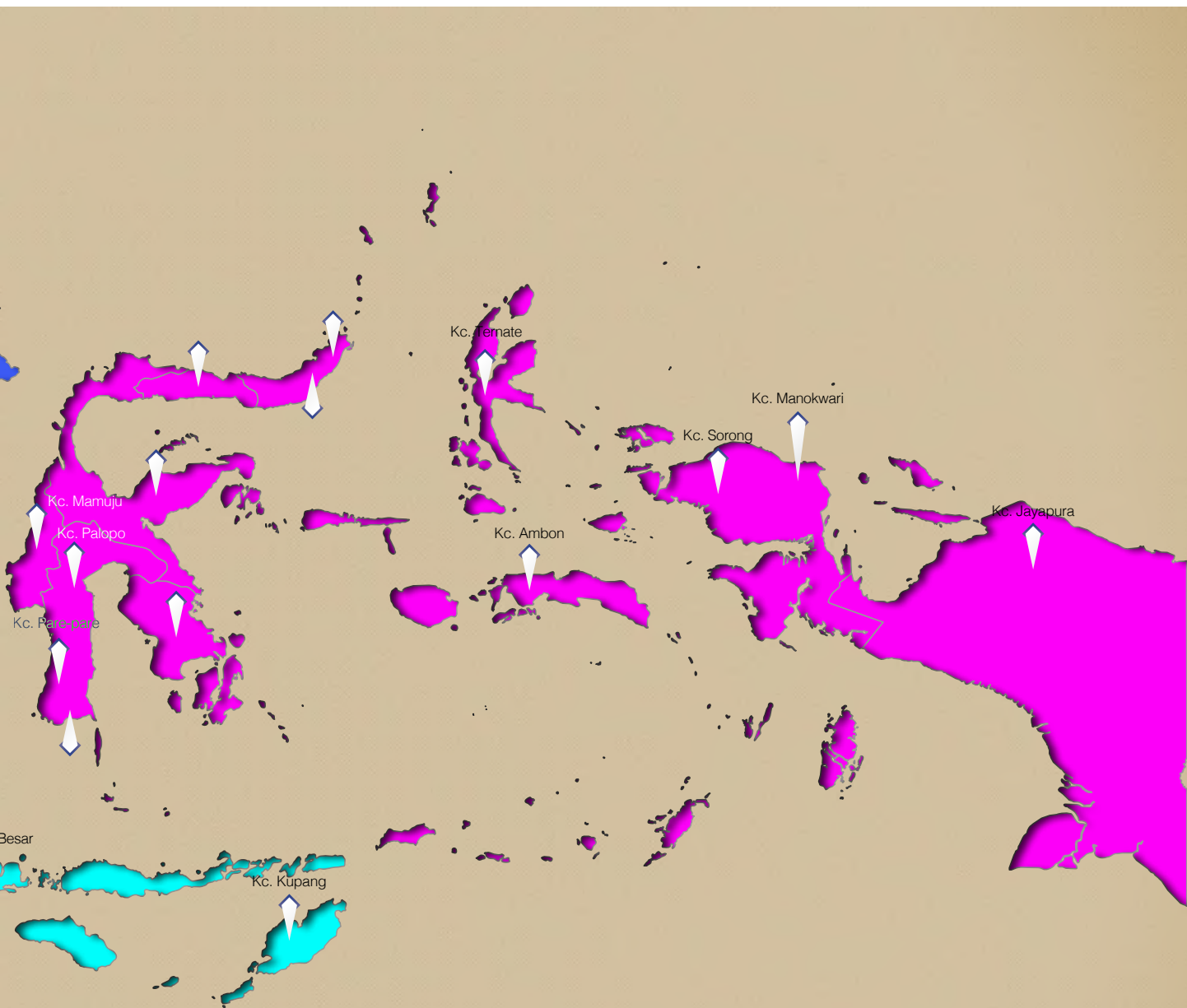
Lembaga/Profesi Penunjang <i>Supporting Profession or Institution</i>	Nama dan Alamat <i>Name and Address</i>	Jenis dan Bentuk Jasa <i>Types and Forms of Services</i>	Biaya <i>Expenses</i>	Periode Penugasan <i>Period of Assignment</i>
Ekspedisi surat <i>Mail expedition</i>	PT Pos Indonesia Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta 10710	Jasa ekspedisi surat menyurat <i>Correspondence and expedition services</i>	Sesuai pemakaian <i>Depends on the Usage</i>	9 Juni 2017 – 8 Juni 2018 <i>June 9, 2017 – June 8, 2018</i>
Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) <i>Indonesian Securities Rating Agency (Pefindo)</i>	PT Pefindo Biro Kredit Panin Tower Senayan City 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270	Jasa pengelola informasi perkreditan <i>Credit information management services</i>	Biaya keanggotaan: Rp100.000.000/tahun Biaya Data: Score & Report Individu Rp5.500/laporan Score & Report Perusahaan Rp12.000/laporan Alert Rp1.200/debitur Membership Fee: IDR100,000,000/year Data Cost: Individual Score & Report IDR5,500 /report. Company Score & Report IDR12,000/report. Alert IDR1,200/debtor	6 November 2017 – 6 November 2019 <i>November 6, 2017 – November 6, 2019</i>
Penyedia Jasa Aplikasi Indonesia Bond Price Agency <i>Application Provider Indonesian Bond Price Agency</i>	PT Penilai Harga Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lt. GF Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190	Penyedia jasa aplikasi Indonesia Bond Price Agency <i>Application Provider Indonesian Bond Price Agency</i>	Rp9.900.000 <i>IDR9,900,000</i>	22 Februari 2017 – 21 Februari 2019 (Berlangganan) <i>February 22, 2017 – February 21, 2019 (Subscribed)</i>
Jasa konsultan penyusunan penyempurnaan pedoman pengadaan barang dan jasa <i>Consulting services for the improved preparation of the procurement guidelines</i>	PT Prima System Integrated Jl. Kemang Raya No.4, RT.11/RW.1, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12730	Jasa penyusunan penyempurnaan pedoman pengadaan barang dan jasa <i>Consulting services for the improved preparation of the procurement guidelines</i>	Rp245.000.000 <i>IDR245,000,000</i>	20 Januari – 20 Maret 2017 <i>January 20 – March 20, 2017</i>
Konsultan pendampingan SMK3 <i>SMK3 mentoring consultant</i>	PT Sepro Indotama Jl. Raya Lenteng Agung No.37E RT.1/RW.2, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12610	Jasa Konsultan Pendampingan SMK3 <i>SMK3 Mentoring Consulting Service</i>	Rp230.000.000 <i>IDR230,000,000</i>	23 Januari 2017 – 28 Februari 2018 <i>January 23, 2017 – February 28, 2018</i>
Konsultan review kebijakan akuntansi <i>Accounting policies reviews consultant</i>	KAP HMR Jl. Prof. Dr. Soepomo. SH No.178A Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870	Jasa konsultan review kebijakan akuntansi <i>Accounting policies reviews consulting service</i>	Rp495.000.000 <i>IDR495,000,000</i>	27 Maret – 10 Juli 2017 <i>March 27 – July 10, 2017</i>
Jasa konsultan standar ISO 9001:2015 <i>ISO 9001: 2015 Standards Consulting Service</i>	PT Sapta Surya Nusabakti Graha Mustika Ratu Lantai 5 5F1.5 #505 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-79 Jakarta 12870	Jasa konsultan standar ISO 9001:2015 <i>ISO 9001: 2015 Standards Consulting Service</i>	Rp58.905.000 <i>IDR58,905,000</i>	Mei 2017 – Juli 2018 <i>May 2017 – July 2018</i>

Lembaga/Profesi Penunjang <i>Supporting Profession or Institution</i>	Nama dan Alamat <i>Name and Address</i>	Jenis dan Bentuk Jasa <i>Types and Forms of Services</i>	Biaya <i>Expenses</i>	Periode Penugasan <i>Period of Assignment</i>
Konsultan K3 <i>K3 Consultant</i>	PT Mega Persada Utama Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang 1 Jakarta, 13420	Jasa sertifikasi instalasi proteksi kebakaran, motor diesel, listrik, lift dan penyalur petir <i>Fire protection installations, diesel motors, electricity, elevators, and lightning distribution certification services</i>	Rp35.200.000 <i>IDR35,200,000</i>	28 Juli – 27 Agustus 2017 <i>July 28 – August 27, 2017</i>
Kantor Akuntan Publik (KAP) <i>Public Accountant Office</i>	KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Palma Tower 18th Floor Lot. F & G, Jl. RA. Kartini II-S Kav. 06, RT.6/RW.14, Pd. Pinang, Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310	Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 Perum Jamkrindo <i>Perum Jamkrindo's Financial Statement Audit Service for the Fiscal Year 2017</i>	Rp386.000.000 <i>IDR386,000,000</i>	31 Agustus 2017 – 10 Februari 2018 <i>August 31, 2017 – February 10, 2018</i>
Konsultan perhitungan alokasi Joint Cost dalam pelaporan hutang piutang dana kur dan Non kur <i>Consultant for the Calculation of Joint Cost allocation in the reporting of receivables and payables of KUR and Non-KUR funds</i>	KAP HMR Jl. Prof. Dr. Soepomo. SH No.178A Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870	Konsultan perhitungan alokasi Joint Cost dalam pelaporan hutang piutang dana kur dan . kur <i>Consultant for the Calculation of Joint Cost allocation in the reporting of receivables and payables of KUR and Non-KUR funds</i>	Rp205.700.000 <i>IDR205,700,000</i>	1 Agustus 2017 – 10 Februari 2018 <i>August 1, 2017 – February 10, 2018</i>
Konsultan perencanaan pekerjaan perbaikan Gedung Jamkrindo <i>Consultant for the repair work planning of Jamkrindo Building</i>	PT Bumi Madani Jl. Tebet Raya No. 66 B Lt. 2, RT. 002/RW. 004, Tebet Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Jasa konsultan perencanaan pekerjaan perbaikan Gedung Jamkrindo <i>Consultant for the repair work planning of Jamkrindo Building</i>	Rp37.000.000 <i>IDR37,000,000</i>	17 Oktober 2017 – penyelesaian proses perbaikan <i>October 17, 2017 – in the process</i>
Konsultan rekonsiliasi data operasional dengan data akuntansi atas saldo IJP dan turunannya <i>Consultant for the reconciliation of operational data with accounting data on the balance of IJP and its derivatives</i>	KAP HMR Jl. Prof. Dr. Soepomo. SH No.178A Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870	Jasa konsultan rekonsiliasi data operasional dengan data akuntansi atas saldo IJP dan turunannya <i>Consultant for the reconciliation of operational data with accounting data on the balance of IJP and its derivatives</i>	Rp165.000.000 <i>IDR165,000,000</i>	November 2017 – Februari 2018 <i>November 2017 – February 2018</i>
Jasa perhitungan valuasi imbalan pasca kerja karyawan Perum Jamkrindo per 31 Desember 2017 <i>Perum Jamkrindo's employee's post-employment benefits as of December 31, 2017 valuation service</i>	PT Aktuaria Praptasentosa Gunajasa Jl. Cikini Raya No.97, RT 14/RW 5, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330	Jasa perhitungan valuasi imbalan pasca kerja karyawan Perum Jamkrindo per 31 Desember 2017 <i>Perum Jamkrindo's employee's post-employment benefits as of December 31, 2017 valuation service</i>	Rp8.800.000 <i>IDR8,800,000</i>	27 Desember 2017 – 4 Januari 2018 <i>December 27, 2017 – January 4, 2018</i>

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices





Kantor Pusat Perum Jamkrindo
Head Office of Perum
Jamkrindo

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telp: +62 21 6540335
Fax: +62 21 6540344, 6540348
Website: www.jamkrindo.co.id
Email: sekper@jamkrindo.co.id

Entitas Anak
Subsidiaries

**PT Penjaminan Jamkrindo
Syariah**

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Lantai 7
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telp: +62 21 6540386
Fax: +62 21 6540389
Website: www.jamkrindosyariah.co.id
Email: info@jamkrindosyariah.co.id

KANTOR WILAYAH (KANWIL)
REGIONAL OFFICE

Kanwil Regional Office	Alamat Address
I Medan	Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan - 20111
II Palembang	Jl. Residen Abdul Rozak No.188-189 Kelurahan Kalidoni Palembang
III DKI Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta
IV Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722, Gedebage, Bandung, Jawa Barat; Telp: 022-7801890
V Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A, Semarang, Jawa Tengah
VI Surabaya	Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2-3, Surabaya, Jawa Timur; Telp: 031-8685567
VII Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76, Denpasar, Bali; Telp: 0361-286854
VIII Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210-B, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
IX Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112, Sulawesi Selatan; Telp: 0411-875836

KANTOR CABANG KHUSUS
JAKARTA SPECIAL BRANCH OFFICE

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Alamat Address
Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: 021-65868278

KANTOR CABANG
BRANCH OFFICE

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
I	1 Medan	Jl. Sei Serayu No. 40, Medan, Sumatera Utara; Telp: (061)4152827, 4155767, Fax: (061) 4156775
	2 Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No 150, Kel. Suka Ramai, Pekanbaru 28113, Riau; Telp: 0761-854311, 854870; Fax: 0761-848801
	3 Aceh	Jl. Syah Kuala No.10 A-B, Kel. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh 23126, DI Aceh
	4 Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C, Padang, Sumatera Barat; Telp: 0751-7050598
	5 Tanjung Pinang	Komp. Ruko Pamedan, Jl. Raja Ali Haji No. 6, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Telp: 0771-316919
	6 Batam	Jl. Raja Ali Haji Fisabilillah, Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No.9, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau; Telp: 0778-7495993
	7 Balige	Jl. Siliwangi No. 08 Balige, Tobasa, Sumatera Utara; Telp: 0632-21722

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office		Alamat Address
II	8	Palembang	Jl. Residen Abdul Rozak No. 188-189 Kelurahan Kalidoni Palembang
	9	Jambi	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi
	10	Bengkulu	Jl. Ahmad Yani Rt. 004/Rw 001 No. 28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-38119
	11	Bandar Lampung	Jl. Teuku Umar No. 10 E-F, Kedaton, Bandar Lampung 35141, Lampung; Telp: 0721-778511
	12	Pangkal Pinang	Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang - 33136
III	13	DKI Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: 021-6540409
	14	Pontianak	Jl. Teuku Umar, Komp. Perkantoran Pontianak Mall Blok B/24, Pontianak, Kalimantan Barat; Telp: 0561-749095
	15	Serang	Jl. Jendral A. Yani No. A1, Serang 42117, Banten; Telp: 0254-228999
	16	Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1, Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322, Banten
IV	17	Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722, Gedebage, Bandung, Jawa Barat; Telp: 022-7801890
	18	Cirebon	Jl. Sudarsono No. 10 B, Kota Cirebon, Jawa Barat
	19	Purwakarta	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No. 55 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa barat
	20	Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No. 90 Rt. 05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113
	21	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F, Kel. Lengkongsari Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat; Telp: 0265-314169
V	22	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A, Semarang, Jawa Tengah
	23	Yogyakarta	Jl. Parangtritis Km. 1 No. 96, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergansan, Yogyakarta; Telp: 0274-375989
	24	Solo	Jl. Agus Salim No. 27 A, Surakarta, Jawa Tengah; Telp: 0271-719807
	25	Purwokerto	Jl. Prof Suharso No. 1186 A, Purwokerto, Jawa Tengah; Telp: 0281-6572555
	26	Kudus	Jl. A. Yani Komplek KAI A-4, Kudus, Jawa Tengah; Telp: 0291-430757
	27	Pekalongan	Ruko The Luxor Jl. Ahmad Yani No. 02 Wiradesa, Pekalongan
VI	28	Surabaya	Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2-3, Surabaya, Jawa Timur
	29	Kediri	Jl. Letjend. S. Parman No. 47, Kediri, Jawa Timur; Telp: 0354-7418826
	30	Banyuwangi	Jl. Adisucipto No. 104 B, Banyuwangi, Jawa Timur; Telp: 0333-418140
	31	Malang	Jl. Kaliurang No. 37 C, Kel. Rampalclaket, Kec. Klojen, Malang, Jawa Timur; Telp: 0341-363962
	32	Madiun	Jl. S. Parman Ruko Suncity Festival B-8, Madiun, Jawa Timur; Telp: 0351-4472250
VII	33	Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76, Denpasar, Bali; Telp: 0361-286854
	34	Mataram	Ruko Airlangga Square No. 3 Jl. Airlangga Mataram 83125
	35	Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82, Kec. Sumbawa Besar, NTB; Telp: 0371-2629239
	36	Kupang	Jl. Bundaran PU, Ruko TDM II No. 4, Oebufu, Kupang, NTT; Telp: 0380-8553899
VIII	37	Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117
	38	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 17 D Kuripan Banjarmasin-70236
	39	Palangkaraya	Jl. Christopel Mihing No. 31, Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Telp: 0536-3226895
	40	Tarakan	Jl. Cendrawasih RT. 004, Karanganyar Pantai, Tarakan, Kalimantan Utara; Telp: 0551-30448
	41	Balikpapan	Jl. Mayjen Sutoyo No. 26 C, Balikpapan, Kalimantan Timur; Telp: 0542-791908

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
IX	42 Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140, Makassar, Sulawesi Selatan; Telp: 0411-873031
	43 Gorontalo	Jl. HB Hasin (KH Agus Salim) No. 222, Gorontalo; Telp: 0435-828003
	44 Mamuju	Jl. Marthadinata No.11, Mamuju, Sulawesi Selatan; Telp: 0426-2324878
	45 Ambon	Jl. Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126
	46 Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo-Ubo, Kel. Tabona, Ternate, Maluku Utara; Telp: 0921-3122739
	47 Jayapura	Pusat Bisnis Jayapura, Ruko Pasifik Permai Blok H No. 17, Kel. Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Papua; Telp: 0967-524424
	48 Manokwari	Jl. Trikora, Wosi, Manokwari, Papua Barat; Telp: 0986-214184
	49 Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C, Palu 94121, Sulawesi Tengah; Telp: 0451-4131812
	50 Kendari	Jl. La Ode Hadi No 56 B, Kendari 93118, Sulawesi Tenggara; Telp: 0401-3196780
	51 Manado	Jl. R.E. Marthadinata No. 43, Manado, Sulawesi Utara; Telp: 0431-865194, 865198
	52 Bitung	Jl. Sam Ratulangi No. 1, Bitung, Sulawesi Utara; Telp: 0438-35939
	53 Pare-pare	Jl. Andi Mappatola No. 30-C, Parepare, Sulawesi Selatan; Telp: 0421-2914592
	54 Palopo	Jl. Batara Lattu No. 74, Palopo 91913, Sulawesi Selatan; Telp: 0471-23006
	55 Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km. 9, Sorong, Papua Barat; Telp: 0951-329081

KANTOR UNIT PELAYANAN (KUP)

SERVICES UNIT OFFICE (KUP)

Kanwil Regional Office	Kantor Unit Pelayanan Services Unit Office	Alamat Address
I	1 Dumai	Jl. Jend. Sudirman No. 391, Kota Dumai, Riau; Telp: 0765-439037
	2 Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No. 04 Rantau Prapat, Sumatera Utara
	3 Mandailing Natal	Willem Iskandar No. 81 Panyabungan - 22913
II	4 Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso RT 001 No. 366, Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan; Telp: 0733-3281182
III	5 Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor, Jawa Barat; Telp: 0251-7564211
	6 Cibinong	Ruko Cibinong City Center, Jl. Tegar Beriman 1 Blok A No. 29, Cibinong, Bogor, Jawa Barat; Telp: 021-29335250
	7 Bekasi	Komplek Ruko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok A Nomor 7Jl.Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan BekasiTimur, Kotamadya Bekasi
IV	8 Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C, RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat
V	9 Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah
	10 Cilacap	Jl Raya Sudirman, Cilacap, Jawa Barat
VI	11 Surabaya Kota	Jl. Kusuma Bangsa No. 86 B, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur
	12 Pamekasan	Jl Jokotole No.26, Barurambat Kota, Pamekasan, Jawa Timur; Telp: 0324-3510118
	13 Jember	Jl. Gajah Mada No. 187 Jember, Jawa Timur; Telp: 0331-4431044
	14 Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.11 A kabupaten Bojonegoro
VIII	15 Pangkalan Bun	Jl. Iskandar, Arut Selatan, Kotawaringin Barat 74113, Kalimantan Tengah
IX	16 Watampone	Jl. Ahmad Yani No. 29 B, Kel. Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Watampone, Sulawesi Selatan; Telp: 0481-2921479

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on Company Website

Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id. Situs Web ini berisi informasi seputar korporasi Perusahaan. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

The Company has an official website at www.jamkrindo.co.id. This website contains information about the Company's corporation. This website becomes an openly accessible portal, with the purpose of providing comprehensive information about the Company to a wide audience

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Description
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu <i>Shareholders information up to the individual end owner</i>	v	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu telah tersedia di situs web Perusahaan. <i>Shareholder information to the most-updated individual owner is available on Company website.</i>
Isi Kode Etik <i>Contents of Code of Ethics</i>	v	Informasi terkait isi Kode Etik telah tersedia di situs web Perusahaan. <i>Information regarding the Code of Ethics is available on Company website.</i>
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) <i>Separate annual financial statements (the last 5 years)</i>	v	Informasi laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) telah tersedia di situs web Perusahaan. <i>Information regarding Annual Financial Report from the 5 years is available on Company website.</i>
Profil Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Directors Profile</i>	v	Profil Dewan Pengawas dan Direksi telah tersedia di situs web Perusahaan. <i>Profiles of the Board of Trustee and Directors are available on Company website.</i>

v: tersedia pada situs web Perusahaan

x: belum tersedia pada situs web Perusahaan

v: available on the Company website

x: not available on the Company website

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Education and/or Training of Board of Supervisors, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>				
Subandriyo	Pelatihan Luar Negeri <i>Overseas Training</i>	Credit Supplementation System's Accomplishment and It's Outlook	Taiwan, 13-17 November 2017 <i>Taiwan, November 13-17, 2017</i>	Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC Conference)- Taiwan SMEG
Noor Ida Khomsiyati	Pelatihan Luar Negeri <i>Overseas Training</i>	Credit Supplementation System's Accomplishment and It's Outlook	Taiwan, 13-17 November 2017 <i>Taiwan, November 13-17, 2017</i>	Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC Conference)- Taiwan SMEG
Diah Natalisa	Pelatihan Luar Negeri <i>Overseas Training</i>	Credit Supplementation System's Accomplishment and It's Outlook	Taiwan, 13-17 November 2017 <i>Taiwan, November 13-17, 2017</i>	Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC Conference)- Taiwan SMEG
Direksi <i>Directors</i>				
Diding S. Anwar (Direktur Utama- digantikan) <i>Diding S. Anwar (President Director- replaced)</i>	Pendidikan & Sertifikasi Luar Negeri <i>Overseas Education & Certification</i>	The Malaysian Insurance Institute-Fellowship of the Malaysian Insurance Institute (FMII) Senior Status Route	Malaysia, 1-2 April 2017 <i>Malaysia, April 1-2, 2017</i>	Malaysian Insurance Institute
Nanang Waskito (Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan- digantikan) <i>Nanang Waskito (Director of HRM, General & Compliance- replaced)</i>	Pendidikan & Sertifikasi Luar Negeri <i>Overseas Education & Certification</i>	The Malaysian Insurance Institute-Fellowship of the Malaysian Insurance Institute (FMII) Senior Status Route	Malaysia, 1-2 April 2017 <i>Malaysia, April 1-2, 2017</i>	Malaysian Insurance Institute
Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan- menggantikan) <i>Sulis Usdoko (Director of HRM, General & Compliance- replaced)</i>	Sertifikasi <i>Certification</i>	<i>Certified Professional Human Resources</i>	Jakarta, 16 - 19 Oktober 2017 <i>Jakarta, October 16-19, 2017</i>	Quantum Quality International

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i>	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i>	Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>				
Jehezkiel Marquee Abdul Bari Fara Prastika	Sosialisasi/ Penyuluhan <i>Socialization/ Counseling</i>	Sosialisasi /Penyuluhan tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Sosialisasi tentang HIV/AIDS" <i>"Socialization/Counseling on Prevention, Eradication of Abuse and Illicit Circulation of Drugs (P4GN) and Socialization on HIV / AIDS"</i>	27 Januari 2017 <i>January 27, 2017</i>	Perum Jamkrindo
Lulu Drusyita	In House Training	Strategi Cerdas Menjaga Reputasi Perusahaan <i>Smart Strategies in Maintaining Corporate Reputation</i>	3-4 Februari 2017 <i>February 3-4, 2017</i>	Forum Humas BUMN <i>Public Relations Forum for SOEs</i>
Levinda Juliana Lulu Drusyita Anzil Firdausi Nuzula	Seminar	Penyakit Stroke dan Mini Medical Check Up <i>Health Seminar on Stroke Disease and Mini Medical Check Up</i>	24 Februari 2017 <i>February 24, 2017</i>	Perum Jamkrindo
Abdul Bari Ringgie Galih Sugestie	In House Training	Financial Management for Non Financial Manager	16-18 Maret 2017 <i>March 16-18, 2017</i>	Perum Jamkrindo & LMFEUI
Abdul Bari	Pelatihan <i>Training</i>	Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Perum Jamkrindo <i>ISO 9001 Certification: 2015 Perum Jamkrindo</i>	20 Maret 2017 <i>March 20, 2017</i>	Perum Jamkrindo & Sucofindo
Anggrenei Andini Sefriyani	Workshop	Beauty Class PAC Martha Tilaar	24 Maret 2017 <i>March 24, 2017</i>	Perum Jamkrindo & PAC Martha Tilaar
Dwi Putra Raneldo K. Rusdi Saleh	Sertifikasi <i>Certification</i>	ISO 9001:2015 Penjaminan & Pelayanan Klaim <i>ISO 9001 Certification: 2015 Guarantee & Claim Services</i>	31 Juli 2017 <i>July 31, 2017</i>	PT Sapta Surya Nusabhakti
Lulu Drusyita	Seminar	Strategy PR Planning & Programming	27-29 Juli 2017 <i>July 27-29, 2017</i>	FHBUMN
Dwi Suwandono	Pelatihan <i>Training</i>	Basic First Aid (P3K)	11 Agustus 2017 <i>August 11, 2017</i>	Perum Jamkrindo
Mutiara Prasiwi Chaerunisa	Pelatihan <i>Training</i>	Microsoft Office Excel 2013 Advanced	18 Agustus 2017 <i>August 18, 2017</i>	PT Iverson Technology
Ringgie Galih Sugestie Shahnaz Fakhrial Al-Hakim		Diklat Jurnalistik Terpadu Angkatan 10 <i>Integrated Journalism Training Batch 10</i>	26-28 September 2017 <i>September 26-28, 2017</i>	Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA (LPJA) <i>ANTARA Journalism Educational Institution (LPJA)</i>
Angga Moshanto Pratama	Seminar	Aviation Security & Awareness	18 Oktober 2017 <i>October 18, 2017</i>	PT Pratiha Titiannusantara

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Mutiara Prasiwi Chaerunisa Rudiman Pressi Hapsari Fadlilah Dzikri Maulana Rully Arieffandy	Pelatihan Training	Staff Development Program	25 September-04 November 2017 September 25-November 4, 2017	Divisi MSDM HRM Division
Lulu Drusyita Anzil Firdausi Nuzula	Pelatihan Training	Jurnalistik Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA Journalism Training in the ANTARA Journalism Educational Institution	28-30 November 2017 November 28-30, 2017	ANTARA
Abdul Bari	Sosialisasi Socialization	MR	24 November 2017 November 24, 2017	Perum Jamkrindo
Nastiti Pandanwangi		Interpretasi & APC KPKU	28-30 November 2017 November 28-30, 2017	Forum Ekselen BUMN
Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit				
Aditya Putra Darmawan Dimas S Ardhi Asep Ginanjar Cahya Gumilar Faoziah Ulfa Bernie Soebekti Muhammad Ilham Andreas Theodorus Mokodaser Arif Syachroni Andik Sugiarto Laila Wijayanti Rinjani Yusni Maharjanti Aldhy Haryono Fachrial Muhammad Leonard Gustav Qhadafi Laurdes Sinurat Andi Aldino Chandra Emmerisa br. Sembiring Michael Ranap Simanjuntak Faisal Arief Sentosa	In House Training	QIA(Qualified Internal Auditor) Sertifikasi Tingkat Lanjutan I QIA (Qualified Internal Auditor) Advanced Level Certification I	9-14 Januari 2017 January 9-14, 2017	Perum Jamkrindo & YPIA

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i>	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i>	Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Aditya Putra Darmawan Dimas S Ardhi Asep Ginanjar Cahya Gumilar Faoziah Ulfa Bernie Soebekti Muhammad Ilham Andreas Theodorus Mokodaser Arif Syachroni Andik Sugianto Laila Wijayanti Rinjani Yusni Maharjanti Aldhy Haryono Fachrial Muhammad Leonard Gustav Q. Laurdes Sinurat Andi Aldino Chandra Emmerisa br. Sembiring Michael Ranap Simanjuntak Faisal Arief Sentosa	In House Training	QIA (Qualified Internal Auditor) Sertifikasi Tingkat Lanjutan II <i>QIA (Qualified Internal Auditor) Advanced Level Certification II</i>	16 – 21 Januari 2017 <i>January 16–20, 2017</i>	Perum Jamkrindo & YPIA
Faisal Arief Sentosa Arif Syachroni Andreas Theodorus Mokodaser	Sosialisasi <i>Socialization</i>	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Sosialisasi tentang HIV/AIDS" <i>"Socialization/Counseling on Prevention, Eradication of Abuse and Illicit Circulation of Drugs (P4GN) and Socialization on HIV / AIDS"</i>	27 Januari 2017 <i>January 27, 2017</i>	Perum Jamkrindo
Bernie Soebekti Faoziah Ulfah Fatmawati	Pelatihan <i>Training</i>	MAP SDP Batch VI	6 – 9 Februari 2017 <i>February 6–9, 2017</i>	Perum Jamkrindo
Bernie Soebekti Faoziah Ulfah Fatmawati	Pelatihan <i>Training</i>	Analisis Kredit SDP Batch VI	10-14 Februari 2017 <i>February 10-14, 2017</i>	Perum Jamkrindo LPPI
Bernie Soebekti Faoziah Ulfah Fatmawati	Pelatihan <i>Training</i>	Service Excellence & Personal Grooming SDP Batch VI	16 Februari 2017 <i>February 16, 2017</i>	Perum Jamkrindo NLIMIT
Arry Andru Palapi	Workshop	Inpres No.10 Tahun 2016 & Standar ISO 37001 Untuk BUMN <i>Presidential Instruction No.10 Year 2016 & Standard ISO 37001 For SOEs</i>	22 Februari 2017 <i>February 22, 2017</i>	Asia Anti Fraud
Aditya Putra Darmawan	In House Training	Financial Management for Non Financial Manager	16-18 Maret 2017 <i>March 16-18, 2017</i>	Perum Jamkrindo & LMFEUI

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Untung Heri Sukariyanto	Pelatihan Training	Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Perum Jamkrindo ISO 9001 Certification: 2015 Perum Jamkrindo	20 Maret 2017 March 20, 2017	Perum Jamkrindo & Sucofindo
Faoziah Ulfah Fatmawati	Workshop	Hijab Class Shafira	29 Maret 2017 March 29, 2017	Perum Jamkrindo & Shafira Hijab
Arry Andru Palapi	Pelatihan Training	Leadership Endurance Test (LET) Batch IV	31 Maret-1 April 2017 March 31–April 01, 2017	Perum Jamkrindo dan PT Dirga
Kartono Laurdes Sinurat Asep Ginanjar Cahya Gumilar	Workshop	Letter of Credit (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Workshop on Letter of Credit (L/C) and Domestic Letters of Credit (SKBDN)	27 April 2017 April 27, 2017	Perum Jamkrindo & Bank Mandiri
Untung Heri Sukariyanto	Pelatihan Training	"Ethics in Business"	18-19 Mei 2017 May 18–19, 2017	Perum Jamkrindo & Malaysian Insurance Institute
Arry Andru Palapi Asep Ginanjar Cahya Gumilar Andreas Theodorus Mokodaser	Workshop	Implementasi Manajemen Risiko Risk Management Implementation	22 Mei 2017 May 22, 2017	Perum Jamkrindo
Dimas Setio Ardhi	Sosialisasi Socialization	Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Persiapan Kesiagaan Tanggap Darurat "Socialization of Occupational Safety and Health & Emergency Preparedness"	26 Mei 2017 May 26, 2017	Perum Jamkrindo
Untung Heri Sukariyanto	Pelatihan Training	Top Executive Capacity Building Program – Perum Jamkrindo Batch II	29–31 Mei 2017 May 29–31, 2017	Perum Jamkrindo & LM FE UI
Aditya Putra Darmawan Asep Ginanjar Cahya Gumilar Rahayudi	Sertifikasi Certification	ISO 9001:2015 Penjaminan & Pelayanan Klaim ISO 9001 Certification: 2015 Guarantee & Claim Services	31 Juli 2017 July 31, 2017	PT. Sapta Surya Nusabhakti
Asep Ginanjar Cahya Gumilar	Pelatihan Training	Basic First Aid (P3K)	11 Agustus 2017 August 11, 2017	Perum Jamkrindo
Aldhy Haryono Fachrial	Pelatihan Training	Microsoft Office Excel 2013 Advanced	18 Agustus 2017 August 18, 2017	PT. Iverson Technology
Untung Heri Sukariyanto	Workshop	Fraud Examiners and Detection Forensic Data Analytics Aproach	6–7 Oktober 2017 October 6–7, 2017	ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
Untung Heri Sukariyanto Bernie Soebekti		National Conference Institute Internal Auditor	10–11 Oktober 2017 October 10–11, 2017	Institute Internal Audit (IIA)

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i>	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i>	Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Untung Heri Sukariyanto Dadang Ary Aviyanto	Seminar	Round Table Discussion (RTD) dengan tema "Tantangan Auditor Internal Indonesia sebagai Trusted Advisor di Perusahaan" <i>Round Table Discussion (RTD) with the theme "Challenges of Indonesian Internal Auditor as Trusted Advisor of the Company"</i>	26 Oktober 2017 <i>October 26, 2017</i>	Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia <i>Professional Association of Indonesian Internal Auditor</i>
Untung Heri Sukariyanto	Seminar	National Call for Paper Seminar & National Anti Fraud Conference 2017"	6-7 November 2017 <i>November 6-7, 2017</i>	ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
Kartono	Sertifikasi <i>Certification</i>	Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>	13-16 November 2017 <i>November 13-16, 2017</i>	LPMA Trisakti
Michael Ranap Simanjuntak Andi Aldino Chandra Faisal Arief Sentosa	Pelatihan <i>Training</i>	Staff Development Program	25 September-04 November 2017 <i>September 25-November 4, 2017</i>	Divisi MSDM <i>HRM Division</i>
Untung Heri Sukariyanto	Sosialisasi <i>Socialization</i>	Sosialisasi MR <i>RM Socialization</i>	28 November 2017 <i>November 28, 2017</i>	Perum Jamkrindo
Agus Mirazul Fajar Kartono		Interpretasi & APC KPU	28-30 November 2017 <i>November 28-30, 2017</i>	Forum Ekselen BUMN
Kartono Laurdes Sinurat Andi Aldino Chandra Rinjani Yusni Maharjanti		Bimtek Teknik dan Strategi Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan dalam Pengadaan <i>Technical guidance on Fraud Detection and Prevention Techniques in Procurement</i>	14-15 Desember 2017 <i>December 14-15, 2017</i>	Pusat Studi Pengembangan Informasi Nasional <i>National Center for Information Development Studies</i>





ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Kondisi Ekonomi Indonesia Tahun 2017

Indonesia's Economic Condition in 2017

Ekonomi global mengalami penguatan pada tahun 2017. Membaiknya harga komoditas dunia, menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi global yang ditandai dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi global.

The global economy was stronger in 2017. Improved world commodity prices as one of the factors driving the growth of the global economy is marked by improved economic growth in developed countries which becomes the motor of global economic growth.

Tahun 2017, Tiongkok kembali mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2017, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 6,7%. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini terhindar dari risiko penurunan laju pertumbuhan ekonomi dengan mengimplementasikan secara lebih gradual program *rebalancing* ekonomi, yang memfokuskan pertumbuhan pada permintaan domestik.

China again experienced positive growth in 2017, with economic growth of 6.9% which is higher than the previous year's growth of 6.7%. The world's second-largest economy is spared the risk of declining economic growth by implementing a more gradual economic rebalancing program, which focuses growth on domestic demand.

Demikian juga dengan Amerika Serikat (AS) yang pada tahun 2017 berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 1,6%.

Similarly, the United States (US) in 2017 managed a record economic growth of 2.3% or higher compared to the previous year's economic growth of 1.6%.

Lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,7% pada 2017. Prediksi tersebut mencerminkan meningkatnya momentum pertumbuhan ekonomi dunia dan ekspektasi dampak dari kebijakan pemangkasan pajak yang dilakukan Amerika Serikat (AS).

The International Monetary Fund (IMF) predicts global economic growth of 3.7% in 2017. The forecast reflects rising momentum of world economic growth and expectations of the impact of US tax-cutting policies.

Sejalan dengan membaiknya perekonomian global, ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh cukup baik. Sebagian besar indikator utama ekonomi nasional tahun 2017 berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa secara kumulatif nilai ekspor Indonesia periode Januari-Desember 2017 mencapai USD168,73 miliar atau meningkat 16,22% dibanding periode yang sama tahun 2016, sedangkan nilai impor sepanjang 2017 tercatat sebesar USD156.893,0 miliar. Dengan demikian, sepanjang 2017 Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) tahun 2017 mengalami surplus sebesar USD11,84 miliar.

In line with the improving global economy, Indonesia's economy in 2017 grew quite well. Most of the major indicators of the national economy in 2017 are in a better position than the previous year. Central Bureau of Statistics (BPS) stated that the cumulative value of Indonesia's exports from January to December 2017 reached USD168.73 billion, an increase of 16.22% over the same period in 2016, while import value throughout 2017 was recorded at USD156,893.0 billion. Thus, throughout 2017 Indonesia's Trade Balance (NPI) in 2017 had a surplus of USD11.84 billion.

Membaiknya NPI tahun 2017 merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang terealisasi sebesar 5,07%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya 5,02%. Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut juga ditopang oleh tingkat inflasi yang dapat dijaga pada *level* yang cukup rendah, yaitu 3,61% atau masih dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 4% ($\pm 1\%$) menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

The improvement in the NPI of 2017 is one of the factors driving the national economic growth which is realized by 5.07%, higher than the 5.02% in the previous year. Positive economic growth is also supported by the level of inflation which can be maintained at a low level of 3.61% or still within the target range of Bank Indonesia of 4% ($\pm 1\%$) sustains household consumption growth.

Pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, rendahnya harga

Inflation control between Bank Indonesia and the Government, both at central and regional levels, low import

impor dan terbatasnya konsumsi di tengah kekhawatiran penurunan daya beli masyarakat menjadi faktor utama terkendalinya inflasi di tahun 2017. Tekanan inflasi yang mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2017 menyebabkan BI melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan. *BI 7-Day Repo Rate* diturunkan sebesar 25 bps menjadi 4,50% di bulan Agustus 2017 dan 4,25% sebulan sesudahnya.

Realisasi investasi baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) juga mendukung perbaikan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang 2017 berhasil melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar Rp678,8 triliun.

Kualitas pembangunan ekonomi di Indonesia juga ditopang oleh kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini peringkat utang negara Indonesia sudah masuk kategori layak investasi oleh ketiga lembaga pemeringkat internasional setelah Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang negara Indonesia menjadi BBB-dengan *outlook* stabil pada tanggal 19 Mei 2017. Kenaikan ini menyusul perbaikan peringkat yang sebelumnya telah diberikan oleh lembaga pemeringkat Moody's dan Fitch. Peringkat kredit Moody's untuk Indonesia adalah Baa3 dengan *outlook* positif yang ditetapkan terakhir pada 8 Februari 2017. Sementara itu, dalam perkembangan terakhir di tahun 2017 Fitch menaikkan peringkat kredit untuk Indonesia satu *notch* menjadi BBB dengan *outlook* stabil pada tanggal 20 Desember 2017.

Sementara itu, kondisi pasar saham di Indonesia juga bergerak positif sepanjang tahun 2017. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang tahun 2017 berkali-kali mencatat rekor tertinggi. Dan pada penutupan perdagangan 29 Desember 2017, IHSG ditutup menguat menguat 41,60 poin ke posisi 6.355,65 dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Perkenomian Indonesia pada tahun 2018 diharapkan tumbuh lebih baik seiring dengan ekspektasi perbaikan ekonomi global. Pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,4%, sedikit membaik dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,2%. Selain itu, inflasi diharapkan lebih terkendali di *level* sekitar 3,5% dan Rupiah ditransaksikan sebesar 13.500 per US\$. Perbaikan ekonomi global juga diharapkan akan memberikan efek positif terhadap harga komoditas khususnya minyak mentah yang diproyeksikan bertahan di *level* USD48,0/barel pada tahun 2018.

prices and limited consumption amid fears of a decline in public purchasing power are the main factors of controlled inflation in 2017. Inflationary pressures that have declined since mid-2017 impacted BI to adjust against the benchmark interest rate. BI 7-Day Repo Rate was reduced by 25 bps to 4.50% in August 2017 and 4.25% a month thereafter.

The realization of investment from both domestic investment (PMDN) and foreign investment (PMA) also supports the improvement of Indonesia's economy. Based on data released by the Investment Coordinating Board (BKPM), total investment realization of Domestic Investment (PMDN) and Foreign Direct Investment (PMA) throughout 2017 is IDR692.8 trillion; This exceeded the target realization of domestic investment and FDI in 2017 of IDR678.8 trillion.

The quality of economic development in Indonesia is also supported by the confidence of foreign investors in the Indonesian economy. Currently, Indonesia's sovereign rating has been categorized as worthy of investment by three international rating agencies after Standard & Poor's (S & P) upgraded Indonesia's sovereign debt to BBB-with a stable outlook on May 19, 2017. This increase follows improvements in ratings previously given by rating agencies Moody's and Fitch. Moody's credit rating for Indonesia is Baa3 with a positive outlook set last on February 8, 2017. Meanwhile, in the latest developments in 2017 Fitch upgraded Indonesia's credit rating by one notch to BBB with a stable outlook on December 20, 2017.

Meanwhile, Indonesian stock market conditions also showed positive results throughout 2017. Composite Stock Price Index (IHSG) throughout 2017 repeatedly reached highest record. And at the close of trading on December 29, 2017, IHSG is closed 41.60 points higher at 6.355.65 and became the highest in history.

The Indonesian economy in 2018 is expected to grow better in line with expectations of global economic recovery. The government projected the Indonesian economy to grow by 5.4%, slightly improved compared to the target of economic growth in 2017 of 5.2%. In addition, inflation is expected to be controlled at around 3.5% and the Rupiah is traded at 13,500 per US \$. The global economic recovery is also expected to have a positive effect on commodity prices, especially crude oil which is projected to stay at USD48.0/ barrel by 2018.

KONTRIBUSI UMKM MENINGKAT

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia semakin penting dan strategis. Berbagai data menunjukkan bahwa UMKM berperan sangat dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.

Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015).

Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak di antara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 2016 hingga tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan (data UMKM 2015, 2016, 2017). Tahun 2017, jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit.

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerja sama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan.

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank BI, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada 2015, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.

INCREASED CONTRIBUTION OF SMES

The role of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) to the Indonesian economy is increasingly important and strategic. Various data show that SMEs play a very dominant role in encouraging national economic growth. SMEs have an important and strategic role in national economic development. In addition to its role in economic growth and employment, SMEs also performs a role in distributing development outcomes.

SMEs have also been proven to be not affected by the crisis. When the crisis hit in the period of 1997-1998, only SMEs were able to remain strong. Data from the Central Bureau of Statistics show that, after the 1997-1998 economic crisis, the number of SMEs did not decrease, it increased, even absorbing 85 million to 107 million workers until 2012.

So far, SMEs industry has contributed 57-60% Gross Domestic Product (PDB) and employment rate about 97% of all national workforce (SMEs Business Profile by LPPI and BI, 2015).

The number of business player in Indonesia's SMEs industry is higher than most countries, especially since 2014. The number of SMEs in Indonesia continues to increase from 2015 to 2017. The number of SMEs in Indonesia will continue to grow (SMEs data in 2015, 2016, 2017). By 2017, the number of SMEs is estimated to grow to more than 59,000,000 units.

SMEs industry has become the backbone of the Indonesian and ASEAN economies. Approximately 88.8-99.9% form of business in ASEAN is SMEs with labor absorption of 51.7 to 97.2%. SMEs have a proportion of 99.99% of the total entrepreneurs in Indonesia or 56.54 million units. Therefore, cooperation for the development and resilience of SMEs should take priority.

The development of SMEs potential in Indonesia cannot be separated from the banking support in the channeling of credit to the performers of SMEs. According to data from Bank Indonesia, every year credit given to SMEs is growing, although, in 2015, around 60%-70% of all sectors of SMEs do not have access to financing through banks.

Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5%, tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 15% dan pada akhir tahun 2018 sebesar 20%.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012, dan PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disertai ketentuan pendukungnya, yang mana dalam PBI dimaksud diwajibkan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM, secara bertahap mulai dari 5% pada tahun 2015 hingga mencapai 20% akhir tahun 2018.

PERAN INDUSTRI PENJAMINAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin menunjukkan perannya dalam perekonomian nasional. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional terus menunjukkan peningkatan.

Di balik meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian nasional terdapat peran industri penjaminan. Industri penjaminan membantu UMKM untuk mengakses dunia perbankan, khususnya dalam menyokong permodalan UMKM.

Tahun 2016, Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang menjadi tahapan penting dalam perkembangan industri penjaminan dan diharapkan akan semakin meningkatkan peran industri penjaminan dalam mendukung perkembangan UMKM.

Penguatan UMKM menjadi penting dalam meningkatkan fundamental ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang bergerak di sektor perdagangan khususnya pada industri UMKM jumlahnya lebih tinggi dibanding sektor lainnya, belum lagi daya serap tenaga kerja yang dihasilkan oleh sektor ini yang cukup signifikan. Untuk itu, perlu adanya dorongan dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, regulator, perbankan, dan lembaga penjaminan kredit untuk dapat berperan mengembangkan sektor UMKM ke arah yang lebih baik, sehingga menciptakan fondasi ekonomi berbasis kerakyatan yang kuat dan dapat bergerak menuju peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha rakyat di masa mendatang melalui UKM naik kelas.

Bank Indonesia has issued provisions in 2015 requiring banks to allocate 5% of its credit/financing to SMEs. In 2016 it was increased to 10%, 15% in 2017, and 20% by the end of 2018.

Based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 17/12/PBI/2015 dated June 25, 2015, on Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 14/22/PBI/2012, and PBI No. 14/22/PBI/2012 concerning the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance for the Development of Micro, Small and Medium Enterprises with its supporting provisions, it is required for commercial banks to allocate 5% of its credit/financing to SMEs in 2015 and 20% by the end of 2018.

THE ROLE OF GUARANTEE INDUSTRY

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) are increasingly showing their role in the national economy. From year to year, the growth and contribution of SMEs to the national economy continues to show improvement.

Behind the increasing role of SMEs in the national economy is the role of the guarantee industry. Guarantee industry helps SMEs to access banking world, especially in supporting the capital of SMEs.

In 2016, the Government issued Law number 1 Year 2016 on Guarantee which became an important stage in the development of the guarantee industry and is expected to further enhance the role of the guarantee industry in supporting the development of SMEs.

Strengthening SMEs become important in improving national economic fundamentals. This is because the people of Indonesia who conduct the trade sector, especially in the SMEs industry is higher than in other sectors, not to mention the labor absorption generated by this sector is quite significant. Therefore, it is necessary to encourage all parties, from the government, regulators, banks and credit guarantee institutions to perform a better role in developing the SMEs sector, thereby creating a strong community-based economic foundation which can move towards increasing people's business capacity and capability in the future through SMEs up-levelling.

Tinjauan Operasional

Operational Review

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA TAHUN 2017

Tahun 2017 masih menjadi bagian dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2016-2018 untuk bertumbuh secara agresif dengan *roadmap* sebagai berikut:

1. Tahun 2016-2017: penguasaan pangsa pasar dan inovasi produk
 - a. Penguasaan pangsa pasar (*market leader*) untuk semua produk Perusahaan
 - i. Segmen pasar lama
 - ii. Segmen pasar baru
 - b. Implementasi JODDIS (*Jamkrindo Online Decision and Information Support*) telah efektif
 - c. Organisasi dan SDM dengan budaya yang kompetitif dan berorientasi pasar
 - d. Inovasi produk baru telah menghasilkan pendapatan yang signifikan
 - e. Profitabilitas yang tinggi, dari bisnis utama dan hasil investasi
2. Tahun 2018 dan seterusnya: akselerasi pertumbuhan
 - a. Mempertahankan akselerasi pertumbuhan yang telah dicapai
 - b. Kompetensi baru telah efektif dalam memenangkan persaingan pasar
 - c. Menjadi "*learning center*" bagi perusahaan penjaminan lainnya

KINERJA OPERASIONAL TAHUN 2017

Produk dan Inovasi tahun 2017

Mobil Layanan Penjaminan dan Fasilitas SSB

Salah satu strategi yang dibangun dalam meningkatkan layanan adalah dengan membuka saluran titik layanan yang fleksibel dan dapat bergerak dengan mudah (*mobile office*) yaitu dengan menggunakan moda mobil sehingga dapat bebas bergerak sesuai kebutuhan tempat transaksi mitra bisnis;

Perusahaan telah menambah 9 (Sembilan) Mobil Layanan Penjaminan (MLP) dan telah mendistribusikan kepada seluruh Kantor Wilayah masing-masing 1 (satu) unit sebagai berikut:

No	Kantor Wilayah Regional Offices	Unit
1	Kantor Wilayah I Medan <i>Regional Office I Medan</i>	1 Unit
2	Kantor Wilayah II Palembang <i>Regional Office II Palembang</i>	1 Unit

BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY OF 2017

The year 2017 is still part of the Company's Long Term Plan (RJPP) 2016-2018 to grow aggressively with the roadmap as follows:

1. Year 2016-2017: mastering of market share and product innovation
 - a. Mastering market share (*market leader*) for all of Company's products
 - i. Existing market segments
 - ii. New market segments
 - b. Implementation of JODDIS (*Jamkrindo Online Decision and Information Support*) is very effective
 - c. Organizations and human resources with a competitive and market-oriented culture
 - d. New product innovations have generated significant revenue
 - e. High profitability, from main business and investment return
2. Year 2018 and beyond: accelerated growth
 - a. Maintain achieved accelerated growth
 - b. New competencies have been effective in winning market competition
 - c. Become a "*learning center*" for other insurance companies

OPERATIONAL PERFORMANCE IN 2017

Products and Innovation 2017

Mobile Guarantee Services and SSB Facilities

One of the strategies built in improving service is to open a flexible and mobile service point (*mobile office*) with the use of cars so that it can be free to move according to the needs of the place of business partner transactions;

The Company has added 9 (Nine) Car for the Mobile Guarantee Services (MLP) and has distributed them to all Regional Offices. The distribution is seen in the table below:

No	Kantor Wilayah <i>Regional Offices</i>	Unit
3	Kantor Wilayah III Jakarta <i>Regional Office III Jakarta</i>	1 Unit
4	Kantor Wilayah IV Bandung <i>Regional Office IV Bandung</i>	1 Unit
5	Kantor Wilayah V Semarang <i>Regional Office V Semarang</i>	1 Unit
6	Kantor Wilayah VI Surabaya <i>Regional Office VI Surabaya</i>	1 Unit
7	Kantor Wilayah VII Denpasar <i>Regional Office VII Denpasar</i>	1 Unit
8	Kantor Wilayah VIII Banjarmasin <i>Regional Office VIII Banjarmasin</i>	1 Unit
9	Kantor Wilayah IX Makassar <i>Regional Office IX Makassar</i>	1 Unit
Jumlah <i>Total</i>		9 Unit

1. MLP merupakan salah satu layanan bergerak yang juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan edukasi dan pemasaran produk penjaminan.
2. MLP dapat dijadikan pusat informasi dan konsultasi penjaminan tidak terbatas pada produk penjaminan, namun dapat mencakup informasi lainnya yang dibutuhkan mitra bisnis.
3. MLP diharapkan menjadi *trusted advisor* bagi mitra bisnis Jamkrindo.
4. MLP diperuntukkan untuk layanan *temporary*, pameran, sosialisasi, dan *event* lain sesuai kebutuhan mitra bisnis.
5. MLP dilengkapi fasilitas *Self Service surety Bond* sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan yang dapat diakses sendiri oleh mitra/nasabah dengan mudan dan cepat.

Call Center

Selain itu guna mendukung perkembangan bisnis penjaminan serta mengantisipasi persaingan maka perlu juga disediakan sebuah sarana komunikasi yang dapat dipergunakan oleh mitra Perusahaan untuk memperoleh informasi dalam menyampaikan pengaduannya. Sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, Perum Jamkrindo merasa penting untuk menyediakan layanan *Call Center* sebagai sarana layanan komunikasi yang efektif, informatif, dan interaktif antara pihak *external* dan juga internal. Sehingga pada tahun 2017, Perusahaan telah mengeluarkan sebuah pedoman layanan tentang *Call Center* agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagaimana cara menerima telepon yang baik sesuai dengan Surat Edaran No. 36/SE/3/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pedoman Layanan *Call Center* Perum Jamkrindo. Adapun nomor telepon *Call Center* Perum Jamkrindo adalah 1500-701.

1. MLP is one of the mobile services that also serves as a place to educate and market the guarantee products.
2. MLP can serve as an information and consulting center for guarantee product. However, it is not limited to guarantee products but may include other information which business partners need.
3. MLP is expected to be trusted advisor for Jamkrindo business partners.
4. MLP is intended for temporary services, exhibitions, socialization, and other events according to the needs of business partners.
5. MLP is equipped with Self Service surety Bond facility so that it can provide convenient services which can be accessed by partner/customer fast and with ease.

Call center

In addition to supporting the development of guarantee business and anticipate competition, it is also necessary to provide a communication tool which can be used by the Company's partners to obtain information by conveying the complaint. As one of the companies engaged in services, Perum Jamkrindo emphasizes on the importance to provide *Call Center* services as a means of effective, informative, and interactive communication services between external and internal parties. So, in 2017, the Company has issued a service guide on *Call Center* in order to serve as a guide on how to receive a good phone in accordance with Circular Letter No. 36/SE/3/VI/2017 dated June 21, 2017, regarding Perum Jamkrindo *Call Center* Service Guidelines. The phone number for Perum Jamkrindo *Call Center* is 1500-701.

Upaya Perbaikan dan Peningkatan Pelayanan tahun 2017

Visualisasi Standar Pelayanan

Perum Jamkrindo merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa penjaminan. Terutama menjamin UMKMK di Indonesia melalui Perbankan maupun lembaga keuangan non bank lainnya. Di era globalisasi saat ini serta persaingan mendapatkan pelanggan semakin ketat membuat para korporasi menciptakan berbagai inovasi maupun ide demi keberlangsungan korporasinya itu sendiri. Salah satu hal yang berpengaruh dalam keberlangsungan Perusahaan adalah dengan menciptakan dan mewujudkan optimalisasi pelayanan terhadap pelanggannya yang dalam hal ini adalah penerima jaminan maupun terjamin. Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri jasa, sangat penting sekali bagi suatu Perusahaan untuk menciptakan kepuasan pelanggan karena merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi kompetisi yang semakin tinggi.

Pada tahun 2017, Perusahaan telah mengeluarkan sebuah visualisasi untuk dimanfaatkan seluruh unit kerja yang berisi pedoman standar pelayanan Perusahaan yang sesuai dengan Peraturan Direksi No. 30/Per-Dir/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perusahaan Perum Jamkrindo. Visualisasi tersebut berupa video yang terbagi atas:

1. Visualisasi standar pelayanan *Meeter and Greeter*

No.	Tahapan Stages	Keterangan Description
1.		Membukakan pintu ketika tamu atau mitra kerja datang ke Unit Kerja. <i>Open the door when guests or partners come to the Work Unit.</i>

Efforts to Improve and Increase Services in 2017

Visualization of Service Standards

Perum Jamkrindo is a State-Owned Enterprises company engaged in the field of guarantee services. It mainly provides guarantee for SMEs in Indonesia through Banking and other non-bank financial institution. This current era of globalization and the increasingly tight competition between customers makes the corporation create various innovations and ideas for the sustainability of the corporation itself. One of the factors which influence the sustainability of the Company is to create and realize the optimization of services to customers who in this case is the recipient of the guarantee or the guaranteed. As a company engaged in the service industry, it is very important for a Company to create customer satisfaction as it is part of a strategy to face increasing competition.

In 2017, the Company has issued a visualization of standard services for the use of all work units containing standard guidelines for the Company's services in accordance with Regulation of the Board of Directors No. 30/Per-Dir/XI/2016 dated 21 November 2016 concerning Guidelines on Service Standards of Perum Jamkrindo Company. This visualization is a video which is divided into:

1. Visualization of Meeter and Greeter service standards

No.	Tahapan Stages	Keterangan Description
2.		Mengucapkan salam pembuka kepada tamu atau mitra kerja yang datang, dengan mengucapkan kalimat: "Selamat Pagi/ Siang/Sore/Malam Bapak/Ibu, Selamat Datang di Perum Jamkrindo" sesuai waktunya sebagai berikut: - Selamat Pagi: Pukul 06.00–10.00 - Selamat Siang: Pukul 10.01–15.00 - Selamat Sore: Pukul 15.01–18.00 - Selamat Malam: Pukul 18.01–24.00 Menawarkan bantuan kepada tamu atau mitra kerja secara sopan, ramah dan tersenyum dengan ucapan: "Ada yang bisa kami bantu?". <i>Welcoming the guests or partners who come, by saying the phrase: "Good Morning / Afternoon / Evening / Night Mr / Mrs, Welcome to Perum Jamkrindo" in accordance to the time of arrival as seen below:</i> <i>Good Morning: From 6am to 10am Good Day: From 10.01-15.00 Good afternoon: From 15.01-18.00 Good Evening: From 18.01-24.00</i> <i>Offer help to guests or partners in a polite, friendly and smiling manner with the words: "What can we help you with?".</i>
3.		Mempersilahkan tamu atau mitra kerja menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan atau diarahkan ke <i>front officer</i> sesuai yang dibutuhkan oleh tamu atau mitra kerja. <i>Allow guests or partners to wait in the waiting room provided or direct them to the front office officer as required by the guest or partners.</i>
4.		Mengantar tamu ke ruang tunggu jika diperlukan <i>Take the guests to the waiting room if necessary.</i>

No.	Tahapan Stages	Keterangan Description
5.		Membukakan pintu ketika tamu atau mitra kerja keluar dari ruangan atau Unit Kerja. Mengucapkan salam penutup ketika tamu atau mitra kerja meninggalkan ruangan atau Unit Kerja dengan ucapan: "Terima kasih Bapak/Ibu, Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam". <i>Open the door when guests or partners exit the room or Work Unit.</i> <i>Leave-take when a guest or work partner leaves the room or Work Unit with the phrase: "Thank you Mr / Ms, Good Morning / Day/ Afternoon / Evening".</i>

2. Visualisasi standar pelayanan *customer service*

2. Visualization of customer service service standards

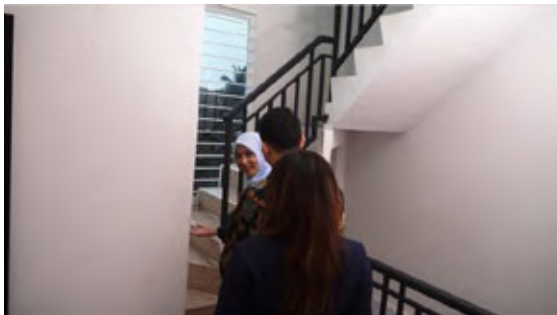
No.	Tahapan Stages	Keterangan Description
1.		Berdiri ketika tamu atau mitra kerja datang. Berjabat tangan sambil mengucapkan salam pembuka sesuai waktunya dengan mengucapkan kalimat: "Selamat Pagi Bapak/Ibu" sesuai waktunya sebagai berikut: Selamat Pagi: Pukul 06.00–10.00 Selamat Siang: Pukul 10.01–15.00 Selamat Sore: Pukul 15.01–18.00 Selamat Malam: Pukul 18.01–24.00 Memperkenalkan diri (sebut nama) dengan mengucapkan kalimat: "Perkenalkan saya (sebut nama), Bapak/Ibu" Menanyakan nama tamu atau mitra kerja dengan mengucapkan kalimat: "Maaf dengan Bapak/Ibu siapa?". <i>Stand when a guest or partner approaches.</i> <i>Shake hands while greeting in accordance to the time of arrival by saying the phrase: "Good Morning Mr / Ms";</i> <i>Good Morning: 06:00 to 10:00 o'clock</i> <i>Good Day: 10:01 am to 3:00 pm</i> <i>Good Afternoon: 15.01-18.00</i> <i>Good Evening: 18.01-24.00</i> <i>Introduce yourself (state your name) by using the phrase: "Hello, my name is (your name)"</i> <i>Asking the name of a guest or work partner by saying the phrase: "Excuse me, May I know who I am speaking with?"</i>
2.		Mempersilahkan tamu atau mitra kerja untuk duduk dengan mengucapkan kalimat: "Silahkan duduk Bapak/Ibu". (Tidak diperkenankan <i>Customer Service</i> untuk duduk sebelum tamu atau mitra kerja duduk terlebih dahulu). <i>Allow guests or partners to sit by saying the phrase: "Please have a seat, Mr / Mrs.". (The Customer Service officer is not allowed to sit before guests or partners sit first).</i>
3.		Menawarkan bantuan atau menanyakan keperluan tamu atau mitra kerja dengan mengucapkan kalimat: "Ada yang bisa kami bantu, Bapak/Ibu (sebut nama)?". <i>Offer assistance or ask for the needs of a guest or work partner by saying the phrase: "What can we help you with, Mr / Mrs. (guest's or partner's name)?"</i>

No.	Tahapan Stages	Keterangan Description
4.		Apabila diperlukan memberikan dokumen agar dilakukan dengan menggunakan kedua tangan dan posisi dokumen dihadapkan ke tamu atau mitra kerja. <i>If it is necessary to hand out documents, do so by using both hands and the position of the document is facing the guests or partners.</i>
5.		Menawarkan bantuan kembali pada saat keperluan tamu atau mitra kerja telah selesai dipenuhi, dengan mengucapkan kalimat: "Masih ada lagi yang bisa kami bantu, Bapak/Ibu ... (sebut nama)?" . <i>Offering help again when the guest or partner's needs have been completed, by saying these phrases: "Is there anything else that we can do for you, Mr / Mrs ... (gusts' or partners' names)?"</i>
6.		Mengucapkan salam penutup dan salam sesuai waktunya dengan mengucapkan kalimat: "Terima kasih Bapak/Ibu ... (sebut nama). Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam" . Tidak diperkenankan <i>Customer Service</i> untuk berdiri terlebih dahulu dari tamu atau mitra kerja. <i>Leave-take in accordance to the time of departure by saying these phrases: "Thank you Mr / Ms (guests' or partners' names). Good Morning / Day/ Afternoon / Evening". (Customer Service is not allowed to stand before the guests or partners do).</i>

3. Visualisasi standar pelayanan tamu eksternal Perusahaan

3. Visualization of corporate's external guests service standards

No.	Tahapan Stages	Keterangan Description
1.		Karyawan mengantar tamu eksternal ke tempat yang mereka butuhkan <i>Employees take external guests to where they need to go</i>
2.		Menyambut tamu dengan sopan dan ramah <i>Welcoming guests with courtesy and friendliness</i>

No.	Tahapan Stages	Keterangan Description
3.		Mendahulukan tamu eksternal Perusahaan untuk menggunakan setiap sarana dan prasarana di Unit Kerja <i>Prioritize the corporate's external guests to use any facilities and infrastructure in the Work Unit</i>

4. Visualisasi standar pelayanan bertelepon: *incoming, outgoing, transfer is connect, dan transfer is unconnect.*

4. Visualization of call service standards: *incoming, outgoing, transfer is connect, and transfer is unconnect.*

No.	Tahapan	Keterangan
1.		Mengucapkan salam pembuka dan salam sesuai waktunya kepada penelepon dengan mengucapkan kalimat: "Jamkrindo Kantor Cabang Jakarta Selamat Pagi, dengan ... (sebut nama) ada yang bisa dibantu?" <i>Saying a welcome greeting in accordance to the time of the call by saying these phrases: "Jamkrindo Branch Office Jakarta, Good Morning, you are speaking with (state name), how can I help you?"</i>
2.		Menanyakan nama dan instansi si penelepon dengan mengucapkan kalimat: "Maaf dengan Bapak/Ibu siapa dan dari mana saya berbicara?" <i>Ask the name and agency of the caller by saying these phrases: "Excuse me, to whom am I speaking with? And where are you calling from?"</i>
3.		Menawarkan bantuan kepada penelepon dengan mengucapkan kalimat: "Ada yang bisa kami bantu, Bapak/Ibu ... (sebut nama)?" <i>Offer help to the caller by saying the phrase: "How can we help you, Mr / Mrs ... (guest's or partner's name)?"</i>

No.	Tahapan	Keterangan
4.		Memastikan kembali apakah penelepon telah memahami penjelasan yang telah disampaikan dengan mengucapkan kalimat: "Apakah sudah cukup jelas, Bapak/Ibu ... (sebut nama)?" . <i>Reassure whether the caller has understood the explanation which has been delivered by saying the phrase: "Is the explanation clear, Mr / Mrs ... (guest's or partner's name)?"</i>
5.		Menawarkan bantuan kembali walaupun permintaan penelepon sudah dipenuhi dengan mengucapkan kalimat: "Ada hal lain yang bisa dibantu, Bapak/Ibu (sebut nama)?" . <i>Offer more help even after the caller's request has been fulfilled by saying the phrase: "Is there anything else that we can help you with, Mr / Mrs (guest's or partner's name)?"</i>
6.		Mengucapkan salam penutup sesuai waktunya dengan mengucapkan kalimat: "Terima kasih telah menghubungi Jamkrindo. Selamat Pagi" . <i>Leave-take in accordance to the time of the call by saying the phrase: "Thank you for contacting Jamkrindo. Good morning/ day/ afternoon/ evening"</i>

Standarisasi Tampilan

Perusahaan juga mengeluarkan Peraturan Direksi tentang Standarisasi Tampilan Eksterior dan Interior Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan Perum Jamkrindo No. 36/Per-Dir/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017. Perdir tersebut dikeluarkan guna menciptakan keseragaman tampilan unit kerja untuk kenyamanan mitra yang berujung pada pelayanan prima Perusahaan.

Standar Penampilan Karyawan

Untuk mendukung pelayanan Perusahaan, maka Karyawan dituntut untuk selalu menjaga penampilan serta kebersihan diri. Oleh karena itu, Perusahaan mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran No. 51/SE/3/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang penampilan dan pemakaian seragam kerja Perusahaan

Standardize Display

The Company also issued a Board of Directors' Regulation on Exterior and Interior Display Standards of Branch Offices and Perum Jamkrindo Public Service Unit No. 36/Per-Dir/XII/2017 dated December 4, 2017. The regulation was issued in order to create uniformity of the display of work units for the convenience of partners which resulted in the Company's excellent service.

Employee Appearance Standards

To support the Company's services, the employees are required to always maintain his or her appearance and personal hygiene. Therefore, the Company issued a policy in the form of Circular Letter No. 51/SE/3/X/2017 dated October 3, 2017, regarding the appearance and usage of the Company's work uniform

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Strategi pengembangan merek yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo selama tahun 2017 yaitu melalui kegiatan promosi di antaranya publikasi acara melalui media cetak dan *online*, *sponsorship*, dan *event*.

PANGSA PASAR

Market Share KUR

Porsi *market share* Perum Jamkrindo untuk KUR Bank BRI adalah sebesar 54% mengungguli pesaing dengan *market share* sebesar 46%. Porsi *market share* Perum Jamkrindo untuk KUR Bank BNI adalah sebesar 33% lebih rendah dari pesaing dengan *market share* sebesar 67%. Porsi *market share* untuk penjaminan KUR Bank Mandiri sebesar 63%, mengungguli pesaing dengan *market share* sebesar 37%. Porsi *market share* Perum Jamkrindo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Market share KUR Perum Jamkrindo

(dalam triliun Rupiah)

Bank Penyalur Distribution Bank	Realisasi Realization			Persentase Percentage	
	Bank	Jamkrindo	Pesaing Competitor	Jamkrindo	Pesaing Competitor
BRI	69,47	37,35	32,12	54%	46%
BNI	9,75	3,22	6,53	33%	67%
Mandiri	13,34	8,43	4,91	63%	37%
Jumlah Total	92,56	49,00	43,55	-	-

Brand development strategy conducted by Perum Jamkrindo during the year 2017 is through promotional activities such as publication of events through print and online media, *sponsorship*, and *events*.

MARKET SHARE

Micro Credit Loan (KUR) Market Share

The market share of Perum Jamkrindo for Bank BRI Micro Credit Loan is 54%. This is ahead of its competitors of 46% market share. The market share of Perum Jamkrindo for Bank BNI Micro Credit Loan is 33%, which is lower than its competitors of 67%. The market share portion for Bank Mandiri's Micro Credit Loan guarantee is 63%, surpassing competitors with a market share of 37%. The market share of Perum Jamkrindo can be seen in the table below.

Perum Jamkrindo's Micro Credit Loan Market Share

(in IDR trillion)

Tinjauan per Segmen Usaha

Review of Business Segments

Laporan Keuangan Perum Jamkrindo yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan belum memisahkan segmen operasi Jamkrindo, sehingga berdasarkan laporan tersebut Jamkrindo beroperasi dengan segmen tunggal. Namun, pembahasan tinjauan per segmen usaha pada laporan ini dibedakan berdasarkan segmen usaha yang ditetapkan oleh pihak internal, yaitu segmen penjaminan program, penjaminan *non*-program, dan penjaminan syariah.

PENJAMINAN PROGRAM

Divisi Bisnis Penjaminan Program membawahi jenis produk yang memiliki sumber dana dari pemerintah/subsidi. Produk yang menjadi ranah Divisi Bisnis Penjaminan Program adalah produk KUR dan FLPP.

Produk KUR merupakan kredit program pemerintah yang telah berjalan sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari bank penyalur KUR yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dimana pemerintah memberikan subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) (KUR periode 2007–2014) dan subsidi bunga (KUR periode 2015–saat ini). Pada tahun 2017 KUR memiliki suku bunga sebesar 9% dengan target penerima adalah UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Produk KUR terbagi atas 3 jenis yaitu KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. Untuk tahun 2017, Pemerintah menetapkan target KUR sebesar Rp110 triliun untuk disalurkan melalui perantara 33 Bank Penyalur, 4 perusahaan pembiayaan, 2 koperasi simpan pinjam, serta 10 perusahaan penjamin.

Kredit FLPP merupakan bentuk Penjaminan terhadap Kredit Pemilikan Rumah program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kredit FLPP merupakan kredit dengan suku bunga rendah, cicilan ringan, dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Strategi Segmen Penjaminan Program

Pada tahun 2017, strategi yang dilakukan oleh Divisi Bisnis Penjaminan Program untuk mengembangkan produk KUR dan FLPP antara lain:

1. Meningkatkan ekspansi bisnis penjaminan KUR dan FLPP melalui percepatan negosiasi dengan mitra baru untuk mempercepat penandatanganan PKS, meningkatkan kualitas pelayanan serta responsif terhadap keluhan mitra dan perubahan kebijakan dari Pemerintah.
2. *Monitoring* aktif bersama Kantor Wilayah dan Kantor Cabang agar pelaksanaan penjaminan KUR sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The financial statements of Perum Jamkrindo which have been audited by the Public Accounting Firm of Hertanto, Grace & Karunawan have not separated the segment of Jamkrindo's operations. So, based on the report, Jamkrindo operates with a single segment. However, the review of business segment review in this report is differentiated based on internal business segment, i.e. program guarantee segment, non-program guarantee, and Syariah guarantee.

PROGRAM GUARANTEE

Program Guarantee Business Division oversees the type of product which has funding sources from government/subsidies. The products which is included in the Program Guarantee Business Division are Micro Credit Loan and FLPP products.

Micro Credit Loan product is a government credit program which has been in operation since 2007 with funding source from Micro Credit Loan distributing banks directly appointed by the government in which the government provides the Subsidy for Guarantee Fee (IJP) (KUR period of 2007-2014) and Interest Subsidy (KUR period of 2015-recently). In 2017 Micro Credit Loan has an interest rate of 9% with target recipients are SMEs in agriculture, fisheries, processing industries, trade, and services. Micro Credit Loan (KUR) products are divided into 3 types namely Micro KUR, Retail KUR, and KUR for Indonesian Workers (TKI). In 2017, the Government set a target of IDR110 trillion of Micro Credit Loan to be distributed through an intermediary of 33 distribution banks, 4 finance companies, 2 savings and loan cooperatives, and 10 guarantee companies.

FLPP Credit is a form of Guarantee to Housing Loan. It is a cooperative program between Banking Parties with Ministry of Public Works and People's Housing. FLPP Credit is a credit with low-interest rate, and small and fixed installment method throughout the credit period intended for Low-Income Communities.

Program Guarantee Segment Strategy

In 2017, the strategies undertaken by the Program Guarantee Business Division to develop Micro Credit Loan (KUR) and FLPP products include:

1. Enhancing the business expansion of KUR and FLPP guarantee through the acceleration of negotiations with new partners to accelerate the signing of MoA, improve service quality and be responsive to partner complaints and policy changes from the Government.
2. Active monitoring of the implementation of KUR guarantee to be in accordance with applicable regulations with Regional Offices and Branch Offices

- Mempercepat SLA (*Service Level Agreement*) dengan Divisi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan Penjaminan KUR Online.
- Meningkatkan kapabilitas karyawan untuk mendorong produktivitas melalui motivasi dan pelatihan kerja.

- Accelerating the SLA (*Service Level Agreement*) with other Divisions related to the problems which often appear in the implementation of Online KUR guarantee.
- Improving employee capability to encourage productivity through motivation and job training.

Kinerja Segmen Penjaminan Program

Produk KUR secara total memiliki pencapaian sebesar 101% terhadap RKAP KUR tahun 2017. Adapun pencapaian volume penjaminan KUR terhadap RKAP KUR tahun 2017 untuk Segmen KUR Mikro adalah sebesar 89%, KUR Ritel sebesar 159%, dan KUR TKI sebesar 49%. Pada Segmen Produk KPR FLPP, pada tahun 2017 memiliki pencapaian sebesar 200% terhadap RKAP FLPP tahun 2017. Kinerja Segmen KUR dan FLPP dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Performance of Program Guarantee Segment

KUR's total product achievement in 2017 is 101% of RKAP KUR in 2017. The achievement of KUR guarantee volume to RKAP KUR 2017 for Micro KUR Segment is 89%, Retail KUR of 159%, and KUR for TKI of 49%. In the Segment of FLPP Products, in 2017, it is 200% of RKAP FLPP 2017. The performance of KUR and FLPP Segment can be seen in the following table.

Segmen Produk KUR dan FLPP

KUR and FLPP Product Segment

Segmen Segment	RKAP Company's Work Plan and Budget	Volume	Pencapaian terhadap RKAP Achievement against RKAP
KUR	50.000.000	50.473.512	101%
• Mikro	40.500.000	35.876.348	89%
• Ritel	9.000.000	14.354.499	159%
• TKI	500.000	242.666	49%
FLPP	12.000.000	24.003.596	200%

Volume Pembiayaan Bisnis Penjaminan Program

KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Berdasarkan data Divisi Bisnis Penjaminan Program, produk KUR tahun 2017 memiliki target RKAP sebesar Rp50 triliun. Perum Jamkrindo telah melakukan Penjaminan kredit KUR sebesar Rp50.473 Triliun yang berarti realisasi tahun 2017 telah melampaui RKAP 2017 dengan persentase sebesar 101%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka realisasi penjaminan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun sebelumnya.

Adapun 5 (lima) Kantor Cabang Perum Jamkrindo dengan Volume Realisasi Penjaminan KUR tertinggi adalah DKI Jakarta, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Kediri. Untuk kategori Kantor cabang dengan pencapaian Volume terhadap RKAP tertinggi diraih oleh Kantor Cabang Purwakarta, Solo, Pekanbaru, Kudus, dan Sumbawa Besar.

Pertumbuhan *volume* tertinggi diraih oleh Kantor Cabang Surabaya, sedangkan pertumbuhan terendah dimiliki oleh Kantor Cabang Manokwari. Rincian *Volume* KUR pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

The Financing Volume of Program Guarantee Business

KUR (Micro Credit Loan)

Based on the data of Program Guarantee Business Division, KUR's product in 2017 has an RKAP target of IDR50 trillion. Perum Jamkrindo has achieved a KUR guarantee amounting to IDR50.473 Trillion which means that the realization of 2017 has exceeded the RKAP 2017 with a percentage of 101%. If compared to 2016, the realization of the guarantee in 2017 increased by 7% from the previous year.

The 5 (five) Branch Offices of Perum Jamkrindo with the highest volume of KUR guarantee realization is DKI Jakarta, Surabaya, Makassar, Semarang, and Kediri. For the category of branch offices with the highest achievement of Volume against RKAP is achieved by Purwakarta, Solo, Pekanbaru, Kudus, and Sumbawa Besar Branch Office.

The highest volume growth was achieved by Surabaya Branch Office, while the lowest growth was owned by Manokwari Branch Office. Details of KUR Volume in 2017 can be seen in the following table.

Volume dalam juta Rupiah

Volume in IDR million

Kantor Cabang Perum Jamkrindo <i>Perum Jamkrindo Branch Offices</i>	Volume 2016 <i>Volume in 2016</i>	2017		Pencapaian RKAP <i>Achievement against RKAP</i>	Pertumbuhan (penurunan) <i>Growth (decrease)</i>
		RKAP	Volume		
Medan	1.296.650	1.226.148	1.752.493	143%	35%
Pekanbaru	1.144.474	693.962	1.247.035	180%	9%
Padang	1.368.255	1.780.807	1.355.590	76%	(1%)
Banda Aceh	676.333	762.929	705.393	92%	4%
Balige	284.421	403.888	271.023	67%	(5%)
Tanjung Pinang	205.195	298.633	216.446	72%	5%
Batam	137.989	275.150	76.849	28%	(44%)
Kantor Wilayah 1 <i>Regional Office 1</i>	5.113.317	5.441.517	5.624.828	103%	10%
Palembang	1.102.153	1.172.895	1.662.900	142%	51%
Bandar Lampung	1.432.951	1.524.925	1.241.962	81%	(13%)
Jambi	594.872	633.054	816.234	129%	37%
Bengkulu	491.836	523.405	491.604	94%	0%
Pangkal Pinang	215.896	229.754	247.192	108%	14%
Kantor Wilayah 2 <i>Regional Office 2</i>	3.837.707	4.084.032	4.459.893	109%	16%
DKI Jakarta	3.377.791	3.314.406	3.704.009	112%	10%
Tangerang	456.894	486.315	581.203	120%	27%
Pontianak	556.150	917.263	545.096	59%	(2%)
Serang	435.679	463.643	316.774	68%	(27%)
Kantor Wilayah 3 <i>Regional Office 3</i>	4.826.604	5.181.629	5.147.082	99%	7%
Bandung	1.661.286	2.267.243	1.458.768	64%	(12%)
Cirebon	991.186	848.609	1.168.964	138%	18%
Tasikmalaya	916.914	856.055	683.236	80%	-25%
Purwakarta	708.351	186.162	724.577	389%	2%
Sukabumi	263.855	675.207	329.374	49%	25%
Kantor Wilayah 4 <i>Regional Office 4</i>	4.541.592	4.833.096	4.364.920	90%	7%
Semarang	1.660.385	1.766.926	2.382.957	135%	44%
Kudus	3.651.116	1.035.058	1.785.485	173%	(51%)
Solo	964.152	590.160	1.492.313	253%	55%
Pekalongan	972.630	3.885.465	1.192.057	31%	23%
Yogyakarta	854.646	1.026.036	623.265	61%	(27%)
Purwokerto	554.565	909.501	499.738	55%	(10%)
Kantor Wilayah 5 <i>Regional Office 5</i>	8.657.494	9.213.147	7.975.816	87%	(8%)
Surabaya	674.977	2.654.371	3.724.107	140%	452%
Kediri	2.494.275	1.779.606	2.379.529	134%	(5%)
Malang	1.672.270	1.155.833	1.192.092	103%	(29%)
Madiun	1.086.120	917.842	1.157.672	126%	7%

Volume dalam juta Rupiah

Volume in IDR million

Kantor Cabang Perum Jamkrindo <i>Perum Jamkrindo Branch Offices</i>	Volume 2016 <i>Volume in 2016</i>	2017		Pencapaian RKAP <i>Achievement against RKAP</i>	Pertumbuhan (penurunan) <i>Growth (decrease)</i>
		RKAP	Volume		
Banyuwangi	862.483	718.301	769.413	107%	(11%)
Kantor Wilayah 6 <i>Regional Office 6</i>	6790125	7225953	9222813	128%	36%
Denpasar	2.039.193	2.170.016	1.888.914	87%	(7%)
Mataram	685.464	729.461	587.531	81%	(14%)
Kupang	629.565	669.974	722.794	108%	15%
Sumbawa Besar	246.696	262.211	392.804	150%	59%
Kantor Wilayah 7 <i>Regional Office 7</i>	3.600.919	3.831.662	3.592.042	94%	0%
Banjarmasin	1.039.989	1.106.742	1.205.066	109%	16%
Palangkaraya	518.422	551.697	407.416	74%	(21%)
Samarinda	320.118	340.665	428.906	126%	34%
Balikpapan	249.596	265.936	365.305	135%	44%
Tarakan	135.292	143.976	114.744	80%	(15%)
Kantor Wilayah 8 <i>Regional Office 8</i>	2.263.418	2.409.015	2.516.437	104%	11%
Makassar	2.550.228	2.049.006	2.832.831	138%	11%
Pare-pare	771.567	821.089	1.007.469	123%	31%
Palopo	685.528	729.529	616.025	84%	(10%)
Palu	598.714	637.143	661.108	104%	10%
Kendari	705.862	751.890	497.315	66%	(30%)
Mamuju	293.692	467.631	382.422	82%	30%
Jayapura	338.020	312.543	373.860	120%	11%
Gorontalo	272.630	290.129	378.777	131%	39%
Manado	419.060	780.426	266.004	34%	(37%)
Ambon	261.462	278.244	236.461	85%	(10%)
Ternate	163.659	217.704	116.927	54%	(29%)
Bitung	98.977	136.928	95.102	69%	(4%)
Sorong	80.214	175.373	57.065	33%	(29%)

FLPP (Fasilitas Likuiditas Penjaminan Perumahan)

Berdasarkan data Divisi Bisnis Penjaminan Program, produk FLPP tahun 2017 memiliki target RKAP sebesar Rp12 triliun. Perum Jamkrindo telah melakukan Penjaminan kredit FLPP sebesar Rp24.003 triliun yang berarti realisasi FLPP tahun 2017 telah melampaui RKAP 2017 dengan persentase sebesar 200%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka realisasi penjaminan FLPP tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 48% dari tahun sebelumnya.

Adapun 5 Kantor Cabang Perum Jamkrindo dengan *Volume Realisasi Penjaminan FLPP* tertinggi adalah DKI Jakarta, Banjarmasin, Makassar, Pekanbaru, dan Bandung. Untuk kategori Kantor Cabang dengan pencapaian *Volume*

FLPP (Housing Financing Liquidity Facility)

Based on the data of Program Guarantee Business Division, FLPP products in 2017 have the RKAP value of IDR12 trillion. Perum Jamkrindo has acquired FLPP credit guarantee amounting to IDR24,003 trillion, which means that the realization of FLPP in 2017 has exceeded the RKAP 2017 with a percentage of 200%. When compared to 2016, the realization of FLPP guarantees in 2017 has increased by 48%.

The 5 Branches of Perum Jamkrindo with the highest volume of FLPP Guarantee Realization is DKI Jakarta, Banjarmasin, Makassar, Pekanbaru, and Bandung. For Branch Office category, the highest volume achievement against the RKAP

terhadap RKAP tertinggi diraih oleh Kantor Cabang Denpasar, Mataram, Kupang, Jayapura, dan Tangerang.

Pertumbuhan *volume* tertinggi diraih oleh Kantor Cabang Denpasar, sedangkan pertumbuhan terendah dimiliki oleh Kantor Cabang Samarinda. Rincian *Volume* FLPP pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

was achieved by Denpasar, Mataram, Kupang, Jayapura, and Tangerang Branch Office.

The highest volume growth was achieved by Denpasar Branch Office, while the lowest growth was owned by Samarinda Branch Office. The details of FLPP Volume in 2017 can be seen in the following table.

Volume Realisasi FLPP Tahun 2017

Volume dalam juta Rupiah

FLPP Realization Volume in 2017

Volume in IDR million

Kantor Cabang Perum Jamkrindo Perum Jamkrindo Branch Offices	Volume 2016 Volume in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (penurunan) Growth (decrease)
		RKAP	Volume		
Banda Aceh	-	-	36.307	0%	0%
Medan	704.133	522.189	1.292.855	248%	84%
Pekanbaru	887.921	670.156	1.651.330	246%	86%
Palembang	766.910	484.528	1.209.016	250%	58%
Jambi	356.869	328.385	820.034	250%	130%
DKI Jakarta	7.541.456	5.424.014	6.929.776	128%	(8%)
Tangerang	49.059	47.819	144.902	303%	195%
Pontianak	693.026	538.213	1.342.987	250%	94%
Bandung	619.974	500.968	1.355.290	271%	119%
Tasikmalaya	231.724	174.380	450.811	259%	95%
Purwakarta	568.289	475.433	747.532	157%	32%
Surabaya	267.010	192.723	550.559	286%	106%
Denpasar	20.210	16.089	235.362	1463%	1065%
Mataram	234.387	128.220	845.996	660%	261%
Kupang	34.112	27.373	113.601	415%	233%
Banjarmasin	1.173.302	896.706	2.193.415	245%	87%
Palangkaraya	536.951	396.694	954.306	241%	78%
Samarinda	344	368	-	0%	(100%)
Makassar	915.587	715.648	1.768.324	247%	93%
Jayapura	249.827	185.644	714.992	385%	186%
Manado	402.347	260.756	618.250	237%	54%
Ternate	14.424	13.692	27.950	204%	94%
Total	16.267.862	12.000.000	24.003.596	200%	48%

Imbal Jasa Penjaminan Bisnis Penjaminan Program

KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Berdasarkan data Divisi Bisnis Penjaminan Program, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) produk KUR tahun 2017 memiliki target RKAP sebesar Rp1.435 Triliun. Perum Jamkrindo memiliki IJP kredit KUR sebesar Rp1.359 Triliun yang berarti realisasi IJP tahun 2017 memiliki persentase pencapaian terhadap RKAP Tahun 2017 sebesar 95%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka IJP KUR tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya.

Business Guarantee Program Compensation

Micro Loan Credit (KUR)

Based on the data from the Division of Business Guarantee Program, the Credit Guarantee compensation (Imbal Jasa Penjaminan/IJP) of KUR products in 2017 has an RKAP target of IDR1,435 trillion. Perum Jamkrindo has an IJP credit of IDR1,359 Trillion which means the realization of IJP in 2017 reached 95% achievement against RKAP Year 2017. When compared to 2016, the IJP KUR in 2017 decreased by 40% from the previous year.

Adapun 5 Kantor Cabang Perum Jamkrindo dengan IJP KUR tertinggi adalah Palembang, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Semarang. Untuk kategori Kantor cabang dengan nominal IJP KUR terhadap RKAP tertinggi diraih oleh Kantor Cabang Purwakarta, Solo, Semarang, Kudus, dan Madiun.

The 5 Branches Perum Jamkrindo with the highest IJP KUR is Palembang, Jakarta, Surabaya, Makassar, and Semarang. For the category of branch offices with the highest IJP KUR against the RKAP achieved by Purwakarta, Solo, Semarang, Kudus, and Madiun Branch Office.

Penurunan IJP yang paling sedikit diraih oleh Kantor Cabang Solo, sedangkan penurunan IJP terbanyak dimiliki oleh Kantor Cabang Manokwari. Rincian Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

The least decrease of IJP achieved by Solo Branch Office, while the biggest decrease of IJP is by Manokwari Branch Office. The details of KUR Credit Guarantee compensation (Imbal Jasa Penjaminan/IJP) in 2017 can be seen in the following table:

Kantor Cabang Perum Jamkrindo Perum Jamkrindo Branch Offices	IJP 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (decrease)
		RKAP	IJP Audited	IJP Audited	IJP Audited
Medan	79.095	49.512	50.299	102%	(36%)
Pekanbaru	87.551	49.470	37.445	76%	(57%)
Padang	63.847	44.662	44.614	100%	(30%)
Banda Aceh	30.619	20.234	19.119	94%	(38%)
Balige	10.810	9.302	6.406	69%	(41%)
Tanjung Pinang	10.696	7.286	6.158	85%	(42%)
Batam	6.916	5.907	3.299	56%	(52%)
Kantor Wilayah 1 Regional Office 1	289.536	186.374	167.340	90%	(42%)
Palembang	113.394	78.808	102.955	131%	(9%)
Bandar Lampung	49.400	47.283	29.854	63%	(40%)
Jambi	32.506	24.324	22.226	91%	(32%)
Bengkulu	22.567	17.829	12.749	72%	(44%)
Pangkal Pinang	9.001	7.487	5.937	79%	(34%)
Kantor Wilayah 2 Regional Office 2	226.868	175.730	173.722	99%	(23%)
DKI Jakarta	174.351	101.708	100.875	99%	(42%)
Tangerang	18.487	12.087	13.724	114%	(26%)
Pontianak	38.444	27.706	18.486	67%	(52%)
Serang	18.908	11.928	9.160	77%	(52%)
Kantor Wilayah 3 Regional Office 3	250.190	153.429	142.244	93%	(43%)
Bandung	96.077	62.933	41.501	66%	(57%)
Cirebon	35.270	20.768	24.101	116%	(32%)
Tasikmalaya	34.748	18.880	18.084	96%	(48%)
Purwakarta	25.439	5.035	15.846	315%	(38%)
Sukabumi	10.786	18.251	8.084	44%	(25%)
Kantor Wilayah 4 Regional Office 4	202.319	125.866	107.616	86%	(47%)
Semarang	178.550	38.300	64.287	168%	(64%)
Kudus	61.449	22.877	37.470	164%	(39%)
Solo	37.232	13.557	35.849	264%	(4%)

Kantor Cabang Perum Jamkrindo Perum Jamkrindo Branch Offices	IJP 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (decrease)
		RKAP	IJP Audited	IJP Audited	IJP Audited
Pekalongan	35.409	107.152	28.191	26%	(20%)
Yogyakarta	40.032	23.261	18.329	79%	(54%)
Purwokerto	22.265	22.321	14.167	63%	(36%)
Kantor Wilayah 5 Regional Office 5	374.937	227.467	198.293	87%	(47%)
Surabaya	131.505	71.180	77.361	109%	(41%)
Kediri	58.819	37.601	47.236	126%	(20%)
Malang	39.140	23.604	27.058	115%	(31%)
Madiun	33.210	19.370	26.373	136%	(21%)
Banyuwangi	22.951	14.898	15.505	104%	(32%)
Kantor Wilayah 6 Regional Office 6	285.624	166.652	193.533	116%	(32%)
Denpasar	112.201	56.055	52.844	94%	(53%)
Mataram	31.934	18.615	19.127	103%	(40%)
Kupang	30.944	18.251	17.660	97%	(43%)
Sumbawa Besar	8.443	5.583	7.421	133%	(12%)
Kantor Wilayah 7 Regional Office 7	183.521	98.504	97.052	99%	(47%)
Banjarmasin	69.617	45.344	56.783	125%	(18%)
Palangkaraya	27.842	22.219	11.714	53%	(58%)
Samarinda	27.322	22.817	16.853	74%	(38%)
Balikpapan	10.156	7.447	8.105	109%	(20%)
Tarakan	5.627	4.163	3.009	72%	(47%)
Kantor Wilayah 8 Regional Office 8	140.565	101.990	96.465	95%	(31%)
Makassar	125.593	65.997	68.212	103%	(46%)
Pare-pare	25.805	18.315	19.304	105%	(25%)
Palopo	22.377	15.856	14.530	92%	(35%)
Palu	28.111	15.540	17.175	111%	(39%)
Kendari	29.032	18.078	13.781	76%	(53%)
Mamuju	13.594	12.872	9.224	72%	(32%)
Jayapura	18.349	7.597	9.270	122%	(49%)
Gorontalo	10.836	6.593	8.392	127%	(23%)
Manado	21.898	17.614	8.601	49%	(61%)
Ambon	10.593	6.638	5.916	89%	(44%)
Ternate	7.228	4.842	3.362	69%	(53%)
Bitung	4.052	2.860	2.390	84%	(41%)
Sorong	3.298	3.645	1.708	47%	(48%)
Manokwari	4.540	2.801	1.640	59%	(64%)
Kantor Wilayah 9 Regional Office 9	325.306	199.249	183.504	92%	(44%)
Total	2.278.866	1.435.262	1.359.768	95%	(40%)

FLPP (Fasilitas Likuiditas Penjaminan Perumahan)

Berdasarkan data Divisi Bisnis Penjaminan Program, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) produk FLPP tahun 2017 memiliki target RKAP sebesar Rp39.662 miliar. Perum Jamkrindo memiliki IJP kredit FLPP sebesar Rp57.609 miliar yang berarti realisasi IJP tahun 2017 telah melampaui RKAP IJP FLPP 2017 dengan persentase sebesar 145%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka IJP FLPP tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 48% dari tahun sebelumnya.

Adapun 5 (lima) Kantor Cabang Perum Jamkrindo dengan IJP FLPP tertinggi adalah DKI Jakarta, Banjarmasin, Makassar, Pekanbaru, dan Bandung. Untuk kategori Kantor Cabang dengan nominal IJP FLPP terhadap RKAP tertinggi diraih oleh Kantor Cabang Denpasar, Mataram, Kupang, Jayapura, dan Tangerang.

Pertumbuhan IJP tertinggi diraih oleh Kantor Cabang Denpasar, sedangkan pertumbuhan terendah dimiliki oleh Kantor Cabang Samarinda. Rincian Imbal Jasa Penjaminan (IJP) FLPP pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

FLPP (Housing Financing Liquidity Facility)

Based on the data of Program Guarantee Business Division, the Guarantee Fee (IJP) of FLPP products in 2017 has an RKAP target of IDR39,662 billion. Perum Jamkrindo acquired the IJP for FLPP credit amounting to IDR57,609 billion which means that the realization of IJP in 2017 has exceeded the RKAP IJP FLPP 2017 with a percentage of 145%. When compared to 2016, IJP FLPP in 2017 has increased by 48%.

The 5 (five) branch offices of Perum Jamkrindo with the highest IJP FLPP are DKI Jakarta, Banjarmasin, Makassar, Pekanbaru, and Bandung. The Branch Offices with the highest IJP FLPP nominal against RKAP are Denpasar, Mataram, Kupang, Jayapura, and Tangerang Branch Offices.

The highest IJP growth was achieved by Denpasar Branch Office, while the lowest growth was by Samarinda Branch Office. The details of FLPP Guarantee Fee (IJP) in 2017 can be seen in the following table.

IJP dalam juta Rupiah

IJP in IDR million

Kantor Cabang Perum Jamkrindo <i>Perum Jamkrindo Branch Offices</i>	IJP 2016 <i>IJP in 2016</i>	2017		Pencapaian RKAP <i>Achievement against RKAP</i>	Pertumbuhan (penurunan) <i>Growth (decrease)</i>
		RKAP	IJP		
Banda Aceh	-	-	87	0%	0%
Medan	1.690	1.726	3.103	180%	84%
Pekanbaru	2.131	2.215	3.963	179%	86%
Palembang	1.841	1.601	2.902	181%	58%
Jambi	856	1.085	1.968	181%	130%
DKI Jakarta	18.099	17.927	16.631	93%	(8%)
Tangerang	118	158	348	220%	195%
Pontianak	1.663	1.779	3.223	181%	94%
Bandung	1.488	1.656	3.253	196%	119%
Tasikmalaya	556	576	1.082	188%	95%
Purwakarta	1.364	1.571	1.794	114%	32%
Surabaya	641	637	1.321	207%	106%
Denpasar	49	53	565	1062%	1065%
Mataram	563	424	2.030	479%	261%
Kupang	82	90	273	301%	233%
Banjarmasin	2.816	2.964	5.264	178%	87%
Palangkaraya	1.289	1.311	2.290	175%	78%
Samarinda	0	1	-	0%	(100%)
Makassar	2.197	2.365	4.244	179%	93%
Jayapura	600	614	1.716	280%	186%
Manado	966	862	1.484	172%	54%
Ternate	35	45	67	148%	94%
Total	39.042	39.662	57.609	145%	48%

Prospek Segmen Penjaminan Program

Penjaminan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Prospek penjaminan FLPP masih terbuka mengingat masih ada mitra bank penyalur FLPP yang belum menjalin kerja sama dengan Perum Jamkrindo. Dengan adanya potensi tersebut, maka Perum Jamkrindo akan melakukan pendekatan dengan bank penyalur FLPP yang belum menjalin kerja sama agar di tahun depan perjanjian kerja sama dapat ditandatangani dan produksi penjaminan KUR diharapkan dapat meningkat.

Untuk target penyaluran FLPP di tahun mendatang, diharapkan dapat mengalami peningkatan sebesar 12,5% dari target tahun 2017 sebesar Rp12 triliun menjadi Rp14 triliun.

Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dari target penyaluran KUR yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Perum Jamkrindo menargetkan *volume* penjaminan sebesar 50% dari target tersebut.

Untuk target penyaluran KUR di tahun mendatang, diharapkan dapat mengalami peningkatan dari Rp50 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp60 triliun di tahun 2018. Dikarenakan target KUR oleh Pemerintah kepada penyalur KUR meningkat sebesar 9% dari target tahun 2017 sebesar Rp110 triliun menjadi Rp120 triliun.

PENJAMINAN PROGRAM DIVISI SISTEM RESI GUDANG

Perum Jamkrindo mendapat penugasan Penjaminan program berdasarkan amanah dari Pemerintah melalui PP No. 1 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut sebagai Produk Penjaminan Sistem Resi Gudang. Dalam PP No. 1 Tahun 2016 tersebut dijelaskan bahwa Perum Jamkrindo ditunjuk sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPPSRG) yang memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan
2. Memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

Atas dasar penugasan dari Pemerintah tersebut, Perum Jamkrindo melakukan langkah strategis dengan membentuk Divisi untuk mengoptimalkan kinerja penugasan Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana yang kemudian disebut dengan Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Program Guarantee Segment Outlook

FLPP (Housing Financing Liquidity Facility) Guarantee

The FLPP guarantee outlook is still open since there are still partners of FLPP distributing banks which have not established cooperation with Perum Jamkrindo. With this potential, Perum Jamkrindo will approach the FLPP distributing banks which have not established cooperation with Perum Jamkrindo so that next year the agreement can be signed, and because of that, the production of KUR guarantee is expected to increase.

The target of FLPP distribution in the coming year is expected to increase by 12.5% from 2017 target of IDR12 trillion to IDR14 trillion.

Micro Credit Loan (KUR) Guarantee

Of the targeted KUR distribution target set by the government, Perum Jamkrindo targets a guarantee volume of 50% of said target.

KUR target in the coming year is expected to increase from IDR50 trillion in 2017 to IDR60 trillion in 2018. This is because the KUR target by the Government to the KUR distributor increased by 9% from the target of 2017 amounting to IDR110 trillion to IDR120 trillion.

GUARANTEE FOR WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM (SRG) DIVISION PROGRAM

Perum Jamkrindo was assigned a guarantee program based on the Government's mandate through Government Regulation No. 1 Year 2016, hereinafter referred to as Warehouse Receipt System Guarantee Product. In that regulation, it is explained that Perum Jamkrindo has been appointed as the Guarantee Implementing Agency of Warehouse Receipt System (LPPSRG) which has the following main functions:

1. To protect the right of the Warehouse Receipt Holder and / or Recipient of Guarantee Rights in the event of failure, inability, and / or bankruptcy of Warehouse Manager in performing its obligations; and
2. Maintaining the stability and integrity of the Warehouse Receipt System in accordance with its authority

On the basis of the assignment from the Government, Perum Jamkrindo has taken strategic steps by establishing a Division to optimize Perum Jamkrindo's performance as the Implementing Agency, which was then called the Guarantee Division of Warehouse Receipt System.

Menindaklanjuti penugasan tersebut Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang melakukan beberapa hal sebagaimana tertuang dalam PP No. 1 Tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat Peraturan Tata Tertib Penjaminan Sistem Resi Gudang.
2. Mendesain Sistem Penjaminan SRG.
3. Melakukan sosialisasi internal.
4. Melakukan sosialisasi kepada *stakeholder*.
5. Mengupayakan agar Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat segera direalisasikan dengan tindakan antara lain:
 - a. Penyampaian secara tersurat Laporan Penunjukan Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjamin Sistem Resi Gudang sesuai PP No. 1 Tahun 2016 kepada OJK, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian BUMN.
 - b. Penyampaian secara tersurat *Business Plan* Penyertaan Modal Negara (PMN) Penjaminan Sistem Resi Gudang Kepada Kementerian BUMN.

Following up the assignment the Guarantee Division of Warehouse Receipt System has conducted the followings as stated in the Government Regulation No. 1 Year 2016:

1. Made the Rules of Guarantee of Warehouse Receipt System.
2. Designed SRG Guarantee System.
3. Conducted internal socialization.
4. Conducted socialization to stakeholders.
5. Strived for the realization of State Equity Participation (PMN) by conducting action such as:
 - a. Delivering the written submission of Appointment Report of Perum Jamkrindo as Implementing Agency for Guarantee of Warehouse Receipt System pursuant to Government Regulation number 1 Year 2016 to Financial Service Authority (OJK), Ministry of Economy, and Ministry of SOEs.
 - b. Delivering the written the Business Plan for State Equity Participation (PMN) for Guarantee of Warehouse Receipt System to the Ministry of SOEs.

Strategi Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang

Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang menyusun beberapa strategi dan program kerja guna mendukung terlaksananya penunjukan sebagai Lembaga Pelaksana, antara lain:

The Strategy of the Guarantee Division of Warehouse Receipt System

Guarantee Division of Warehouse Receipt System has developed several strategies and work programs to support the implementation of the appointment as the Implementing Agency, such as:

No	Strategi Strategy	Program Kerja Work Programs
1.	Percepatan realisasi PMN <i>Accelerated realization of PMN</i>	Pemenuhan atribut dan kebutuhan teknis serta administrasi terkait dengan realisasi PMN. <i>Fulfillment of attributes and technical and administrative requirements related to the realization of PMN.</i>
2.	Optimalisasi PP No. 1 Tahun 2016 terutama Pasal 14 <i>Optimization of Government Regulation No. 1 Year 2016, especially Article 14</i>	Melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan seluruh Pengelola Gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas sebagai Pengelola Gudang SRG. <i>Conducting socialization and cooperation with all Warehouse Manager who has obtained approval from the Supervisory Board as SRG Warehouse Manager.</i>
3.	Sosialisasi kepada <i>Stakeholder</i> <i>Socialization to Stakeholders</i>	Sosialisasi pelaksanaan Penjaminan SRG kepada: • Kantor Wilayah dan Cabang Jamkrindo; • Pengelola Gudang; • Asosiasi Komoditi; • Perbankan; dan • Lembaga Keuangan Non Perbankan; • Industri Pengolahan serta pihak terkait lainnya. <i>Socialization of the implementation of SRG Guarantee to:</i> • <i>Regional Offices and Jamkrindo Branch Offices;</i> • <i>Warehouse Managers;</i> • <i>Commodity Associations;</i> • <i>Banks; and</i> • <i>Non-Banking Financial Institutions;</i> • <i>Processing Industry and other related parties.</i>

No	Strategi Strategy	Program Kerja Work Programs
4.	Peningkatan kemampuan cabang dalam pelaksanaan Penjaminan SRG <i>Improved branch capability in SRG Guarantee implementation</i>	• Pelatihan SDM terkait dengan pemenuhan kebutuhan SDM Divisi Sistem Resi Gudang. • Pelatihan SDM untuk persiapan Kantor Wilayah dan Cabang Perum Jamkrindo seluruh Indonesia dalam penerapan sistem resi gudang. • Optimalisasi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang pelaksana Penjaminan SRG berdasarkan potensi Pengelola Gudang SRG yang beroperasi di wilayah kerjanya. • <i>Training of human resources related to the fulfillment of Human Resource Division of Warehouse Receipt System.</i> • <i>Human Resource Training for the preparation of Regional Offices and Jamkrindo Perum Branches throughout Indonesia in the application of warehouse receipt system.</i> • <i>Optimizing Regional Offices and Branch Offices implementing SRG Guarantee based on potential SRG Warehouse Managers operating in their working areas.</i>
5.	Investasi Sarana dan Prasarana LPPSRG <i>Investment on Facilities and Infrastructure of LPPSRG</i>	• Sarana dan Prasarana Pengadaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Pusat (Divisi Penjaminan SRG), Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dalam rangka pelaksanaan Penjaminan SRG. • Sistem Informasi Penjaminan SRG Membangun jaringan sistem informasi yang terpadu: » Internal Kantor Pusat/Divisi Penjaminan SRG dengan seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang pelaksana penjaminan SRG » Eksternal - Badan Pengawas - Pusat Registrasi - Seluruh Pengelola Gudang • Operasional Keuangan Membangun sistem akuntansi yang baik serta terintegrasi dengan seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang pelaksana Penjaminan SRG. • Sistem Manajemen Risiko Membangun sistem manajemen risiko terpadu untuk memitigasi risiko dalam Penjaminan SRG. • <i>Facilities and infrastructure</i> <i>Procurement and fulfillment of facilities and infrastructure of Head Office (SRG Guarantee Division), Regional Offices and Branch Offices in the framework of SRG Guarantee.</i> • <i>SRG Guarantee Information System</i> <i>Establish an integrated information system network:</i> » <i>Internal</i> <i>Head Office / Guarantee Division of SRG with all Regional Offices and Branch Offices of SRG Guarantee.</i> » <i>External:</i> - <i>Supervisory institutions</i> - <i>Registration Center</i> - <i>All Warehouse Manager</i> • <i>Finance Operational</i> <i>Establish a good accounting system which is integrated with all Regional Offices and Branch Offices of SRG Guarantee.</i> • <i>Risk Management System</i> <i>Establish an integrated risk management system to mitigate risks in SRG Guarantee.</i>

Namun demikian, setelah melakukan langkah-langkah di atas Penjaminan Sistem Resi Gudang belum dapat dijalankan, karena sesuai dengan aturan pelaksanaan yang tertuang dalam Pasal 26 PP No. 1 tahun 2016 bahwa Lembaga Pelaksana mulai melaksanakan kegiatan Penjaminan Sistem Resi Gudang terhitung sejak menerima PMN dari Pemerintah.

Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana tentunya tetap mendukung setiap keputusan pemerintah, saat ini Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang (SRG) turut berperan dalam mendukung program dari Bank Indonesia serta BAPPEBTI utamanya dalam penyempurnaan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Divisi SRG dalam koridor/kapasitasnya sebagai perusahaan penjaminan melakukan beberapa langkah strategis yaitu:

1. Menggali potensi produk penjaminan baru berbasis resi gudang
2. Pembuatan produk baru penjaminan berbasis resi gudang
3. Sosialisasi produk ke internal mitra
4. Menjamin kerja sama dengan mitra potensial (Bank, Non-Bank, Pengelola Agunan, dll.)
5. Melakukan pembinaan internal dan eksternal secara berkelanjutan.
6. *Monitoring* dan evaluasi produk penjaminan

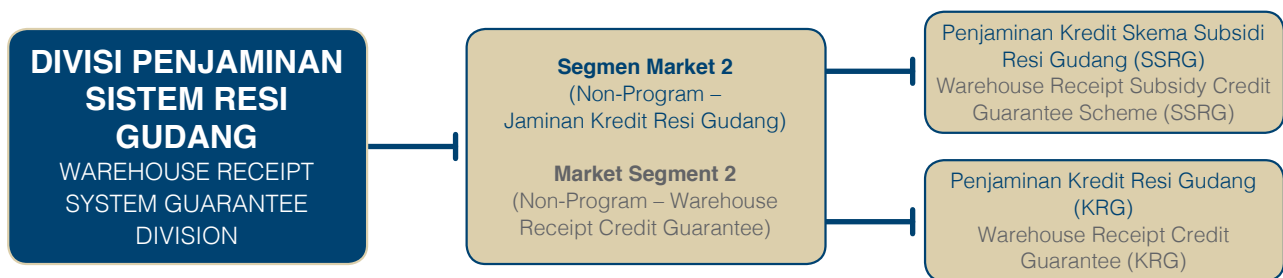
Berdasarkan langkah strategis yang telah dilakukan sebagaimana disebut di atas, Divisi SRG mengembangkan Produk Penjaminan Kredit baru dengan segmentasi sebagai berikut:

However, even after conducting the steps above Guarantee of Warehouse Receipt System has not been implemented yet because in accordance with the rules of implementation contained in Article 26 of the Government Regulation No. 1 Year 2016, the Implementing Agency can only began carrying out the Warehouse Receipt System Guarantee activities after receiving state equity participation (PMN) from the Government.

Perum Jamkrindo as the Implementing Agency obviously remains supportive of every decision of the government. Currently, the Warehouse Receipt System Guarantee Division (SRG) is participating in supporting the programs of Bank Indonesia and BAPPEBTI, mainly in the improvement of the implementation of Warehouse Receipt System. SRG Division in its capacity as guarantee institution has conducted the following strategic steps:

1. Explore the potential of new products guarantee based on warehouse receipts.
2. Create new products based on warehouse receipt.
3. Conduct socialization of products to internal partner.
4. Ensure cooperation with potential partners (Banks, Non-Banks, Collateral Managers, etc.).
5. Conduct ongoing internal and external guidance.
6. Monitor and evaluate guarantee products.

Based on the strategic steps that have been carried out as mentioned above, the SRG Division develops a new Credit Guarantee Product with the following segmentation.



1. **Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)**
Penjaminan yang diberikan kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi atas kewajiban finansial kepada Penerima Jaminan berupa kredit yang mendapat Subsidi Bunga dari Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang.
2. **Penjaminan Kredit Resi Gudang (KRG)**
Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas kewajiban finansial kepada Penerima Jaminan berupa Kredit Modal kerja dengan agunan komoditas yang

1. **Warehouse Receipt Subsidy Credit Guarantee Scheme (SSRG)**
Guarantees given to Farmers, Farmers Groups, Farmers Group Associations, and Cooperatives on financial liabilities to Beneficiaries in the form of credits receiving interest subsidy from the Government with Warehouse Receipt guarantee.
2. **Warehouse Receipt Credit Guarantee (KRG)**
Guarantees that are provided to the Guaranteed of financial obligations to the Beneficiary in the form of Working Capital Credit with the commodity collateral

tertera pada Resi gudang dimana Resi Gudang diterbitkan:

- Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai dengan UU No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya, atau;
- Oleh pengelola agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan (CMA).

Kinerja Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang

Divisi Penjamin Sistem Resi Gudang telah Kebijakan, SOP, dan Juklak untuk Produk Penjaminan Kredit berbasis resi gudang sebagai berikut:

- Kebijakan Umum Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang dan Kredit Resi Gudang.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang dan Penjaminan Kredit Resi Gudang.
- Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang dan Penjaminan Kredit Resi Gudang.

Volume Pembiayaan dan Imbal Jasa Penjaminan

Tabel Data Realisasi Kinerja Periode Desember 2017
Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang

Uraian Description	RKAP 2017		Realisasi Realization		IJP Accrual (until december 2017)
	Volume	IJP	Volume	Cash Basis IJP	
Produk Product					
a Penjaminan Sistem Resi Gudang* Warehouse receipt system guarantee*	36.732.421.875	30.610.352	-	-	-
b Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang Warehouse Receipt Subsidy Credit Guarantee Scheme	-	-	1.165.000.000	8.737.500	6.230.250
c Penjaminan Kredit/Pembiayaan Resi Gudang Guarantee for Warehouse Receipt Credit or Financing	-	-	-	-	-
Jumlah Total	36.732.421.875	30.610.352	1.165.000.000	8.737.500	6.230.250

*) menunggu realisasi PMN

as stated in the Receipt of the warehouse where it is published:

- Through Warehouse Receipt System (SRG) in accordance with Law No. 9 Year 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments, or;
- By the mortgage manager through collective agreements on collateral management (CMA).

Performance of Warehouse Receipt System Guarantee Division

Warehouse Receipt System Guarantee Division has a receipt-based SOPs, Policies, and Guidelines for Credit Guarantee Products as follows:

- General Policy on Warehouse Receipt Subsidy Credit Guarantee Scheme and Warehouse Receipt Credit Guarantee.
- Standard Operational Procedure (SOP) for Warehouse Receipt Subsidy Credit Guarantee Scheme and Warehouse Receipt Credit Guarantee.
- Guidelines for Warehouse Receipt Subsidy Credit Guarantee Scheme and Warehouse Receipt Credit Guarantee.

Financing and Guarantee Fee (IJP) Volume

Table of Performance Realization Data, December 2017
Period Warehouse Receipt System Guarantee Division

PENJAMINAN NON-PROGRAM

Selain menjamin kredit program, Perum Jamkrindo juga melakukan bisnis penjaminan Non-Program, atau biasa disebut penjaminan eksisting. Bisnis penjaminan Kredit Non-Program merupakan bisnis penjaminan yang selama ini diciptakan dan dikembangkan sendiri oleh perusahaan mengikuti kebutuhan pihak penyalur kredit, baik itu bank maupun non-bank.

NON-PROGRAM GUARANTEE

In addition to providing guarantees for program credit, Perum Jamkrindo also conducts non-program guarantee business or commonly called Existing Guarantee. Non-Program Credit Guarantee business is a guarantee business which has been created and developed by the company to follow the needs of credit distributors, whether banks or non-banks.

Perum Jamkrindo melakukan penjaminan kredit *Non-Program*, baik yang dilakukan secara tunai ataupun *non-tunai*. Penjaminan kredit secara tunai merupakan penjaminan yang permohonannya diajukan langsung oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, sementara itu Penjaminan Kredit *non-tunai* merupakan penjaminan yang permohonannya harus melalui penerima jaminan baik itu bank ataupun *non-bank*.

Saat ini Bisnis penjaminan Kredit *Non-Program* dikelola oleh Divisi Bisnis Penjaminan Bank, Divisi Bisnis Suretyship, dan Penjaminan *Non-Bank* serta Divisi Bisnis Penjaminan Syariah untuk skema penjaminan yang dilakukan dengan akad syariah.

Penjaminan Bank

Penjaminan bank berfokus kepada penjaminan yang diperuntukkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Adapun produk-produk yang ditawarkan kepada calon mitra kerja, antara lain:

1. Penjaminan kredit Multiguna
2. Penjaminan kredit Umum
3. Penjaminan kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
4. Penjaminan kredit Mikro
5. Penjaminan kredit KPR
6. Penjaminan kredit *Supply Chain Financing*
7. *Capital Management Guarantee* (CMG)

Strategi Segmen Penjaminan Bank

Divisi Bisnis Penjaminan Bank melakukan kerja sama dengan bank-bank baik Bank BUMN, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka penjaminan kredit yang disalurkan oleh bank-bank tersebut. Bisnis penjaminan kredit ini juga sangat diminati oleh perusahaan Asuransi, dengan demikian Divisi Bisnis Penjaminan Bank melakukan strategi pemasaran yang dilakukan pada 2017, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pangsa pasar produk penjaminan Bank *Non-KUR*
 - a. Diversifikasi Produk Penjaminan
 - b. *Bundling product* dan Penguatan *Co-Branding*
 - c. Fokus kepada produk-produk penjaminan jangka pendek
 - d. Melakukan sentralisasi produk penjaminan di salah satu kantor cabang
2. Optimalisasi kinerja pemasaran melalui jaringan kerja yang ada seperti Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.
 - a. Melakukan *market mapping* terhadap mitra kerja

Perum Jamkrindo guarantees *Non-Program* loans, either cash or non-cash. Cash Credit Guarantee is a guarantee of which the petition is submitted directly by Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives, while non-cash Credit Guarantee is a guarantee of which application must be submitted through the beneficiary of either bank or non-bank guarantee.

Currently, *Non-Program* Credit Guarantee is managed by Bank Guarantee Business Division, Suretyship and *Non-Bank* Guarantee Business Division, and Sharia Guarantee Business Division for guarantee scheme with sharia contract

Bank Guarantee

Bank guarantee is focused on the guarantee intended for the actors of Micro, Small, Medium and Cooperative Enterprises. The products offered to prospective partners, among others, are:

1. Multipurpose Credit Guarantee
2. General Credit Guarantee
3. Credit Guarantee for Construction and Goods/Services Procurement
4. Micro Credit Guarantee
5. KPR (Housing Loans) Guarantee
6. Supply Chain Credit Guarantee
7. Capital Management Guarantee (CMG)

Bank Guarantee Segment Strategy

The Bank Guarantee Business Division cooperates with state-owned banks, national private banks (BUSNs), regional development banks (BPD), and rural banks (BPRs) in the framework of credit guarantees disbursed by these banks. Credit guarantee business also intrigues insurance companies. Because of that, the Bank Guarantee Business Division conducts the following marketing strategy in 2017:

1. Increase market share of guarantee products of *Non-KUR* Banks
 - a. Diversification Guarantee Product
 - b. Bundling product and Co-Branding Reinforcement
 - c. Focus on short-term guarantee products
 - d. Centralized guarantee products in one branch office
2. Optimize marketing performance through existing networks such as Branch Offices and Regional Offices.
 - a. Conduct market mapping on partners

- b. Optimalisasi dan evaluasi agen penjaminan
- c. Melakukan kerja sama dengan mitra bank baru
- d. *Gathering* antara Perum Jamkrindo dengan mitra Bank.
- e. Mengutamakan Penjaminan melalui *Online System*

- b. Optimization and evaluation of guarantee agencies
- c. Cooperate with new partners
- d. Conduct *Gathering* between Perum Jamkrindo and Bank Partners.
- e. Priority Guarantee through *Online System*

Sejalan dengan Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar dimana disebutkan bahwa penjaminan kredit oleh Perum Jamkrindo dapat menurunkan ATMR Bank, yang berarti bahwa bank hanya dikenakan bobot risiko 20% pada perhitungan ATMR. Yang secara tidak langsung akan berdampak pada perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Atas dasar tersebut Divisi Bisnis Penjaminan Bank kemudian mengincar beberapa perbankan yang masih memiliki nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di bawah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Penjaminan kredit yang dapat menurunkan bobot nilai ATMR dengan menawarkan produk penjaminan Capital Management Guarantee (CMG).

In line with FSA Circular Letter No. 42/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016, Concerning Guidelines on Weighted Assets Calculation According to Credit Risk by Using the Standard Approach which states that credit guarantee by Perum Jamkrindo may decrease the Bank's ATMR, this means that banks are only subject to 20% risk weight on the calculation of RWA. This indirectly affects the calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR). On that basis, the Bank Guarantee Business Division then targeted several banks which still have the Capital Adequacy Ratio (CAR) value under which has been stipulated by the Financial Services Authority (OJK) through Credit Guarantee that can reduce the weight of the value of RWA ATMR by offering a guarantee product of Capital Management Guarantee (CMG).

Kinerja Segmen Penjaminan Bank

Performance of Bank Guarantee Segments

Volume Penjaminan Bisnis Penjaminan Bank

Guarantee Volume of Bank Guarantee Business

No	Produk Product	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian Achievement	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)
			RKAP	Realisasi Realization		
1	Multiguna Multipurpose	7.017.338	8.500.000	3.001.114	70,28%	(23,60%)
2	Umum Commercial	1.063.590	2.405.000	980.897	40,79%	(7,77%)
3	Mikro Micro	1.730.889	2.960.000	2.422.710	81,85%	39,97%
4	Konstruksi Construction	3.189.235	2.997.000	2.580.135	86,09%	(19,10%)
5	Supply Chain	142.863	1.000.000	22.826	2,28%	(84,02%)
6	KPR Housing Loans	35.836	296.000	20.345	6,87%	(43,23%)
7	CMG	10.903.350	14.800.000	8.438.322	57,02%	(22,61%)
Jumlah Total		34.083.101	42.958.000	27.466.349	63,94%	(19,41%)

Tahun 2017, *volume* penjaminan Divisi Bisnis Penjaminan Bank mencapai Rp27.466 miliar. Namun dengan pencapaian tersebut, Divisi Bisnis Penjaminan Bank belum berhasil melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp42.958 miliar atau dengan pencapaian hanya sebesar 63,94%. Dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 19%. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

In 2017, the guarantee volume of the Bank Guarantee Business Division reached IDR27,466 billion. However, with this achievement, the Bank Guarantee Business Division has not managed to exceed the target of Corporate Plan and Budget (RKAP) of 2017 set at IDR42.958 billion. In other words, the division only managed to achieve 63.94% of the target. Compared with the achievement of the previous year, there was a decline of 19%. The decline was caused by several factors, such as:

1. Terhentinya penjaminan di Bank Mandiri karena belum melalui prosedur Pelaporan Aktivitas Baru (PAB) Otoritas Jasa Keuangan sehingga beberapa produk penjaminan seperti produk kredit Serbaguna Mikro yang mempunyai potensi +/- Rp2 triliun per tahun dan Kredit Usaha Mikro yang mempunyai potensi +/- Rp0,3 triliun per tahun belum dapat dilakukan.
2. Penurunan penjaminan CMG Bukopin pada tahun 2017, yaitu dari Rp10,9 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp7,9 triliun pada tahun 2017.
3. Belum berjalannya penjaminan kredit konstruksi Bank Mandiri dengan potensi Rp0,9 triliun per tahun.
4. Penurunan atau penghentian penjaminan KMG beberapa BPD karena batasan biaya akuisisi oleh OJK dan keterbatasan *underwriting life insurance* menyangkut batasan usia, *plafond* kredit, dan persaingan tarif.
5. Perubahan pola penjaminan beberapa BPD dari secara langsung menjadi menggunakan *broker*, mengakibatkan turun atau berhenti sama sekali.

1. The termination of guarantee in Bank Mandiri since it has not been through the New Financial Service Activity Reporting (Pelaporan Aktivitas Baru/PAB) of OJK so that some guarantee products such as Multipurpose Micro Credit products have a potential of +/- IDR2 trillion per year and Micro Business Loans with potential of +/- IDR0.3 trillion per year still cannot be executed.
2. The decrease of the Bukopin CMG guarantee in 2017, from IDR10.9 trillion in 2016 to IDR7.9 trillion in 2017.
3. Bank Mandiri's construction credit guarantee has not yet started with a potential of IDR0.9 trillion per year.
4. Decrease or termination of KMG guarantee of some BPD due to the limitation of acquisition cost and limitations of underwriting life insurance regarding age limit, credit limit, and tariff competition by IJK.
5. Changes in the guarantee pattern of multiple BPDs from a direct method into using a broker, resulting in a decrease or stoppage of guarantee.

Imbal Jasa Penjaminan Bisnis Penjaminan Bank

Guarantee Fee of Bank Guarantee Business

No	Produk Product	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian Achievement	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)
			RKAP	Realisasi Realization		
1	Multiguna Multipurpose	435.360	499.500	286.219	57,30%	(34,26%)
2	Umum Commercial	15.623	72.150	12.468	17,28%	(20,19%)
3	Mikro Micro	42.809	88.800	52.011	58,57%	21,50%
4	Konstruksi Construction	32.155	40.460	26.340	65,10%	(18,08%)
5	Supply Chain	1.007	13.500	81	0,60%	(91,92%)
6	KPR Housing Loans	837	6.660	350	5,25%	(58,24%)
7	CMG	38.162	74.000	30.285	40,93%	(20,64%)
Jumlah Total		565.952	795.070	407.755	51,29%	(27,95%)

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan dari Divisi Bisnis Penjaminan Bank pada tahun 2017 mencapai Rp407 miliar, mengalami penurunan sebesar 27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp565 miliar. Pencapaian tahun 2017 hanya mencapai 51,29% dari target RKAP 2017 yang ditetapkan sebesar Rp795 miliar diakibatkan penurunan volume penjaminan yang dicapai.

The Revenue on Guarantee Fee of the Bank Guarantee Business Division in 2017 reached IDR407 billion. It was a decrease of 27% compared to the previous year which amounted to IDR565 billion. The achievement in 2017 only reached 51.29% of the set target of RKAP 2017 at IDR795 billion was attributable to the decrease in guaranteed volume.

Prospek Segmen Penjaminan Bank

Perum Jamkrindo tetap konsisten membantu pertumbuhan UMKMK di tahun 2018 dan memperluas pasar penjaminan dengan cara membuka kerja sama baru baik dengan mitra

Bank Guarantee Segment Outlook

Perum Jamkrindo remains consistent in assisting the growth of SMEs in 2018 and expanding the guarantee market by opening new partnerships with banking partners already

perbankan yang sudah bekerja sama untuk produk-produk baru maupun mitra perbankan yang belum bekerja sama sama sekali. Pasar UMKM yang masih sangat besar untuk digali merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang akan berbanding lurus dengan pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan dan penjaminan kredit oleh Jamkrindo.

Pada 2016, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57.896 juta dengan pertumbuhan sebesar 2,41% (www.bps.go.id). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM di Indonesia mencapai 57%. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Divisi Bisnis Penjaminan Bank memiliki beragam produk yang diharapkan dapat mengakomodir permintaan pasar. Selain produk penjaminan yang telah ada saat ini, Divisi Bisnis Penjaminan juga kini memiliki produk CMG yang merupakan produk penjaminan atas portofolio kredit dalam satu *coverage* penjaminan.

Bank Indonesia menetapkan suku bunga *7-Days Repo Rate* di angka 4,25%, yang kemudian menjadi suku bunga acuan baik simpanan maupun pinjaman. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan suku bunga *7-Days Repo Rate* di tahun 2017 yang mencapai 4,75%. Penurunan tersebut berdampak pada penurunan suku bunga kredit perbankan. Penurunan suku bunga kredit, berkorelasi dengan penurunan tarif IJP karena komponen suku bunga kredit mencakup tarif IJP di dalamnya. Sehingga apabila suku bunga turun, tarif IJP pun menurun. Namun di lain pihak, penurunan suku bunga kredit juga diharapkan dapat meningkatkan pencairan kredit sehingga kuantitas penjaminan bertambah dan penurunan profit dapat dihindari.

Segmen Divisi Bisnis Penjaminan Bank adalah bank penyalur kredit UMKMK yang terbagi atas Bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Saat ini, Perum Jamkrindo telah bekerja sama dengan 4 Bank BUMN, 25 BPD, 15 BUSN, dan 2 BPR.

Divisi Bisnis Penjaminan Bank bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan bank-bank yang telah bermitra tersebut dalam rangka perluasan penjaminan terhadap jenis kredit lain yang dimiliki oleh bank tersebut serta memperluas pemasaran produk-produk penjaminan kepada mitra-mitra baru yang belum ada kerja sama dengan Perum Jamkrindo.

Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non-Bank

Divisi Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non-Bank adalah divisi yang membawahi produk penjaminan *suretybond*, *customs bond*, *payment bond*, kontra bank garansi,

working on new products and banking partners who have not formed a cooperation with the corporation. The ever expansive potential market of SMEs market is one of the motors of economic growth which will be directly proportional to the growth of credit distribution by banks and credit guarantee by Jamkrindo.

In 2016, the number of SMEs in Indonesia reached 57,896 million with a growth of 2.41% (www.bps.go.id). Based on data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, the contribution of SMEs in Indonesia reached 57%. To maximize this potential, the Bank Guarantee Business Division has a variety of products which are expected to accommodate market demand. In addition to the current guarantee products, the Guarantee Business Division also now has CMG products which are the guarantee products of loan portfolio under one guarantee coverage.

Bank Indonesia set the *7-Days Repo Rate* at 4.25%, which then became the benchmark interest rate for both deposits and loans. This figure decreased compared to the *7-Days Repo Rate* rate in 2017 which reached 4.75%. The decline had an impact on the decline in bank lending rates. The decline in loan interest rates correlated with the decrease in the IJP tariffs as the lending rate component covers the IJP rate in it. So, if the interest rate falls, the IJP tariff decreases. On the other hand, the decline in loan interest rates is also expected to increase credit disbursement so that the guarantee quantity increases and the decrease in profit can be avoided.

Bank Guarantee Business Division Segment is a credit distributing banks of SMEs which are divided into SOEs (BUMN) Banks, Regional Development Banks (BPD), Private National Commercial Banks (BUSN), and Rural Banks (BPR). Currently, Perum Jamkrindo has cooperated with 4 BUMNs (SOEs), 25 BPDs, 15 BUSNs, and 2 BPR banks.

Bank Guarantee Business Division intends to establish cooperation with the partnered banks in order to extend the guarantee of other types of credit held by the bank and extend the marketing of guarantee products to new partners not yet in cooperation with Perum Jamkrindo.

Suretyship and Non-bank Guarantee Business

The *Suretyship* and Non-bank Guarantee Business Division is a division handling guarantee products of *surety bonds*, *customs bond*, *payment bond*, counter bank guarantees,

keagenan kargo dan penjaminan atas penyaluran *Cash Loan/Non-Cash Loan* dari lembaga keuangan *non-bank*.

Produk Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank:

1. Penjaminan *Suretyship*
 - a. Penjaminan *Surety Bond*
 - b. Penjaminan *Customs Bond*
 - c. Penjaminan *Payment Bond*
 - d. Penjaminan Keagenan Kargo
 - e. Kontra Bank Garansi
2. Penjaminan *Non-Bank*
 - a. Penjaminan Kredit Umum
 - b. Penjaminan Kredit Mikro
 - c. Penjaminan Kredit Multiguna
 - d. Penjaminan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
 - e. Penjaminan Otomotif (Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
 - f. Penjaminan Kredit Konstruksi
 - g. Penjaminan *Supply Chain Financing/Invoice Financing/Anjak Piutang/Factoring*
 - h. Penjaminan Distribusi Barang
 - i. Penjaminan *Peer to Peer Lending*

Strategi Segmen Penjaminan Non-Program

Memperkuat jaringan agen penjaminan *suretyship* yang tersebar dengan skema SaKa-SaKi (Satu Kabupaten Satu Kaki). Menjalin kerja sama dengan mitra kerja baru untuk penjaminan produk yang tersedia dan melakukan sosialisasi produk-produk penjaminan tersebut kepada mitra *existing*, serta melakukan *maintenance* secara intensif atas produk-produk penjaminan yang telah berjalan.

Kinerja Segmen Penjaminan Non-Program

Volume Penjaminan Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan *Non-Bank* tahun 2017 telah mencapai Rp27,44 triliun atau setara dengan 97,99% dari RKAP 2017. Meskipun belum melebihi target RKAP 2017 namun pertumbuhan *volume* Penjaminan Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan *Non-Bank* mencapai 33,93%, sedang untuk Imbal Jasa Penjaminan di tahun 2017 Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan *Non-Bank* berhasil melebihi target RKAP 2017 sebesar 102,57% atau setara dengan Rp277,95 miliar tumbuh 56,29% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan *Volume* Penjaminan dan Imbal Jasa Penjaminan yang cukup signifikan ini salah satunya dikarenakan telah dilakukannya sinergi BUMN untuk produk *Payment Bond* dengan ditandatangani Perjanjian kerja sama dengan PT Telkom (Telekomunikasi Indonesia) Divisi Business Service. Selain itu, Perum Jamkrindo kembali melakukan sinergi BUMN dengan Kliring Berjangka Indonesia (KBI) untuk produk Jaminan Risiko Transaksi (JRT) Dalam

cargo agency and guarantee for Cash Loan / Non-Cash Loan distribution from non-bank financial institutions.

The products of Suretyship and Non-bank Guarantee Business Division are:

1. Suretyship Guarantee
 - a. Surety Bond Guarantee.
 - b. Custom Bond Guarantee.
 - c. Payment Bond Guarantee.
 - d. Cargo Agency Guarantee.
 - e. Counter Bank Guarantees.
2. Non-bank Guarantee
 - a. General Credit Guarantee.
 - b. Micro Credit Guarantee.
 - c. Multipurpose Credit Guarantee.
 - d. KPR (Housing Loans) Guarantee.
 - e. Automotive guarantee.
 - f. Credit Guarantee for Construction.
 - g. Supply Chain Financing/Invoice/Factoring Credit Guarantee.
 - h. Goods Distribution Guarantee.
 - i. Peer to Peer Lending Guarantee.

Non-program Guarantee Segment Strategy

Strengthen the network of suretyship guarantee agents with the SaKa-SaKi scheme (One District-One Branch). Establish cooperation with new partners to guarantee the available products and socialize the guarantee products to the existing partners, and conduct intensive maintenance of the current guarantee products.

Performance of Non-program Guarantee Segment

The volume of transaction of Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Division in 2017 has reached IDR27.44 trillion, which is equivalent to 97.99% of RKAP 2017. Although it has not exceeded the target of RKAP 2017, the Suretyship and Non-Bank Business Surety Division Survey has grown by 33, 93%, while for the Return of Assurance Services in 2017 the Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Division has been successful in exceeding the target of RKAP 2017 of 102.57% or equivalent to IDR277.95 billion. This is a growth of 56.29% compared to the previous year. The significant increase of the volume of Guarantee and Guarantee Fee is one of the reasons for the synergy of SOEs for Payment Bond products with signed Agreement of cooperation with PT Telkom (Telekomunikasi Indonesia) Business Service Division. In addition, Perum Jamkrindo again synergizes with another SOEs namely PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) for Transaction Risk Guarantee (JRT) products in Pasar Lelang Gula Rafinasi and MoU with PT SIER. The realization

Pasar Lelang Gula Rafinasi dan MoU dengan PT SIER. Realisasi kegiatan atas seluruh kodifikasi produk-produk penjaminan sampai dengan periode triwulan IV tahun 2017 adalah penandatanganan PKS sekaligus sosialisasi/demo aplikasi penjaminan *online* dengan mitra baru yakni PT Indosurya Inti Finance, PT Radana Bhaskara Finance, PT Pupuk Kujang, PT Semen Padang, PT Semen Baturaja, PT Investree Radhika Jaya, PT Mandiri Tunas Finance, PT Suzuki Finance Indonesia, PT Tifa Finance, MoU PT Sarana Multigria Financial, dan MoU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Inisiasi kerja sama juga telah dilakukan dengan berbagai calon mitra multifinance dan Lembaga Keuangan Lainnya seperti LPDB & LPMUKP. Sedangkan maintenance atas produk-produk Penjaminan dilakukan dengan membina hubungan baik yang telah terbentuk selama ini dengan mitra penjaminan eksisting.

Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank melakukan Inisiasi kerja sama dengan mitra *non-multifinance* mengarah kepada Industri *Financial Technology*, dengan didapatkannya izin Otoritas Jasa Keuangan tentang Penjaminan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dengan surat No. S-3588/NB.111/2017. Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank telah melakukan kerja sama dengan Amarta dan Investree.

of activities on all the codification of guarantee products up to the fourth quarter of 2017 is the signing of MoA as well as socialization/demo of online guarantee application with new partner, PT Indosurya Inti Finance, PT Radana Bhaskara Finance, PT Pupuk Kujang, PT Semen Padang, PT Semen Baturaja, PT Investree Radhika Jaya, PT Mandiri Tunas Finance, PT Suzuki Finance Indonesia, PT Tifa Finance, MoU signing with PT Sarana Multigria Financial, and MoU signing with Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Initiation of cooperation has also been done with various prospective partners of multifinance and other financial institutions such as LPDB & LPMUKP. On the other hand, the maintenance of guaranteed products is done by fostering good relationships which have been formed so far with existing guarantee partners.

With the acquisition of the permit from the Financial Services Authority regarding Information Technology-Based Financing Guarantee the Suretyship and Non-bank Guarantee Business Division initiates cooperation with non-multi finance partners on Financial Technology Industry, as stated in its circular letter number S-3588 / NB.111 / 2017. The Suretyship and Non-bank Guarantee Business Division has cooperation with Amarta and Investree.

Volume Pembiayaan Bisnis Penjaminan Non-Program

The volume of Non-Program Guarantee Business Financing

Produk Product	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
CUSTOMS BOND	84.825,62	200.000,00	100.540,02	50,27%	18,53%
DISTRIBUSI BARANG GOODS DISTRIBUTION	-	1.000.000,00	43.120,43	4,31%	0,00%
KEAGENAN KARGO CARGO AGENCY	71.431,00	90.000,00	67.401,00	74,89%	(5,64%)
KREDIT KPR MNC MNC HOUSING LOANS CREDIT	117.309,78	130.000,00	55.143,43	42,42%	(52,99%)
KREDIT MIKRO MICRO CREDIT	1.236.533,99	1.200.000,00	1.615.075,21	134,59%	30,61%
KREDIT MIKRO BAV BAV MICRO CREDIT	455.258,00	450.000,00	613.482,90	136,33%	34,75%
KREDIT MULTIGUNA MULTIPURPOSE CREDIT	365.773,00	500.000,00	565.303,93	113,06%	54,55%
KREDIT OTO AUTOMOTIVE CREDIT	2.063.553,33	7.000.000,00	5.182.718,39	74,04%	151,16%
KREDIT UMUM COMMERCIAL CREDIT	48.470,14	35.000,00	57.232,75	163,52%	18,08%
PAYMENT BOND	133.539,79	70.000,00	517.746,21	739,64%	287,71%

Produk Product	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
PEMBIAYAAN INVOICE INVOICE FINANCING	19.368,37	25.000,00	42.471,86	169,89%	119,28%
SUPERMIKRO SUPERMICRO	843.994,00	300.000,00	3.715.606,01	1.238,54%	340,24%
SURETYBOND	9.041.695,48	9.000.000,00	8.849.251,02	98,33%	(2,13%)
KREDIT KONTRA BANK GARANSI COUNTER BANK GUARANTEE CREDIT	6.005.164,27	8.000.000,00	6.012.357,56	75,15%	0,12%
TOTAL	20.486.916,79	28.000.000,00	27.437.450,72	97,99%	33,93%

Imbal Jasa Penjaminan Bisnis Penjaminan Non-Program

Guarantee Fee of Non-program Guarantee Business

Produk Product	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
CUSTOMS BOND	798,33	1.999,27	914,85	45,76%	14,60%
DISTRIBUSI BARANG Goods Distribution	-	6.000,00	301,16	5,02%	0,00%
KEAGENAN KARGO CARGO AGENCY	1.428,62	1.800,00	1.351,22	75,07%	(5,42%)
KREDIT KPR MNC MNC HOUSING LOANS CREDIT	351,93	390,00	165,43	42,42%	(52,99%)
KREDIT MIKRO MICRO CREDIT	20.621,94	20.868,15	24.733,37	118,52%	19,94%
KREDIT MIKRO BAV BAV MICRO CREDIT	6.911,38	6.824,35	9.066,49	132,86%	31,18%
KREDIT MULTIGUNA MULTIPURPOSE CREDIT	5.096,06	6.840,78	8.977,16	131,23%	76,16%
KREDIT OTO AUTOMOTIVE CREDIT	22.540,62	88.372,71	74.044,88	83,79%	228,50%
KREDIT UMUM COMMERCIAL CREDIT	1.226,03	1.348,31	1.200,79	89,06%	(2,06%)
PAYMENT BOND	1.054,16	578,66	9.099,49	1.572,52%	763,20%
PEMBIAYAAN INVOICE INVOICE FINANCING	116,56	156,22	226,88	145,23%	94,65%
SUPERMIKRO SUPERMICRO	14.122,57	5.135,72	45.741,58	890,65%	223,89%
SURETYBOND	42.229,10	45.715,52	40.652,00	88,92%	(3,73%)
KREDIT KONTRA BANK GARANSI COUNTER BANK GUARANTEE CREDIT	61.348,90	84.964,54	61.474,72	72,35%	0,21%
TOTAL	177.846,19	270.994,23	277.950,02	102,57%	56,29%

Prospek Segmen Penjaminan Non-Program

Perum Jamkrindo melihat bahwa industri keuangan di Indonesia tidak hanya lembaga perbankan, lembaga keuangan *non-bank* seperti *multifinance*, *fintech*, koperasi, pegadaian, LPEI, ataupun pabrikan untuk distribusi barang juga membutuhkan penjaminan sebagai mitigasi risiko dan jumlahnya pun cukup banyak.

Di tahun 2017 saja pertumbuhan *multifinance* sebesar 7-8% tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai angka 8-10%. APBN & APBD untuk alokasi pengadaan barang dan jasa juga mencapai Rp1.000 triliun. Begitu juga dengan Volume Penjaminan Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank di tahun 2017 yang mencapai Rp27,44 triliun Rupiah atau 20,27% dari keseluruhan penjaminan pada Perum Jamkrindo yang sebesar Rp135,36 triliun. Dari data tersebut terlihat bahwa pasar penjaminan *suretyship* dan *non-bank* ini potensial dan masih terbuka luas.

PENJAMINAN SYARIAH

Penjaminan Syariah menasar segmen penjaminan untuk UMKM-K lebih khusus penjaminan pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif, ketiga skema pembiayaan tersebut masih merupakan segmen favorit perbankan syariah, mengingat pemerintah sangat konsen dengan pengembangan infrastruktur dan perumahan rakyat.

Jamkrindo memiliki sejumlah produk di segmen penjaminan syariah, antara lain:

1. Penjaminan Pembiayaan Umum
2. Penjaminan Pembiayaan Mikro
3. Penjaminan Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa
4. Penjaminan Kontra Bank Garansi
5. Penjaminan Pembiayaan Multiguna
6. Penjaminan Pembiayaan FLPP

Strategi Segmen Penjaminan Syariah

Selain melakukan pengembangan produk mengikuti kebutuhan penjaminan lembaga keuangan bank dan *non-bank* divisi bisnis penjaminan syariah juga menambah portofolio mitra dengan mengadakan kerja sama dengan mitra baru.

Kinerja Segmen Penjaminan Syariah

Tahun 2017, segmen penjaminan syariah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dibandingkan tahun 2016, kinerja segmen bisnis penjaminan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 196% dengan realisasi Volume Penjaminan mencapai Rp5,9 triliun. Pencapaian tersebut setara dengan 139% dari RKAP.

Non-program Guarantee Segment Outlook

Perum Jamkrindo sees that the financial industry in Indonesia is not only banking institutions, non-bank financial institutions such as multifinance, fintech, cooperatives, pawnshops, LPEI, or manufacturers for the distribution of goods also need guarantee as a risk mitigation and there are quite a lot of them.

In 2017 alone the growth of multifinance of 7-8% was not that much different from the banking credit growth which reached 8-10%. The State and Regional Government Budgeting (APBN and APBD) for the allocation of procurement of goods and services reached IDR1,000 trillion. The Volume of Guarantee of Suretyship and Non-Bank Guarantee Division in 2017 reached IDR27.44 trillion or equal to 20.27% of the total acquired guarantee of Perum Jamkrindo of IDR135,36 trillion. From the data, it can be seen that the suretyship and non-bank guarantee market is very potential and still open for exploration.

SYARIAH GUARANTEE

Syariah Guarantee is targeting the guarantee segment for SMEs, or more specifically, the guarantee of working capital, investment, and consumptive financing. The three financing schemes are still the favorite segments of Syariah banking, as the government is very much concerned with the development of infrastructure and public housing.

Jamkrindo has a number of products in the Syariah guarantee segment, such as:

1. General Financing Guarantee
2. Micro Financing Guarantee
3. Guarantee of Working Capital Financing of Construction & Procurement of Goods/Services
4. Counter Bank Guarantee
5. Multipurpose Financing Guarantee
6. FLPP Financing Guarantee

Syariah Guarantee Segment Strategy

In addition to product development following the guarantee needs of bank and non-bank financial institutions, the Syariah business division also adds to its partnership portfolio by partnering with new partners.

Performance of Syariah Guarantee Segment

In 2017, the Syariah guarantee segment showed a very good performance. Compared to 2016, the performance of the Syariah business segment grew by 196% with the realization of Guarantee Volume reaching IDR5,9 trillion. This achievement is equivalent to 139% of RKAP.

dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
Pembiayaan Mikro Micro Financing	204.542,9	235.667	67.350,3	29%	33%
Pembiayaan Umum General Financing	15.384,0	18.530	19.600,0	106%	127%
Pembiayaan Konstruksi & PBJ Financing on Construction & Procurement of Goods and Services	35.149,5	37.500	25.622,5	68%	73%
Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	1.086.506,8	1.579.970	1.162.640,6	74%	107%
Pembiayaan Mikro Multiguna Micro Multipurpose Financing	3.695,6	-	667,0	100%	18%
Kontra Bank Garansi Counter Bank Guarantee	359.010,1	660.600	917.784,4	139%	256%
Pembiayaan FLPP FLPP Financing	1.348.374,3	1.600.000	3.571.396,1	223%	265%
KPR Housing Loans	-	-	3.870,0	100%	100%
Pembiayaan Arrum Arrum Financing	-	-	211.240,5	100%	100%
Pembiayaan Otto Automotive Financing	-	157.168	-	0%	0%
Jumlah Total	3.052.663,3	4.289.435	5.980.171,6	139%	196%

Imbal Jasa Kafalah Bisnis Penjaminan Syariah

Kafalah Fee of Syariah Guarantee Business

dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
Non-Program					
Pembiayaan Mikro Micro Financing	3.848,9	5.040,3	1.396,3	28%	36%
Pembiayaan Umum General Financing	323,5	610,9	574,2	94%	177%
Pembiayaan Konstruksi & PBJ Financing on Construction and Procurement of Goods and Services	307,5	316,2	269,2	85%	88%
Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	25.108,9	33.212	21.683,7	65%	86%
Pembiayaan Mikro Multiguna Micro Multipurpose Financing	69,1	-	13,3	100%	19%
Kontra Bank Garansi Counter Bank Guarantee	3.041,4	6.279,5	8.760,4	140%	288%
KPR Housing Loans	-		79,9	100%	100%
Pembiayaan Arrum Arrum Financing	-		3.916,9	100%	100%
Pembiayaan Otto Automotive Financing	-		-	0%	0%
Program					

dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
Pembiayaan FLPP FLPP Financing	3.236,1	3.840	8.594,7	224%	266%
Jumlah Total	35.935,4	50.556,9	45.288,7	90%	126%

Jumlah pendapatan Imbal Jasa Kafalah Penjaminan Syariah tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 26% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp36 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp45 miliar pada tahun 2017. Namun demikian, pencapaian tersebut masih berada di bawah target RKAP 2017 yang ditetapkan sebesar Rp50 miliar atau dengan pencapaian sebesar 90% dari RKAP 2017.

The total revenues of Kafalah Fee of Syariah Guarantee in 2017 increased by 26% compared to the previous year, from IDR36 billion in 2016 to IDR45 billion in 2017. Nevertheless, the achievement is still below the target of 2015 RKAP set at IDR50 billion. In other words, it only achieved 90% of the 2017 RKAP.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik: Hertanto, Grace & Karunawan dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Bahasan kinerja keuangan Perseroan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik: Hertanto, Grace & Karunawan dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan, disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

This financial performance description is prepared based on the Company's Financial Statements presented in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) generally accepted in Indonesia for the year ended December 31, 2017. These financial statements have been audited by Public Accounting Firm: Hertanto, Grace & Karunawan with unqualified opinion of all things material.

Discussion of the Company's financial performance is submitted with due consideration to the Consolidated Financial Statements of external auditors as an integral part of this Annual Report.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

This financial performance description is prepared in accordance with the Company's Financial Statements presented in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) generally accepted in Indonesia for the year ended December 31, 2017. These Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm: Hertanto, Grace & Karunawan with unqualified opinion of all things material.

Discussion of the Company's financial performance is submitted with due consideration to the Consolidated Financial Statements of external auditors as an integral part of this Annual Report.

Aset

dalam jutaan Rupiah

Assets

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	5.418.223	5.723.816	(305.593)	(5,34%)
Surat Berharga Securities	4.025.861	3.209.124	816.737	25,45%
Piutang IJP IJP Receivables	2.474.754	2.347.025	127.729	5,44%
Piutang Penjaminan Ulang Re-guarantee Receivables	120.532	112.346	8.186	7,29%
Piutang yang diberikan Loans	776	955	(179)	(18,76%)
Piutang lain-lain Other Receivables	87.892	81.728	6.164	7,54%
Pajak Bayar dimuka Prepaid Taxes	-	82	(82)	(100,00%)

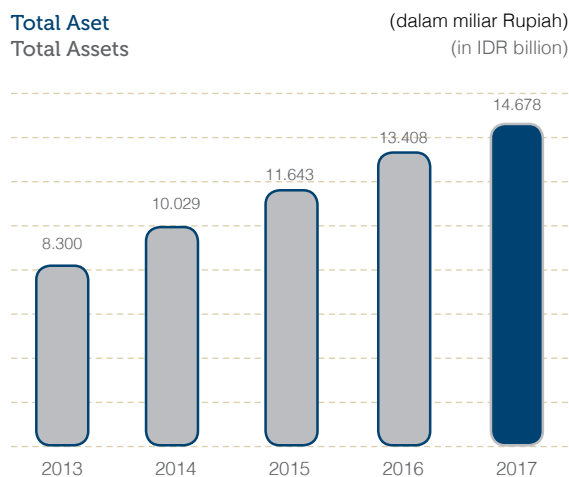
dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Premi dan Fee dibayar di muka <i>Prepaid Premiums and Fee</i>	1.132.300	991.153	141.147	14,24%
Beban dibayar di muka <i>Prepaid Expenses</i>	21.690	25.020	(3.330)	(13,31%)
Aset Tetap <i>Fixed Assets</i>	471.169	441.995	29.174	6,60%
Aset Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Assets</i>	177.252	174.614	2.638	1,51%
Aset lain-lain <i>Other Assets</i>	747.693	300.641	447.052	148,70%
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	14.678.143	13.408.418	1.269.725	9,47%

Total Aset Perum Jamkrindo per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.678 miliar, naik sebesar 9% atau Rp1.270 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp13.408 miliar. Total Aset mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir seperti tergambar dalam bagan di bawah ini:

Total Assets of Perum Jamkrindo as of December 31, 2017, amounted to IDR14,678 billion, an increase of 9% or IDR1,270 billion compared to the previous year which amounted to IDR13,408 billion. Total Assets have increased year by year over the last 5 years as illustrated in the chart below:



Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Jamkrindo mengalami penurunan sebesar 5% atau Rp306 miliar dari Rp5.724 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp5.418 miliar pada tahun 2017. Penurunan yang terjadi dikarenakan kas dan setara kas dialokasikan untuk investasi dalam surat berharga.

Cash and Cash Equivalent

Cash and Cash Equivalents of PT Jamkrindo decreased by 5% or equivalent to IDR306 billion from IDR5,724 billion in 2016 to IDR5,418 billion in 2017. The decrease was caused by the allocation of cash and cash equivalents for investments in marketable securities.

Surat Berharga

Surat Berharga Perum Jamkrindo pada tahun 2017 sebesar Rp4.026 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp817 miliar atau 25% dibandingkan tahun sebelumnya Rp3.209 miliar. Peningkatan yang terjadi dikarenakan meningkatnya penempatan investasi.

Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp2.475 miliar menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp128 miliar atau 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.347 miliar. Peningkatan yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya volume penjaminan KUR.

Premi dan Fee Dibayar di Muka

Premi dan *fee* dibayar di muka Perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp141 miliar atau 14,24% dari nilai sebesar Rp991 miliar di tahun 2016 menjadi Rp1,1 triliun di tahun 2017. Penyebab peningkatan ini lebih disebabkan karena volume penjaminan eksisting meningkat sehingga berpengaruh langsung terhadap peningkatan premi dan *fee* dibayar di muka (*co guarantee* dan reasuransi).

Aset Tetap

Aset Tetap Perusahaan pada penghujung tahun 2017 adalah sebesar Rp471 miliar dimana angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp29 miliar atau 7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp442 miliar. Penyebab meningkatnya *asset* tetap Perusahaan ini adalah karena adanya peningkatan belanja modal.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan Perusahaan pada posisi 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp177 miliar, dimana terdapat pertumbuhan sebesar 2% atau Rp3 miliar dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp174 miliar. Pertumbuhan nilai ini dikarenakan adanya kenaikan cadangan-cadangan.

Aset Lain-lain

Aset lain-lain Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp748 miliar, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp447 miliar atau 149% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp301 miliar. Peningkatan ini dikarenakan oleh penambahan deposito yang dibatasi penggunaannya dan *subrogasi* belum teridentifikasi.

Securities

Securities of Perum Jamkrindo in 2017 amounting to IDR4,026 billion, or increased by IDR817 billion or 25% compared to the previous year of IDR3,209 billion. The increase is due to increased investment placement.

IJP Receivables

The Company's IJP Receivables in 2017 of IDR2,475 billion represents an increase of IDR128 billion or 5% compared to the previous year which amounted to IDR2,347 billion. The increase is due to the increased volume of KUR guarantee.

Prepaid Premiums and Fee

Prepaid premiums and fees of the Company increased by IDR141 billion or 14.24% from IDR991 billion in 2016 to IDR1.1 trillion in 2017. The cause of this increase was the increased volume of existing guarantee, which directly affected the increase in premiums and prepaid fees (*co-guarantee* and reinsurance).

Fixed Assets

The Company's fixed assets at the end of 2017 amounted to IDR471 billion, which represents an increase of IDR29 billion or 7% when compared to the previous year which amounted to IDR442 billion. The cause of the increase was an increase in capital expenditures.

Deferred Tax Assets

The Company's Deferred Tax Assets as of December 31, 2017, amounted to IDR177 billion, representing a growth of 2% or IDR3 billion compared to the position of 31 December 2016 amounting to IDR174 billion. The growth of this value is due to the increase of reserves.

Other Assets

The other assets of Perum Jamkrindo at end of 2017 amounted to IDR748 billion, a significant increase of IDR447 billion or 149% when compared to 2016 of IDR301 billion. This increase is due to the addition of restricted deposits and unidentified subrogation.

Aset Lain-lain

dalam jutaan Rupiah

Other Assets

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Deposit	424.140	76.140	348.000	457,05%
Piutang Dalam Proses Receivable in Process	170.435	91.946	78.489	85,36%
Klaim Dalam Proses Claim in Process	143.507	117.472	26.035	22,16%
Aset Lainnya Other Assets	9.443	14.930	(5.487)	(36,75%)
Aset Tak Berwujud-Software Intangible Asset - Software	168	153	15	9,80%
Jumlah Aset Lain-Lain Total Other Assets	747.693	300.641	447.052	148,70%

Liabilitas

dalam jutaan Rupiah

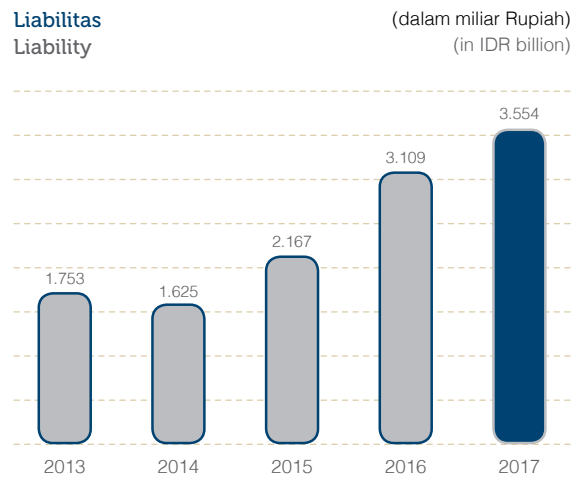
Liabilities

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Utang Klaim Claim Payable	75.925	11.650	64.275	551,74%
Utang Pajak Tax Payable	59.550	72.812	(13.262)	(18,21%)
Cadangan Klaim Claims Reserve	427.143	404.959	22.184	5,48%
Utang Penjaminan Ulang Co-Guarantee Payable	109.687	66.604	43.083	64,69%
Pendapatan Ditangguhkan Deferred Income	2.638.598	2.346.246	292.353	12,46%
Utang lain-lain Other Payable	204.458	178.409	26.049	14,60%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	38.907	28.168	10.739	38,12%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.554.268	3.108.849	445.419	14,33%

Jumlah Liabilitas Perum Jamkrindo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.554 miliar mengalami pertumbuhan sebesar Rp445 miliar atau 14,33% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp3.109 miliar. Pertumbuhan yang terjadi adalah dikarenakan hampir semua aspek pada liabilitas mengalami peningkatan karena terkait pertumbuhan usaha. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan selalu terjadi untuk Liabilitas setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir seperti dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Total Liabilities of Perum Jamkrindo as of December 31, 2017, amounted to IDR3,554 billion, which is an increase of IDR445 billion or 14.33% compared to 2016 of IDR3,109 billion. The reason for the growth is because almost all aspects of liability increased due to the growth of business. It can be said that there is always a growth in Liabilities every year for the last 5 years as can be seen in the chart below:



Utang Klaim

Utang Klaim Perusahaan pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp76 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp64 miliar atau 552% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp12 miliar. Peningkatan yang terjadi dikarenakan klaim pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan untuk persetujuan di akhir tahun 2017 baru dibayarkan di awal tahun 2018.

Claim Payable

The Company's Claim Payable at the end of 2017 amounted to IDR76 billion or an increase of IDR64 billion or 552% when compared to IDR12 billion in 2016. The increase is due to increased claims in 2017, and the approval by the end of 2017 is only paid in early 2018.

Utang Penjaminan Ulang

Utang Penjaminan Ulang Perum Jamkrindo pada tahun 2017 adalah sebesar Rp110 miliar yang mengalami peningkatan sebesar Rp43 miliar atau 65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp67 miliar. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan *volume* penjaminan yang berhubungan langsung dengan premi yang harus dibayar perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim.

Co-Guarantee Payable

The Co-Guarantee Payable of Perum Jamkrindo in 2017 amounted to IDR110 billion, which is an increase of IDR43 billion or 65% compared to the previous year of IDR67 billion. This increase is due to an increase in the volume of guarantee which is directly related to the premium the company pays to transfer the risk of claims.

Cadangan Klaim

Cadangan Klaim Jamkrindo pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp427 miliar, naik sebesar 5% atau Rp22 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp404 miliar. Kenaikan cadangan klaim ini terjadi dikarenakan meningkatnya *volume* penjaminan sehingga perusahaan membentuk cadangan klaim yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya untuk memitigasi risiko.

Claims Reserve

Jamkrindo's Claims Reserve at the end of 2017 amounted to IDR427 billion, or an increase of 5% or IDR22 billion when compared to the previous year of IDR404 billion. The increase in Claims Reserve is due to an increase in the volume of guarantee so that the company had to form a claims reserve which is higher than the previous year's to mitigate risks.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Perusahaan meningkat sebesar 38% atau Rp11 miliar, posisi di tahun 2016 sebesar Rp28 miliar dan posisi di akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp39 miliar. Peningkatan yang terjadi dikarenakan bertambahnya jumlah SDM di perusahaan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan imbalan pasca kerja.

Employee Benefits Liabilities

The Company's Employee Benefits Liabilities increased by 38% or equal to IDR11 billion. Its position in 2016 amounted to IDR28 billion and its position in the year ending of 2017 was IDR39 billion. The increase is due to the increase in the number of human resources in the company which affects the increase in post-employment benefits.

Ekuitas

Equity

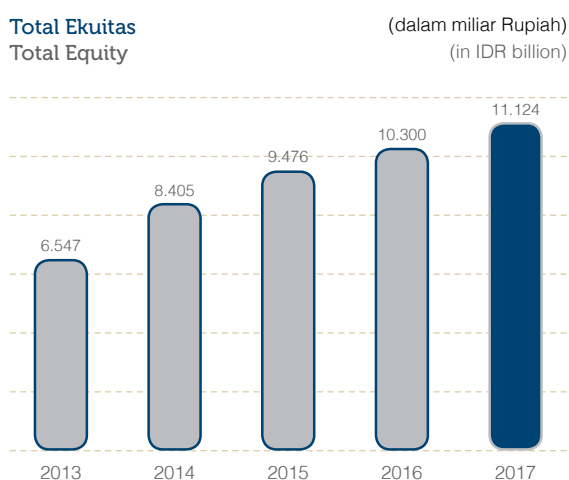
dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)		Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%
Penyertaan Modal Pemerintah State Equity Participation	7.638.733	7.638.733	(0)	0,00%
Cadangan-cadangan Reserves	2.471.937	1.828.847	643.090	35,16%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Component	211.345	139.930	71.415	51,04%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	14	13	1	5,16%
Saldo Laba Retained Earnings	801.845	692.045	109.800	15,87%
Jumlah Ekuitas Total Equity	11.123.875	10.299.569	824.306	8,00%

Posisi Ekuitas Perum Jamkrindo pada tahun 2017 adalah sebesar Rp11.124 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp842 miliar atau 8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp10.300 miliar. Jumlah Ekuitas Perum Jamkrindo selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dapat terlihat dari bagan berikut ini:

The equity position of Perum Jamkrindo in 2017 amounted to IDR11,124 billion. This is an increase of IDR842 billion or 8% when compared to the previous year of IDR10,300 billion. Total Equity of Perum Jamkrindo for the last 5 years has always increased, as can be seen from the following chart:



Laba Rugi

Profit (Loss) Statement

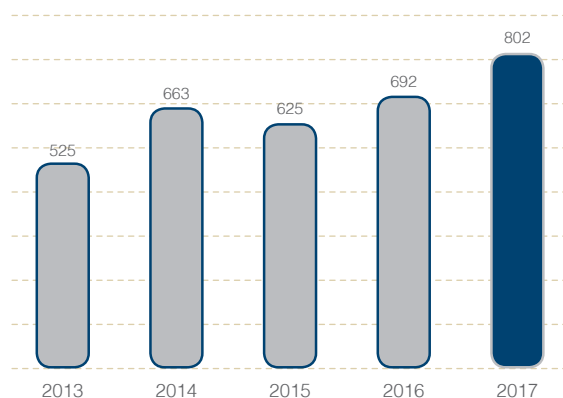
dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income	1.805.686	1.588.441	217.245	13,68%
Beban Klaim Claim Expenses	(1.004.610)	(871.583)	(133.027)	15,26%
Penjaminan Bersih Operating Income - Net	801.077	716.857	84.220	11,75%
Pendapatan Investasi Bersih Investment Income - Net	601.634	587.678	13.956	2,37%
Pendapatan Lain-lain Bersih Other Income - Net	328.679	294.070	34.609	11,77%
Beban Usaha Operating Expenses	(708.169)	(657.151)	(51.018)	7,76%
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	1.023.221	941.454	81.767	8,69%
Laba Bersih Net Income	801.846	692.045	109.801	15,87%
Laba Komprehensif Total Comprehensive Income	859.677	573.335	286.342	49,94%

Laba Bersih Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp802 miliar dimana angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp110 miliar atau 16% dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2016 yaitu sebesar Rp692 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan seiring peningkatan *volume* penjaminan dan investasi.

Net income of Perum Jamkrindo at the end of 2017 amounted to IDR802 billion, which represents an increase of IDR110 billion or 16% when compared to its position at the end of 2016 of IDR692 billion. This increase was attributed to the rising incomes as the volume of guarantee and investment increased.

Laba Bersih
Net Income(dalam miliar Rupiah)
(in IDR billion)

Beban Klaim

Beban Klaim perum Jamkrindo pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp1.005 miliar meningkat 15% atau Rp133 miliar dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp872 miliar. Peningkatan yang terjadi dikarenakan oleh meningkatnya *volume* penjaminan sehingga potensi klaimnya semakin tinggi.

Penjaminan Bersih

Penjaminan Bersih Perusahaan pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp801 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp84 miliar atau 12% dibandingkan dengan akhir tahun 2016 yaitu sebesar Rp717 miliar. Peningkatan nilai penjaminan bersih ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan IJP.

Pendapatan Investasi Bersih

Pendapatan Investasi Bersih Perusahaan per 3 Desember 2017 adalah sebesar Rp602 miliar, terdapat pertumbuhan sebesar Rp14 miliar atau 2% dibandingkan dengan akhir tahun 2016 yang sebesar Rp588 miliar. Pertumbuhan yang terjadi dikarenakan peningkatan dana kelolaan investasi sehingga pendapatan investasi mengalami peningkatan.

Pendapatan Lain-lain Bersih

Pendapatan Lain-lain Bersih Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp329 miliar, mengalami peningkatan sebesar 12% atau Rp35 miliar dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp294 miliar. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya pendapatan *subrogasi*.

Beban Usaha

Beban Usaha pada Perusahaan pada akhir tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8% atau Rp51 miliar yaitu senilai Rp708 miliar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp657 miliar. Peningkatan beban usaha pada tahun ini lebih disebabkan karena bertambahnya jumlah SDM sehingga beban SDM mengalami peningkatan.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak Perum Jamkrindo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.023 miliar dimana angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 9% atau Rp82 miliar dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp941 miliar. Peningkatan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan seiring peningkatan *volume* penjaminan dan investasi.

Laba Komprehensif

Laba Komprehensif Perusahaan pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp573 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 50% atau Rp286 miliar menjadi

Claim Expenses

Claim Expenses of Perum Jamkrindo at the end of 2017 amounted to IDR1,005 billion. This represents an increase of 15% or IDR133 billion when compared to the year 2016 of IDR872 billion. The increase is caused by the increasing volume of guarantee so that the potential claim is higher.

Operating Income-Net

The Company's net operating income at end of 2017 amounted to IDR801 billion which is an increase of IDR84 billion or 12% when compared to the end of 2016 of IDR717 billion. The increase in net operating income is due to the increase in IJP revenues.

Investment Income-Net

The Company's net investment income per December 3, 2017, was IDR602 billion, a growth of IDR14 billion or 2% when compared to the end of 2016 of IDR588 billion. The growth is due to the increase in investment-managed funds which caused the increase in net investment income.

Other Income-Net

Other Net Income of Perum Jamkrindo at the end of 2017 was IDR329 billion which is an increase of 12% or IDR35 billion when compared to the year 2016 other net income of IDR294 billion. This increase is more to the increase in subrogated income.

Operating Expenses

Operating Expenses of the Company at the end of 2017 increased by 8% or IDR51 billion, amounting to IDR708 billion when compared to the previous year of IDR657 billion. The increase in operating expenses this year is due to the increasing number of human resources so that the burden of human resources has increased.

Income Before Tax

Perum Jamkrindo's income before tax per December 31, 2017, amounted to IDR1,023 billion, which represents an increase of 9% or IDR82 billion when compared to December 31, 2016, of IDR941 billion. The increase was attributed to the rising income as the volume of guarantee and investment increased.

Total Comprehensive Income

The Company's Total Comprehensive Income at the end of 2016 amounted to IDR573 billion and increased in 2017 by 50% or equal to IDR286 billion to IDR860 billion. The

Rp860 miliar. Terdapatnya peningkatan pada Laba Komprehensif pada tahun ini adalah dikarenakan oleh meningkatnya pendapatan seiring peningkatan volume penjaminan dan investasi, serta nilai pasar surat berharga yang naik.

increase in the Comprehensive Income this year is due to an increase in income as the volume of guarantee and investment increases, as well as the rising market value of securities.

Arus Kas

Cash Flow

Arus Kas

Dalam jutaan Rupiah

Cash Flow

In IDR million

Uraian Description	Tahun Year		Pertumbuhan/Penurunan Growth/Decrease	
	2017	2016	Rp IDR	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flow from Operational Activity</i>	350.601	(212.440)	563.041	(265,0%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flow from Investment Activity</i>	(608.193)	154.112	(762.305)	(494,6%)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flow from Financing Activity</i>	(48.000)	187.323	(235.323)	(125,6%)
(Penurunan) Kenaikan Kas dan Setara Kas <i>(Decrease) Increase of Cash and Cash Equivalent</i>	(305.593)	128.994	(434.587)	(336,9%)
Kas dan setara kas awal tahun <i>Cash and Cash Equivalent at the beginning of the year</i>	5.723.816	5.594.822	128.994	2,3%
Kas dan setara kas akhir tahun <i>Cash and Cash Equivalent at the end of the year</i>	5.418.223	5.723.816	(305.593)	(5,3%)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp351 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp563 miliar atau 265% dimana pada tahun 2016 sebesar Rp212 miliar. Arus kas masuk diperoleh dari penerimaan imbalan jasa penjaminan dan penerimaan aktivitas operasi lainnya.

Cash Flow from Operational Activity

Net cash flows generated from operating activities in 2017 amounted to IDR351 billion, which is an increase of IDR563 billion or 265% when compared to 2016 of IDR212 billion. The cash inflows are derived from the guarantee fee and other operating activities.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp608 miliar, mengalami penurunan sebesar 494% atau Rp762 miliar dimana pada tahun 2016 Perusahaan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp154 miliar.

Cash Flow from Investment Activity

Net cash flows used in investing activities in 2017 amounted to IDR608 billion, a decrease of 494% or IDR762 billion when compared to the one in 2016 when the Company obtained net cash flows from investment activities of IDR154 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp48 miliar, mengalami penurunan sebesar 126% atau Rp235 miliar dimana pada tahun sebelumnya Perusahaan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp187 miliar.

Cash Flow from Financing Activity

Net cash flow used in financing activities in 2017 amounted to IDR48 billion, a decrease of 126% or IDR235 billion, which in the previous year, the Company obtained net cash flow from financing activities amounting to IDR187 billion.

Kas dan Setara Kas Awal Tahun

Kas dan setara kas pada awal tahun 2017 adalah sebesar Rp5.724 miliar, mengalami peningkatan sebesar 2% atau Rp129 miliar dimana pada tahun 2016 adalah sebesar Rp5.595 miliar.

Cash and Cash Equivalent at the beginning of the year

Cash and cash equivalents at the beginning of 2017 amounted to IDR5,724 billion, an increase of 2% or IDR129 billion from the one in 2016 of IDR5,595 billion.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Kas dan setara kas pada akhir tahun 2017 sebesar Rp5.418 miliar, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp306 miliar atau 5% dimana kas dan setara kas akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp5.724 miliar.

Cash and Cash Equivalent at the end of the year

Cash and cash equivalents at end of 2017 amounted to IDR5,418 billion, a decrease from the previous year of IDR306 billion or 5% in which cash and cash equivalents at end of 2016 amounted to IDR5,724 billion.

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

dalam %

in %

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Likuiditas <i>Liquidity Ratio</i>					
Current ratio	1.010,06%	1.351,10%	755,22%	712,07%	769,09%
Rasio Solvabilitas <i>Solvability Ratio</i>					
Hutang terhadap ekuitas <i>Debt to Equity</i>	26,78%	19,34%	22,87%	30,18%	31,95%
Rasio Rentabilitas <i>Profitability Ratio</i>					
Margin Laba Kotor <i>Gross Profit Margin</i>	29,36%	31,59%	25,78%	29,75%	28,85%
Margin Laba Penjualan <i>Profit Margin On Sales</i>	39,05%	42,86%	42,14%	43,26%	42,50%
Return on assets	8,81%	9,23%	7,30%	7,52%	7,29%
Return on equity	8,10%	7,89%	6,60%	6,72%	7,49%
Rasio Aktivitas <i>Activity Ratio</i>					
Perputaran Aset <i>Assets Turnover</i>	22,56%	21,54%	17,32%	17,37%	17,14%
Jumlah investasi pada entitas asosiasi (Juta Rp) <i>Total Investments in associates (IDR million)</i>	347,674	531,364	599,525	587,678	601,634

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

COMPANY HEALTH INDEX

Evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Jaminan. Dari perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan. Sesuai dengan evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni

Evaluation of the Company's Health Index is based on the Decree of State Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 on Evaluation of Health Index, and Regulation of State Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. PER-04/MBU/2011 dated August 19, 2011 on the Evaluation Indicators for Health Index of State-Owned Enterprises of Financial Services in the Insurance and Guarantee Services Business. In accordance with the evaluation of the soundness of state-owned enterprises, based on the Decree of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. KEP-100/MBU/2002

2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI PER-10/MBU/2014 tanggal 19 Agustus 2011 disertai dengan Surat Menteri Negara BUMN No. S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011. dan Surat Menteri Negara BUMN terbaru No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014, maka tingkat kesehatan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia pada tahun 2017 adalah dengan skor 81,50 berada pada kategori "SEHAT AA", sementara pada tahun sebelumnya mendapatkan skor 78,50 Perusahaan masuk dalam kategori "SEHAT A".

dated June 4, 2002, and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-10/MBU/2014 dated August 19, 2011, accompanied by Letter of the Minister of State Owned Enterprises No. S-314/MBU.4/2011 dated October 13, 2011. and Letter of State Minister of State Owned Enterprises No. PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014, then the level Corporate health level of Perum Jamkrindo in 2017 is 81.50 which fall into the category "HEALTHY AA", while in the previous year the Company received a score of 78,50 which made the Company scores qualified for "HEALTHY A" category.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Perusahaan menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari rasio kas dan rasio lancar. Sedangkan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Perusahaan menggunakan rasio solvabilitas yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aset dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas.

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY

To measure the Company's capacity to pay its short-term liabilities, the Company uses liquidity ratio consisting of cash ratio and current ratio. While for measuring the Company's capacity in fulfilling its total liabilities, the Company uses solvency ratio measured by dividing total liabilities to total assets and total liabilities to total equity.

Uraian Description	2017	2016
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio		
Rasio Kas Cash Ratio	313,74%	370,42%
Rasio Lancar Current Ratio	769,09%	712,07%
Rasio Solvabilitas Solvability Ratio		
Rasio Liabilitas Terhadap Total Aset Liability Ratio to Total Assets	24,21%	23,19%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Liability Ratio to Equity	31,95%	30,18%

Di tahun 2017, tingkat kemampuan Perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek berdasarkan aset lancar yang ditunjukkan melalui rasio lancar sebesar 769,09%. Berdasarkan nilai tersebut kemampuan aset lancar Perusahaan dalam menjamin utang lancarnya masih relatif baik.

In 2017, the Company's capacity to pay its short-term liabilities based on current assets was shown through current ratio of 769.09%. Based on the ratio, the capacity of the Company's current assets in guaranteeing its current liabilities was relatively good.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Modal Perum Jamkrindo terdiri dari Liabilitas dan Ekuitas adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah penuh, kecuali persentase

Uraian Description	2017	% Total Modal % Total Capital	2016	% Total Modal % Total Capital
Liabilitas Liabilities	3.554.267.730.063	24,21%	3.108.848.887.056	23,76%
Ekuitas Equity	11.123.875.294.471	75,78%	10.299.568.987.996	76,24%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	14.678.143.024.534	100,00%	13.408.417.875.052	100,00%

Kebijakan Struktur Modal

Pengelolaan terhadap struktur modal Perum Jamkrindo dilakukan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi Pemangku Kepentingan lainnya serta mempertahankan struktur permodalan yang optimal guna mengurangi biaya modal.

Kondisi struktur modal yang optimal dapat dicapai dengan modal rata-rata tertimbang atau *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) yang minimal dengan penambahan penggunaan utang, akan meminimalkan WACC karena biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri (*cost of equity*). Di samping itu, penggunaan hutang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Meski demikian, peningkatan hutang yang dilakukan Perum Jamkrindo akan meningkatkan biaya beban bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perum Jamkrindo secara keseluruhan untuk itu, perlu kompromi perpaduan antara penggunaan hutang dan modal sendiri sehingga diperoleh kondisi yang optimum.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang tahun 2017, Perusahaan tidak melakukan pengikatan yang bersifat material untuk investasi barang modal dengan pihakmanapun.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT'S POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The capital structure of Perum Jamkrindo consists of Liabilities and Equity as follow:

in full IDR, except the percentage

Uraian Description	2017	% Total Modal % Total Capital	2016	% Total Modal % Total Capital
Liabilitas Liabilities	3.554.267.730.063	24,21%	3.108.848.887.056	23,76%
Ekuitas Equity	11.123.875.294.471	75,78%	10.299.568.987.996	76,24%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	14.678.143.024.534	100,00%	13.408.417.875.052	100,00%

Capital Structure Policy

Management on capital structure of Perum Jamkrindo is done to protect the Company's capacity in maintaining business continuity, thus the Company can provide return to the Shareholders and benefits to other Stakeholders as well as maintain optimum capital structure to reduce capital cost.

Optimum capital structure condition can be achieved by minimum Weighted Average Cost of Capital (WACC). With the addition of payable use, WACC will be minimized because the cost of debt will be lower than cost of equity. In addition, payable use will also decrease taxable cost, thus there will be tax savings. Nevertheless, the increase of payable conducted by Perum Jamkrindo will increase interest expense cost that will further decrease the value of Perum Jamkrindo in overall. Therefore, a combination between the use of payable and equity needs to be compromised to achieve optimum condition.

MATERIAL TIES FOR THE INVESTMENT OF CAPITAL GOODS IN THE LAST FISCAL YEAR

Throughout 2017, the Company did not engage in material ties for capital good investment with any party.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang tahun 2017, Perusahaan melakukan belanja modal yang bertujuan untuk memperluas jaringan usaha Perusahaan serta melakukan revitalisasi atas aset-aset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun investasi yang dilakukan pada 2017 yang ditujukan guna mengoptimalkan kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

CAPITAL GOODS INVESTMENT REALIZED IN THE LAST FISCAL YEAR

Throughout 2017, the Company undertook capital expenditures which were aimed at expanding the Company's business network and revitalizing its assets in order to improve the services quality. The investments made in 2017 to optimize the Company's performance are as follows:

dalam Rupiah penuh

in full IDR

Jenis Barang Modal <i>Type of Capital Goods</i>	Nilai <i>Value</i>
Tanah <i>Land</i>	11.004.445.155
Bangunan Kantor <i>Offices Building</i>	15.309.866.675
Kendaraan Bermotor <i>Motorized Vehicles</i>	10.540.314.695
Inventaris Kantor <i>Office Inventories</i>	10.693.428.321
Inventaris Rumah Dinas <i>Service House Inventories</i>	222.926.542
Total Akumulasi Penyusutan <i>Total Accumulated Depreciation</i>	47.770.981.387

Tujuan Investasi

Tujuan Perusahaan melakukan investasi barang modal adalah untuk menunjang operasional Perusahaan, karena itu strategi investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Perusahaan.

Investment Purposes

The Company's purpose to invest capital goods is to support the Company's operations, therefore the capital goods investment strategy undertaken by the Company is adjusted to the needs and plans for the Company's development.

dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian <i>Description</i>	RKAP 2017	Realisasi 2017 <i>2017 Realization</i>	Pencapaian RKAP <i>RKAP Achievement</i>
Imbal Jasa Penjaminan-Bersih <i>Net Guarantee Fee</i>	1.931.117	1.805.686	94%
Beban Klaim <i>Claim Expenses</i>	1.160.952	1.004.610	87%
Pendapatan Investasi <i>Investment Income</i>	621.456	601.634	97%
Laba Tahun Berjalan <i>Profit for the Year</i>	894.813	801.845	90%
Aset <i>Assets</i>	15.320.871	14.678.143	96%

INFORMASI FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Akuntan sampai dengan laporan ini diterbitkan yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan Perum Jamkrindo.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Penjaminan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Prospek penjaminan FLPP masih terbuka mengingat masih ada mitra bank penyalur FLPP yang belum menjalin kerja sama dengan Perum Jamkrindo. Dengan adanya potensi tersebut, maka Perum Jamkrindo akan melakukan pendekatan dengan bank penyalur FLPP yang belum menjalin kerja sama agar di tahun depan perjanjian kerja sama dapat ditandatangani dan produksi penjaminan KUR diharapkan dapat meningkat.

Untuk target penyaluran FLPP di tahun mendatang, diharapkan dapat mengalami peningkatan sebesar 12,5% dari target tahun 2017 sebesar Rp12 triliun menjadi Rp14 triliun.

Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dari target penyaluran KUR yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Perum Jamkrindo menargetkan volume penjaminan sebesar 50% dari target tersebut.

Untuk target penyaluran KUR di tahun mendatang, diharapkan dapat mengalami peningkatan dari Rp50 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp60 triliun di tahun 2018. Dikarenakan target KUR oleh Pemerintah kepada penyalur KUR meningkat sebesar 9% dari target tahun 2017 sebesar Rp110 triliun menjadi Rp120 triliun.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Jumlah Dividen

Berdasarkan keputusan RPB pada 2017 memutuskan usulan pembagian laba tahun buku 2016 sebagai berikut:

Uraian Description	Tahun Buku 2016 Fiscal Year 2016	Tahun Buku 2015 Fiscal Year 2015
Laba Bersih Net Income	692.045.235.887	625.354.338.229
Jumlah Dividen Amount of Dividend	48.000.000.000	312.677.169.113
Payout Ratio	6,94%	50%
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	31 Mei 2017 31 May 2017	22 Juni 2016 22 June 2016

MATERIAL FACTS INFORMATION SUBSEQUENT TO BALANCE SHEET DATE

There were no significant events subsequent to balance sheet date until this report was issued, which significantly affected the presentation of Perum Jamkrindo's Financial Statements.

COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS

Guarantee of Housing Financing Liquidity Facility

The prospect of FLPP guarantee is still open since there are still partners of FLPP distributing banks which have not yet established a cooperation with Perum Jamkrindo. With this potential, Perum Jamkrindo will approach the FLPP distributing banks which have not established a cooperation so that next year the cooperation agreement can be signed and the production of KUR guarantee is expected to increase.

The target of FLPP distribution in the coming year is expected to increase by 12.5% from 2017 target of IDR12 trillion to IDR14 trillion.

Guarantee on Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Of the targeted KUR distribution target set by the government, Perum Jamkrindo targets a guarantee volume of 50% of the target.

KUR target in the coming year is expected to increase from IDR50 trillion in 2017 to IDR60 trillion in 2018. This is due to the increase in KUR target set by the Government to the KUR dealer by 9% from the target of 2017 of IDR110 trillion to IDR120 trillion.

DIVIDEND POLICY

The Amount of Dividend

RPB in 2017 decided the proposal of profit distribution for 2016 fiscal year as follows:

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Pada tahun 2017 Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan berupa pemungutan dan penyetoran berbagai jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

CONTRIBUTION TO THE NATION

In 2017, the Company had conducted taxation obligation in the form of collection and payment of various types of taxes with the following details:

Uraian Description	Saldo Awal (Rp) Beginning Balance (IDR)	Mutasi Tahun 2017 Transfer in 2017		Saldo Akhir (Rp) Ending Balance (IDR)
		Kewajiban (Rp) Obligation (IDR)	Penyetoran (Rp) Payment (IDR)	
Uang Muka Pajak Prepaid Taxes				
Pajak Pertambahan Nilai Value Added Taxes	-	2.500.000	-	2.500.000
Hutang Pajak Tax Payable				
Pajak Penghasilan Income Tax				
Pajak Penghasilan pasal 21 Income tax article 21	5.190.411.556	32.306.644.347	34.910.670.964	2.586.384.939
Pajak Penghasilan pasal 22 Income tax article 22	62.941.404	480.128.926	481.765.749	61.304.581
Pajak Penghasilan pasal 23 Income tax article 23	430.265.464	2.946.494.695	3.099.979.219	276.780.942
Pajak Penghasilan pasal 25 Income tax article 25	6.637.598.034	96.763.203.996	95.337.201.697	8.063.600.333
Pajak Penghasilan pasal 4 (2) Income tax article 4 (2)	370.910.483	1.115.598.733	1.298.239.546	188.269.670
Pajak Penghasilan pasal 29 Income tax article 29	57.349.155.592	44.032.737.504	54.624.996.592	45.937.895.254
Pajak Final Revaluasi Aset Tetap Final Tax of Fixed Assets Revaluation	-	-	-	-
Total Pajak Penghasilan Total Income Tax	70.041.282.533	177.661.431.451	189.752.853.764	57.133.358.970
Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax	2.770.794.181	12.662.567.643	13.042.755.435	2.390.606.389
Pajak Bumi dan Bangunan Land and Building Tax	-	623.458.590	597.458.590	26.000.000
Total Hutang Pajak Total Tax Payable	72.812.076.714	190.947.457.684	203.393.067.789	59.549.965.359

Pajak Penghasilan (PPh)

Jumlah saldo awal Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2017 adalah Rp70.041.282.533 dan Kewajiban Pajak Penghasilan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp177.661.476.451 Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan menyetor ke kas Negara sebesar Rp189.752.853.764 sehingga hutang PPh per 31 Desember 2017 sebesar Rp57.133.358.970.

Income Tax (PPh)

The total beginning balance of Income Tax Obligation in 2017 was IDR70,041,282,533 and the Income Tax obligation for 2017 was IDR177,661,431,451. The Company has fulfilled its tax obligations which has been deposited to the State treasury amounting to IDR189,752,853,764. Thus, taxation obligation as of December 31, 2017 was IDR57,133,358,970.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perum Jaminan Kredit Indonesia memiliki saldo awal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2017 sebesar Rp2.770.794.181 dan kewajiban PPN selama tahun 2017 sebesar Rp12.662.567.643. Jumlah PPN yang disetorkan pada tahun 2017 sebesar Rp13.042.755.435 sehingga saldo akhir PPN tahun 2016 Perum Jaminan Kredit Indonesia sebesar Rp2.390.606.389.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sebagai wajib pajak, Perum Jaminan Kredit Indonesia telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima pada tahun 2017 sebesar Rp597.458.590.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

Perum Jamkrindo adalah perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hingga 31 Desember 2017, Perum Jamkrindo tidak pernah melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan atau manajemen.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga 31 Desember 2017, Perusahaan tidak pernah melakukan penawaran umum, baik berupa penawaran saham atau surat hutang, sehingga tidak terdapat informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang dapat disampaikan pada laporan ini.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Sepanjang tahun 2017, Perusahaan tidak memiliki informasi material yang terkait dengan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi dan restrukturisasi utang.

Value Added Tax (PPN)

Perum Jaminan Kredit Indonesia had a beginning balance of VAT in 2017 amounting to IDR2,770,794,181 and VAT obligation for 2017 at IDR12,662,567,643. TOTAL VAT paid in 2016 amounted to IDR13,042,755,435, thus ending balance of VAT in 2016 of the Company amounted to IDR2,390,606,389.

Land and Building Tax

As a taxpayer, Perum Jaminan Kredit Indonesia had fulfilled its PBB tax obligation according to Letter of Payable Tax Notification (SPPT) received in 2017 amounted to IDR597,458,590.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP) CARRIED OUT BY THE COMPANY

100% of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. As of December 31, 2017, Perum Jamkrindo has never implemented a stock ownership program by employees or management.

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

As of December 31, 2017, the Company has never made a public offering, either in the form of stock offer or debt notes. Therefore, there are no information on the realization of use of proceeds from public offering which can be submitted in this report.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION OR CAPITAL/DEBT RESTRUCTURING

Throughout 2017, the Company has no material information related to investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition or debt restructuring.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2017, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Perusahaan, antara lain.

MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

In its business activities, the Company conduct certain transactions with related parties and the management believes that transactions with related parties are conducted under the same terms and conditions as those with third parties.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

Throughout 2017, there have been changes in laws and regulations that have considerable effect on the Company, such as:

Nama Peraturan Name of Regulation	Dampak Bagi Perusahaan Impact on Company
POJK No. 2 /POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin <i>POJK No. 2/POJK.05/2017 dated January 11, 2017, on the Guarantee Institution Business</i>	Perubahan penetapan besaran cadangan klaim yaitu minimal 0,25% dari nilai Penjaminan yang ditanggung oleh Lembaga Penjaminan (POJK No. 6/POJK.05/2014 tanggal 8 April 2014) menjadi paling sedikit 0,01% dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau penjumlahan dari 100% dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (<i>incurred but not reported</i>), mana yang lebih banyak. <i>Changes in the amount of claim reserves from a minimum of 0.25% of the value of the Guarantee covered by the Guarantee Institution (POJK Number 6/POJK.05/2014 dated April 8, 2014) to at least 0.01% of the value of the self-covered guarantee; or a sum of 100% of the Guaranteed value covered at the time the claim is reported, with a provision that it is incurred but not reported, whichever is greater.</i>
Surat OJK No. S-129/D.05/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal pencatatan IJP akrual Perum Jamkrindo. <i>OJK Letter No. S-129/D.05/2017, dated 29 August 2017, regarding the recording of IJP accrual of Perum Jamkrindo.</i>	Perubahan pencatatan IJP KUR dilakukan secara bulanan menjadi tahunan di bulan Agustus 2017. <i>Changes to the IJP KUR listing are changed from monthly to yearly basis in August 2017.</i>

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED BY THE COMPANY IN THE LAST FISCAL YEAR

PSAK Statement of Financial Accounting Standards	Dampak Bagi Laporan Keuangan Jamkrindo Impact on Jamkrindo Financial Report
Amandemen PSAK No. 3, Penyajian Laporan Keuangan tentang Laporan Keuangan Interim <i>Amendment of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 3 on the Presentation of Financial Statements on Interim Financial Reports</i>	Tidak ada perubahan <i>No changes</i>
PSAK 24: Imbalan Kerja (Penyesuaian 2016) <i>PSAK 24: Benefits (2016 Adjustment)</i>	Tidak ada perubahan <i>No changes</i>

PSAK Statement of Financial Accounting Standards	Dampak Bagi Laporan Keuangan Jamkrindo Impact on Jamkrindo Financial Report
PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan (Penyesuaian 2016) <i>PSAK 58: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (2016 Adjustment)</i>	Tidak ada perubahan <i>No changes</i>
PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Penyesuaian 2016). Amandemen PSAK No. 101 (2016), Penyajian Laporan Keuangan Syariah tentang penyajian laporan keuangan asuransi syariah <i>PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures (Adjustment 2016). Amendment of PSAK No. 101 (2016) on the Presentation of Sharia Financial Statement on presentation of Syariah financial report</i>	Tidak ada perubahan <i>No changes</i>
Amandemen PSAK No. 102 (2016), Akuntansi Murabahah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar <i>Amendment of PSAK No. 102 (2016), Murabahah Accounting on adjustment of fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement</i>	Tidak ada perubahan <i>No changes</i>
Amandemen PSAK No. 103 (2016), Akuntansi Salam tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar <i>Amendment of PSAK No. 103 (2016), Salam Accounting regarding adjustment of fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement</i>	Tidak ada perubahan <i>No changes</i>
Amandemen PSAK No. 104 (2016), Akuntansi Istishna" tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar <i>Amendment of SFAS No. 104 (2016) on Istishna Accounting concerning adjustment of fair value definition in line with SFAS 68: Fair Value Measurement</i>	Tidak ada perubahan <i>No changes</i>
Amandemen PSAK No. 107 (2016), Akuntansi Ijarah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan SFAS 68: Pengukuran Nilai Wajar <i>Amendment of SFAS No. 107 (2016) on Ijarah Accounting on adjustment of fair value definition in line with SFAS 68: Fair Value Measurement</i>	Tidak ada perubahan <i>No changes</i>
Amandemen PSAK No. 108 (2016), Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah <i>Amendment of PSAK No. 108 (2016), Accounting for Sharia Insurance Transactions on the recognition, measurement, presentation and disclosure of Syariah insurance transactions</i>	Tidak ada perubahan <i>No changes</i>

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Pada tahun 2017, tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Lingkungan internal dan eksternal Perusahaan masih berada dalam kondisi normal tanpa adanya perubahan yang signifikan.

Penyaluran KUR tahun 2017 masih mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian realisasi penyaluran KUR secara nasional tahun 2017 mencapai Rp96,7 triliun atau tumbuh 2,4% dibanding tahun sebelumnya Rp94,4 triliun.

Dari sisi internal Perusahaan, tahun 2017 Jamkrindo mencatat penurunan NPL menjadi 0,01% dan tingkat Pencapaian Pengembalian *Subrogasi* pada tahun 2016 sebesar 80,61%, turun menjadi 79,47% pada tahun 2017 serta *Recovery Rate* Piutang *Subrogasi* dari 5,96% turun 0,21% menjadi 5,75% pada tahun 2017.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

In 2017, there were no potential elements which could significantly affect the Company's business continuity. The Company's internal and external environments are still in a normal condition without significant changes.

KUR distribution in 2017 experienced growth compared to the previous year. Based on data from the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the realization of national KUR distribution in 2017 reached IDR96,7 trillion or grew 2.4% when compared to the previous year of IDR94,4 trillion.

From the internal side of the Company, in 2017, Jamkrindo recorded a decrease in NPL to 0.01%. The Subrogation Return Achievement rate in 2016 amounted to 80.61% decreased to 79.47% in 2017. The Recovery Rate of Subrogation Receivables went down 0.21% from 5.96% to 5.75% in 2017.



A man in a pink button-down shirt and dark blue trousers is shaking hands with another person. He is smiling and looking towards the left. In the background, a large blue sign for "Bank Indonesia" is visible, with the words "Kredit" and "nesia" also visible below the main name.

Bank Indonesia

Kreditnesia

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Business Support Function

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi

Human Resources and Competency Development

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sumber daya paling penting bagi suatu perusahaan dan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, Perum Jamkrindo sangatlah memperhatikan pengelolaan SDM sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan. Untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya, Perum Jamkrindo senantiasa melakukan program-program pengembangan bagi karyawan. Melalui pengelolaan SDM dan pengembangan kompetensi, Perum Jamkrindo berupaya untuk dapat menciptakan kinerja organisasi yang dapat mendorong setiap karyawan untuk dapat menemukan potensi terbaik dirinya dan mengembangkan talenta tersebut secara berkesinambungan.

Human Resources (HR) is the most important resource for a company and as a company engaged in services, Perum Jamkrindo is very concerned about human resource management since it is one of the determinants of corporate success. To improve the competence and quality of its human resources, Perum Jamkrindo always conducts development programs for employees. Through HR management and competency development, Perum Jamkrindo strives to create an organizational performance that can encourage every employee to be able to find his or her best potential and develop the talent on an ongoing basis.

DEMOGRAFI KARYAWAN

Hingga 31 Desember 2017, Perum Jamkrindo mengaryakan 1.042 orang. Jumlah ini meningkat 15,65% dibanding tahun 2016 yang sebanyak 901 orang. Hal ini disebabkan oleh pengangkatan calon karyawan baru sesuai kebutuhan Perusahaan (pembukaan 2 KUP baru) dan pengisian jabatan struktural yang kosong. Jumlah tersebut belum termasuk karyawan kontrak dan/atau *outsorce*.

EMPLOYEES DEMOGRAPHIC

As of 31st December 2017, Perum Jamkrindo has 1,044 employees. This is an increase of 15,65% in comparison with 901 employees in 2016. This is due to appointment of new employee candidates as per Company requirement (opening of 2 new KUPs) and vacant fulfillment of structural positions.

Demografi karyawan selengkapnya disajikan sebagai berikut ini.

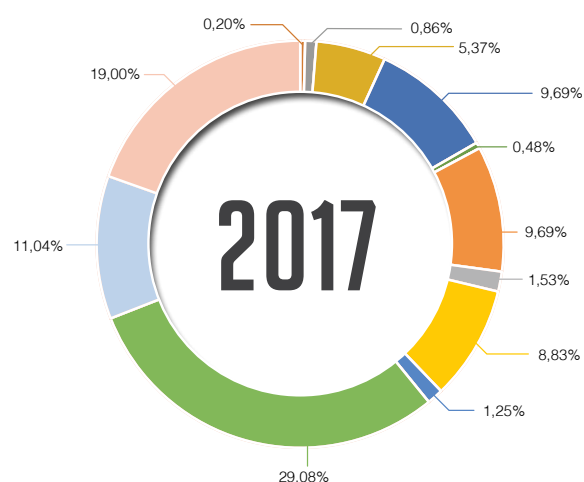
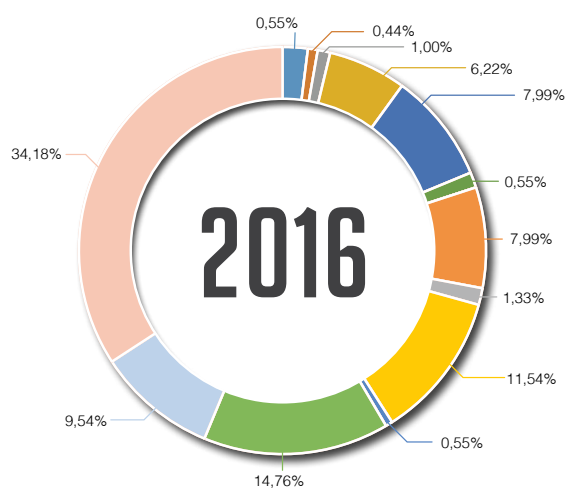
A full employee demographic is presented as follows.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level/Kelompok Jabatan

Distribution of Employees Based on Level / Position Group

Level/Kelompok Jabatan <i>Level / Position Group</i>	2017				2016			
	L <i>Male</i>	P <i>Female</i>	Jumlah <i>Amount</i>	Komposisi <i>Composition</i>	L <i>Male</i>	P <i>Female</i>	Jumlah <i>Amount</i>	Komposisi <i>Composition</i>
Kepala Divisi <i>Head of Division</i>	12	7	19	1,82%	12	6	18	2,00%
Pejabat Pranata Utama <i>Main Institution's Officer</i>	2	-	2	0,20%	2	2	4	0,44%
Kepala Kantor Wilayah <i>Head of Regional Office</i>	8	1	9	0,86%	8	1	9	1,00%
Wakil Kepala Kantor Wilayah <i>Deputy Head of Regional Office</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Kantor Cabang <i>Head of Branch Office</i>	49	7	56	5,37%	50	6	56	6,22%
Kepala Bagian <i>Department Head</i>	71	29	100	9,60%	53	26	79	8,77%
Pejabat Pranata Madya <i>Middle Institution's Officer</i>	4	1	5	0,48%	2	3	5	0,55%
Pejabat Pranata Pratama <i>Institution's Junior Officer</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Unit <i>Unit Head</i>	74	27	101	9,69%	54	18	72	7,99%
Kepala Kantor Unit Pelayanan <i>Head of Service Unit Office</i>	14	2	16	1,53%	11	1	12	1,33%

Level/Kelompok Jabatan <i>Level / Position Group</i>	2017				2016			
	L <i>Male</i>	P <i>Female</i>	Jumlah <i>Amount</i>	Komposisi <i>Composition</i>	L <i>Male</i>	P <i>Female</i>	Jumlah <i>Amount</i>	Komposisi <i>Composition</i>
Kepala Seksi <i>Section Head</i>	34	58	92	8,83%	43	61	104	11,54%
Pranata Muda <i>Institution's Junior</i>	1	-	1	0,10%	-	-	-	-
Kepala Sub Seksi <i>Sub-section Head</i>	9	4	13	1,25%	3	2	5	0,55%
Staf <i>Staff</i>	176	127	303	29,08%	82	51	133	14,76%
Pelaksana <i>Executor</i>	75	40	115	11,04%	60	26	86	9,54%
Calon Karyawan <i>Prospective Employees</i>	104	94	198	19,00%	181	127	308	34,18%
Penugasan Jamsyar <i>Assigned to Jamsyar</i>	5	4	9	0,86%	5	5	10	1,11%
Penugasan PT LSPP <i>Assigned to PT LSPP</i>	2	1	3	0,29%	-	-	-	-
Jumlah <i>Total</i>	640	402	1.042	100,00%	566	335	901	100,00%

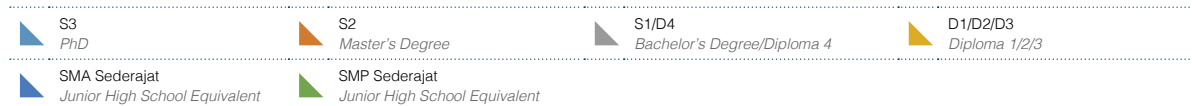
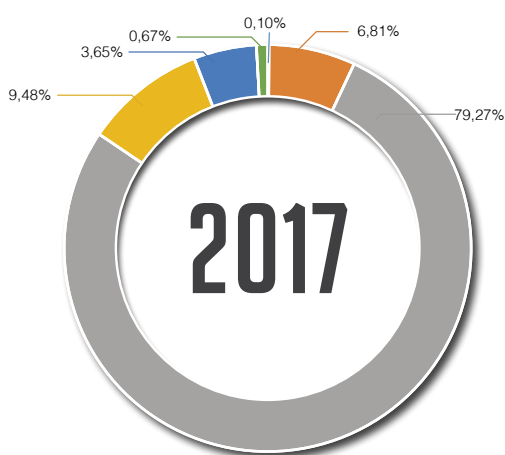
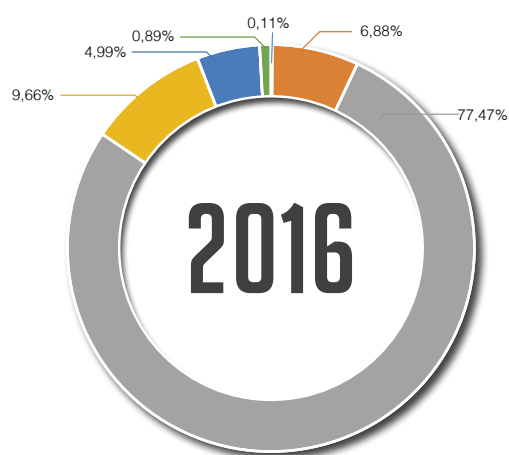


Kepala Divisi <i>Head of Division</i>	Pejabat Pranata Utama <i>Main Institution's Officer</i>	Kepala Kantor Wilayah <i>Head of Regional Office</i>	Kepala Kantor Cabang <i>Head of Branch Office</i>
Kepala Bagian <i>Department Head</i>	Pejabat Pranata Madya <i>Middle Institution's Officer</i>	Pejabat Pranata Pratama <i>Institution's Junior Officer</i>	Kepala Unit <i>Unit Head</i>
Kepala Kantor Unit Pelayanan <i>Head of Service Unit Office</i>	Kepala Seksi <i>Section Head</i>	Kepala Sub Seksi <i>Sub-section Head</i>	Staf <i>Staff</i>
Pelaksana <i>Executor</i>	Calon Karyawan <i>Prospective Employees</i>		

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribution of Employees Based on Education Level

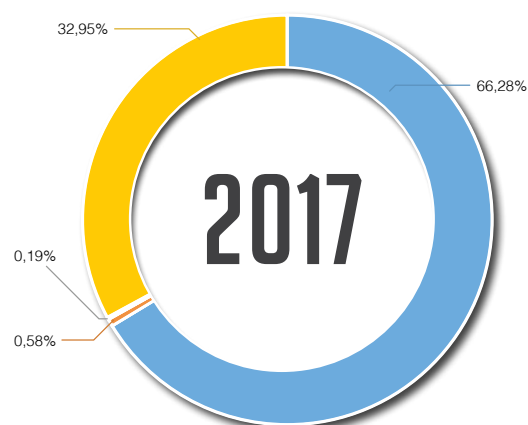
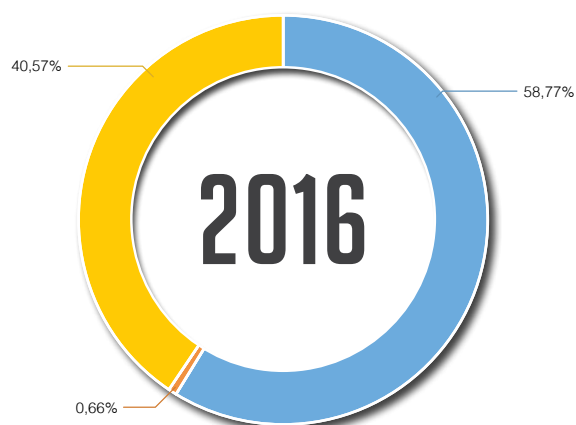
Tingkat Pendidikan Education	2017				2016			
	L Male	P Female	Jumlah Amount	Komposisi Composition	L Male	P Female	Jumlah Amount	Komposisi Composition
S3 PhD	1	0	1	0,10%	1	0	1	0,11%
S2 Master's Degree	49	22	71	6,81%	45	17	62	6,88%
S1/D4 Bachelor's Degree/ Diploma 4	498	328	826	79,27%	434	264	698	77,47%
D1/D2/D3 Diploma 1/2/3	58	41	99	9,50%	49	38	87	9,66%
SMA Sederajat High School Equivalent	27	11	38	3,65%	29	16	45	4,99%
SMP Sederajat Junior High School Equivalent	7	0	7	0,67%	8	0	8	0,89%
SD Elementary School	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Jumlah Total	640	402	1.042	100,00%	566	335	901	100,00%



Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Distribution of Employees Based on Employment Status

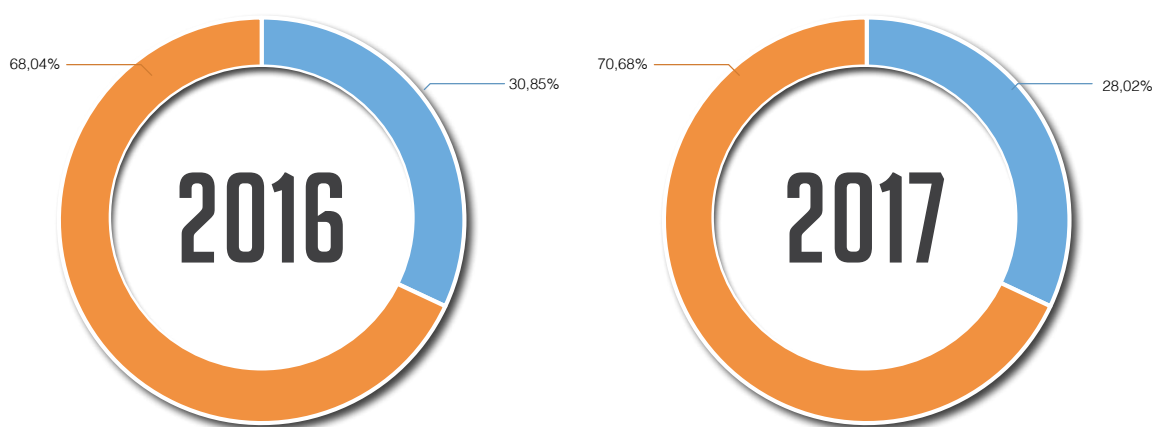
Status Kepegawaian Employment Status	2017				2016			
	L Male	P Female	Jumlah Amount	Komposisi Composition	L Male	P Female	Jumlah Amount	Komposisi Composition
Permanen Permanent	633	397	1.030	66,28%	561	330	891	58,77%
Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah Assigned to PT Jamkrindo Syariah entity	5	4	9	0,58%	5	5	10	0,66%
Penugasan PT LSPP Assigned to PT LSPP	2	1	3	0,19%	0	0	0	0,00%
Sub Jumlah Sub Total	640	402	1.042	67,05%	566	335	901	59,43%
Kontrak & Outsource Contract & Outsource	421	91	512	32,95%	475	140	615	40,57%
Jumlah Total	1.061	493	1.554	100,00%	1.041	475	1.516	100,00%



Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja

Distribution of Employees Based on Work Area

Level/Kelompok Jabatan Level / Position Group	2017				2016			
	L Male	P Female	Jumlah Amount	Komposisi Composition	L Male	P Female	Jumlah Amount	Komposisi Composition
Kantor Pusat Head Office	166	126	292	28,02%	162	116	278	30,85%
Kantor Wilayah/Cabang Regional / Branch Office	467	271	738	70,83%	399	214	613	68,04%
Penugasan Jamsyar Assigned to PT Jamkrindo Syariah entity	5	4	9	0,86%	5	5	10	1,11%
Penugasan PT LSPP Assigned to PT LSPP	2	1	3	0,29%	0	0	0	0,00%
Jumlah Total	640	402	1.042	100,00%	566	335	901	100,00%



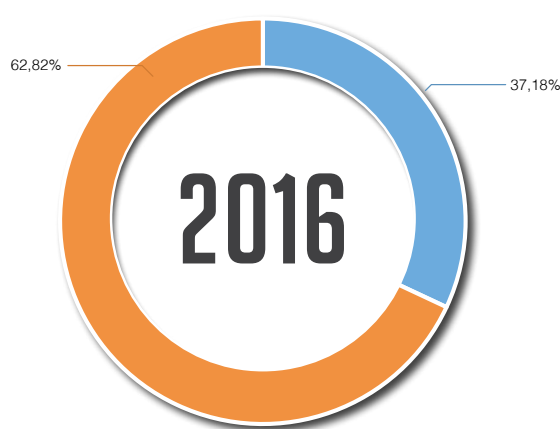
 Kantor Pusat
Head Office

 Kantor Wilayah/Cabang
Regional/Branch Office

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribution of Employees Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2017		2016	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
Laki-laki Male	640	61,42%	566	62,82%
Perempuan Female	402	38,58%	335	37,18%
Jumlah Total	1.042	100,00%	901	100,00%



Perempuan
Female

Laki-laki
Male

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PLANNING AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

Kesuksesan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM, baik dari sisi pengelolaan internal maupun memenuhi kebutuhan pasar. Perencanaan dan pengembangan SDM merupakan fungsi utama yang dilaksanakan Perum Jamkrindo untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

The success and sustainability of the Company's business are largely determined by the availability of human resources, both in terms of internal management and meeting market needs. HR planning and development is the main function implemented by Perum Jamkrindo to ensure the availability of the right manpower to occupy the right positions and duties at the right time.

Tujuan perencanaan SDM adalah:

The purpose of HR planning is:

1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam Perusahaan.
2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan.
3. Menghindari terjadinya *miss management* dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat.

1. To determine the quality and quantity of employees who will fill all positions in the Company.
2. To ensure the availability of employees, presently as well as in the future, to accomplish every given tasks.
3. To avoid mismanagement and overlapping tasks completion.
4. To support coordination, integration and synchronization which leads to an increase in productivity.



5. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan.
6. Menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan kedisiplinan, serta pemberhentian karyawan.
7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau horisontal) dan pensiun karyawan.
8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian pegawai.

Saat ini Perusahaan menuju pada pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan sasaran dapat menempatkan posisi seorang karyawan pada tempat atau jabatan yang sesuai dengan kualitas kemampuannya. Pengembangan SDM berbasis kompetensi diawali dengan telah tersusunnya direktori kompetensi dan kebutuhan jabatan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Perusahaan pada RKAP 2015 dan RJPP 2014-2018. Untuk itu, telah dilakukan Penyusunan Direktori Kompetensi dan Kompetensi Jabatan Perum Jamkrindo, yang memuat antara lain sebagai berikut:

1. Pengelompokan jenis kompetensi.
2. Jenis kompetensi.
3. Nama kompetensi.
4. Definisi kompetensi.
5. *Proficiency level* (tingkat keahlian)
6. Uraian tingkat keahlian.
7. Kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perum Jamkrindo.

REKRUTMEN SDM

Perum Jamkrindo menyadari betapa pentingnya kualitas SDM bagi kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan Perusahaan. Karyawan yang handal hanya dapat dibentuk dari orang-orang yang mempunyai integritas, dedikasi, serta loyalitas yang baik.

Oleh karena itu, Perum Jamkrindo pada tahap awal perekrutan karyawan senantiasa berupaya untuk mencari dan menempatkan calon-calon karyawan dengan aspek kompetensi dan integritas yang terbaik, berkualitas, dan mumpuni sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam melayani masyarakat. Perum Jamkrindo tidak hanya menawarkan pekerjaan pada bidang keahlian yang dimiliki masing-masing karyawan maupun calon karyawan, namun juga kepastian jenjang karir bersama Perum Jamkrindo.

Sesuai kompetensi dan untuk menjaga independensi maka seleksi karyawan dilakukan melalui konsultan independen yang mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang rekrutmen karyawan.

5. To avoid shortage or excess of employees.
6. To serve as a foundation in determining recruitment program, selection, development, compensation, integration, preservation, discipline and dismissal of employees.
7. To serve as a foundation in executing mutation (both vertically and horizontally) and giving pension for the employees.
8. To serve as a basis in reviewing employees.

Currently, the Company is leading the development of competency-based human resources with the goal of positioning an employee in a place or position in accordance with the quality of his ability. Competency-based human resource development begins with the completion of competency directories and job requirements as stated in the Company's work plan in the RKAP 2015 and the RJPP 2014 - 2018. For that reason, the Competency Directory Arrangement and Position's Competency of Perum Jamkrindo have been made, which entails:

1. Grouping of competency types.
2. Types of competency.
3. Name of competency.
4. Definition of competency.
5. Proficiency level.
6. Analysis of level of skill.
7. Position's competency for all positions in Perum Jamkrindo.

HR RECRUITMENT

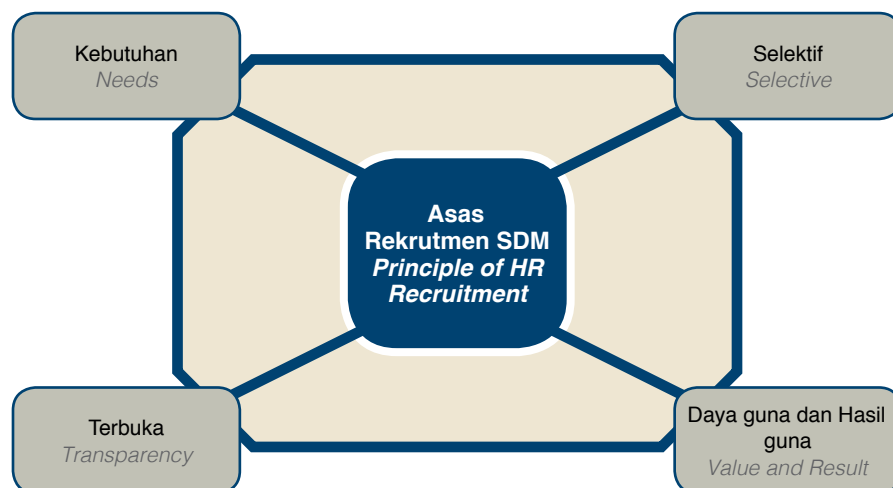
Perum Jamkrindo realizes how important the quality of human resources for the Company's operational, marketing, and financial performance. Reliable employees can only be formed from people who have integrity, dedication, and good loyalty.

Therefore, in the early stages of employee recruitment, Perum Jamkrindo always strives to find and allocate the candidates with the best competency and integrity, best qualification and best-suited with the needs of the Company in serving the community. Perum Jamkrindo not only offers jobs in the areas of expertise owned by each employee and prospective employees but also the certainty of a career path with Perum Jamkrindo.

In accordance with the competency, and to maintain independence, employee selection is performed through an independent consultant who has the competency and experience in the field of employee recruitment.

Proses rekrutmen yang diselenggarakan Perum Jamkrindo senantiasa mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan berdasarkan kebutuhan, serta kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan. Perum Jamkrindo juga memberikan peluang seluas-luasnya bagi lulusan perguruan tinggi.

The recruitment process held by Perum Jamkrindo always put forward the principles of transparency, fairness, and equity based on the needs, as well as the competencies of the prospective employees. Perum Jamkrindo also provides the widest opportunity for college graduates.



Ruang lingkup pengadaan karyawan meliputi:

1. **Perencanaan** : untuk memperoleh tenaga yang tepat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan termasuk merencanakan kebutuhan profesional dengan kompetensi khusus.
2. **Pengumuman** : untuk memberikan kesempatan bagi angkatan kerja untuk melamar pada Perusahaan.
3. **Pelamaran** : untuk menciptakan ketertiban dalam proses penerimaan karyawan.
4. **Seleksi** : untuk memilih dan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
5. **Pengangkatan** : untuk memberikan status karyawan dan atau jabatan tertentu dalam Perusahaan.

The scope of recruitment:

1. **Planning** : to get the suitable candidate that is compatible with the Company's need, including planning for professional staff with special competency.
2. **Announcing** : to give the workforce an opportunity to apply to the Company.
3. **Applying** : to initiate order in the process of receiving employees.
4. **Selecting** : to choose and acquire employees that are fitting to the company's need.
5. **Assigning** : to give employees his/her employment status and/or certain position in the Company.

Sumber pengadaan karyawan berasal dari dalam Perusahaan dan atau dari luar Perusahaan apabila dibutuhkan untuk pengisian format tertentu dan atau memerlukan keahlian/keterampilan tertentu. Perusahaan dapat melakukan pengadaan/rekrutmen tenaga kerja berpengalaman/tenaga profesional untuk pengisian posisi tertentu dan/atau untuk kebutuhan keahlian/keterampilan tertentu berupa:

Should the Company require a certain format and or skill, the Company's HR department will search for such employees both internally and or externally. The Company can recruit professional or experienced staff to fill in certain position and or certain function, such as:



1. Karyawan/staf berpengalaman
Karyawan yang diangkat Perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
2. Pejabat struktural/ fungsional
Karyawan yang diangkat Perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menduduki jabatan struktural/fungsional.
3. Tenaga kerja profesional (*Prohire*)
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu yang direkrut berdasarkan pengalaman kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan pendampingan dan asistensi pada unit kerja terkait atau untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan/atau dengan target tertentu dan jangka waktu tertentu.

1. Staff / experienced staff
The Company will appoint employees by taking into account their work experience, working period, expertise and competencies as per the qualifications appropriate to the needs of the Company.
2. Structural/Functional Officers
The Company will appoint employees by taking into account their work experience, working period, expertise and competencies as per the qualifications appropriate to the company's need to occupy structural/functional positions.
3. Professional staff (*Prohire*)
The Company will recruit contractual staff based on their work experience, expertise and competencies as per the qualifications required by the company to provide assistance to related work units or to perform certain jobs and/or with specific targets and timeframes.

Pada tahun 2017 telah dilakukan rekrutmen karyawan baru sebanyak 165 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

In 2017 the Company has recruited as many as 165 new employees with details as seen in the table below.

Rekrutmen Recruitment	Jumlah Total
Calon Karyawan S2 <i>Candidate with Master's Degree</i>	4
Calon Karyawan S1/D4 <i>Candidate with Bachelor's Degree/Diploma 4 Degree</i>	138
Calon Karyawan D3/SMA/SMP <i>Candidate with Diploma 3/High School/Junior High Degree</i>	23
Jumlah <i>Total</i>	165

Tabel di bawah menunjukkan rekrutmen karyawan profesional Perusahaan pada tahun 2017 untuk ditetapkan sebagai pejabat struktural yang memiliki pengalaman sesuai kebutuhan Perusahaan sebanyak 5 orang.

The table below shows the recruitment of the Company's professional employees in 2017 to be designated as a structural official. The Company needs 5 employees who have the proper experience to meet the Company's needs.

Rekrutmen Recruitment	Jumlah Total
Pranata Utama <i>Main Institution</i>	0
Kepala Bagian <i>Department Head</i>	1
Pranata Madya <i>Middle Institution</i>	0
Kepala Seksi <i>Section Head</i>	4
Jumlah <i>Total</i>	5

Selain hal tersebut, pada tahun 2017 Perusahaan juga melakukan rekrutmen tenaga kerja waktu tertentu profesional untuk melakukan pendampingan dan asistensi sebanyak 2 (dua) orang yang tersebar di beberapa unit kerja, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Perekrutan tenaga profesional tersebut diharapkan dapat membantu percepatan tercapainya program-program kerja Perusahaan serta *transfer knowledge* kepada karyawan tetap pada unit kerja tersebut.

In addition, in 2017 the Company also undertook recruitment of specified time professional staffs to provide assistance. There were 2 (two) people recruited which was allocated over several work units, as shown in the table below. The recruitment of such professionals is expected to help accelerate the achievement of the Company's work programs and the transfer of knowledge to permanent employees in the work unit.

Rekrutmen Recruitment	Jumlah Total
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukkan untuk mendukung bidang Teknologi Informasi <i>Specified Time Professional Staff (STPS) to support in Information Technology</i>	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukkan untuk mendukung bidang Manajemen Risiko <i>Specified Time Professional Staff (STPS) to support in Risk Management</i>	1
Jumlah <i>Total</i>	2

PENGEMBANGAN KARIER

Pengembangan karier bagi karyawan Perusahaan secara optimal dapat memotivasi karyawan agar bekerja secara maksimal. Pengembangan karier melalui kenaikan posisi jabatan seorang pegawai ke *level* yang lebih tinggi melalui kegiatan promosi. Kegiatan promosi dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan yang levelnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan secara tepat waktu.

Karyawan yang dinilai berdasarkan sistem penilaian kinerja dan telah menunjukkan prestasi kerja yang baik, jujur dan dapat dipercaya serta berwibawa dapat diangkat untuk menduduki jabatan struktural apabila memenuhi syarat jabatan yang dimaksud. Sistem penilaian kinerja karyawan diadakan untuk menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat, golongan gaji dan tingkat gaji serta pengangkatan dalam jabatan struktural tertentu pada perusahaan.

Tahapan kegiatan pengembangan karier melalui kegiatan promosi adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana jenjang karier karyawan berdasarkan:
 - Kebijakan perusahaan tentang pengelolaan SDM.
 - Peraturan-peraturan perusahaan yang terkait pengelolaan SDM.
 - RKAP dan RJPP.
- Memetakan seluruh formasi karyawan dan evaluasi karyawan berdasarkan:
 - Formasi karyawan baru.
 - Hasil penilaian kinerja pegawai.

CAREER DEVELOPMENT

Optimum career development for employees can be a motivation for employees to perform well. Career development of an employee advancing to a higher level is through promotion. Furthermore, career development through promotion is preferred in order to find the right candidate for a position that is in accordance with the requirements in a timely manner.

Employees who are evaluated based on the performance evaluation system and have proven themselves to have performed well and are honest, dependable and prudent, could be promoted to the structural position with the condition that they are qualified for the position. Performance evaluation for the employees is enforced to ensure objectivity when evaluating and determining salary group and level, as well as promoting to a specific structural position in the Company.

Below are the phases of career development through promotion:

- The career path plan for the employees based on:
 - Company policy on Human Resource management.
 - Company's rules and regulation on Human Resource management.
 - RKAP and RJPP.
- The mapping of all employees formation and evaluation based on:
 - Formation of new employees.
 - Result of employees performance review.

3. Mengidentifikasi formasi yang akan kosong berdasarkan:
 - a. Hasil pemetaan formasi karyawan dan evaluasi karier karyawan.
 - b. Identifikasi formasi yang akan kosong.
4. Melakukan rencana pengisian formasi melalui promosi dan menyusun persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut.
5. Mencari kandidat untuk dipromosikan berdasarkan:
 - a. Data kualifikasi karyawan yang kompeten untuk menempatkan posisi yang kosong.
 - b. Seleksi kualifikasi dan kompetensi awal untuk mendapatkan calon kandidat terbatas/*sort list candidate*.
 - c. Rekomendasi atasan karyawan jika memiliki kandidat yang memenuhi kualifikasi yang menjadi syarat untuk posisi yang kosong.
6. Menetapkan kandidat yang tepat untuk posisi yang kosong melalui komite promosi.
7. Melakukan proses penggantian posisi karyawan sesuai mekanisme.

Pada tahun 2017 terdapat karyawan yang mendapatkan promosi sebanyak 211 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

3. The identification of soon-to-be absent formation based on:
 - a. Result of employees formation mapping and career evaluation.
 - b. Identification of soon-to-be empty formation.
4. Plan the formation filling through promotion and arrange the needed requirements for the specific position.
5. Searching candidates for promotion based on:
 - a. Qualification data on competent employees to fill in a vacant position.
 - b. Early selection based on qualification and competency to find limited / short list candidate.
 - c. Employees' recommendation when there is a candidate with sufficient qualification for the vacant position.
6. Select the right candidate for the vacant position through the promotion committee.
7. Perform employees mutation process according to the mechanism.

In 2017 there were 211 employees who got promoted. The details is in the table below.

Promosi Karyawan Tahun 2017

Employees Promotion in 2017

Jabatan Title/Position	Jumlah Total
Kepala Divisi/ Setingkat <i>Division Head/ Equivalent</i>	4
Kepala Kantor Wilayah <i>Regional Head</i>	1
Kepala Kantor Cabang Tipe A/ B/ C/ D <i>Branch Head Type A/ B/ C/ D</i>	20
Kepala Bagian Kantor Pusat/ Cabang Tipe A/ B <i>Department Head – Head / Branch Office Type A/ B</i>	53
Kepala Unit Kantor Cabang Tipe C/ D <i>Unit Head – Branch Office Type C/ D</i>	76
Kepala KUP <i>KUP Head</i>	11
Kasie Pusat/ Wilayah/ Cabang A/ B <i>Section Head - Main/ Regional/ Branch A/ B</i>	28
Kasubsie Kantor Cabang Tipe C <i>Sub-section Head – Branch Office Type C</i>	0
Kasubsie KUP <i>Sub-section Head of KUP</i>	12
Pranata Utama <i>Main Institution</i>	3
Pranata Madya <i>Middle Institution</i>	3
Jumlah <i>Total</i>	211

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Perum Jamkrindo mempunyai komitmen yang tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas karyawan sebagai salah satu kunci utama penentu keberlangsungan Perusahaan. Salah satu sarana peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan karyawan.

Indikator <i>Indicator</i>	2017	2016	Pertumbuhan <i>Growth</i>
Jumlah karyawan yang disertakan mengikuti diklat <i>Total of employees participated in trainings</i>	1.618	2.872	(43,66%)
Realisasi Biaya pengembangan <i>Realization cost of development</i>	Rp13.397.708.866	Rp16.796.433.140	(20,23%)
Penugasan belajar (S2) Dalam Negeri atau Luar Negeri <i>Selected for a master's degree in the country or outside the country</i>	2	1	100,00%

Pada tahun 2017 jumlah karyawan yang dilatih mengalami penurunan dibanding 2016, hal ini disebabkan jumlah karyawan baru yang direkrut pada tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan tahun 2016. Jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan Perusahaan yang sedang melakukan ekspansi dalam segala lini bisnisnya. Dalam rangka memberikan pembekalan kepada karyawan baru tersebut maka Perusahaan memberikan sejumlah pelatihan guna mendukung *skill* dan kompetensi mereka.

Program pelatihan dan pendidikan Perum Jamkrindo dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial Perusahaan. Program pelatihan dan pendidikan tersebut disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berbasis Kompetensi
Program pelatihan mengacu pada kebutuhan kompetensi sesuai *job description* masing-masing karyawan.
2. Berjenjang
Program pelatihan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan kebutuhan/tuntutan tugas, tanggung jawab dan jabatan karyawan.
3. Berkelanjutan
Program pelatihan dilakukan secara berkesinambungan baik dari segi materi (materi *level* terendah sampai level tertinggi) maupun dari segi kontinuitasnya.

Sedangkan jenis pelatihan yang diperuntukkan kepada karyawan dibedakan dalam 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Reguler
Program pelatihan yang dirancang khusus untuk dilaksanakan secara rutin (tahunan) oleh Perusahaan. Dalam rangka program pelatihan reguler maka dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis pelatihan sebagai berikut:

EDUCATION AND TRAINING

Perum Jamkrindo is highly committed to continuously increase its employees' quality, as it is the main aspect of the Company's sustainability. One of the ways to increase quality is through employees' training and education program.

In 2017, the number of trained employees has decreased compared to 2016, this is due to the number of new recruits in the year 2017, which is less than in 2016. The amount is in accordance with the needs of the Company, which is expanding its activities in all lines of business. In order to provide briefings to these new employees, the Company provides a number of training to support their skills and competencies.

The training and education program is performed with consideration of the company's financial capability. Furthermore, the training and education program is thoughtfully designed with the basis of these principals:

1. Competency Based
The training program is based on the competencies needed corresponding to the job description of each employee.
2. Tiered
The training program is conducted by levels according to the needs and demands of the job, responsibility, and position of the employees.
3. Continuity
The training program is conducted continuously and cohesively from the material perspective (bottom-top level).

The type of trainings for employees are categorized into 2 (two) programs as follows:

1. Regular Training Program
Training program that is specifically designed to be performed yearly by the Company. There are 2 (two) types of regular training program as follows:



a. Pelatihan Prajabatan

Pelatihan yang harus diikuti karyawan yang akan diangkat menjadi Calon Karyawan dan Karyawan Tetap atau yang akan atau telah menduduki suatu tingkat jabatan tertentu.

Materi pelatihan prajabatan terdiri dari:

i. Pelatihan pengetahuan Perusahaan

Pelatihan-pelatihan tentang pengetahuan perusahaan yang diikuti oleh seluruh karyawan sesuai tingkatan dan jabatan karyawan.

ii. Pelatihan perilaku

Pelatihan-pelatihan yang bertujuan pembentukan untuk dan peningkatan kualitas kepribadian, perilaku dan etika karyawan yang wajib diikuti seluruh karyawan sesuai tingkatan dan jabatan karyawan.

iii. Pelatihan manajerial

Pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan karyawan, serta ditujukan bagi karyawan yang akan atau telah menduduki suatu tingkat jabatan struktural.

b. Pelatihan Kompetensi Teknis

Pelatihan yang harus diikuti karyawan agar mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai *job description* masing-masing.

2. Program Pelatihan Non-Regular

Program pelatihan di luar program yang tema dan pelaksanaannya bersifat insidental sesuai kebutuhan Perusahaan. Materi pelatihan diberikan secara komprehensif meliputi semua aspek peningkatan kualitas, baik kualitas perilaku maupun keilmuannya.

Seluruh pelatihan dilakukan melalui lembaga pendidikan yang mempunyai kompetensi di bidang yang diperlukan maupun secara mandiri oleh para pejabat senior perusahaan untuk materi "*Corporate and Product Knowledge*" dan sebagai saran transfer pengetahuan ilmu penjaminan kredit dari pejabat yang telah mempunyai pengalaman di bidang tersebut kepada para staf sebagai generasi penerus perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas karyawan perusahaan juga telah menjalankan program pemberian beasiswa pendidikan ke jenjang S2 dengan program studi sesuai kebutuhan perusahaan. Seleksi pemberian beasiswa tersebut dengan memperhatikan kinerja dan kontribusi karyawan.

a. Pre-position training

Training that is designed for staff who will be promoted to prospective employees and permanent employees, or going to or are currently holding certain position.

The training materials for pre-position are:

i. Company's information training

The trainings regarding company's information are for employees according to their level and position.

ii. Soft skill training

Trainings for the purpose of character building, improving the quality of soft skills and ethics. It is mandatory for employees according to their level and position.

iii. Managerial training

Training with the purpose of improving the managerial and leadership skills. Designed for employees who will or have been holding a certain structural position.

b. Technical Competency Training

This is mandatory trainings for employees in order to gain technical skills that are necessary to perform their job according to the each job description.

2. Non-Regular Training Program

Training program which theme and schedule are out of the regular program depending on the need of the Company. The material given is comprehensive which covers quality improvement in both soft skill as well as hard skill.

All training is done through educational institutions which have competencies in the field which is needed independently or needed by the senior officials. The material is "*Corporate and Product Knowledge*" and it serves as a tool for transfer knowledge of credit assurance from experienced officials in that field to the new generation of staff that will later lead the company.

The company offers scholarship to employees to continue their education for a masters degree, in support to its commitment towards continuous quality improvement of their employees. Selection is based on employees' contribution and performance.

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Dalam menilai program peningkatan tenaga kerja, maka Perum Jamkrindo membuat evaluasi indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan Perum Jamkrindo yang dinilai pada tahun 2016 dan tahun 2017. Program kepuasan karyawan dapat digambarkan sebagai program peningkatan kinerja (*performance improvement*) secara efektif, dalam hal ini adalah program yang menyesuaikan dengan kebutuhan para karyawan.

Survei kepuasan karyawan ini dilakukan di seluruh wilayah kerja Perum Jamkrindo dengan cara memberikan jawaban melalui kuesioner yang berjumlah 1.102 responden meliputi KKWT, Calon Karyawan, dan Karyawan Tetap.

Hasil dari survei kepuasan karyawan dengan menggunakan indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

In evaluating the human resource improvement program, Perum Jamkrindo created the evaluation index for employee satisfaction and employees engagement which were evaluated in 2016 and 2017. Employee satisfaction program is portrayed as performance improvement program effectively, that is according to needs of the employees.

The employee satisfaction survey is given throughout all regions of Perum Jamkrindo. The company hands out questionnaires to 1,102 respondents including STPS, prospective employees, and permanent employees.

The result of the employee satisfaction survey and employee engagement survey are expected to motivate the Company to improve its performance.

Uraian Analysis	Kepuasan Karyawan Employees Satisfaction		Loyalitas Loyalty	
	2017	2016	2017	2016
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	76,88	75,81	80,69	80,63
Wilayah I <i>Region I</i>	76,95	77,43	81,43	83,23
Wilayah II <i>Region II</i>	77,00	75,49	80,22	81,53
Wilayah III <i>Region III</i>	77,12	74,98	81,48	80,08
Wilayah IV <i>Region IV</i>	77,03	76,28	82,53	80,69
Wilayah V <i>Region V</i>	76,91	77,37	80,85	83,08
Wilayah VI <i>Region VI</i>	77,09	78,28	81,26	81,64
Wilayah VII <i>Region VII</i>	77,06	76,12	82,78	82,53
Wilayah VIII <i>Region VIII</i>	77,00	77,40	80,87	82,31
Wilayah IX <i>Region IX</i>	77,01	77,56	83,92	85,46
Nasional <i>National</i>	77,00	76,67	81,60	81,37



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka indeks kepuasan dan loyalitas karyawan Perum Jamkrindo secara Nasional meningkat. Angka indeks kepuasan karyawan secara nasional meningkat dari 76,67% di tahun 2016 menjadi 77% di tahun 2017. Sedangkan indeks loyalitas meningkat dari 81,37% menjadi 81,60%. Baik indeks kepuasan maupun loyalitas karyawan Perum Jamkrindo termasuk dalam kategori “BAIK”.

Apabila dilihat berdasarkan 10 kategori, yakni Kantor Pusat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, Wilayah VI, Wilayah VII, Wilayah VIII, dan Wilayah IX, maka indeks kepuasan tertinggi terdapat di Wilayah III (Jakarta). Hal ini berubah secara signifikan apabila dibanding hasil survei tahun lalu dimana indeks kepuasan karyawan di Jakarta adalah terendah dibandingkan wilayah lainnya. Dari sisi Loyalitas wilayah IX (Makassar) memperoleh skor tertinggi yaitu 83,92.

TINGKAT KESEJAHTERAAN

Perum Jamkrindo menyadari bahwa tuntutan tugas dan tanggung jawab Perusahaan terus meningkat seiring peningkatan skala dan *volume* bisnis Perusahaan. Untuk itu seluruh karyawan dituntut untuk dapat bekerja secara intensif dan optimal sesuai kebutuhan perusahaan.

Selain menyediakan lingkungan kerja yang nyaman, baik dan kondusif, Perum Jamkrindo juga berupaya untuk menyempurnakan sistem penggajian karyawan. Sistem penggajian karyawan Perum Jamkrindo disusun dengan memperhatikan masa kerja, beban kerja, tanggung jawab, serta risiko tugas maupun jabatan masing-masing karyawan.

Perum Jamkrindo telah menerapkan sistem pemberian insentif baik kepada karyawan maupun unit kerja sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan. Selain hal tersebut, Perum Jamkrindo juga memberikan benefit kepada karyawan berupa Jasa Produksi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kinerja tahunannya.

Berikut rincian pendapatan dan rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan Perum Jamkrindo:

1. Pendapatan karyawan Perum Jamkrindo terdiri dari:
 - a. Gaji Pokok.
 - b. Tunjangan Kesejahteraan.
 - c. Tunjangan Jabatan.
 - d. Tunjangan Wilayah.
 - e. Tunjangan Uang Makan.
 - f. Tunjangan Komunikasi.
 - g. Tunjangan Cuti Tahunan.
 - h. Tunjangan Hari Raya.

Based on the analysis given in the table, the index level of satisfaction and loyalty of employees showed under the “National”, in 2016 the index showed 76,67 and increased to 77.00 in 2017. Therefore, it is in the “GOOD” category. Moreover, the loyalty index nationwide also increased from 81.37 in 2016 to 81.60 in 2017, making it into the “GOOD” category.

There are 10 categories, namely: Head Office, Region I, Region II, Region III, Region IV, Region V, Region VI, Region VII, Region VIII and Region XI. Based on the analysis, the employees satisfaction index is highest in Region III – Jakarta. This shows significant changes compared to last year’s survey results in which the employee satisfaction index in Jakarta was the lowest compared to other regions. In terms of Loyalty, area IX (Makassar) obtained the highest score of 83.92.

LEVEL OF WELFARE

Perum Jamkrindo understands that the duty and responsibility of the Company will increase parallel with the increase of volume and scale of the Company. Therefore, all employees are enforced to work intensively and optimally according to the needs of the company.

Perum Jamkrindo strives to create a workspace that is comfortable and conducive for the employees. Furthermore, Perum Jamkrindo also tries to perfect its payroll system. The current payroll system considers several factors, namely: years of service, responsibility, workload, risk, and position of each of the employees.

Perum Jamkrindo has started to give incentive to employees as well as work unit as a gesture of appreciation for the employee’s performance. Additionally, Perum Jamkrindo also gives benefit to employees in the form of Production Service as an appreciation for its employees’ yearly performance.

Below is the breakdown of employees income and highest salary ratio from bottom to top:

1. Perum Jamkrindo’s employees income consists of:
 - a. Main Salary.
 - b. Welfare Allowance.
 - c. Position Allowance.
 - d. Regional Allowance.
 - e. Food Allowance.
 - f. Communication Allowance.
 - g. Annual Leave Allowance
 - h. Religious Holiday Allowance.

2. Rasio Gaji (Upah) tertinggi dan terendah
Berikut kami sampaikan Rasio Gaji (upah) tertinggi dan terendah sebagai berikut:
- Rasio Gaji Karyawan Terendah dan Tertinggi= 1 : 6,09
 - Rasio Gaji Direksi Terendah dan Tertinggi= 1 : 0,09
 - Rasio Honorarium Dewan Pengawas Terendah dan Tertinggi= 1 : 0,11
 - Rasio Gaji Direksi Terendah dan Karyawan Tertinggi= 1 : 3,59

2. Salary ratio highest and lowest. Below are the explanation of low salary ratio and high salary ratio:

- Employees salary ratio lowest : highest = 1 : 6,09
- Directors salary ration lowest : highest = 1 : 0,09
- Honorarium Ratio of Supervisory Board lowest and highest = 1 : 0,11
- Directors salary ratio lowest : highest for employees = 1 : 3,59

Rasio Gaji 2017

Salary Ratio 2017

Gaji Salary	GG/TG Salary and Allowances	Gaji + Tunjangan Tetap Salary + Fixed allowance	Jabatan Position
Gaji Tertinggi 2017 Highest Salary 2017	XI/22	Rp27.271.425	Kepala Divisi Division Head
Gaji Terendah 2017 Lowest Salary 2017	III/3	Rp5.251.858	Pelaksana Executor

JUMLAH KARYAWAN KELUAR (TURNOVER)

Data jumlah karyawan keluar (*turnover*) pada tahun 2016 terdiri dari pensiun normal, pensiun dini, mengundurkan diri, dan meninggal dunia.

TOTAL OF EMPLOYEES TURNOVER

Data on the number of employees turnover in 2016 includes data of regular pension, early retirement, resignation, and death.

Karyawan Keluar Employees Turnover	Jumlah Total
Pensiun normal Regular pension	5
Pensiun dini Early retirement	0
Mengundurkan diri Resignation	22
Meninggal dunia Death	0
Jumlah Total	27

ROTASI DAN MUTASI KARYAWAN

Mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja dapat diadakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas perusahaan dan pembinaan pegawai, termasuk di dalamnya perencanaan karier. Kewenangan mutasi dan penempatan karyawan dibedakan menjadi 2 (dua):

- Kantor Pusat
 - Mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern Direktorat dapat dilakukan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Divisi yang membidangi SDM.

ROTATION AND MUTATION OF EMPLOYEES

Mutation of position and or mutation of work unit can be done for the purpose of completion of tasks and employees training, including career planning. The authority to mutate and placement for employees is categorized into 2 (two):

- Head Office
 - Placement and mutation of the internal directorate of employees may be proposed by Division Head or equivalent. Division Head will suggest the name to Division Head of HR.



- b. Mutasi dan penempatan karyawan antar Direktorat dapat diusulkan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Direktur yang membidangi SDM.
2. Kantor Cabang
- a. Untuk mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern kantor cabang ditetapkan oleh Kepala Kantor Cabang dengan memperhatikan kompetensi masing-masing karyawan dan kebutuhan Kantor Cabang.
 - b. Khusus untuk penempatan karyawan sebagai kasir agar segera dibuat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Cabang setempat.

Sebagian besar rotasi dan mutasi karyawan dilakukan dalam rangka memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap Karyawan yang bersangkutan pada jabatan yang lebih tinggi. Ketentuan terkait rotasi dan mutasi karyawan untuk promosi ditetapkan sesuai dengan ketentuan promosi Perusahaan sesuai hasil komite promosi.

Selama tahun 2017 tingkat rotasi dan mutasi karyawan sebesar 13,69% dibandingkan jumlah keseluruhan karyawan.

- b. Placement and mutation of employees between the Directorates may be proposed by the Division Head or equivalent Division Head will suggest the name to Division Head of HR.
2. Branch Office
- a. Placement and mutation of employees in the branch office can be proposed by Head of Branch Office by considering the competencies of each employee and the needs of the Branch Office.
 - b. Specifically for cashiers, Assignment Letter has to be signed by the corresponding Head of Branch.

Much of the rotation and mutation of employees is conducted in order to assign duties and responsibilities to the employees concerned in a higher position. Terms related to the rotation and transfer of employees for promotion are determined in accordance with the provisions of the promotion of the Company according to the results of the promotion committee.

During the year 2017, the rotation and employee mutation rate is 13.69% compared to the total number of employees.

Karyawan Mutasi/Rotasi <i>Rotation and Mutation of Employees</i>	Jumlah <i>Total</i>
Januari <i>January</i>	4
Februari <i>February</i>	8
Maret <i>March</i>	49
April <i>April</i>	0
Mei <i>May</i>	0
Juni <i>June</i>	0
Juli <i>July</i>	29
Agustus <i>August</i>	20
September <i>September</i>	11
Oktober <i>October</i>	25
November <i>November</i>	0
Desember <i>December</i>	0
Jumlah <i>Total</i>	146

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Perusahaan menerapkan metode penilaian kinerja karyawan di tahun 2017 berdasarkan Keputusan Direksi No. 3/DIR/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Penilaian Kinerja Pegawai, dan Keputusan Direksi No. 36/DIR/VII/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direksi No. 3/DIR/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Penilaian Kinerja Pegawai.

Penilaian atas kinerja karyawan dilakukan melalui 2 (dua) periode, yaitu pada semester I untuk periode bulan Januari sampai Juni, pelaksanaan penilaian dilakukan pada awal bulan Juli; dan semester II untuk periode bulan Juli hingga Desember, dengan pelaksanaan penilaian dilakukan pada awal bulan Januari. Berdasarkan penilaian tersebut, Perusahaan dapat menentukan penetapan kenaikan gaji karyawan dan pemberian penghargaan berdasarkan penilaian tahunan kinerja.

Ketentuan Penetapan Kenaikan Gaji Karyawan dan Pemberian Penghargaan berdasarkan Penilaian Tahunan Kinerja

Hasil Penilaian Review Results	Kenaikan Gaji Karyawan Salary Determination	Penghargaan Karyawan Awarding
Kurang <i>Disappointing</i>	Tidak Naik Gaji <i>No Increase in Salary</i>	Mendapat teguran tertulis <i>Getting Written Reprimand</i>
Cukup <i>Satisfactory</i>	Tidak Naik Gaji <i>No Increase in Salary</i>	Tidak mendapat surat teguran tertulis <i>No Need for Written Reprimand</i>
Baik <i>Good</i>	Naik Gaji 1 Tingkat Gaji <i>Salary Increase by One Level</i>	Tidak mendapat TIPKP <i>Not Getting EPAB*</i>
Sangat Baik <i>Excellent</i>	Naik Gaji 1 Tingkat Gaji <i>Salary Increase by One Level</i>	Mendapat TIPKP sebesar "N" <i>Getting EPAB in the amount of "N"</i>

*) EPAB : Employee Performance Achievement Benefits

Sejak tahun 2018, sesuai Surat Edaran No. 14/SE/4/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Penerapan KPI Individu sebagai Dasar Penilaian Kinerja Karyawan, maka terhitung mulai tahun 2018 penilaian kinerja karyawan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis *balanced scorecard*.

EMPLOYEES PERFORMANCE REVIEW

The Company applies employee performance review method in 2017 based on Board of Directors Decree No. 3/DIR/I/2001 dated January 15, 2001 on Employee Performance Review, and Board of Directors Decree No. 36/DIR/VII/2001 dated July 11, 2001 on the Implementation Guideline of The Board of Director's Decree No. 3/DIR/I/2001 dated January 15, 2001 on Employee Performance Review.

Assessment of the employee's performance is performed in 2 (two) periods, i.e. in the first semester for the period of January to June, the implementation of the assessment conducted in early July; and second semester for July to December period, with the assessment conducted in early January. Based on these assessments, the Company may determine the increase in employee salary and award based on the annual performance appraisal.

Conditions for Increasing Employee Salaries and Awarding Based on Annual Performance Review

Since 2018, according to Circular Letter, No. 14/SE/4/III/2018 dated 29 March 2018 on Guidelines for Implementation of Individual KPI as the Basic of Employee Performance Review, starting from 2018, employee performance review will be conducted using *Key Performance Indicator* (KPI) based on a *balanced scorecard*.

Teknologi Informasi

Information Technology

Visi dan Misi Penerapan Teknologi Informasi Perum Jamkrindo

Vision and Mission Statement of Perum Jamkrindo Information Technology

Visi

Menjadi *Key Success Factor* bagi transformasi Perusahaan menuju Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

Vision

As the Key Success Factor in the company's transformation to be the Leading Assurance Company which supports the National Economic Growth.

Misi

- Menyediakan Solusi Bisnis yang terintegrasi, efisien dan efektif untuk mendukung transformasi Perusahaan.
- Menyediakan infrastruktur TI yang aman dan handal sesuai dengan perkembangan bisnis.
- Meningkatkan kematangan atau kapabilitas *IT Governance* sesuai dengan kebutuhan kepatuhan regulasi dan pemenangan persaingan.

Mission

- *Offers Business Solutions that are integrated, efficient and effective which supports the transformation of the Company.*
- *Provides IT infrastructure that is secure and reliable which conforms to the business growth.*
- *To increase the capability of IT Governance which conforms to the regulations and market competition.*

PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perusahaan, khususnya dukungan dalam penyediaan aplikasi perangkat lunak kegiatan operasional penjaminan kredit, maka pada tahun 2017 Perusahaan mengembangkan program strategis dengan tema "Implementasi Sistem Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas Proses Bisnis Perusahaan". Untuk itu Perusahaan telah melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Operasional Penjaminan dan Akuntansi Tersentralisasi dan Terintegrasi
Sebelumnya, aplikasi operasional dan aplikasi akuntansi Perusahaan memiliki infrastruktur yang terdesentralisasi, dimana *server*, aplikasi, dan *database* terdapat pada masing-masing cabang. Berkembangnya Kantor Cabang dan pelayanan Perusahaan menjadi tantangan tersendiri bagi pemeliharaan sistem Teknologi Informasi yang dimiliki Perusahaan. Untuk itu sejak tahun 2016 hingga Januari 2017 dikembangkan proyek Pengembangan Aplikasi Sentralisasi atas kedua aplikasi tersebut dan resmi digunakan akhir Januari 2017.

Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penjumlahan akuntansi dari Aplikasi Operasional, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi Integrasi

THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM IN PERUM JAMKRINDO

In order to support the Company's business activities, particularly in supporting the provision of software applications for credit guarantee operations, in 2017 the Company develops a strategic program with the theme "Implementation of Integrated System to Improve Effectiveness of Company's Business Process". For that purpose, the Company has undertaken the following activities:

1. Development of Centralized and Integrated Accounting Operational System
Previously, the Company's operational applications and accounting applications had a decentralized infrastructure, where servers, applications, and databases existed in different branches. The expansion of Branch Offices and Company services is a challenge for the maintenance of the Company's Information Technology system. For that purpose, from 2016 to January 2017, the Centralized Application Development project has been developed on both applications and has been officially used by the end of January 2017.

In addition, to improve efficiency in the accounting journalization process of Operational Applications, the Information Technology Division develops Operational

Operasional dan Akuntansi. Saat ini, implementasi Integrasi Operasional dan Akuntansi telah mencakup:

- a. *Accrual* IJP,
- b. *Accrual* turunan IJP (kecuali *feebase*),
- c. *Cashbasis* turunan IJP (kecuali *feebase*), dan
- d. Beban klaim

Dengan adanya integrasi ini, maka proses penjaminan pada Aplikasi Operasional (seperti penerbitan SP, persetujuan klaim) akan otomatis dilakukan jurnal pada Aplikasi Akuntansi.

2. Integrasi Penjaminan *Online* dengan Mitra Bisnis (Bank dan *Non-Bank*)

Sejak tahun 2013, Perusahaan bekerja sama dengan mitra bank maupun *non-bank* untuk melaksanakan kerja sama *Digital Channeling* dan terus berkembang, baik dalam segi jumlah mitra maupun jumlah produk *Online*. Pada tahun 2017 terdapat penambahan 12 mitra *Online*, sehingga secara total terdapat 48 mitra *Online* yang terhubung dengan Jamkrindo sejak tahun 2013.

Dengan adanya integrasi penjaminan *Online* dengan mitra bisnis, maka kesalahan data penjaminan bisa direduksi karena tidak ada lagi proses *re-entry* data di sisi Jamkrindo. Selain itu, proses penerbitan sertifikat penjaminan menjadi lebih cepat karena data langsung diterima oleh sistem.

3. Implementasi *Monitoring* Produksi Harian

Perusahaan telah memiliki aplikasi monitoring produksi dan terus dilakukan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Pada tahun 2017 dilaksanakan pengembangan lanjutan monitoring produksi harian yang meliputi:

- a. *Dashboard* penerbitan harian *Suretybond*
- b. Aplikasi *dashboard* pencapaian bisnis bank
- c. *Dashboard volume* penjaminan tiap produk
- d. *Dashboard* penjaminan KUR baru

Dengan adanya *dashboard* terintegrasi ini diharapkan pihak Manajemen dapat memantau perkembangan bisnis secara cepat dan tepat.

4. Pengembangan Aplikasi Koreksi

Pada tahun 2017, Perusahaan juga mengembangkan aplikasi koreksi tersentralisasi untuk proses penjaminan khususnya penerbitan SP, serta sebagian telah terintegrasi dengan jurnal akuntansi. Dengan adanya aplikasi koreksi terintegrasi ini, maka proses koreksi dari semua aplikasi dapat dilakukan di satu aplikasi, dan hasil koreksi telah terintegrasi dengan jurnal akuntansi.

and Accounting Integration applications. Currently, the implementation of Operational and Accounting Integration has included:

- a. *Accrual* IJP,
- b. *Accrued* IJP derivatives (except fee based),
- c. *Cash Base* IJP derivative (except *feebase*), and
- d. Claim charges

With this integration, the guarantee process on the Operational Application (such as SP issuance and claim approval) will automatically be journalized on Accounting Application.

2. Integrasi Penjaminan *Online* dengan Mitra Bisnis (Bank dan *Non-Bank*)

Sejak tahun 2013, Perusahaan bekerja sama dengan mitra bank maupun *non-bank* untuk melaksanakan kerja sama *Digital Channeling* dan terus berkembang, baik dalam segi jumlah mitra maupun jumlah produk *Online*. Pada tahun 2017 terdapat penambahan 12 mitra *Online*, sehingga secara total terdapat 48 mitra *Online* yang terhubung dengan Jamkrindo sejak tahun 2013.

With the integration of online guarantee with business partners, the guarantee's data errors can be reduced because there is no longer data re-entry process on the Jamkrindo. In addition, the process of issuing certificates of guarantee becomes faster because the data directly received by the system.

3. Implementation of Daily Production Monitoring

The Company already has production monitoring applications and continues to be developed to meet the needs of stakeholders. In the year 2017, the Company carried out the development of advanced daily production monitoring which includes:

- a. Daily publishing dashboard of *Suretybond*
- b. Dashboard application of bank business achievement
- c. Dashboard of guarantee volume of each product
- d. Dashboard of new KUR guarantee

With the integrated dashboard, it is expected that the management can monitor business development quickly and precisely.

4. Development of Correction Application

In 2017, the Company has also developed a centralized correction application for the underwriting process, especially the issuance of SP, and partly integrated with the accounting journal. With the existence of this integrated correction application, then the process of correction of all applications can be done in one application, and the correction results have been integrated with the accounting journal.



5. Implementasi *Link Load Balancer & Wan Optimizer*
Dengan adanya *Resource Wide Area Network (WAN)* *Primary* dan *Secondary*, membuat salah satu *resource* tersebut tidak optimal karena hanya digunakan sebagai cadangan/*back up*. Oleh sebab itu Divisi Teknologi Informasi menerapkan *Link Load Balancer* yang memungkinkan sistem otomatis memilih jalur terbaik sesuai dengan beban kerja koneksi dari *Primary* dan *Secondary*. Selain itu implementasi *Wan Optimizer* memungkinkan kompresi otomatis atas paket data yang terkirim sehingga jalur interkoneksi yang ada dapat diakses seoptimal mungkin.

Dengan adanya integrasi dua link MPLS maka konektivitas dengan sistem dapat terjaga (24 jam) sehingga meningkatkan efektifitas proses bisnis.

6. *Knowledge Management*
Perusahaan mengembangkan aplikasi *Knowledge Majanemen*, yang dapat diakses secara internal untuk data-data pelatihan internal, serta secara publik sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam memberikan peningkatan literasi keuangan yang mendorong iklim *financial inclusions*.
7. Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko
Perusahaan telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) sejak tahun 2012 dan terus dilakukan pengembangan mengikuti kebutuhan dari unit kerja terkait. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan pengembangan aplikasi SIMR lanjutan secara *inhouse* dengan mengubah proses bisnis dari risiko perorangan ke risiko jabatan dan aplikasi tersebut telah dapat digunakan untuk menjalankan proses manajemen risiko.

5. Implementation of Link Load Balancer & Wan Optimizer
The existence of primary and secondary Resource Wide Area Network (WAN) makes one of the resources to be not optimal because it is only used as a backup. Therefore the Information Technology Division implements Link Load Balancer which allows the automatic system to choose the best path according to the connection workload of Primary and Secondary. In addition, the implementation of Wan Optimizer allows automatic compression of data packets sent so that the existing interconnection paths can be accessed optimally.

With the integration of two MPLS links, the connectivity with the system can be maintained (24 hours); thus increasing the effectiveness of business processes.

6. Knowledge Management
The Company developed the Knowledge Management application, which can be accessed internally for internal training data, as well as publicly as part of the Company's efforts to provide increased financial literacy that fosters the financial inclusions climate.
7. Risk Management Application Development
The Company has had a Risk Management Information System (SIMR) application since 2012 and continues to be developed following the needs of the related work units. In 2017, the ongoing development of in-house SIMR applications by changing business processes from individual risk to occupational risk and the application has been used to run the risk management process.

BESARAN BIAYA YANG DIKELUARKAN TEKNOLOGI INFORMASI

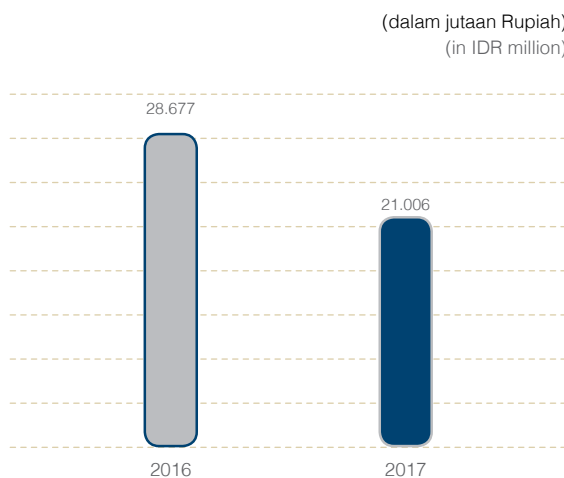
Di sepanjang tahun 2017 Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp21,01 miliar, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp28,68 miliar.

Perbandingan Biaya yang Dikeluarkan Teknologi Informasi
2016-2017

THE TOTAL OF INVESTMENT COSTS ISSUED BY INFORMATION TECHNOLOGY

Throughout the year 2017, the Company spent IDR21.01 billion, which is a decrease from IDR28.68 billion in the previous year.

Cost Comparison Issued by Information Technology
2016-2017







TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance

Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik

General Principles of Good Corporate Governance

Berkembangnya dunia usaha dari masa ke masa membuat reputasi sebuah perusahaan tidak lagi hanya dipandang dari segi finansial, melainkan juga dari segi non-finansial, mencakup etika bisnis dan bentuk komitmen serta pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya kepada publik secara luas. Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan alat dan metode bagi entitas usaha untuk mengembangkan aspek non-finansial, yang pada akhirnya akan membentuk kepercayaan publik kepada entitas usaha dan meningkatkan iklim investasi.

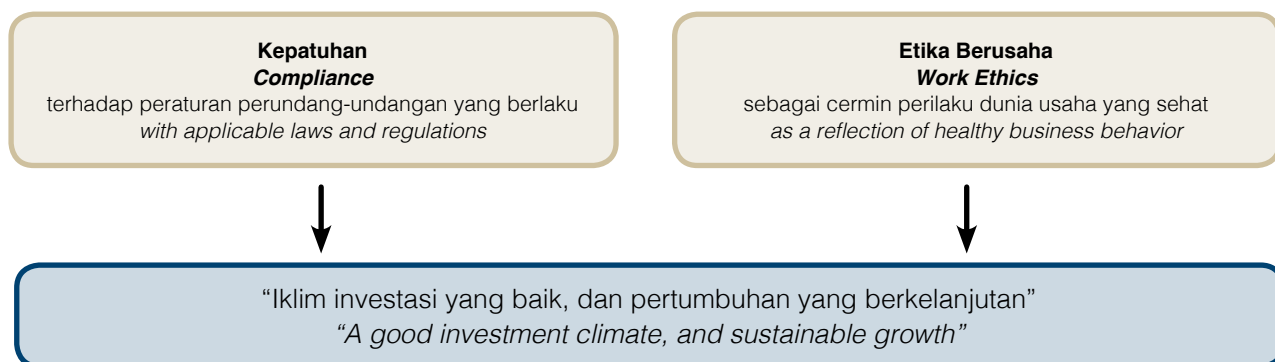
GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika. Pada konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainability development*, GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang.

The development of the business world from time to time makes the reputation of a company no longer only seen from the financial side, but also in terms of nonfinancial, including business ethics and the form of commitment and accountability of a company in conducting its business activities to the public. Good Corporate Governance (GCG) practices provide tools and methods for business entities to develop non-financial aspects, which in turn will establish public confidence in business entities and improve the investment climate.

GCG are principles that underlie the company's management processes and mechanisms based on regulatory compliance and reflection of the ethical business. In the concept of sustainability development, GCG becomes one of the main pillars which are expected to establish the foundation of a healthy investment climate. Furthermore, GCG has become one of the fundamental factors for investors in assessing the performance of a sustainable company for the foreseeable future.

Pendekatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Approach

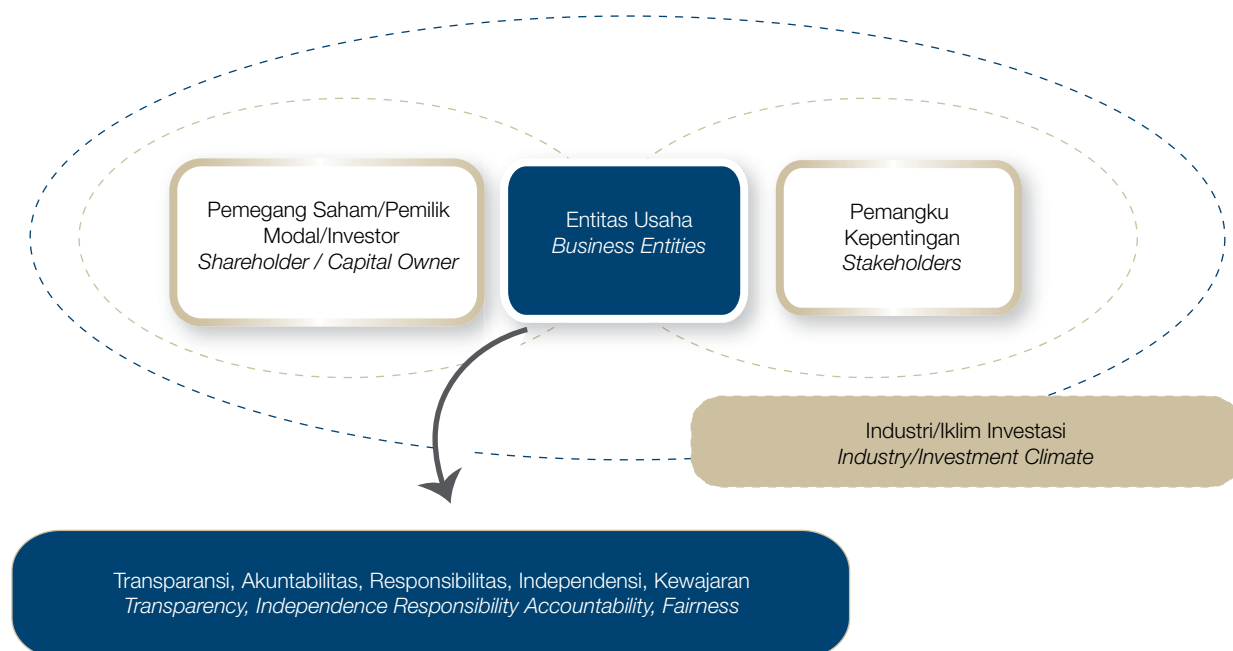


Di Indonesia, regulator bersama-sama dengan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan GCG di Indonesia memberikan penegasan yang kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan pemangku kepentingan. Melalui hubungan yang harmonis ini, diharapkan akan terbentuk dunia usaha yang menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat, dan justru mampu berkontribusi bagi dimensi sosial dan lingkungan di sekitarnya.

In Indonesia, the regulators, together with various parties concerned with GCG developments in Indonesia, provide a strong affirmation of the importance of harmonious relationships between business entities and stakeholders. Through this harmonious relationship, it is hoped that a business which contributes to the surrounding social and environmental dimensions, and one which does not only operate for profit, will be established.

Harmonisasi Entitas Usaha dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Harmonization of Business Entities with Shareholders and Stakeholders



Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perum Jamkrindo

The Development of Good Corporate Governance Application in Perum Jamkrindo

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kebijakan dan Dasar Penerapan

Perum Jamkrindo sebagai salah satu entitas usaha sangat menjunjung tinggi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah mekanisme yang diciptakan sebagai upaya mengatur hubungan antar organ dalam entitas usaha; baik hubungan internal maupun eksternal yang berlandaskan pada perundang-undangan dan etika berusaha.

Perum Jamkrindo senantiasa memiliki semangat dan komitmen dalam menerapkan GCG di lingkup Perusahaan yang dilandaskan pada kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar Perum Jamkrindo dapat berkembang secara maksimal serta memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi dinamika usaha khususnya pada industri penjaminan secara konsisten. Untuk itu, implementasi GCG menjadi aspek penting bagi Perusahaan dalam mencapai cita-cita yang digariskan serta mewujudkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dalam mengimplementasikan GCG, Perum Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

THE BASICS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Policies and Basis of Implementation

Perum Jamkrindo as one of the business entities highly upholds Good Corporate Governance. Good Corporate Governance (GCG) is a mechanism created as an effort to regulate the relationships between organs within a business entity; both internal and external relationships which are based on legislation and business ethics.

Perum Jamkrindo always has the spirit and commitment for implementing GCG in the Company based on compliance with prevailing laws and regulations. It is intended so that Perum Jamkrindo can develop optimally and have a high competitiveness in facing the dynamics of the business, especially and consistently, in the guarantee business. Therefore, the implementation of GCG becomes an important aspect for the Company in achieving the goals outlined and realizing sound corporate principles.

In implementing GCG, Perum Jamkrindo refers to several laws and regulations, particularly Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE). This Law gives overall foundation to the organizational management aspect; from shareholders rights and obligations, duties and authorities of Directors and Board of Commissioners/Board of Supervisors, to relationship between the Company and internal and external stakeholders.

As an SOE entity, GCG implementation in the Company scope also refers to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises (SOE) as amended by Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012, stating that GCG are principles underlying a process and mechanism of managing a company based on laws and regulations and business ethics. Implementation of GCG principles covers transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, which are strong basis to the sustainability of the Company's business activity. Furthermore, GCG implementation that refers to

kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan pemilik modal dan para pemangku kepentingan yang akan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tersebut, penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Azas-azas Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Transparansi Transparency	Akuntabilitas Accountability	Responsibilitas Responsibility	Independensi Independency	Kewajaran Fairness

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) melalui azas-azas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemilik Modal, Dewan Pengawas maupun Direksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 88/KEP-DIR/XII/2012, KEP-05/DP JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

best practices will increase trust from the equity owners and stakeholders, which will bring the Company to sustainable and significant advancement.

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs, the application of GCG principles to BUMN entities shall have the following objectives:

1. To optimize SOE value so that the company has strong competitiveness, nationally and internationally.
2. To support SOE management professionally, efficiently, and effectively, as well as to empower functions and increase the independence of the Company's organ.
3. To support the Company's organ in making decisions and taking actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of SOE social responsibility towards the stakeholders and the environmental preservation surrounding the SOE.
4. To increase SOE's contributions to the national economy.
5. To improve conducive climate for national investment development.

Principles of Good Corporate Governance Implementation

Principles of Good Corporate Governance

GCG implementation principle used by the Company refers to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 and GCG General Guidelines from the National Committee of Governance Policies (KNKG) through GCG principles generally known as TARIF, which are transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness on all Corporate Organs either Equity Owners, Board of Supervisors or Directors stipulated in the Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 88/KEP-DIR/XII/2012, KEP-05/DP JAMKRINDO/XII/2012 dated 3 December 2012 on Guidelines for Good Corporate Governance Implementation of Public Corporation (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia (Credit Guarantee Indonesia), with details as follows:



Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance principles</i>				
	Transparansi <i>Transparency</i>	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i>	Kemandirian <i>Independency</i>	Kewajaran <i>Fairness</i>
Pemilik Modal <i>Equity Owner</i>	a. Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain <i>merger</i>, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dalam jumlah yang substansional b. Keterbukaan dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas a. <i>Clear disclosure of extraordinary transaction plans includes mergers, acquisitions, and sale of Company assets in substantial quantities</i> b. <i>Openness in determining the remuneration of the Directors and Board of Supervisors</i>	Pemilik modal mempunyai tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan <i>Equity owner has the responsibility to monitor the implementation of GCG principles in the Company's management process and ensure that all of the Company's management comply with the laws and regulations</i>	Pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku <i>Equity owner is not allowed to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Directors in accordance with the prevailing laws and regulations</i>	Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota Direksi dan Dewan Pengawas sehingga secara objektif didapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan <i>Perform a common procedure in determining the members of the Directors and Board of Supervisors in order to objectively hire the right people according to the qualifications required by the Company</i>	Pemilik modal berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas <i>Equity owner is entitled to obtain information relating to the interests of the Company from the Directors and/or Board of Supervisors</i>

Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance principles				
	Transparansi Transparency	Akuntabilitas Accountability	Pertanggungjawaban Responsibility	Kemandirian Independency	Kewajaran Fairness
Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>	a. Dibuat risalah rapat Dewan Pengawas yang menunjukkan adanya dinamika rapat dalam proses pengambilan keputusan b. Kehadiran setiap anggota Dewan Pengawas dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan c. Remunerasi Dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan a. <i>Minutes of the Board of Supervisors meeting indicate the dynamics of the meeting in decision making process</i> b. <i>Attendance of each member of the Board of Supervisors and the implementation of the Board of Supervisors meeting are reported in the Company's Annual Report</i> c. <i>Remuneration of the Board of Supervisors is reported in the Company's Annual Report</i>	a. Dewan Pengawas bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif b. Pemberdayaan fungsi Dewan Pengawas a. <i>The Board of Supervisors is responsible for overseeing the implementation of the Company's strategy and requiring the implementation of accountability and providing advice to the Directors in the framework of effective management of the Company</i> b. <i>Empowerment of Board of Supervisors functions</i>	a. Dewan Pengawas harus mempunyai komitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya b. Dewan Pengawas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal c. Dewan Pengawas turut bertanggungjawab terhadap kebenaran laporan keuangan yang diajukan Direksi kepada Pemilik Modal a. <i>Board of Supervisors shall have a commitment to comply with the laws and regulations relating to its official duties</i> b. <i>Board of Supervisors is responsible for the performance of its duties to the Equity Owner</i> c. <i>Board of Supervisors is also responsible for the actuality of the financial statements submitted by the Directors to the Equity Owners</i>	a. Memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan b. Dewan Pengawas tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerja sama atau kontrak- kontrak yang bersifat rutin a. <i>Provide objective consideration in solving problems faced by the Company that may contain potential conflict of interest</i> b. <i>Board of Supervisors is not authorized to make day-to-day management decisions of the Company such as decisions on employee appointments and dismissals or the signing of cooperation or contracts of a routine task</i>	Dewan Pengawas dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan <i>stakeholders</i> <i>The Board of Supervisors in carrying out its positions will always apply the Company's business ethics in order to meet the interests of stakeholders</i>



Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance principles</i>				
	Transparansi <i>Transparency</i>	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i>	Kemandirian <i>Independency</i>	Kewajaran <i>Fairness</i>
Direksi <i>Directors</i>	a. Menyediakan Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan sebagai alat bantu untuk mengungkapkan transaksi keuangan dan kinerja Perusahaan kepada <i>stakeholder</i> secara transparan b. Mengungkapkan informasi dan Laporan Keuangan Perusahaan di antaranya disajikan melalui <i>website</i> Perusahaan c. Mengungkapkan gaji dan penghasilan lain direksi pada Laporan Tahunan a. <i>Provide Company Activity and Financial Report as a supporting tool to transparently disclose financial transactions and Company performance to the stakeholders</i> b. <i>Disclose information and Company Financial Statements are presented on the Company's website</i> c. <i>Discloses salaries and other remuneration of the Directors in the Annual Report</i>	a. Direksi harus mampu menempatkan urutan prioritas dalam upaya pemenuhan kepentingan <i>stakeholder</i> b. Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan aset Perusahaan c. Direksi memberdayakan peran dan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen. d. Direksi harus memastikan bahwa SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya a. <i>Directors should be able to put priority order in the effort of fulfilling the stakeholder's interest</i> b. <i>The Directors establish and determine an effective Internal Control System to secure the Company's assets</i> c. <i>The Directors empower the role and function of SPI as management's strategic partner</i> d. <i>The Directors shall ensure that SPI has access to information about the Company which is required to perform its duties</i>	a. Direksi harus mempunyai komitmen untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan b. Direksi bertanggungjawab terhadap materi yang disajikan pada Laporan Keuangan c. Direksi bertanggungjawab terhadap pengungkapan informasi Laporan Keuangan pada media publikasi nasional sehingga dapat diakses oleh <i>stakeholder</i> a. <i>The Directors shall have a commitment to comply with the laws and regulations relating to the Company's operations</i> b. <i>The Directors are responsible for the material presented in the Financial Statements</i> c. <i>The Directors are responsible for information disclosure of the Financial Statement on national publication media in order to be accessed by stakeholders</i>	Komposisi Direksi harus memungkinkan direksi dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lainnya <i>The Directors composition shall enable the Directors to act independently in the sense that there is no interest which may interfere with the ability to perform the duties independently and critically in relation to each other</i>	a. Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang memadai agar setiap karyawan memperoleh rasa keadilan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pencapaian kinerja b. Menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan <i>stakeholder</i> a. <i>Applying adequate reward and punishment system so that every employee obtains a sense of fairness associated with the success in achieving performance</i> b. <i>Applying the Company's business ethics in order to fulfill the stakeholders' interests</i>

Landasan Hukum

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
11. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
13. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
14. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
15. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.
16. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Legal Basis

GCG implementation in the Company's area refers to several laws and regulations applicable in Indonesia, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE).
2. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 on Guarantee.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on Changes of Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption.
4. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on Administering Clean Country that is Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
5. Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 on Money Laundering as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003.
6. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Information Disclosure.
7. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.
8. Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporate (Perum) Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia)
9. Government Regulation No. 38 of 2008 on Changes of Government Regulation No. 6 of 2006 on the Management of State/Regional-Owned Property
10. Government Regulation No. 45 of 2005 on Establishment, Management, Monitoring, and Dissolution of SOE.
11. Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 and its changes No. PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises.
12. Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines to Determine Remuneration of the Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprise.
13. Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/2013 dated 18 February 2013 on Guidelines to Prepare SOE Information Technology Management.
14. Regulation of Minister of SOE No. PER-05/MBU/2006 on Audit Committee for SOE.
15. Decree of Secretary of SOE State Minister No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOE.
16. General Guidelines of GCG Indonesia by the National Committee of Governance Policies (KNKG).



INFRASTRUKTUR DAN SOFTSTRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Infrastruktur keorganisasian sebuah Perusahaan Umum (Perum) mencakup kepentingan pemilik modal yang dituangkan melalui Rapat Pembahasan Bersama (RPB); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perum menganut model 2 (dua) badan (*two tier system*), yaitu Dewan Pengawas dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Perusahaan telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RPB, Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Pengawas dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

Infrastruktur GCG Perusahaan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perusahaan, terdiri dari pemangku kepentingan dan organ pendukung. Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebagai landasan utama, Perusahaan menempatkan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan sebagai kunci utama yang melandasi seluruh organisasi Perusahaan untuk dapat bekerja bersama-sama, dan mampu mewujudkan kinerja yang sesuai dengan etika usaha yang berlaku di Indonesia.

Agar infrastruktur berjalan pada koridor yang tepat, Perusahaan menerapkan perangkat kebijakan berupa peraturan internal sebagai *softstructure* yang mengatur Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perusahaan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pedoman *Good Corporate Governance*, dengan pengesahan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 88/Kep-Dir/XII/2012-KER-05/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
3. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

INFRASTRUCTURE AND SOFTSTRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The organizational infrastructure of a Public Corporation (Perum) covers the interests of the equity owner as outlined through the Joint Discussion Meeting (RPB); Directors with their duties to manage; as well as the Board of Supervisors which functions to supervise. The management system of Perum adheres to the two-tier system model, namely the Board of Supervisors, and the Board of Directors, which has clear authority and responsibility in accordance with their respective functions as mandated in the regulations and legislation.

The Company already has the three main organs; RPB, Board of Supervisors and Directors. The Board of Supervisors and the Board of Directors have the responsibility to maintain the Company's long-term sustainability. Therefore, the Board of Supervisors and the Board of Directors must have a common perception of the Company's vision, mission, and values.

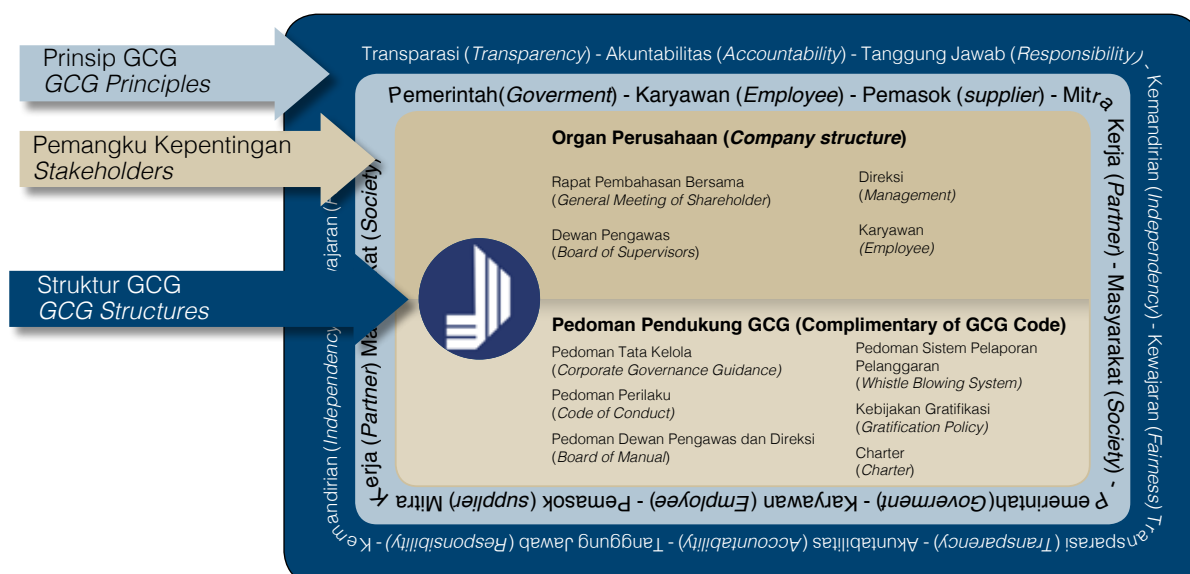
The Company's GCG Infrastructure also incorporates several important aspects which contribute to supporting the strengthening of control and management of the Company, which consist of stakeholders and supporting organs. The structure is in compliance with the prevailing regulations in Indonesia.

As the main foundation, the Company places the vision, mission and values of the Company as the main key underlying the entire organization of the Company to work together, and be able to realize the performance in accordance with the applicable business ethics in Indonesia.

For the infrastructure to proceed in the proper corridor, the Company implements a set of internal regulatory frameworks as soft structures which govern Corporate Governance within the Company, which includes:

1. Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia) as the Company's Articles of Association.
2. Good Corporate Governance Guidelines, with ratification through Joint Decree of Directors and Board of Supervisors of Public Corporation (Perum) of Indonesian Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia) No. 88/Kep-Dir/XII/2012-KER- 05/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated 3 December 2012 on General Guidelines of (Perum) Indonesian Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia).
3. Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012 dated 13 December 2012 on Code of Conduct.

4. Pedoman/*Board Manual* Dewan Pengawas dan Direksi, yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012-KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
5. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS), yang telah diperbaharui serta disahkan melalui Keputusan Direksi Perum Jamkrindo No. 121/Kep-Dir/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014.
6. Pedoman Kebijakan Gratifikasi, yang telah diperbaharui serta disahkan melalui Surat Edaran Direksi No. 9/SE/4/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Perum Jamkrindo.
7. Piagam Komite Audit, yang telah disahkan pada tanggal 26 April 2011.
8. Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha, yang telah disahkan pada Desember 2012.
9. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*), yang telah diperbaharui serta disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 38/Kep-Dir/V/2017 – KEP-03/DP-JAMKRINDO/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
10. Kode Etik Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai Auditor Internal Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo Peraturan Direksi, yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 30/Per-Dir/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.



PETA JALAN: RENCANA PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

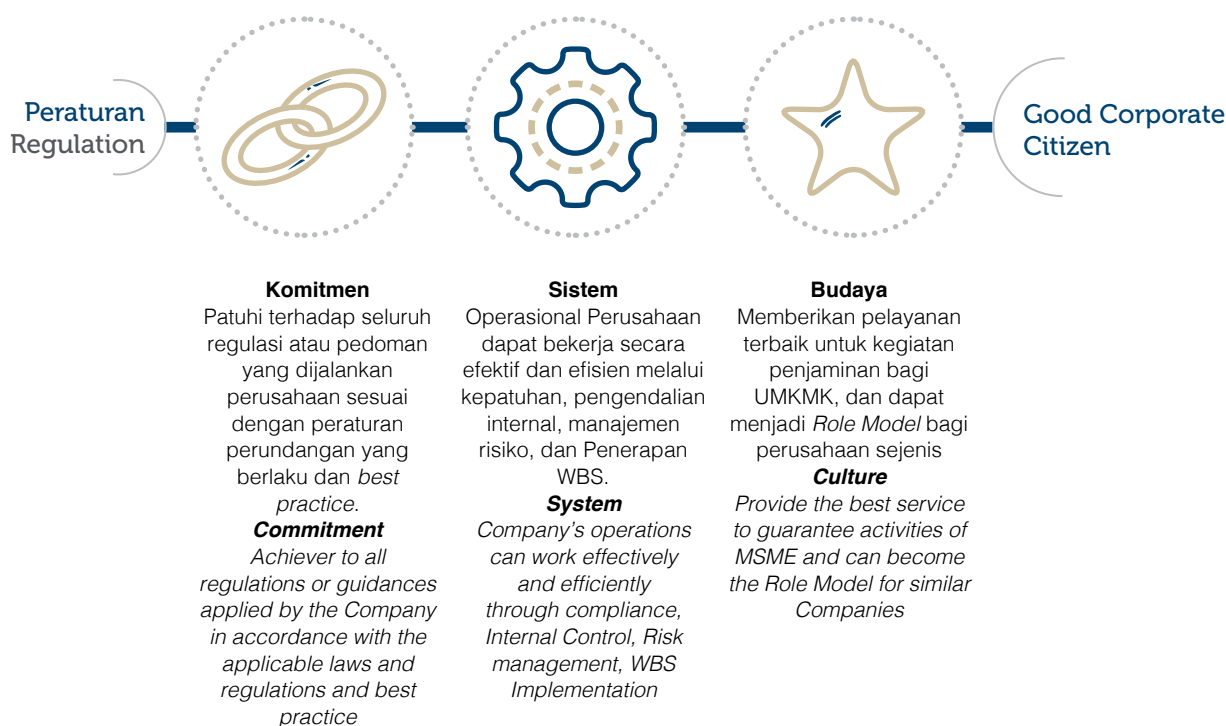
Proses GCG merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan dan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari komitmen, struktur GCG, sistem dan prosedur yang telah disusun oleh Perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang profesional secara efektif dan efisien.

Perum Jamkrindo memiliki *Roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

ROADMAP OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

GCG process is a way or mechanism done by the company and management in implementing GCG principles in order to perform its functions and duties in accordance with the applicable laws and regulations. The manifestation of commitment, GCG structure, system and procedures which have been developed by the Company aims to create added value for the stakeholders through professional management of the company, effectively and efficiently.

Perum Jamkrindo has a Roadmap in implementing GCG principles in order to achieve Good Corporate Citizen with the following mechanisms:



Komitmen

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Perum Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Perum Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Perum Jamkrindo

Commitment

In implementing GCG principles, all of the Company's Persons are committed to adhere and comply with all applicable laws and regulations, as well as the generally accepted ones. Support from the management provides a major role in determining the direction and objectives of GCG implementation in Perum Jamkrindo. In practice, Perum Jamkrindo Management serves as an example for the employees to keep committing to the ongoing GCG implementation. Perum Jamkrindo will apply

akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

Sistem

Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Perum Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

Budaya

Nilai-nilai budaya Perum Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Perum Jamkrindo, maka seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Perum Jamkrindo adalah untuk menjadi Perusahaan Penjaminan yang memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien dengan menciptakan nilai-nilai budaya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, membangun citra Perusahaan (*brand image*) dan reputasi Perusahaan yang baik serta *benchmark* bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

GCG principles in every business process and make improvements of the GCG support tools.

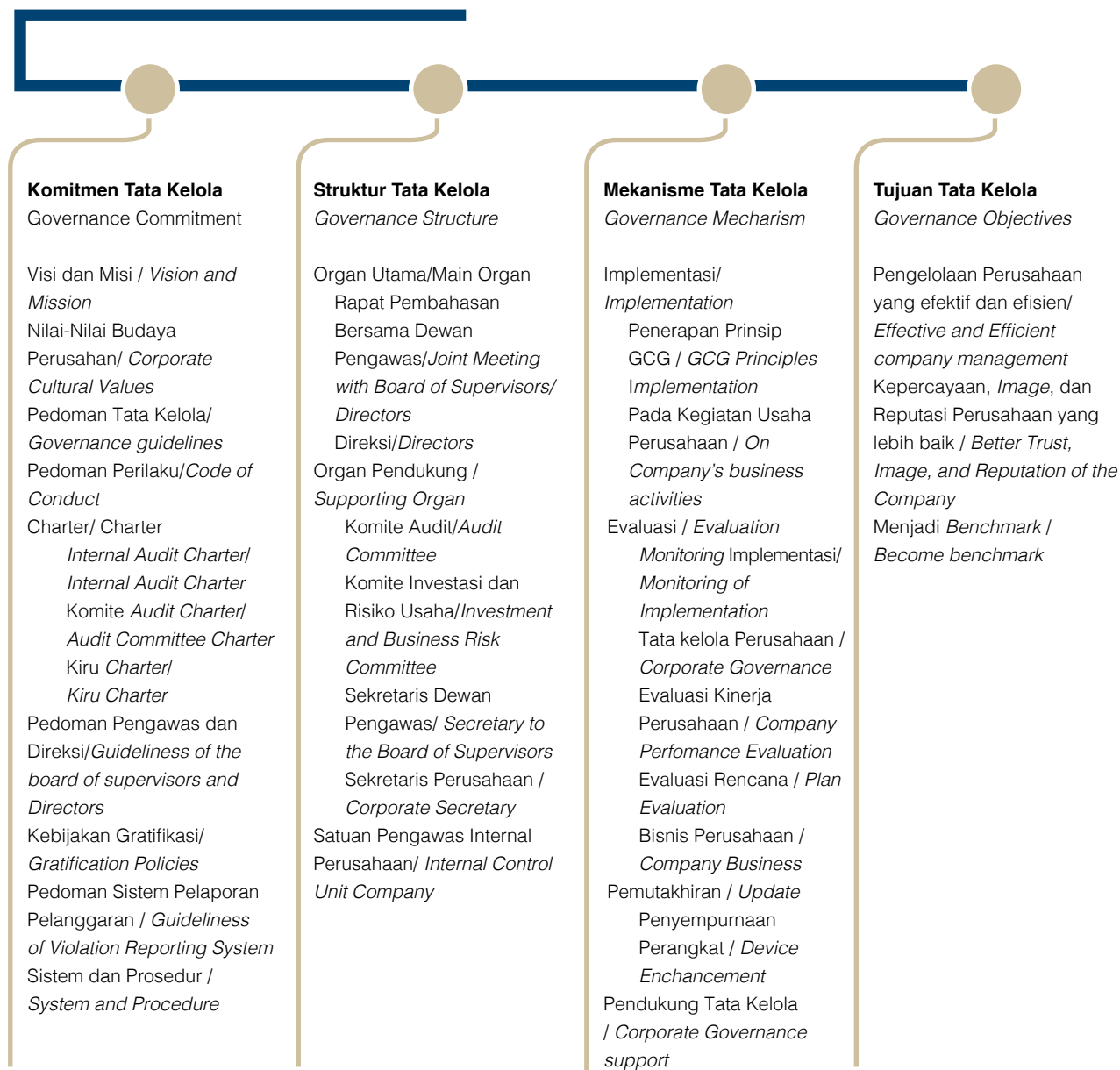
System

In supporting sustainable GCG commitment at Perum Jamkrindo, it is necessary to have an operational system that can work effectively and efficiently through compliance with the applicable laws and regulations, an adequate internal control system and proper risk management, and effective implementation of violation reporting system.

Culture

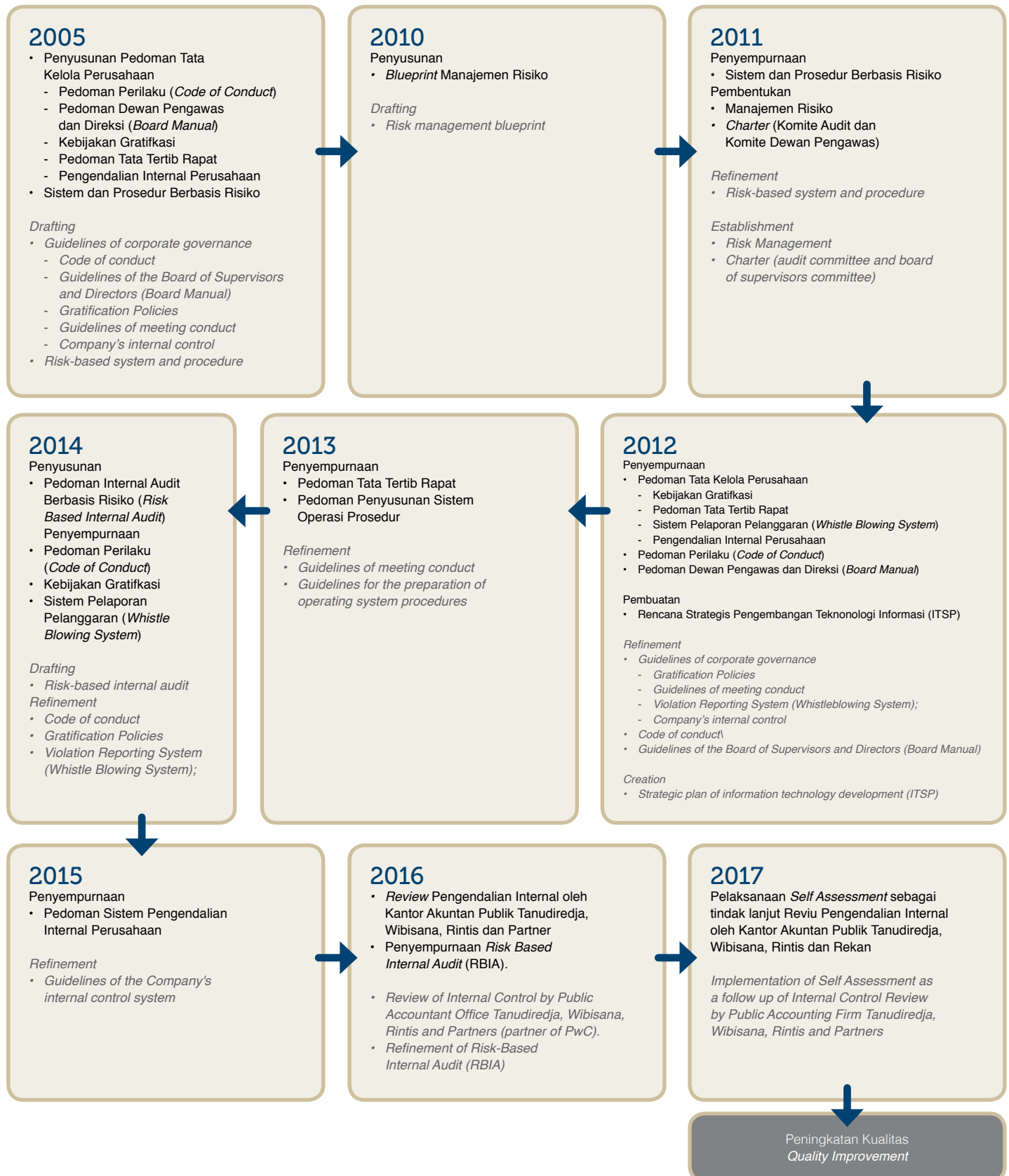
The cultural values of Perum Jamkrindo are the foundation for the Company's employees in working to be clearer and more structured. In order to implement GCG at Perum Jamkrindo, all of the Company's employees are committed to implement corporate culture values that are in line with the GCG principles.

The objective of GCG implementation performed by Perum Jamkrindo is to become a Guarantee Company which provides value to the stakeholders through effective and efficient Company management by creating cultural values so as to increase the level of trust, establish a good Corporate image and reputation, as well as benchmarks for other similar companies as described below:



Rekam Jejak Perkembangan Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik

Track record of Good Corporate Governance development





PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2017

Penerapan praktik GCG terus-menerus ditingkatkan di Perum Jamkrindo, melalui *monitoring* dari SPI dan Divisi MSDM atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan *fraud* di lingkup Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2017, pemantauan atas penerapan praktik GCG pada Perum Jamkrindo, di antaranya:

1. Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan *Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2016 kepada Kementerian BUMN selaku Pemilik Modal, dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jamkrindo melalui Surat No. 2058/P/1/IV/2017 tanggal 5 April 2017.
2. Menyampaikan *Area of Improvement* atas Hasil *Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2016 kepada Dewan Pengawas dan Divisi terkait sebagai tindak lanjut melalui Surat No. 4998/P/1/IX/2017 tanggal 29 September 2017 dan Memorandum No. 293/M/1.2/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
3. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Whistleblowing System* Tahun 2017 kepada Direktur Utama melalui Memorandum No. 02/M/1.2/I/2018 tanggal 02 Januari 2018.
4. Melakukan *Assessment* GCG Perum Jamkrindo Tahun 2017 oleh Tim *Self Assessment* sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan OJK berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) No. 1373/SPT/1/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
5. Dalam rangka penyelesaian tindak lanjut *Area of Improvement* GCG Tahun 2016 dan pelaksanaan *Self Assessment* GCG Tahun 2017 serta sesuai dengan disposisi Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko dan Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan, maka perlu dilakukan pendampingan oleh Tenaga Ahli;
6. Dalam proses pelaksanaan *Self Assessment* GCG Tahun 2017, Tim *Self Assessment* GCG telah mengirimkan memorandum kepada Divisi terkait dan Dewan Pengawas perihal permintaan dokumen GCG. Berdasarkan dokumen tersebut, Tim *Self Assessment* GCG melakukan analisis dan menyusun kertas kerja dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN dan Surat Edaran OJK No. 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT IN 2017

The implementation of GCG practices is continuously improved in Perum Jamkrindo, through monitoring of the Internal Control Unit and HRM Divisions on the implementation of the Code of Conduct (CoC). In the event of any conflict of interest or misuse of office resulting in fraud in the Company, it shall be resolved and acted upon in accordance with applicable regulations. In 2017, the act of monitoring on the implementation of GCG practices at Perum Jamkrindo, includes:

1. Submitting the Report on the Assessment on the Implementation of Good Corporate Governance in 2016 to the Ministry of SOEs as the Owner of the Company's Capital, enclosed with a copy to the Board of Supervisors and Board of Directors of Perum Jamkrindo through Letter No. 2058 / P / 1 / IV / 2017 dated 5 April 2017.
2. Delivering the Area of Improvement on the Results of Good Corporate Governance Assessment in 2016 to the Board of Supervisors and related Divisions as a follow-up through Letter no. 4998 / P / 1 / IX / 2017 dated September 29, 2017 and Memorandum no. 293 / M / 1.2 / IX / 2017 dated September 29, 2017.
3. the 2017 Whistleblowing System Implementation Report to the President Director through Memorandum No. 02 / M / 1.2 / I / 2018 dated January 02, 2018.
4. Conducting the Assessment on GCG Perum Jamkrindo Year 2017 with the assistance of Self Assessment Team in accordance with the Regulation of the Minister of SOE and OJK Regulation based on the Order of Instruction (SPT) No. 1373 / SPT / 1 / IX / 2017 dated September 26, 2017.
5. In the framework of completion of the 2014 GCG Area of Improvement follow-up and implementation of GCG Self Assessment for the year 2017 and in accordance with the disposition of Director of Finance, Investment & Risk Management, and Director of HRM, General Affairs & Compliance, it is necessary to assist the Experts;
6. In the process of implementing GCG Self Assessment in 2017, the GCG Self Assessment Team has sent a memorandum to the relevant Division and the Board of Supervisors regarding the request for GCG documents. Based on the document, the GCG Self Assessment Team analyzes and prepares the working papers based on the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 on Assessment Indicators/Parameters and Evaluation of GCG Implementation on SOEs, and Circular Letter of OJK No. 54 / SEOJK.05 / 2017 dated October 12, 2017

Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

7. Membuat Keputusan Direksi No. 120/Kep-Dir/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan sebagai Direktur yang Bertanggung Jawab dalam Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
8. Menyampaikan Laporan *Self Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perum Jamkrindo Tahun 2017 kepada Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei & Keuangan, Jasa Survei dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 1609/P/1/III/2018 dan 1610/P/1/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.

regarding Good Corporate Governance Report for the Guarantee Institution.

7. Making the Decision of the Board of Directors No. 120/Kep-Dir/XII/2017 dated December 19, 2017, on the appointment of Director of HRM, General Affairs, and Compliance as the Director-In-Charge for the Implementation and Monitoring of Good Corporate Governance of Perum Jamkrindo.
8. Submitting a Self Assessment Report on the Implementation of Good Corporate Governance of Perum Jamkrindo for the year 2017 to the Deputy of Financial Services Business, Survey & Finance Services, Survey Services and Chief Executive Officer of Insurance, Pension Fund, Financing Institution and Other Financial Services Institution of the Financial Services Authority through its letter No. 1609/P/1/III/2018 and 1610/P/1/III/2018 dated March 20, 2018.

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sosialisasi prinsip-prinsip GCG terus dilakukan dengan tujuan agar seluruh Insan Perusahaan memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam lingkungan kerja sehari-hari guna menghindari perilaku menyimpang. Sosialisasi penerapan GCG pada tahun 2017 dilakukan pada 3 (tiga) Kantor Cabang, yaitu Kantor Cabang Palembang pada tanggal 3 Maret 2017, KCK Jakarta tanggal 7 November 2017, dan Kantor Cabang Jakarta tanggal 8 November 2017.



SOCIALIZATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

The socialization of GCG principles continues to be conducted with the objective that all Company's employees understand and can apply the principles of GCG in the daily work environment in order to avoid deviant behavior. The socialization of GCG implementation in 2017 will be conducted in 3 (three) Branch Offices, namely Branch Office of Palembang on March 3, 2017, KCK Jakarta on November 7, 2017, and Jakarta Branch Office dated November 8, 2017.





PENILAIAN: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Assessment Penerapan GCG

Metode Assessment

Sebagai wujud komitmen penerapan prinsip GCG, Perum Jamkrindo melaksanakan *assessment* atau penilaian atas penerapan GCG di lingkup Perusahaan. *Assessment* dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu melalui *self assessment* atau evaluasi yang dilakukan oleh tim internal Perusahaan, dan *assessment* atau penilaian yang dilakukan oleh pihak independen. Tujuan pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perum Jamkrindo, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan pada Perum Jamkrindo.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada Perum Jamkrindo dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan perusahaan.

Hasil *assessment* diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan dan perbaikan penerapan praktik GCG di Perum Jamkrindo. Selanjutnya penerapan praktik GCG tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk *trend* kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), dan citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap Perum Jamkrindo.

Dasar pelaksanaan penilaian/evaluasi atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

ASSESSMENT: EVALUATION, MONITORING, AND IMPROVEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Assessment Method

As a form of commitment to the implementation of GCG principles, Perum Jamkrindo conducts assessment or appraisal of GCG implementation in the Company. Assessment is done in 2 (two) models, which are through self assessment or evaluation conducted by the Company's internal team, and assessment conducted by an independent party. The purposes of conducting assessment on GCG implementation in Perum Jamkrindo refers to the Letter of the Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012, which are as follows:

1. Measuring the quality of the company's GCG implementation through evaluation of GCG criteria fulfillment level with the real condition applied by Perum Jamkrindo, through scoring/ valuing GCG implementation and its application quality category.
2. Identifying the strengths and weaknesses of the company's GCG implementation, and proposing improvement recommendations to reduce the gap between GCG criteria and the application in Perum Jamkrindo.
3. Monitoring the consistency of GCG implementation at Perum Jamkrindo and obtaining inputs for improvement and development of corporate governance policies within the company's environment.

The assessment results are expected to be the basis for improvement and refinement of the implementation of GCG practices in Perum Jamkrindo. Furthermore, the implementation of GCG practice is also expected to provide benefits to encourage the Company's management in a transparent, professional, and efficient manner so as to increase the Company's value in the form of the company's high performance trends, good Corporate image, and trust from the stakeholders (services users, employees, and society as a whole) towards Perum Jamkrindo.

The basis for the assessment/evaluation of GCG implementation in Perum Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises (SOE) as amended by Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 and Letter of the Secretary

Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Assessment Tahun 2016 dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2017

Penilaian dilakukan pada tahun buku 2016 dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG Perusahaan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 65/SPK/4.2/XI/2016 tanggal 1 November 2016.

of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises.

Assessment in 2016 and its Follow-up in 2017

Assessment conducted in the fiscal year 2016 with the objective of providing recommendations on continuous improvement of the Company's GCG implementation. The assessment process is conducted based on the Work Order Letter no. 65 / SPK / 4.2 / XI / 2016 dated November 1, 2016.

Jenis Penilaian <i>Type of Assessment</i>	: Assessment/Penilaian <i>Assessment</i>
Penilai <i>Assessor</i>	: Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali <i>Public Accounting Firm of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, and Ali</i>
Metode Penilaian <i>Assessment Method</i>	: Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 <i>Assessment Indicator/Parameter of GCG Implementation SK16/S.MBU/2012</i>
Tahun Buku Penerapan <i>Implementation Year</i>	: 1 Januari - 31 Desember 2016 <i>1 January - 31 December 2016</i>
Periode Pengukuran <i>Assessment Period</i>	: 7 November 2016 - 3 Januari 2017 <i>7 November 2016 - 3 January 2017</i>

Hasil penilaian penerapan GCG Perum Jamkrindo tahun 2016 mencapai total skor sebesar 92,120 dengan kualifikasi SANGAT BAIK, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The assessment result of Perum Jamkrindo GCG assessment in 2016 achieved a total score of 92.120 with "VERY GOOD" qualification, which can be seen in the following table.

Aspek <i>Aspect</i>		Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Amount</i>	Pencapaian (%) <i>Achievement (%)</i>
1		2	3	(4=3/2 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation</i>	7,000	6,962	99,456
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal <i>Shareholders and RPB/Equity Owners</i>	9,000	8,206	91,180
III	Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>	35,000	32,249	92,139
IV	Direksi <i>Directors</i>	35,000	32,943	94,124
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,000	7,760	86,225
VI	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,000	4,000	80,000
Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>		100,000	92,120	92,120
Peringkat Kualitas Penerapan Gcg <i>Rank of the GCG Implementation Quality</i>		"Sangat Baik" <i>"Very Good"</i>		

Klasifikasi Kualitas Penerapan *Assessment*

Classification of Assessment Implementation Quality

Nilai di atas 85 <i>Score above 85</i>	:	Sangat Baik <i>Very Good</i>
75 < Nilai ≤ 85 <i>75 < Score ≤ 85</i>	:	Baik <i>Good</i>
60 < Nilai ≤ 75 <i>60 < Score ≤ 75</i>	:	Cukup Baik <i>Fair</i>
50 < Nilai ≤ 60 <i>50 < Score ≤ 60</i>	:	Kurang Baik <i>Poor</i>
Nilai ≤ 50 <i>Score ≤ 50</i>	:	Tidak Baik <i>Bad</i>

Area of Improvement atas *assessment* yang telah dilakukan, dan tindak lanjutnya di tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Area of Improvement on the assessment which has been conducted, and its follow-up in 2017 can be seen in the table below.

No.	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 <i>Recommendation from the Assessment of GCG Implementation Year 2016</i>	Tindak Lanjut per 31 Desember 2017 <i>Follow-up as per 31 December 2017</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Types of Follow-up</i>
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation</i> - Nihil - <i>None</i>			
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Equity Owners</i>			
1	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal belum menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari kalangan di luar Perum Jamkrindo dan Pemerintah, sebagai Pengawas Independen. <i>Shareholders and GMS/Equity Owners have not set the members of the Board of Supervisors who come from outside Perum Jamkrindo and the Government, as an Independent Supervisor.</i>	v	2017	Kementrian BUMN selaku Pemilik modal telah mengangkat Dewan Pengawas Independen seperti tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. <i>Ministry of BUMN as the Equity Owner has appointed Independent Board of Supervisors, as stated in Decree of Minister of SOEs, as the Government Representative as Equity Owner of Perum Jamkrindo. This is in SK-88 / MBU / 05/2017 on the Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.</i>

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 <i>Recommendation from the Assessment of GCG Implementation Year 2016</i>	Tindak Lanjut per 31 Desember 2017 <i>Follow-up as per 31 December 2017</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Types of Follow-up</i>
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/Board of Supervisors</i>			
1	Jangka Waktu Persetujuan Dewan Pengawas atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Direksi. <i>Board Manual</i> Dewan Pengawas belum mengatur jangka waktu pemberian tanggapan terhadap rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan oleh Direksi. <i>The Period of Approval of the Board of Supervisors on the draft of Work Plan and Corporate Budget (RKAP) proposed by the Board of Directors. Board Manual of the Board of Supervisors has not regulated the period of response to the Company's Long Term Plan (RJPP) draft and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) proposed by the Directors.</i>	v	2017	Dicarry over ke dalam Laporan <i>Self Assessment</i> GCG Tahun 2017 <i>Carried over in the 2017 GCG Self Assessment Report</i>
2	Dewan Pengawas tidak menetapkan target kinerja dan penilaian kinerja untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas (individu), penilaian kinerja Dewan Pengawas masih dilakukan secara kolegal. <i>Board of Supervisors does not set performance targets and performance assessment for each member of the Board of Supervisors (individual), performance assessment of the Board of Supervisors is still conducted collectively.</i>	v	2017	Carry over ke dalam Laporan <i>Self Assessment</i> GCG Tahun 2017 <i>Carried over in the 2017 GCG Self Assessment Report</i>
IV	Direksi <i>Directors</i>			
1	Tingkat pencapaian kinerja Direksi (KPI) yang telah yang dilaporkan oleh Direksi kepada Pemilik Modal masih berbentuk kolegal, belum terdapat pencapaian kinerja direksi per individu. <i>The performance achievement level of the Directors (KPI) that has been reported by the Directors to the Equity Owners is still in the form of collective, not yet performance of individual Director.</i>	v	2017	Dicarry over ke dalam Laporan <i>Self Assessment</i> GCG Tahun 2017 <i>Carried over in the 2017 GCG Self Assessment Report</i>



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 <i>Recommendation from the Assessment of GCG Implementation Year 2016</i>	Tindak Lanjut per 31 Desember 2017 <i>Follow-up as per 31 December 2017</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Types of Follow-up</i>
2	Perusahaan belum memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk) <i>The company has not had quality policy (product quality control system).</i>	v	2017	Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 34/Per-Dir/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Sistem Manajemen Mutu Perum Jamkrindo <i>Regulation of the Board of Directors of Public Corporation (Perum) of Indonesian Credit Guarantee (Jamkrindo) No. 34 / Per-Dir / XI / 2017 dated November 17, 2017, regarding Policy and Quality Management System Guidelines of Perum Jamkrindo</i>
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Disclosure of Information and Transparency.</i>				
1	Terdapat perbedaan informasi antara <i>Annual Report</i> Tahun 2015 dengan Laporan Assessment GCG Tahun 2015 mengenai susunan anggota Komite Audit. <i>There is a difference of information on the 2015 Annual Report and 2015 GCG Assessment Report on the composition of the Audit Committee members.</i>	v	2017	Laporan tahunan Perusahaan telah memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan Perusahaan mendapatkan juara ke-2 untuk kategori BUMN Keuangan Non Listed dalam ARA 2016 <i>The Company's annual report meets the general requirements of presentation of the Annual Report. This is confirmed by the Company obtaining 2nd place for the category of Non-Listed Finance SOEs in ARA 2016</i>
2	Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai pengelolaan dan pemutakhiran <i>website</i> <i>The company has not had a policy on managing and updating the website.</i>	v	2017	Keputusan Direksi No. 101/Kep-Dir/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Penetapan Situs Web dan Susunan Pengurus Situs Web Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia <i>Board of Directors' Decree No. 101 / Kep-Dir / X / 2017 dated October 9, 2017, on the Establishment of Web Site and Composition of Public Website Management of Public Corporation (Perum) Credit Guarantee Indonesia (Jamkrindo)</i>
VI Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>				
- Nihil - None				

Assessment Tahun 2017

Penilaian juga dilakukan pada tahun buku 2017 dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG Perusahaan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 1373/SPT/1/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

Assessment in 2017

Assessment is also conducted in the fiscal year 2017 with the objective of providing recommendations on continuous improvement of the Company's GCG implementation. The assessment process was conducted based on the Task Working Order No. 1609/P/1/III/2018 and 1610/P/1/III/2018 dated September 26, 2017.

Jenis Penilaian <i>Types of Assessment</i>	: Self Assessment/Evaluasi <i>Self Assessment/Evaluation</i>
Assessor	: Tim Self Assessment Internal Perum Jamkrindo <i>Internal Self Assessment Team of Perum Jamkrindo</i>
Metode Penilaian <i>Assessment Method</i>	: Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S. MBU/2012 <i>Assessment Indicator/Parameter of GCG Implementation SK16/S.MBU/2012</i>
Tahun Buku Penerapan <i>Implementation Year</i>	: 1 Januari - 31 Desember 2017 <i>1 January - 31 December 2017</i>
Periode Pengukuran <i>Assessment Period</i>	: 26 September 2017 - 28 Februari 2018 <i>26 September 2017 - 28 February 2018</i>

Hasil penilaian penerapan GCG Perum Jamkrindo tahun 2017 mencapai total skor sebesar 92,470 dengan kualifikasi SANGAT BAIK, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The assessment result of Perum Jamkrindo GCG assessment in 2017 achieved a total score of 92.470 with "VERY GOOD" qualification, which can be seen in the following table.

Aspek <i>Aspect</i>		Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Amount</i>	Pencapaian (%) <i>Achievement (%)</i>
1		2	3	(4=3/2 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation</i>	7,000	6,924	98,912
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal <i>Shareholders and RPB/Equity Owners</i>	9,000	8,568	95,194
III	Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>	35,000	32,085	91,671
IV	Direksi <i>Directors</i>	35,000	32,426	92,647
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,000	8,468	94,085
VI	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,000	4,000	80,000
Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>		100,000	92,470	92,470
Peringkat Kualitas Penerapan Gcg <i>Rank of the GCG Implementation Quality</i>			"Sangat Baik" <i>"Very Good"</i>	



Klasifikasi Kualitas Penerapan *Assessment*

Classification of Assessment Implementation Quality

Nilai di atas 85 <i>Score above 85</i>	:	Sangat Baik <i>Very Good</i>
75 < Nilai ≤ 85 <i>75 < Score ≤ 85</i>	:	Baik <i>Good</i>
60 < Nilai ≤ 75 <i>60 < Score ≤ 75</i>	:	Cukup Baik <i>Fair</i>
50 < Nilai ≤ 60 <i>50 < Score ≤ 60</i>	:	Kurang Baik <i>Poor</i>
Nilai ≤ 50 <i>Score ≤ 50</i>	:	Tidak Baik <i>Bad</i>

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Perum Jamkrindo dinilai telah memiliki sistem dan infrastruktur yang sangat baik, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki guna mendukung penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa parameter yang perlu diperbaiki diuraikan sebagai berikut:

- Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
Perum Jamkrindo segera melakukan revisi Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) berupa mekanisme pelaporan pelanggaran, penyempurnaan sarana dan prasarana pelaporan dan penunjukan pengelola WBS.
- Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal
Nihil
- Dewan Pengawas
 - Dewan Pengawas sebaiknya melaksanakan program pelatihan/seminar/*workshop* sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas dan membuat laporan atas kegiatan tersebut.
 - Melakukan revisi *Board Manual* dengan menetapkan jangka waktu pemberian tanggapan dari Dewan Pengawas atas rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi.
 - Menyusun target kinerja individual dan melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap kinerja masing-masing Dewan Pengawas serta melaporkannya kepada Pemilik Modal.
 - Dewan Pengawas agar memberikan arahan dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan dengan Direksi mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya untuk meningkatkan kinerja operasional Perusahaan.

Based on the assessment result, Perum Jamkrindo is considered to have a very good system and infrastructure, but there are some areas that still need to be improved in order to support the implementation of Good Corporate Governance principles. Some parameters that need to be improved are described as follows:

- The Aspect of Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation.
Perum Jamkrindo needs to immediately revise the Whistleblowing System Guideline (WBS) in the form of violation reporting mechanism, improvement of facilities and infrastructure of reporting and appointment of WBS manager.
- Shareholders and RPB/Equity Owners
None
- Board of Supervisors
 - The Board of Supervisors should implement a training/seminar/*workshop* program in accordance with the Board's annual work plan and budget, and prepare reports on such activities
 - Revise the Board Manual by stipulating the period of response of the Board of Supervisors regarding the draft of RKAP proposed by the Board of Directors.
 - Set individual performance targets and conduct self-assessment on the performance of each member of the Board of Supervisors and report it to the Equity Owners.
 - Board of Supervisors needs to provide guidance in the Internal Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors on quality policy and services and their implementation to improve the Company's operational performance.

4. Direksi
 - a. Menyusun target kinerja individual dan melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap kinerja masing-masing Direksi serta melaporkannya kepada Dewan Pengawas.
 - b. Segera melakukan finalisasi atas SOP Teknologi Informasi dan Kebijakan Tata Kelola & Manajemen Teknologi Informasi.
 - c. Melakukan sertifikasi standar mutu pelayanan untuk kegiatan bisnis utama dengan menunjuk lembaga yang kompeten dan melakukan audit atas pelaksanaan sistem mutu.
 - d. Segera melakukan finalisasi atas Kebijakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Nihil
6. Aspek Lainnya
Nihil

4. Directors/Board of Directors
 - a. Establish individual performance targets and conduct self-assessment of the performance of each member of the Board of Directors and report them to the Board of Supervisors.
 - b. Conduct immediate finalization of SOP of Information Technology, as well as the Information Technology Governance & Management Policy.
 - c. Certify quality standard of service for main business activity by appointing competent institution and conducting audit on quality system implementation.
 - d. Conduct immediate finalization of Health and Work Safety Policy.
5. Information Disclosure and Transparency
None
6. Other Aspects
None

Perjalanan *Assessment* Perum Jamkrindo

The History of Assessment of Perum Jamkrindo

Sekilas riwayat proses penilaian penerapan GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

Overview of the history of assessment process of the Company's GCG implementation is as follows:

Pengukuran GCG GCG Assessment	Tahun Buku Fiscal Year	Assessor	Skor Score (%)	Kategori Category
<i>Self Assessment</i>	2013	Tim <i>Self Assesment</i> Perum Jamkrindo <i>Self Assessment Team of Perum Jamkrindo</i>	90,080	Sangat Baik <i>Very good</i>
<i>Assessment</i>	2014	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali <i>Public Accountant Office Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali</i>	91,510	Sangat Baik <i>Very good</i>
<i>Self Assessment</i>	2015	Tim <i>Self Assesment</i> Perum Jamkrindo <i>Self Assessment Team of Perum Jamkrindo</i>	91,563	Sangat Baik <i>Very good</i>
<i>Assessment</i>	2016	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali <i>Public Accountant Office Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali</i>	92,120	Sangat Baik <i>Very good</i>
<i>Self Assessment</i>	2017	Tim <i>Self Assesment</i> Perum Jamkrindo <i>Self Assessment Team of Perum Jamkrindo</i>	92,470	Sangat Baik <i>Very good</i>

Hasil *assessment* atas penerapan GCG Perum Jamkrindo periode tahun 2012-2016 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

The assessment result of GCG implementation at Perum Jamkrindo for the period of 2012-2016 can be summarized below:

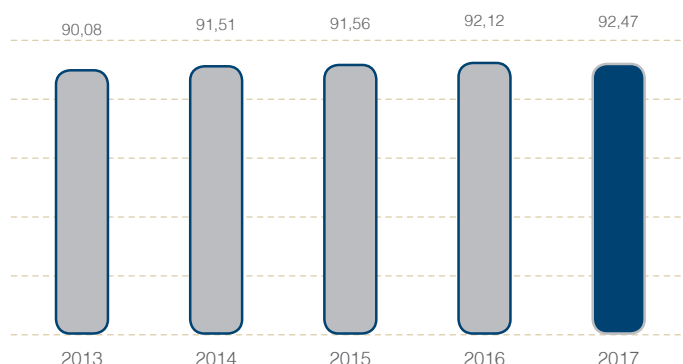
Aspek Pengujian/Indikator/ Parameter <i>Aspect of Testing/ Indicator/ Parameter</i>	Bobot Weight	Capaian Tahun 2013 <i>Achievement 2013</i>		Capaian Tahun 2014 <i>Achievement 2014</i>	
		Skor Score	% Capaian Achievement	Skor Score	% Capaian Achievement
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan <i>Commitment on Sustainable Governance Implementation</i>	7,00	6,36	90,86	6,96	99,35
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Equity Owners</i>	9,00	8,46	94,04	8,12	90,19
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/ Board of Supervisors</i>	35,00	31,31	89,45	31,59	90,26
Direksi <i>Directors</i>	35,00	32,31	92,32	32,93	94,09
Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,89	87,66	7,91	87,9
Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	3,75	75,00	4,00	80,00
Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>	100,00	90,08	90,08	91,51	91,51
Klasifikasi <i>Classification</i>		"Sangat Baik" "Very Good"		Sangat Baik" "Very Good"	

	Capaian Tahun 2015 <i>Achievement 2015</i>		Capaian Tahun 2016 <i>Achievement 2016</i>		Capaian Tahun 2017 <i>Achievement 2017</i>	
	Skor Score	% Capaian Achievement	Skor Score	% Capaian Achievement	Skor Score	% Capaian Achievement
	6,95	99,35	6,96	99,46	6,92	98,91
	8,11	90,07	8,21	91,18	8,57	95,19
	31,61	90,32	32,25	92,14	32,08	91,67
	32,94	94,12	32,94	94,12	32,43	92,65
	7,95	88,32	7,76	86,23	8,47	94,08
	4,00	80,00	4,00	80,00	4,00	80,00
	91,56	91,56	92,12	92,12	92,47	92,47
	Sangat Baik "Very Good"		"Sangat Baik" "Very Good"		Sangat Baik "Very Good"	



Komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip GCG dan melakukan evaluasi terhadap penerapan tersebut ditunjukkan melalui tren peningkatan skor *assessment* GCG. Melalui *assessment*, Perusahaan mendapatkan rekomendasi secara berkala, yang memungkinkan bagi Perusahaan untuk terus melakukan pembenahan baik dari infrastruktur atau perangkat GCG, hingga *softstructure* GCG yang dimiliki. Tren skor *assessment* GCG 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The Company's commitment to apply GCG principles and assess the implementation is demonstrated through the trend of increasing the GCG assessment score. Through the assessment, the Company receives periodic recommendations, enabling the Company to continue improvements from either GCG infrastructure or equipment, to GCG's own soft structure. The latest 5 (five) years GCG assessment score trends are as follows:



KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Metode Penilaian

Dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing BUMN, Kementerian BUMN memutuskan untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja BUMN berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Hal ini dituangkan melalui Surat Kementerian Negara BUMN No.S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN yang telah diperbaharui melalui Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan *Assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN 2016.

Sistem Penilaian pada Evaluasi Kinerja BUMN ini didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN yang mengadopsi dan mengadaptasi "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*". Penyelenggaraan *Malcolm Baldrige National Quality Award* (MBNQA) bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan yang dapat dijadikan *role model* bagi perusahaan lain. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan

ASSESSMENT CRITERIA OF SUPERIOR PERFORMANCE (KPKU)

Assessment Method

In order to improve the capability and competitiveness of SOEs, Ministry of SOE decided to implement SOEs performance management and control system based on Superior Performance Assessment Criteria (KPKU). This is outlined in the State Ministry of SOE Letter No. S-153/S.MBU/2012 dated July 19, 2012 on Performance Reporting Based on Approach Assessment Criteria of Superior Performance (KPKU) of SOE, which has been updated with Secretary of the Ministry of SOE Letter No. S-445/ D7.MBU/10/2016 dated October 14, 2016 on the Implementation of Assessment of Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) of SOE of 2016.

Assessment System for SOE Performance Evaluation is based on the methods outlined in Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) documents as established by the Ministry of SOE that adopt and adapt the "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*". The organization of Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) aims to identify a company that can be a role model for other companies. In addition, the Company also applies the Malcolm Baldrige criteria to strengthen

kriteria *Malcolm Baldrige* untuk menguatkan daya saing melalui upaya:

- Meningkatkan praktik kinerja organisasi, kemampuan dan hasil.
- Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi tentang praktik terbaik di antara perusahaan-perusahaan dari semua jenis industri.
- Menyediakan sebuah alat untuk memahami dan mengelola kinerja perusahaan, juga sebagai alat untuk membimbing perencanaan dan meningkatkan pembelajaran.

Evaluasi kinerja KPKU tersebut didasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian, yaitu “Proses”, dan “Hasil”. Proses penerapan KPKU dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar, yaitu tahap “*Ondesk Review*” yaitu penilaian di atas kertas berbasis pada respon KPKU pada tahun sebelumnya dan informasi pendukung melalui Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI; serta tahapan “*Site Visit*” ke perusahaan untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta *Senior Leader* lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi. Sementara faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level, Trend, Comparison* dan *Integration* (LeTCI).

Kedua dimensi evaluasi, yaitu dimensi “Proses” dan dimensi “Hasil” sangat penting bagi evaluasi dan umpan balik. Berdasarkan kedua tahapan di atas kemudian disusun laporan yang berisi Skor dan Umpan Balik yang berisikan *Opportunity for Improvements* (OFI) dan Kekuatan (*Strengths*) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam melakukan perbaikan, baik proses maupun peningkatan hasil-hasil bisnis.

Hasil skor dan kategorisasi atas penilaian penerapan KPKU adalah sebagai berikut:

competitiveness through efforts of:

- Improving organizational performance practice, capability, and results.
- Facilitate communication and share information on best practices among companies of all types of industries.
- Provide a tool to understand and manage company performance, as well as a tool to guide planning and improving learning.

KPKU performance evaluation is based on 2 (two) assessment dimensions, which are “Process”, and “Result”. The process of applying KPKU is conducted through 2 (two) major stages, which are “On-desk Review” stage, which is on-paper assessment based on KPKU response in previous year and supporting information through Method/System (*Approach*), Deployment, Learning, and Integration (*Integration*) or abbreviated ADLI; as well as the “Site Visit” stage to the company for interviews and clarification of KPKU response to the Directors and other Senior Leaders appointed by the company as well as verification of various data and information. While the factors used to evaluate the Company’s results are Level, Trend, Comparison, and Integration (LeTCI).

The two dimensions of evaluation, the “Process” dimension and the “Results” dimension are very important for evaluation and feedback. Based on the above two stages, a report is prepared containing Score and Feedback containing Opportunity for Improvements (OFI) and Company Strengths which can be used as a basis for improvement, both on process and business outcomes.

The results of the scores and categorization of KPKU implementation assessment are as follows:

Skala Skor Scale of Score	Kategori Categories
876 - 1.000	World Class Leader
776 - 875	Benchmark Leader
676 - 775	Industry Leader
576 - 675	Emerging Industry Leader
476 - 575	Good Performance
376 - 475	Early Improvement
276 - 375	Early Result
0 - 275	Early Development

Penilaian KPKU Tahun Buku 2016 dan Tindak Lanjut di Tahun 2017

Assessment of KPKU Fiscal Year 2016 and Its Follow-up in 2017

Hasil penilaian KPKU tahun 2016 adalah sebagai berikut:

The results of the KPKU assessment in 2016 are as follows:

Kategori Category	Maksimal Skor Maximum Score	Persentase Percentage (%)	Skor Score (nominal)
	(1)	(2)	(3 = 1x2)
Kategori 1: Kepemimpinan <i>Category 1: Leadership</i>			
1.1. Kepemimpinan Senior <i>Senior Leadership</i>	70	60%	42,00
1.2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan <i>Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility</i>	50	55%	27,50
Kategori 2: Perencanaan Strategis <i>Category 2: Strategic Planning</i>			
2.1. Pengembangan Strategi <i>Strategic Development</i>	40	55%	22,00
2.2. Implementasi Strategi <i>Strategy Implementation</i>	45	60%	27,00
Kategori 3: Fokus Pelanggan <i>Category 3: Customer Focus</i>			
3.1. Suara Pelanggan <i>Customer's Feedback</i>	45	60%	27,00
3.2. Keterikatan (<i>Engagement</i>) Pelanggan <i>Customer Engagement</i>	40	55%	22,00
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan <i>Category 4: Assessment, Analysis and Knowledge Management</i>			
4.1. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan <i>Assessment, Analysis and Improvement of Company Performance</i>	45	60%	27,00
4.2. Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi <i>Knowledge Management, Information Management and Information Technology</i>	45	60%	27,00
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja <i>Category 5: Focus on Human Resource</i>			
5.1. Lingkungan Tenaga Kerja <i>Human Resource Environment</i>	40	60%	24,00
5.2. Keterikatan (<i>Engagement</i>) Tenaga Kerja <i>Employee Engagement</i>	45	55%	24,75
Kategori 6: Fokus Operasi <i>Category 6: Focus on Operation</i>			
6.1. Proses Kerja <i>Working process</i>	45	60%	27,00
6.2. Efektivitas Operasional <i>Operational Effectiveness</i>	40	55%	22,00
Kategori 7: Dimensi Hasil <i>Category 7: Results Dimension</i>			
7.1. Hasil/Kinerja Produk dan Proses <i>Product and Processes Result/Performance</i>	110	50%	55,00
7.2. Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan <i>Customer Focus Result/Performance</i>	85	50%	42,50

Kategori Category	Maksimal Skor Maximum Score	Persentase Percentage (%)	Skor Score (nominal)
7.3. Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja <i>Human Resource Focus Results/Performance</i>	85	45%	38,25
7.4. Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola <i>Leadership and Governance Result/Performance</i>	80	45%	36,00
7.5. Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar <i>Financial and Market Result/Performance</i>	90	50%	45,00
Jumlah <i>Total</i>	1.000		536,00
Kategori <i>Category</i>	"Good Performance"		

Berikut disampaikan *Opportunity of Improvement* sebagai hasil penilaian KPKU tahun 2016 yang menjadi rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjut manajemen yang dilakukan di sepanjang tahun 2017.

The following is presented based on Opportunity of Improvement as the outcomes of KPKU assessment in 2016 which serves as a recommendation for improvement and management follow-up conducted in 2017.

No	Rekomendasi KPKU 2016	KPKU Recommendation in 2016
A	Dimensi "Proses" <i>"Process" Dimension</i>	
1	Walaupun JAMKRINDO aktif mendukung & mengelola komunitas utama perusahaan, khususnya yg terkait dengan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL), dengan cara: 1. Penetapan kriteria yang menjadi target Program Kemitraan. 2. Penetapan anggaran untuk kegiatan Program Kemitraan 3. Evaluasi terhadap proposal yang masuk ke unit pengelola PKBL. 4. Penetapan proposal yang dapat disetujui. Namun metode mendukung dan mengelola komunitas utama perusahaan, khususnya yang terkait dengan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terbukti belum efektif hal ini terlihat dari laporan tahunan kinerja PKBL yang mana selama 3 tahun terakhir kinerjanya menunjukkan: * Program kemitraan yaitu (Efektivitas penyaluran & Kolektibilitas pengembalian pinjaman) mengalami penurunan (<i>Adverse</i>) yaitu: • Efektivitas penyaluran tahun 2013 sebanyak 90% dan ditahun 2014 sebesar 60,75% pada tahun 2015 hanya 39,69% • Kolektibilitas pengembalian pinjaman pada tahun 2013 sebesar 90,10%, Tahun 2014 sebesar 86,40% dan menurun menjadi 66,95% ditahun 2015. * Progam bina lingkungan hanya 35% Dati-1 yang dilayani (12 dari 34 Dati) dan hanya 88% dana yang tersalurkan dan tidak terdistribusi merata karena di DKI sampai 283% dari anggaran dan 11 Dati lainnya hanya rata-rata 28% dana tersalurkan. Hal ini akan dapat mempengaruhi upaya perusahaan dalam meningkatkan citra perusahaan (<i>brand image</i>) di lokasi mana kantor wilayah/kantor cabang berada.	Although JAMKRINDO was actively supporting & managing the company's core communities, especially those related to the Partnership & Community Development Program (PCDP), by: 1. Defining the criteria targeted by the Partnership Program, 2. Establishing the budget for Partnership Program activities, 3. Evaluating proposals submitted to the PKBL management unit, 4. Establishing approved proposals, The method of supporting and managing the company's main communities, however, especially those related to the Partnership and Community Development Program (PCDP) has proven to be ineffective. This is proved from the annual report of PKBL's performance which over the past 3 years has shown the followings: * A decrease in the partnership program in terms of its effectiveness of distribution & collectibility of loan repayment (<i>Adverse</i>) Here are the details: • The effectiveness of distribution in 2013 was 90%, in 2014 60.75%, and in 2015 only 39.69% • Loan repayment collectibility in 2013 was 90.10%, in 2014 was 86.40%, in 2015, it went down to 66.95% * In the Community Development Program, only 35% of the Dati-1 was served (12 out of 34 Dati) and only 88% of the funds are distributed. The fund was also not distributed evenly because, in DKI, it was up to 283% of the budget and in 11 others only 28% of the funds are distributed. This will affect the company's efforts in improving the image of the company (<i>brand image</i>) in the location where the regional office/branch office is located.



No	Rekomendasi KPKU 2016	KPKU Recommendation in 2016
2	Walaupun JAMKRINDO telah mengumpulkan dan menganalisa data yang relevan & mengembangkan informasi dalam elemen tantangan & keunggulan strategis dengan cara: 1. Melakukan Analisa SWOT menghasilkan <i>positioning & Rumusan Strategi</i> perusahaan. 2. Merumuskan strategi untuk mencapai sasaran strategis 3. Menyusun program untuk menjawab tantangan dan keunggulan strategis. Proses telah dilaksanakan lebih dari 1 tahun, unit kerja terkait telah melakukan proses sesuai dengan desain sistem yang dipersyaratkan, Sistem/metode secara berkala direview dan ditingkatkan berdasarkan analisa dan fakta. Namun metode tersebut belum sistematis, karena indikator kinerja antara lain pertumbuhan ratio ekuitas dan <i>outstanding</i> kredit pertumbuhan inovasi proses, tingkat pengendalian dana kemitraan, dll yang digunakan untuk menilai efektivitas implementasinya, tanpa indikator tersebut, JAMKRINDO akan mengalami kesulitan untuk menyusun program peningkatan bisnis penjaminan.	<i>Although JAMKRINDO has collected and analyzed relevant data & developed information in elements of challenge & strategic advantage by:</i> 1. <i>Conducting SWOT Analysis resulted in the company's positioning & Strategy Formulation.</i> 2. <i>Formulating strategies to achieve strategic goals</i> 3. <i>Developing programs to address strategic challenges and advantages. The process has been implemented for more than 1 year, the relevant work unit has performed the process in accordance with the required system design, and the system/method is periodically reviewed and improved based on analysis and facts.</i> <i>The method, however, was not systematic, because the performance indicators used to assess the effectiveness of its implementation were the growth of equity ratio and the outstanding credit growth of process innovation, the level of partnership fund control, etc. Without such indicators, JAMKRINDO will have difficulty in preparing the program to increase the guarantee business.</i>
3	Walaupun JAMKRINDO telah menentukan cara mendapatkan umpan balik yang segera dan dapat ditindaklanjuti dari Pelanggan mengenai mutu produk, dukungan pelanggan, dan transaksi sebagai berikut: 1. Menentukan pelanggan yang akan dimintakan umpan balik pada saat dikunjungi. 2. Melakukan pertemuan dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, 3. Memilih umpan balik yang bisa ditindaklanjuti, Namun metode untuk mendapatkan umpan balik dan dukungan pelanggan belum dilakukan <i>review</i> karena sampai saat ini belum ada <i>approach</i> yang terdokumentasi. Proses telah diselaraskan dengan program-program kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang dan menjadi masukan untuk pelaksanaan program di seluruh unit kerja, serta belum ada dokumen yang menunjukkan tindak lanjut dan belum ada <i>evidence</i> menunjukkan metode telah selaras dengan unit kerja.	<i>Although JAMKRINDO has determined the method to obtain immediate and actionable feedback from Customers regarding product quality, customer support and transactions by:</i> 1. <i>Specifying which subscribers to whom feedback will be requested when visited.</i> 2. <i>Conducting meetings and gathering feedback from customers, and</i> 3. <i>Selecting feedback which can be followed up.</i> <i>The method for obtaining feedback and customer support, however, has not been reviewed since there are no documented approaches yet. The process has been aligned with head office, regional offices, and branch offices programs, and provides input for program implementation across all work units. There were also no document showing follow-up and no evidence indicates the method has been aligned with the working unit.</i>

No	Rekomendasi KPKU 2016	KPKU Recommendation in 2016
4	Walaupun JAMKRINDO telah memilih dan memastikan efektivitas pemanfaatan DATA dan INFORMASI PEMBANDING yang penting untuk mendukung operasional, pengambilan keputusan strategis dan melakukan inovasi, dengan cara: - Kompulsi data pembanding yang sama dengan data kinerja perusahaan, - Bandingkan dan analisa terhadap data pesaing, - Buat <i>action plan</i> untuk dapat melampaui pencapaian kinerja pesaing, baik dari pencapaian maupun pertumbuhannya, - Tetapkan <i>action plan</i> yang akan ditindaklanjuti dan berinovasi Namun Perusahaan belum memiliki mekanisme yang sistematis dalam memanfaatkan data pembanding. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan operasional bisnis perusahaan.	<i>Although JAMKRINDO has chosen and ensured the effective use of DATA and COMPARATIVE INFORMATION essential to support operations, strategic decision making and innovation, by:</i> <i>Compiling data comparisons which are similar to company performance data,</i> <i>Comparing and analyzing competitor data,</i> <i>Devising an action plan to exceed the achievement of competitor's performance, either from achievement or growth, and</i> <i>Setting action plan to be followed up and to innovate</i> <i>The Company, however, does not yet have a systematic mechanism for utilizing the comparison data. This can affect the speed and accuracy in making important decisions related to the company's business operations.</i>
5	Walaupun JAMKRINDO telah mengorganisasikan dan mengelola tenaga kerja untuk memperkuat fokus pada pelanggan & bisnis dengan cara Melakukan <i>training need analysis</i> untuk melihat <i>gap</i> kapabilitas tenaga kerja dan tuntutan pekerjaan, Memberikan pelatihan tenaga kerja khususnya untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan (<i>service excellence</i>) dan meningkatkan pengetahuan tentang produk-produk Perusahaan, Mengadakan <i>coffee morning</i> atau hari mutu (setiap Jumat pagi) dan Memberikan pelatihan kepada Karyawan tentang budaya Perusahaan. Sistem telah dilaksanakan terus menerus dan hasilnya digunakan oleh semua unit menutupi <i>gap</i> tenaga kerja untuk mencapai kinerja perusahaan. namun sistem tersebut belum efektif, terbukti pencapaian kinerja unit kerja dan tenaga kerja cenderung menurun, hal ini mempengaruhi daya saing perusahaan dalam meningkatkan kinerja.	<i>JAMKRINDO has organized and managed the workforce to strengthen focus on customer & business by conducting need analysis training to see the gap of labor capability and job demands, providing training of workers especially to improve service to customer (service excellence), and increasing knowledge about Company's products, holding a coffee morning or a day of quality (every Friday morning), and providing training to the employees in relation to the Company's culture. The system has been implemented continuously and the result is used by all units covering the labor gap to achieve the company's performance, however, the system has not been effective. This is proven by the achievement of work unit performance and labor which tends to decrease. This affects the competitiveness of company in improving performance.</i>
6	Walaupun JAMKRINDO telah mengendalikan seluruh biaya operasi atas keseluruhan sistem kerjanya dengan 2 cara: - Melakukan evaluasi antara target dan realisasi - Laporan Realisasi Anggaran disampaikan ke seluruh Kanca - Dimintakan penjelasan atas pelampauan anggaran dengan 25% - Kompilasi realisasi anggaran secara korporat Namun perusahaan belum mengukur efektivitas metode tersebut karena baru diterapkan kurang dari setahun dan hanya oleh Kantor Pusat belum di seluruh unit kerja.	<i>Although JAMKRINDO has controlled all operating costs over the whole system by:</i> <i>Conducting evaluation between target and realization</i> <i>Submitting Budget Realization Report to all Branch Office</i> <i>Requesting an explanation of the 25% over budget</i> <i>Compiling the budget realization in the corporation</i> <i>The company, however, has not measured the effectiveness of the method since it has only been applied for less than a year and only in the Head Office and not in all work units.</i>



No	Rekomendasi KPKU 2016	KPKU Recommendation in 2016
B	Dimensi "Hasil" "Result" Dimension	
7	Walaupun JAMKRINDO telah melakukan pengukuran dan menyampaikan 90,27% Data (167 grafik dari 185 data yang dipersyaratkan) dari kinerja Produk dan Proses Cat 7.1 sampai dengan Kinerja Finansial dan Pasar pada Cat 7.5, namun beberapa data menurun: LEVEL: 1% (1 data) No Level hanya terdiri dari 1 tahun periode data 13% (24 data) kinerja tahun 2015 sama dengan tahun sebelum 29% (53 data) kinerja tahun 2015 menurun dibanding kinerja sebelumnya TREND: 5% (9 data) <i>No Trend</i> karena data kinerja yang disajikan hanya 2 periode 11% (21 data) <i>Adverse</i> yaitu kinerja 3 tahun terakhir menurun 14% (25 data) <i>Unfavorable</i> yaitu kinerja 3 tahun terakhir cenderung turun COMPARISON: 66% (123 data) <i>No Comparison</i> yaitu grafik belum disandingkan dengan pesaing INTEGRATION : 5% (9 data) belum tersajikan pada laporan kinerja 7.1 s/d 7.5 yaitu: • Nilai Efisiensi sebelum dan sesudah inovasi • Kecepatan penerbitan <i>invoice</i> • Capaian waktu simulasi tanggap darurat • Penghargaan atas prestasi tenaga kerja • Sosialisasi <i>Visi-Value</i> kepada Tenaga Kerja & <i>Stakeholder</i> • Indeks pencapaian nilai-nilai organisasi • Komunikasi 2 arah yang dihadiri manajemen senior • % Temuan audit internal yang ditindaklanjuti • % Temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengukuran kinerja operasional bisnis perusahaan yang berkaitan dengan upaya Perusahaan mencapai <i>Visi-Misi</i> Perusahaan dengan menjaga <i>sustainability</i> Perusahaan dan memenuhi harapan dan persyaratan <i>stakeholder</i>.	<i>Although JAMKRINDO has measured and delivered 90.27% of Data (167 charts of 185 required data) of the Product and Process Performance in Cat 7.1 up to Financial and Market Performance in Cat 7.5, the quantity of some data, however, decreases. The followings are the details.</i> LEVEL: <i>1% (1 data) is No Level since it only consists of 1 year data period</i> <i>13% (24 data) performance in 2015 is the same as the previous year</i> <i>29% (53 data) performance in 2015 decreased when compared to previous performance.</i> TREND: <i>5% (9 data) are No Trend because the performance data presented are only for 2 periods</i> <i>11% (21 data) are Adverse because the performance in the last 3 years decreased</i> <i>14% (25 data) are Unfavorable since the performance in the last 3 years tends to fall.</i> COMPARISON: <i>66% (123 data) are No Comparison since the graphics are not juxtaposed with competitors yet.</i> INTEGRATION: <i>5% (9 data) has not been presented in performance reports 7.1 to 7.5. They are:</i> • <i>Value of Efficiency before and after innovation</i> • <i>Speed of invoice publishing</i> • <i>Accurate emergency response time</i> • <i>Award for the achievement of the workforce</i> • <i>Socialization of Vision-Value to Labor & Stakeholders</i> • <i>Index of achievement of organizational values</i> • <i>Two-way communication attended by senior management</i> • <i>% Internal audit findings are acted upon</i> • <i>% External audit findings are acted upon</i> <i>This may affect the effectiveness of the measurement of the company's business operational performance related to the Company's efforts to achieve the Company's Vision-Mission by maintaining the Company's sustainability and meeting the expectations and requirements of stakeholders.</i>

Penilaian KPKU Tahun 2017

Seperti halnya penilaian KPKU tahun 2016, penilaian KPKU untuk tahun 2017 didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen KPKU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Di bawah ini disampaikan hasil penilaian KPKU Perusahaan tahun 2017.

Assessment of KPKU in 2017

As with the 2016 KPKU assessment, the KPKU assessment for 2017 is based on the method described in the KPKU document as established by the SOE Ministry. Below is the submitted result of the assessment of the Company's KPKU in 2017.

Kategori Category	Maksimal Skor Maximum Score	Persentase Percentage (%)	Skor Score (nominal)
	(1)	(2)	(3 = 1x2)
Kategori 1: Kepemimpinan <i>Category 1: Leadership</i>			
1.1. Kepemimpinan Senior <i>Senior Leadership</i>	70	60%	42,00
1.2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan <i>Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility</i>	50	55%	30,00
Kategori 2: Perencanaan Strategis <i>Category 2: Strategic Planning</i>			
2.1. Pengembangan Strategi <i>Strategic Development</i>	40	55%	24,00
2.2. Implementasi Strategi <i>Strategy Implementation</i>	45	60%	27,00
Kategori 3: Fokus Pelanggan <i>Category 3: Customer Focus</i>			
3.1. Suara Pelanggan <i>Customer's Feedback</i>	45	60%	24,75
3.2. Keterikatan (<i>Engagement</i>) Pelanggan <i>Customer Engagement</i>	40	55%	20,00
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan <i>Category 4: Assessment, Analysis and Knowledge Management</i>			
4.1. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan <i>Assessment, Analysis and Improvement of Company Performance</i>	45	60%	27,00
4.2. Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi <i>Knowledge Management, Information Management and Information Technology</i>	45	60%	24,75
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja <i>Category 5: Focus on Human Resource</i>			
5.1. Lingkungan Tenaga Kerja <i>Human Resource Environment</i>	40	60%	24,00
5.2. Keterikatan (<i>Engagement</i>) Tenaga Kerja <i>Employee Engagement</i>	45	55%	27,00
Kategori 6: Fokus Operasi <i>Category 6: Focus on Operation</i>			
6.1. Proses Kerja <i>Work process</i>	45	60%	24,75
6.2. Efektivitas Operasional <i>Operational Effectiveness</i>	40	55%	20,00
Kategori 7: Dimensi Hasil <i>Category 7: Results Dimension</i>			
7.1. Hasil/Kinerja Produk dan Proses <i>Product and Processes Result/Performance</i>	110	50%	55,00
7.2. Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan <i>Customer Focus Result/Performance</i>	85	50%	45,00
7.3. Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja <i>Human Resource Focus Results/Performance</i>	85	45%	48,00



Kategori Category	Maksimal Skor Maximum Score	Persentase Percentage (%)	Skor Score (nominal)
	(1)	(2)	(3 = 1x2)
7.4. Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola <i>Leadership and Governance Result/Performance</i>	80	45%	40,00
7.5. Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar <i>Financial and Market Result/Performance</i>	90	50%	54,00
Jumlah <i>Total</i>	1.000		557,25
Kategori Category	"Good Performance"		

Opportunity of improvement dari hasil penilaian KPKU tahun 2017 yang menjadi rekomendasi perbaikan adalah sebagai berikut:

Opportunity of improvement from the results of the KPKU assessment in 2017 which became the recommendation for improvement are as follows:

No	Opportunity of improvement
Dimensi "PROSES" "Process" Dimension	
1.	Walaupun, Pimpinan senior Jamkrindo telah menetapkan cara dalam mengejawantahkan visi dan tata nilai perusahaan dalam sistem kepemimpinannya, kepada semua pekerja, pemasok utama dan mitra kerja, juga kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya yang sesuai, dengan garis besar tahapan: - Identifikasi pemangku kepentingan melalui data yang dimiliki. - Menetapkan anggaran - Menetapkan <i>stakeholders</i> yang akan menjadi objek sosialisasi/internalisasi VMT - Membuat jadwal sosialisasi - Pelaksanaan - Evaluasi setelah pelaksanaan dan evaluasi pada penyusunan RKAP Sosialisasi yang telah dilakukan: - kepada pegawai melalui berbagai kesempatan, di antaranya distribusi <i>tools</i> Budaya TRUST sesuai surat nomor 208/P/4.1/2017 dan <i>morning briefing</i> yang diatur melalui surat edaran no. 49/SE/3/9/2017, dengan agenda doa, ikrar visi & misi, <i>empowering session</i>, Ikrar budaya dan yel-yel. - Kepada pelanggan, Pelatihan Analis Kredit Standard di BNI, 2017 (dalam 4 kali kesempatan); - Kepada Komunitas, Pelatihan Jaminan Kredit, dengan peserta para wartawan yang bertugas meliput pemberitaan ekonomi, Februari 2017 - UMKM dan Koperasi, bersamaan dengan Pelatihan/Sosialisasi Jaminan Kredit, 2017 Namun pelaksanaannya belum konsisten, terbukti Jamkrindo belum memiliki program sosialisasi VMN TRUST kepada tenaga kerja alihdaya dan <i>vendor</i>. Kondisi seperti ini dapat menghambat pencapaian visi dan pembangunan Nilai-nilai TRUST.

No	Opportunity of improvement
	Senior leaders of Jamkrindo have established ways to embody the company's vision and values in its leadership system, to all workers, key suppliers and partners, as well as to other appropriate customers and stakeholders, with an outline of the phases as follow: - Identifying stakeholders through the data they possess. - Setting a budget - Establishing stakeholders who will be the object of VMT socialization/internalization - Creating a socialization schedule - Carrying on with the Implementation - Conducting evaluation after implementation and evaluation on RKAP preparation Socialization which has been done: - to employees through various opportunities, such as the distribution of TRUST Culture tools according to letter number 208 / P / 4.1 / 2017 and morning briefing arranged by circular no. 49 / SE / 3/9/2017, with prayer agenda, vision & mission pledge, empowering session, Cultural pledge and yells. - To customers, Standard Credit Analyst Training at BNI, 2017 (in 4 occasions); - To the Community, Credit Guarantee Advisory, with participants of journalists in charge of covering the economic news, February 2017. - To SMEs and cooperatives, together with Training / Socialization of Credit Guarantee, 2017 - The implementation, however, has not been consistent, it is proven that Jamkrindo does not have VMN TRUST socialization program to outsourced workers and vendors. Conditions like these can hamper the achievement of the vision and development of TRUST Values.
2.	Walaupun JAMKRINDO telah mengumpulkan dan menganalisa data yang menyangkut faktor ketidaktahuan atau terbatasnya jangkauan penglihatan (<i>potential blind spot</i>), berdasarkan pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo No 25 dan 28 Tahun 2017, dalam proses perencanaan strategi dan dalam memperoleh informasi yang penting bagi perusahaan sebagai bagian dari perencanaan strategis dengan cara : Memperdalam Analisa SWOT melalui FGD (<i>Focus group Discussion</i>) dalam sebuah <i>workshop</i> tanggal 20 Juli 2016 dengan peserta seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Divisi, Kanwil dan Kanca guna mendapat masukan yang telah tercantum dalam draft RJPP, sebelum dilakukan perumusan keuntungan strategis dan tantangan strategis, Namun cara tersebut tidak efektif, terbukti belum mampu mengidentifikasi risiko <i>potential blind spot</i> tersebut seperti terlihat dalam profil <i>risk</i> 2015-2016 dan 2017 masih terdapat risiko di luar ambang batas toleransi sebanyak 19 (zona <i>orange</i>/tinggi) dan 1 risiko (zona merah/ekstrem). Dengan demikian berpotensi mengganggu <i>sustainability</i> perusahaan JAMKRINDO has collected and analyzed data pertaining to factors of ignorance or limited potential blind spots, based on Perum Jamkrindo Risk Management Policy guidelines No. 25 and 28 of 2017, in the strategic planning process and in obtaining information that is important to the company as part of strategic planning by: Expanding the depth of the SWOT Analysis through Focus Group Discussion (FGD) in a workshop on July 20, 2016, with participants from all work units at Head Office, Division, Regional Office, and Branch Office, in order to get inputs listed in the RJPP draft prior to the formulation of profit strategic and strategic challenges. However, they are proven to be ineffective, and this is seen from its inability to identify the potential risk blind spot as seen in risk profile 2015, 2016 and 2017 in which there are still 19 risks beyond the tolerance threshold (in the orange/high zone) and 1 risk (in the red zone/extreme) which could potentially disrupt the sustainability of the company



No	Opportunity of improvement
3.	Walaupun JAMKRINDO, memastikan telah menentukan persyaratan yang terpenting untuk memberikan dukungan kepada pelanggan dengan cara pendekatan melalui: - Melakukan kunjungan ke pelanggan. - Analisa persyaratan dan harapan pelanggan - Melakukan komunikasi dan melakukan <i>deal marketing</i>. - Menampung informasi / umpan balik pelanggan sebagai dukungan perbaikan terhadap produk & service. - Tata cara kunjungan pelanggan dibedakan berdasarkan <i>segment</i> pelanggan maupun pasar. Namun (a). Pelaksanaan belum konsisten terbukti dalam tahapan analisa persyaratan dan harapan pelanggan khususnya Non KUR tidak ada bukti melakukan analisa atau pemetaan terhadap tahapan pengalaman pelanggan atau “<i>Mapping Customer Experience Journey</i>” pada setiap tahapan <i>Touchpoint</i> atau yang berpotensi menjadi pengalaman pelanggan, (b). Pelaksanaannya belum efektif, terbukti pencapaian kinerja yang tidak lebih baik dari target atau dari tahun sebelumnya terkait grafik nomor 7.2.a.(2).2.2 <i>Customer Acquisition - Non KUR</i>; grafik nomor 7.2.a.(2).5.3 <i>Customer Engagement Segmen Non KUR</i>; grafik nomor 7.2.a.(1).4 Jumlah Keluhan / Komplain pelanggan; grafik nomor 7.2.a.(1).4.1 Jumlah Keluhan / Komplain pelanggan Prosedur Pembayaran Klaim. Sehingga JAMKRINDO mengalami kesulitan untuk memberikan dukungan pelanggan secara efektif untuk mencapai pengelolaan fokus pelanggan baik saat ini maupun ke depan. <i>JAMKRINDO has ensured that it has determined the most important requirements to provide support to customers by:</i> <i>Making a visit to the customer.</i> <i>Analyzing customer requirements and expectations</i> <i>Communicating and conducting deal marketing.</i> <i>Accommodating customer information/feedback to support product & service improvements.</i> <i>Differentiating the ways and means of customer visits by customer or market segment.</i> <i>However, in (a). the implementation, they have not been consistently proven in the stages of the analysis of customer requirements and expectations, especially in Non KUR segments as there is no evidence of an analysis or mapping of the stage of customer experience, or often known as "Mapping Customer Experience Journey", at each stage of Touchpoint or at what could potentially be a customer experience, and (b). The implementation has been ineffective. This is seen from the achievement of performance that is not better than target or from the previous year as seen in graph 7.2.a. (2) .2.2 on Customer Acquisition - Non-KUR; and graph number 7.2.a. (2) .5.3 on Customer Engagement of Non-KUR Segment; and graph number 7.2.a. (1) .4 on Number of Complaints / Complaints; graph number 7.2.a. (1) .4.1 Number of Customer's Complaints regarding Claims Payment Procedure. Therefore, JAMKRINDO has difficulty providing effective customer support to achieve a management focus of both current and future customers.</i>
4.	Walaupun JAMKRINDO telah memiliki cara dalam mentransfer pengetahuan yang relevan dari dan kepada pelanggan, pemasok, mitra kerja dan kolaborator, yang dilakukan melalui tahapan : (a) Melakukan <i>up load</i> data dan informasi ke dalam web perusahaan; (b) Menginformasikan kepada pelanggan, pemasok, mitra dan kolaborator melalui media cetak dan elektronik setiap kali mencantumkan alamat perusahaan; dan melakukan <i>up date</i> data setiap bulan. Dalam pelaksanaannya didapatkan fakta, bahwa : Terlibat dalam konsultasi manajemen tentang akses pasar ekspor Malaysia yang mengundang peserta dari UMKM, Asosiasi Pengusaha Makanan & minuman dan Induk Koperasi Kreasi Wanita, dengan salah satu nara sumber dari Jamkrindo. Sosialisasi juga dilakukan ke kampus-kampus. Namun, pelaksanaannya tidak konsisten terbukti tidak ada program/dokumen yang terkait dengan aktivitas transfer pengetahuan dari dan ke pemasok. Kondisi demikian berpotensi mengganggu kegiatan operasional. <i>JAMKRINDO already has a way of transferring relevant knowledge to and from customers, suppliers, partners, and collaborators, through the following stages: (a) Uploading data and information into the company web; (b) Informing customers, suppliers, partners and collaborators through print and electronic media each time they include a company address; and updating the data every month.</i> <i>In addition, in reality, it was found that Jamkrindo was involved in management consultancy on export market access to Malaysia with participants from SMEs, Association of Food & Beverage Entrepreneurs, and Parent Association of Kreasi Wanita Cooperative, with socialization, is also done to the campuses.</i> <i>Its implementation, however, is inconsistent as there are no programs/documents related to knowledge transfer activities from and to suppliers. Such conditions have the potential to disrupt operational activities.</i>

No	Opportunity of improvement
5.	Walaupun JAMKRINDO telah menilai kebutuhan akan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja, termasuk tingkat keterampilan, kompetensi dan tingkat pengawakannya dengan cara; 1. Mengidentifikasi RJPP dan RKAP tentang kebutuhan akan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja yang mendukung tercapainya rencana strategis perusahaan, 2. Melakukan penyusunan standarisasi kebutuhan staf dan pejabat pada masing-masing unit kerja 3. Melakukan penyusunan direktori kompetensi dimana terdokumentasi seluruh jenis keterampilan serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan sesuai bidang tugasnya. Model kompetensi tersebut dibangun berdasarkan kajian organisasi dan SDM Perusahaan dengan landasan utama yaitu : visi, misi, rencana strategik organisasi, struktur organisasi, <i>job description</i>, budaya organisasi dan nilai-nilai SDM, 4. Mengukur kesesuaian pemenuhan pengisian staf dan jabatan pada masing-masing unit kerja melalui analisis beban kerja 5. Mengukur kesenjangan kompetensi antara tuntutan kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki individu yang duduk atau akan duduk pada jabatan tersebut melalui asesmen 6. Melakukan mutasi jika: (a) Hasil analisa beban kerja suatu unit kerja menunjukkan antara beban pekerjaan lebih sedikit dibanding tingkat pengawakannya, (b) Hasil asesmen menunjukkan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan 7. Promosi sesuai dengan kebutuhan dan hasil asesmen dan abk
	JAMKRINDO telah melakukan <i>assessment</i> terhadap pegawai dan melakukan pemenuhan kebutuhan pengisian staf dan jabatan pada unit kerja juga kesenjangan atas kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan organisasi dan unit kerja. Namun sistem ini belum efektif, terbukti tidak bisa dijadikan acuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan unit kerja karena, mengacu kepada grafik nomor 7.3.a.(1).1. Pengisian Posisi Pekerjaan (%) menunjukkan pemenuhan tidak mencapai 100% dalam tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut dapat mengakibatkan layanan dan operasional akan terganggu sehingga kepuasan pelanggan menurun
	<i>JAMKRINDO has assessed the need for capability and manpower capacity, including the level of skills, competence and level of consciousness by;</i> 1. <i>Identifying RJPP and RKAP in relation to the need for manpower capability and capacity which support the achievement of the company's strategic plan,</i> 2. <i>Making a standard for the staff and officials' needs in each work unit</i> 3. <i>Drafting a directory of competencies in which all types of skills and competencies required to perform the work according to their field of duty are documented. The competency model is built on organizational and human resources studies with the main foundations: vision, mission, organizational strategic plan, organizational structure, job description, organizational culture and human resource values,</i> 4. <i>Measuring the suitability of the fulfillment of staffing and occupation in each work unit through workload analysis</i> 5. <i>Measuring the competency gap between the competency demands of the position and the competency of the individual who is sitting or will sit in the position through the assessment</i> 6. <i>Conducting a mutation if: (a) The result of the workload analysis of a work unit indicates that there is less workload than the manpower, and (b) The result of the assessment shows the mismatch between the competency possessed and the required job competence</i> 7. <i>Giving promotion in accordance with the needs and results of assessment and workload analysis</i>
	<i>JAMKRINDO has also conducted assessments of employees and fulfilling the need for staffing and job positions in the work unit as well as gaps in capacity and capabilities required by the organization and work unit. However, this system has not been effective. It is proven to be useless to be used as a reference in fulfilling the needs of the work unit because, as can be referred to the chart number 7.3.a. (1) .1. on Fulfillment of Job Position (%), it shows that the fulfillment could not reach 100% in three consecutive years. This may result in service and operations being disrupted resulting in reduced customer satisfaction</i>



No	Opportunity of improvement

6. Walaupun JAMKRINDO melakukan pengukuran kinerja proses yang berkorelasi/berujung pada dicapainya kualitas produk dan kinerja perusahaan dengan cara:
1. Memonitor hasil tindak lanjut atas kinerja yang belum mencapai target;
 2. Melakukan koordinasi antar Divisi, Cabang dan Unit Kerja untuk pencapaian kinerja perusahaan;
 3. Melakukan perhitungan Penilaian Kinerja perusahaan setiap triwulan dan tahunan.
 4. Memberikan insentif kepada Karyawan dan Unit Kerja dengan Peringkat AA, A dan BB;
 5. Memberikan sanksi kepada Karyawan dan Unit Kerja dengan kualifikasi penilaian "Tidak Produktif". Sesuai dengan Peraturan Direksi Perum Jamkrindo nomor: 34/Per-Dir/IX/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Kinerja Perusahaan dan Unit Kerja dalam Rangka Pemberian Insentif kepada Karyawan dan Unit Kerja.

Namun, *deployment*nya tidak konsisten. Terbukti pada permohonan Klaim nomor B-414-KCXV/AMU/09/2016 diterima tanggal 2-Nov-2016, Berita Acara Klaim tanggal 2-Sept-2016 (BRI terjamin). Persetujuan tanggal 23 Oktober dan Pembayaran tanggal 31 Oktober. Kelengkapan Dokumen belum ada tanggal, yang menyebabkan SLAnya tidak dapat diukur. Hal ini dapat menyebabkan JAMKRINDO kesulitan dalam mencapai Misi Perusahaan yaitu Dharma Kedua: Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas

JAMKRINDO has assessed process performance which correlates/leads to the achievement of product quality and company performance by:

1. Monitoring the results of follow-up on performance that has not reached the target;
2. Making coordination between Divisions, Branches and Work Units for the achievement of company performance;
3. Calculating the Company's Performance Assessment every quarterly and yearly;
4. Providing incentives to Employees and Work Units with AA, A, and BB Ratings;
5. Giving sanctions to Employees and Work Unit with "Not Productive" scoring qualifications in accordance with Regulation of the Board of Directors Perum Jamkrindo number: 34 / Per-Dir / IX / 2014 regarding Provisions and Procedures for Assessment of Company Performance and Work Unit in the Framework of Incentives to Employees and Work Unit.

However, its deployment is inconsistent. This is seen in the claim request number B-414-KCXV / AMU / 09/2016 received on 2 November 2016, Minutes of Claim dated September 2, 2016 (guaranteed BRI). In the approval dated October 23 and Payment of 31 October, it has not been dated yet, causing its SLA not measurable. This can cause JAMKRINDO difficulties in achieving the Company's Mission Second Dharma which is to provide wider and more qualified services.

Dimensi "HASIL" "Result" Dimension

7. Walaupun JAMKRINDO telah melaporkan 247 (91.8%) dari 269 Indikator yang harus dilaporkan.

Namun terdapat sebanyak:

- 52 (19.3%) data level kinerjanya memburuk (*poor*) dibandingkan tahun sebelumnya.
- 57 (21.2%) data memiliki kecenderungan memburuk selama tiga tahun terakhir, terdiri dari 20 (35.1%) indikator *Unfavourable*, 9 (15.8%) *Advers* dan 28 (49%) *No Trend*
- 32 (11.9%) *lagging* terhadap pembandingan, 126 (46.8%) tidak disertai pembandingan,
- 60 (22.3%) data tidak ada proyeksinya, 22 (8.2%) kekurangan data
- 22 (8.2%) tidak ada segmentasi.

JAMKRINDO has reported 247 (91.8%) of 269 Indicators to be reported. There are, however:

- 52 (19.3%) data performance of which level has deteriorated (*poor*) when compared to previous year,
- 57 (21.2%) of data had a worsening trend over the past three years, consisting of 20 (35.1%) *Unfavorable* indicators, 9 (15.8%) *Adverse* and 28 (49%) *No Trend*,
- 32 (11.9%) *lagging* against comparison, and 126 (46.8%) not accompanied by comparison,
- 60 (22.3%) data had no projection, and 22 (8.2%) lack of data, and
- 22 (8.2%) no segmentation.

Perkembangan Penerapan KPKU di Lingkup Perum Jamkrindo

Melalui penerapan KPKU, Perusahaan memiliki perangkat untuk dapat melakukan evaluasi yang meliputi “Proses” dan “Hasil”, dimana kedua faktor ini mempengaruhi seluruh aspek baik kinerja maupun penerapan GCG yang berlandaskan kepatuhan. Tren skor *assessment* GCG periode 2013-2017 adalah sebagai berikut:

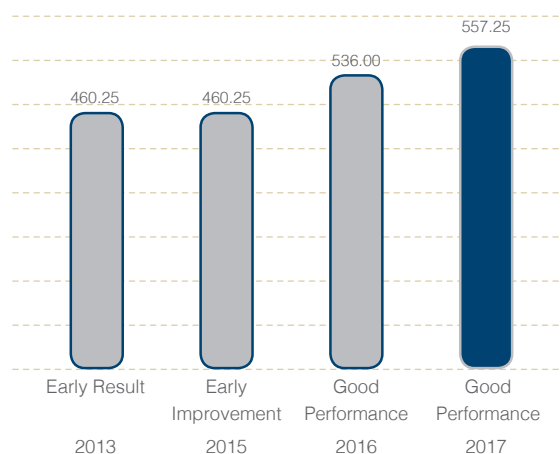
Development of KPKU Implementation in Perum Jamkrindo

Through the implementation of the KPKU, the Company has the tools to conduct evaluations which include “Process” and “Outcome”, in which these two factors affect all aspects of both GCG performance and compliance-based implementation. The GCG assessment score for the 2013-2017 period is as follows:

Perkembangan Skor Penerapan KPKU 2013-2017

Development of KPKU Implementation Score 2013-2017

Perkembangan Skor Penerapan KPKU 2013-2017
Development of KPKU Implementation Score 2013-2017



Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

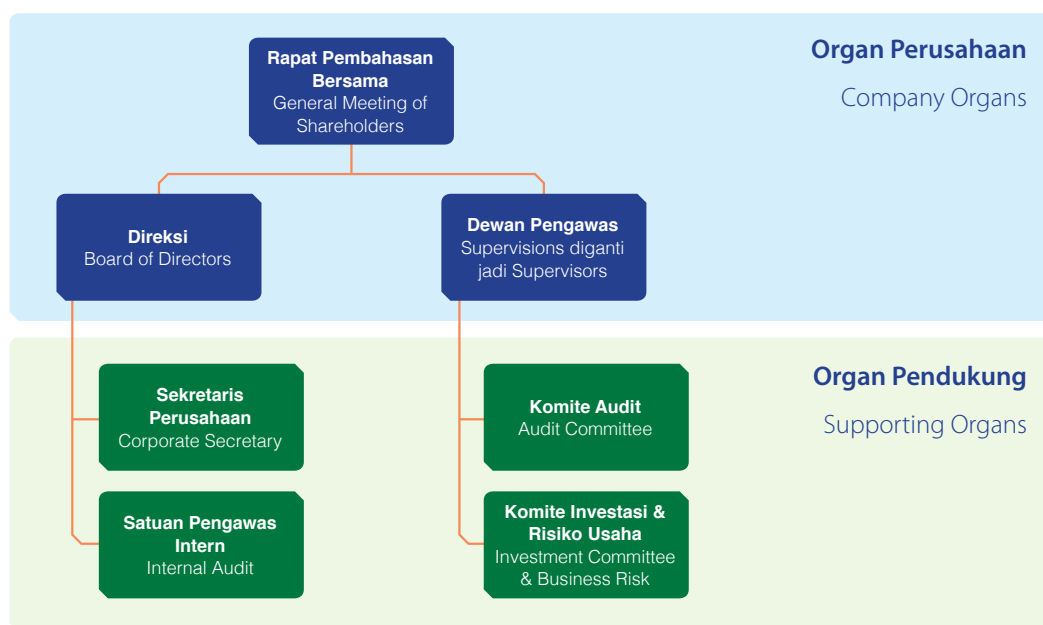
Corporate Governance Organization Structure

MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

RELATIONSHIP MECHANISM AMONG THE CORPORATE GOVERNANCE ORGANS

Struktur Organ GCG Perum Jamkrindo

Organ Structure of GCG Perum Jamkrindo



Dalam forum Rapat Pembahasan Bersama (RPB), para Pemilik Modal dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RPB didasarkan pada kepentingan Perusahaan. RPB atau Pemilik Modal tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RPB untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kedudukan yang setara, para Pemilik Modal akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Setelah keputusan diambil, maka RPB kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Pengawas dan Direksi. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

In the General Meeting of Shareholders (RPB) forum, the Equity Owner can make important decisions related to the investments invested in the Company. The decisions made in RPB are based on the Company's interests. RPB or Equity Owner can not intervene the duties, functions, and authorities of the Board of Supervisors and Directors yet not reducing RPB authority to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and Laws and Regulations. With equal standing, the Equity Owner shall carefully consider its decisions for the sake of the Company's longterm interests. After a decision is taken, RPB shall then submit all authorities of the supervision and execution to implement the decision to the Board of Supervisors and Directors. This is in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RPB tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Pengawas kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perusahaan serta keputusan RPB tersebut dilaksanakan secara optimal dan dicapai maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut.

The Company's management and implementation of any RPB decisions will be conducted by the Directors. The Board of Supervisors then exercises supervision and advises to ensure that the Company's objectives and RPB decisions are optimally implemented and achieved to the fullest or maximum. With such huge duties and responsibilities in maintaining the continuity of the Company, the Board of Supervisors is assisted by Supporting Committees while the Directors are assisted by work units associated with the governance mechanism.

PEMILIK MODAL DAN RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA

Pemilik Modal dan Informasi Terkait Entitas Induk Akhir

Perum Jamkrindo merupakan entitas usaha dengan status hukum Perusahaan Umum (Perum), di mana Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemilik modalnya. Kebijakan kepemilikan modal dalam Perusahaan dilakukan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN menjadi pemilik tunggal sekaligus entitas induk akhir dari Perum Jamkrindo.

EQUITY OWNER AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Equity Owner and Information Related to Ultimate Parent Entity

Perum Jamkrindo is a business entity with the legal status of Public Corporation (Perum), where the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia becomes the equity owner. The Company's equity ownership policy is carried out through the mechanism of State Equity Participation (PMN). Thus, the State of the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/Ministry of SOE becomes the sole owner as well as the ultimate parent entity of Perum Jamkrindo

Komposisi Kepemilikan Perum Jamkrindo

Composition of Perum Jamkrindo Owners



Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan mekanisme pengambilan keputusan strategis oleh pemilik modal. Melalui RPB, pemilik modal memiliki wewenang dan hak untuk melakukan berbagai keputusan atas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Wewenang Rapat Pembahasan Bersama

Kewenangan RPB dalam hal ini adalah Menteri Negara BUMN atau Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya;
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah;
4. Menetapkan jumlah anggota Direksi Perusahaan dan jumlah anggota Dewan Pengawas;
5. Pengesahan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
6. Pengesahan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
7. Memberikan Persetujuan Rancangan perubahan RKAP yang telah disahkan, apabila terdapat perubahan;
8. Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan;
9. Pengesahan atas auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, dan melakukan pengesahan atas laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dimaksud;
10. Menetapkan alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan, termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan;
11. Menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas;
12. Melakukan penilaian (evaluasi) kinerja Direksi dan Dewan Pengawas.

Hasil Keputusan RPB Tahun 2016 dan Realisasinya oleh Manajemen di Tahun 2017

Di tahun 2016, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RPB, yaitu tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 26 Mei 2016. Berikut disampaikan hasil RPB dan tindak lanjutnya oleh manajemen di sepanjang tahun 2017.

General Meeting of Shareholders (RPB) is a strategic decision-making mechanism by the equity owners. Through RPB, the equity owner has the authority and right to make various decisions on the Company as described below.

Authorities of Joint Discussion Meeting

RPB authorities, in this case is the State Minister of SOE or a Minister appointed and/or authorized to represent the Government as the equity owner of the Company, by taking into account the provisions of the Laws and Regulations, are:

1. To add State Capital Participation derived from reserve capitalization and other sources;
2. To approve the amendment of the Company's Articles of Association;
3. To appoint and dismiss members of the Directors, Board of Supervisors, and Sharia Supervisory Board;
4. To determine the number of members of the Company's Directors and the number of members of the Board of Supervisors;
5. To ratify the Company's Long Term Plan (RJPP);
6. To ratify Work Plan and Corporate Budget (RKAP) draft;
7. To approve draft of amendment plan of RKAP that has been validated, if there is any change;
8. To ratify the Company's Annual Report;
9. To approve the external auditor appointed to conduct the examination, and to approve the report of the examination result of external auditor;
10. To determine the allocation of the Company's net profit, including the amount of allowance for reserves;
11. To determine the remuneration of the Directors and Board of Supervisors;
12. To assess the performance (evaluation) of the Directors and Board of Supervisors.

RPB Resolution of 2016 and the Implementation by the Management in 2017

In 2016, the Company held 2 (two) RPBs, which is dated January 8, 2016 and May 26, 2016. Following is the submitted the results of RPB and its follow-up by management throughout 2017.

Rapat Pembahasan Bersama Tahun 2016

Joint Discussion Meeting 2016

No	Hasil Keputusan RPB 8 Januari 2016 RPB Resolution of January 8, 2016
1	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 dengan pokok-pokok sebagai berikut: - Laporan posisi keuangan konsolidasi Perum Jamkrindo per 31 Desember 2016 diproyeksikan ditutup dengan jumlah aset dan liabilitas beserta ekuitas masing-masing sebesar Rp12.625.064 - Laporan laba/rugi komprehensif konsolidasi dengan laba setelah pajak konsolidasi kegiatan penjaminan eksisting (non KUR) dan KUR Perum Jamkrindo Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp762.965 juta. - Rencana belanja modal tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp188.634 juta - Jumlah SDM 1.450 orang dengan rincian 830 pegawai tetap dan 620 pegawai kontrak. - Target tingkat kesehatan tahun 2016 sesuai perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/2014 - Gaji direksi dan honorarium Dewan Pengawas serta fasilitas yang diberikan tahun 2016 untuk sementara ditetapkan sama dengan tahun 2015 <i>Ratifying the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 2016 with the following principles:</i> <i>Perum Jamkrindo's consolidated financial position report as of 31 December 2016 was projected to close with total assets and liabilities and equity each amounting to IDR12,625,064</i> <i>Consolidated comprehensive profit/loss report with consolidated profit after tax of the existing guarantee activity (non-KUR) and KUR of Perum Jamkrindo of 2016 was targeted at IDR762,965 million.</i> <i>Plan for capital expenditure of 2016 was budgeted at IDR188,634 million</i> <i>Total HR is 1,450 people with details of 830 permanent employees and 620 contract employees.</i> <i>Sound level target of 2016 according to calculation based on Minister of SOE Regulation No. PER-10/MBU/2014</i> <i>Directors' salary and honorarium of the Board of Supervisors as well as facilities granted in 2016 are temporarily set equal to those of 2015.</i>
2	Mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2016 <i>Ratifying RKA of Partnership and Community Development Program of 2016</i>
3	Menyetujui dan mengesahkan KPI yang tertuang dalam kontrak manajemen tahun 2016 antara Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dengan Pemilik Modal Perum Jamkrindo yang telah mengacu pada surat Menteri BUMN No. S-485/MBU/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang penyampaian aspirasi pemegang saham/pemilik modal untuk penyusunan RKAP Tahun 2016 <i>Approving and ratifying KPI as stipulated in management contract in 2016 between the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo and Equity Owner of Perum Jamkrindo, which has referred to SOE Minister's Letter No. S-485/MBU/08/2015 dated 27 August 2015 on Submission of Aspiration of Shareholders/Equity Owner to prepare RKAP of 2016</i>
4	Menyetujui dan mengesahkan KPI Tahun 2016 antara Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dengan Pemilik Modal Perum Jamkrindo yang telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN <i>Approving and ratifying the KPI of Year 2016 between Perum Jamkrindo's Board of Supervisors with Perum Jamkrindo's Equity Owner which has referred to Minister of SOE Regulation No. PER 01/MBU/2011 in conjunction with PER 09/MBU/2012 on Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance on SOE.</i>



No	Hasil Keputusan RPB 8 Januari 2016 <i>RPB Resolution of January 8, 2016</i>
5	Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 Direksi dan Dewan Pengawas diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Pengawas dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) tahun 2016 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Pembahasan Bersama (RAB) menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2016 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Pengawas. - Meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan dari bisnis Non-KUR dengan memperkuat sinergi bisnis internal, <i>customer engagement</i> dan layanan berbasis TI. - Membuat kajian terkait rencana perusahaan untuk melakukan penambahan modal pada perusahaan <i>asset</i> manajemen dan penyertaan langsung pada Perusahaan Penjaminan Kredit (Jamkrida) dan Perusahaan Pembiayaan, serta menyampaikan hasil kajiannya kepada Pemilik Modal untuk mendapatkan persetujuan. - Menyelesaikan permasalahan tagihan klaim KPR pada Bank BTN yang terkait dengan program pemerintah untuk penyediaan sejuta rumah. - Tantiem yang dianggarkan dalam RKAP 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku, merupakan besaran maksimal yang dapat dibebankan dan realisasi pelaksanaannya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2016 yang diputuskan dalam RUPS Tahunan - Dalam rangka pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Direksi diminta untuk mengikuti arahan dalam risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL tahun 2016 Perum Jamkrindo No. RIS-12/D7.MBU.4/12/2015 tanggal 30 November 2015 <i>In implementing the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 2016, the Directors and Board of Supervisors are requested to consider the following matters:</i> <i>Books of RKAP, RKA-PKBL, RKA Board of Supervisors, and KPI (Key Performance Indicators) of 2016, which have been approved and ratified by the Joint Discussion Meeting (RPB), serve as guidelines for the Directors in implementing work program and performance targets in 2016 as well as monitoring and supervision channel for the Board of Supervisors.</i> <i>Increasing the company's income contribution from Non-KUR business by strengthening internal business synergy, customer engagement, and IT-based service.</i> <i>Making a study of the company's plan to add capital to the company's asset management and direct participation to Credit Guarantee Company (Jamkrida) and Financing Company, and submit the study results to Equity Owner to obtain approval.</i> <i>Resolving mortgage claim issue to Bank BTN related to the government program of the provision of a million homes.</i> <i>Tantiem budgeted in 2016 RKAP is in accordance with the applicable Minister of SOE Regulation and shall be the maximum amount to be charged and the realization of its implementation is based on the performance target achievement of 2016 determined in Annual GMS.</i> <i>In order to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL), the Directors are required to follow the guidance in the minutes of Work Plan Discussion Meeting and Budget of PKBL of 2016 of Perum Jamkrindo No. RIS-12/D7.MBU.4/12/2015 dated 30 November 2015</i>
6	Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Pengawas dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2016 sebagaimana disampaikan melalui surat No. S-26/DP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 <i>The Directors shall observe and follow-up the suggestions and recommendations of the Board of Supervisors in the implementation of the 2016 RKAP as conveyed by letter No. S 26/DP/XII/2015 dated 15 December 2015</i>

No	Hasil Keputusan RPB 26 Mei 2016 RPB Resolution of May 26, 2016
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2015 termasuk penyajian kembali (<i>restatement</i>) Tahun Buku 2014 dan 2013, persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Tahun 2015 serta pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan perusahaan dan Dewan Pengawas atas tindakan pengawasan perusahaan selama tahun buku 2015. Menyetujui Laporan tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk penyajian kembali (<i>restatement</i>) Tahun Buku 2013 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace & Karunawan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material. Sebagaimana Laporan Auditor Independen No. 004/LAI/JMK/HGK.HT-2016 tanggal 2 Februari 2016. <i>Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for fiscal year 2015, including restatement of Fiscal Year 2014 and 2013, approval of the Monitoring Duties Report of the Board of Supervisors in 2015 and ratification of the Annual Report on the Implementation of Partnership Program and Community Development for 2015 fiscal year including granting release and discharge the full responsibility (volledig acquit et decharge) to the Directors for the actions of the company's management and the Board of Supervisors on the company's monitoring actions during 2015 fiscal year.</i> <i>Approved the Company's Annual Report including Monitoring Duties Report which had been conducted by the Board of Supervisors for the Fiscal Year ended 31 December 2015, and ratified the Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2015 included the restatement of Fiscal Year 2013 and 2014, which were audited by KAP Hertanto, Grace & Karunawan with Fair opinion in all material respects. As per Independent Auditor's Report Number: 004/LAI/JMK/HGK.HT-2016 dated 2 February 2016.</i>
2	Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2015 sebesar Rp625.354.338.229,00 sebagai berikut: a. Dividen sebesar 50,00% atau Rp312.677.169.114,50 b. Cadangan sebesar 50,00% atau Rp312.677.169.114,50 <i>Established the use of consolidated net profit attributable to equity owner of the parent entity of 2015 Fiscal Year amounting to IDR625,354,338,229.00 as follows:</i> <i>a. Dividend of 50.00% or equal to IDR312,677,169,114.50</i> <i>b. Reserve of 50.00% or equal to IDR312,677,169,114.50</i>
3	Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas. Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun 2016 serta Tantiem Tahun Buku 2015 untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan ditetapkan kemudian secara tersendiri. <i>Determined the Remuneration of the Directors and Board of Supervisors. The determination of the salary/honorarium including the facilities and other allowances in 2016 and Tantiem of 2015 Fiscal Year for members of Directors and Board of Supervisors of the Company shall be determined separately.</i>
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016. a. Menetapkan kembali KAP Hertanto, Grace, Karunawan sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. b. Memberikan kuasa pada kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta biayanya dalam hal KAP Hertanto, Grace dan Karunawan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. <i>Determined the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program for 2016 Fiscal Year.</i> <i>a. Reappointed KAP Hertanto, Grace, Karunawan as the external auditors to audit the Company's Financial Statements and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year ending on 31 December 2016.</i> <i>b. Granted power to the Board of Supervisors to determine the substitute Public Accounting Firm and its charges in the case of KAP Hertanto, Grace and Karunawan for any reason was unable to complete the audit of the Company's Financial Statements and the Financial Report of the Implementation of the Company's Partnership and Community Development Program (PKBL) for the Fiscal Year ending on 31 December 2016.</i>



Penyelenggaraan RPB Tahun 2017

Di tahun 2017, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RPB, yaitu tanggal 25 Januari dan 9 Mei 2017. Berikut disampaikan hasil keputusan RPB dan realisasi tindak lanjutnya oleh manajemen.

General Meeting of Shareholders (RPB) in 2017

In 2017, the Company held 2 (two) RPBs, namely on January 25 and May 9, 2017. The following are submitted by RPB resolution and the realization of the follow-up by management.

No	Hasil Keputusan RPB 25 Januari 2017 RPB Resolution of January 25, 2017
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 <i>Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 2017</i>
2	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) 2017 <i>Ratification of Work Plan and Budgeting of Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) 2017</i>
3	Menyetujui dan mengesahkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2017 antara Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dengan Pemilik Modal Perum Jamkrindo, yang telah mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan surat Menteri BUMN No. S-513/MBU/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 <i>Approval and ratification of the Key Performance Indicators (KPI) as stipulated in the Management Contract of 2017 between the Board of Directors and the Perum Jamkrindo Board of Supervisors with Perum Jamkrindo Capital Owners, which has been referred to the Assessment Criteria of Superior Performance (KPKU) and the letter of the Minister of SOEs number S-513 / MBU / 08/2016 dated 30 August 2016 on Submission of Aspirations of Shareholders / Capital Owners for the Drafting of Corporate Work Plan and Budget of 2017</i>
4	Menyetujui dan mengesahkan KPI Tahun 2017 antara Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dengan Pemilik Modal Perum Jamkrindo yang telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada BUMN. <i>Approval and ratification of 2017 KPI between Perum Jamkrindo Board of Supervisors with Perum Jamkrindo Capital Owner which has referred to Minister of SOE Regulation number PER-01 / MBU / 2011 jo. PER-09 / MBU / 2012 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.</i>

No	Hasil Keputusan RPB 25 Januari 2017 <i>RPB Resolution of January 25, 2017</i>
5	Dalam melaksanakan RKAP serta RKA PKBL Tahun 2017, Direksi dan Dewan Pengawas diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Pengawas dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) Dewan Pengawas tahun 2017 yang telah disetujui dan disahkan RPB menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2017 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Pengawas. - Melakukan sinergi antar BUMN sebagai upaya mengoptimalkan potensi bisnis yang lebih baik yang mampu memberikan tingkat kualitas layanan dan efisien dengan harga yang lebih kompetitif serta dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip saling menguntungkan. - Meningkatkan kinerja perusahaan dalam layanan jasa dan produk dengan mengedepankan sinergi kemitraan dengan didukung implementasi sistem TI yang terintegrasi dan selaras dengan model bisnis serta didukung peningkatan kualitas kompetensi SDM. - Meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan dari bisnis Non-KUR dengan memperkuat sinergi bisnis internal melalui pengembangan produk dan layanan bisnis, <i>customer engagement</i> dan layanan berbasis TI. - Meningkatkan pengelolaan pendapatan <i>subrogasi</i> secara optimal untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dengan didukung Sistem Teknologi Informasi terintegrasi dan SDM yang kompeten untuk menghasilkan data yang cepat, akurat, <i>up to date</i> dan dapat dipertanggungjawabkan. - Tantiem yang dianggarkan dalam RKAP 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, merupakan besaran maksimal yang dapat dibebankan dan realisasinya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2017 yang diputuskan dalam RPB Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan. - Dalam rangka program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang PKBL. - Terhadap pelaksanaan RKA PKBL Tahun 2017, RUPS dapat menyetujui RKA PKBL Tahun 2017 berdasarkan penetapan final hasil telaahan antara unit Keasdepan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Perum Jamkrindo. - Direksi agar melaporkan pelaksanaan penggunaan dana penyertaan modal negara kepada Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 jo. No. PER-11/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015. - Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK RI yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2016 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2017. - Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Pengawas dalam pelaksanaan RKAP 2017 sebagaimana disampaikan melalui surat No. S-22/DP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.



No	Hasil Keputusan RPB 25 Januari 2017 RPB Resolution of January 25, 2017
	<i>In implementing the RKAP and RKA PKBL of 2017, the Board of Directors and Board of Supervisors are required to consider the following matters:</i> <i>The RKAP, RKA-PKBL, RKA of the Board of Supervisors, and 2017 KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Supervisors which has been approved and ratified by the RPB to serve as guidelines for the Board of Directors in implementing the work program and performance targets in 2017 as well as becoming the monitoring and overseeing facilities for the Board of Supervisors.</i> <i>Conducting synergy among SOEs as an effort to optimize the potential of better business which will be able to provide an efficient level of service quality with a more competitive price with its implementation still put forward the principle of mutual benefit.</i> <i>Improve the company's performance in services and products by prioritizing partnership synergy which is in line with the Company's business model and supported by an integrated IT system and quality improvement of human resource competence.</i> <i>Increase the company's revenue contribution from Non-KUR business by strengthening internal business synergy through the development of business products and services, customer engagement and IT-based services.</i> <i>Optimize the management of subrogation income to support the company's operational activities with the support of Integrated Information Technology System and competent human resources to produce fast, accurate, up to date data which can be accounted for.</i> <i>The tantiem budgeted in RKAP 2017, which is in accordance with the Regulation of the Minister of SOE concerning the Guidelines for the Stipulation of Remuneration for Directors, Board of Commissioners and Board of Supervisors of SOE, is the maximum amount which can be charged. The realization is based on the achievement of the 2017 performance targets determined in a Joint Discussion Meeting on Annual Financial Reporting.</i> <i>In the framework of SOE's partnership program with small business and community development (PKBL), it is necessary to note the following matters:</i> <i>Submit periodic reports in a timely manner within the time limits specified in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises. PER-08 / MBU / 2013 dated September 10, 2013, as already amended the latest by Regulation of the Minister of SOEs no. PER-03 / MBU / 12/2016 regarding PKBL.</i> <i>In relation to the implementation of RKA PKBL 2017, the GMS may approve the RKA PKBL of 2017 based on the final results of the review of the unit of Social and Environmental Responsibility Unit with Perum Jamkrindo.</i> <i>The Board of Directors must report on the implementation of the use of State Equity Participation funds to the Shareholders in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs no. PER-08 / MBU / 06/2015 jo. No. PER-11 / MBU / 09/2015 dated September 28, 2015.</i> <i>The Board of Directors must consider the findings and recommendations of BPK RI which cannot be completed until 2016 and make it a target for completion in 2017.</i> <i>The Board of Directors must observe and follow-up on the recommendations and advice of the Board of Supervisors in the implementation of the 2017 RKAP as stated in the letter number S-22 / DP / XII / 2016 dated December 19, 2016.</i>

No	Hasil Keputusan RPB 9 Mei 2017 RPB Resolution of May 9, 2017
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2016 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Tahun 2016 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquitet decharge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Pengawas atas Tindakan Pengawasan Perusahaan selama Tahun Buku 2016. <i>Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year 2016, approval of the Monitoring Duties Report of the Board of Supervisors in 2015 and ratification of the Annual Report on the Implementation of Partnership Program and Community Development for 2016 fiscal year including granting release and discharge the full responsibility (volledig acquit et decharge) to the Directors for the actions of the company's management and the Board of Supervisors on the company's monitoring actions during 2016 fiscal year.</i> 1.a. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2016 dan Laporan Kegiatan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas serta mengesahkan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2016 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace dan Karunawan <i>1.a. Approved the Annual Report and ratified the Consolidated Financial Statements of the Fiscal Year 2016 and the Company Activity Report and Monitoring Duties Report of the Board of Supervisors and ratified the 2016 PKBL Financial Statements which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Hertanto, Grace, and Karunawan</i>

No	Hasil Keputusan RPB 9 Mei 2017 RPB Resolution of May 9, 2017
	1.b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan anggota Dewan Pengawas atas tindakan pengawasan Perusahaan selama tahun 2016, dengan ketentuan: sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku dan tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. <i>1.b. Granting release and discharge the full responsibility (volledig acquit et decharge) to the Directors for the actions of the company's management and the Board of Supervisors on the company's monitoring actions during 2016 fiscal year provided that: to the extent, such act is not a criminal offense or does not violate applicable legal provisions/procedures and such actions are recorded and reported in the 2016 Annual and Financial Report.</i>
2	Penetapan penggunaan laba bersih perusahaan untuk tahun buku 2016. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2016 sebesar Rp692.044.895.364 sebagai berikut: a. Dividen sebesar Rp48.000.000.000 atau 6,94%. b. Cadangan sebesar Rp644.044.895.364 atau 93,06%. c. Dividen sebesar Rp48.000.000.000 tersebut agar segera disetor ke kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat persetujuan ini. <i>Established the use of the Company's net profit for the fiscal year 2016. Approved the established use of consolidated net profit attributable to equity owner of the parent entity of 2016 Fiscal Year amounting to IDR692,044,895,364 as follows:</i> <i>a. Dividend of IDR48,000,000,000 or equal to 6.94%</i> <i>b. Reserve of IDR644,044,895,364 or equal to 93.06%</i> <i>c. The dividends amounting to IDR48,000,000,000 are to be deposited into the state treasury no later than 1 (one) month after the date of this letter of consent.</i>
3	Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas. Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun 2017 serta tantiem Tahun Buku 2016 untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo akan ditetapkan secara tersendiri. <i>Determined the Remuneration of the Directors and Board of Supervisors. The determination of the salary/honorarium including the facilities and other allowances in 2017. The tantiem of 2016 Fiscal Year for members of Board of Directors and Board of Supervisors of the Company shall be determined separately.</i>
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017. a. Menetapkan kembali KAP Hertanto, Grace dan Karunawan sebagai auditor untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. b. Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP yang ditetapkan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. <i>Determined the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program for 2017 Fiscal Year.</i> <i>a. Reappointed KAP Hertanto, Grace, Karunawan as the external auditors to audit the Company's Financial Statements and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year ending on 31 December 2017.</i> <i>b. Granted power to the Board of Supervisors, under applicable terms and regulations, to determine the substitute Public Accounting Firm and its charges in the case of KAP Hertanto, Grace and Karunawan for any reason was unable to complete its duties for any reason.</i>
5	Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Direksi. <i>Some aspects which need to be considered by the Board of Directors.</i> 5.1. Sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan ke depan dengan memperhatikan pencapaian kinerja tahun buku 2016, Direksi diminta untuk: <i>5.1. As an effort to improve company performance in the future by paying attention the performance of the fiscal year 2016, the Board of Directors is required to:</i>



No	Hasil Keputusan RPB 9 Mei 2017 RPB Resolution of May 9, 2017
	a. Meningkatkan efisiensi beban usaha yang berasal dari beban SDM, beban operasional, dan beban administrasi kantor dan umum yang meningkat cukup besar pada tahun 2016 melalui pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan perusahaan dengan berorientasi pada efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan. <i>Improving the efficiency of operating expenses arising from HR expenses, operating expenses, and office and general office expenses which increased substantially in 2016 through appropriate policy making in the management of companies with cost-efficiency and revenue-generating orientation.</i>
	b. Mengoptimalkan pendapatan <i>subrogasi</i> dengan meningkatkan koordinasi kantor cabang dengan perbankan dalam mendukung efektivitas aplikasi operasional IT penyelesaian klaim dan <i>subrogasi</i> yang telah dibangun perusahaan. <i>Optimizing subrogation income by improving the coordination of branch offices with banks in support of the effectiveness of the IT operational application of claims settlement and subrogation which has been built by the company.</i>
	c. Melakukan evaluasi struktur organisasi agar lebih efektif dan efisien menuju organisasi berkinerja tinggi yang berfokus pada pencapaian target kinerja perusahaan dan rencana pengembangan bisnis ke depan. <i>Evaluate organizational structure to make it more effective and efficient toward high performing organizations focusing on achieving company performance targets and future business development plans.</i>
	d. Melakukan evaluasi <i>cost and benefit</i> terhadap pencapaian kinerja kantor cabang, sehingga diharapkan dapat diperoleh jumlah kantor cabang yang ideal sesuai potensi dan volume bisnis dari daerah kantor cabang untuk berkontribusi positif pada perusahaan. <i>Conduct a cost and benefit assessment towards the achievement of branch office performance, so it is expected to get the ideal number of branch office according to the potential and business volume of regional branch office to contribute positively to the company.</i>
	e. Memperbaiki secara komprehensif <i>collection period</i> atas piutang perusahaan dengan memperbaiki proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan baik di kantor cabang maupun kantor pusat. <i>Comprehensively fixed the collection period on corporate receivables by improving the planning process, management, control, and supervision in both the branch office and the head office.</i>
	f. Meningkatkan kinerja sistem IT baik untuk KUR maupun Non KUR serta manajemen SDM yang terintegrasi dengan baik antara kantor pusat dan kantor cabang dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan. <i>Improving the performance of IT systems for both KUR and Non KUR as well as integrated human resources management between headquarters and branch offices in support of improved corporate performance.</i>
	g. Kebijakan akuntansi perusahaan terutama yang berkaitan dengan pencatatan pendapatan UP harus berpedoman pada standar akuntansi Otoritas Jasa Keuangan/OJK dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. <i>The accounting policies of company which are primarily related to the recording of revenues must referred to the accounting standards of the Financial Services Authority/OJK and generally accepted accounting principles.</i>
	h. Memperkuat peran dan fungsi <i>risk management</i> dalam kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan untuk mendapatkan manfaat penempatan dana investasi yang berkualitas, dan dalam pelaksanaannya agar memperhatikan likuiditas perusahaan, regulasi yang berlaku serta mengedepankan prinsip kehati-hatian (<i>prudent</i>). <i>Strengthen the role and function of risk management in the company's financial management policy to obtain the benefits of the placement of quality investment funds. In the implementation, considers corporate liquidity, applicable regulations and promote prudent principles.</i>
	i. Direksi agar tetap konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko serta terus menyempurnakan pelaksanaannya di seluruh bisnis perusahaan dan memastikan setiap pelaksanaan kegiatan bebas dari praktik gratifikasi, <i>fraud</i>, dan KKN. <i>The Board of Directors must consistently implement GCG principles and risk management and continue to refine its implementation throughout the company's business and ensure that every activity is free from the practice of gratuities, fraud, and corruption.</i>

No	Hasil Keputusan RPB 9 Mei 2017 <i>RPB Resolution of May 9, 2017</i>
	5.2. Direksi diminta untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas pada tahun 2017 atas temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak berulang kembali. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor dimaksud agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Pengawas dan disampaikan secara tertulis kepada Pemilik Modal.
	<i>5.2. The Board of Directors is requested to immediately follow up on the findings and suggestions of external auditors (BPK RI and/or KAP) as well as internal auditors (SPI) of 2016 and previous years, and complete it in 2017 so that in the future the same problem does not recur. The follow-up to the completion of the auditor's findings/suggestions is to be comprehensively discussed with the Board of Supervisors and submitted in writing to the Equity Owners.</i>
	5.3. Penetapan pemberian jasa produksi kepada para pegawai oleh Direksi dan Dewan Pengawas sebagai upaya pemberian motivasi dan peningkatan kinerja harus didasarkan atas tolok ukur pencapaian RKAP. <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) dan <i>merit system</i> yang jumlah maksimumnya sebesar yang telah dianggarkan, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan-perundangan yang berlaku.
	<i>5.3. The establishment of production service provision to the employees by the Board of Directors and Board of Supervisors which serves as an effort to provide motivation and performance improvement must be based on the benchmark of achievement of RKAP. In its implementation, Key Performance Indicators (KPI) and merit system with maximum amount of budgeted amount are still taking into account the prevailing provisions and regulations.</i>
	5.4. Mempertimbangkan tidak adanya alokasi tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Program KUR, Direksi diminta meningkatkan daya saing bisnis Non-KUR melalui peningkatan kualitas dan layanan produk penjaminan yang pemasarannya bersinergi dengan perbankan.
	<i>5.4. Considering the absence of an additional allocation of State Equity Participation (PMN) of the KUR Program, the Board of Directors is required to increase the competitiveness of Non-KUR business through the improvement of quality and service of guarantee products whose marketing is in synergy with the banking system.</i>
	5.5. Direksi diminta agar melaporkan secara tepat waktu atas perkembangan realisasi penggunaan dana PMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas beserta peraturan perubahannya No. PER-11/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015.
	<i>5.5. The Board of Directors is requested to report in a timely manner the development of the realization of the use of PMN funds as stipulated in Regulation of the Minister of SOE number PER-08 / MBU / 06/2015 dated June 3, 2015 regarding Reporting Guidelines on the Realization of the Additional Use of State Equity Participation Funds to SOE and Limited Liability Companies and their amendments to Regulation No. PER-11 / MBU / 09/2015 dated September 28, 2015.</i>
	5.6. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Direksi diminta menindaklanjuti arahan Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2016 No. RIS-150/D7.MBU.3/04/2017 tanggal 9 Maret 2017.
	<i>5.6. In the implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL), the Board of Directors is required to follow up on the guidance of the Ministry of SOE as stated in the 2016 Annual Report of Partnership and Community Development Program No. 2016. RIS-150 / D7.MBU.3 / 04/2017 dated March 9, 2017.</i>
	5.7. Direksi diminta untuk memperhatikan dan menindaklanjuti arahan Pemilik Modal dan saran-saran dari Dewan Pengawas.
	<i>5.7. The Board of Directors is required to observe and follow up on the Capital Owner's directives and suggestions from the Board of Supervisors.</i>

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas dibentuk oleh pemilik modal untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan

BOARD OF SUPERVISORS

The Board of Supervisors is established by the equity owner to monitor the management of the company conducted by the Directors. The legal basis for the appointment of the Board of Supervisors is regulated in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOE) No. PER-02/MBU/02/2015 on the Requirements and Procedures for



Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/ XII/2012/ KEP-07/DP-JAMKRINDO/XII/2012 yang secara garis besar mengatur tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perum Jamkrindo. Serta melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No.89/Kep-Dir/XII/2012/KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 yang secara garis besar menjelaskan tentang Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 88/ Kep-Dir/XII/2012/KER-05/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perum Jamkrindo.

Guideline and Code of Conduct of the Board of Supervisors

Guidelines and code of conduct of the Board of Supervisors are stipulated through Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/ XII/2012/KEP-07/ DP-JAMKRINDO/XII/2012 which outlines the Code of Conduct of Perum Jamkrindo and through the Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/ XII/2012/KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 which outlines the Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 88/Kep-Dir/XII/2012/KER-05/DP-JAMKRINDO/ XII/2012 n Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance of Perum Jamkrindo.

Kriteria Dewan Pengawas

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 persyaratan formal dan materil anggota Dewan Pengawas terdiri dari:

Criteria of the Board of Supervisors

As stipulated in Minister of SOE Regulation No. PER-02/ MBU/02/2015, the formal requirements and material members of the Board of Supervisors consist of:

Persyaratan Requirements	Uraian Description
Formal <i>Formal</i>	a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum b. Tidak pernah dinyatakan pailit c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan/Perum dinyatakan pailit; dan d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara <i>a. Able to perform legal acts</i> <i>b. Never been declared bankrupt</i> <i>c. Never become a member of the Directors or a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors who is found guilty of causing a Company/Public Corporation (Perum) to be declared bankrupt; and</i> <i>d. Never been punished for committing criminal acts that harm the state finances</i>
Materil <i>Material</i>	a. Integritas b. Dedikasi c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya <i>a. Integrity</i> <i>b. Dedication</i> <i>c. Understand the company's management issues related to one of the management functions</i> <i>d. Have sufficient knowledge in the area of business of Persero/Perum where the concerned is nominated; and</i> <i>e. Can provide enough time to carry out their duties</i>

Persyaratan Requirements	Uraian Description
Persyaratan lainnya <i>Other requirements</i>	Persyaratan lain anggota Dewan Pengawas, yaitu: - Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif, calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II - Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah - Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut - Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan Komisaris/dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter - Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan <i>Other requirements of members of Board of Supervisors are:</i> <i>Not an administrator of a Political Party and/or a candidate of legislative member and/or a member of the legislature. Candidates for legislative members or legislative members consist of candidates/ members of DPR (House of Representatives), DPD (Regional Representatives), DPRD (Regional House of Representatives) Level I and Level II</i> <i>Not a candidate for Head/Deputy Head of Region and/or Head/Deputy Head of Region</i> <i>Not serving as member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors of the relevant SOE for 2 (two) consecutive periods.</i> <i>Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that could impede the performance of duties as a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors), as evidenced by a health certificate from a doctor.</i> <i>Prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies must be based on a proposal letter of the relevant agency.</i>

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Pasal 56 bahwa:

- Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kalinya pada saat pendirian.
- Apabila masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Menteri sudah harus menetapkan anggota Dewan Pengawas yang definitif.

Susunan dan Komposisi Dewan Pengawas Tahun 2017

Di tahun 2017 terjadi pergantian keanggotaan Dewan Pengawas. Kronologi pergantian susunan Dewan Pengawas, dan susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2017 dapat dilihat di bawah ini.

Terms of Office

Based on Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia), Article 56 that:

- Members of Board of Supervisors are appointed for a term of 5 (five) years, and may be re-appointed for 1 (one) term of office.
- The appointment of members of Board of Supervisors does not coincide with the appointment of members of Directors, except for the first appointment at the time of establishment.
- If the term of member of Board of Supervisors ends, then within 30 (thirty) days the most, the Minister must have determined the definitive members of Board of Supervisors.

Structure and Composition of the Board of Supervisors in 2017

In 2017, there was a change in the composition of the Board of Supervisors, with the chronology as per 31 December 2017 as follows:

Kronologi Pergantian Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2017

Chronology of Composition of the Board of Commissioners Throughout the Year 2017

1 Januari - 3 Mei 2017 January 1- May 3 2017	3 Mei - 27 Oktober 2017 May 3 - October 27 2017	27 Oktober - 31 Desember 2017 October 27 - December 31 2017	Keterangan Description
Braman Setyo (Ketua Dewan Pengawas) (Head of the Board of Supervisors)	Braman Setyo (Ketua Dewan Pengawas) (Head of the Board of Supervisors)		Braman Setyo efektif tidak lagi menjabat Ketua Dewan Pengawas sejak 27 Oktober 2017 Braman Setyo has no longer served to be Head of the Board of Supervisors since October 27, 2017
Nasarudin Umar (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)			Nasarudin Umar efektif tidak lagi menjabat Anggota Dewan Pengawas sejak 3 Mei 2017 Nasarudin Umar has no longer served to be Member of the Board of Supervisors since May 3, 2017
Dahlan Siamat (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	Dahlan Siamat (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	Dahlan Siamat (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	
Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	
Noor Ida Khomsiyati (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	Noor Ida Khomsiyati (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	Noor Ida Khomsiyati (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	
	Diah Natalisa (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	Diah Natalisa (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	Diah Natalisa efektif menjabat Anggota Dewan Pengawas sejak 3 Mei 2017 Diah Natalisa has been an effective member of the Board of Supervisors since May 3, 2017
		Sri Mulyanto (Ketua Dewan Pengawas) (Head of the Board of Supervisors)	Sri Mulyanto efektif menjabat Ketua Dewan Pengawas sejak 27 Oktober 2017 Sri Mulyanto has effectively served as the Head of the Board of Supervisors since 27 October 2017

Susunan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo
per 31 Desember 2017Structure of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo
Per December 31, 2017

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Start of Services	Masa Akhir Jabatan End of Services	Periode Jabatan Period of Office
Ketua Head	Sri Mulyanto	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 <i>Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-233/MBU/10/2017 dated October 27, 2017</i>	27 Oktober 2017 <i>October 27, 2017</i>	26 Oktober 2022 <i>October 22, 2022</i>	Ke-1 <i>First</i>
Anggota Member	Dahlan Siamat	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-297/MBU/2013 tanggal 28 Juni 2013 <i>Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-297/MBU/2013 dated June 28, 2013</i>	28 Juni 2013 <i>June 28, 2013</i>	27 Juni 2018 <i>June 27, 2018</i>	Ke-1 <i>First</i>
Anggota Member	Subandriyo	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 <i>Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-435/MBU/2013 dated December 31, 2013</i>	31 Desember 2013 <i>December 31, 2013</i>	30 Desember 2018 <i>December 30, 2018</i>	Ke-1 <i>First</i>



Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Start of Services	Masa Akhir Jabatan End of Services	Periode Jabatan Period of Office
Anggota Member	Noor Ida Khomsiyati	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 <i>Decree of State Minister of SOE as Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 dated April 12, 2016</i>	12 April 2016 <i>April 12, 2016</i>	11 April 2021 <i>April 11, 2021</i>	Ke-1 <i>First</i>
Anggota Member	Diah Natalisa	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 <i>Decree of State Minister of SOE as Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 dated May 3, 2017</i>	3 Mei 2017 <i>May 3, 2017</i>	2 Mei 2022 <i>May 2, 2022</i>	Ke-1 <i>First</i>

*Profil singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

*Brief profiles of each member of the Board of Supervisors can be seen in the Board of Supervisors Profile, in the Company Profile chapter.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam rangka menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau bidang teknis operasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk melakukan hal-hal berikut:

Duties and Responsibilities of the Board of Supervisors

The Board of Supervisors is the Company's organ with duties to:

1. Carry out supervision on the Company's management conducted by the Directors.
2. Advise the Directors in carrying out the Company's management activities.

The supervision conducted by the Board of Supervisors in order to assess the Company is by comparing the actual situation with the circumstances that should be done, both in the field of finance and/or operational technical areas. To perform the duties as referred to above, the Board of Supervisors is obliged to do the following matters:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi.
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
3. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
5. Memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.

Pembagian Lingkup Tugas Antar Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia No. KEP-04/DP-JAMKRINDO/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum Jaminan Kredit Indonesia, dilakukan pembagian tugas di antara keanggotaan Dewan Pengawas sebagai berikut:

1. Provide opinions and suggestions to the Minister on RJPP and RKAP proposed by the Directors.
2. Follow the Company's activity development, providing opinions and suggestions to the Minister on any matter deemed necessary for the management of the Company.
3. Report immediately to the Minister in case there is any symptom of declining performance of the Company.
4. Examine and review the Periodic Report and Annual Report prepared by the Directors, including signing the Annual Report.
5. Monitor and ensure that GCG principles are implemented effectively and sustainably.

Hold meetings regularly, at least once every month.

Division of Scope of Duties Among the Board of Supervisors

Based on the Decree of Board of Supervisors of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia No. KEP-02/DP-JAMKRINDO/VI/2016 dated June 23, 2017, on Division of Duties of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo, that in the framework of conducting supervisory duties and giving advice to the Directors in conducting Perum Jaminan Kredit Indonesia's management activities, the division of duties among members of the Board of Supervisors is as follows:

Dewan Pengawas Board of Supervisors	Bidang Tugas Field of Duty
Sri Mulyanto (Ketua Dewan Pengawas/ Head of the Board of Supervisors)	Melakukan koordinasi kepada seluruh organ Dewan Pengawas dan penunjang, serta khususnya bidang jaringan dan Teknologi Informasi <i>Coordinate to all organs of the Board of Supervisors and support, and especially the field of network and Information Technology</i>
Dahlan Siamat (Anggota Dewan Pengawas/Member of the Board of Supervisors)	Bidang keuangan dan bisnis penjaminan <i>Finance and Guarantee Business</i>
Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas/ Member of the Board of Supervisors)	Bidang investasi dan manajemen risiko <i>Investment and Risk Management</i>
Noor Ida Khomsiyati (Anggota Dewan Pengawas/ Member of the Board of Supervisors)	Bidang SDM, hukum dan kepatuhan <i>HR, Legal, and Compliance</i>
Diah Natalisa (Anggota Dewan Pengawas/ Member of the Board of Supervisors)	Bidang umum dan penjaminan syariah <i>General and Sharia Guarantee</i>

Pembagian bidang tugas ini tidak mengurangi hak setiap anggota Dewan Pengawas untuk mendalami permasalahan lainnya di luar bidang pembagian tugas yang ditetapkan dalam keputusan ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Tahun 2017

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas telah 15 kali rapat internal, 13 kali rapat gabungan dengan Direksi, dan 2 (dua) kali Rapat Pembahasan Bersama dengan Kementerian BUMN selaku Pemilik Modal. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas dapat tergambarkan dari produk hukum yang dikeluarkan. Selama tahun 2017 telah diterbitkan 25 surat dan 5 keputusan.

Dewan Pengawas telah melakukan *monitoring* tindak lanjut atas masalah-masalah penting di lingkup Perusahaan serta berupaya aktif dalam membantu Direksi untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dengan memberikan saran dan masukan. Perkembangan tindak lanjut permasalahan strategis dibahas secara intensif dalam kesempatan rapat bulanan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas melaksanakan kegiatan kunjungan ke lapangan guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat/jelas mengenai bidang atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Selama tahun 2017, Dewan Pengawas telah melaksanakan 3 (tiga) kali kunjungan, dengan rincian sebagai berikut:

This division of duties does not diminish the right of each member of the Board of Supervisors to explore other issues beyond the division of duties set forth in this decree.

Brief Report of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Supervisors in 2017

In 2017, the Board of Supervisors has conducted 15 (fifteen) internal meetings, 13 (thirteen) joint meetings with the Board of Directors, and 2 (two) joint Discussion meetings with the Ministry of SOEs as the Owner of Equity. Implementation of duties and obligations of the Board of Supervisors may be reflected in the legal products issued. Throughout the year 2017 25 letters and 5 decisions had been published.

The Supervisory Board has conducted follow-up monitoring of important issues within the Company and strives to be active in assisting the Board of Directors to resolve any problems by providing advice and input. The development of strategic follow-up issues is discussed intensively in the monthly Board of Supervisors meeting. The Board of Supervisors conducted site visits to get a more accurate picture of the areas or issues which needed attention. In 2017, the Board of Supervisors has conducted 3 (three) visits, with details as follows:

Tanggal Date	Lokasi Location	Perihal Regarding	Kehadiran Attended by
25-26 Maret 2017 March 25-26, 2017	Kudus, Jawa Tengah Kudus, Central Java	Monitoring Evaluasi Kinerja Cabang Monitoring of Branch Performance Evaluation	- Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas/Member of the Board of Supervisors) - Slamet Wiyono (Anggota Komite Investasi/Member of Committee of Investment)
17-18 Juli 2017 17-18 July, 2017	Medan, Sumatera Utara Medan, North Sumatera	Monitoring Evaluasi Kinerja Cabang Monitoring of Branch Performance Evaluation	- Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas/Member of the Board of Supervisors) - Slamet Wiyono (Anggota Komite Investasi/Member of Committee of Investment) - Pressi HF (Staff sekretaris dewan pengawas/Staff of Secretary of the Board of Supervisors)
30-31 Juli 2017 July 30-31, 2017	Malang, Jawa Timur Malang, East Java	Monitoring Evaluasi Kinerja Cabang Monitoring of Branch Performance Evaluation	- Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas/Member of the Board of Supervisors) - Slamet Wiyono (Anggota Komite Investasi/Member of Committee of Investment)

Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas pengawasan menunjukkan bahwa capaian kinerja dari program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2017 secara umum dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian skor KPI (*Key Performance Indicator*) Dewan Pengawas tahun 2017 sebesar 93,75 (Cukup Baik). Ke depan, Dewan Pengawas akan terus melakukan penyempumaan dan peningkatan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

DIREKSI

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang secara garis besar mengatur tentang hari, jam kerja, cuti, dan izin Direksi serta ketentuan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat, kode etik, dan peningkatan kompetensi Direksi.

Kriteria Direksi

Penetapan pedoman kualifikasi Direksi Perusahaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Perusahaan bersandar pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan aturan tersebut terdapat ketentuan mengenai persyaratan formal, materil, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang Direksi Perum yang mencakup:

The results of the evaluation of the implementation of supervisory tasks indicate that the achievement of work programs and activities carried out during 2017, in general, can be categorized as "Very Good". This can be seen from the achievement of KPI (Key Performance Indicator) of the Board of Supervisors in 2017 of 93.75 (Fair). In the future, the Board of Supervisors will continue to make improvements and enhancements to perform the Company's supervisory duties more effectively, efficiently and accountable.

BOARD DIRECTORS

Based on Article 1 paragraph 4 of Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia), Board of Directors are Company organs responsible for the Company's management for the Company interests and objectives as well as representing the Company both inside and outside court.

Guideline and Code of Conduct of the Board of Directors

The guidelines and code of conduct of the Board of Directors are stipulated through Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia) which outlines the days, hours of work, leave, and permission of the Board of Directors and the provisions of organizing and decision making in meetings, code of ethics, and improvement of Board of Directors' competence.

Criteria of the Board of Directors

The establishment of guidelines on the Company's Board of Directors qualifications refers to the prevailing laws and regulations. In this matter, the Company refers to Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 on the Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Directors Minister of State-Owned Enterprises.

Based on the regulation, there are stipulations on formal and material requirements, as well as other requirements which must be fulfilled by a Director of the Company, which include:



Persyaratan Requirements	Uraian Description
Formal <i>Formal</i>	• Mampu melaksanakan perbuatan hukum • Tidak pernah dinyatakan pailit • Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan/Perum dinyatakan pailit; dan • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara • <i>Able to perform legal acts</i> • <i>Never been declared bankrupt</i> • <i>Never become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors who is found guilty of causing a Company/Public Corporation (Perum) to be declared bankrupt; and</i> • <i>Never been punished for committing criminal acts that harm the state finances</i>
Materil <i>Material</i>	• Integritas • Dedikasi • Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen • Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan • Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya • <i>Integrity</i> • <i>Dedication</i> • <i>Understand the company's management issues related to one of the management functions</i> • <i>Have sufficient knowledge in the field of business of Persero/Perum where the concerned is nominated; and</i> • <i>Can provide enough time to carry out their duties</i>
Persyaratan lainnya <i>Other requirements</i>	Persyaratan lain anggota Direksi, yaitu: • Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II • Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah • Tidak menjabat sebagai anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut • Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan direksi/Komisaris/dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter • Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan <i>Other requirements of members of Board of Directors are:</i> • <i>Not an administrator of a Political Party and/or a candidate of legislative member and/or a member of the legislature. Candidates for legislative members or legislative members consist of candidates/ members of DPR (House of Representatives), DPD (Regional Representatives), DPRD (Regional House of Representatives) Level I and Level II</i> • <i>Not a candidate for Head/Deputy Head of Region and/or Head/Deputy Head of Region</i> • <i>Not serving as member of the Board of Directors/Board of Commissioners/Board of Supervisors of the relevant SOE for 2 (two) consecutive periods.</i> • <i>Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that could impede the performance of duties as a member of the Board of Directors/Board of Commissioners/Board of Supervisors), as evidenced by a health certificate from a doctor.</i> • <i>Prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies must be based on a proposal letter of the relevant agency.</i>

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Pasal 16, disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2017

Di tahun 2017 terjadi pergantian keanggotaan Dewan Pengawas. Kronologi pergantian susunan Dewan Pengawas, dan susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2017 dapat dilihat di bawah ini.

Terms of Office

In accordance the with Government Regulation No. 41 of 2008 concerning Public Corporation (Perum) of Credit Guarantee of Indonesia Article 16, it is stated that members of the Board of Directors are appointed for a term of 5 (five) years, and may be reappointed for 1 (one) term of office.

Structure and Composition of the Directors in 2017

In 2017, there was a change in the structure of the Board of Directors. Structure and Composition of the Board of Directors throughout 2017 are as follows:

Kronologi Pergantian Susunan Dewan Direksi di Sepanjang Tahun 2017

Chronology of Composition of the Board of Directors Throughout the Year 2017

1 Januari - 7 September 2017 1 January – 7 September 2017	7 September - 21 November 2017 7 September – 21 November 2017	21 November - 31 Desember 2017 21 November - 31 December 2017	Keterangan Description
Diding S. Anwar (Direktur Utama) (President Director)	Diding S. Anwar (Direktur Utama) (President Director)		Diding S. Anwar efektif tidak lagi menjabat Direktur Utama sejak 21 November 2017 <i>Diding S. Anwar has no longer served as President Director since 21 November 2017</i>
Bakti Prasetyo (Direktur Bisnis Penjaminan) (Director of Guarantee Business)			Bakti Prasetyo efektif tidak lagi menjabat Direktur Bisnis Penjaminan sejak 7 September 2017 <i>Bakti Prasetyo has no longer served as Director Of Guarantee Business since September 7, 2017</i>
Nanang Waskito (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan) (Director of HRM, GA, and Compliance)			Nanang Waskito efektif tidak lagi menjabat Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan sejak 27 Oktober 2017 <i>Nanang Waskito has no longer served as Director Of HRM, GA and Compliance since 27 October, 2017</i>
R. Sophia Alizsa (Direktur Operasional dan Jaringan) (Director of Operational and Network)	R. Sophia Alizsa (Direktur Operasional dan Jaringan) (Director of Operational and Network)		R. Sophia Alizsa efektif tidak lagi menjabat Direktur Operasional dan Jaringan sejak 21 November 2017 <i>R. Sophia Alizsa has no longer served as Director Of Operational and Network since 21 November, 2017</i>



1 Januari - 7 September 2017 1 January – 7 September 2017	7 September - 21 November 2017 7 September – 21 November 2017	21 November - 31 Desember 2017 21 November - 31 December 2017	Keterangan Description
I. Rusdonobanu (Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Investment, and Risk Management)	I. Rusdonobanu (Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Investment, and Risk Management)	I. Rusdonobanu (Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Investment, and Risk Management)	-
	Amin Masudi (Direktur Bisnis Penjaminan) (Director of Guarantee Business)	Amin Masudi (Direktur Bisnis Penjaminan) (Director of Guarantee Business)	Amin Masudi efektif menjabat Direktur Bisnis Penjaminan sejak 7 September 2017 Amin Masudi has been appointed as a Director of Guarantee Business since September 7, 2017
	Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan) (Director of HRM, GA, and Compliance)	Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan) (Director of HRM, GA, and Compliance)	Sulis Usdoko efektif menjabat Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan sejak 7 September 2017 Sulis Usdoko has been appointed as a Director of HRM, General Affair, and Compliance since September 7, 2017
		Randi Anto (Direktur Utama) (President Director)	Randi Anto efektif menjabat Direktur Utama sejak 21 November 2017 Randi Anto has been appointed as a President Director since 21 November 2017
		Kadar Wisnuwarman (Direktur Operasional dan Jaringan) (Director of Operational and Network)	Kadar Wisnuwarman efektif menjabat Direktur Operasional dan Jaringan sejak 21 November 2017 Kadar Wisnuwarman has been appointed as a Director of Operations and Network since 21 November 2017

Susunan Direksi Perum Jamkrindo per 31 Desember 2017

Structure of the Board of Directors of Perum Jamkrindo As
per 31 December 2017

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Start of Services	Masa Akhir Jabatan End of Services	Periode Jabatan Period of Office
Direktur Utama <i>President Director</i>	Randi Anto (Direktur Utama) (<i>President Director</i>)	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK- 249/MBU/11/2017 <i>Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK- 249/MBU/11/2017</i>	21 November 2017	20 November 2022	Ke-1 <i>First</i>
Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Guarantee Business</i>	Amin Masudi (Direktur Bisnis Penjaminan) (<i>Director of Guarantee Business</i>)	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK- 187/MBU/09/2017 <i>Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK- 187/MBU/09/2017</i>	7 September 2017	6 September 2022	Ke-1 <i>First</i>
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan <i>Director of HRM, GA, and Compliance</i>	Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan) (<i>Director of HRM, GA, and Compliance</i>)	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK- 187/MBU/09/2017 <i>Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK- 187/MBU/09/2017</i>	7 September 2017	6 September 2022	Ke-1 <i>First</i>



Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Start of Services	Masa Akhir Jabatan End of Services	Periode Jabatan Period of Office
Direktur Operasional dan Jaringan <i>Director of Operational and Network</i>	Kadar Wisnuwarman (Direktur Operasional dan Jaringan) <i>(Director of Operational and Network)</i>	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 <i>Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017</i>	21 November 2017 <i>November 21, 2017</i>	20 November 2022 <i>November 20, 2022</i>	Ke-1 <i>First</i>
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment, and Risk Management</i>	I. Rusdonobanu (Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko) <i>(Director of Finance, Investment and Risk Management)</i>	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 <i>Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 in conjunction with Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014</i>	15 Januari 2013 <i>January 15, 2013</i>	14 Januari 2018 <i>January 14, 2018</i>	Ke-1 <i>First</i>

*Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan.

*Brief profiles of each member of the Board of Supervisors can be seen in the Board of Supervisors Profile, in the Company Profile chapter.

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi. Dalam melaksanakan Kepengurusan Perusahaan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan syarat semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi. Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka ditetapkan salah seorang Direktur

Company Management Policies

The Company's Management Policy is established by the Directors. In executing the Management of the Company, the President Director shall have the right and authority to act on behalf of the Directors and to represent the Company, provided that all actions of the said President Director have been approved by the Directors Meeting. If the President Director is absent for any reason, then it is established that

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan urutan sebagai berikut:

1. Salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan di antara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir (b) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, Direktur sebagaimana dimaksud pada butir (c) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

one of the Directors is authorized to act for and on behalf of the Directors in the following order:

1. One of the Directors appointed by the President Director is authorized to act for and on behalf of the Directors.
2. In the event that the President Director does not make an appointment, one of the Directors appointed by and among the members of the Directors is authorized to act for and on behalf of the Directors.
3. In the event as referred to in point (b) is not done, one of the Director who is serving the longest as a member of the Director shall be authorized to act for and on behalf of the Directors.
4. In the event that the Director who is serving the longest as a member of the Directors is more than 1 (one) person, the Director, as referred to in point (c), of the oldest in age shall be authorized to act for and on behalf of the Directors.

Duties and Responsibilities

Referring to Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia), the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

Tugas Pokok Main Duties	
1	Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan tersebut <i>Carry out the management of the Company for the Company's interests and objectives and act as the Chairman in the management</i>
2	Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan <i>Represent the Company inside and outside court</i>
3	Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan <i>Maintain and manage the Company's wealth</i>
Tanggung Jawab Responsibility	
1	Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan pengelolaan Perusahaan, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perusahaan dan mewakili Perum Jamkrindo di dalam dan di luar pengadilan <i>The Directors are responsible for implementing the Company's regulations and management, taking legal action for and on behalf of the Company, and representing Perum Jamkrindo inside and outside court</i>
2	Secara bersama-sama atau individual, bertanggung jawab segala kerugian yang timbul pada kekayaan Perusahaan akibat tindakan Direksi yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan <i>Collectively or individually, shall be liable for any loss arising on the Company's assets due to the actions taken by the Directors which violate or neglect of the duties and/or obligations as stipulated in the Company Regulations and Laws and Regulations</i>
3	Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap <i>Ensure that information about the Company is given to the Board of Supervisors in a timely and complete manner</i>
4	Tanggung jawab lain sesuai ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku <i>Other responsibilities are in accordance with the Company Regulations and the applicable Laws and Regulations</i>



Pembagian Lingkup Tugas Antar Direksi

Tugas dan wewenang masing-masing Direksi telah diatur dalam Surat Direktur Utama No. 3713/P/I/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Perubahan Struktur Organisasi Perum Jamkrindo yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas melalui surat No. S-23/DP/X/2015 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Perum Jamkrindo. Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan membagi tugas dan wewenang sebagai berikut:

Division of Scope of Duties Among the Directors

The duties and authorities of each Board of Directors are regulated in Letter of President Director No. 3713/P/I/X/2015 dated October 5, 2015, regarding Amendment of Organizational Structure of Perum Jamkrindo which has been approved by the Board of Supervisors through a letter No. S-23/DP/X/2015 concerning Approval of Amendment of Organizational Structure of Perum Jamkrindo. In carrying out its activities, members of the Company's Board of Directors divide the following duties and powers as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Duties and Authorities
Direktur Utama, Randi Anto <i>President Director, Randi Anto</i>	Tugas Pokok: Mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mengendalikan seluruh direktorat, kantor wilayah dan seluruh unit kerja untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Perusahaan. Tanggung Jawab: • Mengoordinasikan, merumuskan, menyusun dan melaksanakan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran Perusahaan. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain merumuskan dan menetapkan pedoman <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain merumuskan dan menetapkan peraturan/keputusan/ Kebijakan <i>Standard Operating Prosedur</i> (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan. • Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Divisi Pemeringkatan UMKM & Manajemen Konsultasi serta Kantor Wilayah. • mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di bawah Direksi. • Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala SPI, Sekretaris Perusahaan, Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Divisi Pemeringkatan UMKM & Manajemen Konsultasi serta Kantor Wilayah. • Bersama Direktur lainnya menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan dan Keuangan (Triwulanan). • Mengoordinasikan dan menyelenggarakan rapat berkala. • Mengoordinasikan dan menetapkan Program kerja Tahunan Pemeriksaan Internal Perusahaan. • Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan GCG di seluruh Direktorat. • Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi. • Tugas-tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Duties and Authorities
	Main tasks: To coordinate, integrate, and control all directorates, regional offices and all work units for the purposes and objectives of the Company and act as the Leader in the management of the Company. Responsibilities: • To coordinate, formulate, develop and implement the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as guidelines for the implementation of the tasks and achievement of the Company's objectives. • Together with other members of the Board of Directors formulate and set guidelines for Good Corporate Governance (GCG). • Together with other members of the Board of Directors formulate and enact regulations/decisions/policies of Standard Operating Procedures (SOP) of operational and non-operational activities of the Company. • To define the main tasks and functions and coordinate the implementation of the duties of the Internal Audit Unit (SPI), Corporate Secretary, Planning & Development Division and SMEs Ratings Division & Management Consulting and Regional Offices. • To coordinate, formulate and define the main tasks and functions and coordinate implementation of the duties of Functional Officers under the Board of Directors. • To foster and evaluate the performance of SPI Head, Corporate Secretary, Planning & Development Division and SMEs ratings Division & Management Consulting and Regional Offices. • Together with other Directors to prepare Management Reports, Company Annual Reports, and Activity and Financial Reports (Quarterly). • To coordinate and hold regular meetings. • To coordinate and establish the Company's Annual Internal Audit Working Program. • To execute and supervise the implementation of GCG throughout the Directorate. • To sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Directors in charge. • To perform other duties in accordance with the provisions of Company regulations and prevailing laws and regulations.



Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab <i>Duties and Authorities</i>
Direktur Bisnis Penjaminan, Amin Masudi <i>Director of Guarantee Business, Amin Masudi</i>	Tugas Pokok: Mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mengendalikan Direktorat Bisnis Penjaminan dan Kantor Wilayah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Direktorat Bisnis Penjaminan. Tanggung Jawab: • Mengoordinasikan, merumuskan, menyusun dan melaksanakan RJPP dan RKAP dalam Direktorat Bisnis Penjaminan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran Perusahaan. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan pedoman GCG. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, SOP kegiatan Direktorat Bisnis Penjaminan. • Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Program, Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank, Kepala Divisi <i>Suretyship</i> Penjaminan Non Bank serta Kepala Divisi Penjaminan Syariah. • Mengusulkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di bawah Direksi. • Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Program, Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank, Kepala Divisi <i>Suretyship</i> & Penjaminan Non Bank serta Kepala Divisi Penjaminan Syariah. • Bersama Direktur lainnya menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan (Triwulanan) • Mengoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut: • Rapat Direksi. • Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas. • Rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan. • Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target Perusahaan dalam tahun berjalan. • Menyenggarakan dan memimpin rapat-rapat berkala di Direktorat Bisnis Penjaminan serta rapat Direktorat Bisnis Penjaminan dengan pihak eksternal Perusahaan. • Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan GCG di Direktorat Bisnis Penjaminan. • Menandatangani dokumen hukum untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenang selaku Direktur Bisnis Penjaminan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur Utama. • Tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Duties and Authorities
	Main Tasks: To coordinate, integrate and control the Directorate of Guarantee Business and Regional Offices for the purposes and objectives of the Company and act as the leader in the management of the Guarantee Business Directorate. Responsibilities: • To coordinate, formulate, develop, and implement the Company's long-term plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP) in the Directorate of Guarantee Business, as a guideline for the implementation of tasks and achievement of the Company's objectives. • Together with other members of the Board of Directors formulate and establish GCG guidelines. • Together with other members of the Board of Directors formulate and enact the Rules/Decisions/Policies, and SOP of the Directorate of Guarantee Business activities. • To define the key tasks and functions and to coordinate the implementation of the tasks of the Head of Guarantee Business Program Division, Head of Bank Guarantee Business Division, Head of Suretyship Division of Non Bank Guarantee and Head of Sharia Guarantee Division. • To propose the core tasks and functions and to coordinate the execution of duties of the Functional Officers under the Board of Directors. • To foster and evaluate the performance of the Head of Guarantee Business Program Division, Head of Bank Guarantee Business Division, Head of Suretyship Division of Non Bank Guarantee and Head of Sharia Guarantee Division. • Together with other Directors prepare Management Reports, Company Annual Reports, and Corporate and Financial Reports (Quarterly) • To coordinate and attend regular meetings as follows: • Board of Directors Meeting. • Board of Directors' Meeting with Board of Supervisors. • Meetings of the Board of Directors and/or Board of Supervisors with owners of equity or with external parties • Monthly evaluation meetings and national work meetings as • an effort to achieve the Company's target in the ongoing year. • To hold monthly evaluation meetings and national work meetings as an effort to achieve the Company's target in the ongoing year. • To conduct and lead periodic meetings at the Directorate of Guarantee Business and meeting of the Directorate of Guarantee Business with the external parties. • To execute and supervise the implementation of GCG in the Directorate of Guarantee Business. • To sign legal documents for the areas assigned and authorized to the Director of Guarantee Business, either alone or together with the President Director. • To perform other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations.



Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab <i>Duties and Authorities</i>
Direktur Operasional dan Jaringan, Kadar Wisnuwarman <i>Director of Operational and Network, Kadar Wisnuwarman</i>	Tugas Pokok: Mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mengendalikan Direktorat Operasional & Jaringan serta Kantor Wilayah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Direktorat Operasional & Jaringan. Tanggung Jawab: • Mengoordinasikan, merumuskan, menyusun dan melaksanakan RJPP dan RKAP dalam Direktorat Operasional & Jaringan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran Perusahaan. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan pedoman GCG. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, SOP kegiatan Direktorat Operasional & Jaringan. • Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan, Kepala Divisi Klaim & Subrogasi, Kepala Divisi Jaringan & Layanan serta Kepala Divisi Teknologi Informasi. • Mengusulkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di bawah Direksi. • Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan, Kepala Divisi Klaim & Subrogasi, Kepala Divisi Jaringan & Layanan serta Kepala Divisi Teknologi Informasi. • Bersama Direktur lainnya menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Operasional & Jaringan (Triwulanan). • Mengoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut: • Rapat Direksi. • Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas. • Rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan. • Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target Perusahaan dalam tahun berjalan. • Menyenggarakan dan memimpin rapat-rapat berkala di Direktorat Operasional & Jaringan serta rapat Direktorat Operasional & Jaringan dengan pihak eksternal Perusahaan. • Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan GCG di Direktorat Operasional & Jaringan. • Menandatangani dokumen hukum untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenang selaku Direktur Operasional & Jaringan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur lainnya. • Tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Duties and Authorities
	Main Tasks: To coordinate, integrate and control the Directorate of Operations & Networks and Regional Offices for the purposes and objectives of the Company and act as a leader in the management of the Directorate of Operations & Networks. Responsibilities: • To coordinate, formulate, develop and implement the Company's long-term plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP) in the Directorate of Operations & Networks, as guidelines for the implementation of tasks and achievement of the Company's objectives. • Together with other members of the Board of Directors formulate or establish GCG guidelines. • Together with other members of the Board of Directors formulate and enact the Rules/Decisions/Policies, and SOP of activities of Directorate of Operations & Network. • To define the main tasks and functions and coordinate the implementation of duties of the Head of Guarantee Engineering and Administration Division, Head of Claim & Subrogation Division, Head of Network & Service Division and Head of Information Technology Division. • To propose core tasks and functions and coordinate the execution of duties of the Functional Officers under the Board of Directors. • To foster and evaluate the performance of Head of Guarantee Engineering & Administration Division, Head of Claim & Subrogation Division, Head of Network & Service Division, and Head of Information Technology Division. • Together with other Directors prepare Management Reports, Company Annual Reports, and Operations & Network Activities Reports (Quarterly). • To coordinate and attend regular meetings as follows: • Board of Directors Meeting. • Board of Directors' Meeting with Board of Supervisors. • Meetings of the Board of Directors and/or Board of Supervisors with owners of equity or with external parties. • Monthly evaluation meetings and national work meetings in order to achieve the Company's target in the ongoing year. • To conduct and lead periodic meetings at the Directorate of Operations & Networks and meetings of the Directorate of Operations & Networks with external parties. • To execute and supervise the implementation of GCG in the Directorate of Operations & Network. • To sign legal documents for the areas in charge and authority as Director of Operational & Network either alone and together with other Directors. • To perform other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations.



Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab <i>Duties and Authorities</i>
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan, Sulis Usdoko <i>Director of HRM, General Affairs, and Compliance, Sulis Usdoko</i>	Tugas Pokok: Mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mengendalikan Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan serta Kantor Wilayah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan. Tanggung Jawab: • Mengoordinasikan, menumuskan, menyusun dan melaksanakan RJPP dan RKAP dalam Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran Perusahaan. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan pedoman GCG. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, SOP kegiatan Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan. • Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Divisi MSDM, Kepala Divisi Umum serta Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan. • Mengusulkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di bawah Direksi. • Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala Divisi MSDM, Kepala Divisi Umum serta Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan. • Bersama Direktur lainnya menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan (Triwulanan). • Mengoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut: • Rapat Direksi. • Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas. • Rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan. • Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target Perusahaan dalam tahun berjalan. • Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat berkala di Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan serta rapat Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan dengan pihak eksternal Perusahaan. • Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan GCG di Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan. • Menandatangani dokumen hukum untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenang selaku Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan baik sendiri maupun bersama- sama dengan Direktur Utama. • Tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraruran perundang-undangan yang berlaku.

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Duties and Authorities
	Main Tasks: To coordinate, integrate and control the Directorate of HRM, General Affairs & Compliance, and Regional Offices for the purposes and objectives of the Company and act as the leader in the management of the Directorate of HRM, General Affairs & Compliance. Responsibilities: • To coordinate, formulate, develop and implement the Company's long-term plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP) in the Directorate of HRM, General Affairs & Compliance, as guidance for the implementation of tasks and achievement of the Company's objectives. • Together with other members of the Board of Directors formulate and establish GCG guidelines. • Together with other members of the Board of Directors formulate and enact the Rules/Decisions/Policies, and SOP of activities of the Directorate of HRM, General Affairs & Compliance. • To define the main tasks and functions and coordinate the duties of Head of HRM Division, Head of General Affairs Division, and Head of Legal and Compliance Division. • To propose the core tasks and functions and coordinate the execution of duties of Functional Officers under the Board of Directors. • To foster and evaluate the performance of Head of HRM Division, Head of General Affairs Division, and Head of Legal and Compliance Division. • Together with other Directors prepare Management Reports, Company Annual Reports, and Corporate Activities and Financial Reports (Quarterly). • To coordinate and attend regular meetings as follows: • Board of Directors Meeting. • Board of Directors' Meeting with Board of Supervisors. • Meetings of the Board of Directors and/or Board of Supervisors with owners of equity or with external parties. • Monthly evaluation meetings and national work meetings in order to achieve the Company's target in the ongoing year. • To conduct and lead periodic meetings at the Directorate of HRM, General Affairs & Compliance and meetings of the Directorate of HRM, General Affairs & Compliance with external parties. • To execute and supervise the implementation of GCG at the Directorate of HRM, General Affairs & Compliance. • To sign legal documents for the areas of duty and authority as the Director of HRM, General Affairs & Compliance either alone or together with the President Director. • To perform other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulation.



Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab <i>Duties and Authorities</i>
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko, Rusdonobanu <i>Director of Finance, Investment, and Risk Management, I. Rusdonobanu</i>	Tugas Pokok: Mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mengendalikan Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko serta Kantor Wilayah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. Tanggung Jawab: • Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Divisi Keuangan & Investasi, Kepala Divisi Akuntansi & PKBL serta Kepala Divisi Manajemen Risiko. • Mengusulkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di bawah Direksi. • Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala Divisi Keuangan & Investasi, Kepala Divisi Akuntansi & PKBL serta Kepala Divisi Manajemen Risiko. • Bersama Direktur lainnya menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan (Triwulanan). • Mengoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut: • Rapat Direksi. • Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas. • Rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan. • Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target Perusahaan dalam tahun berjalan. • Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat berkala di Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko serta rapat Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko dengan pihak eksternal Perusahaan. • Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan GCG di Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. • Menandatangani dokumen hukum untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenang selaku Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur Utama. • Tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Duties and Authorities
	Main Tasks: To coordinate, integrate and control the Directorate of Finance, Investment and Risk Management and Regional Offices for the purposes and objectives of the Company and act as the leader in the management of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. Responsibilities: - To define the main tasks and functions and coordinate the implementation of the tasks of Head of Finance & Investment Division, Head of Accounting & Partnership & Community Development Program (PKBL) Division, and Head of Risk Management Division. - To propose core tasks and functions and coordinate the execution of duties of Functional Officers under the Board of Directors. - To foster and evaluate the performance of Head of Finance & Investment Division, Head of Accounting Partnership & Community Development Program Division, and Head of Risk Management Division. - Together with other Directors prepare Management Reports, Company Annual Reports, and Corporate Activities and Financial Reports (Quarterly). - To coordinate and attend regular meetings as follows: - Board of Directors Meeting. - Board of Directors' Meeting with Board of Supervisors. - Meetings of the Board of Directors and/or Board of Supervisors with owners of equity or with external parties. - Monthly evaluation meetings and national work meetings in order to achieve the Company's target in the ongoing year. - To conduct and lead periodic meetings at the Directorate of Finance, Investment and Risk Management and meetings of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management with external parties. - To execute and supervise the implementation of GCG in the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. - To sign legal documents for the areas in which the Director of Finance, Risk and Investment Director of the Finance, Investment and Risk Management is in charge either alone or alone or with the President Director. - To perform other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations.

Keputusan Strategis Tahun 2017

Strategic Decisions in 2017

Beberapa keputusan strategis yang tertuang dalam keputusan dan surat Direksi adalah:

Some strategic decisions contained in the decree/letter of the Board of Directors are:

No	Perihal Subjects	Nomor Letter/Decree Number	Tanggal Date
1	Pembukaan Kantor Unit Pelayanan Perum Jamkrindo Bekasi <i>The opening of Service Unit Office of Perum Jamkrindo Bekasi</i>	33/Kep-Dir/IV/2017	26 April 2017 <i>April 26, 2017</i>
2	Pembukaan Kantor Unit Pelayanan Perum Jamkrindo Mandailingnatal <i>The opening of Service Unit Office of Perum Jamkrindo Mandailingnatal</i>	34/Kep-Dir/IV/2017	26 April 2017 <i>April 26, 2017</i>
3	Penetapan Pengelola Admin Portal Perum Jamkrindo pada Portal Kementerian <i>The Establishment of Admin Manager of Jamkrindo Portal at the Ministry Portal</i>	40/Kep-Dir/V/2017	16 Mei 2017 <i>May 16, 2017</i>
4	Tim Kajian Penyertaan Modal Kepada Jamkrinda <i>Review Team for Equity Participation to Jamkrinda</i>	42/Kep-Dir/V/2017	16 Mei 2017 <i>May 16, 2017</i>
5	Pembentukan Panitia Pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Perum Jamkrindo Kupang <i>The Establishment of the Committee for Procurement of Land and Building of Kupang Branch Office of Perum Jamkrindo</i>	44/Kep-Dir/V/2017	22 Mei 2017 <i>May 22, 2017</i>



No	Perihal Subjects	Nomor Letter/Decree Number	Tanggal Date
6	Pembentukan Panitia Pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Perum Jamkrindo Samarinda <i>The Establishment of the Committee for Procurement of Land and Building of Samarinda Branch Office of Perum Jamkrindo</i>	45/Kep-Dir/V/2017	22 Mei 2017 <i>May 22, 2017</i>
7	Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia <i>Reports on Assets of State Officials Management Unit (LHKPN) For Public Corporation's (Perum) Officials of Jamkrindo</i>	52/Kep-Dir/VI/2017	14 Juni 2017 <i>June 14, 2017</i>
8	Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Samarinda <i>The Establishment of the Committee for Procurement of Land and Building of Samarinda Branch Office of Perum Jamkrindo</i>	71/Kep-Dir/VIII/2017	23 Agustus 2017 <i>August 23, 2017</i>
9	Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia <i>Dismissal, Change of Names of Position, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo</i>	72/Kep-Dir/VIII/2017	7 September 2017 <i>September 7, 2017</i>
10	Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Banjarmasin <i>The Establishment of the Committee for Procurement of Land and Building of Banjarmasin Branch Office of Perum Jamkrindo</i>	73/Kep-Dir/VIII/2017	23 Agustus 2017 <i>August 23, 2017</i>
11	Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Manado <i>The Establishment of the Committee for Procurement of Land and Building of Manado Branch Office of Perum Jamkrindo</i>	74/Kep-Dir/VIII/2017	23 Agustus 2017 <i>August 23, 2017</i>
12	Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Layanan <i>Virtual Private Network (VPN) Secondary</i> <i>The Establishment of Auction Committee for the Procurement of Secondary Virtual Private Network (VPN)</i>	93/Kep-Dir/IX/2017	7 September 2017 <i>September 7, 2017</i>
13	Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Perum Jamkrindo DKI Jakarta <i>The Establishment of the Committee for Procurement of Land and Building of Jakarta Branch Office of Perum Jamkrindo</i>	107/Kep-Dir/X/2017	26 Oktober 2017 <i>October 26, 2017</i>
14	Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan <i>Server On Premise dan Managed Services</i> <i>The Establishment of Auction Committee for the Procurement of Server On Premise and Managed Services</i>	113/Kep-Dir/XI/2017	14 November 2017 <i>November 14, 2017</i>
15	Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Layanan <i>Private Cloud and Disaster Recovery Center (DRC)</i> <i>The Establishment of Auction Committee for the Procurement of Private Cloud and Disaster Recovery Center (DRC)</i>	116/Kep-Dir/XI/2017	20 November 2017 <i>November 20, 2017</i>
16	Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Perbaikan Gedung Jamkrindo <i>The Establishment of Auction Committee for the Procurement of Jamkrindo Building Repair</i>	117/Kep-Dir/XI/2017	20 November 2017 <i>November 20, 2017</i>

TRANSPARANSI INFORMASI TERKAIT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Assessment Dewan Pengawas dan Direksi

Sebagai organ utama dalam Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan. *Assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Assessment terhadap penerapan GCG mengacu kepada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan di atas.

Sejalan dengan *assessment* yang bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi, Manajemen Perusahaan diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses *assessment*. Untuk *assessment* penerapan GCG tahun ukur 2016, hasil *assessment* memberikan predikat "Sangat Baik", dengan nilai mencapai 91,120. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing meraih nilai perolehan 92,139 dan 94,124, keduanya dengan predikat "Sangat Baik".

TRANSPARENCY OF INFORMATION RELATED TO THE BOARD OF SUPERVISORS AND DIRECTORS

Assessment Of The Board Of Supervisors And Directors

As the main organ of the Company, the Board of Commissioners and Board of Directors have a central role in the Company's growth. Assessment of these two organs becomes a must, especially since the Company is a State Owned Enterprise (SOE) \directed to implement GCG principles which is in accordance to SOE standards and the assessment of the implementation.

Assessment of the implementation of GCG refers to a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises. SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012, on the Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance on SOEs. Assessment and evaluation methods are carried out using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with the specified weights as set forth in the above copy of the Decree.

In line with the assessment aimed at providing evaluation and recommendations, the Company Management is expected to follow-up on recommendations arising from the assessment process. For the assessment of GCG implementation in 2016, the assessment results were "Very Good", with a value reaching 91.120. The aspect of the Board of Commissioners/Board of Supervisors, and Board of Directors, each earned 92,139 and 94,124, or with a "Very Good" predicate.

Skor *assessment* penerapan prinsip GCG tahun buku 2016 untuk aspek Dewan Komisaris mendapatkan skor 92,139 (kategori "Sangat Baik") dan aspek Direksi 94,124 (kategori "Sangat Baik"), meningkat dari tahun 2015 dengan skor masing-masing 90,322 (kategori "Sangat Baik") dan 94,119 (kategori "Sangat Baik").

Assessment score of GCG principles of the fiscal year 2016 for Board of Commissioners aspect was 92,139 score ("Very Good" category) and Board of Directors was 94,124 ("Very Good"), This is an increase from 2015 score of 90,322 ("Very Good" category) and 94.119 (also "Very Good" category).



Jenis Penilaian <i>Type of Assessment</i>	: Self Assessment
Assessor	: Tim Internal dibantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>The Company's Internal Team assisted by the Financial and Development Supervisory Board (BPKP)</i>
Tahun Buku Penerapan <i>Implementation Year</i>	: 1 Januari 2016 - 31 Desember 2016 <i>January 1, 2016 – December 31, 2016</i>
Periode Pengukuran <i>Assessment Period</i>	: 30 Januari - 28 Februari 2017 <i>January 30 – February 28, 2017</i>

Hasil *Assessment* Penerapan GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016

Results of GCG Implementation Assessment for the Aspects of Board of Commissioners and Board of Directors in the Fiscal Year 2016

(Metode Penilaian Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

(Assessment Method is Based on the Decree of Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012)

Aspek Pengujian <i>Aspects of Assessment</i>	Bobot <i>Weight</i>	Pencapaian Tahun Buku 2016 <i>Achievement in Fiscal Year 2016</i>		
		Nilai <i>Score</i>	Pencapaian <i>Achievement</i> (%)	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG <i>Quality Qualification of GCG Implementation</i>
Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/Board of Supervisors</i>	35,00	32,249	92,139	"Sangat Baik" <i>"Very Good"</i>
Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	32,943	94,124	"Sangat Baik" <i>"Very Good"</i>

Keterangan:

0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Keterangan/Information:

0-50 : Bad | 50-60 : Poor | 60-75 : Fair | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Rekomendasi hasil *assessment* penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi tahun ukur 2016 dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Recommendation of GCG implementation assessment for Board of Commissioners and Board of Directors in 2016 and follow up by Company is as follows:

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2016 <i>Recommendation of GCG Application Assessment for Fiscal Year 2016</i>	Tindak Lanjut di Tahun 2017 <i>Follow-up in 2017</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Tindakan <i>Actions</i>
Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>For the Board of Commissioners / Board of Supervisors</i>				
1	Jangka Waktu Persetujuan Dewan Pengawas atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Direksi. <i>Board Manual</i> Dewan Pengawas belum mengatur jangka waktu pemberian tanggapan terhadap rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan oleh Direksi. <i>The Period of Approval by the Board of Supervisors on the draft Work Plan and Corporate Budget (RKAP) by the Board of Directors. The Board Manual of the Board of Supervisors has not set the period of response to the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) proposed by the Board of Directors.</i>	v	2017	<i>Carry over ke dalam Laporan Self Assessment GCG Tahun 2017</i> <i>Carried over to the 2017 GCG Self Assessment Report</i>
2	Dewan Pengawas tidak menetapkan target kinerja dan penilaian kinerja untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas (individu), penilaian kinerja Dewan Pengawas masih dilakukan secara kolegal. <i>The Board of Supervisors does not set performance targets and performance assessment for each member of the Board of Supervisors (individual assessment and target setting), and the performance assessment of the board of Supervisory Board was still conducted collegially</i>	v	2017	<i>Carry over ke dalam Laporan Self Assessment GCG Tahun 2017</i> <i>Carried over to the 2017 GCG Self Assessment Report</i>
Aspek Direksi <i>For the Board of Directors</i>				
1	Tingkat pencapaian kinerja Direksi (KPI) yang telah yang dilaporkan oleh Direksi kepada Pemilik Modal masih berbentuk kolegal, belum terdapat pencapaian kinerja direksi per individu. <i>The level of achievement of the Board of Directors (KPI) which has been reported by the Board of Directors to the Equity Owners is still conducted collegially, and, there is no performance achievement report of individual directors.</i>	v	2017	<i>Carry over ke dalam Laporan Self Assessment GCG Tahun 2017</i> <i>Carried over to the 2017 GCG Self Assessment Report</i>



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2016 <i>Recommendation of GCG Application Assessment for Fiscal Year 2016</i>	Tindak Lanjut di Tahun 2017 <i>Follow-up in 2017</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Tindakan <i>Actions</i>
2	Perusahaan belum memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk). <i>The company has not yet had a quality policy (product quality control system).</i>	v	2017	Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 34/Per-Dir/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Sistem Manajemen Mutu Perum Jamkrindo <i>The Regulation of the Board of Directors of Public Corporation (Perum) of Indonesian Credit Guarantee (Jamkrindo) No. 34 / Per-Dir / XI / 2017 dated November 17, 2017, regarding Policy and Quality Management System Guidelines of Perum Jamkrindo</i>

v = telah ditindaklanjuti | x = belum ditindaklanjuti

v = follow-up has been conducted | x = follow-up hasn't been conducted

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mengadakan rapat rutin sekali dalam setiap bulan, yaitu Rapat Internal Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Komite Audit, dan Komite Investasi dan Risiko Usaha serta Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi. Namun dalam hal dipandang penting, Dewan Pengawas juga melakukan rapat-rapat insidental, baik dengan komite-komite maupun dengan Direksi.

Di sepanjang tahun 2017, Dewan Pengawas menggelar 15 kali Rapat Internal Dewan Pengawas dan 13 kali Rapat Gabungan dengan Direksi. Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat internal Dewan Pengawas.

Meeting Of The Board Of Supervisors And Directors

Board of Supervisors Meeting

The Board of Supervisors holds regular meetings every month, which is the Internal Meeting of the Board of Supervisors attended by the Audit Committee and the Investment and Business Risk Committee as well as Meeting of the Board of Supervisors with the Directors. However, if deemed necessary, the Board of Supervisors also conducts incidental meetings, both with the committees and the Directors.

Throughout 2017, the Board of Supervisors held 15 Internal Meetings of the Board of Supervisors and 13 Meetings with the Directors. Below are the minutes of meetings and attendance level of the Board of Supervisors in the meetings.

Risalah Rapat Internal Dewan Pengawas

Minutes of Meetings of
the Board of Supervisors Internal Meeting

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
31 Januari 2017 31 January 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Head Office of Perum Jamkrindo	- Evaluasi Kinerja Usaha Tahun 2016 - Hasil Evaluasi Komite Audit - Hasil Evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha - Lain-lain 2016 Business Performance Evaluation - Evaluation Result of Audit Committee - Evaluation Result of Investment and Business Risk Committee - Etc	- Braman Setyo - Subandriyo - Nasaruddin Umar - Dahlan Siamat - Noor Ida K - Wawan CA - Fajar Karyanto - Slamet Wiyono	-
28 Februari 2017 28 February 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Head Office of Perum Jamkrindo	- Evaluasi Kinerja Usaha Januari 2017 - Hasil Evaluasi Komite Audit - Hasil Evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha - Lain-lain - January 2017 Business Performance Evaluation - Evaluation Result of Audit Committee - Evaluation Result of Investment and Business Risk Committee - Etc	- Subandriyo - Dahlan Siamat - Noor Ida K - Slamet Wiyono - Fajar Karyanto	- Braman Setyo - Nasaruddin Umar - Wawan CA



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
27 Maret 2017 27 March 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Head Office of Perum Jamkrindo</i>	• Evaluasi Kinerja Usaha Februari 2017 • Hasil Evaluasi Komite Audit • Hasil Evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha • Lain-lain • <i>February 2017 Business Performance Evaluation</i> • <i>Evaluation Result of Audit Committee</i> • <i>Evaluation Result of Investment and Business Risk Committee</i> • <i>Etc</i>	• Braman Setyo • Subandriyo • Dahlan Siamat • Noor Ida K • Nasaruddin Umar • Wawan CA • Slamet Wiyono	Fajar Karyanto
4 April 2017 4 April 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Head Office of Perum Jamkrindo</i>	Pembahasan Usulan Bakal Calon Direksi Perum Jamkrindo <i>Discussion of Proposed Candidate for the position of Director of Perum Jamkrindo</i>	• Braman Setyo • Dahlan Siamat • Subandriyo • Noor Ida K	• Nasaruddin Umar • Wawan CA • Slamet Wiyono • Fajar Karyanto
26 April 2017 26 April 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Head Office of Perum Jamkrindo</i>	• Evaluasi Kinerja Usaha Maret 2017 • Hasil Evaluasi Komite Audit • Hasil Evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha • Lain-lain • <i>March 2017 Business Performance Evaluation</i> • <i>Evaluation Result of Audit Committee</i> • <i>Evaluation Result of Investment and Business Risk Committee</i> • <i>Etc</i>	• Braman Setyo • Dahlan Siamat • Noor Ida K • Fajar Karyanto • Wawan CA • Slamet Wiyono	• Subandriyo • Nasaruddin Umar

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
26 Mei 2017 26 May 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Head Office of Perum Jamkrindo</i>	- Evaluasi Kinerja Usaha April 2017 - Hasil Evaluasi Komite Audit - Hasil Evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha - Lain-lain <i>April 2017 Business Performance Evaluation</i> <i>Evaluation Result of Audit Committee</i> <i>Evaluation Result of Investment and Business Risk Committee</i> <i>Etc</i>	- Braman Setyo - Dahlan Siamat - Noor Ida K - Diah Natalisa - Subandriyo - Wawan CA - Fajar Karyanto - Slamet Wiyono	-
16 Juni 2017 16 Juni 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Head Office of Perum Jamkrindo</i>	- Evaluasi Kinerja Usaha Mei 2017 - Hasil Evaluasi Komite Audit - Hasil Evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha - Lain-lain <i>May 2017 Business Performance Evaluation</i> <i>Evaluation Result of Audit Committee</i> <i>Evaluation Result of Investment and Business Risk Committee</i> <i>Etc</i>	- Dahlan Siamat - Subandriyo - Noor Ida K - Fajar Karyanto - Slamet Wiyono	- Braman Setyo - Diah Natalisa - Wawan CA



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
28 Juli 2017 28 July 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Head Office of Perum Jamkrindo</i>	• Evaluasi Kinerja Usaha Juni 2017 • Hasil Evaluasi Komite Audit • Hasil Evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha • Lain-lain • <i>June 2017 Business Performance Evaluation</i> • <i>Evaluation Result of Audit Committee</i> • <i>Evaluation Result of Investment and Business Risk Committee</i> • <i>Etc</i>	• Braman Setyo • Subandriyo • Diah Natalisa • Dahlan Siamat • Noor Ida K • Slamet Wiyono • Fajar Karyanto	Wawan CA
29 Agustus 2017 29 August 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Head Office of Perum Jamkrindo</i>	• Evaluasi Kinerja Usaha Juli 2017 • Hasil Evaluasi Komite Audit • Hasil Evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha • Lain-lain • <i>July 2017 Business Performance Evaluation</i> • <i>Evaluation Result of Audit Committee</i> • <i>Evaluation Result of Investment and Business Risk Committee</i> • <i>Etc</i>	• Braman Setyo • Subandriyo • Dahlan Siamat • Diah Natalisa • Noor Ida K • Slamet Wiyono • Wawan CA	Fajar Karyanto

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
28 September 2017 28 September 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Head Office of Perum Jamkrindo	- Evaluasi Kinerja Usaha Agustus 2017 - Hasil Evaluasi Komite Audit - Hasil Evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha - Lain-lain - August 2017 Business Performance Evaluation - Evaluation Result of Audit Committee - Evaluation Result of Investment and Business Risk Committee - Etc	- Braman Setyo - Subandriyo - Dahlan Siamat - Noor Ida K - Wawan CA - Slamet Wiyono - Fajar Karyanto	Diah Natalisa
10 November 2017 10 November 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Head Office of Perum Jamkrindo	Paparan mengenai RKAP Perum Jamkrindo Tahun 2018 Presentation of the Perum Jamkrindo's Workplan and Budget in 2018	- Srl Mulyanto - Dahlan Siamat - Subandriyo - Noor Ida K - Wawan CA - Alvin Nur W - Dody Heriawan - Fajar Karyanto - Slamet Wiyono	Diah Natalisa
21 November 2017 21 November 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Head Office of Perum Jamkrindo	Paparan dan Breakdown Program Kerja Dewan Pengawas dan Komite Exposure and Breakdown of Work Program of the Board of Supervisors and Committee	- Srl Mulyanto - Dahlan Siamat - Subandriyo - Noor Ida K - Diah Natalisa - Slamet Wiyono - Dody Heriawan - Alvin Nur W	-



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
13 Desember 2017 13 December 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Head Office of Perum Jamkrindo	- Paparan tugas Dewan Pengawas dan Organ Pendukung - Rincian Agenda Rapat Dewan Pengawas - Format Risalah Rapat Dewan Pengawas - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha bulan Oktober dan November 2017 - Explanation of duties of the Board of Supervisors and Supporting Organs - Detailed Meeting Agenda of the Board of Supervisors - The Format of Board of Supervisors Minutes of Meeting - October and November 2017 Business Performance Monitoring and Evaluation	- Srl Mulyanto - Dahlan Siamat - Subandriyo - Noor Ida K	- Diah Natalisa - Slamet Wiyono - Dody Heriawan - Alvin Nur W
19 Desember 2017 19 December 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Head Office of Perum Jamkrindo	- Hasil Evaluasi Komite Audit - Hasil Evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha - Lain-lain - Evaluation Result of Audit Committee - Evaluation Result of Investment and Business Risk Committee - Etc	- Srl Mulyanto - Dahlan Siamat - Subandriyo - Noor Ida K - Diah Natalisa - Slamet Wiyono - Dody Heriawan - Alvin Nur W	...
27 Desember 2017 27 December 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Head Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan tentang Klaim dan Piutang Subrogasi Discussion of Subrogation Claims and Receivables	- Srl Mulyanto - Dahlan Siamat - Noor Ida K - Subandriyo - Slamet Wiyono - Dody Heriawan - Alvin Nur W	Diah Natalisa

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dalam
Rapat Internal Dewan PengawasRecapitulation and Attendance of the Board of Supervisors
Member in the Board of Supervisors' Internal Meeting

Dewan Pengawas Board of Supervisors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendance	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % of Attendance
Sri Mulyanto (Ketua Dewan Pengawas)* <i>Sri Mulyanto (Head of the Board of Supervisors)*</i>	3	3	100,00%
Dahlan Siamat (Anggota Dewan Pengawas) <i>Dahlan Siamat (Member of the Board of Supervisors)</i>	12	11	91,67%
Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas) <i>Subandriyo (Member of the Board of Supervisors)</i>	12	11	91,67%
Noor Ida Khomsiyati (Anggota Dewan Pengawas) <i>Noor Ida Khomsiyati (Member of the Board of Supervisors)</i>	12	12	100,00%
Diah Natalisa (Anggota Dewan Pengawas)** <i>Diah Natalisa (Member of the Board of Supervisors) **</i>	8	4	50,00%
Braman Setyo (Ketua Dewan Pengawas-digantikan)* <i>Braman Setyo (Former Head of the Board of Supervisors)*</i>	9	7	77,78%
Nasarudin Umar (Anggota Dewan Pengawas-digantikan)** <i>Nasarudin Umar (Former Member of the Board of Supervisors)</i>	4	2	50,00%
Rata-rata <i>Average</i>			80,16%

*) 27 Oktober 2017, Sri Mulyanto efektif menjabat Ketua Dewan Pengawas menggantikan Braman Setyo.

**) 3 Mei 2017, Diah Natalisa efektif menjabat Anggota Dewan Pengawas menggantikan Nasarudin Umar.

Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi dalam rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi.

*) October 27, 2017, Sri Mulyanto effectively served as the Head of the Board of Supervisors to replace Braman Setyo.

**) May 3, 2017, Diah Natalisa effectively served as a member of the Supervisory Board to replace Nasarudin Umar.

The following are minutes of meetings and attendance of the Supervisory Board and Board of Directors in a joint meeting of the Board of Supervisors and Board of Directors.

Risalah Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi

Minutes of Meeting of the Board of Supervisors with the Board of Directors

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
31 Januari 2017 31 January 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	• Evaluasi Kinerja Bulanan • Pemenuhan Kebijakan • Paparan Direksi tentang Revisi PP No. 41 Tahun 2008 • <i>Monthly Performance Evaluation</i> • <i>Policy Fulfillment</i> • <i>Board of Directors' Presentation on the Revised of Government Regulation no. 41 of 2008</i>	• Braman Setyo • Subandriyo • Nasaruddin Umar • Dahlan Siamat • Noor Ida K • Diding S Anwar • Bakti Prasetyo • Nanang Waskito • R. Sophia Alizsa	I Rusdonobanu
3 Maret 2017 3 March 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	• Hasil Tindak Lanjut Rapat Januari 2017 • Evaluasi Kinerja Usaha Januari 2017 • Pemenuhan Kebijakan • Lain-lain • <i>Follow-up Results of the January 2017 Meeting</i> • <i>January 2017 Business Performance Evaluation</i> • <i>Policy Fulfillment</i> • <i>Etc</i>	• Braman Setyo • Subandriyo • Nasaruddin Umar • Noor Ida K • Diding S Anwar • Bakti Prasetyo • I Rusdonobanu • Nanang Waskito • R. Sophia Alizsa	Dahlan Siamat

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
27 Maret 2017 27 March 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	• Presentasi Direksi terkait Dampak Penyesuaian Pencatatan Pendapatan IJP • Presentasi Hasil Assesmen atas Usulan <i>Longlist</i> Calon Direksi • Hasil Tindak Lanjut Rapat Februari 2017 • Evaluasi Kinerja Usaha Februari 2017 • Pemenuhan Kebijakan • Lain-lain • <i>Presentation of the Board of Directors regarding the Impact of IJP Revenue Adjustment</i> • <i>Presentation of Assessment Results on Longlist Proposal of Directors Candidate</i> • <i>Follow up Results of February 2017 Meeting</i> • <i>February 2017 Business Performance Evaluation</i> • <i>Policy Fulfillment</i> • <i>Etc</i>	• Braman Setyo • Subandriyo • Dahlan Siamat • Nasaruddin Umar • Noor Ida K • Bakti Prasetyo • Diding S Anwar • Nanang Waskito • R. Sophia Alizsa • I Rusdonobanu	-
8 Mei 2017 8 May 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	• Hasil Tindak Lanjut Rapat Maret 2017 • Evaluasi Kinerja Usaha Maret 2017 • Pemenuhan Kebijakan • Lain-lain • <i>Follow up Results of March 2017 Meeting</i> • <i>March 2017 Business Performance Evaluation</i> • <i>Policy Fulfillment</i> • <i>Etc</i>	• Braman Setyo • Dahlan Siamat • Subandriyo • Noor Ida K • Diding S Anwar • I Rusdonobanu • R. Sophia Alizsa • Bakti Prasetyo	Nasaruddin Umar Nanang Waskito



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
2 Juni 2017 2 June 2017		• Hasil Tindak Lanjut Rapat April 2017 • Evaluasi Kinerja Usaha April 2017 • Pemenuhan Kebijakan • Lain-lain • <i>Follow up Results of April 2017 Meeting</i> • <i>April 2017 Business Performance Evaluation</i> • <i>Policy Fulfillment</i> • <i>Etc</i>	• Braman Setyo • Subandriyo • Diah Natalisa • Dahlan Siamat • Noor Ida K • Bakti Prasetyo • Diding S Anwar • I Rusdonobanu • R. Sophia Alizsa	-
21 Juni 2017 21 June 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Office of Perum Jamkrindo</i>	• Hasil Tindak Lanjut Rapat Mei 2017 • Evaluasi Kinerja Usaha Mei 2017 • Pemenuhan Kebijakan • Lain-lain • <i>Follow up Results of May 2017 Meeting</i> • <i>May 2017 Business Performance Evaluation</i> • <i>Policy Fulfillment</i> • <i>Etc</i>	• Braman Setyo • Subandriyo • Dahlan Siamat • Bakti Prasetyo • I Rusdonobanu • R. Sophia Alizsa	• Diah Natalisa • Noor Ida K • Diding S Anwar
7 Agustus 2017 7 August 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Office of Perum Jamkrindo</i>	• Hasil Tindak Lanjut Rapat Juni 2017 • Evaluasi Kinerja Usaha Juni 2017 • Pemenuhan Kebijakan • Lain-lain • <i>Follow up Results of June 2017 Meeting</i> • <i>June 2017 Business Performance Evaluation</i> • <i>Policy Fulfillment</i> • <i>Etc</i>	• Braman Setyo • Subandriyo • Dahlan Siamat • Diah Natalisa • Noor Ida K • Diding S Anwar • Bakti Prasetyo • I Rusdonobanu • Wawan CA • Abdul Bari	R. Sophia Alizsa

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
29 Agustus 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Office of Perum Jamkrindo</i>	- Hasil Tindak Lanjut Rapat Juli 2017 - Evaluasi Kinerja Usaha Juli 2017 - Pemenuhan Kebijakan - Lain-lain <i>Follow up Results of July 2017 Meeting</i> <i>July 2017 Business Performance Evaluation</i> <i>Policy Fulfillment Etc</i>	- Braman Setyo - Dahlan Siamat - Diah Natalisa - Noor Ida K - Subandriyo - I Rusdonobanu - Bakti Prasetyo R. Sophia Alizsa	Diding S Anwar
28 September 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Office of Perum Jamkrindo</i>	- Hasil Tindak Lanjut Rapat Agustus 2017 - Evaluasi Kinerja Usaha Agustus 2017 - Pemenuhan Kebijakan - Lain-lain <i>Follow up Results of August 2017 Meeting</i> <i>August 2017 Business Performance Evaluation</i> <i>Policy Fulfillment Etc</i>	- Braman Setyo - Subandriyo - Dahlan Siamat - Noor Ida K - I Rusdonobanu R. Sophia Alizsa - Amin Mas'udi - Sulis Usdoko	Diah Natalisa
17 Oktober 2017 17 October 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Office of Perum Jamkrindo</i>	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 <i>Discussion of 2018 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)</i>	- Dahlan Siamat - Subandriyo - I Rusdonobanu R. Sophia Alizsa - Amin Mas'udi - Sulis Usdoko - Diah Natalisa - Slamet Wiyono - Wawan CA - Noor Ida K	Braman Setyo
10 November 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo <i>Office of Perum Jamkrindo</i>	Paparan mengenai RKAP Perum Jamkrindo Tahun 2018 <i>Presentation of 2018 Perum Jamkrindo's Work Plan and Budget (RKAP)</i>	- Sri Mulyanto - I Rusdonobanu - Amin Mas'udi - Sulis Usdoko - Dahlan Siamat - Noor Ida K - Subandriyo - Diah Natalisa	R. Sophia Alizsa



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
19 Desember 2017 19 December 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober dan November 2017 - Lain-lain - October and November 2017 Performance Monitoring and Evaluation - Etc.	- Sri Mulyanto - Randi Anto - I Rusdonobanu - Amin Mas'udi - Kadar Wisnuwarman - Sulis Usdoko - Diah Natalisa - Noor Ida K - Subandriyo - Dahlan Siamat	-
27 Desember 2017 27 December 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan tentang Klaim dan Piutang Subrogasi <i>Discussion of Subrogation Claims and Receivables</i>	- Sri Mulyanto - Dahlan Siamat - Noor Ida K - Subandriyo - Slamet Wiyono - Dody Heriawan - Alvin Nur W - Kadar Wisnuwarman - Agus Supriadi	- Randi Anto - I Rusdonobanu - Amin Mas'udi - Sulis Usdoko

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi dalam Rapat Gabungan

Recapitulation and Attendance of Board of Supervisors and Board of Directors in Joint Meeting

Dewan Pengawas dan Direksi Board of Supervisor and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendance	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % of Attendance
Dewan Pengawas			
Sri Mulyanto (Ketua Dewan Pengawas)* Sri Mulyanto (Head of the Board of Supervisors)*	3	2	66,67%
Dahlan Siamat (Anggota Dewan Pengawas) Dahlan Siamat (Member of the Board of Supervisors)	12	11	91,67%
Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas) Subandriyo (Member of the Board of Supervisors)	12	12	100,00%
Noor Ida Khomsiyati (Anggota Dewan Pengawas) Noor Ida Khomsiyati (Member of the Board of Supervisors)	12	11	91,67%
Diah Natalisa (Anggota Dewan Pengawas)** Diah Natalisa (Member of the Board of Supervisors) **	8	6	75,00%
Braman Setyo (Ketua Dewan Pengawas-digantikan)* Braman Setyo (Former Head of the Board of Supervisors)*	9	8	88,89%
Nasarudin Umar (Anggota Dewan Pengawas-digantikan)** Nasarudin Umar (Former Member of the Board of Supervisors)	4	3	75,00%

Dewan Pengawas dan Direksi <i>Board of Supervisor and Board of Directors</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Mandatory Attendance</i>	Jumlah Kehadiran <i>Number of Attendance</i>	% Kehadiran <i>% of Attendance</i>
Direksi <i>Board of Directors</i>			
Randi Anto (Direktur Utama)*** <i>Randi Anto (President Director)***</i>	1	1	100,00%
Amin Masudi (Direktur Bisnis Penjaminan)**** <i>Amin Masudi (Director of Guarantee Business)****</i>	4	4	100,00%
Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan)**** <i>Sulis Usdoko (Director of HRM, General Affairs, and Compliance)****</i>	4	4	100,00%
Kadar Wisnuwarman (Direktur Operasional dan Jaringan)*** <i>Kadar Wisnuwarnaman (Director of Operational and Network)***</i>	1	1	100,00%
I. Rusdonobanu (Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko) <i>I. Rusdonobanu (Director of Finance, Investment, and Risk Management)</i>	12	11	91,67%
Diding S. Anwar (Direktur Utama-digantikan)*** <i>Diding S. Anwar (Former President Director)***</i>	8	6	75,00%
Bakti Prasetyo (Direktur Bisnis Penjaminan-digantikan)**** <i>Bakti Prasetyo (Former Director of Guarantee Business)****</i>	8	8	100,00%
Nanang Waskito (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan-digantikan)**** <i>Nanang Waskito (Former Director of HRM, General Affairs, and Compliance)****</i>	3	3	100,00%
R. Sophia Alizsa (Direktur Operasional dan Jaringan-digantikan)*** <i>R. Sophia Alizsa (Former Director of Operational and Network)***</i>	10	9	90,00%
Rata-rata <i>Average</i>			90,35%

*) 27 Oktober 2017, Sri Mulyanto efektif menjabat Ketua Dewan Pengawas menggantikan Braman Setyo.

**) 3 Mei 2017, Diah Natalisa efektif menjabat Anggota Dewan Pengawas menggantikan Nasarudin Umar.

***) 21 November 2017, Randi Anto efektif menjabat Direktur Utama menggantikan Diding S. Anwar, dan Kadar Wisnuwarman efektif menjabat Direktur Operasional dan Jaringan menggantikan R. Sophia Alizsa.

****) 7 September 2017, Amin Masudi efektif menjabat Direktur Bisnis Penjaminan menggantikan Bakti Prasetyo, dan Sulis Usdoko efektif menjabat Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan menggantikan Nanang Waskito.

*)As per October 27, 2017, Sri Mulyanto effectively served as Head of the Board of Supervisors replacing Braman Setyo.

**)As per May 3, 2017, Diah Natalisa effectively served as a member of the Board of Supervisors replacing Nasarudin Umar.

***)As per November 21, 2017, Randi Anto effectively served as the President Director replacing Diding S. Anwar, and Wisnuwarman effectively served as the Director of Operational and Networks replacing R. Sophia Alizsa.

****)As per September 7, 2017, Amin Masudi served as the Director of Guarantee Business replacing Bakti Prasetyo, and Sulis Usdoko effectively served as the Director of HRM, General Affairs, and Compliance replacing Nanang Waskito.

Rapat Direksi

Sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi No. 56/PerDir/XII/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Rapat Direksi Perum Jamkrindo, ketentuan mengenai Rapat Direksi Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

1. Rapat wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau atas usul dari sesama anggota Direksi dengan menyebutkan agenda atau hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang hadir atau diwakili.

Direksi mengadakan rapat rutin setiap sekali dalam setiap bulan, sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam penjelasan di atas. Di sepanjang 2017, Direksi melaksanakan 12 kali Rapat Internal Direksi. Di samping itu, Direksi menghadiri 13 kali Rapat dengan Dewan Pengawas. Tentang risalah Rapat Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilihat pada bagian pembahasan Rapat Dewan Pengawas.

Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat.

Risalah Rapat Direksi

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
26 Januari 2017 January 26, 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	• Diding S Anwar • Bakti Prasetyo • R. Sophia Alizsa • Nanang Waskito • I Rusdonobanu	-
2 Februari 2017 February 2, 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	• Diding S Anwar • Bakti Prasetyo • R. Sophia Alizsa • Nanang Waskito • I Rusdonobanu	-
3 Februari 2017 February 3, 2017	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	• Diding S Anwar • Bakti Prasetyo • R. Sophia Alizsa • Nanang Waskito • I Rusdonobanu	-

Board of Directors' Meeting

As stipulated in the Directors' Regulation No. 56/PerDir/XII/2013 on Guidelines to Organize Directors' Meeting of Perum Jamkrindo, the provisions on Directors' Meeting of Perum Jamkrindo are as follows:

1. Meetings must be held at least once a month, or at the suggestion of fellow members of the Board of Directors by mentioning the agenda or matters to be discussed.
2. The Board of Directors Meeting shall be chaired by the President Director. If the President Director is unable to attend, the meeting shall be chaired by one of the members of the Board of Directors appointed by other members of the Board of Directors present or represented.

Directors hold regular meetings once every month, as the provisions have been set out in the above explanation. Throughout 2017, the Board of Directors held 12 meeting sessions. In addition, the Board of Directors attended 13 meeting sessions with the Board of Supervisors. The minutes of Meeting of the Board of Supervisors and the Board of Directors can be seen in the discussion section of Meeting of the Board of Supervisors.

The following are minutes of meetings and attendance of the Board of Directors in the meeting.

Minutes of the Board of Directors' Meeting

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee and The Reasons for the Absence
13 Februari 2017 February 13, 2017	Kantor Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	- Diding S Anwar - Bakti Prasetyo R. Sophia Alizsa - Nanang Waskito - I Rusdonobanu	-
7 Maret 2017 March 7, 2017	Kantor Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	- Diding S Anwar - Bakti Prasetyo - I Rusdonobanu R. Sophia Alizsa	Nanang Waskito
5 Mei 2017 May 5, 2017	Kantor Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	- Diding S Anwar - Bakti Prasetyo R. Sophia Alizsa - I Rusdonobanu	-
8 Juni 2017 June 8, 2017	Kantor Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	- Diding S Anwar - Bakti Prasetyo - I Rusdonobanu R. Sophia Alizsa	-
15 Agustus 2017 August 15, 2017	Kantor Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	- Diding S Anwar - Bakti Prasetyo - I Rusdonobanu R. Sophia Alizsa	-
7 September 2017 September 7, 2017	Kantor Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	- I Rusdonobanu R. Sophia Alizsa - Sulis Usdoko - Amin Mas'udi	-
18 September 2017 September 18, 2017	Kantor Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	- I Rusdonobanu R. Sophia Alizsa - Sulis Usdoko - Amin Mas'udi	-
16 Oktober 2017 October 16, 2017	Kantor Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	- I Rusdonobanu R. Sophia Alizsa - Amin Mas'udi	Sulis Usdoko
19 Desember 2017 December 19, 2017	Kantor Perum Jamkrindo Office of Perum Jamkrindo	Pembahasan Hal-Hal Strategis Discussion on Strategic Matters	- Randi Anto - Sulis Usdoko	Amin Mas'udi I Rusdonobanu Kadar Wisnuwarman

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat

Recapitulation and Attendance of the Board of Directors in the Meeting

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendance	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % of Attendance
Randi Anto (Direktur Utama)* (President Director)*	1	1	100,00%
Amin Masudi (Direktur Bisnis Penjaminan)** (Director of Guarantee Business)**	4	3	75,00%



Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendance	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % of Attendance
Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan)** (Director of HRM, General Affairs, and Compliance)**	4	3	75,00%
Kadar Wisnuwarman (Direktur Operasional dan Jaringan)* (Director of Operational and Network)*	1	-	0,00%
I. Rusdonobanu (Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Investment, and Risk Management)	12	11	91,67%
Diding S. Anwar (Direktur Utama-digantikan)* (Former President Director)*	11	8	72,73%
Bakti Prasetyo (Direktur Bisnis Penjaminan-digantikan)** (Former Director of Guarantee Business)**	8	8	100,00%
Nanang Waskito (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan-digantikan)** (Former Director of HRM, General Affairs, and Compliance)**	8	5	62,50%
R. Sophia Alizsa (Direktur Operasional dan Jaringan-digantikan)* (Former Director of Operational and Network)*	11	11	100,00%
Rata-rata Average			75,21%

*) 21 November 2017, Randi Anto efektif menjabat Direktur Utama menggantikan Diding S. Anwar, dan Kadar Wisnuwarman efektif menjabat Direktur Operasional dan Jaringan menggantikan R. Sophia Alizsa.

**) 7 September 2017, Amin Masudi efektif menjabat Direktur Bisnis Penjaminan menggantikan Bakti Prasetyo, dan Sulis Usdoko efektif menjabat Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan menggantikan Nanang Waskito.

*) As per November 21, 2017, Randi Anto effectively served as the President Director replacing Diding S. Anwar, and Wisnuwarman effectively served as the Director of Operational and Networks replacing R. Sophia Alizsa.

**) As per September 7, 2017, Amin Masudi served as the Director of Guarantee Business replacing Bakti Prasetyo, and Sulis Usdoko effectively served as the Director of HRM, General Affairs, and Compliance replacing Nanang Waskito.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Agar Dewan Pengawas dan Direksi dapat selalu memahami perkembangan hal-hal terkait industri penjaminan, Dewan Pengawas dan Direksi mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas dan Direksi di sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut.

PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCY OF THE BOARD OF SUPERVISORS AND DIRECTORS

In order for the Board of Supervisors and Board of Directors always be able to understand the development of matters related to the guarantee industry, the Board of Supervisors Board and the Board of Directors shall follow competency development programs in the form of seminars, workshops, or other activities which enhance their knowledge and competence. Competence development activities that are followed by the Board of Supervisors and Board of Directors throughout 2017 are as follows.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Event Organizer
Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>				
Subandriyo	Pelatihan Luar Negeri <i>Overseas Training</i>	<i>Credit Supplementation System's Accomplishment and It's Outlook</i>	Taiwan, 13-17 November 2017 <i>Taiwan, 13-17 November 2017</i>	Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC Conference)-Taiwan SMEG
Noor Ida Khomsiyati	Pelatihan Luar Negeri <i>Overseas Training</i>	<i>Credit Supplementation System's Accomplishment and It's Outlook</i>	Taiwan, 13-17 November 2017 <i>Taiwan, 13-17 November 2017</i>	Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC Conference)-Taiwan SMEG
Diah Natalisa	Pelatihan Luar Negeri <i>Overseas Training</i>	<i>Credit Supplementation System's Accomplishment and It's Outlook</i>	Taiwan, 13-17 November 2017 <i>Taiwan, 13-17 November 2017</i>	Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC Conference)-Taiwan SMEG
Direksi <i>Board of Directors</i>				
Diding S. Anwar (Direktur Utama-digantikan) <i>(Former President Director)</i>	Pendidikan & Sertifikasi Luar Negeri <i>Overseas Education & Certification</i>	<i>The Malaysian Insurance Institute-Fellowship of the Malaysian Insurance Institute (FMII) Senior Status Route</i>	Malaysia, 1-2 April 2017 <i>Malaysia, 1-2 April 2017</i>	Malaysian Insurance Institute
Nanang Waskito (Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan-digantikan) <i>(Former Director of HRM, General Affairs, and Compliance)</i>	Pendidikan & Sertifikasi Luar Negeri <i>Overseas Education & Certification</i>	<i>The Malaysian Insurance Institute-Fellowship of the Malaysian Insurance Institute (FMII) Senior Status Route</i>	Malaysia, 1-2 April 2017 <i>Malaysia, 1-2 April 2017</i>	Malaysian Insurance Institute
Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan-menggantikan) <i>(Current Director of HRM, General Affairs, and Compliance)</i>	Sertifikasi <i>Certification</i>	<i>Certified Professional Human Resources</i>	Jakarta, 16 - 19 Oktober 2017 <i>Jakarta, 16 - 19 October 2017</i>	Quantum Quality International



Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

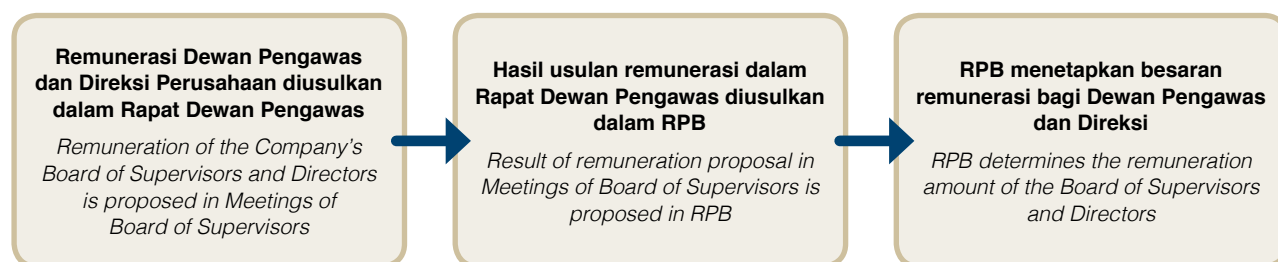
Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan mengacu kepada Keputusan Kementerian BUMN selaku perwakilan Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. 04/MBU/2014, tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan diusulkan dalam Rapat Dewan Pengawas, dengan membahas pertimbangan usulan, hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya. Dewan Pengawas dan Direksi mengusulkan kepada Pemilik Modal melalui RPB, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri di atas dan kemampuan Perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RPB.

Remuneration Of The Board Of Supervisors And Directors

Procedure for the Proposal to the Establishment of Remuneration of the Board of Supervisors and Board of Directors

The establishment of remuneration for the Company's Board of Supervisors and Board of Directors refers to the Decree of Ministry of SOE as the Equity Owners of Perum Jamkrindo No. 04/MBU/2014 dated 10 March 2014 on Guidelines to Determine Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprise. The Remuneration of the Company's Board of Supervisors and Directors is proposed in the Meeting of Board of Supervisors, discussing the proposed considerations, survey results with similar industries and other sectors. Board of Supervisors and Directors propose to the Equity Owners through RPB, keeping in mind the above Ministerial Regulations and the Company's capabilities, to further be determined in RPB.



Faktor perhitungan atas usulan besaran remunerasi:

- Pertimbangan usulan yang ada
- Hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya
- Kemampuan Perusahaan

Calculated factors regarding the proposed remuneration amount:

- Considerations on the existing proposal
- Survey result with similar industries and other sectors
- The Company's capability

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**Remuneration Structure of Board of Supervisors and Board of Directors**

Berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN No. 04/MBU/2014, struktur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jamkrindo terdiri dari:

Based on the Decision of the Ministry of SOEs. No. 04 / MBU / 2014, the structure of the remuneration of the Board of Supervisors and Board of Directors of Perum Jamkrindo consists of:

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas Remuneration Structure of Board of Supervisors	
Honorarium <i>Honorarium</i>	Dewan Pengawas diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Honorarium Ketua Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama 2. Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 90% dari Ketua Dewan Pengawas <i>The Board of Supervisors is given the honorarium with the following conditions:</i> 1. <i>Honorarium of the Head of the Board of Supervisors shall be determined by the composition of the position factor of 45% of the salary of the President Director</i> 2. <i>Honorarium of members of the Board of Supervisors is determined by the composition of the position factor of 90% of the Head of the Board of Supervisors</i>
Tunjangan <i>Allowances</i>	• Tunjangan Hari Raya Keagamaan • Tunjangan Komunikasi • Tunjangan Santunan Purna Jabatan • Tunjangan Pakaian • Tunjangan Transportasi • <i>Allowance for Religious Holiday</i> • <i>Allowance for Communication</i> • <i>Allowance for Post-Employment</i> • <i>Allowance for Clothing</i> • <i>Allowance for Transportation</i>
Fasilitas <i>Facilities</i>	• Pemeliharaan Kesehatan • Kepesertaan dan Perkumpulan Profesi • Bantuan Hukum • <i>Health Maintenance</i> • <i>Membership and Profession Association</i> • <i>Legal Aid</i>
Tantiem	Pemberian tantiem bagi Dewan Pengawas juga mengacu pada ketentuan di atas antara lain: • Tantiem diberikan dalam hal BUMN memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan • Tantiem diberikan apabila pencapaian Ukuran Kinerja Utama (KPI) lebih dari 70% dan tingkat kesehatan dengan nilai lebih dari 70% <i>The provision of tantiem for the Board of Supervisors also refers to the above provisions, among others:</i> <i>Tantiem is given in the event that the SOE obtains profit in the relevant fiscal year</i> <i>Tantiem is given if the achievement of Key Performance Indicators (KPI) is more than 70% and business health level is valued at more than 70%</i>
Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure of Board of Directors	
Gaji <i>Salary</i>	Anggota Direksi BUMN diberikan gaji dengan ketentuan sebagai berikut 1. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri 2. Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama <i>Members of SOE Directors are paid a salary with the following conditions:</i> <i>The salary of the President Director is determined by using the internal guideline stipulated by the Minister</i> <i>The salary of other members of the Board of Directors is determined by the composition of position factor of 90% of the salary of the President Director</i>



Struktur Remunerasi Dewan Pengawas Remuneration Structure of Board of Supervisors

Tunjangan Allowances

Tunjangan yang terdiri atas:

1. Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji
2. Tunjangan perumahan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% dari Gaji dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp27.500.000 untuk wilayah Ibu Kota
 - Perusahaan tidak memberikan fasilitas rumah jabatan bagi Direksi
3. Tunjangan komunikasi bagi Direksi sebesar pemakaian (*at cost*)
4. Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti)
 - Premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari Gaji dalam satu tahun
 - Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
 - Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian
5. Tunjangan pakaian sesuai dengan yang dianggarkan di RKAP
6. Tunjangan cuti tahunan diberikan setiap tahun sebanyak 1 (satu) kali Gaji/Honorarium, setelah Direksi bekerja selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut
7. Tunjangan cuti besar diberikan paling banyak 2 (dua) kali Gaji/Honorarium per bulan apabila Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan. Selama tahun buku 2014 Perusahaan tidak mengeluarkan Tunjangan Cuti Besar
8. Pajak tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan

Allowances consist of:

1. *Religious holiday allowance is given in the amount of 1 (one) month Salary*
2. *Housing allowance is provided under the following conditions;*
 - *Housing allowance including utility fee is provided on a monthly basis of 40% of the Salary with a maximum amount of IDR27,500,000.00 for the Capital Region*
 - *The Company does not provide official housing facilities for the Directors*
3. *Communication allowance for the Directors is at cost*
4. *Post-employment insurance is provided under the following conditions;*
 - *Post-employment insurance is provided during the term of office (from the beginning of appointment to termination)*
 - *Premium borne by the company is at most 25% of the one year salary*
 - *The selection of programs for post-employment insurance is determined by each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Supervisors of SOE*
 - *The provision of premiums, fees/subscriptions, or other terms relevant to post-employment insurance should include a premium for accident and death insurance*
5. *Allowance for clothing shall be in accordance with the budget in RKAP*
6. *Annual leave allowance is given annually for 1 (one) month Salary/Honorarium; it is given after the Directors have worked for a minimum of 6 (six) consecutive months for the SOE*
7. *A major leave allowance is given at most 2 (two) months Salary/Honorarium; it is given after the Directors have worked for 3 (three) consecutive years in one period of office. During 2014 fiscal year, the Company did not issue any major leave allowances*
8. *The allowance tax is borne by the Company*

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas Remuneration Structure of Board of Supervisors

Fasilitas Facilities

1. Fasilitas kendaraan bagi Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta pemeliharaan dan operasionalnya. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS. Fasilitas kendaraan ini harus dikembalikan kepada Perusahaan dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat
2. Perusahaan telah memberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas kepada seluruh Direksi beserta biaya pemeliharaan dan operasional sehingga tidak diberikan lagi tunjangan transportasi
 - Fasilitas kesehatan;
 - Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan
 - Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan
 - Fasilitas kesehatan diberikan berupa:
 - a. Rawat jalan dan obat
 - b. Rawat inap dan obat
 - c. Medical check up
3. Fasilitas uang pangkal dan iuran tahunan paling banyak 2 (dua) perkumpulan profesi
4. Fasilitas biaya representasi Direksi mewakili Perusahaan sebesar *at cost* yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan batas maksimumnya ditetapkan oleh RUPS
5. Fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan
6. Pajak yang timbul akibat pemberian fasilitas ditanggung dan menjadi beban perusahaan

Vehicle facility for the Directors is 1 (one) unit of official vehicle and its maintenance and operations. Specifications and standards of vehicles are determined by GMS. The vehicle facility must be returned to the Company within 30 (thirty) days after the Directors end the term of office

The Company has provided the facility of 1 (one) unit of official vehicle to all Directors including the maintenance and operational costs. For that reason, transportation allowance is no longer provided

Health facilities;

Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses

Health facilities are given to members of Directors and a wife/husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 with the provisions that if the child is not yet 25 years but is married or have previously worked, the said child is not entitled to receive the health facilities

Health facilities are provided in the forms of:

Outpatient and medicines

Inpatient and medicines

Medical check up

Facilities of initial fee and annual fee of at most 2 (two) associations of professions

Directors' representation cost representing the Company is at cost adjusted to the Company's capability and the maximum limit is determined by GMS

Legal aid facility in the event of any action/deeds for and on behalf of a position related to the purpose and objective and business activities of the company

Taxes incurred as a result of the facility are borne by and become the expense of the company

Tantiem Tantiem

1. Jumlahnya ditetapkan sesuai RUPS yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan
2. Besarnya tantiem bagi anggota Direksi sebesar 90% dari Direktur Utama
3. Pajak yang timbul atas tantiem direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi

1. The amount is determined in GMS, which is adjusted to the KPI achievement and the Company's sound level.

2. Tantiem amount for members of Directors is 90% of that of the President Director.

3. Taxes incurred as a result of Directors' tantiem are borne by and become the expense of the company



Indikator untuk Penetapan Remunerasi Direktur Utama dan Pengesahannya

Penetapan remunerasi yang berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini:

1. Pendapatan Perusahaan.
2. Aktiva Perusahaan.
3. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
4. Tingkat inflasi.
5. Faktor-faktor lain yang relevan, termasuk di antaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Untuk penetapan remunerasi yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Pencapaian target.
2. Tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perusahaan.
3. Faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*), termasuk di antaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Sesuai dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-16/D5.MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Tahun 2017, besarnya gaji yang diterima Direktur Utama untuk tahun 2017 sebesar Rp120.000.000. Gaji Direktur Utama tersebut menjadi acuan bagi besaran perhitungan gaji Dewan Pengawas dan Direksi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/06/2016 Jo. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Indicators for the Establishment of Remuneration of the President Director and its Ratification

The establishment of remuneration in the form of salary/honorarium, allowances and facilities are fixed by considering several factors below:

1. Company's Revenue.
2. Company's Assets.
3. Company's Conditions and Financial Capabilities.
4. Inflation rate.
5. Other relevant factors, including the prevailing remuneration rate in similar industries.

The establishment of remuneration in the form of allowances and tantiems, which are variable in nature, is done by considering several factors, namely:

1. Targets achievement.
2. Company's financial capability and financial health level.
3. Other relevant factors (*merit system*), including among others the level of remuneration generally accepted in similar industries.

In accordance with Letter of the Ministry of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-16 / D5.MBU / 06/2017 dated June 21, 2017, concerning the Submission of Remuneration Establishment of the Board of Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo in 2017, the amount of salary received by the President Director for 2017 is IDR120,000,000. The salary of the President Director shall be a reference for the amount of salaries of the Board of Supervisors and Board of Directors, as stated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises. PER-2 / MBU / 06/2016 Jo. PER-04 / MBU / 2014 concerning Guidelines for Stipulation of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Supervisors of SOE.

Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2017

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Pengawas di sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Total remuneration given by The Company to the Board of Directors in 2017 is as follows:

The Amount of Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2017 is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas Tahun 2017**The Amount of Remuneration of the Board of Supervisors in 2017**

No	Uraian Description	Ketua Dewan Pengawas Head of the Board of Supervisors (Rp) (IDR)	Anggota Dewan Pengawas Member of the Board of Supervisors (Rp) (IDR)
1	Honorarium <i>Honorarium/Salary</i>	54.000.000	48.600.000
2	THR per Tahun <i>Religious Holiday Allowance (THR) per Year</i>	54.000.000	48.600.000
3	Komunikasi per bulan <i>Communication allowance per month</i>	500.000	500.000
4	Transportasi per bulan <i>Transportation allowance per month</i>	10.800.000	9.720.000
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) bulan per Dewan Pengawas <i>Total Remuneration within 1 (one) month per member of Board of Supervisors</i>	65.300.000	58.820.000
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun per Dewan Pengawas <i>Total Remuneration within 1 (one) year per member of Board of Supervisors</i>	783.600.000	705.840.000
	Jumlah Dewan Pengawas <i>Number of Board of Supervisors</i>	1 orang <i>1 person</i>	4 orang <i>4 people</i>
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk seluruh Dewan Pengawas <i>Total Remuneration within 1 (one) year for all members Board of Supervisors</i>	783.600.000	2.823.360.000
	Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas Tahun 2017 <i>Total Remuneration of the Board of Supervisors in 2017</i>		3.606.960.000

Untuk besaran remunerasi yang diterima Direksi di sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Total remuneration given by The Company to the Board of Directors in 2017 is as follows:

Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2017

The Amount of Remuneration of the Board of Directors in 2017

No	Uraian Description	Direktur Utama President Director (Rp) (IDR)	Direksi Lain Other Directors (Rp) (IDR)
1	Gaji Salary	120.000.000	108.000.000
2	THR per Tahun Religious Holiday Allowance (THR) per Year	120.000.000	108.000.000
3	Komunikasi per bulan Communication allowance per month	500.000	500.000
4	Pakaian per tahun*** Clothing allowance per year***	-	-
5	Tunjangan perumahan per bulan* Housing allowance per month*	27.500.000	27.500.000
	Jumlah Gaji dan Tunjangan dalam 1 (satu) bulan Total Salaries and Allowances in 1 (one) month	148.000.000	136.000.000
	Jumlah Gaji dan Tunjangan dalam 1 (satu) tahun Total Salaries and Allowances in 1 (one) year	1.776.000.000	1.632.000.000
6	Tantiem / Bonus TB 2015 sebelum PPh 21** Tantiem/Bonus TB 2015 before Income Tax Article 21**	3.422.565.717	3.080.309.145
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun per Direksi Total Remuneration within 1 (one) year per member of the Board of Directors	1.776.000.000	1.632.000.000
	Jumlah Direksi Number of Board of Directors	1 orang 1 person	4 orang 4 people
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk seluruh Direksi Total Remuneration within 1 (one) year per member of the Board of Directors	1.776.000.000	6.528.000.000
	Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2017 The Amount of Remuneration of Board of Directors in 2017		8.304.000.000

*) Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

**) Sesuai Peraturan Menteri BUMN pajak tantiem/bonus yang ditanggung oleh Ybs./penerima.

***) Dalam bentuk natura, at cost

*) In accordance with SOE Minister Regulation no. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Stipulation of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Supervisors of SOE.

**) In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of tantiem/bonus paid by the party concerned/recipient.

***) In the form of natura, at cost

Jumlah remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

The Amount of Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2017 is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2017

The Amount of Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2017

Uraian Description	Jumlah Amount (Rp) (IDR)
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas <i>Total Remuneration of Board of Supervisors</i>	3.606.960.000
Jumlah Remunerasi Direksi <i>Total Remuneration of the Board of Directors</i>	8.304.000.000
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2017 <i>Total Remuneration of the Board of Supervisors and Directors in 2017</i>	11.910.960.000

Transparansi Hubungan Hubungan Afiliasi Antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal

Transparency Of Affiliated Relationship Between The Board Of Supervisors, The Board Of Directors, And The Equity Owner

Tabel di bawah ini menunjukkan hubungan usaha dan hubungan afiliasi antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal. Bentuk hubungan usaha termasuk di antaranya hutang-piutang, kerja sama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya.

The table below shows the business relationship and affiliation relationship between the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the Equity Owners. The forms of business relationships include among others accounts payable, business cooperation, etc. The form of affiliate relationship, on the other hand, includes special relationships primarily due to blood-related relationships such as spouses/children/parents/ siblings/in-laws, etc.

	Hubungan Afiliasi Dengan Affiliation Relationship With		
	Dewan Pengawas Board of Supervisors	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Equity Owners
Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>			
Sri Mulyanto (Ketua Dewan Pengawas) <i>(Head of the Board of Supervisors)</i>	x	x	x
Dahlan Siamat (Anggota Dewan Pengawas) <i>(Member of the Board of Supervisors)</i>	x	x	x
Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas) <i>(Member of the Board of Supervisors)</i>	x	x	x
Noor Ida Khomsiyati (Anggota Dewan Pengawas) <i>(Member of the Board of Supervisors)</i>	x	x	x



	Hubungan Afiliasi Dengan Affiliation Relationship With		
	Dewan Pengawas Board of Supervisors	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Equity Owners
Diah Natalisa (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	x	x	x
Braman Setyo (Ketua Dewan Pengawas-digantikan) (Former Head of the Board of Supervisors)	x	x	x
Nasarudin Umar (Anggota Dewan Pengawas-digantikan) (Former Member of the Board of Supervisors)	x	x	x
Direksi Board of Directors			
Randi Anto (Direktur Utama) (President Director)	x	x	x
Amin Masudi (Direktur Bisnis Penjaminan) (Director of Guarantee Business)	x	x	x
Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan) (Director of HRM, General Affairs, and Compliance)	x	x	x
Kadar Wisnuwarman (Direktur Operasional dan Jaringan) (Director of Operational and Network)	x	x	x
I. Rusdonobanu (Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Investment, and Risk Management)	x	x	x
Diding S. Anwar (Direktur Utama-digantikan) (Former President Director)	x	x	x
Bakti Prasetyo (Direktur Bisnis Penjaminan-digantikan) (Former Director of Guarantee Business)	x	x	x
Nanang Waskito (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan-digantikan) (Former Director of HRM, General Affairs, and Compliance)	x	x	x
R. Sophia Alizsa (Direktur Operasional dan Jaringan-digantikan) (Former Director of Operational and Network)	x	x	x

v = ada / x = tidak ada

v = there is a relationship / x = there isn't a relationship

Untuk susunan dan komposisi Dewan Pengawas dan Direksi tahun 2017 tidak terdapat hubungan afiliasi dan hubungan usaha, baik di antara Dewan Pengawas, Direksi, maupun dengan Pemilik Modal.

For the composition and structure of 2017 Board of Supervisors and Board of Directors, there is no affiliation and business relationship between the Board of Supervisors, the Board of Directors or the Equity Owners.

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada perusahaan lain di luar Perum Jamkrindo periode tahun 2017 sebagai berikut:

Transparency of Concurrent Position of the Board of Supervisors and board of Directors

The management relationship of the Board of Supervisors and Board of Directors to other companies outside Perum Jamkrindo for the period of 2017 is as follows:

	Kepengurusan pada Perusahaan Lain Management of Other Company	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors
Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>		
Sri Mulyanto (Ketua Dewan Pengawas) (Head of the Board of Supervisors)	x	x
Dahlan Siamat (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	x	x
Subandriyo (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	x	x
Noor Ida Khomsiyati (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	x	x
Diah Natalisa (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Board of Supervisors)	x	x
Braman Setyo (Ketua Dewan Pengawas-digantikan) (Former Head of the Board of Supervisors)	x	x
Nasarudin Umar (Anggota Dewan Pengawas-digantikan) (Former Member of the Board of Supervisors)	x	x
Direksi <i>Board of Directors</i>		
Randi Anto (Direktur Utama) (President Director)	x	x
Amin Masudi (Direktur Bisnis Penjaminan) (Director of Guarantee Business)	x	x
Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan) (Director of HRM, General Affairs, and Compliance)	x	x
Kadar Wisnuwarman (Direktur Operasional dan Jaringan) (Director of Operational and Network)	x	x
I. Rusdonobanu (Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Investment, and Risk Management)	x	x



Kepengurusan pada Perusahaan Lain Management of Other Company	
Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors

Diding S. Anwar (Direktur Utama-digantikan) (Former President Director)	x	x
Bakti Prasetyo (Direktur Bisnis Penjaminan-digantikan) (Former Director of Guarantee Business)	x	x
Nanang Waskito (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan-digantikan) (Former Director of HRM, General Affairs, and Compliance)	x	x
R. Sophia Alizsa (Direktur Operasional dan Jaringan-digantikan) (Former Director of Operational and Network)	x	x

v = ada / x = tidak ada

v = there is a relationship / x = there isn't a relationship

ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS

Sekretaris Dewan Pengawas

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang berfungsi melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan PER-12/MBU/2012 bagian ketiga Pasal 5 masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-05/DP-JAMKRINDO/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas dipercayakan kepada Alvin Nur Widjajanti.

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Secretary To The Board Of Supervisors

In order to assist in the smooth implementation of its duties, the Board of Supervisors is assisted by a Secretary to the Board of Supervisors who functions to carry out the Company's protocol and secretariat activities.

Terms of Office

Based on PER-12 / MBU / 2012 Section 3 of Article 5, the term of office of Secretary and Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners/Supervisors Board has been stipulated by the Board of Commissioners/Supervisors to be a maximum of 3 (three) years and may be re-appointed for a maximum of 2 (two) years without reducing the right of the Board of Commissioners/Supervisors to terminate the appointment at any time.

Secretary Officer to the Board of Supervisors

Secretary to the Board of Supervisors is appointed and dismissed by the Board of Supervisors. Based on Board of Supervisors' Decree No. KEP-05/DP-JAMKRINDO/XI/2017 dated 1 November 2017 on the Appointment and Dismissal of Secretary to the Board of Supervisors of Public Corporation of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia), Secretary Officer to the Board of Supervisors is assigned to Alvin Nur Widjajanti.

Alvin Nur Widjajanti

Sekretaris Dewan Pengawas

Secretary to the Board of Supervisors

Periode Jabatan: 1 November 2017 - 31 Oktober 2020

Term of Office: 1 November 2017 – October 31 2020

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia

Usia 48 tahun

Kelahiran Jakarta, 5 November 1959

Personal Data

Indonesia Citizen

48 Years old

Born in Jakarta, 5 November 1959

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Domiciled in

Bekasi, West Java, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta (1995), dan Pasca Sarjana (S2) Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997)

Education

Bachelor Degree (S1) majoring in Civil Engineering from Trisakti University, Jakarta (1995), and Master (S2) in Management from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997)

Riwayat Profesi

Telah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada beberapa BUMN, di antaranya PT Taman Wisata Candi BP dan RB (2003-2013), PT Perikanan Nusantara (2008-2013), PT Asuransi Jiwasraya (2013-2017). Sejak 2015 menjabat sebagai Kepala Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I, Kementerian BUMN.

History of Profession

Has been Secretary of the Board of Commissioners/Supervisors in several SOEs, including PT Taman Wisata Candi BP and RB (2003-2013), PT Perikanan Nusantara (2008-2013), PT Asuransi Jiwasraya (2013-2017). Since 2015, he has served as Head of Financial Services Sub-Division, Survey Services, and Consultant I, Ministry of SOE.

Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Pelaksanaan kegiatan meliputi komunikasi Perusahaan, protokoler, kesekretariatan, administrasi persuratan, humas dalam rangka pengelolaan Perusahaan, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan komunikasi perusahaan, termasuk penyusunan strategi dan perencanaan kegiatan komunikasi Dewan Pengawas.
2. Melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.
3. Melaksanakan kegiatan administrasi dan memfasilitasi Dewan Pengawas dengan Pihak Eksternal.
4. Melaksanakan kegiatan agenda rapat Dewan Pengawas dan RPB.
5. Melaksanakan kegiatan humas dalam pertemuan dengan pihak internal maupun eksternal terkait kepentingan Perusahaan.
6. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen/kearsipan Perusahaan.

Duties of Secretary to the Board of Supervisors

Implementation of activities includes Company communications, protocols, secretariats, correspondence administration, public relations in the framework of the management of the Company, among others:

1. Carry out corporate communication activities, including the preparation of strategies and planning of communication activities of the Board of Supervisors.
2. Implement the Company's protocol and secretarial activities.
3. Carry out administrative activities and facilitate the Board of Supervisors with External Parties.
4. Carry out the agenda activities of the Board of Supervisors and RPB meetings.
5. Conduct public relations activities in meetings with internal and external parties related to the interests of the Company.
6. Carry out Company document management/archives activities.

7. Menyusun materi dan Berita Acara Komite Audit Dan Komite Risiko Usaha sesuai bidang tugasnya.
8. Melaksanakan dan mengawasi penerapan *Good Corporate Governance* di bidang tugasnya.
9. Melaksanakan kegiatan Manajemen Risiko sesuai bidang tugasnya.
10. Melaksanakan, memelihara dan mengolah *data base* sesuai bidang tugasnya.
11. Melakukan penatausahaan berkas/dokumentasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
12. Menyusun laporan kegiatan dan berkala di bidang tugasnya.
13. Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal serta menindaklanjuti rekomendasi Auditor tersebut sesuai bidang tugasnya.
14. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja seluruh staf dan pelaksana pada bagian Sekretariat & Humas.
15. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan pelaksana bagian Sekretariat dan Humas.

7. Prepare materials and Minutes of Audit Committee and Business Risk Committee according to their area of duty.
8. Implement and supervise the implementation of Good Corporate Governance in its area of duty.
9. Conduct Risk Management activities according to their area of duty.
10. Implement, maintain, and process data base according to the area of duty.
11. Administer files/documentation related to the field of duty.
12. Prepare an activity report periodically in the field of duty.
13. Provide data and information for internal/external examination purpose as well as follow up on the Auditor's recommendations according to their field of duty.
14. Foster, direct, and assess the performance of all staffs and implementers in the Secretariat & Public Relations division.
15. Supervise the implementation of the duties of the Board of Directors and the implementers of the Secretariat and Public Relations Division.

Kebijakan Remunerasi bagi Sekretaris Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas No. Kep-05/DP/Jamkrindo/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, memutuskan:

1. Honorarium per bulan sebesar Rp18.000.000
2. Tunjangan Transportasi Rp1.300.000

Remuneration Policy for the Secretary to Board of Supervisors

Based on the Decree of the Board of Supervisors No. KEP-05/DP/JAMKRINDO/ XI/2017 dated 1 November 2017 on the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Supervisors of the Indonesian Credit Guarantee Corporation (Perum Jamkrindo), it is stipulated that:

1. Honorarium per month of IDR18,000,000
2. Transportation Allowance is IDR1,300,000

Remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas

No	Uraian Description	Jumlah Amount (Rp) (IDR)
1	Honorarium <i>Honorarium/Salary</i>	18.000.000
2	THR per Tahun <i>Religious Holiday Allowance (THR) per Year</i>	18.000.000
3	Transportasi per bulan <i>Transportation allowance per month</i>	1.300.000
Jumlah dalam 1 (satu) bulan <i>Total Amount in 1 (one) month</i>		19.300.000
Jumlah dalam 1 (satu) tahun <i>Total Amount in 1 (one) year</i>		231.600.000

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

Kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas selama tahun 2017 antara lain:

- Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Pengawas;
- Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
- Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;
- Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Pengawas;
- Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Sekretaris Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat melaksanakan tugas lain berupa:

- Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
- Memberikan Informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
- Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN; dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

Komite Audit senantiasa menjalankan tugasnya secara independen dalam membantu Dewan Pengawas memantau kinerja Unit Audit Internal serta Auditor Eksternal yang ditunjuk. Oleh karena itu, Komite Audit diberikan kewenangan untuk membangun hubungan dengan kedua institusi tersebut dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas. Hasil pengawasan berupa temuan maupun rekomendasi dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dewan Pengawas dalam hal pengambilan keputusan.

Brief Report of Secretariat Activities in 2017

The activities of the Secretariat of the Board of Supervisors in 2017 include:

- Preparing for meetings, including meeting material/ briefing sheets for the Board of Supervisors;
- Making the minute of meeting of the Board of Supervisors in accordance with the provisions of the articles of association of the Company;
- Administering the documents of the Board of Supervisors, be it incoming mail, outgoing mail, minutes of meetings, or other documents;
- Drafting the Work Plan and Budget of the Board of Supervisors;
- Drafting the Board of Supervisors' Reports;
- Perform other duties from the Board of Supervisors.

In addition to performing the above-mentioned duties, the Secretary to the Board of Supervisors as the head of the Secretariat shall carry out other tasks in the form of:

- Ensure that the Board of Supervisors complies with the prevailing laws and regulations and applies GCG principles; provide the information required by the Board of Supervisors periodically and/or at any time to be reviewed;
- Provide the information required by the Board of Supervisors periodically and/or at any time to be reviewed;
- Act as a liaison officer between the Board of Supervisors with other parties.
- Performance Assessment by the Board of Supervisors

Audit Committee

The establishment of the Audit Committee and the implementation of its duties and responsibilities are based on Government Regulation No. 41 of 2008 concerning Public Corporation (Perum) of Credit Guarantee of Indonesia, Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOE; and Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2006 concerning the Audit Committee for SOE.

The Audit Committee continues to perform its duties independently in assisting the Board of Supervisors to monitor the performance of the Internal Audit Unit as well as the designated External Auditor. Therefore, the Audit Committee is authorized to build relationships with both institutions and submit reports to the Board of Supervisors. The results of supervision in the form of findings and recommendations can be taken into consideration by the Board of Supervisors in the case of decision making.

Struktur, Keanggotaan, Integritas dan Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Struktur, keanggotaan, dan tugas Komite Audit Perum Jamkrindo diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari anggota Dewan Pengawas. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan yang memiliki integritas yang baik dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan. Selain itu, anggota Komite Audit Perum Jamkrindo mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan serta memahami industri bisnis Perum Jamkrindo. Anggota Komite Audit juga tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan Perum Jamkrindo.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan dan Profil Anggota Komite Audit

Di tahun 2017 terjadi pergantian keanggotaan Komite Audit. Kronologi pergantian susunan Komite Audit, dan susunan Komite Audit per 31 Desember 2017 dapat dilihat di bawah ini.

Kronologi Pergantian Susunan Komite Audit di Sepanjang Tahun 2017

1 Januari - 15 November 2017 <i>January 1 - November 15, 2017</i>	15 November - 31 Desember 2017 <i>November 15 - December 31, 2017</i>	Keterangan <i>Description</i>
Dahlan Siamat (Ketua Komite Audit/Anggota Dewan Pengawas) <i>(Head of Audit Committee/Member of the Board of Supervisor)</i>	Dahlan Siamat (Ketua Komite Audit/ Anggota Dewan Pengawas) <i>(Head of Audit Committee/ Member of the Board of Supervisor)</i>	-
Fajar Karyanto (Anggota Komite Audit) <i>(Member of Audit Committee)</i>		Fajar Karyanto efektif tidak lagi menjabat Anggota Komite Audit sejak 15 November 2017 <i>Fajar Karyanto has no longer served as a Member of the Audit Committee since November 15, 2017</i>
	Dody Heriawan Priatmoko (Anggota Komite Audit) <i>(Member of Audit Committee)</i>	Nanang Waskito efektif menjabat Anggota Komite Audit sejak 15 November 2017 <i>Nanang Waskito has effectively become a member of the Audit Committee since November 15, 2017</i>

Structure, Membership, Integrity and Expertise, and Independence of Audit Committee

Structure, Membership, and duties of Audit Committee of Perum Jamkrindo is regulated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 on the Supporting Organ of the Board of Commissioners/ Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.

The Audit Committee is led by a chairman who is a member of the Board of Supervisors. Members of the Audit Committee may be from members of the Board of Supervisors or from outside the Company who have good integrity and have sufficient work experience in the field of supervision/examination. Furthermore, members of the Audit Committee of Perum Jamkrindo have background in accounting and finance education and understand the business industry of Perum Jamkrindo. Members of the Audit Committee should also have no potential conflicts of interest with Perum Jamkrindo.

Period of Services

The period of services of Audit Committee member who is not member of the Company's Board of Supervisors are at the most 3 (three) years and can be extended for 1 (one) time for 2 (two) years of period of services by not reducing the rights of the Board of Supervisors to terminate it at any time

Composition and Profiles of Members of Audit Committee

In 2017 there has been a change of membership of the Audit Committee. The chronology of the change of Audit Committee composition, and the composition of the Audit Committee as of December 31, 2017, can be seen below.

The Chronology of the Change of Audit Committee Composition in 2017

Susunan Komite Audit Perum Jamkrindo
per 31 Desember 2017Structure of the Audit Committee of Perum Jamkrindo
Per 31 Decemmber 2017

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Start of Services	Masa Akhir Jabatan End of Services	Periode Jabatan Period of Office
Ketua Komite Audit/ Anggota Dewan Pengawas (Head of Audit Committee/ Member of the Board of Supervisor)	Dahlan Siamat	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-04/DP- JAMKRINDO/ VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 Board of Supervisors' Decree No. KEP-04/ DPJAMKRINDO/ VII/2013 dated July 26, 2013	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Following the term of office as a member of the Board of Supervisors		
Anggota Komite Audit (Member of Audit Committee)	Dody Heriawan Priatmoko	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-06/ DP-Jamkrindo/ XI/2017 tanggal 15 November 2017 Board of Supervisors' Decree No. KEP-06/ DPJAMKRINDO/ XI/2017 dated November 15, 2017	15 November 2017 15 November 2017	15 November 2020 15 November 2020	Ke-1 First

Dahlan Siamat

Ketua Komite Audit/Anggota Dewan Pengawas

Head of Audit Committee/ Member of the Board of Supervisor

Profil Ketua Komite Audit Dahlan Siamat dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

Profile of the Head of Audit Committee, Dahlan Siamat, can be seen in the Board of Supervisors Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report

Dody Heriawan Priatmoko

Anggota Komite Audit

Member of Audit Committee

Periode Jabatan: 15 November 2017 - 15 November 2020

Period of Office: 15 November 2017 - 15 November 2020

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 35 tahun

Kelahiran Pemalang, 15 April 1982

Personal Data

Indonesia Citizen

35 Years old

Born in Pemalang, 15 April 1982

**Domisili**

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Domiciled in

South Tangerang, Banten, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2004).

Education

Bachelor Degree (S1) in Economics majoring in Accounting from Diponegoro University, Semarang (2004).

Riwayat Profesi

Pernah bekerja di Grup Astra (2004-2008), PT Unilever Indonesia Tbk (2008-2009) dan sejak tahun 2009 menjadi pegawai Kementerian BUMN, di mana sejak tahun 2015 hingga kini menjabat Kepala Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas I pada Kedeputan Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha. Beberapa pengalaman penugasan di BUMN yaitu Staf Sekretariat Dewan Pengawas (2011-2014) dan Sekretaris Dewan Pengawas (2014-2017) di Perum Perhutani.

History of Positions

He has worked in Astra Group (2004-2008), PT Unilever Indonesia Tbk (2008-2009) and since 2009 has been an employee of the Ministry of SOE, where since 2015 until now he is Head of Portfolio Empowerment of Minority Ownership I Subsector at Deputy for Restructuring and Business Development. Some experiences of assignment in SOEs are Secretariat Staff of Board of Supervisors (2011-2014) and Secretary to the Board of Supervisors (2014-2017) in Perum Perhutani.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**Functions, Duties, and Responsibilities of the Audit Committee**

Komite Audit Perusahaan bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

The Company's Audit Committee works collectively and serves to assist the Board of Supervisors in performing its duties, as well as in its reporting, and is directly responsible to the Board of Supervisors. In performing its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.

1. Assist the Board of Supervisors in ensuring the effectiveness of internal control systems and the effectiveness of the implementation of the duties of Internal Auditor and External Auditor.
2. Assess the implementation of the activities and the results of audits conducted by either the Internal Audit Division or External Auditor.
3. Provide recommendations regarding the improvement of management control system and its implementation.
4. Ensure that there has been a satisfactory review procedures for all information issued by Perum Jamkrindo.
5. Give recommendations regarding the appointment of the Public Accountants and Public Accountant Office to the Board of Supervisors to be delivered to the Equity Owner.
6. Identify matters requiring the attention of the Board of Supervisors as well as other duties from the Board of Supervisors.

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Komite Audit selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait industri penjaminan, Komite Audit mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Komite Audit. Di tahun 2017, Perusahaan tidak melakukan program pengembangan kompetensi bagi Komite Audit.

Rapat Komite Audit

Komite Audit telah menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Rapat Komite Audit di tahun 2017 digelar bersamaan dengan Rapat Internal Dewan Pengawas yang diselenggarakan sebanyak 15 kali sepanjang tahun 2017. Tentang risalah rapat dapat dilihat pada pembahasan Rapat Dewan Pengawas. Kehadiran Komite Audit pada rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Competency Development Program

To ensure that the Audit Committee can always follow the development of matters related to guarantee industry, the Audit Committee attends competency development program such as seminar, workshop, or other activities that can improve knowledge and competency of the Audit Committee. In 2017, the Audit Committee did not hold competency development program.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee has organized meetings aimed to support the duties of the Board of Supervisors in monitoring the Company's management. The Audit Committee Meetings in 2017 are held simultaneously with the Internal Meetings of the Board of Supervisors which was held 15 times in 2017. The minutes of the meeting can be seen in the discussion section of the Board of Supervisors' Meeting. The attendance of the Audit Committee at the meeting can be seen in the table below.

Kehadiran Anggota Komite Audit pada Rapat

The Attendance of the Audit Committee at the Meeting

Tanggal Date	Komite Audit Audit Committee		
	Dahlan Siamat (Ketua) (Head of Audit Committee)	Dody Heriawan Priatmoko (Anggota) (Member of Audit Committee)	Fajar Karyanto (Anggota) (Member of Audit Committee)
31 Januari 2017 January 31, 2017	v	v	
28 Februari 2017 February 28, 2017	v	v	
27 Maret 2017 March 27, 2017	v	x	
4 April 2017 April 4, 2017	v	x	
26 April 2017 April 26, 2017	v	v	
26 Mei 2017 May 26, 2017	v	v	
16 Juni 2017 June 16, 2017	v	v	
28 Juli 2017 July 28, 2017	v	v	
29 Agustus 2017 August 29, 2017	v	x	
28 September 2017 September 28, 2017	v	v	
10 November 2017 November 10, 2017	v	v	
21 November 2017 November 21, 2017	v		v



Tanggal Date	Komite Audit Audit Committee		
	Dahlan Siamat (Ketua) (Head of Audit Committee)	Dody Heriawan Priatmoko (Anggota) (Member of Audit Committee)	Fajar Karyanto (Anggota) (Member of Audit Committee)
13 Desember 2017 December 13, 2017	v		x
19 Desember 2017 December 19, 2017	v		v
27 Desember 2017 December 27, 2017	v		v

v = hadir / x = berhalangan hadir

v = attending / x = not attending

*) Fajar Karyanto efektif tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 15 November 2017, digantikan oleh Dody Heriawan Priatmoko

*) Fajar Karyanto has no longer served as a member of the Audit Committee since November 15, 2017 and is replaced by Dody Heriawan Priatmoko

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat

Recapitulation and Attendance of the Audit Committee in Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendance	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % of Attendance
Dahlan Siamat (Ketua) (Head of Audit Committee)	12	12	100,00%
Dody Heriawan Priatmoko (Anggota)* (Member of Audit Committee)*	4	3	75,00%
Fajar Karyanto (Anggota)* (Member of Audit Committee)*	8	5	62,50%
Rata-rata Average			79,17%

*) Fajar Karyanto efektif tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 15 November 2017, digantikan oleh Dody Heriawan Priatmoko

*) Fajar Karyanto has effectively ceased the position as a member of the Audit Committee since November 15, 2017, and is replaced by Dody Heriawan Priatmoko

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit 2017

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Work Plan in 2017

Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada dewan Pengawas. Program Kerja Komite Audit di tahun 2017 disampaikan pada Desember 2017 kepada Dewan Pengawas dan pelaporannya disampaikan melalui laporan triwulan.

The Audit Committee works collectively and serves to assist the Board of Supervisors in performing its duties. The Audit Committee is independent either in the implementation of its duties or in reporting, and is directly responsible to the Board of Supervisors. Audit Committee's Work Program in 2017 was submitted in December 2017 to the Board of Supervisors and the submission is delivered through quarterly report.

Selama tahun 2017, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas sepanjang tahun 2017.
- Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Pengawas ke lapangan.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2017 yang dilaksanakan oleh KAP Hertanto, Grace dan Karunawan.
- Membantu Dewan Pengawas dalam proses pengadaan dan pengusulan KAP audit tahun buku 2017 untuk ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- Melakukan *review* terhadap kegiatan pengendalian internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern serta memberi tanggapan/masukan terkait temuan temuan penting SPI dan temuan-temuan dari pihak eksternal seperti BPK-RI, OJK, dan lainnya.
- Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan I, II, dan III Tahun 2017.
- Melakukan telaahan atas saran dan pertimbangan untuk Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI.
- Melakukan telaahan atas *Assesment Good Corporate Governance*, dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
- Melakukan telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017.

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Audit

Remunerasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Kepada anggota Komite Audit yang bukan merupakan Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut:

- Honorarium per bulannya Rp24.000.000.
- Tunjangan Hari Raya per tahunnya 1x Honorarium.

In 2017, the Audit Committee has performed its duties in accordance with applicable provisions, covering the following activities:

- Prepared the review and materials of the Board of Supervisors' meeting throughout 2017.
- Counseled the visit of the Board of Supervisors to the field.
- Monitored and evaluate the implementation of the financial report audit for the fiscal year 2017 which was conducted by the Public Accountant Office of Hertanto, Grace, and Karunawan.
- Assisted the Board of Supervisors in the procurement and approval process of Public Accountant Office auditing for the fiscal year 2017 to be determined by the Minister of SOE.
- Reviewed the internal control activities conducted by the Internal Audit Unit and provide feedback on the findings of key SPI findings and findings from external parties such as BPK-RI, OJK, and others.
- Reviewed the Management Reports of Quarter I, II, and III Year 2017.
- Reviewed the recommendations and considerations for the SPI Annual Work Program (PKPT) Development.
- Reviewed the Assessment of Good Corporate Governance and the Code of Conduct.
- Reviewed the Company's 2017 Work Plan and Budget (RKAP).

Remuneration Policy for Audit Committee

Remuneration of members of Audit Committee is determined by the Board of Supervisors by taking into account the Company's capability, with maximum amount of 20% of the President Director's salary. Member of Board of Supervisors who becomes the Head/member of Audit Committee is not given any additional income from the position aside from the income as member of Board of Supervisors.

Member of Audit Committee who is not Board of Supervisors is given a remuneration policy by the Company as follows:

- Honorarium per month IDR24,000,000
- Holiday allowance diganti jadi Religious holiday allowance



Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Nomination And Remuneration Function

"Perum Jamkrindo tidak memiliki komite tersendiri terkait fungsi nominasi dan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi. Mekanisme nominasi dan pengangkatan sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian BUMN sebagai Pemilik Modal."

"Perum Jamkrindo does not have a separate committee related to the nomination and remuneration function for the Board of Supervisors and Directors. The nomination and appointment mechanisms are entirely the authority of the Ministry of SOE as the Equity Owner."

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Procedures of Appointment and Dismissal of Members of Board of Supervisors

1. Pengangkatan

Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 yaitu dengan terlebih dahulu menominasikan beberapa calon yang berasal dari berbagai sumber seperti mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, Pejabat Struktural maupun Fungsional serta dari sumber lain.

Mekanisme pengangkatan selanjutnya adalah melakukan penjangkaran dengan Menteri BUMN, Sekretaris, Deputy Teknis, dan/atau Deputy yang bertindak sebagai penanggung jawab. Setelah didapatkan kandidat calon Dewan Pengawas, selanjutnya Deputy melakukan pengadministrasian terhadap masing-masing kandidat. Setelah pengadministrasian dirampungkan, Deputy melakukan penilaian serta evaluasi terhadap seluruh kandidat calon anggota Dewan Pengawas dengan mengacu kepada kualifikasi yang sudah ditetapkan. Rekomendasi yang diberikan setelah hasil penilaian dan evaluasi berupa pernyataan kualitatif yaitu, "Disarankan" atau "Tidak Disarankan".

Bagi kandidat calon yang mendapatkan kriteria "Disarankan" dapat diusulkan untuk kemudian ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas Perusahaan. Dalam aturan ini, anggota Dewan Pengawas dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Untuk itu, terdapat ketentuan bahwa kandidat terpilih diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan sebelumnya semenjak ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan anggota Dewan Pengawas tidak melaksanakan ketentuan tersebut, secara otomatis masa jabatan yang bersangkutan berakhir pada saat itu.

1. Appointment

The appointment mechanism of the Board of Supervisors is based on Minister of SOE Decree No. PER-02/MBU/02/2015, which is by first nominating several candidates from various sources such as former SOE Directors, Board of Commissioners or Board of Supervisors of SOE, Structural or Functional Official and from other sources.

The next appointment mechanism is to conduct a screening with the Minister of SOE, the Secretary, the Technical Deputy, and/or the Deputy acting as the person in charge. After obtaining the candidate for the Board of Supervisors, the Deputy shall then administer each candidate. After the administration is finalized, the Deputy shall assess and evaluate all candidate of members of the Board of Supervisors with reference to the qualifications already stipulated. Recommendations given after assessment and evaluation results are qualitative statements, which are "Recommended" or "Not Recommended".

For candidates who get the "Recommended" criteria can be proposed to be determined to become a member of the Board of Supervisors of the Company. In this rule, members of the Board of Supervisors are prohibited from taking concurrent positions. Therefore, there is a requirement that the elected candidate to sign a letter of resignation from his previous position since being appointed as a member of the Board of Supervisors of the Company. If within the stipulated period the member of the Board of Supervisors does not implement the provisions, the term of office of the relevant member will automatically expire at that time.

2. Pemberhentian

Dalam ketentuan ini, Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan berbagai alasan baik atas permintaan pribadi maupun alasan-alasan lain terkait seperti pelanggaran ketentuan kebijakan internal dan hukum, serta tidak terpenuhinya tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Dewan Pengawas Perusahaan juga dapat diberhentikan oleh Menteri BUMN dalam rangka restrukturisasi atau memasuki masa usia pensiun Aparatur Sipil Negara.

Mekanisme pemberhentian diawali dengan pelaksanaan evaluasi terhadap anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan oleh Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris. Setelah melakukan evaluasi, Deputi Teknis mengajukan usulan kepada Menteri BUMN guna mendapatkan penetapan. Penyampaian usulan pemberhentian disertai dengan penjelasan alasan pemberhentian dan konsep surat Menteri tentang pemberhentian.

Selain mendapatkan usulan dari Deputi Teknis dan Sekretaris sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, proses pemberhentian anggota Dewan Pengawas juga dapat dilakukan langsung oleh Menteri BUMN berdasarkan hasil evaluasinya sendiri. Menteri BUMN juga dapat menerima masukan dari Deputi Teknis dan Sekretaris terkait kebijakan pemberhentian yang dilakukan.

Kebijakan Mengenai Rencana Suksesi Direksi

Suksesi Direksi menjadi momentum membangun tradisi alih generasi dan *role model* bagi Perum Jamkrindo, selain sebagai tantangan bagi Direksi terpilih dan segenap karyawan untuk menjawabnya dengan prestasi dan kinerja terbaik. Untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang semestinya, Perusahaan melakukan proses suksesi Direksi di mana penetapan calon Direksi Perum Jamkrindo ditetapkan berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/02/2015. Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian.

2. Dismissal

In this provision, the Board of Supervisors may be dismissed at any time for various reasons either on personal request or other related reasons such as violations of internal policies and legal provisions, and non-fulfillment of mandated duties and responsibilities. The Company's Board of Supervisors may also be dismissed by the Minister of SOE in the context of restructuring or entering the retirement age of the State Civil Apparatus.

The dismissal mechanism begins with the evaluation of members of the Board of Supervisors who are dismissed by the Technical Deputy in coordination with the Secretary. After conducting the evaluation, the Technical Deputy submits a proposal to the Minister of SOE in order to obtain the validation. Submission of proposed dismissal is accompanied by explanation of reason for dismissal and concept of Minister's letter about the dismissal.

In addition to obtaining a proposal from the Technical Deputy and Secretary as described earlier, the process of dismissal of the members of the Board of Supervisors can also be done directly by the Minister of SOE based on the results of his or her own evaluation. Minister of SOE may also receive input from the Technical Deputy and the Secretary regarding the termination policy.

Policy on the Directors Succession Plan

The Directors succession becomes a momentum to build the tradition of transferring generation and role model for Perum Jamkrindo, in addition to being a challenge for the elected Directors and all employees to respond with the best performance and achievement. To ensure that the Company is managed by a management with the appropriate expertise and competence, the Company conducts a succession process of the Directors in which the determination of the candidate for the Directors of Perum Jamkrindo is determined based on the fulfillment of State Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/02/2015. The selection process of the Directors shall be conducted by the Evaluation Team determined by the Minister based on the proposal from the relevant Echelon I and the Secretary of the Ministry.

Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi, adalah sebagai berikut:

The selection process by the Evaluation Team is as follows:



Tim Evaluasi memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menentukan calon terbaik. Sedangkan pembobotan dalam penilaian terhadap persyaratan materi calon Direksi, adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 35% dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 10%;
 - b. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan pidana yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat

The Evaluation Team gives recommendations to the Minister to determine the best candidate. The weighting in the assessment of the material requirements of the candidate of Directors is as follows:

1. Integrity and morality are given the weight of the assessment of 35% with the following details:
 - a. Never engage in an unlawful engineering actions and misconduct practices in the candidate's previous working premises before nomination (dishonesty). This is given a weight of 10%;
 - b. Never engage in an act of pledge breaching which can be categorized as not fulfilling the agreed commitments in the candidate's previous work

- yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
- c. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 5%;
2. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 55% dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan diberikan bobot 5%.
 - b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan diberikan bobot 10%.
 - c. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga diberikan bobot 10%.
 - d. Kemampuan memimpin dan bekerja sama diberikan bobot 10%.
 - e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN diberikan bobot 20%.
 3. Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%
- premises before nomination (bad behavior) This is given a weight of 10%;
- c. Never engage in acts categorized as having unlawful benefits to the person concerned and/or other parties before the nomination (bad behavior) This is given a weight of 10%;
 - d. Never engage in acts that can be categorized as violations of the provisions relating to the principles of healthy corporate governance (bad behavior). This is given a weight of 5%;
2. Technical competence/expertise is given the weight of the assessment of 55% with the following details:
 - a. Knowledge in SOE business shall be given a weight of 5%.
 - b. Understanding of management and corporate governance shall be given a weight of 10%.
 - c. Experience in managing SOE/Company/Institution shall be given a weight of 10%.
 - d. The ability to lead and cooperate shall be given a weight of 10%.
 - e. The ability to formulate and implement strategic policies in the framework of SOE development shall be given a weight of 20%.
 3. Psychology aspect is awarded a weight of assessment by 10%.

Komite Investasi dan Risiko Usaha

Pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha pada Desember 2011 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Negara BUMN No. S-328/MBU.4/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG Perum Jamkrindo Tahun 2010, dengan memperhatikan kondisi bahwa:

1. Perum Jamkrindo mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi, yang menghadapi risiko tinggi, terutama risiko pembayaran klaim (tagihan ganti rugi dari pihak perbankan selaku pemberi kredit) akibat kredit macet.
2. Perum Jamkrindo mengelola dana dalam jumlah yang relatif besar yang pengelolaannya perlu diselenggarakan dengan baik melalui penempatan pada berbagai *instrument* investasi keuangan dengan memperhatikan keamanan dan optimalisasi pendapatan.

Committee Of Investment And Business Risk

The establishment of the Investment and Business Risk Committee in December 2011 is based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia) as a follow-up of State Minister of SOE Letter No. S-328/MBU.4/2011 dated 25 October 2011 on Assessment Result Report of GCG Implementation of Perum Jamkrindo in 2010, by considering the conditions that:

1. Perum Jamkrindo has the main duty of conducting credit guarantee activities for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives, which face high risk, especially the risk of claim payment (claim of indemnity from the bank as lender) due to bad credit.
2. Perum Jamkrindo manages a relatively large amount of funds in which the management needs to be properly organized through placement on various financial investment instruments with due regard to the security and revenue optimization.



Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan dan Profil Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Susunan dan komposisi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Investasi dan Risiko Usaha Perum Jamkrindo Tahun 2017

Terms of Office

The term of office of a member of the Investment and Business Risk Committee who is not a member of the Board of Supervisors of the Company is a maximum of 2 (two) years, without reducing the right of the Board of Supervisors to terminate the appointment at any time.

Structure and Profile of Members of Investment and Business Risk Committee

Structure and Composition of Members of the Investment and Business Risk Committee throughout 2017 are as follows:

Structure of Investment and Business Risk Committee of Perum Jamkrindo in 2017

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Start of Services	Masa Akhir Jabatan End of Services	Periode Jabatan Period of Office
Ketua/Anggota Dewan Pengawas <i>Head of Investment and Business Risk Committee/ Member of the Board of Supervisors</i>	Subandriyo	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-04/DP- JAMKRINDO/I11/2014 tanggal 21 Maret 2014 <i>Board of Supervisor's Decree No. KEP-04/ DP-JAMKRINDO/ I11/2014 dated March 21, 2014</i>	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas <i>Following the term of office as a member of the Board of Supervisors</i>		
Wakil Ketua/ Anggota Dewan Pengawas <i>Deputy Head of Investment and Business Risk Committee/ Member of the Board of Supervisors</i>	Noor Ida Khomsiyati	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-01/DP- JAMKRINDO/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 <i>Board of Supervisor's Decree No. KEP-01/DP- JAMKRINDO/II/2018 dated 31 January 2018</i>			
Anggota/Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Investment and Business Risk Committee/ Member of the Board of Supervisors</i>	Diah Natalisa				

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Start of Services	Masa Akhir Jabatan End of Services	Periode Jabatan Period of Office
Anggota Member	Slamet Wiyono	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/DP-JAMKRINDQ/V/2017 tanggal 1 Maret 2017 Board of Supervisor's Decree No. KEP-02/DP-JAMKRINDQ/V/2017 dated 1 March 2017	1 Mei 2017 May 1, 2017	30 April 2020 April 30, 2020	Ke-2 Second

Subandriyo

Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha /Anggota Dewan Pengawas

Head of Investment and Business Risk Committee/ Member of the Board of Supervisors

Profil Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha Subandriyo dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

Profile of the Head of Investment and Business Risk Committee, Noor Ida Khomsiyati, can be seen in the Board of Supervisors Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report

Noor Ida Khomsiyati

Wakil Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha/Anggota Dewan Pengawas

Deputy Head of Investment and Business Risk Committee/ Member of the Board of Supervisors

Profil Wakil Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha Noor Ida Khomsiyati dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

Profile of the Deputy Head of Investment and Business Risk Committee, Diah Natalisa, can be seen in the Board of Supervisors Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report

Diah Natalisa

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha/Anggota Dewan Pengawas

Member of Investment and Business Risk Committee/ Member of the Board of Supervisors

Profil Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha Diah Natalisa dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

Profile of the Member of Investment and Business Risk Committee, Subandriyo, can be seen in the Board of Supervisors Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report



Slamet Wiyono

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Member of Investment and Business Risk Committee

Periode Jabatan: 1 Maret 2017 - 30 April 2020

Period of Office: 1 March 2017 - 30 April 2020

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 59 tahun

Kelahiran Boyolali, 12 Januari 1958

Personal Data

Indonesia Citizen

59 Years old

Born in Kebumen, Boyolali, 12 Januari 1958

Domisili

Tangerang, Banten, Indonesia

Domiciled in

Tangerang, Banten, Indonesia

Pendidikan

Warga Negara Indonesia, Boyolali. Menyelesaikan studi Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1984), Pasca Sarjana (S2) bidang studi *Accounting and Finance* di RVB Belanda, Maastricht (1993), dan Doktor (S3) bidang *Islamic Economics and Finance* di Universitas Trisakti (2014).

Education

Indonesian citizen, born in Boyolali. He completed his Bachelor of Economics majoring in Accounting at Gadjah Mada University, Yogyakarta (1984), Post-Graduate (S2) in Accounting and Finance in RVB Netherlands, Maastricht (1993), and Doctorate Islamic Economics and Finance at Trisakti University (2014).

Riwayat Profesi

Aktif di dunia civitas akademika, khususnya di Universitas Indonesia. Tercatat menjabat Wakil Ketua Kopkar FE Usakti, Universitas Trisakti (2013-2018); Anggota Tim Evaluasi PKM, Universitas Trisakti (2008-2009); Sekretaris Pendidikan Diploma 4 Komunikasi, Universitas Trisakti (2010); Anggota Senat Fakultas, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (1996); Direktur Lembaga Administrasi Perusahaan (LAP), Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (1996-1999), dan Sekretaris Jurusan Akuntansi FE Usakti Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (1992-1996). Saat ini masih aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.

History of Positions

Is active in the academic world, especially at the University of Indonesia. Was appointed as the Vice Head of Kopkar FE Usakti, Trisakti University (2013-2018); Member of PKM Evaluation Team, Trisakti University (2008-2009); Secretary of Education for Diploma 4 Communication Program, Trisakti University (2010); Member of the Faculty Senate, Faculty of Economics, Trisakti University (1996); Director of Corporate Administration Institute (LAP), Faculty of Economics, Trisakti University (1996-1999), and Secretary of Accounting Department of Faculty of Economy of Trisakti University, Jakarta (1992-1996). Currently teaching at the Faculty of Economics, Trisakti University, Jakarta.

Tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Investasi dan Risiko Usaha Perum Jamkrindo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan terhadap transaksi, pengelolaan, kebijakan dan pedoman keuangan dan investasi;
2. Melakukan *review* terhadap kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, dan struktur permodalan;
3. Memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada Dewan Pengawas dalam rangka memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan investasi dan risiko usaha;
4. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan pengelolaan risiko dan investasi yang diselenggarakan Direksi;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas yang terkait dengan pemantauan risiko usaha dan investasi;
6. Melaporkan hasil-hasil kerja Komite kepada Dewan Pengawas.

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Komite Investasi dan Risiko Usaha dapat terus mengikuti perkembangan dunia usaha dan industri penjaminan, Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha. Di tahun 2017, Perusahaan tidak melakukan program pengembangan kompetensi bagi Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha

Komite Investasi dan Risiko Usaha menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha di tahun 2017 digelar bersamaan dengan Rapat Internal Dewan Pengawas yang diselenggarakan sebanyak 15 kali sepanjang tahun 2017. Tentang risalah rapat dapat dilihat pada pembahasan Rapat Dewan Pengawas. Kehadiran Komite Investasi dan Risiko Usaha pada rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Duties of Investment and Business Risk Committee

In performing its functions, the Investment and Business Risk Committee has the following duties and responsibilities:

1. Monitor transactions, management, policies, and guidelines of finance and investment;
2. Review investment performance, risk management implementation, and capital structure;
3. Give input on matters that need the attention of the Board of Supervisors in order to advise the Board of Directors on the management of investment and business risks;
4. Prepare annual work plans and budgets which are aligned with the annual work plan of the risk and investment management conducted by the Board of Directors;
5. Perform other duties given by the Board of Supervisors associated with monitoring business risk and investment;
6. Report the results of the Committee's work to the Board of Supervisors.

Competence Development Program

To keep the Investment and Business Risk Committee up-to-date with the development of business world and guarantee industry, the Company facilitates competency development program for members of Investment and Business Risk Committee. In 2017, the Company did not undertake a competency development program for the Investment and Business Risk Committee.

Meetings of Investment and Business Risk Committee

The Investment and Business Risk Committee has organized meetings aimed to support the duties of the Board of Supervisors in monitoring the Company's management. The Meeting of the Investment and Business Risk Committee of the Company in 2017 was held simultaneously with the Internal Meetings of the Board of Supervisors, which was held for 15 times throughout 2017. The minutes of the meeting can be seen in the discussion of the Board of Supervisors' Meeting. The attendance of the Investment and Business Risk Committee at the meeting can be seen in the table below.

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Investasi dan Risiko Usaha dalam Rapat

Recapitulation and Attendance of the Investment and Business Risk Committee

Komite Investasi dan Risiko Usaha <i>Investment and Business Risk Committee</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Mandatory Attendance</i>	Jumlah Kehadiran <i>Number of Attendance</i>	% Kehadiran <i>% of Attendance</i>
Subandriyo (Ketua) <i>(Head of Investment and Business Risk Committee)</i>	12	11	91,67%
Noor Ida Khomsiyati (Wakil Ketua) <i>(Deputy Head of Investment and Business Risk Committee)</i>	12	12	100,00%
Diah Natalisa (Anggota) <i>(Member of Investment and Business Risk Committee)</i>	8	4	50,00%
Slamet Wiyono (Anggota) <i>(Member of Investment and Business Risk Committee)</i>	15	13	86,67%
Rata-rata <i>Average</i>			82,08%

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Investasi dan Risiko Usaha 2017

Brief Report on the Implementation of Investment and Business Risk Committee Work Plan in 2017

Salah satu tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen risiko dan investasi atas pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan investasi Perusahaan. Program Kerja Komite Investasi dan Risiko Usaha di tahun 2017 disampaikan pada Desember 2017 kepada Dewan Pengawas dan Laporan Pelaksanaan terhadap Program Kerja tersebut disampaikan melalui Laporan Triwulan.

One of the duties of the Investment and Business Risk Committee is to give recommendations to increase the implementation quality of risk management and investment on the monitoring of policies and implementation of the Company's risk management and investment. The Work Program of Investment and Business Risk Committee in 2017 was submitted in December 2017 to the Board of Supervisors and the Implementation Report to the Work Program is delivered through Quarterly Report.

Selama tahun 2017, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

In 2017, the Investment and Business Risk Committee has performed its duties in accordance with applicable provisions, covering the following activities:

1. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas sepanjang tahun 2017.
2. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Pengawas ke lapangan.
3. Melakukan telaahan atas Penilaian/*Assessment* GCG.
4. Melakukan telaahan atas *Review Board Manual Code of Governance* dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
5. Melakukan telaahan atas reviu SOP dan pelaksanaan kegiatan investasi.
6. Melakukan telaahan atas pelaksanaan dan reviu atas laporan berkala manajemen risiko.

1. Prepared the review and materials of the Board of Supervisors' meeting throughout the year 2017.
2. Counseled the visit of the Supervisory Board to the field.
3. Reviewed GCG Assessment.
4. Reviewed the Board Manual Code of Governance and the Company's Code of Conduct.
5. Reviewed SOPs and the implementation of investment activities.
6. Reviewed the implementation and periodic risk management reports.

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Investasi dan Risiko Usaha

Remunerasi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Kepada anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha yang bukan merupakan Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut:

- Honorarium per bulannya Rp24.000.000.
- Tunjangan Hari Raya per tahunnya 1x Honorarium.

Remuneration Policy for Investment and Business Risk Committee

Remuneration of members of Investment of Business Risk Committee is determined by the Board of Supervisors by taking into account the Company's capability, with a maximum amount of 20% of the President Director's salary. Member of the Board of Supervisors who becomes the Head/Member of Investment and Business Risk Committee is not given any additional income from the position aside from the income as a member of the Board of Supervisors.

The remuneration policy for the Member of Investment and Business Risk Committee who is not a member of Board of Supervisors is as follows:

- Honorarium per month IDR24,000,000
- Holiday allowance diganti jadi Religious holiday allowance

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Sekretaris Perusahaan

Perusahaan memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi Perusahaan, termasuk penyusunan strategi serta protokoler dan kesekretariatan Perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan berada langsung di bawah Direksi.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 91/Kep-Dir/VIII/2016 tentang Pengangkatan Pejabat, Pejabat Sekretaris Perusahaan dipercayakan kepada Abdul Bari.

SUPPORTING ORGANS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Corporate Secretary

The Company has a Corporate Secretary function in charge of conducting corporate communications activities, including preparation of corporate strategies, protocols, and secretariats. The function of Corporate Secretary is directly under the Directors.

Officer of Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors. Based on Board of Director's Decree No. 91/Kep-Dir/VIII/2016 on the appointment of officials, the Officer of Corporate Secretary is entrusted to Abdul Bari.

**Abdul Bari**

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Menjabat sejak 1 Agustus 2016

Beginning of Service: 1 August 2016

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 42 tahun

Kelahiran Subang, 29 September 1975

Personal Data

Indonesia citizen

42 Years old

Born in Subang, 29 September 1975

Domisili

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Domiciled in

Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir

S3 Doktoral Manajemen SDM Universitas Negeri, Jakarta (2014)

Education

Doctoral degree in HR Management, Universitas Negeri Jakarta (2014)

Bergabung di Perum Jamkrindo

10 Desember 2015

Joined Perum Jamkrindo

10 December 2015

Riwayat Jabatan

- Pranata Utama Direktorat Operasional dan Jaringan (2016)
- Pejabat Pranata Utama Direktorat Utama (2015-2016)
- Pranata Madya Sekretaris Perusahaan (2015)

History of Positions

- *First Class Official of Directorate of Operations and Network (2016)*
- *First Class Official of Primary Directorate (2015-2016)*
- *Associate Officer of Corporate Secretary (2015)*

Sertifikasi

- *Certified Profesional In Human Resources Management (CPHRM) Tahun 2015*
- *Completed DISC Trainer Certification Tahun 2014*
- *Sertifikasi Training Of Trainer Tahun 2014*
- *Sertifikasi Keahlian Asuransi (Ahli Asuransi Kesehatan/AAK) Tahun 2008*
- *Sertifikasi Asuransi Jiwa (AAIJ) Tahun 2007*
- *Sertifikasi Keahlian Asuransi (Ahli Ajun Asuransi Kesehatan/AAAK) Tahun 2006*
- *Sertifikasi K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) Tahun 2002*

Certification

- *Certified Professional in Human Resources Management (CPHRM) in 2015*
- *Completed DISC Trainer Certification in 2014*
- *Training of Trainer Certification in 2014*
- *Certification of Insurance Experts (Health Insurance Experts/AAK) in 2008*
- *Certification of Life Insurance (AAIJ) in 2007*
- *Certification of Insurance Experts (Associate Level of Health Insurance Experts/AAAK) in 2006*
- *K3 Certification (Occupational Health and Safety) in 2002*

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan yang meliputi beberapa aspek di bawah ini:

- Menyusun dan mengusulkan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Unit Kerja Sekretaris Perusahaan.
- Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal serta menindaklanjuti rekomendasi auditor tersebut sesuai bidang tugasnya
- Merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan pengelolaan komunikasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembinaan hubungan baik dan kerja sama dengan internal, *stakeholders* eksternal termasuk media.
- Mengoordinasi dan memonitor pelaksanaan prosedur tata upacara/seremonial, tata tempat, tata penghormatan pejabat internal dan eksternal dalam setiap kegiatan di lingkungan Perusahaan.
- Mengumpulkan, menganalisa keluhan/saran masyarakat/klien dari kotak saran dan meneruskannya kepada pimpinan unit kerja terkait serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut, sebagai bahan kebijakan.
- Melaksanakan, memelihara dan mengelola *data base* sesuai bidang tugasnya.

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Sekretaris Perusahaan selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait dunia usaha, industri penjaminan, serta peraturan dan perundang-undangan terkait, Perusahaan memfasilitasi SDM yang tergabung dalam Divisi Sekretaris untuk mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Implementation of Corporate Secretary activities covering the following aspects:

- Develop and propose policies and Standard Operating Procedures (SOP) of Corporate Secretary Work Unit.
- Provide data and information for internal/external examination purposes as well as follow up on the Auditor's recommendations according to their field of duty.
- Formulate and implement corporate communication management strategies and policies with the aim of improving the quality of good relationship and cooperation with internal parties, and external stakeholders which includes the media.
- Coordinate and monitor the implementation of ceremonial procedures, arrangement of places, procedures to honor internal and external officials in every activity within the Company.
- Collect, analyze community/client complaints/suggestions from the advice box and forward them to the head of the relevant work unit and prepare and respond to the complaints, as policy materials.
- Implement, maintain, and process data base according to the field of duty.

Competency Development Program

To keep the Corporate Secretary updated with the development of matters related to the business world, guarantee industry, and the relevant laws and regulations, the Company facilitates the HR of Corporate Secretary Division to attend competency development program in the forms of seminar, *workshop*, or other activities which can increase their knowledge and competence.

Program pengembangan kompetensi yang diikuti di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

The competency development program participated in 2017 is as follows.

Nama dan Jabatan Name and Position	Kegiatan Activity	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Event Organizer
- Jehezkiel Marquee - Abdul Bari - Fara Prastika	"Sosialisasi /Penyuluhan tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Sosialisasi tentang HIV/AIDS" <i>"Socialization/Counseling on Prevention, Eradication of Abuse and Illicit Circulation of Drugs (P4GN) and Socialization on HIV / AIDS"</i>	27 Januari 2017 <i>January 27, 2017</i>	Perum Jamkrindo
Lulu Drusyita	Strategi Cerdas Menjaga Reputasi Perusahaan <i>Smart Strategies in Maintaining Corporate Reputation</i>	3-4 Februari 2017 <i>February 3-4, 2017</i>	- Forum Humas BUMN - Public Relations Forum for SOEs
- Levinda Juliana - Lulu Drusyita - Anzil Firdausi Nuzula	Seminar Kesehatan tentang Penyakit Stroke dan <i>Mini Medical Check Up</i> <i>Health Seminar on Stroke Disease and Mini Medical Check Up</i>	24 Februari 2017 <i>February 24, 2017</i>	Perum Jamkrindo
- Abdul Bari - Ringgie Galih Sugestie	<i>In House Training Financial Management for Non Financial Manager</i>	16-18 Maret 2017 <i>March 16-18, 2017</i>	Perum Jamkrindo & LMFEUI
Abdul Bari	Pelatihan Awareness Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Perum Jamkrindo <i>Awareness Training of ISO 9001 Certification: 2015 Perum Jamkrindo</i>	20 Maret 2017 <i>March 20, 2017</i>	Perum Jamkrindo & Sucofindo
Anggrenei Andini Sefriyani	<i>Workshop Beauty Class PAC Martha Tilaar</i>	24 Maret 2017 <i>March 24, 2017</i>	Perum Jamkrindo & PAC Martha Tilaar
- Lulu Drusyita - Levinda Juliana	<i>Workshop Hijab Class Shafira</i>	29 Maret 2017 <i>March 29, 2017</i>	Perum Jamkrindo & Shafira Hijab
Ringgie Galih Sugestie	<i>Leadership Endurance Test (LET) Batch IV</i>	31 Maret - 01 April 2017 <i>March 31 - April 01, 2017</i>	- Perum Jamkrindo dan PT. Dirga - Perum Jamkrindo and PT. Dirga
Abdul Bari	Pelatihan "<i>Ethics in Business</i>" "<i>Ethics in Business</i>" Training	18-19 Mei 2017 <i>18-19 May 2017</i>	Perum Jamkrindo & Malaysian Insurance Institute
- Rusdi Saleh - Widya Udiantini	<i>Workshop Implementasi Manajemen Risiko</i> <i>Workshop on Risk Management Implementation</i>	22 Mei 2017 <i>May 22, 2017</i>	Perum Jamkrindo

Nama dan Jabatan Name and Position	Kegiatan Activity	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Event Organizer
Dwi Suwandono	"Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Persiapan Kesiagaan Tanggap Darurat" <i>"Socialization of Occupational Safety and Health & Emergency Preparedness"</i>	26 Mei 2017 <i>May 26, 2017</i>	Perum Jamkrindo
Abdul Bari	<i>Top Executive Capacity Building Program – Perum Jamkrindo Batch II</i>	29-31 Mei 2017 <i>May 29-31, 2017</i>	Perum Jamkrindo & LMFEUI
- Dwi Putra Raneldo K. - Rusdi Saleh	Awareness Sertifikasi ISO 9001:2015 Penjaminan & Pelayanan Klaim <i>Awareness of ISO 9001 Certification: 2015 Guarantee & Claim Services</i>	31 Juli 2017 <i>July 31, 2017</i>	PT Sapta Surya Nusabhakti
Lulu Drusyita	<i>Strategy PR Planning & Programming</i>	27-29 Juli 2017 <i>July 27-29, 2017</i>	FHBUMN
Dwi Suwandono	<i>Basic First Aid (P3K)</i>	11 Agustus 2017 <i>August 11, 2017</i>	Perum Jamkrindo
Mutiara Prasiwi Chaerunisa	<i>Microsoft Office Excel 2013 Advanced</i>	18 Agustus 2017 <i>August 18, 2017</i>	PT Iverson Technology
- Ringgie Galih Sugestie - Shahnaz Fakhrial Al-Hakim	<i>Diklat Jurnalistik Terpadu Angkatan 10</i> <i>Integrated Journalism Training Batch 10</i>	26-28 September 2017 <i>September 26-28, 2017</i>	- Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA (LPJA) - ANTARA Journalism Educational Institution (LPJA)
Angga Moshanto Pratama	<i>Aviation Security & Awareness</i>	18 Oktober 2017 <i>October 18, 2017</i>	PT Pratitha Titiannusantara
- Mutiara Prasiwi Chaerunisa - Rudiman - Pressi Hapsari Fadlilah - Dzikri Maulana - Rully Ariefandy	Staff Development Program	25 September-04 November 2017 <i>September 25-November 04, 2017</i>	- Divisi MSDM - HRM Division
- Lulu Drusyita - Anzil Firdausi Nuzula	Pelatihan Jurnalistik Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA <i>Journalism Training in the ANTARA Journalism Educational Institution</i>	28-30 November 2017 <i>November 28-30, 2017</i>	ANTARA
Abdul Bari	Sosialisasi MR <i>RM Management</i>	24 November 2017 <i>November 24, 2017</i>	Perum Jamkrindo
Nastiti Pandanwangi	<i>Interpretasi & APC KPKU</i>	28-30 November 2017 <i>November 28-30, 2017</i>	Forum Ekselen BUMN



Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2017

Di sepanjang tahun 2017, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Menyusun & mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretaris Perusahaan
- Mengelola pelaksanaan dan penggunaan RKA Sekretaris Perusahaan
- Melakukan *Review* dan menetapkan laporan pelaksanaan RKA dan penggunaan anggaran Unit kerja.
- Penyampaian Laporan Manajemen kepada Dewan Pengawas, yaitu:

Audit Internal

Audit Internal merupakan proses pengawasan atas pengelolaan operasional dan bisnis Perusahaan yang dilakukan secara internal. Fungsi Audit Internal di Perum Jamkrindo dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. SPI bertugas melakukan *assurance* dan *consulting* yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 20/Kep-Dir/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, Untung Heri S dipercayakan untuk menjabat Kepala SPI dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Brief Report of Duty Implementation of Corporate Secretary in 2016

Throughout the year 2017, the Corporate Secretary held several activities as follows:

- Formulate & propose Work Plan and Budget (RKA) of Corporate Secretary
- Manage the implementation and use of RKA of Corporate Secretary
- Review and establish reports on the implementation of RKA and the use of the work unit budget.
- Submit Management Report to the Board of Supervisors, which are:

Internal Audit

Internal Audit is a process of oversight that is done internally of the Company's operations and business management. Internal Audit function at Perum Jamkrindo is conducted by Internal Audit Unit (SPI) led by a Head of Internal Audit Unit who is appointed and dismissed by the President Director upon approval by the Board of Supervisors. The Internal Audit Unit is responsible for conducting independent and objective assurance and consulting, with the aim of enhancing added value and improving the Company's operations through a systematic approach by evaluating and improving the adequacy and effectiveness of the internal control systems, risk management, and corporate governance.

Party Appointing/Dismissing the Head of Internal Audit Unit

The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director upon approval from the Board of Supervisors. The President Director can dismiss the Head of Internal Audit Unit after obtaining approval from the Board of Supervisors if the head of Internal Audit Unit does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in the existing regulations and/or fail or incapable in carrying out the duties.

Profile of Head of Internal Audit Unit

Based on the Board of Director's Decree No. 20/Kep-Dir/III/2017 dated 8 March 2017, Untung Heri S is entrusted the position of the Head of Internal Audit Unit and have obtained approval from the Board of Supervisors.

Untung Heri S

*Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit*

Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun
Kelahiran Lumajang, 8 Juli 1971
Berdomisili di Jakarta

*Indonesian citizen
47 years old
Born in Lumajang, 8 July 1971
Domiciled in Jakarta*

Mulai Menjabat

Tanggal 8 Maret 2017.
*Beginning of Services:
8 March 2017*

Pendidikan

S2 Manajemen Universitas Hasanudin Tahun 2003
S1 Administrasi Niaga Universitas Brawijaya Malang Tahun 1995

Education:

*Bachelor of Economics, majoring in Business Administration from Universitas Brawijaya, Malang (1995);
Master of Management from Universitas Hasanudin (2003).*

Bergabung di Perum Jamkrindo
April 1996

*Joined Perum Jamkrindo:
April 1996*

Riwayat Jabatan

- Kepala Satuan Pengawasan Intern mulai menjabat tanggal 08/03/2017 - Sekarang
- Kepala Kantor Wilayah VI Surabaya periode 22/04/2016 - 07/03/2017
- Kepala Kantor Cabang Surabaya periode 15/09/2105 - 21/04/2016
- Kepala Kantor Anak Cabang Manado periode 19/01/2012 s.d 24/03/2013
- Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Makassar periode 09/07/2008 - 18/01/2012
- Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Kanca DKI Jakarta periode 16/07/2007 - 08/07/2008
- Kepala Bagian Pemeriksaan Wilayah II periode 16/12/2004 - 15/07/2007
- Kepala Bagian Analisa Pembiayaan Usaha Divisi Investasi dan Keuangan periode 14/07/2004 - 15/12/2004
- Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Perum Sarana Makassar periode 23/07/2002 - 13/07/2004

History of Positions

- *Head of Internal Audit Unit since 08/03/2017 - Present*
- *Head of Regional Office VI Surabaya from 22/04/2016 - 07/03/2017*
- *Head of Surabaya Branch Office from 15/09/2105 - 21/04/2016*
- *Head of Manado Branch office from 19/01/2012 - 24/03/2013*
- *Head of Operations Section Makassar Branch Office from 09/07/2008 - 18/01/2012*
- *Head of Administration and Finance of DKI Branch Office from 16/07/2007 - 08/07/2008*
- *Head of Region II Inspection Section from 16/12/2004 - 15/07/2007*
- *Head of Business Financing Analysis of Investment and Financial Division from 14/07/2004 - 15/12/2004*
- *Head of Operational Division of Perum Sarana Makassar Branch Office from 23/07/2002 - 13/07/2004*

Sertifikasi

Qualified Internal Audit (QIA) 2013

Certification

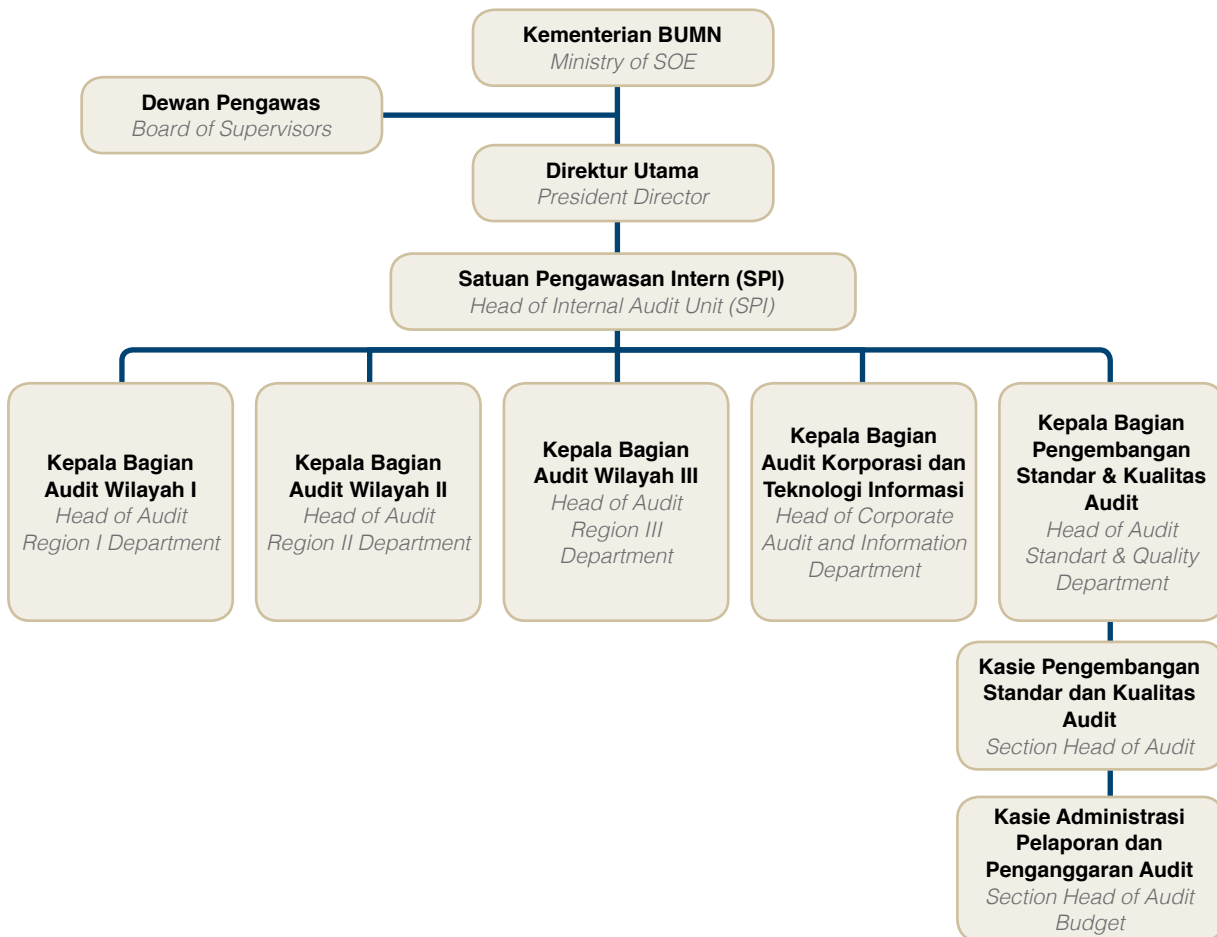
Qualified Internal Audit (QIA) 2013

Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Jamkrindo dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. Struktur Organisasi SPI Perum Jamkrindo berdasarkan Keputusan Direksi No. 36/Kep-Dir/IV/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Struktur Organisasi Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

Organizational Structure and Position of the Internal Audit Unit

Perum Jamkrindo SPI is led by the Head of Internal Audit Unit who is appointed and dismissed by the President Director upon approval of the Board of Supervisors. The President Director can dismiss the Head of Internal Audit Unit after obtaining approval from the Board of Supervisors if Head of Internal Audit Unit does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in the existing regulations and/or fail or incapable in carrying out the duties. Perum Jamkrindo SPI Organizational Structure is based on Directors' Decree Number: 36/Kep-Dir/IV/2016 dated 20 April 2016 on Organizational Structure of Perum Jamkrindo.



Jabatan Position	Nama Name
Kepala Satuan Pengawasan Intern <i>Head of Internal Audit Unit</i>	Untung Heri S
Kepala Bagian Audit Wilayah I <i>Head of Audit Region I Department</i>	Aditya Putra Darmawan
Kepala Bagian Audit Wilayah II <i>Head of Audit Region II Department</i>	Karinu Aji Wira Kusuma
Kepala Bagian Audit Wilayah III <i>Head of Audit Region III Department</i>	Agus Mirazul Fajar
Kepala Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi <i>Head of Corporate Audit and Information Technology Division</i>	Irmatati
Kepala Bagian Pengembangan Standar dan Kualitas Audit <i>Head of Standard Development and Quality Audit Division</i>	Kartono

Jumlah Karyawan Satuan Pengawasan Intern

Untuk mendukung tugas-tugas pengawasan yang diemban SPI, berikut adalah jumlah dan kualitas personil SPI pada periode tahun 2017:

1. Kepala SPI	: 1 orang
2. Kepala Bagian	: 1 orang
3. Kepala Seksi	: 1 orang
4. Staf	: 14 orang
5. Agendaris	: 1 orang
Jumlah	: 22 orang

Piagam SPI (Internal Audit Charter)

SPI Perum Jamkrindo memiliki *Internal Audit Charter* yang disusun sebagai pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi Audit Internal yang perlu diselenggarakan oleh Perusahaan serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal serta agar terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.

Di samping itu, *Internal Audit Charter* merupakan pemenuhan *compliance* perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Piagam Audit Internal Perusahaan telah diperbaharui serta disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas No. 38/Kep-Dir/V/2017 – KEP-03/DP-JAMKRINDO/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.

Number of Employees of Internal Audit Unit

To support the auditing duties of Internal Audit Unit, the followings are the number and qualification of Internal Audit Unit employees:

1. Head of Internal Audit Unit	: 1 people
2. Head of Division	: 1 people
3. Head of Section	: 1 people
4. Staff	: 14 people
5. Clerk	: 1 people
Total	: 22 people

Internal Audit Charter

The Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo has an Internal Audit Charter compiled as a standard guideline containing the minimum requirements of Internal Audit function which should be conducted by the Company as well as the aspects related to the implementation of Internal Audit. It also functions to create common understanding and become the basis on the level of maintenance of interests and commitment of all parties associated with the Company.

Furthermore, the Internal Audit Charter is a compliance fulfillment of the company to the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at SOE and Law of Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE).

The Company's Internal Audit Charter has been updated and ratified by Joint Decree of the Board of Directors and Board of Supervisors No. 38/Kep-Dir/V/2017 – KEP-03/DP-JAMKRINDO/V/2017 dated May 10, 2017.



Visi dan Misi SPI

Vision and Mission of SPI

Berdasarkan Piagam Audit Internal Perusahaan, Visi dan Misi SPI adalah sebagai berikut,

Based on the Company's Internal Audit Charter, The Internal Audit Unit's Vision and Mission are as follows,

Visi

Menjadi *strategic business partner* yang independen, objektif, profesional, terpercaya, tanggap melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Vission

To be a strategic business partner that is independent, objective, professional, trusted, responsive through assurance and consulting activities and can provide added value to the Company.

Misi

- Aktif melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas Perusahaan meliputi proses pengendalian manajemen, operasional, dan pengelolaan risiko dalam peningkatan kinerja Perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG.
- Meningkatkan peran pemeriksaan intern dan kualitas hasil pengawasan melalui peningkatan kompetensi Auditor Internal dan pemanfaatan sistem informasi.
- Mengupayakan pelayanan konsultasi untuk meningkatkan nilai-nilai Perusahaan dan sistem pendukungnya, memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas Perusahaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan, *business best practice*, dan prosedur serta kebijakan yang ditetapkan.
- Memberikan nilai tambah yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, proaktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan, dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.

Mission

- Active monitoring of all activities of the Company include management control, operational and risk management processes in improving the Company's performance through improving the efficiency and effectiveness of the Company's activities based on GCG principles.*
- Increasing the role of internal audit and quality of supervision result through improving Internal Auditor's competency and utilization of information system.*
- Seeking advisory services to enhance the Company's values and its supporting systems, ensuring that all of the Company's activities have been carried out in accordance with the regulations, business best practices, and established policies and procedures.*
- Giving added value focusing on business process and customer, proactive, enthusiastic, and trustworthy, able to communicate effectively, able to find the root of a problem, and can utilize the information technology system optimally.*

Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) terkait dengan Pemeriksaan Internal Perusahaan

Duties of the Internal Audit Unit (SPI) related to the Company's Internal Examination

Dalam menjalankan Pemeriksaan Internal pada Perusahaan, SPI Perum Jamkrindo bertugas:

In carrying out Internal Examination in the Company, Perum Jamkrindo's Internal Audit Unit has the following duties:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjalankan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan anggarannya.
- Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan pemeriksaan lainnya atas tugas sesuai arahan dan persetujuan Direktur Utama.
- Melakukan *review* dan evaluasi penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan organisasi yang berlaku serta memberikan

- To assist the President Director duties and Board of Supervisor in the monitoring activities by executing, planning, implementing, and monitoring the audit result.
- Coordinating and integrating the draft of Annual Examination Work Program (PKPT) and its budget.
- Conducting routine examination in accordance with the Annual Examination Work Program (PKPT) and other examination duties under the directives and approval from the President Director.
- Reviewing and evaluating GCG implementation in presenting assessment according to the organization's regulations, policies/provisions as well as contributing

kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko dengan membantu Perusahaan mengidentifikasi besaran risiko yang signifikan.

5. Melakukan koordinasi kegiatan SPI dengan kegiatan unit kerja lainnya di lingkungan Perusahaan dan mengevaluasi kecukupan indikator pengukuran kinerja yang digunakan.
6. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja audit internal dan pedoman audit internal dan mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan SPI.
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak-pihak terkait.
8. Melakukan *monitoring* dan pelaksanaan atas tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal serta memberikan jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya terkait dengan fungsi pengawasan.
9. Berkoordinasi dengan pihak eksternal berdasarkan penugasan dari Direktur Utama dalam kaitan dengan tugas-tugas pengawasan.
10. Meningkatkan kompetensi pemeriksaan intern melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, SPI bertanggung jawab untuk:

1. Menyelenggarakan program kerja pengawasan atas pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan Direksi serta program kerja Perusahaan.
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada bidang Pengawasan Intern Perusahaan yang berkaitan dengan pemeriksaan kegiatan operasional dan administrasi & keuangan.
3. Melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau informasi mengenai segala hal yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama mengenai hasil pemeriksaan, berikut saran perbaikannya.
5. Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha.
6. Menilai sistem pengendalian intern perusahaan.
7. Menilai kewajaran laporan keuangan dan menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional/non operasional perusahaan.
8. Memberikan pendapat, usulan dan saran perbaikan atas kegiatan operasional/non operasional.

to the improvement of risk management process by assisting the Company in identifying the amount of significant risk.

5. Coordinating Internal Audit Unit's activities with other work unit's activities in the Company's environment and evaluating the adequacy of performance measurement indicators used.
6. Drafting and refining the internal audit work standard and internal audit guidelines and coordinating the Internal Audit Unit's activity report preparation.
7. Submitting Examination Result Report (LHP) to the relevant parties.
8. Monitoring and executing the follow-up of the result of either internal or external audit as well as providing objective consultancy services to the management and other work unit related to the monitoring function.
9. Coordinating with external party based on assignment from the President Director related to monitoring duties.
10. Improving the competence of internal examination through education and training.

In carrying out these main duties, The Internal Audit Unit is responsible for the followings:

1. Organizing the monitoring work program over the implementation of all Directors' policies and decree and the Company's work program.
2. Coordinating and controlling the activity implementation on Company's Internal Monitoring related to examination on activities of operations, administration and finance.
3. Researching and testing the accuracy of the report or information regarding all matters which can cause losses for the Company.
4. Preparing and submitting report to the President Director regarding the examination result, including the improvement suggestions.
5. Assessing the compliance with the existing provisions, by assessing and monitoring all systems, procedures, provisions, and operations of the Company to drive effectiveness and compliance in the implementation as well as giving recommendations to the Directors on business risk control/management.
6. Assessing the Company's internal control system.
7. Assessing the fairness of financial statements and assessing the efficiency and effectiveness of the Company's operational/non-operational activities.
8. Giving opinion, suggestions, and advices on improvement of the operational/non-operational activities.



9. Memotivasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh setiap unit kerja dan wajib melakukan penilaian dan pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut oleh semua Organ Perusahaan.
10. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas hasil pemeriksaan SPI maupun auditor eksternal dan melaporkan hasil pantauan tersebut kepada Direktur Utama.
11. Menjadi mitra kerja auditor eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan ataupun pemeriksaan lainnya.

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Auditor Internal

SPI Perum Jamkrindo aktif sebagai anggota pada Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Asuransi Negara dan Jasa Keuangan (Asgara Jaskeu Plus). Keikutsertaan SPI dalam forum tersebut berguna untuk *sharing* pengetahuan dan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan intern sesama BUMN.

Pengembangan Sumber Daya Auditor

Dalam rangka memastikan kesinambungan pengembangan SDM, baik sisi kompetensi maupun *soft-skill*, auditor SPI Perum Jamkrindo terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan mengikuti seminar, *workshop*, studi banding, pelatihan dan pendidikan bersertifikasi auditor internal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang kompeten, baik untuk pelatihan audit, manajemen risiko maupun *Good Corporate Governance* (GCG).

9. Motivating the GCG principles implementation of each work unit and ensuring the assessment and monitoring of the principles implementation by all of the Company's organs.
10. Monitoring the implementation on the follow-up of examination result over the Internal Audit Unit or external auditor's examination result and reporting the monitoring result to the President Director.
11. Becoming the external auditor work partner in conducting examination on the Company's financial statements or other examination.

Participation in Internal Audit Profession Association

Perum Jamkrindo's Internal Audit Unit is an active member of Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI), State Insurance and Financial Services (Asgara Jaskeu Plus). The Internal Audit Unit's participation in these forum is useful for sharing knowledge and information regarding internal examination activities among SOEs.

Human Resources Development for Auditors

To ensure the sustainability of HR development, both on the competency and their soft-skills, Perum Jamkrindo Internal Audit Unit's auditors continue to improve their knowledge and capability by attending seminar, *workshop*, comparative study, training and education of certified internal auditor held by competent educational institution, either for training of audit, risk management, or Good Corporate Governance (GCG).

Berikut seminar, pelatihan dan pendidikan yang diikuti personil SPI selama tahun 2017:

Below are the seminar, training, and education attended by the Company's Internal Audit Unit's auditor in 2017:

Nama dan Jabatan Name and Position	Kegiatan Activities	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer/s
- Aditya Putra Darmawan - Dimas S Ardhi - Asep Ginanjar Cahya Gumilar - Faoziah Ulfa - Bernie Soebekti - Muhammad Ilham - Andreas Theodorus Mokodaser - Arif Syachroni - Andik Sugianto - Laila Wijayanti - Rinjani Yusni Maharjanti - Aldhy Haryono Fachrial - Muhammad Leonard Gustav Qhadafi - Laurdes Sinurat - Andi Aldino Chandra - Emmerisa br. Sembiring - Michael Ranap Simanjuntak - Faisal Arief Sentosa	<i>In House Training QIA(Qualified Internal Auditor) Sertifikasi Tingkat Lanjutan I</i> <i>In House Training QIA (Qualified Internal Auditor) Advanced Level Certification I</i>	9 - 14 Januari 2017 <i>9 - 14 January 2017</i>	Perum Jamkrindo & YPIA
- Aditya Putra Darmawan - Dimas S Ardhi - Asep Ginanjar Cahya Gumilar - Faoziah Ulfa - Bernie Soebekti - Muhammad Ilham - Andreas Theodorus Mokodaser - Arif Syachroni - Andik Sugianto - Laila Wijayanti - Rinjani Yusni Maharjanti - Aldhy Haryono Fachrial - Muhammad Leonard Gustav Q. - Laurdes Sinurat - Andi Aldino Chandra - Emmerisa br. Sembiring - Michael Ranap Simanjuntak - Faisal Arief Sentosa	<i>In House Training QIA(Qualified Internal Auditor) Sertifikasi Tingkat Lanjutan II</i> <i>In House Training QIA (Qualified Internal Auditor) Advanced Level Certification II</i>	16 – 21 Januari 2017 <i>16 – 21 January 2017</i>	Perum Jamkrindo & YPIA
- Faisal Arief Sentosa - Arif Syachroni - Andreas Theodorus Mokodaser	Sosialisasi /Penyuluhan tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Sosialisasi tentang HIV/AIDS" <i>"Socialization/Counseling on Prevention, Eradication of Abuse and Illicit Circulation of Drugs (P4GN) and Socialization on HIV / AIDS"</i>	27 Januari 2017 <i>27 January 2017</i>	Perum Jamkrindo
- Bernie Soebekti - Faoziah Ulfah Fatmawati	MAP SDP <i>Batch VI</i>	6 – 9 Februari 2017 <i>6 – 9 February 2017</i>	Perum Jamkrindo



Nama dan Jabatan Name and Position	Kegiatan Activities	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer/s
- Bernie Soebekti - Faoziah Ulfah Fatmawati	Pelatihan Analisis Kredit SDP Batch VI <i>SDP Credit Analysis Training Batch VI</i>	10 – 14 Februari 2017 <i>10 – 14 February 2017</i>	Perum Jamkrindo LPPI
- Bernie Soebekti - Faoziah Ulfah Fatmawati	<i>Training Service Excellence & Personal Grooming SDP Batch VI</i>	16 Februari 2017 <i>16 February 2017</i>	Perum Jamkrindo NLIMIT
Arry Andru Palapi	Inpres No.10 Tahun 2016 & Standar ISO 37001 Untuk BUMN <i>Presidential Instruction No.10 Year 2016 & Standard ISO 37001 For SOEs</i>	22 Februari 2017 <i>22 February 2017</i>	Asia Anti Fraud
Aditya Putra Darmawan	In House Training Financial Management for Non Financial Manager	16 - 18 Maret 2017 <i>16 - 18 March 2017</i>	Perum Jamkrindo & LMFEUI
Untung Heri Sukariyanto	Pelatihan Awareness Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Perum Jamkrindo <i>Awareness Training of ISO 9001 Certification: 2015 Perum Jamkrindo</i>	20 Maret 2017 <i>20 March 2017</i>	Perum Jamkrindo & Sucofindo
Faoziah Ulfah Fatmawati	<i>Workshop Hijab Class Shafira</i>	29 Maret 2017 <i>29 March 2017</i>	Perum Jamkrindo & Shafira Hijab
Arry Andru Palapi	<i>Leadership Endurance Test (LET) Batch IV</i>	31 Maret - 1 April 2017 <i>31 March - 1 April 2017</i>	Perum Jamkrindo dan PT Dirga
- Kartono - Laurdes Sinurat - Asep Ginanjar Cahya Gumilar	<i>Workshop Letter of Credit (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)</i> <i>Workshop on Letter of Credit (L / C) and Domestic Letters of Credit (SKBDN)</i>	27 April 2017	Perum Jamkrindo & Bank Mandiri
Untung Heri Sukariyanto	Pelatihan "Ethics in Business" "Ethics in Business" Training	18 - 19 Mei 2017 <i>18 - 19 May 2017</i>	Perum Jamkrindo & Malaysian Insurance Institute
- Arry Andru Palapi - Asep Ginanjar Cahya Gumilar - Andreas Theodorus Mokodaser	<i>Workshop Implementasi Manajemen Risiko</i> <i>Workshop on Risk Management Implementation</i>	22 Mei 2017 <i>22 May 2017</i>	Perum Jamkrindo
Dimas Setio Ardhi	"Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Persiapan Kesiagaan Tanggap Darurat" <i>"Socialization of Occupational Safety and Health & Emergency Preparedness"</i>	26 Mei 2017 <i>26 May 2017</i>	Perum Jamkrindo
Untung Heri Sukariyanto	<i>Top Executive Capacity Building Program – Perum Jamkrindo Batch II</i>	29 – 31 Mei 2017 <i>29 – 31 May 2017</i>	Perum Jamkrindo & LM FE UI

Nama dan Jabatan Name and Position	Kegiatan Activities	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer/s
- Aditya Putra Darmawan - Asep Ginanjar Cahya Gumilar - Rahayudi	Awareness Sertifikasi ISO 9001:2015 Penjaminan & Pelayanan Klaim <i>Awareness of ISO 9001 Certification: 2015 Guarantee & Claim Services</i>	31 Juli 2017 31 July 2017	PT. Sapta Surya Nusabhakti
Asep Ginanjar Cahya Gumilar	Basic First Aid (P3K)	11 Agustus 2017 11 August 2017	Perum Jamkrindo
Aldhy Haryono Fachrial	Microsoft Office Excel 2013 Advanced	18 Agustus 2017 18 August 2017	PT. Iverson Technology
Untung Heri Sukariyanto	Workshop Fraud Examiners and Detection Forensic Data Analytics Approach	6 – 7 Oktober 2017 6 – 7 October 2017	ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
- Untung Heri Sukariyanto - Bernie Soebekti	National Conference Institute Internal Auditor	10 – 11 Oktober 2017 10 – 11 October 2017	Institute Internal Audit (IIA)
- Untung Heri Sukariyanto - Dadang Ary Aviyo	Round Table Discussion (RTD) dengan tema "Tantangan Auditor Internal Indonesia sebagai Trusted Advisor di Perusahaan" <i>Round Table Discussion (RTD) with the theme "Challenges of Indonesian Internal Auditor as Trusted Advisor of the Company"</i>	26 Oktober 2017 26 October 2017	Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia <i>Professional Association of Indonesian Internal Auditor</i>
Untung Heri Sukariyanto	National Call for Paper Seminar & national Anti Fraud Conference 2017	6 – 7 November 2017	ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
Kartono	Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification</i>	13 – 16 November 2017	LPMA Trisakti
- Michael Ranap Simanjuntak - Andi Aldino Chandra - Faisal Arief Sentosa	Staff Development Program	25 September – 4 November 2017	Divisi MSDM <i>HRM Division</i>
Untung Heri Sukariyanto	Sosialisasi MR <i>RM Socialization</i>	28 November 2017	Perum Jamkrindo
- Agus Mirazul Fajar - Kartono	Interpretasi & APC KPKU <i>Interpretation & APC KPKU</i>	28 – 30 November 2017	Forum Ekselen BUMN
- Kartono - Laurdes Sinurat - Andi Aldino Chandra - Rinjani Yusni Maharjanti	Bimbingan teknis Teknik dan Strategi Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan dalam Pengadaan <i>Technical guidance on Fraud Detection and Prevention Techniques in Procurement</i>	14 – 15 Desember 2017 14 – 15 December 2017	Pusat Studi Pengembangan Informasi Nasional <i>National Center for Information Development Studies</i>



Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2017

Selama tahun 2017, SPI Perum Jamkrindo telah melaksanakan aktivitas pemeriksaan tahunan dan menjadi *counterpart* Auditor Eksternal.

1. Hingga Desember 2017 Satuan Pengawasan Intern telah menyelesaikan pemeriksaan internal terhadap:
 - a. 56 (Lima puluh enam) Kantor Cabang (KC) yaitu:

Brief Report of SPI Duty Implementation in 2017

Throughout the year 2017, the Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo has conducted annual inspection activities and become an External Auditor counterpart.

1. Until December 2017 the Internal Audit Unit has completed internal audit of:
 - a. 56 (Fifty six) Branch Offices (KC), namely:

No	KCK/ Kantor Wilayah KCK/Regional Offices	Kantor Cabang Branch Offices	Nomor LHP LHP Number
1	Kantor Cabang Khusus <i>Special Branch Office</i>		64/LHP/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 <i>64 / LHP / XII / 2017 dated December 12, 2017</i>
2	Kanwil I (Medan) <i>Region I (Medan)</i>	Batam	01/LHP/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 <i>01/LHP/III/2017 dated 14 March 2017</i>
3		Balige	17/LHP/IV/2017 tanggal 06 April 2017 <i>17/LHP/IV/2017 dated 06 April 2017</i>
4		Padang	26/LHP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 <i>26/LHP/V/2017 dated 22 May 2017</i>
5		Tanjung Pinang	28/LHP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 <i>28/LHP/V/2017 dated 22 May 2017</i>
6		Pekanbaru	47/LHP/IX/2017 tanggal 22 September 2017 <i>47/LHP/IX/2017 dated 22 September 2017</i>
7		Medan	62/LHP/XI/2017 tanggal 24 November 2017 <i>62/LHP/XI/2017 dated 24 November 2017</i>
8		Banda Aceh	63/LHP/XI/2017 tanggal 24 November 2017 <i>63/LHP/XI/2017 dated 24 November 2017</i>
9	Kanwil II (Palembang) <i>Region II (Palembang)</i>	Bengkulu	21/LHP/IV/2017 tanggal 26 April 2017 <i>21/LHP/IV/2017 dated 26 April 2017</i>
10		Pangkal Pinang	23/LHP/IV/2017 tanggal 28 April 2017 <i>23/LHP/IV/2017 dated 28 April 2017</i>
11		Bandar Lampung	39/LHP/IX/2017 tanggal 06 September 2017 <i>39/LHP/IX/2017 dated 06 September 2017</i>
12		Jambi	41/LHP/IX/2017 tanggal 05 September 2017 <i>41/LHP/IX/2017 dated 05 September 2017</i>
13		Palembang	50/LHP/IX/2017 tanggal 29 September 2017 <i>50/LHP/IX/2017 dated 29 September 2017</i>
14	Kanwil III (Jakarta) <i>Region III (Jakarta)</i>	Tangerang	06/LHP/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 <i>06/LHP/III/2017 dated 17 March 2017</i>
15		Serang	30/LHP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 <i>30/LHP/VI/2017 dated 20 June 2017</i>
16		Pontianak	43/LHP/IX/2017 tanggal 06 September 2017 <i>43/LHP/IX/2017 dated 06 September 2017</i>
17		Jakarta	65/LHP/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 <i>65/LHP/XII/2017 dated 12 December 2017</i>

No	KCK/ Kantor Wilayah KCK/Regional Offices	Kantor Cabang Branch Offices	Nomor LHP LHP Number
18	Kanwil IV (Bandung) Region IV (Bandung)	Purwakarta	04/LHP/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 04/LHP/III/2017 dated 14 March 2017
19		Cirebon	05/LHP/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 05/LHP/III/2017 dated 14 March 2017
20		Tasikmalaya	07/LHP/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 07/LHP/III/2017 dated 17 March 2017
21		Sukabumi	08/LHP/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 08/LHP/III/2017 dated 17 March 2017
22		Bandung	61/LHP/XI/2017 tanggal 24 November 2017 61/LHP/XI/2017 dated 24 November 2017
23	Kanwil V (Semarang) Region V (Semarang)	Solo	02/LHP/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 02/LHP/III/2017 dated 14 March 2017
24		Kudus	12/LHP/IV/2017 tanggal 04 April 2017 12/LHP/IV/2017 dated 04 April 2017
25		Pekalongan	13/LHP/IV/2017 tanggal 05 April 2017 13/LHP/IV/2017 dated 05 April 2017
26		Purwokerto	15/LHP/IV/2017 tanggal 06 April 2017 15/LHP/IV/2017 dated 06 April 2017
27		Yogyakarta	32/LHP/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 32/LHP/VIII/2017 dated 18 August 2017
28		Semarang	59/LHP/XI/2017 tanggal 10 November 2017 59/LHP/XI/2017 tanggal 10 November 2017
29	Kanwil VI (Surabaya) Region VI (Surabaya)	Malang	03/LHP/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 03/LHP/III/2017 dated 14 March 2017
30		Madiun	10/LHP/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 10/LHP/III/2017 dated 17 March 2017
31		Kediri	11/LHP/IV/2017 tanggal 03 April 2017 11/LHP/IV/2017 dated 03 April 2017
32		Banyuwangi	14/LHP/IV/2017 tanggal 06 April 2017 14/LHP/IV/2017 dated 06 April 2017
33		Surabaya	60/LHP/XI/2017 tanggal 17 November 2017 60/LHP/XI/2017 dated 17 November 2017
34	Kanwil VII (Denpasar) Region VII (Denpasar)	Sumbawa Besar	20/LHP/IV/2017 tanggal 06 April 2017 20/LHP/IV/2017 dated 06 April 2017
35		Mataram	29/LHP/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 29/LHP/VI/2017 dated 06 June 2017
36		Kupang	46/LHP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 46/LHP/IX/2017 dated 11 September 2017
37		Denpasar	51/LHP/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 51/LHP/X/2017 dated 03 October 2017
38	Kanwil VIII (Banjarmasin) Region VIII (Banjarmasin)	Balikpapan	09/LHP/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 09/LHP/III/2017 dated 17 March 2017
39		Tarakan	25/LHP/IV/2017 tanggal 28 April 2017 25/LHP/IV/2017 dated 28 April 2017
40		Palangka Raya	38/LHP/IX/2017 tanggal 07 September 2017 38/LHP/IX/2017 dated 07 September 2017
41		Banjarmasin	48/LHP/IX/2017 tanggal 22 September 2017 48/LHP/IX/2017 dated 22 September 2017
42		Samarinda	56/LHP/XI/2017 tanggal 16 November 2017 56/LHP/XI/2017 dated 16 November 2017



No	KCK/ Kantor Wilayah <i>KCK/Regional Offices</i>	Kantor Cabang <i>Branch Offices</i>	Nomor LHP <i>LHP Number</i>
43	Kanwil IX (Makassar) <i>Region IX (Makassar)</i>	Bitung	16/LHP/IV/2017 tanggal 06 April 2017 <i>16/LHP/IV/2017 dated 06 April 2017</i>
44		Parepare	18/LHP/IV/2017 tanggal 06 April 2017 <i>18/LHP/IV/2017 dated 06 April 2017</i>
45		Sorong	19/LHP/IV/2017 tanggal 06 April 2017 <i>19/LHP/IV/2017 dated 06 April 2017</i>
46		Ambon	22/LHP/IV/2017 tanggal 26 April 2017 <i>22/LHP/IV/2017 dated 26 April 2017</i>
47		Palu	24/LHP/IV/2017 tanggal 28 April 2017 <i>24/LHP/IV/2017 dated 28 April 2017</i>
48		Gorontalo	27/LHP/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 <i>27/LHP/V/2017 dated 23 May 2017</i>
49		Kendari	33/LHP/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 <i>33/LHP/VIII/2017 dated 08 August 2017</i>
50		Ternate	34/LHP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 <i>34/LHP/VIII/2017 dated 16 August 2017</i>
51		Manado	40/LHP/IX/2017 tanggal 03 September 2017 <i>40/LHP/IX/2017 dated 03 September 2017</i>
52		Jayapura	49/LHP/IX/2017 tanggal 29 September 2017 <i>49/LHP/IX/2017 dated 29 September 2017</i>
53		Manokwari	53/LHP/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 <i>53/LHP/X/2017 dated 18 October 2017</i>
54		Mamuju	54/LHP/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 <i>54/LHP/X/2017 dated 18 October 2017</i>
55		Makassar	57/LHP/XI/2017 tanggal 02 November 2017 <i>57/LHP/XI/2017 dated 02 November 2017</i>
56		Palopo	58/LHP/XI/2017 tanggal 08 November 2017 <i>58/LHP/XI/2017 dated 08 November 2017</i>

b. 12 (Dua belas) Divisi yaitu:

b. And 12 Divisions, namely:

No	Divisi <i>Divisions</i>	Nomor LHP <i>LHP Number</i>
1	Divisi Keuangan & Investasi <i>Finance & Investment Division</i>	31/LHP/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 <i>31/LHP/VIII/2017 dated 08 August 2017</i>
2	Divisi Bisnis Suretyship & Penjaminan Nonbank <i>Suretyship Business & Nonbank Guarantee Division</i>	35/LHP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 <i>35/LHP/VIII/2017 dated 14 August 2017</i>
3	Divisi Klaim & Subrogasi <i>Claim & Subrogation Division</i>	36/LHP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 <i>36/LHP/VIII/2017 dated 16 August 2017</i>
4	Divisi MSDM <i>HRM Division</i>	37/LHP/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 <i>37/LHP/VIII/2017 dated 18 August 2017</i>
5	Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan <i>Guarantee Engineering & Administration Division</i>	42/LHP/IX/2017 tanggal 05 September 2017 <i>42/LHP/IX/2017 dated 05 September 2017</i>
6	Divisi Sistem Resi Gudang <i>Warehouse Receipt System Division</i>	44/LHP/IX/2017 tanggal 06 September 2017 <i>44/LHP/IX/2017 dated 06 September 2017</i>
7	Divisi Umum <i>General Affairs Division</i>	45/LHP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 <i>45/LHP/IX/2017 dated 11 September 2017</i>

No	Divisi Divisions	Nomor LHP LHP Number
8	Divisi Bisnis Penjaminan Program <i>Program Guarantee Business Division</i>	52/LHP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 <i>52/LHP/X/2017 dated 16 October 2017</i>
9	Divisi Bisnis Penjaminan Bank <i>Bank Guarantee Business Division</i>	55/LHP/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 <i>55/LHP/X/2017 dated 18 October 2017</i>
10	Divisi Akuntansi & PKBL <i>Accounting and Partnership & Community Development Program Division</i>	66/LHP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 <i>66/LHP/XII/2017 dated 13 December 2017</i>
11	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	67/LHP/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 <i>67/LHP/XII/2017 dated 28 December 2017</i>
12	Divisi Teknologi & Informasi <i>Information & Technology Division</i>	68/LHP/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 <i>68/LHP/XII/2017 dated 28 December 2017</i>

2. *Counterpart* Auditor Eksternal

Sasaran tersebut dilakukan dengan strategi mendampingi auditor eksternal pada saat melakukan pemeriksaan guna memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan guna memperlancar pemeriksaan yang dilaksanakan dengan rincian:

2. External Auditor Counterpart.

These targets are accomplished by accompanying external auditor strategies when conducting the examination to meet all the necessary requirements to facilitate the examination carried out with the following details:

Counterpart	Surat Tugas <i>Letter of Assignment</i>
Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority (FSA)</i>	S-441/NB.2/2017 tanggal 03 Juli 2017 <i>S-441/NB.2/2017 dated 03 July 2017</i>
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Board</i>	S-495/D4/03/2017 dan ST-137/D403/I/2017 tanggal 16 Mei 2017 <i>S-495/D4/03/2017 dan ST-137/D403/I/2017 dated 16 May 2017</i>
KAP Hertanto, Grace dan Karunawan (HGK) <i>Public Accountant Office of Hertanto, Grace dan Karunawan</i>	PKS No. 18/PK/4.2/VIII/2017 – 209.01.06/HGK.HQ/VIII-2017 tanggal 31 Agustus 2017 <i>PKS No. 18/PK/4.2/VIII/2017 – 209.01.06/HGK.HQ/VIII-2017 dated 31 August 2017</i>

Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut (TL) atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Sasaran tersebut dapat tercapai dengan strategi melakukan *monitoring* penyelesaian tindak lanjut (TL) oleh unit kerja yang diperiksa (*auditee*) atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

Implementation of follow-up (TL) on internal and external examination results. These targets can be achieved by a strategy of monitoring the follow-up (TL) completion by audited work units based on internal and external examination results.

A. Hasil Temuan Auditor Eksternal

A. External Auditors Findings

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal

Number of Findings by External Auditor

Posisi Position	Auditor Eksternal External Auditor					
	BPK Financial and Development Supervisory Board		OJK Financial Services Authority		KAP Public Accountant Office of Hertanto, Grace dan Karunawan	
	PDDT	Kerugian Negara State Loss	2017	2016	2017	2016
Total Temuan Total Findings	-	-	5	-	3	6
Total Rekomendasi Total Recommendations	-	-	5	9	6	7
Rekomendasi yang Telah Diselesaikan Settled Recommendations	-	-	0	9	0	0
Dalam Proses Penyelesaian In the Process of Settlement	-	-	5	-	3	7

B. Hasil Temuan SPI

B. Internal Audit Unit Findings Result

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan SPI

Internal Audit Unit Findings Result

Unit Kerja Work Unit	2017			2016		
	Jumlah Rekomendasi 2017 Number of Recommendations in 2017	Penyelesaian Tindak Lanjut 2017 Follow-up Settlement in 2017		Jumlah Rekomendasi 2016 Number of Recommendations in 2016	Penyelesaian Tindak Lanjut 2016 Follow-up Settlement in 2016	
Divisi Division	66	35	46,97%	150	60	47,33%
Kantor Cabang Branch Office	550	462	16,00%	473	312	65,96%
Jumlah Total	616	497	19,32%	623	372	59,71%

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Akuntan Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; dan usulan Dewan Pengawas yang disahkan dalam RPB. Berdasarkan PP 20/2015 tersebut, Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, di mana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

Berdasarkan keputusan RPB tahun 2017 disetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan untuk melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2017. Sementara akuntan yang akan melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2016 adalah Drs. Hertanto, M.S.Ak., CPA., CPMA., CA., CTA. Audit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2016 oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan telah memasuki periode ke-3 berturut-turut, demikian pula dengan akuntan Drs. Hertanto.

Kepada KAP Hertanto, Grace, Karunawan, Perusahaan memberikan biaya jasa untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 sebesar Rp386.000.000. Hasil audit menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 Perusahaan "Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017. Serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

PUBLIC ACCOUNTANT

Public Accountant, or the audit process conducted by external party, conducts financial audit to give independent and objective opinion on the fairness, compliance to principles, and suitability of the Company's financial statements with the Indonesia's Financial Accounting Standards (SAK) and the applicable laws and regulations. The Public Accountant must be free from the intervene of the Board of Supervisors, Directors, and parties with interests to the Company. The Company must provide all accounting records and supporting data necessary in the external audit process to enable the Public Account to give its opinion on fairness, compliance with principles, and suitability of the Company's financial statements with the Indonesia Financial Accounting Standards.

The appointment of the Public Accountant refers to Government Regulation No. 20 of 2015 on Public Accountant Practices; and recommendation from the Board of Supervisors, which is validated in Joint Discussion Meeting. Based on the Government Regulation No. 20/2015, Public Accountant is limited to the most 5 (five) consecutive fiscal years, where the Public Auditor can provide again the audit services after a consecutive of 2 (two) fiscal years not giving the audit services to the same company.

Based on the resolution of Joint Meeting Discussion in 2016, the appointment of Public Accountant (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan was approved to conduct independent audit on the Company's Financial Statements for 2017 fiscal year. The accountant who will conduct the independent audit of the Company's Financial Statements for 2017 fiscal year is Drs. Hertanto, M.S.Ak., CPA., CPMA., CA., CTA. The Company's financial statements audit for 2016 fiscal year by the Public Accountant Office of Hertanto, Grace, Karunawan has entered its 3rd period consecutively, and so is with the accountant Drs. Hertanto.

To the Public Accountant Office of Hertanto, Grace, Karunawan, the Company provided services fee to perform the audit of Financial Statements for 2017 fiscal year in the amount of IDR386,000,000. The audit result stated that the Financial Statements for 2017 fiscal year is "Presented fairly, with all material matters, consolidated financial of Perum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries dated 31 December 2017, as well as the financial performance and consolidated cash flow for the year ended on the said date, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards".



Di samping audit terhadap laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2017, KAP Hertanto, Grace, Karunawan juga memberikan jasa sebagai berikut:

1. Audit umum (*general audit*) atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2. Audit atas Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pengendalian Intern tahun 2017
3. Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
4. Audit atas Laporan Keuangan Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pihak Pertama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
5. *Review*/telahaan atas Pengendalian Internal Pihak Pertama, sekaligus menyampaikan usulan/rekomendasi perbaikannya, dalam hal ditemukan kelemahan yang signifikan, yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut Direksi

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2012 hingga 2017 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

In addition to the audit on the Company's financial statements for 2017 fiscal year, the Public Accountant Office of Hertanto, Grace, Karunawan also provides the following services:

1. General audit on Consolidated Financial Statements.
2. Audit of the Company's Compliance to the applicable Laws and Regulations and Internal Control of the year 2017.
3. Performance Evaluation for the year ended on 31 December 2017.
4. Audit on Financial Statements of First Party Partnership and Community Development Management Program for the year ended 31 December 2017
5. Review on the First Party Internal Control, including proposing suggestions/recommendations of the improvement, in regard of findings of significant weakness that needs the Board of Directors' attention and follow-up.

For transparency purpose, below is the list of Public Auditor of the Company's Financial Statements for 6 (six) consecutive years, from 2012 to 2017 fiscal years.

Tahun Buku <i>Fiscal Year</i>	Akuntan <i>Accountant</i>	Kantor Akuntan Publik <i>Public Accountant Office</i>	Opini <i>Opinion</i>	Biaya Jasa Audit (Rp-ribu) <i>Audit Services Fee (In IDR- thousand)</i>
2017	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material <i>Fair, in all material respects</i>	386.000
2016	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material <i>Fair, in all material respects</i>	387.612
2015	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material <i>Fair, in all material respects</i>	389.565
2014	Budi Taufik Wibawa	Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar untuk hal yang material <i>Fair, in all material respects</i>	300.740
2013	Budi Taufik Wibawa	Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar untuk hal yang material <i>Fair, in all material respects</i>	300.740
2012	Budi Taufik Wibawa	Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar untuk hal yang material <i>Fair, in all material respects</i>	285.000

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Sistem Manajemen Risiko Penjaminan Kredit

Risiko penjaminan kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan. Dalam mengelola risiko penjaminan kredit tersebut, maka diperlukan Sistem Manajemen Risiko Penjaminan Kredit. Sistem ini meliputi rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Penjaminan Kredit.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif pada seluruh tahapan kegiatan penjaminan kredit disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Perusahaan serta karakteristik dan risiko kredit yang dijamin. Pada tahapan implementasi, dilakukan proses identifikasi risiko penjaminan yang bertujuan untuk memprediksi risiko atas kredit yang diajukan Penjaminannya oleh Penerima Jaminan. Prediksi risiko tersebut dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Persetujuan Penjaminan yang dituangkan dalam hasil evaluasi Kelayakan Penjaminan sesuai dengan sistem dan prosedur penjaminan terkait. Pendekatan yang dilakukan dalam identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, dan *Personality*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya Risiko Penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score*, ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu Pengajuan Penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah Rapat Komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari Pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan Penjaminan (*risk taker unit*) dan Pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

The System of Risk Management of Credit Guarantee

Credit Risk Management is a risk due to a failure from customers to fulfill their obligations. In managing such guarantee risk, a Credit Guarantee Risk Management System is required. The system includes a set of procedures used to identify, measure, monitor, and control the risks that come from Credit Guarantee activities.

In practice, the Risk Management System is implemented effectively at all stages of Credit Guarantee activities, in accordance with Company's resources capability and the guaranteed characteristics and credit risks. During the implementation phase, a risk identification process is conducted which is aimed to predict the risk of the credits submitted under the guarantees by the Recipient of the Guarantee. Such predicted risk is used as one considerations in decision making.

As outlined in the evaluation result of Guarantee Feasibility, Guarantee Approval is conducted in accordance with the system and procedures of the guarantee. In identifying the risk, the approach taken uses the 4P model, namely Prospect, Productivity, Payment, and Personality. Items to be considered for each of the above aspects are adjusted to the characteristics of credit to be guaranteed, and elaborated in the corresponding guarantee systems and procedures.

The result of risk identification process is then followed-up with a risk prediction of the guarantee, to identify the amount of guarantee risk. In practice, a risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for every aspect of the 4P model. Quantitative prediction is conducted with the use of scoring system. Based on the score result, the risk guarantee prediction of each Guaranteed or a group of Guaranteed, or a new product is determined.

Next, the decision to either approve or disapprove a Guarantee Submission is taken in a Committee Meeting. In accordance with a precautionary principle, members of the committee shall consist of Officials directly related to the risk taker unit and Officials directly related to the consequences of potential risk costs (i.e. risk financing unit). With this decision-making mechanism which involves two or more parties of different perspectives, it is expected that the decision taken will be more objective and the potential risks due to wrong decision-making can be minimized.



Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan Penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan Sistem Manajemen Risiko adalah pelaporan dan evaluasi. Setiap unit kerja yang terekspos oleh risiko harus menyampaikan laporan terkait dengan risiko tersebut. Atas laporan tersebut, bagian yang menangani Manajemen Risiko melakukan pengolahan data dan informasi sebagai dasar penetapan kebijakan dalam meminimalisasi Risiko Penjaminan Kredit.

Operational Risk Management

Dalam meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan operasional, Perusahaan juga memasukan potensi tersebut ke dalam bagian pengelolaan Sistem Manajemen Risiko Perum Jamkrindo. Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Risiko operasional tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kegagalan sistem/*downtime* & teknologi, kesalahan manusia (*human error*), peralatan (*mechanical and engineering*), pihak eksternal, *fraud*, kegagalan proses internal, organisasi & SDM, *Counterpart*, HSE (*Health, Safety and Environment*), dan Teknologi Informasi.

Dalam rangka pengelolaan risiko operasional Perusahaan, Perum Jamkrindo mengembangkan kerangka kerja dengan mengacu kepada ketentuan eksternal dan internal Perusahaan. Cakupan kerangka kerja tersebut meliputi kebijakan dan prosedur, pengembangan *tools* dan sistem informasi Manajemen Risiko operasional, *monitoring* dan pelaporan. Perusahaan juga menerapkan Manajemen Risiko pada sistem informasi dan menerapkan *Business Continuity Management* (BCM).

In addition to being used to assist the process of decision making on Guarantee, the result of risk analysis may also serve as one basic consideration in monitoring the ongoing credit. For high risk credit, credit monitoring shall be done more carefully.

An integral part of the Risk Management System application is the reporting and evaluation. Each work unit exposed by any risk must submit a report related to those risks. Towards this report, the section handling Risk Management shall conduct data and information processing as the basis to determine a policy in minimizing Credit Guarantee Risk.

Operational Risk Management

To mitigate the impact of loss due to operational activities, the Company also incorporates potentials of operational risks into Perum Jamkrindo Risk Management system. In accordance with the Risk Management policy of Perum Jamkrindo, operational risk is a risk caused by inadequate and/or nonfunctioning internal processes, human error, system failure or external problems affecting Company's operations.

An operational risk can be caused by several factors, for examples: system failure/*downtime* & technology, human error, mechanical and engineering, external party, fraud, internal process failure, organization & HR, Counterpart, HSE (Health, Safety and Environment), and Information Technology.

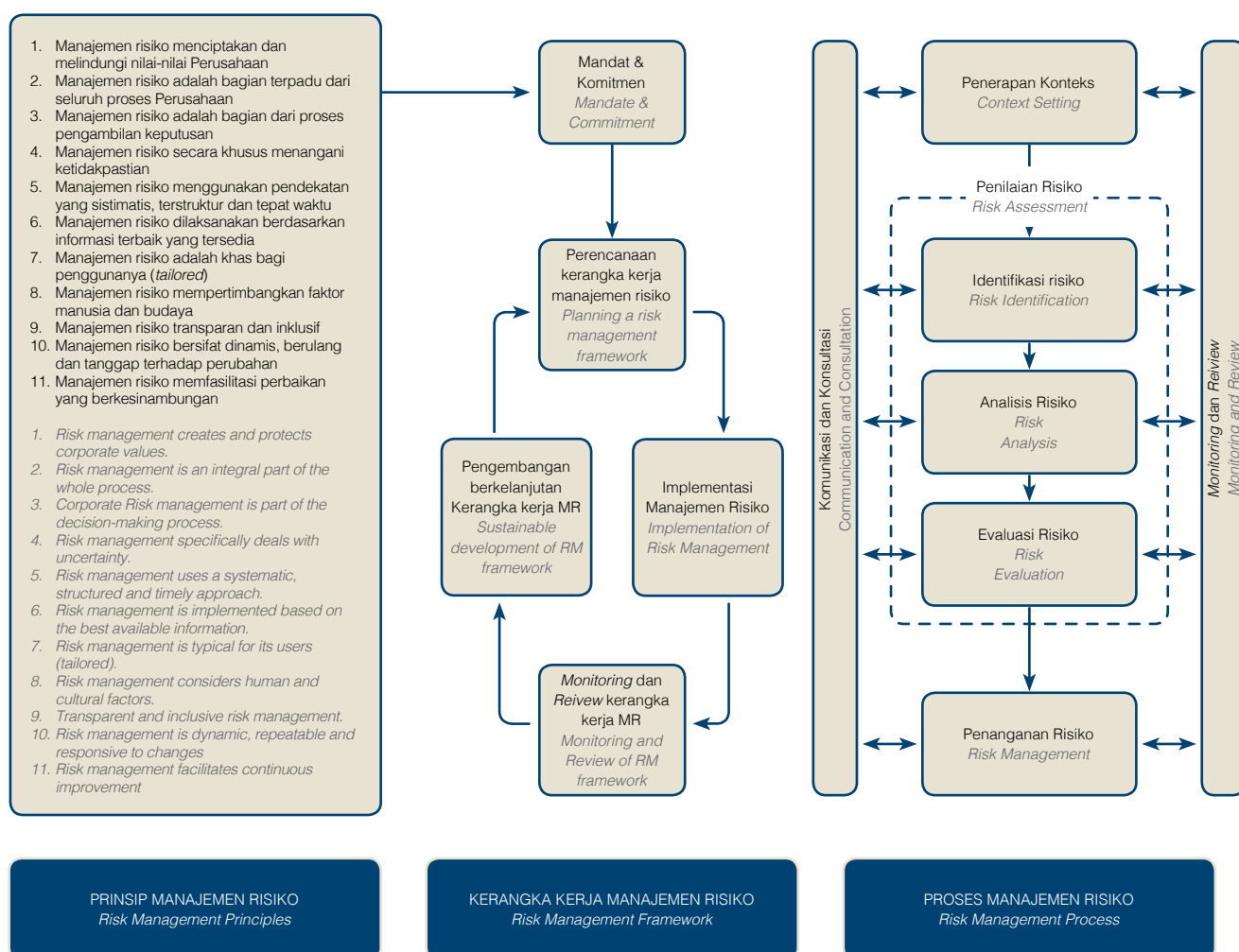
To manage the Company's operational risks, Perum Jamkrindo develops a framework which refers to the Company's internal and external requirements. The scope of the framework includes policies and procedures, development of Risk Management operational information and systems, and monitoring and reporting tools. The Company also applies Risk Management to the information system and implements Business Continuity Management (BCM).

Definisi Manajemen Risiko Perum Jamkrindo

Manajemen Risiko merupakan alat bantu pemenuhan akuntabilitas Direksi yang mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perusahaan. Komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan, dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang dibangun sesuai konten dan kapabilitas Perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan dengan menggunakan ISO 31000:2009 atau SNI ISO 31000:2011.

Definition of Perum Jamkrindo Risk Management

Risk Management is a tool for the fulfillment of accountability of the Board of Directors which supports the Company's decision-making and development process. Commitment to the application of Risk Management, as an integral part of the Company's overall management system, is set forth in Risk Management Policies and Procedures built in accordance with the Company's contents and capabilities. Company Risk Management is implemented in accordance with the conditions and requirements of the Company with the use of ISO 31000: 2009 or SNI ISO 31000: 2011.



Blue-Print Manajemen Risiko Perum Jamkrindo

Untuk melakukan implementasi manajemen risiko terintegrasi, Perum Jamkrindo, telah menyusun *Blue-Print* Manajemen Risiko Terintegrasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. *Blue-Print* yang telah diselesaikan pada tahun 2010 tersebut merupakan cetak biru arsitektur pengembangan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Secara umum, *Blue-Print* ERM Perum Jamkrindo terdiri dari 6 komponen utama yaitu komitmen, struktur dan fungsi, mekanisme, proses manajemen risiko, sistem pendukung, dan pencapaian. Keenam komponen tersebut memiliki berbagai elemen sebagai bagian utamanya, secara lebih lengkap model *Blue-Print* ERM Perum Jamkrindo digambarkan dalam model di bawah ini.

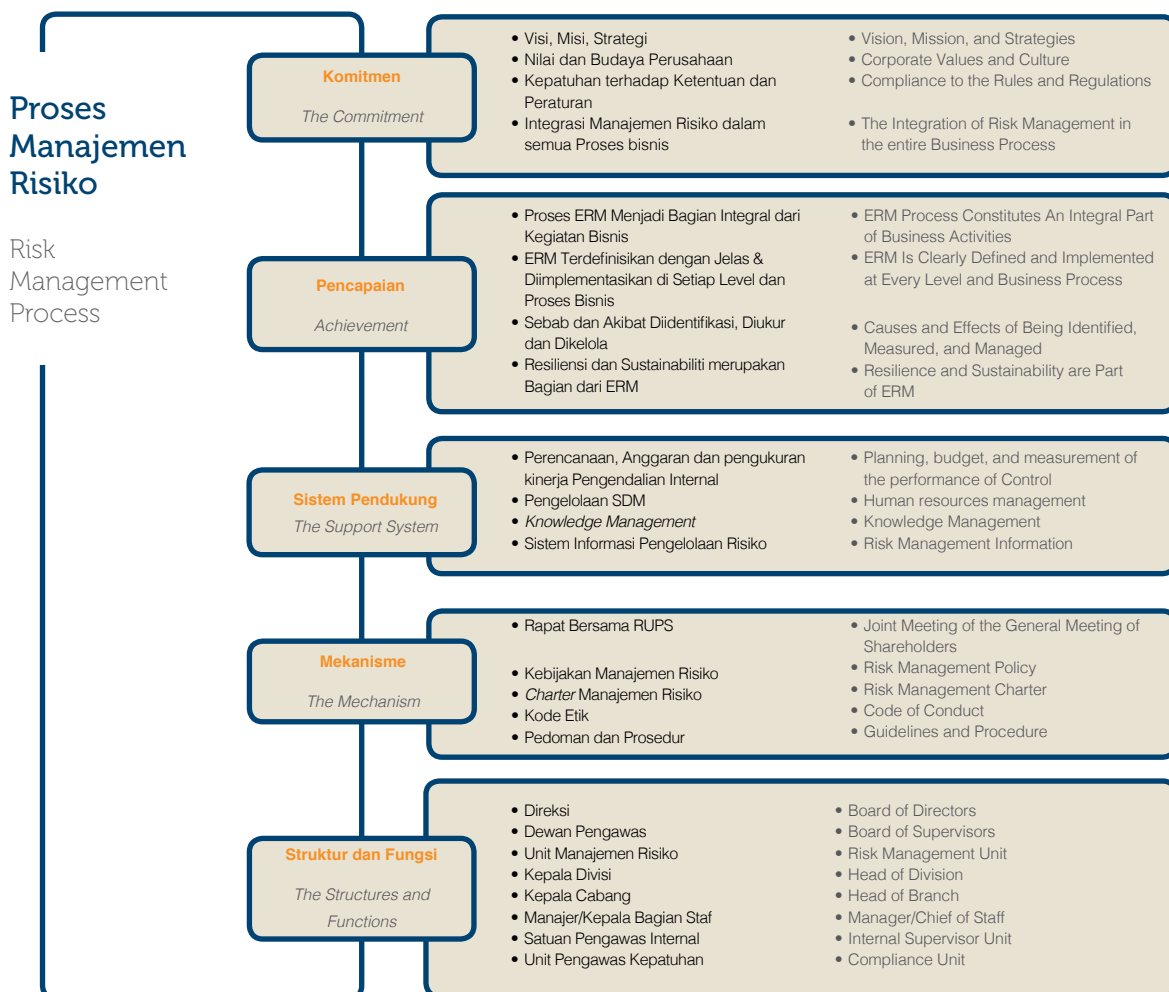
Model Blue-Print Manajemen Risiko Terintegrasi Perum Jamkrindo

Blue-Print of Perum Jamkrindo Risk Management

To execute the implementation of integrated risk management, Perum Jamkrindo has developed a Blue-Print Integrated Risk Management of Public Corporation (Perum) Indonesian Credit Guarantee. The Blue-Print which was completed in 2010 is a blueprint for Enterprise Risk Management (ERM) development architecture.

In general, Perum Jamkrindo Blue-Print ERM consists of 6 main components namely: commitment, structure and function, mechanism, risk management process, support system, and achievement. The six components have various elements as the main part, and a more complete model of the Jamkrindo ERM Blue-Print is described in the model below.

Perum Jamkrindo Blue-Print Model of Integrated Risk Management

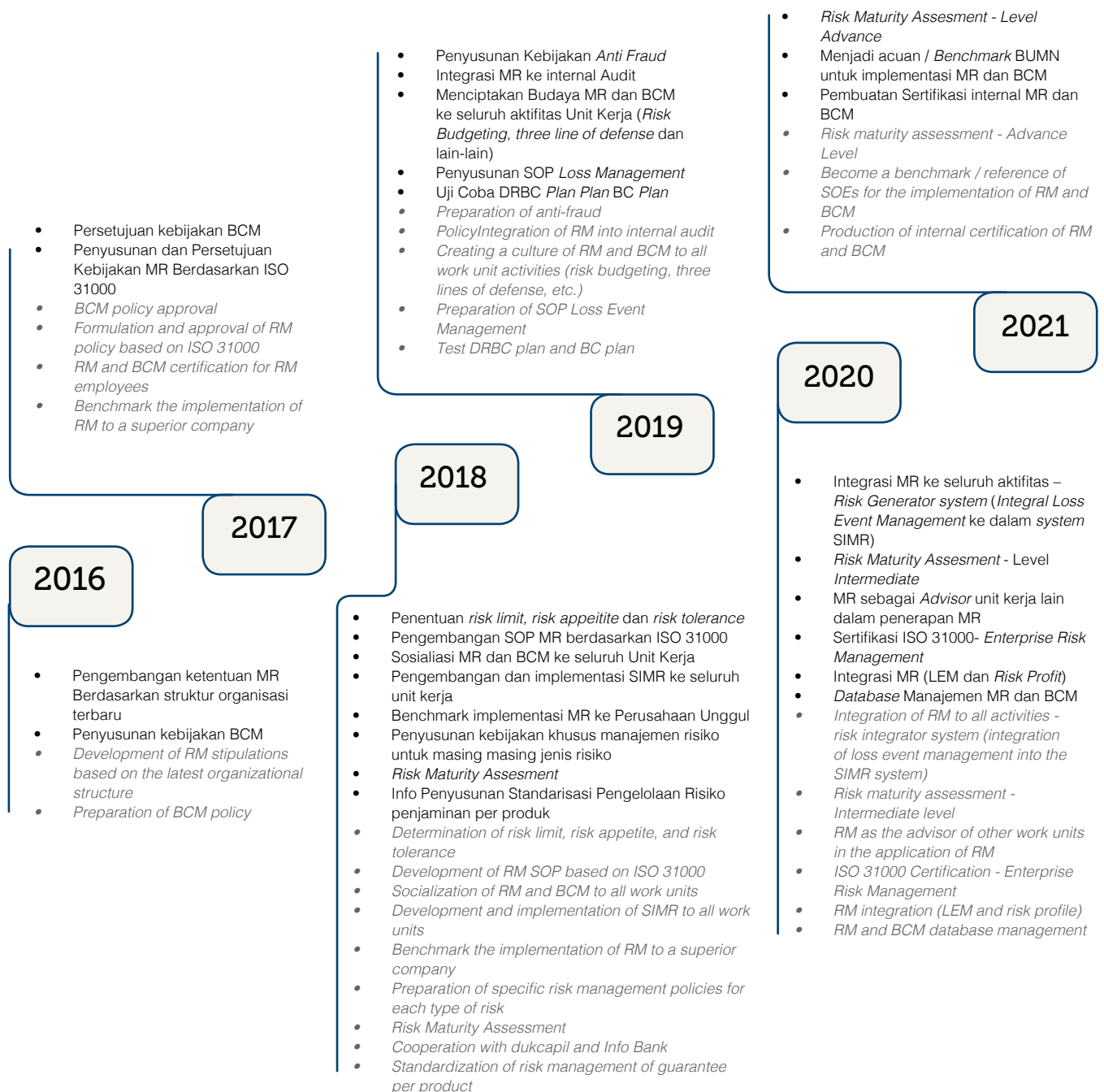


Road Map Manajemen Risiko

Untuk mencapai kondisi penerapan manajemen risiko seperti yang telah dituangkan dalam *blue print* Manajemen Risiko, Perum Jamkrindo telah menyusun *road map* implementasi pengembangan manajemen risiko sampai tahun 2021, dengan *milestone* pencapaian *Blue-Print* manajemen risiko yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

Road Map of Risk Management

To achieve the conditions of risk management implementation as set forth in the blue print of Risk Management, Perum Jamkrindo has developed a road map for implementing the risk management development, with a set of milestone that marks the achievement of Blue-Print integrated risk management, and they are as follows:





Implementasi Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidentil. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan *monitoring* dan evaluasi risiko.

Pada tahap awal, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko *Inherent*. Atas hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko.

Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidentil adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Divisi Manajemen Risiko.

Kegiatan insidentil berupa pemberian opini untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJPP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/*software* baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Sesuai Peraturan Direksi No. 03 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo, pelaksanaan pemberian opini tersebut mulai diterapkan secara resmi pada tanggal 1 Juli 2013, namun demikian mulai bulan Oktober 2011 telah dilakukan pemberian opini dalam rangka pembelajaran. Peraturan Direksi tersebut telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 25/Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pendapat (opini) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.

Pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, telah dilakukan pemberian opini sebanyak 130 opini, baik opini terkait dengan kegiatan penjaminan, keuangan, maupun kegiatan pendukung lainnya.

Implementation of Risk Management

Risk Management activities are conducted regularly and incidentally. Risk Management Activities which are conducted regularly are the risk management process that consists of 4 process-stages, namely: risk identification, risk assessment, risk management and risk monitoring and evaluation.

In the early stages, the undertaken process is identification and assessment of inherent risk. The results of risk identification and risk assessment are evaluated to improve the risk management process.

Incidental risk management activities are implementation of risk management undertaken at certain stages, based on the stipulation in the SOP regarding risk-based business process and opinions relating to matters which should be submitted to the Risk Management Division.

Incidental activities are in the form of feedback for issues which are considered strategic and having a significant impact to the sustainability to the Company, the creation of new products and/or activities, transactions with a certain value, a write-off policy of corporate accounts receivable, creation of SOP, CPR, RKAP, implementation of new applications/*software*, determination of new bank for deposit placement and investment, and other strategic policies.

According to the Board of Directors' Regulation No. 03 dated 10 October 2011 on Opinion of Perum Jamkrindo Risk Management, implementation on giving the opinion started to be implemented officially on 1 July 2013, however on October 2011 opinion was given in order to learn. The Board of Directors' Regulation No. 03 dated 10 October 2011 has been updated with the Board of Directors' Regulation No. 25/Per-Dir/VIII/2016 dated 12 August 2016 on Opinion of Perum Jamkrindo Risk Management.

In the period of January 1 – 31 December 2017, 130 (one hundred and thirty) feedback were submitted, which include opinions related to guarantee activities, financial or other supporting activities.

Kelengkapan Manajemen Risiko

Untuk implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, maka diperlukan beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Perum Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko
Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko merupakan peraturan yang menyatakan tentang penerapan manajemen risiko dan perangkat pendukung yang diperlukan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pernyataan tentang pengelolaan risiko yang merupakan pernyataan Direksi dan seluruh Pejabat Perum Jamkrindo mengenai kebijakan penanganan risiko perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tertulis dari komitmen Direksi dan Pejabat Perum Jamkrindo dalam menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan.
2. Organisasi Manajemen Risiko Perum Jamkrindo
Secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Divisi Manajemen Risiko. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat *ad hoc*, yaitu Komite Manajemen Risiko Perum Jamkrindo. Komite Manajemen Risiko (KMR) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia adalah komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan. Komite Manajemen Risiko berperan untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi risiko usaha, jenis, dan dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan, menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan, dan memberikan laporan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan kepada Dewan Pengawas. Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, PIC Manajemen Risiko berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko.
3. Kebijakan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo
Kebijakan Manajemen Risiko merupakan pedoman atau acuan penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi di Perusahaan dan pedoman penyusunan kebijakan pendukung di korporasi dan tingkat Unit Kerja. Kebijakan Panduan manajemen risiko tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam SOP yang terdapat di dalam Divisi Manajemen Risiko.

Risk Management Tools

To implement an integrated risk management, the Company needs several important tools to support the risk management implementation. Perum Jamkrindo has therefore compiled several tools as follows:

1. The Board of Directors Regulation regarding Implementation of Risk Management
The Board of Directors regulation regarding Implementation of Risk Management is a regulation stating the risk management implementation and the necessary supporting tools. The regulation includes a statement on risk management i.e. statement from the Board of Directors and all Perum Jamkrindo Officials regarding Company's risk management policy. The statement is a written form of the Board of Directors commitment and Perum Jamkrindo Officials in applying risk management at every stage of their activity.
2. Organization of Perum Jamkrindo Risk Management
Structurally, the Board of Directors has established an organizational structure which include a Risk Management Division. In addition to structural organizations, the Company has an *ad hoc* structure, i.e. the Risk Management Committee of Perum Jamkrindo. The Risk Management Committee (KMR) of Public Company (Perum) Indonesian Credit Guarantee is a committee of Directors and Division Heads whose duties are related to the management of the Company's Risk Management. The Risk Management Committee plays a role in conducting regular assessments and recommendations on business risks, types and impacts on the Company's activities, establishes the Company's risk appetite and risk tolerance, and reports on the implementation of the Company's Risk Management to the Board of Supervisors. In addition, for the sake of an efficient risk management process implementation, a Person in Charge (PIC) is designated at every work unit which carries a task to coordinate the implementation of risk management processes in his/her work unit. In performing its duties, the PIC of Risk Management coordinates and consults with the Risk Management Division.
3. Perum Jamkrindo Risk Management Policy
The Risk Management Policy is a guideline or reference for the implementation of Integrated Risk Management in the Company and guidelines for the preparation of corporate support policies and the work unit level. The risk management guidance policy is then adopted into SOPs within the Risk Management Division. Standard Operation Process of Risk Management



4. SOP Manajemen Risiko
SOP Manajemen Risiko merupakan SOP yang ditujukan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Perum Jamkrindo. Peraturan Direksi yang mengatur terkait dengan SOP Manajemen Risiko No. 24/Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.
 5. Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko
Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Nomor 15/SE/4/VII/2012. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap Unit Kerja terkait penerapan Manajemen Risiko di Perum Jamkrindo. Hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan penerapan manajemen risiko tersebut secara garis besar adalah :
 - a. Identifikasi Risiko
 - b. Penilaian Risiko
 - c. Penanganan Risiko
 - d. *Monitoring* dan Evaluasi Risiko
 - e. Komite Manajemen Risiko
 - f. Pelaporan *Loss Event* (Risiko yang telah terjadi)
 - g. Pelaksanaan proses bisnis dengan mempertimbangkan risiko
 - h. Pemberian Opini/Pendapat Manajemen Risiko atas risiko yang berdampak secara signifikan bagi Perusahaan.
 6. SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko
SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait di dalam proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam *risk register* dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, sementara untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari bagian Divisi Manajemen Risiko sebagai *second opinion* dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Perum Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap.
 7. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi
Terkait dengan sistem pendukung manajemen risiko terintegrasi sejak tahun 2011, perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR). Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko secara periodik dan terekam digital. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk *database* yang terstruktur.
4. Risk Management SOP
Risk Management is a SOP aimed to provide a technical guidance in implementing the risk management process at Perum Jamkrindo. Regulation of the Board of Directors governance which are related to Risk Management SOPs is No. 24 / Per-Dir / VIII / 2016 dated August 12, 2016, regarding Standard Operating Procedure (SOP) of Risk Management Perum Jamkrindo.
 5. Technical Guidelines of the Risk Management Implementation
Technical Guidance of the Risk Management Implementation was issued with the Circular Letter No.15/ SE/4/VII/2012. The Guideline includes an explanation of what each Work Unit should do regarding the Risk Management implementation in Perum Jamkrindo. Issues that must be completed in relation to implementation of risk management in general are:
 - a. Risk Identification
 - b. Risk Assessment
 - c. Risk Management/Handling
 - d. Risk Monitoring and Evaluation
 - e. Risk Management Committee
 - f. Reporting on Loss Event (Risks that have occurred)
 - g. Implementation of business processes by taking into account any risks
 - h. Giving Opinion/Risk Management Opinion on risks which have significant impact to the Company.
 6. Risk Based Business Process SOP
An SOP of Risk Based Business Process is the SOP of a business process constructed by taking into account all associated risks in the process. The SOP is intended to ensure that the risks listed in the risk registers and the necessary risk controls have been considered during the execution of a business process, and that business units are ensured to have been given an opinion regarding new types of risks from the ERM section as a second opinion in decision-making. Given the type of activities in Perum Jamkrindo is quite diverse, preparation of risk-based business process SOP is conducted in several stages.
 7. Integrated Risk Management Support System
In relation to integrated risk management support systems since 2011, the Company has begun to build Risk Management Information System (SIMR) Applications. The application serves to facilitate the process of identification, risk assessment, and risk management follow-up. With the application, risk data can be stored in the form of a structured data base.

Jenis Dan Pengelolaan Risiko Selama Tahun 2017

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Risiko Penjaminan Kredit

Risiko Penjaminan Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default rate* dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

Pada posisi 31 Desember 2017, indikator-indikator pada risiko penjaminan kredit mengalami kenaikan dan penurunan.

- a. Indikator yang mengalami kenaikan yaitu :
Default Rate yaitu dari 0,59% pada tahun 2016, naik menjadi 0,60% pada tahun 2017.
- b. Indikator yang mengalami penurunan, yaitu :
 - i. NPL mengalami penurunan sebesar 0,01% pada tahun 2017, yang sebelumnya sebesar 0,05%.
 - ii. Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi pada tahun 2016 sebesar 80,61%, turun menjadi 79,47% pada tahun 2017.
 - iii. *Recovery Rate* Piutang Subrogasi dari 5,96% turun 0,21% menjadi 5,75% pada tahun 2017

Types and Management of Risk in 2017

Some of the relatively significant risks in 2017 were as follows:

1. Risk of Credit Guarantee

Risk of Credit Guarantee is a risk that arises due to a failure of a guarantor to meet his obligations. These risks are shown in the amount of default rate and guaranteed NPL credit level, as well as the return of subrogated receivables.

In the period of January 1 to December 31, 2017, the indicator risk of credit guarantee has experienced a decrease and an increase

- a. Indicator experiencing an increase is:
The default rate, which increased from 0.59% in 2016, to 0.60% in 2017.
- b. Indicator experiencing a decrease is:
 - i. NPL which decreased by 0.01% in 2017, from previously at 0.05%.
 - ii. Level of Subrogation Return Achievement which amounted to 80.61% in 2016, went down to 79.47% in 2017.
 - iii. The Recovery Rate of Subrogation Receivables which went down 0.21% to 5.75% in 2017 from 5.96% in 2016

Uraian Description	2016 (RP)		2017 (RP)		Pertumbuhan/ Growth
<i>Default risk</i> = (Biaya Klaim)/ (Volume Penjaminan)	748.694.198.933	= 0,59%	896.207.609.837	= 0,60%	0,01%
	125.968.092.619.258		148.759.236.212.372		
NPL = (<i>Outstanding</i> Kredit Kol 3+4+5)/(Total <i>Outstanding</i> Kredit)	64.608.181.155	= 0,05%	71.497.231.459	= 0,04%	(0,01%)
	125.571.037.250.413		169.909.821.557.704		
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi = (Realisasi Angsuran Subrogasi)/(Target Angsuran Subrogasi)	259.384.339.757	= 80,61%	285.348.574.492	= 79,47%	(1,15%)
	321.768.030.188		359.077.995.038		
<i>Recovery Rate</i> Piutang Subrogasi = (Angsuran Piutang Subrogasi)/(Saldo Piutang Subrogasi)	259.384.339.757	= 5,96%	285.348.574.492	= 5,75%	(0,21%)



Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, dan *Personality*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kewenangan memutuskan penjaminan dalam rapat komite penjaminan kredit mengacu Per-Dir No. 08/Per-Dir/II/2017 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan Perum Jamkrindo. Dengan mekanisme pengambilan keputusan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Pada 31 Desember 2017, di samping upaya mitigasi tersebut, perusahaan juga melakukan beberapa mitigasi risiko lainnya yaitu:

- Memegang prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisa penjaminan.
- Melakukan pembaharuan perjanjian kerja sama dengan menambahkan klausul yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan penyebaran risiko dengan menambah mitra kerja baru dan menambah produk yang dikerja samakan dengan mitra kerja.
- Menambah produk yang dipasarkan oleh Perusahaan sesuai dengan tren yang sedang berkembang.

To minimize the risk of guarantee, then on the credit guarantee process, risk identification is conducted using the 4P model, that is *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, and *Personality*. The items to be considered for each of these aspects are adjusted to the characteristics of the credit to be guaranteed and elaborated in the corresponding guarantee systems and procedures.

The result of the risk identification process is then followed up with the determination of risk assurance for the risk of guarantee. In practice, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for every aspect of 4P. Quantitative prediction is done by scoring system. Based on the score predicted risk guarantee of each Guaranteed or Guaranteed group, or a new product is set.

Furthermore, for a decision of whether a guarantee application can be approved or not, a meeting is held by the committee by prioritizing prudential principles. The authority to decide the guarantee in the credit guarantee committee meeting refers to Per-Dir. 08 / Per-Dir / II / 2017 on Guidelines for Delegation of Administrative Authority and Perum Jamkrindo's Policy. With such decision-making mechanism, it is expected that the decision becomes more objective and potential risks due to mis-decision making can be minimized.

In addition to being used to assist the guarantee decision-making process, the result of risk analysis has also been made as one of the basic considerations in monitoring the ongoing credit. For credit at high risk, credit monitoring is conducted more carefully.

As of December 31, 2017, in addition to these mitigation efforts, the Company also undertook several other risk mitigations:

- Holding the principle of prudence in conducting guarantee analysis.
- Renewing the cooperation agreement by adding a clause that can be used to minimize risk.
- Risk spreading by adding new partners and adding products which are collaborated with partners.
- Adding products marketed by the Company in line with emerging trends.

- e. Melakukan peninjauan penyebaran risiko dengan bekerja sama dengan perusahaan re-asuransi.
- f. Memanfaatkan jasa agen yang dapat membantu menyeleksi calon Terjamin untuk Penjaminan Kredit non KUR.
- g. Melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Program KUR untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.
- h. Melakukan pembatasan volume penjaminan untuk produk yang berisiko tinggi.
- i. Melakukan *update* data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif.
- j. Bekerja sama dengan mitra dalam mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.
- k. Melakukan rekonsiliasi dengan mitra kerja untuk meminimalisir kesalahan dalam data misalnya IJP, klaim, dan subrogasi.

2. Risiko Co-Guarantee

Co-guarantee adalah kerja sama antara Perum Jamkrindo dengan perusahaan penjaminan lain atau asuransi dalam bentuk penutupan risiko tertentu. Risiko *co-guarantee* merupakan risiko tidak tertagihnya piutang *co-guarantee*.

Salah satu indikasi besaran risiko *co-guarantee* adalah besarnya piutang *co-guarantee* dibandingkan dengan rata-rata pengajuan klaim *co-guarantee* dengan mitra *co-guarantee* yang terkait. Sesuai dengan Per-Dir no. 14/Per-Dir/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, piutang *co-guarantee* dinyatakan wajar apabila saldo piutang *co-guarantee* yang belum diselesaikan oleh mitra *co-guarantee* maksimal 3 (tiga) bulan rata-rata pengajuan penggantian pembayaran klaim periode terakhir.

Pada posisi 31 Desember 2017, *co-guarantee* dilakukan dengan 5 (lima) perusahaan asuransi, yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT Al Amin), PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT Jiwasraya, PT Jamkrindo Syariah, dan PT Asuransi Beringin Sejahtera. *Performance* mitra *co-guarantee* Perum Jamkrindo tersebut adalah sebagai berikut:

- e. Assessing risk spreading by working with reinsurance companies.
- f. Utilizing the services of agents which can help select Guaranteed candidates for non-KUR Credit Guarantee.
- g. Coordinating with the Policy Committee related to the implementation of the KUR Program to anticipate problems that may occur.
- h. Limiting the volume of warranty for high-risk products.
- i. Updating data on subrogation receivables including collateral as one of the considerations in making the collection of subrogation receivables so that efforts can be done effectively.
- j. Cooperating with partners in optimizing collection of subrogated receivables.
- k. Reconciling with partners to minimize errors in data such as IJP, claims, and subrogation.

2. Risk of Co-Guarantee

A co-guarantee is a cooperation between Perum Jamkrindo and other insurance companies or insurance in the form of covering a certain risks. With such cooperation, Perum Jamkrindo is exposed with the co-guarantee risk. Co-Guarantee Risk represents a non-collectible receivable from the co-guarantee.

An indication of the magnitude of co-guarantee risk is the amount of co-guarantee receivable compared to the average submitting of a co-guarantee claim with the associated co-guarantee partner. In accordance with Board of Directors Regulation No.14/Per-Dir/XII/2011 dated December 22, 2011, the co-guaranteed receivable shall be deemed fair if the outstanding balance of co-guarantee receivable by the coguarantee partner is a maximum of 3 (three) months of the average last period claim.

As per December 31, 2017, the Company has been established with 5 (five) co-guarantee partnership with some insurance companies, namely PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT Al Amin), PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT Jiwasraya, PT Jamkrindo Syariah, and PT Asuransi Beringin Sejahtera. The performance of co-guarantee partners of Perum Jamkrindo is as follows:

Mitra Co-Guarantee Co-Guarantee Partner	Saldo Piutang Co-Guarantee Co-Guarantee Receivables (dalam jutaan/ in million)	Rata-rata Pengajuan Klaim Co-Guarantee per Bulan Average Co-Guarantee Claims per Month (dalam jutaan/ in million)	Perbandingan Saldo Piutang terhadap 3 bulan Rata-rata Pengajuan Comparative Balance receivables on average 3 months Submissions (%)
PT Asuransi Beringin Sejahtera	44.285.402.653	3.118.422.943	473%
PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	102.226.132.154	11.253.949.271	303%
PT Jamkrindo Syariah	10.364.422.300	2.617.218.112	132%
PT Jiwasraya	563.760.675	781.412.278	24%
PT Asuransi Syariah Mubarakah	72.707.247.598	-	-

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan saldo piutang terhadap 3 bulan rata-rata pengajuan paling besar didominasi oleh PT Asuransi Beringin Sejahtera sebesar 473%, lalu di posisi kedua ditempati oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin sebesar 303%, dan selanjutnya PT Jamkrindo Syariah dan PT Jiwasraya.

Untuk perbandingan tersebut yang bernilai di atas 100% disarankan agar melakukan mitigasi risiko sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi kinerja mitra *co-guarantee* untuk meminimalisir risiko.
- Melakukan pemantauan dan analisa kinerja mitra *co-guarantee* secara berkala
- Melakukan penyempurnaan perjanjian kerja sama dengan menambahkan klausul untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan rekonsiliasi dan penagihan piutang *co-guarantee* secara berkala.

3. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dapat tercermin dari risiko likuiditas suatu perusahaan. Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Sesuai dengan POJK No. 2/POJK.05/2017 tentang rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus). Rasio Likuiditas dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

Based on the above data, it can be seen that the comparison of outstanding accounts receivable to 3 months average submission is dominated by PT Asuransi Beringin Sejahtera of 473%, then the second position is occupied by PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin by 303%, and then PT Jamkrindo Syariah and PT Jiwasraya.

For such a high comparison of over 100% it is advisable to perform the following risk mitigation:

- Performing performance evaluation of co-guarantee partners to minimize risk.
- Performing regular monitoring and performance analysis of co-guarantee partners.
- Improving the cooperation agreements by adding clauses to minimize risk.
- Performing regular reconciliation and collection of co-guarantee receivables.

3. Financial Risk

Financial Risk can be reflected from the liquidity risk of a company. Liquidity Risk is a risk that, among others, is due to the company being unable to meet its matured obligations.

In accordance with POJK No. 2 / POJK.05 / 2017 on the guaranteed liquidity ratio set at least 120% (one hundred and twenty per one hundred). Liquidity Ratio is calculated by using current ratio i.e. the ratio of current assets to current debt.

Uraian	2016 (RP)	2017 (RP)	Pertumbuhan/ Growth	Description
Risiko Likuiditas = (aset lancar) / (utang lancar)	10.999.049.838.024 1.544.664.923.325	11.190.723.233.179 1.917.055.275.003	= 583,75% -128,32%	Default risk = (Cost of Claim) / (Guarantee Volume)

Risiko likuiditas perusahaan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 128,32%, hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan utang lancar yang cukup tinggi dibandingkan dengan naiknya aset lancar perusahaan. Namun, berdasarkan indikator di atas, risiko likuiditas Perum Jamkrindo masih di atas ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK No. 2/POJK.05/2017.

The company's liquidity risk in 2017 decreased by 128.32%, which is influenced by the increase in current debt which is quite high compared with the increase of current assets of the company. However, based on the above indicator, Perum Jamkrindo's liquidity risk is still above the requirements required in POJK no. 2 / POJK.05 / 2017.

4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) penjaminan Perum Jamkrindo, yang dapat mengurangi pasar penjaminan (merugikan) Perusahaan serta pergerakan pasar keuangan yang dapat berpotensi menurunnya *return* dan nilai investasi. Variabel pasar dalam hal ini yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, *trend* kredit perbankan, regulasi pasar. Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

4. Market Risk

Market Risk is a risk cause by an adverse movement/trend of Perum Jamkrindo guarantee, which can harm the guarantee market of the Company and financial market movement which could potentially decrease the return and value of its investment. In such case, the market variables related to guarantee are competition level, trend of bank credit, and market regulation. Market risks associated with the investment are interest rates, inflation, and investment portfolios.

Uraian	2016 (RP)	2017 (RP)	Pertumbuhan/ Growth	Description
Pertumbuhan Penjaminan = ((Vol Penjaminan t-Vol Penjaminan t-1))/(Vol Penjaminan t-1)	60.377.517.031.615 65.590.575.587.643	22.791.143.593.114 125.968.092.619.258	= 92,05% = 18,09%	Growth Guarantee = (((Vol Guarantee t-Vol Guarantee t-1))/(Vol Guarantee t-1))
Pencapaian Target Penjaminan = (Realisasi Vol Penjaminan)/(Target Vol Penjaminan)	125.968.092.619.258 122.500.000.000.000	148.759.236.212.972 145.998.073.803.131	= 102,83% = 101,89%	Achievement of Guarantee Target = (Realization of Vol Guarantee)/ (Target of Vol Guarantee)
Pencapaian Pendapatan Investasi = (Realisasi Pendapatan Investasi)/ (Target Pendapatan Investasi)	587.678.040.947 724.831.000.000	592.779.806.231 605.935.994.297	= 81,08% = 97,83%	Achieving of Investment Income = (Realization of Investment Income)/(Target of Investment Income)



Dari indikator-indikator tersebut di atas, dapat dilihat pertumbuhan penjaminan dan pencapaian target penjaminan di tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Secara nominal, perusahaan telah mengalami penurunan pada volume penjaminan tetapi telah melewati target RKAP 2017 sebesar 101,89%.

Secara nominal, pendapatan investasi perusahaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, meskipun pencapaiannya belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RKAP 2017. Namun, secara persentase pencapaian pendapatan investasi naik sebesar 16,75%, dari 81,08% pada tahun 2016, naik menjadi 97,83% pada tahun 2017.

Disarankan agar perusahaan dalam jangka panjang, harus lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan investasi sekaligus meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya target investasi.

Untuk meminimalkan risiko investasi berupa deposito, hal-hal yang dilakukan perusahaan adalah:

- Melakukan pemilihan bank untuk penempatan deposito, di mana deposito ditempatkan di bank-bank yang berkinerja baik.
- Nominal penempatan disesuaikan dengan ekuitas bank yang bersangkutan.
- Pihak bank menyampaikan laporan deposito secara berkala
- Melakukan pemantauan atas nilai suku bunga yang mempengaruhi bunga deposito
- Penempatan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkan dilakukan *review* apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan perusahaan serta meningkatkan nilai Perusahaan dan efisiensi & efektivitas pengelolaan Perusahaan secara hati-hati. Penerapan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo mulai dilakukan pada tahun 2010 yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 21/Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

From the above indicators, it can be seen that guarantee growth and achievement of guarantee targets in 2017 has decreased significantly from the previous year.

In nominal terms, the company has experienced a decrease in the guaranteed volume but has exceeded the 2017 RKAP target of 101.89%.

In nominal terms, the investment income of the company has increased from the previous year, although its achievement has not met the target set in the RKAP 2017. However, the percentage of achievement of investment income increased by 16.75%, from 81.08% in 2016, rose to 97, 83% by 2017.

It is recommended that companies in the long term, should further optimize the achievement of investment revenue targets while minimizing the potential risks that can hinder the achievement of investment targets.

To minimize the risk of investment in the form of deposits, the Company has conducted the followings:

- Select the bank for deposit placement, in which deposits are placed in the banks which perform well.
- Nominal placements are adjusted to the equity of the bank concerned.
- The bank submits the deposit report periodically
- Monitoring interest rates which affect interest on deposits
- Placements are made within a certain period of time which allows review in the case of change in interest rates.

Evaluation on the Effectiveness of Risk Management System

The Implementation of Risk Management aims to ensure that the Company's goals are achieved as well as enhance the Company's value and improve the Company's management efficiency and effectiveness. The Implementation of Risk Management of Perum Jamkrindo has been effected since 2010 marked with the issuance of the Regulation of the Board of Directors No. 13/Per-Dir/XII/2010 dated 29 December 2010, which later updated by the Regulation of the Board of Directors No. 21/ Per-Dir/VIII/2016 dated 12 August 2016 on the Implementation of Risk Management.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara garis besar kondisi beberapa parameter penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- **Pemahaman Manajemen Risiko**
Sebagian proses manajemen risiko sudah tercantum dalam SOP-SOP proses bisnis berbasis risiko, sehingga apabila audit internal ataupun eksternal tidak menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap SOP dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman Manajemen Risiko sudah cukup baik.
- **Pelaksanaan Rancangan Proses Manajemen Risiko**
Pelaksanaan rancangan proses manajemen risiko perlu didukung dengan adanya sistem manajemen risiko. Terkait sistem manajemen risiko, Perum Jamkrindo telah memiliki *Blueprint* Manajemen Risiko dan Panduan Manajemen Risiko yang didukung dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko yang berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Proses identifikasi dan penilaian risiko serta penyusunan rencana pengendalian risiko tersebut sudah dilakukan secara triwulanan oleh *Risk Owner* di Perum Jamkrindo. Dengan demikian, dapat dikatakan rancangan proses manajemen risiko telah sesuai untuk diterapkan.

Based on the above description, the outline condition of several Risk Management implementation parameter are as follows:

Understanding the Risk Management

- Some risk management processes are listed in the risk-based business process SOPs, therefore, if the internal or external audit could not find any non-compliances against the SOP, it could then be concluded that the level of understanding of Risk Management is fairly good.
- **Implementation of Risk Management Process Design**
Implementation of risk management process design requires a support of a risk management system. In relation to risk management system, Perum Jamkrindo has in place a *Blueprint* Risk Management and Risk Management Guidance supported by a Risk Management Information System Application which function to simplify the process of identification, risk assessment, and follow up of risk handling. The process of identification, risk assessment and preparation of risk control plan has been conducted quarterly by the Risk Owner in Perum Jamkrindo. Thus, it can be concluded that design of risk management process is appropriate for application.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Pengendalian Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Perusahaan melaksanakan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dengan mengacu kepada Kebijakan dan Prosedur yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan fungsi pengendalian intern, Perusahaan membentuk Satuan Pengawasan Intern untuk memastikan agar Perusahaan tetap patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, memastikan kesesuaian Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya terhadap tujuan, sasaran, rencana, kebijakan, instruksi dan/atau ketentuan lain yang berlaku dalam organisasi, ketaatan atau kesesuaian perusahaan terhadap aturan dan ketentuan bidang pengelolaan perusahaan dan komitmen perusahaan kepada segenap *Stakeholder*.

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh insan Perum Jamkrindo untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo mengacu pada *Internal Audit Charter* dan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko
 - a. Memastikan bahwa risiko-risiko yang dikelola oleh manajemen risiko sudah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, dimonitor dan dikomunikasikan.
 - b. Melaksanakan konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penerapan pengelolaan risiko Perusahaan.
 - c. Menyusun dan menerapkan pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yaitu audit berbasis risiko.
2. Satuan Pengawasan Intern
 - a. Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
 - b. Menggunakan data profil risiko di Perusahaan dalam rangka mendukung proses audit atau *Risk Based Audit*.
 - c. Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha.

Finance and Operations control, and Compliance to Other Laws and Regulations

The Company implements an internal control system in the application of Risk Management by referring to the established Policies and Procedures. In order to exercise internal control function, the Company established an Internal Audit Unit to ensure that the Company remained in compliance with the laws and regulations applicable to the Company, ensuring the conformity of the Working Units in the course of performing its duties to other objectives, targets, plans, policies, instructions and / or other provisions apply within the organization, compliance or conformity of the company to the rules and regulations of the field of corporate management and corporate commitment to the entire Stakeholder.

The Internal Control System is a process integrated to actions and activities which are conducted continuously by the leaders and all employees of Perum Jamkrindo to give sufficient trust to the achievement of the organization's objectives through: effective and efficient activities, reliability of financial reporting, security of Company's asset, and compliance to laws and regulations.

The implementation of internal control system conducted by Perum Jamkrindo refers to Internal Audit Charter and Guidelines of Good Corporate Governance Implementation which describes the followings:

1. Risk Management
 - a. Ensuring that the risks managed by the risk management have already been identified, analyzed, evaluated, monitored, and communicated.
 - b. Conducting consultation, monitoring and evaluation on the Company's risk management implementation.
 - c. Preparing and implementing risk-based audit examination.
2. Internal control unit
 - a. Evaluate the effectiveness of the implementation of internal control, Risk Management, and corporate governance processes, in accordance with the laws and Company's regulations.
 - b. Use the Company's risk profile data to support the audit process or Risk-Based Audit.
 - c. Assess compliance with existing provisions by conducting assessments and monitoring of all systems, procedures, provisions, and operations of the Company to encourage effectiveness and adherence in its implementation and to provide recommendations to the Board of Directors on business risk control/management.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perum Jamkrindo dalam menjalin hubungan dengan Pemangku Kepentingan, baik dari internal seperti karyawan maupun dari eksternal seperti konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perum Jamkrindo membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

Corporate Social Responsibility becomes a channel for Perum Jamkrindo in building relationship with the Stakeholders, either internally, such as with the employees, or externally, such as with customers. Related to CSR implementation, Perum Jamkrindo divides it into 4 (four) aspect.

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup

Corporate Social Responsibility related to environment

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja

Corporate Social Responsibility related to employment, occupational health and safety

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility related to social and community development

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen

Corporate Social Responsibility related to responsibility to customers

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perum Jamkrindo dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

More information about CSR implementation by Perum Jamkrindo can be seen in the chapter of Company's Corporate Social Responsibility in this Annual Report

PERKARA PENTING

SIGNIFICANT CASES

Permasalahan Hukum

Di sepanjang tahun 2017, baik Perum Jamkrindo, entitas anak, serta anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki dan/atau menghadapi permasalahan hukum.

Sanksi Administratif

Tidak terdapat sanksi administratif di sepanjang tahun 2017 yang dikenakan oleh regulator kepada Perum Jamkrindo, entitas anak, Dewan Pengawas, dan/atau Direksi.

Legal Problems

Perum Jamkrindo does not have any legal problems throughout the year 2017, either related to Company, subsidiaries, Board of Supervisors, or Board of Directors.

Administrative Sanctions

Throughout the year 2017, there was no record of administrative sanctions imposed by the regulator to Perum Jamkrindo, its subsidiaries, Board of Supervisors, or Board of Directors..

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

INFORMATION ACCESS AND CORPORATE DATA

Dalam menyampaikan dan penyebaran informasi serta berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Perum Jamkrindo menggunakan berbagai media yang ada, yaitu media internet, cetak dan kegiatan atau *event*.

In delivering and distributing information and communicating with the interested parties, Perum Jamkrindo use many existing media, which are internet, print, and activity or event.

Dalam prosesnya, akses terhadap informasi Perusahaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

In the process, access to Company information is divided into 2 (two), which are:

No.	Akses Informasi Information Access	Jenis Types
1	Komunikasi Internal <i>Internal Communication</i>	a. Surat Edaran <i>Circular Letter</i> Perum Jamkrindo Menggunakan Surat Edaran Untuk Mengomunikasikan Kebijakan dan Peraturan Terbaru di Dalam Internal Perusahaan. Informasi yang Disebarkan Umumnya Berisi tentang Sosialisasi Kebijakan Direksi <i>Perum Jamkrindo uses Circular Letter to Communicate the Latest Policies and Regulations in the Company's Internal. The Information Distributed Generally Contains the Dissemination of the Board of Directors' Policies</i> b. ICPR (<i>Integrated Corporate Performance Reporting</i>) Perum Jamkrindo Juga Menggunakan Sarana Teknologi Informasi yang Berbasis Web yaitu ICPR yang telah Diterapkan di Lingkungan Perum Jamkrindo <i>Perum Jamkrindo Also Uses Web-Based Information Technology Facilities, which is ICPR which has been applied within Perum Jamkrindo.</i> c. <i>E-mail</i> Perum Jamkrindo juga telah memiliki <i>e-mail system</i> sendiri untuk mengelola komunikasi internal perusahaan antar unit kerja <i>Perum Jamkrindo has also had its own email system to manage internal communication of the Company among working units.</i> d. Evaluasi dan <i>Action Plan</i> Triwulan <i>Quarterly Evaluation and Action Plan</i> Untuk sarana komunikasi antara Direksi dengan Kepala Divisi dan Pimpinan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang dalam menyampaikan target dan rencana bisnis Perusahaan, Perum Jamkrindo secara rutin tiga bulan atau triwulanan menyelenggarakan rapat evaluasi dan <i>action plan</i>. Dalam rapat evaluasi dan <i>action plan</i> ini, Direksi Perum Jamkrindo melakukan evaluasi terhadap kinerja triwulanan berjalan dan membahas serta mengomunikasikan rencana bisnis Perum Jamkrindo untuk triwulanan ke depan kepada para Kepala Divisi, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor Anak Cabang untuk meneruskan target dan rencana bisnis tahunan yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan <i>For communication facilities between Directors and Head of Division and Head of Branch Office or Sub-Branch Office in conveying the Company's business targets and plans, Perum Jamkrindo regularly conducts quarterly meetings of evaluation and action plan.</i> <i>In this evaluation and action plan meeting, Directors of Perum Jamkrindo evaluate the current quarterly performance and discusses and communicates the business plan of Perum Jamkrindo for the coming quarterly to the Head of Division, Head of Branch Office and Head of Sub-Branch Office to continue the annual business plan and targets which has been stipulated in the current year's RKAP.</i>

Korespondensi dan Laporan Berkala

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

- Laporan Triwulan.
- Laporan Tahunan.
- Keterbukaan informasi melalui *public expose*.
- Laporan administrasi kepada Pemilik Modal.

Situs Web

Situs web memiliki peran yang signifikan dalam tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan, di mana situs web memungkinkan penyampaian informasi yang tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah.

Perusahaan telah memiliki situs web elektronik resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id. Situs web ini menyediakan konten seputar informasi Perusahaan yang komprehensif dan berguna bagi akses informasi kepada publik dan pemangku kepentingan.

Hubungan Media

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, Perusahaan melakukan hubungan media melalui Rilis Media kepada sejumlah media baik nasional maupun lokal. Selama tahun 2017 terdapat 20 rilis yang diberikan kepada media baik nasional maupun lokal.

Ragam Media Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

Correspondence and Periodic Report

The Company's financial and non-financial information has been prepared and reported in a transparent manner to the shareholders, stakeholders, and other institutions required. Information is reported on time target, presented completely and accurately, up-to-date, fully, and adequately in accordance with the procedure, type, and scope as stipulated in the provisions on Transparency of the Company's Financial Condition. Information presented through the report is in the form of:

- Quarterly Report.
- Annual report.
- Disclosure of information through public expose.
- Administrative reports to Equity Owner.

Website

The existence of website has a significant role on information disclosure governance. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits to the public and stakeholders, which will enable the delivery of unlimited, quick, precise, and inexpensive information.

The Company has already had an official electronic website with the address www.jamkrindo.co.id. This website provides content around Company's information that is comprehensive and useful for information access to the public and stakeholders.

Media Relations

To be able to convey information comprehensively, the Company conducts media relations through Media Release to a number of national and local media. In 2017 there are 20 releases given to both national and local media.

Media Variety To Shareholders and Stakeholders

Below is a table describing the variety of communication media used by the Company to convey data and information related to operational activities, business processes, and performance achievements which have been obtained by the Company.



Kepada To	Bentuk-bentuk Media Forms of Media
Regulator <i>Regulators</i>	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan <i>Quarterly Report and Annual Report</i>
Pemilik Modal <i>Equity Owner</i>	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan <i>Quarterly Report and Annual Report</i>
Lembaga Publik <i>Public Institution</i>	<i>Press Release</i>
Konsumen <i>Customer</i>	<i>Leaflet, Booklet, Baliho, Banner, Spanduk, Media Sosial, Video PSA, Mobil Layanan</i> <i>Leaflet, Booklet, Billboard, Banner, Social Media, PSA Video, Services Car</i>
Karyawan <i>Employees</i>	Majalah Internal <i>Internal Magazine</i>
Perusahaan Sejenis Lainnya <i>Other Similar Companies</i>	<i>Leaflet, Booklet, Baliho, Banner, Spanduk, Media Sosial, Video PSA</i> <i>Leaflet, Booklet, Billboard, Banner, Social Media, PSA Video</i>
Mitra Kerja dan Rekanan <i>Business Partners</i>	Laporan Tahunan, <i>Leaflet, Booklet</i> <i>Annual Report, Leaflet, Booklet</i>
Organisasi Profesi <i>Professional Organization</i>	Laporan Tahunan, <i>Leaflet, Booklet</i> <i>Annual Report, Leaflet, Booklet</i>
Masyarakat/Ummum <i>Community/Public</i>	<i>Leaflet, Booklet, Baliho, Banner, Spanduk, Media Sosial, Video PSA, Mobil Layanan</i> <i>Leaflet, Booklet, Billboard, Banner, Social Media, PSA Video, Services Car</i>

* Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.

* The Company Website is not included in the above media, because it is open, unlimited, and accessible to anyone.

Kode Etik

Code of Ethics

Kode Etik atau *Code of Conduct* adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari budaya Perusahaan serta Standar Etika Perusahaan yang membentuk dan mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Perusahaan. *Code of Conduct* berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perusahaan dan entitas anak, serta menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Tujuan penerapan Kode Etik dilakukan untuk:

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika usaha dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Perum Jamkrindo yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
2. Sebagai landasan etis dalam berpikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perum Jamkrindo.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Perum Jamkrindo.
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Perum Jamkrindo terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai Landasan Utama

Penerapan kode etik yang dimiliki Perusahaan merupakan sebuah upaya untuk dapat mensinergikan seluruh organ Perusahaan untuk dapat bersama-sama mengemban visi, misi dan budaya Perusahaan. Sebagai tujuan akan perjalanan Perusahaan di masa yang akan datang, visi berperan penting dalam menempatkan seluruh Insan Perum Jamkrindo untuk dapat mewujudkan visi tersebut melalui misi yang telah ditetapkan, serta internalisasi budaya perusahaan hingga mampu membentuk perilaku setiap Insan Perum Jamkrindo.

Code of Conduct is a compilation of commitment consisting of Corporate culture and Ethical Standard of the Company which form and direct behavior to be in accordance with the Company's culture and values. Code of Conduct applies to all individual acting on behalf of the Company and subsidiaries, as well as becoming a reference to all stakeholders conducting business transactions with the Company.

The purposes of applying the Code of Ethics are:

1. As the guidelines which contain guidance in implementing business ethics standards and behavior guidelines for all employees of Perum Jamkrindo which must be obeyed in daily interaction with all parties.
2. As an ethical foundation in thinking and making decisions related to Perum Jamkrindo.
3. As a tool to create and support a healthy, positive work environment and display ethical behaviors of all employees of Perum Jamkrindo.
4. As means to increase the sensitivity of the Company and employees of Perum Jamkrindo towards the values of business ethics by developing discussions or developing discourse on ethics.

Vision, Mission, and Corporate Culture as the Main Foundation

The Company's code of ethics is an effort to synergize all the Company's organs to share the Company's vision, mission, and culture. As the goal of the Company's journey in the future, vision plays an important role in putting all employees of Perum Jamkrindo to realize the vision through the mission which has been established, and the internalization of corporate culture to be able to form the behavior of every employees of Perum Jamkrindo.



Visi

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian nasional.

Vision

To become a Leading Guarantee Company which Supports the National Economic Development.

Misi

Visi Perusahaan dijabarkan ke dalam misi-misi yang merupakan "Tridharma Jamkrindo" sebagai berikut:

1. Dharma Pertama
Melakukan kegiatan penjaminan bagi pengembangan bisnis UMKM dan Koperasi.
2. Dharma Kedua
Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas.
3. Dharma Ketiga
Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat.

Missions

The Company's vision is described into missions which are named "Tridharma Jamkrindo". The followings are description of the 'Dharma':

1. *First Dharma*
Conducting guarantee activities for business development of MSME and Cooperatives.
2. *Second Dharma*
Providing wider and more qualified services.
3. *Third Dharma*
Providing benefits to the stakeholders in accordance with sound business principles.

Kredo Perusahaan

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan.
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan.
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan.
5. Berkemuka dalam memberikan kepuasan pelanggan.

Corporate Credo

1. *Trustworthy in conducting business guarantee.*
2. *Responsive to business environment changes.*
3. *Excellent and Professional service.*
4. *Healthy corporate governance*
5. *Reputable in providing customer satisfaction*

Budaya Perusahaan, "TRUST"

- Terpercaya
Bekerja jujur dengan integritas tinggi
- Responsif
Tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap *stakeholder*
- Unggul
Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan
- Sehat
Selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat
- Berkemuka
Selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan

Corporate Culture, "TRUST"

- *Trustworthy*
Work honestly with high integrity
- *Responsive*
Responsive to meet the needs of business partners and all stakeholders
- *Excellent*
Always improve professionalism to achieve extra value for the company
- *Healthy*
Always work diligently to support healthy corporate governance
- *Reputable*
Always in the forefront in providing services and performances to become the leader in guarantee industry

Pedoman Perilaku Perum Jamkrindo

Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Standar perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajiban. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen untuk:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi).
4. Memperlakukan semua *stakeholder* sebagai mitra.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik.

Isi Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan antara lain adalah:

Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan

1. Perusahaan harus memperlakukan *stakeholder* secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak *stakeholder*.
2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi *stakeholder*.
3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.
4. Perusahaan harus memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada *stakeholder*.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan *stakeholder* dengan baik.

Company's Ethics with Stakeholders

1. Companies should treat stakeholders in a fair and equitable manner by fulfilling the rights of stakeholders.
2. Companies are required to improve the performance and maintain a positive image in order to increase value for stakeholders.
3. Companies are required to maintain the confidentiality of information and data.
4. Companies must turn off non-misleading information to stakeholders.
5. Companies must serve and anticipate stakeholders' needs well.

Perum Jamkrindo Code of Conduct

The Company is committed to implement Good Corporate Governance based on principles of transparency, fairness, accountability, and independence, so as to support the Government policy in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives. This is stated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DPJAMKRINDO/XII/2012 dated 13 December 2012 on Code of Conduct.

The Company's standards of conduct are transparency and disclosure of information of independence, accountability, and fairness. Implementation of the business ethics standards is the Company's way to conduct business in order to realize its commitment to:

1. Place customer satisfaction as the main priority.
2. Implement Ethical Standards in all business activities based on Good Corporate Governance principles.
3. Always be in proportion in providing high quality services to the business of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives.
4. Treat all stakeholders as partners.
5. Company must serve and strive to anticipate stakeholders' needs well.

Contents of the Company's Code of Conduct among others are:



Etika Perusahaan dengan Karyawan

- a. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.
- b. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Karyawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.
- d. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.
- e. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.
- f. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Perusahaan mengizinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.

Company's Ethics with Employees

- a. The Company should prioritize occupational health, safety, quality improvement and welfare of employees by fulfilling the employees' rights proportionally so that Employees are expected to perform optimally.
- b. The Company provides equal employment opportunities to all Employees regardless of background, ethnicity, religion, gender, age, disability of a person, or other special circumstances protected by legislation.
- c. The company provides equal opportunities in Employee self-development.
- d. The Company rewards employees based on employees' competence and performance.
- e. The Company creates a conducive and productive working environment, communication and working relationship with superior, subordinates, and peers.
- f. The Company respect human dignity regardless of background, ethnicity, religion, gender, age, disability of a person, or other special circumstances protected by legislation.
- g. Companies must uphold the general principles of humanity, rights and obligations under the applicable laws and regulations.
- h. The Company allows Employees to engage in other activities outside the Company for social activities, professional membership, associations or similar groups.

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa

- a. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa (*supplier*) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
- c. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
- d. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Company's Ethics with Supplier of Goods and Services

- a. The Company treats the supplier of goods or services including the procurement process in accordance with business principles of sound, open, impartial based on applicable provisions.
- b. The Company must make the procurement process transparent and accountable based on the prevailing regulations with reference to the principles of effectiveness, efficiency, and economics.
- c. The Company uses suppliers of goods and services based on written documentation.
- d. The Company must maintain the confidentiality of information and procurement documents of goods and services in accordance with the applicable laws and regulations.
- e. The company does not engage in corruption, collusion, and nepotism in the procurement of goods and services.

Etika Perusahaan dengan Pesaing

- Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
- Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan/atau tindakan yang tidak jujur.
- Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepakatan yang bersifat anti kompetisi.
- Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.

Company's Ethics with Competitors

- The Company must implement fair business competition by promoting product excellence and service quality.*
- The Company should avoid misleading behavior and/or dishonest acts.*
- The Company opposes any agreements or agreements which are anti-competitive in nature.*
- The Company does not cooperate without acceptable and reasonable reason.*

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

- Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
- Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Company's Ethics with the Government

- The Company must comply with the applicable Laws and Regulations.*
- The Company must maintain good relationship and communication with the Government.*
- The Company must support Government programs in accordance with the applicable laws and regulations.*

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

- Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
- Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak asasi manusia.
- Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
- Perusahaan mengoptimalkan penyaluran program-program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
- Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Company's Ethics with the Community

- The Company maintains a clean and healthy environment.*
- The Company supports social, culture, traditions, religion, and human rights activities.*
- The Company participates in the economic empowerment of the surrounding communities.*
- The Company optimizes the distribution of Company's CSR programs to the community (Partnership and Community Development Program).*
- The Company does not engage in acts that lead to discrimination of people based on ethnicity, religion, race, and interclass.*

Etika Perusahaan dengan Media Massa

- Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
- Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
- Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

Company's Ethics with Mass Media

- The Company must provide relevant information.*
- The Company makes mass media as partners in creating conducive cooperation based on mutual respect and mutual benefit.*
- The Company accepts and follows-up proportionally against constructive criticisms delivered through the mass media.*



Standar Perilaku Insan Perusahaan

Standards of Behavior for the Company's Employees

Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi

- Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian.
- Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Personal and Professional Responsibility

- All Company's employees are required to comply with all Company's requirements regarding employment.*
- All Company's Persons must understand and comply with all provisions issued by either the Company or the regulators in accordance with the respective areas of duties and responsibilities.*
- All Company's employees must be dedicated, loyal, diligent, and meticulous in working and always try to improve knowledge and ability to assist in the execution of duty.*
- All Company's employees must apply the Company's interests above personal or group interests.*

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif

- Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi.
- Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja.
- Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan.
- Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status.
- Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor) :
 - Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkoba atau obat-obatan terlarang.
 - Mengonsumsi minuman beralkohol.
 - Melakukan semua bentuk perjudian,
 - Melakukan semua bentuk tindakan kriminal.
- Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat.
- Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama.

Creating Conducive Working Environment

- All Company's employees must be polite in communicating.*
- All Company's employees must uphold ethical values in working relationship with superiors, subordinates, and colleagues.*
- All Company's employees must avoid acts and utterances which contain elements of harassment, humiliation, mockery, slander, and degrading behavior.*
- All Company's employees are prohibited from engaging in affairs, sexual harassment either verbally, visually, or physically including harassment of privacy and status.*
- All Company's employees is prohibited (both in offices and out of offices):*
 - Use, possess, distribute, or sell narcotics or illegal drugs.*
 - Consume alcoholic beverages.*
 - Do all forms of gambling,*
 - Do all forms of criminal acts.*
- All Company's employees must maintain a healthy environment.*
- All Company's employees must make efficient and effective use of the phone, avoid excessive use of the phone for personal benefit, and respond to telephone or call alert at the first opportunity.*

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur

- a. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.
- b. Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.
- c. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.
- d. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain.
- e. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.
- f. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.
- g. Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.
- h. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan *mark up* harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
- i. Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.

Avoiding All Conflicts of Interest and its Potential that Triggers Unhealthy and Dishonest Behavior

- a. All Company's employees use their energy, thoughts, and work abilities for the Company's benefit. Work or activities outside office hours may be conducted as long as not utilizing the Company's name and interests.
- b. All Company's employees who are inactive or resigned are prohibited from using any copyright, intellectual property, data, and information of the Company and perform activities on behalf of the Company.
- c. All Company's employees must not invest Company funds in the name of individuals or classes.
- d. All Company's employees must not invest Company funds by pledging personal gain with other parties.
- e. All Company's employees must not accept any bribe or payment of any kinds from any party having direct or indirect relationship with his position or duties.
- f. All Company's employees must not accept and give any prizes in any forms which may reasonably be expected to influence sound business decisions.
- g. All Company's employees are prohibited from becoming providers of goods and services which directly or indirectly sell goods, rights, or services to the Company.
- h. All Company's employees are prohibited to mark up the sale or purchase price either for personal or other party's interest.
- i. All Company's employees are prohibited from using their positions to provide preferential treatment to other parties.

Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan

- a. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- b. Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan aset sesuai wewenangnya masing-masing.
- c. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
- d. Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- e. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.
- f. Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Maintaining Assets, Properties, and Information for the Company's Interests

- a. All Company's employees utilize Company assets only for the benefit of the Company and are not allowed for personal or group interests.
- b. All Company's employees must be responsible for protecting Company properties against theft, embezzlement, and misuse of assets in their discretion.
- c. All Company's employees must secure data and information along with the devices in accordance with their authorities so as not to be misused, defaced, stolen, or not accessed by other irresponsible parties.
- d. All Company's employees must not be permitted to use Company's name, logos, copyrights, and accessories for personal gain.
- e. All Company's employees must safeguard the Company's confidential internal information and not use it for any personal, family, friends, class, or group interests.
- f. All Company's employees must make and deliver reports and data correctly and honestly to the interested parties according to the prevailing laws and regulations.



Mematuhi Hukum dan Perundang-Undangan

- a. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan *insider trading* guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.
- b. Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan/atau praktik yang bersifat pencucian uang (*money laundering*).
- c. Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat :
 - d. Tidak mengatasnamakan Perusahaan,
 - e. Tidak menggunakan aset Perusahaan dalam aktivitas politiknya,
 - f. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan,
 - g. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.
- h. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Complying with Laws and Regulations

- a. *All Company's employees are prohibited from engaging in insider trading activities in order to gain personal gain and must not act as brokers, seekers, or other intermediaries for personal or group interests in transactions conducted by the Company.*
- b. *All Company's employees are prohibited from being involved or engaging in money laundering investments and/or practices.*
- c. *All Company's employees are prohibited from entering into any agreements, bindings, statements either directly or indirectly indicating that the Company has any attachment to any political parties, but the Company grants all Company's employees freedom to channel their political aspirations on conditions:*
 - d. *Not on behalf of the Company,*
 - e. *Not using Company assets in its political activities,*
 - f. *Not making any contribution on behalf of the Company,*
 - g. *If holding a position in a Political Party and becoming a candidate/legislative member, that person is considered resigning from the Company.*
- h. *All Company's employees are prohibited from doing Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) activities.*

Internalisasi dan Penegakan Code of Conduct

Internalisasi *Code of Conduct* memiliki tujuan untuk menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama dari segenap jajaran di internal Perusahaan untuk dapat menaati dan menjalankan secara baik pedoman perilaku yang tertuang di dalamnya. Internalisasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara menyeluruh dengan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi segenap insan Perusahaan dalam memperoleh informasi tersebut.

Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan dengan cara seluruh insan perusahaan wajib menandatangani surat Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan seluruh insan Perusahaan wajib mengerti, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

1. Saluran pengaduan
 - a. Apabila ditemui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk segera melaporkan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor kepada Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Internalization and Enforcement of Code of Conduct

The internalization of the Code of Conduct aims to create mutual understanding and commitment from all internal levels within the Company to adhere to and implement well the code of conduct contained therein. Internalization is carried out through socialization activities which are carried out thoroughly by providing access to the widest possible for all Company's employees in obtaining such information.

The Code of Conduct enforcement mechanism is carried out by means of all Company's employees are obligated to sign the Statement of Commitment to Comply with the Code of Conduct, and all Company's employees are required to understand, comprehend, and apply the Code of Conduct.

1. Complaint Channel
 - a. If any violation of the Code of Conduct is found within the Company, each employee is obligated to immediately report it in writing by mentioning the identity of the reporting party to the Division dealing with Human Resources (HR).

b. Permasalahan perilaku Dewan Pengawas dan Direksi, penanganannya dilakukan oleh Menteri. c. Permasalahan perilaku pegawai, penanganannya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku. d. Pelanggaran Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya tetap mengacu kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam Perusahaan. e. Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM) berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional. 2. Mekanisme Penanganan atas Laporan Pelanggaran Pedoman Perilaku a. Atasan langsung atau unit kerja yang ditunjuk untuk mengelola penanganan atas laporan pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima melakukan identifikasi permasalahan analisis, mengumpulkan informasi tambahan yang relevan serta merahasiakan identitas pelapor. b. Hasil analisis tersebut apabila dipandang perlu dapat dilaporkan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. 3. Penyebarluasan Etika Perusahaan Upaya sosialisasi dan penyebarluasan Etika Perusahaan secara merata kepada seluruh elemen Perusahaan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain: a. Pemberian sosialisasi, <i>training</i> dan seminar bagi karyawan b. Pemasangan <i>banner</i> maupun spanduk c. Rapat evaluasi kinerja d. Sosialisasi saat proses perekrutan	b. Behavior problem of the Board of Supervisors and Board of Directors is handled by the Minister. c. Behavior problem of employees is handled by the direct supervisor in stages according to the applicable mechanism. d. Violation of Code of Conduct in relation to the community is handled by still referring to the employment provisions applicable in the Company. e. A division handling Human Resources (HR) affairs is obliged to respond promptly to any inquiries, notices, and reports received proportionately. 2. Handling Mechanism of Violation Report of the Code of Conduct a. The direct supervisor or designated work unit to manage the handling of infringement reports based on the report received identifies the problem, analyze, collects additional relevant information, and keeps the identity of the reporting party classified. b. The analysis result, if necessary, may be reported to the Board of Directors for further process in accordance with the applicable mechanism. 3. Dissemination of Company Ethics Efforts to disseminate and socialize the Company's Ethics equally to all elements of the Company are conducted through various strategies, such as: a. Providing socialization, training, and seminars for employees b. Installation of banners c. Performance evaluation meeting d. Socialization during the recruitment process

Proses sosialisasi juga dilakukan secara individu. Kepada setiap insan Perusahaan diwajibkan untuk membaca Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan, dan menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi *Code of Conduct*.

The process of socialization is also done individually. Every employee of the Company is required to read the Code of Conduct of the Company, and sign a commitment statement form to comply with the Code of Conduct.



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
UNTUK MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NPP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Status Kepegawaian :

Menyatakan bahwa, saya :

4. Telah menerima Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
5. Telah memahami isi dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
6. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan Perusahaan dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
7. Siap menerima konsekuensi dan sanksi dari Perusahaan apabila melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini;
8. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada Divisi yang membidangi bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pejabat yang telah ditunjuk untuk memonitor penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, apabila menemui permasalahan dan/atau pelanggaran dalam melaksanakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jakarta, September 2016

(Nama)

Sosialisasi *Code of Conduct* dilakukan dengan tujuan agar seluruh Insan Perusahaan memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam lingkungan kerja sehari-hari guna menghindari perilaku menyimpang. Kegiatan sosialisasi Kode Etik dan prinsip GCG di tahun 2017 dilakukan di beberapa kantor cabang, yaitu:

The socialization of the Code of Conduct is conducted with the aim that all Company's employees understand and apply the GCG principles in the daily work environment to avoid deviant behavior. The socialization activities of the Code of Ethics and GCG principles in 2017 were conducted in several branch offices, which are:

No.	Kantor Cabang Branch Offices	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
1.	Palembang	3 Maret 2017 March 3, 2017
2.	KCK Jakarta	7 November 2017 November 7, 2017
3.	Jakarta	8 November 2017 November 8, 2017

4. Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Etika Perusahaan
Adanya sanksi terhadap pelanggaran etika Perusahaan berfungsi untuk menjamin tegaknya aturan yang dibuat demi terciptanya kedisiplinan dan profesionalisme bagi seluruh Insan Perusahaan. Penegakan dan pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali. Adapun sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.

5. Sanksi Administrasi

Setiap karyawan wajib:

- mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi Pegawai BUMN;
- menaati semua peraturan perusahaan, baik berupa perintah maupun larangan secara tertulis atau secara lisan dalam batas pengertian yang layak dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan; dan
- menunaikan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan penugasan oleh Direksi dan atasan masing-masing pegawai dengan mementingkan kepentingan Perusahaan.

Pemberian sanksi administrasi bagi karyawan Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Direksi No. 19/Per-Dir/III/2006 tentang Disiplin Pegawai. Sanksi administrasi diberikan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Sebagai realisasi penegakan Pedoman Perilaku, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun terakhir:

4. Enforcement and Sanctions of Company Ethical Violations

The existence of sanctions against violations of Company ethics serves to ensure the establishment of rules created for the creation of discipline and professionalism for all Company's employees. Enforcement and sanction for acts of violation committed is in full force without exception. The sanctions given are in the form of warning letters.

5. Administrative Sanctions

Each employee must:

- comply with all provisions and regulations stipulated by the Government for SOE employees;
- comply with all company regulations, in the forms of orders or prohibitions in writing or verbally within the limits of a reasonable understanding and not contrary to the norms of decency; and
- fulfill duties and obligations as best as possible in accordance with the assignment by the Board of Directors and the respective employee's supervisor with an emphasis on the Company's interests.

The imposition of administrative sanctions for employees of Perum Jamkrindo refers to the Board of Directors' Regulation No. 19/Per-Dir/III/2006 on Employee Discipline. Administrative sanctions are given to employees who commit disciplinary offenses.

As a realization of the enforcement of the Company's Code of Conduct, below are the details of sanctions imposed related to the enforcement of the Code of Ethics for the past 3 (three) years:

Jenis Sanksi Types of Sanctions	2017	2016	2015
Teguran Reprimand	-	-	-
Peringatan 1 1st Warning	2	-	2
Peringatan 2 2nd Warning	1	-	-
Peringatan 3 3rd Warning	-	-	-
Pengunduran Diri Resignation	1	-	-
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Termination (PHK)	-	2	-



Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control

Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam meminimalisir benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan, Perusahaan mengupayakan penerapan pengendalian gratifikasi dari pihak lain. Pedoman Kebijakan Gratifikasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Edaran Direksi No. 9/SE/4/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Perum Jamkrindo.

Pentingnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan Kode Etik seperti yang telah dijelaskan di atas berhubungan dengan pembatasan secara definitif antara gratifikasi atau hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain, dengan suap yang erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan telah mendefinisikan secara jelas tentang gratifikasi yang tergolong suap, dan pemberian diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan serta kaidah yang berlaku.

Melalui kebijakan tersebut, Perusahaan tidak hanya mengupayakan penerapan prinsip GCG berbasis pengelolaan korporasi yang sehat, namun kebijakan tersebut juga memberikan landasan bagi setiap insan Perum Jamkrindo untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjauhkan perilaku insan Perum Jamkrindo dari kecenderungan praktik korupsi.

One of the Company's commitment to minimize the conflicts of interest and the abuse of power and position is the implementation of gratification control from the other parties. The Guidelines for Gratification Policy of the Company has been validated under the Circular Letter of the Board of Directors No SE/4/IX/2014 dated 24 September 2014 on the Gratification Control Policy at Perum Jamkrindo.

The importance of gratification control in the implementation of Code Conduct as explained above is related to the definitive limitation between gratification or gifts or the provision of anything in value given by the other parties, and bribes which are closely related to the abuse of power and position. The Company's Gratification Control Policy has clearly defined the gratification which constitutes as bribery and the allowed provision of things to the extent that it is not contrary to the applicable laws and regulations.

Through the policy, the Company not only strives to apply the principles of GCG based on sound corporate management, but the policy also provides the foundation for every Perum Jamkrindo personnel not to abuse their authority and position and to alienate Perum Jamkrindo's behavior from corruption practices.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policies

Undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, *kickback* ataupun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para pegawai secara individu dapat dikenai denda dan/atau hukuman penjara.

The laws of the Republic of Indonesia stipulates that paying or offering payment or even accepting bribes, kickbacks, or other forms of corrupt payments is a criminal offense which may allow the Company or individual employees to be subject to fines and/or imprisonment.

Undang-undang anti korupsi ini, termasuk Peraturan Praktik Korupsi menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan undang-undang anti korupsi terkait.

The anti-corruption laws, including the Corruption Practices Act, make payments, offers, or grants anything of value to Company's officials for the purpose of influencing actions or decisions of the officials as a criminal offense. The purpose of this Policy is to ensure that all employees, officials, and directors, as well as all of its subsidiaries and affiliates are in compliance with the Company's Anti-Corruption Policy and related anti-corruption laws.

Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut ini:

1. Suap, *Kickback* atau Pembayaran Korup Lain
2. Pembayaran Fasilitasi
3. Hubungan dengan Pihak Ketiga

This policy includes the following matters:

1. Bribe, Kickback, or Other Corrupt Payment
2. Facilitation Payments
3. Relationship with Third Parties

Kementerian BUMN telah meluncurkan *roadmap* BUMN Bersih sebagai aksi anti korupsi di lingkungan kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara, dan itu juga berlaku di Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara.

The Ministry of SOEs has launched a Clean SOE roadmap as an anti-corruption action within the ministry of SOE and state enterprises, which also applies in Perum Jamkrindo as one of the state-owned enterprises.

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Adapun tujuan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yaitu:

1. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif.
2. Menciptakan iklim yang kondusif dengan memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan dalam rangka menjaga serta melindungi aset/kepentingan perusahaan.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif dalam penyelesaian laporan-laporan pelanggaran secara internal maupun eksternal melalui jalur hukum (bila dianggap perlu), melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut.
4. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk perlindungan pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
5. Mengurangi potensi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
6. Meningkatkan reputasi perusahaan.
7. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Yang termasuk di dalam aktivitas pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Melanggar kode etik perusahaan.
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
5. Tindakan kecurangan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
6. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non finansial.
7. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

The Whistleblowing System is a system which can be used by witnesses as a medium for reporting acts of violation indicated within a company based on accountable evidence and goodwill for the benefit of the company. The purpose of the reporting system of violations (*Whistleblowing System*) are:

1. To guarantee the implementation of an effective violation reporting settlement mechanism.
2. To create conducive climate by strengthening monitoring environment and encouraging reporting on matters which can adverse financially and non-financially, including matters that can damage the Company's image in order to maintain and protect the Company's assets/interests.
3. To facilitate the management in handling fast and effectively the settlement of violation reports internally or externally through legal channel (if deemed necessary), protecting the confidentiality of the whistleblower's identity, and keeping the confidentiality and safety of the information.
4. To build policies and infrastructures to protect the whistleblower from retaliation of internal or external parties.
5. To reduce potential loss which may happen due to violation through early detection.
6. To increase the Company's reputation.
7. As one of the efforts in disclosing various problems in the Company which are not in accordance with ethical standards applicable in the Company.

Included in the violation activity are as follows:

1. Violation of laws and regulations.
2. Violation of the company's code of ethics
3. Violation of generally accepted accounting principles
4. Violation of the Company's operational policies and procedures, or other policies, procedures, regulations deemed necessary by the Company.
5. Other fraudulent acts deemed necessary by the Company.
6. Other fraudulent acts which may result in financial or non-financial loss.
7. Acts that endanger work safety.

Komitmen Perum Jamkrindo dan Karyawan

Seluruh karyawan Perum Jamkrindo berkomitmen untuk mempraktikkan WBS dalam rangka melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut untuk berpartisipasi aktif dan ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Perum Jamkrindo juga memiliki komitmen membuat kebijakan untuk melindungi pelapor. Dalam kebijakan WBS menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan. Sistem pelaporan pelanggaran berada di bawah Direksi, khususnya Direktur Utama. Dewan Pengawas ikut melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas atas pelaksanaan sistem tersebut.

Commitment of Perum Jamkrindo and the Employees

All employees of Perum Jamkrindo are committed to practice WBS in order to implement the violation reporting system. Employees are also required to actively participate in reporting if there is any violation. Perum Jamkrindo also has commitment to prepare policies to protect the whistleblower. WBS policies state clearly that the whistleblower will receive protection from the company against harmful treatment. Whistleblowing system is under the Board of Directors, particularly the President Director. Board of Supervisors also monitor the adequacy and effectiveness of the system implementation.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

1. Semua pelanggaran yang dilaporkan dan diversifikasi ditangani dengan baik.
2. Pelanggaran yang berulang dan sistemik dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.
3. Tim pengelola WBS harus mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas selaku penanggung jawab pemantauan sistem pelaporan pelanggaran.
4. Mekanisme pelaporan pelanggaran:

Mechanism of Violation Reporting Submission

1. All violations reported and diversification are handled well.
2. Repeated and systemic violation is reported to the relevant executive who has authority to make improvement.
3. WBS management team must obtain reporting access directly to the President Director with copies to the Head of Board of Supervisors as the responsible person in the monitoring of the violation reporting system.
4. Violation reporting mechanism:

Bila Pelanggaran dilakukan Oleh: <i>If the violation is conducted by:</i>	Maka Laporan Pelanggaran diserahkan ke: <i>The Violation Report should be submitted directly to:</i>	Penanganan Lebih Lanjut oleh: <i>Further handling on this violation report is done by:</i>
Karyawan <i>Employees</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	Tim Pengelola WBS <i>WBS Management Team</i>
Personil Tim Pengelola WBS <i>Personnel of WBS Management Team</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	Direksi/Investigator/Auditor Eksternal yang independen <i>Independent Directors/ Investigators/ External Auditors</i>
Anggota Direksi <i>Member of the Board of Directors</i>	Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>	Direksi/Investigator/Auditor Eksternal yang independen <i>Independent Directors/ Investigators/ External Auditors</i>
Anggota Dewan Pengawas dan organ pendukungnya <i>Member of the Board of Supervisors and its Supporting Organs</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	Direksi/Investigator/Auditor Eksternal yang independen <i>Independent Directors/ Investigators/ External Auditors</i>
Anggota Dewan Pengawas, Organ Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan Karyawan <i>Members of the Board of Supervisors, Organs of the Board of Supervisors, Members of the Board of Directors and Employees</i>	Tidak dapat diselesaikan secara internal <i>Cannot be settled internally</i>	Penegak hukum yang berwenang seperti polisi, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK), atau penyidik. <i>Law enforcement authorities such as police, prosecutors, corruption eradication commissions (KPK), or investigators.</i>



Perlindungan Bagi Pelapor

Perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran pada prinsipnya adalah pemenuhan hak dan rasa aman kepada pelapor dan/atau keluarga pelapor terkait dengan kemungkinan ancaman/tindakan yang dihadapinya akibat penyampaian/pengungkapan laporan pelanggaran. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan azas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di perusahaan.

Perlindungan yang Diberikan oleh Perusahaan

1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya
2. Menjamin perlindungan segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaannya pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yaitu:
 - a. Pemecatan yang tidak adil;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat atau penurunan jabatan;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau tunjangan;
 - d. Pengenaan sanksi baik langsung maupun tidak langsung;
 - e. Tindakan fisik seperti pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
 - f. Intimidasi, pemaksaan atau menjadi korban;
 - g. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya (*personal file record*).

Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran menyampaikan pengungkapan dengan memenuhi kriteria berikut:

1. Beritikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tidak mengharapkan imbalan materi dan/atau popularitas;
2. Informasi dan/atau pelanggaran yang disampaikan adalah yang telah terjadi dan dapat dipercaya;
3. Hal-hal yang terjadi sesuai dengan informasi dan/atau pelanggaran yang disampaikan/dilaporkan dan dapat dipercaya.

Pemberian perlindungan kepada pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terbukti bahwa pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya serta apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor ternyata palsu/fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang.

Protection for the Whistleblower

Protection to the whistleblower of infringement, in principle, is the fulfillment of rights and feelings of security to the reporting party and/or the reporting family in relation to the possible threat/action they face as a result of the delivery/disclosure of the violation report. Provision of protection is done with due regard to the principles of confidentiality and related provisions applicable in the company.

Protection Given by the Company

1. Whistleblower's identity is guaranteed its confidentiality.
2. Guarantee protection of all types of threats, intimidation or unpleasant actions from any parties as long as the whistleblower maintain the confidentiality of the violation reported to any parties.
3. Give protection to adverse actions, which are:
 - a. Unfair termination;
 - b. Pending promotion or demotion of position;
 - c. Pending periodical salary and/or allowance raise;
 - d. Imposition of sanctions either directly or indirectly;
 - e. Physical actions such as harassment or discrimination in any forms;
 - f. Intimidation, coercion, or victimization;
 - g. Adverse record in personal file record;

Protection to whistleblower is given if the submitted disclosure meets the following criteria:

1. Having good faith based on moral and ethical drive as well as not expecting any material return and/or popularity;
2. Information and/or violation submitted is about what already happened and can be trusted;
3. What happened is in accordance with the information and/or violation submitted/reported and can be trusted;

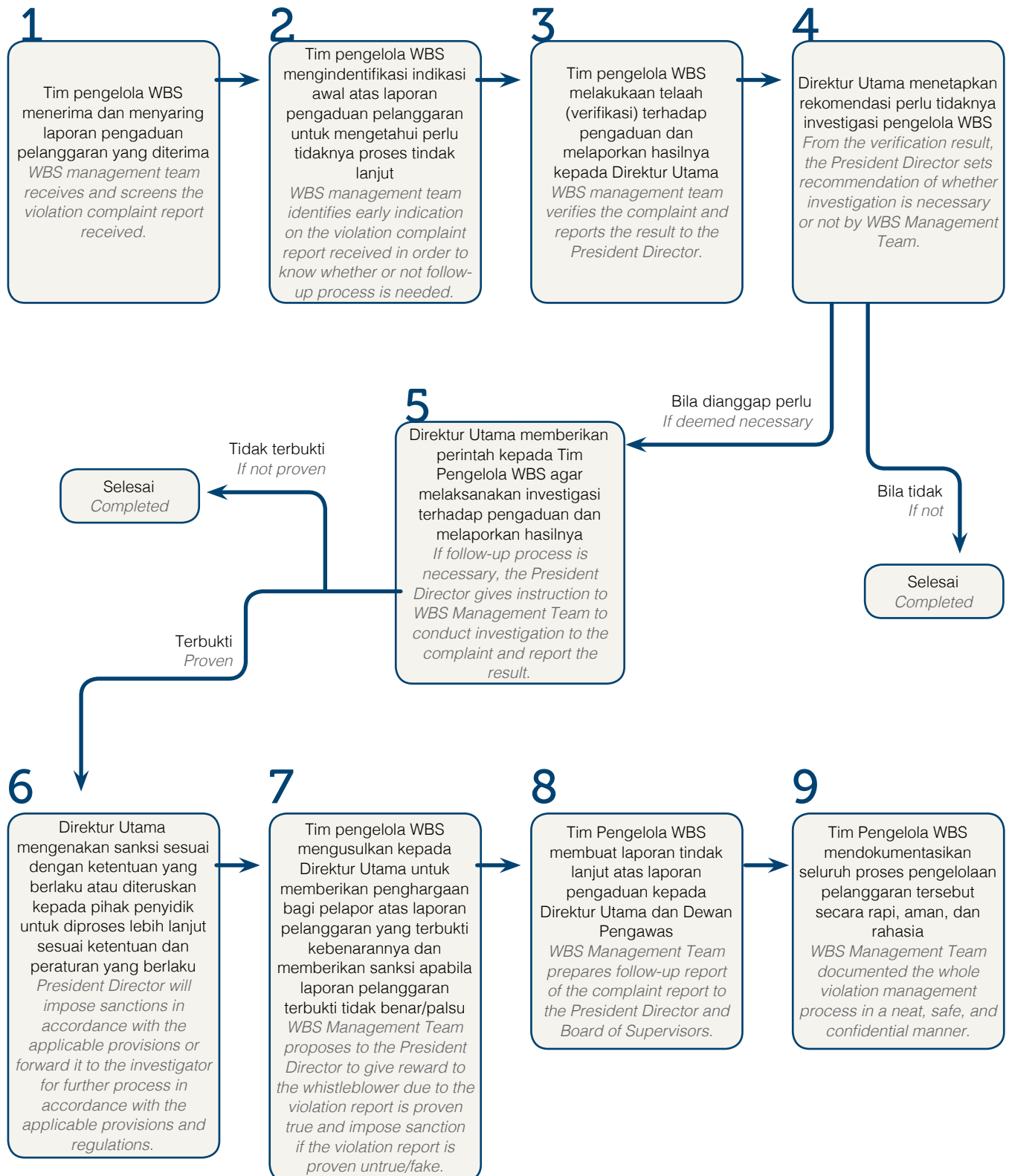
Protection provision to the whistleblower can be rejected or stopped if proven that the whistleblower does not fulfill the obligation in keeping the confidentiality of his/her identity and report, and if in the future, it is proven that the violation submitted by the whistleblower is fake/slander or has deviation purpose.

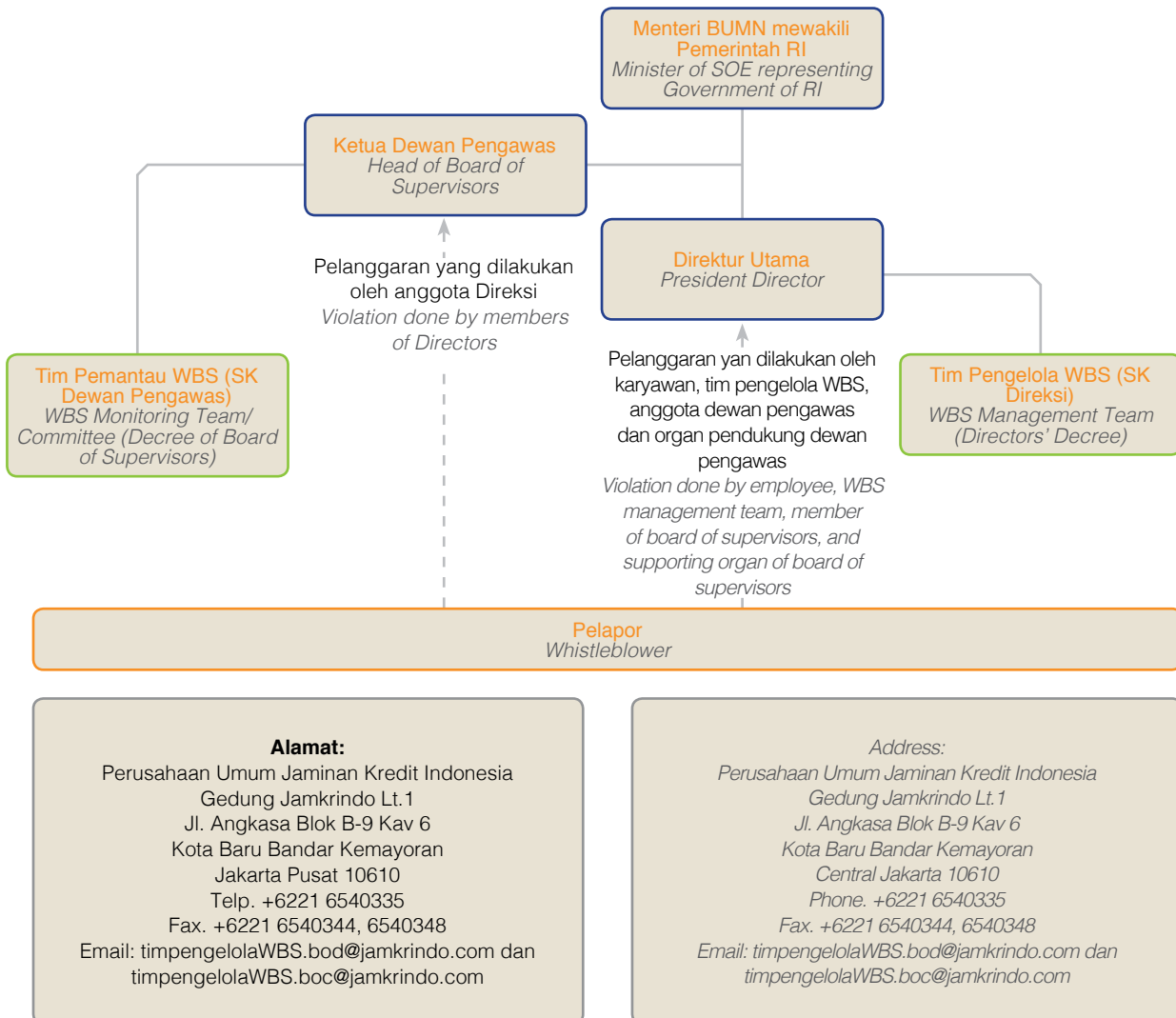
Mekanisme Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan pelaporan atau pengaduan melalui sistem WBS adalah seperti skema di bawah ini:

Complaint Handling Mechanism

The mechanism of reporting or complaint handling through the WBS system is described on the scheme below:





Proses Penanganan dan Data Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Tahun 2017

Dalam rangka mengelola pelaksanaan pelaporan pelanggaran di Perusahaan, Perum Jamkrindo membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berdasarkan Keputusan Direksi No.33/Kep-Dir/III/2015 tanggal 11 Maret 2015. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai berikut:

1. Tugas:
 - a. Mengelola Pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
 - b. mengoordinasikan penanganan tindak lanjut atas penerimaan pelaporan pelanggaran, menyeleksi dan memproses laporan pelanggaran tanpa membuka identitas pelapor.
 - c. Melakukan investigasi terhadap substansi laporan pelanggaran, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan terjadinya pelanggaran.
 - d. Menyampaikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada Direktur Utama guna mendapat keputusan.
 - e. mengoordinasikan pemberian perlindungan terhadap pelapor dengan unit terkait.
 - f. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk.
 - g. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap keefektifan pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
2. Tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor.
 - b. Memberikan usulan pengelolaan laporan pelanggaran kepada Direktur Utama.
 - c. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangannya.
 - d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

Berdasarkan Memorandum No. 02/M71.2/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 dari Kepala Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama tentang Laporan Pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) Tahun 2017, selama tahun 2017 tidak terdapat pengaduan pelanggaran yang dilaporkan kepada Tim Pengelola WBS baik melalui *email*, kotak surat WBS maupun surat resmi yang diantar langsung atau melalui pos.

Handling Process and Data Management of Whistleblowing in 2017

In order to manage the implementation of whistle blowing in the Company, Perum Jamkrindo forms Violation Reporting Management Team (*Whistleblowing System*) based on the Board of Directors' Decree No. 33/Kep-Dir/III/2015 dated 11 March 2015. Duties and responsibilities of the Violation Reporting Management Team (*Whistleblowing System*) are as follows:

1. Duties:
 - a. Manages the Implementation of Violation Reporting (*Whistleblowing System*);
 - b. Coordinate follow-up handling over the violation report received, select and process the violation report without disclosing the whistleblower's identity;
 - c. Investigate the substance of the violation report, to seek and gather necessary evidences to ensure that violation does take place;
 - d. Submit sanction recommendation on violation done to the President Director in order to obtain decision;
 - e. Coordinate protection to the whistleblower with the relevant unit.
 - f. Monitor the settlement handling on report received.
 - g. Evaluate and make corrective actions on the effectiveness of the implementation of Violation Reporting (*Whistleblowing System*).
2. Responsibilities:
 - a. Monitor the whistleblower protection program in accordance with the Company's policies, especially on aspect of confidentiality and security guarantee of the whistleblower.
 - b. Giving suggestions on whistleblowing system to the President Director.
 - c. Determine follow-up on the report, especially report in which the follow-up decision is in its authority.
 - d. Conduct other action necessary in order to implement *Whistleblowing System*.

Based on Memorandum No. 02/M71.2/1/2018 dated January 2, 2018, from the Head of the Internal Audit Unit to the President Director on the *Whistleblowing System* (WBS) Report of 2017, in 2017 no complaints were reported to the WBS Management Team either via email, WBS mailbox or official letter delivered directly or by post.

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi

Diversity of the Composition of the Board of Supervisors and Directors

Dunia usaha, khususnya pada bidang penjaminan selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Terlebih bisnis ini merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan target pasar Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Atas dasar tersebut, dibutuhkan beragam kompetensi dan keahlian serta pengalaman di level manajemen Perusahaan khususnya pada Dewan Pengawas maupun Direksi Perusahaan agar senantiasa dapat menjawab tantangan dunia usaha dengan kebijakan-kebijakan strategisnya.

Perusahaan menilai bahwa keberagaman komposisi sangat diperlukan, meskipun regulasi dan Peraturan Perundang-undangan terkait belum mengatur hal tersebut. Keberagaman Komposisi pada Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman serta *gender* dapat memberikan berbagai macam sudut pandang terkait strategi pengelolaan Perusahaan agar menjadi lebih baik dan berkualitas.

Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola perusahaan dirancang untuk dapat menciptakan iklim yang mendorong adanya partisipasi konkret seluruh pemangku kepentingan serta adanya keberagaman dalam susunan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi. Keberagaman ini diwujudkan melalui pembentukan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi yang memenuhi berbagai aspek yang diperlukan baik dari segi kualifikasi akademis, keterampilan, usia serta atas dasar prinsip anti diskriminasi. Berikut keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan.

The business world, particularly guarantee sector, always experiences dynamic development. Furthermore, this business is one of the important sectors in encouraging the national economic growth with the target market of Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives. On that basis, various competencies, expertise, and experience in the Company's management level, especially on the Board of Supervisors and Board of Directors of the Company, are always required to meet the business challenges with its strategic policies.

The Company considers that diversity in the composition is highly necessary, even though the relevant laws and regulations have not been established. Diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors comprising academic qualifications, expertise, experience, and gender can provide a variety of perspectives related to the Company's management strategy to be better and more qualified.

Therefore, the implementation of corporate governance is designed to create a climate that encourages concrete participation of all stakeholders as well as the diversity in the composition of the Board of Supervisors and Board of Directors. This diversity is manifested through establishing composition of Board of Supervisors and Board of Directors which meet the various aspects required either in terms of academic qualifications, skills, age, and on the basis of anti-discrimination principles. Below is the diversity of composition of each member of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Nama Name	Jabatan Position	Warganegara Citizenship	Kualifikasi Akademik Academic Qualifications	Usia Age	Gender
Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>					
Sri Mulyanto	Ketua <i>Head</i>	Indonesia	Magister Kebijakan Ekonomi <i>Master of Economic Policy</i>	60	Laki-laki <i>Male</i>
Dahlan Siamat	Anggota <i>Member</i>	Indonesia	Magister Manajemen Keuangan <i>Master in Financial Management</i>	64	Laki-laki <i>Male</i>
Subandriyo	Anggota <i>Member</i>	Indonesia	Sarjana Pertanian <i>Bachelor of Agriculture</i>	62	Laki-laki <i>Male</i>
Noor Ida Khomsiyati	Anggota <i>Member</i>	Indonesia	Magister Manajemen <i>Master of Management</i>	47	Perempuan <i>Female</i>
Diah Natalisa	Anggota <i>Member</i>	Indonesia	Profesor Ilmu Ekonomi <i>Professor of Economics</i>	55	Perempuan <i>Female</i>

Nama Name	Jabatan Position	Warganegara Citizenship	Kualifikasi Akademik Academic Qualifications	Usia Age	Gender
Direksi Board of Directors					
Randi Anto	Direktur Utama President Director	Indonesia	Magister Manajemen Perbankan Master in Banking Management	57	Laki-laki Male
Amin Masudi	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Indonesia	Magister Manajemen Agribisnis Master in Agribusiness Management	45	Laki-laki Male
Kadar Wisnuwarman	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operational and Network	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	47	Laki-laki Male
Sulis Usdoko	Direktur MSDM, Umum Dan Kepatuhan Director of HRM, GA, and Compliance	Indonesia	Magister Ekonomi Manajemen Master in Management Economics	58	Laki-laki Male
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment, and Risk Management	Indonesia	Master of Science	59	Laki-laki Male

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

State Administrators' Wealth Report

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib menaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Basic Principles of State Administrators' Wealth Report

As a State-Owned Enterprise through the Government of Indonesia, the Company is required to comply with binding legislation. One form of legislation which is based on the spirit of corruption eradication and internal irregularities is the obligation of State Administration Wealth Report (LHKPN).

LHKPN is a list of the whole State Administrator's Wealth stated in LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK's Decree No. KEP 07/KPK/02/2005 on the Procedures for Registration, Inspection, and Announcement of State Administrator's Wealth Report. Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission confirms the authority of KPK to conduct measures or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN. Furthermore, Law No. 28 of 1999 on the Implementation of a Clean and Free State of Corruption, Collusion, and Nepotism mandates that every organizer must report and announce his/her Assets before and after taking office and be willing to be inspected of his/her assets before and after taking office. In Law No. 28 of 1999 Article 2 (7) and its elucidation, it is described that other officials with strategic functions in relation to state administration including Board of Commissioners, Board of Directors, and other structural officials at State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

The examination of LHKPN submitted to KPK aims to realize State Administrators who adhere the general principles of state officials who are free from corruption, collusion, and nepotism practices, and other disgraceful acts. Each State Administrator is required to report his/her wealth through LHKPN form provided by KPK to be filled honestly, correctly, and completely, so that KPK can analyze, evaluate, and assess all Wealth reported in a correct, prompt, precise, accurate, and responsible manner.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2017

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan di tahun 2017.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Perum Jamkrindo Tahun 2017

Pejabat Officials	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Report	Jumlah yang Telah Melaporkan Number of Submitted Report	
		Jumlah Total	%
Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>	4	3	75,00%
Direksi <i>Board of Directors</i>	5	5	100,00%
Organ Pendukung Dewan Pengawas <i>Supporting Organs of the Board of Supervisors</i>	-	-	-
Manajer atau Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi <i>Manager or Officials of One Level Below Directors</i>	90	90	100,00%
Jumlah <i>Total</i>	99	98	99,00%

Legal Basis and Regulations in Applying LHKPN in the Company

In applying LHKPN, the Company weighs some legal and regulatory basis as the foundation of how to view LHKPN implementation within the Company. The legal basis are:

1. Law No. 28 of 1999 on Administering Clean State Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission.
3. Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises and its amendments.
4. Decree of Secretary of Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of GCG Implementation.

LHKPN Transparency of Company Officials in 2017

Below is the transparency of LHKPN submission of Company officials in 2017.

Disclosure of LHKPN Submission of Perum Jamkrindo Officials in 2017

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Penjaminan Syariah yang diberikan Perusahaan, dan untuk memenuhi ketentuan peraturan mengenai syariah, Perusahaan telah membentuk dan mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Keputusan Direksi No. 98/Kep-Dir/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan Keputusan Direksi No. 124/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Selain melegalisasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah, keputusan Direksi tersebut mencakup uraian tentang tugas dan tanggung jawab.

Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan di sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo Tahun 2017

To optimize the monitoring function of the Sharia Guarantee granted by the Company, and to comply with the provisions of the sharia regulations, the Company has established and appointed the Sharia Supervisory Board based on Directors' Decree No. 98/Kep-Dir/VII/2013 dated 24 July 2013 on Appointment of Sharia Supervisory Board of Public Corporate (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia.

Guidelines for Duty Implementation

The implementation of Sharia Supervisory Board's duties is based on Directors' Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016 and the Board of Directors' Decree No. 124/Kep-Dir/VII/2016 dated 14 October 2016 on the Appointment of Sharia Supervisory Board of Public Corporate (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia. In addition to legalizing the appointment of Sharia Supervisory Board, the Directors' decree includes a description of the duties and responsibilities.

Composition of Membership of the Sharia Supervisory Board

Membership structure of the Sharia Supervisory Board of the Company throughout the year 2017 is as follows:

Structure of the Sharia Supervisory Board of Perum Jamkrindo Year 2017

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Start of Services	Masa Akhir Jabatan End of Services
Ketua Head	Hasanudin	Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 <i>Board of Director's Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016.</i>	1 Juli 2016 <i>July 1, 2016</i>	30 Juni 2019 <i>June 30, 2019</i>
Anggota Member	Muhammad Syakir Sula	Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 <i>Board of Director's Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016.</i>	1 Juli 2016 <i>July 1, 2016</i>	30 Juni 2019 <i>June 30, 2019</i>

**Profil singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas Syariah, dalam bab Profil Perusahaan*

** Brief profiles of each member of the Sharia Supervisory Board can be seen in the Sharia Supervisory Board Profile, in the Company Profile chapter.*

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah atas semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan.
2. Memberikan nasehat, saran atau pendapat kepada Direksi mengenai kesesuaian semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memastikan semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
4. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan yang berkaitan dengan produk syariah pada Perusahaan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, serta memberikan tembusan kepada Direksi.
5. Menghadiri pertemuan yang disepakati antara Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan di luar jadwal yang sudah ditentukan apabila diminta oleh Direksi.
6. Memberikan dukungan secara maksimal demi tercapainya kemajuan Perusahaan khususnya Unit Kerja Penjaminan Syariah.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Di sepanjang tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan rapat.

Kebijakan Remunerasi

Kepada Dewan Pengawas Syariah, Perusahaan memberikan remunerasi sebagai berikut:

Uraian Description	Ketua DPS Head of Sharia Supervisory Board	Anggota DPS Member of Sharia Supervisory Board
Honorarium	12.650.000	11.385.000
Tunjangan Hari Raya per tahun (1x Honorarium) <i>Holiday allowance diganti jadi Religious holiday allowance</i>	12.650.000	11.385.000

Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board are as follows:

1. Conduct monitoring and ensure compliance with Sharia principles over all products, operations, and policies of the Company.
2. Provide advice, suggestion, or opinion to the Directors on the conformity of all products, operations, and policies of the Company with sharia principles.
3. Ensure that all products, operations and policies of the Company are in compliance with the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI).
4. Report business activities and developments related to sharia products to the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI), at least once in 1 (one) year, and provide a copy to the Directors.
5. Attend an agreed meeting between the Sharia Supervisory Board and Board of Directors at least once in 1 (one) month according to the agreed timetable, and at any time if required outside the specified schedule when requested by the Board of Directors.
6. Provide maximum support for the achievement of the Company's progress, especially the Sharia Guarantee Work Unit.

Meetings of Sharia Supervisory Board

Throughout the year 2017, the Sharia Supervisory Board did not have any meetings.

Remuneration Policy

To Sharia Supervisory Board, the Company gives the following remuneration:

Praktik *Bad Governance*

Bad Governance Practice

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat sekitar area proyek serta lingkungan. Oleh karena itu, praktik *bad corporate governance* senantiasa mengancam dalam kegiatan operasional Perusahaan. Berikut disampaikan praktik *Bad Governance* sesuai dengan kebutuhan

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Perum Jamkrindo tidak menemukan adanya laporan dari pihak manapun atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang (*self-assessment system*). Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai telah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun 2017 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan yang berlaku. Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang “Penyajian Laporan Keuangan” dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, dengan hasil opini bahwa laporan keuangan Perusahaan “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.”

The Company realizes that the business activities conducted cannot be separated from the direct or indirect interaction with the community around the project area and the environment. Therefore, bad corporate governance practices always threaten the Company's operational activities. Presented below is the Bad Governance practice according to the needs

Reports on Company Activities that Pollute the Environment

Perum Jamkrindo did not found any reports from any parties on Company's activities which pollute the environment.

Disclosure on Fulfillment of Tax Obligations

According to Tax regulation in Indonesia, the Company calculates, determines, and pays its own Tax payable (*self-assessment system*). Payment and reporting of Income Tax and Value Added Tax has been done regularly according to the applicable tax regulation.

Inconsistency of Presentation of Annual Report and Financial Statements with the Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

The Company's Financial Statements for 2017 has been prepared and presented according to the Financial Accounting Standard in Indonesia covering Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards – Indonesian Accounting Association (DSAK – IAI) as well as the prevailing regulations. The financial statements are prepared according to PSAK 1 (2009) on “Presentation of Financial Statements” and has been audited by the Public Accountant Office of Hertanto, Grace, Karunawan with the result of opinion that the financial statements of the Company is “Presented fairly, in all material respects.”

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Tidak terdapat kasus terkait buruh dan karyawan yang dihadapi Perusahaan di tahun 2017.

Cases Related to Labor and Employee

The Company does not find any labor and employee-related cases facing the Company in 2017.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 disusun dengan memisahkan laporan untuk penjaminan Program KUR dan Non Program.

Disclosure of Operations Segments in Financial Statements

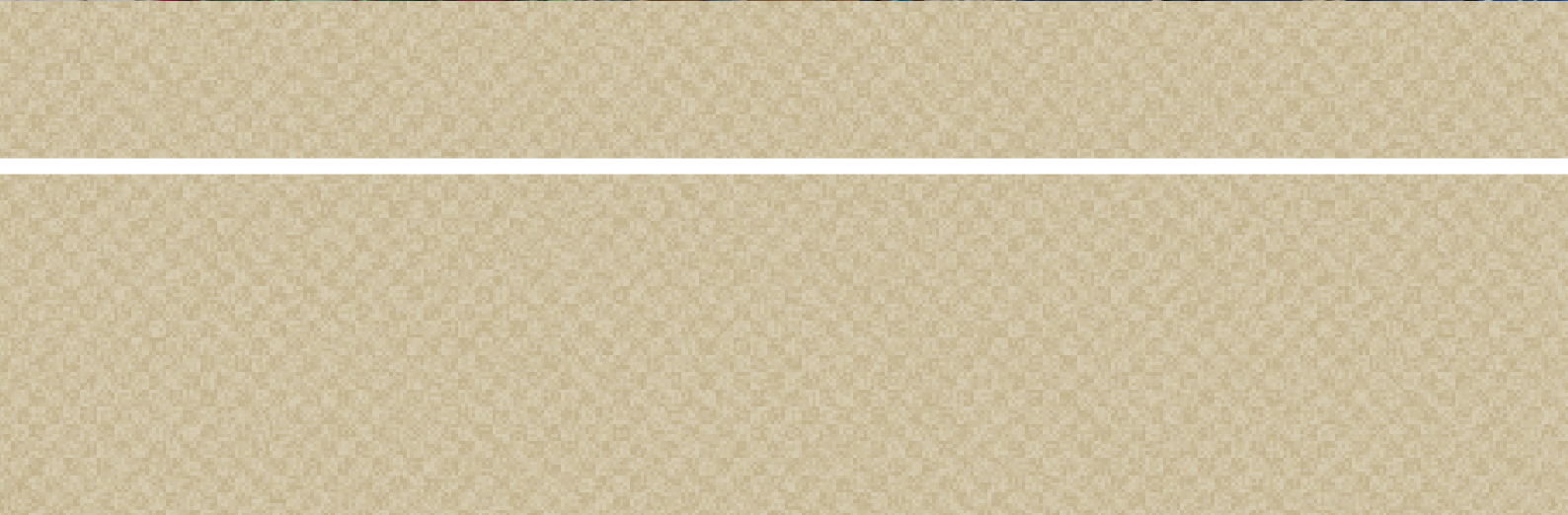
The Company's Consolidated Financial Statements for the years ended on 31 December 2017 and 2016 were prepared by separating the reports for the guarantee of KUR Program and Non-Program.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Perusahaan menyajikan Laporan Tahunan Digital yang disajikan pada situs web Perusahaan sesuai atau sama dengan Laporan Tahunan dalam bentuk buku.

The Conformance of Annual Report Book to Digital Annual Report

The Company presents the Digital Annual Report displayed on the Company's website conformed to or same as the Annual Report in the form of book.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bases of Implementation of Corporate Social Responsibility

Sebagai badan usaha milik negara yang menjadi bagian dari pemerintah dalam membantu terciptanya kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, Perum Jamkrindo senantiasa melengkapi peran tersebut melalui kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sesuai dengan visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional”, Perum Jamkrindo memiliki kewajiban moral untuk dapat mewujudkan keseimbangan antara pengelolaan usaha berbasis laba, kepentingan pemilik modal, hingga hubungan dengan pemangku kepentingan.

Pengelolaan usaha yang sehat, penerapan tata kelola organisasi yang baik yang didasarkan pada kepatuhan dan akuntabilitas, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan hak-haknya, hingga pertumbuhan Perum Jamkrindo bersama masyarakat Indonesia, tentu akan memperkuat posisi Perum Jamkrindo untuk dapat menjemput visi yang dicita-citakan.

As a state-owned enterprise which assists the Government in the establishment of a prosperous Indonesian society, Perum Jamkrindo always complements those roles through Corporate Social Responsibility (CSR) activities. In accordance with the Company's vision of “To become a Leading Guarantee Company which Supports the National Economic Development.”, Perum Jamkrindo has a moral obligation to realize a balance between the management of profit-based enterprises and the interests of the owners of capital, to the relationships with stakeholders.

Sound business management, good corporate governance which is based on compliance and accountability, human resource competency development and fulfillment of its rights, to the growth of Perum Jamkrindo with the Indonesian community will strengthen the position of Perum Jamkrindo to achieve the dreamed vision.

Keseimbangan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Balance in Sustainable Development



Keseimbangan seperti yang tergambar pada bagan di atas dapat diwujudkan melalui komitmen Perum Jamkrindo dalam melaksanakan program CSR ke dalam 4 (empat) aspek:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap lingkungan hidup.

The balance as illustrated in the above chart can be realized through Perum Jamkrindo's commitment to implement the CSR program into 4 (four) aspects:

1. Corporate Social Responsibility to the environment.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap karyawan melalui Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap masyarakat melalui pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap konsumen.

LANDASAN HUKUM

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN:
 - a. Pasal 2 mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
 - b. Pasal 88 mengemukakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (pasal 15 (b)) yang berisi, "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat".
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Corporate Social Responsibility to employees through Employment, Work Safety, and Health.
3. Corporate Social Responsibility to the community through social and community development and implementation of Partnership and Community Development Program (PCDP).
4. Corporate Social Responsibility to customers.

LEGAL FOUNDATION

The foundation of the Corporate Social Responsibility is based on the following legal aspects:

1. Law No. 19 of 2003 on SOEs:
 - a. Article 2 suggests that one of the aims and objectives of SOE establishment is to actively provide guidance and assistance to entrepreneurs of economically low category, cooperative, and community groups.
 - b. Article 88 states that SOEs can set aside a portion of their net income for the purposes of small business/cooperative development and community development around diganti State Owned Enterprises (BUMN).
2. Law No. 32 of 1998 concerning Development and Support of Small Enterprises.
3. Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprise.
4. Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment (article number 15(b)) that states, "Every capital investor is obligated to conduct corporate social responsibility. What is meant by corporate social responsibility is the responsibility of a capital-investing corporation to create harmonious and balanced relationship that adheres to the local environment, values, norms, and culture.
5. Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety.
6. Law No. 8 of 1999 concerning Customer Protection.
7. Law No. 13 of 2003 concerning Employment.
8. Law No. 28 of 1999 concerning transparent State Administration and free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
9. Law of the Republic of Indonesia No. 20 Year of 2001 concerning the changes of the law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.



10. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
11. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
13. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
14. ISO 26000
Telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada 2012, dengan 7 (tujuh) subyek inti yaitu:
 - a. Tata Kelola Organisasi yang Baik
 - b. Penegakan Hak Asasi Manusia
 - c. Praktek Ketenagakerjaan yang Manusiawi dan Berkeadilan
 - d. Dampak Kegiatan Perusahaan terhadap Lingkungan
 - e. Prosedur Operasi yang Wajar
 - f. Tanggung Jawab terhadap Konsumen
 - g. Pelibatan dalam Pengembangan Masyarakat
15. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP PERUM JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), yang salah satunya poinnya memuat tentang dukungan Perum Jamkrindo akan kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi), serta menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
16. Peraturan Direksi Perum Jamkrindo No. 29/Per-Dir/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Sistem dan Prosedur, Manual Akuntansi dan *Software* Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perum Jaminan Kredit Indonesia.
10. Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Work Health and Safety Management System.
11. Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises.
12. Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program of State Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program, as lastly amended by PER-03/MBU/12/2016 concerning the Amendment of the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
13. Circular Letter of the Ministry of State Owned Enterprises No. SE-02/MBU/Wk/2012 dated February 23 2012 concerning the Stipulation of Accounting Guidelines for Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
14. ISO 26000
It has been ratified by the Government in 2010 and has been made into Indonesian National Standard (SNI) in 2012 with 7 (seven) core subjects. They are:
 - a. Good Organizational Management
 - b. Implementation of Human Rights
 - c. Humane and Fair Employment Practice
 - d. Impact of the Corporation's Activity to the Environment
 - e. Appropriate Operational Procedure
 - f. Responsibility to the Customers
 - g. Community Involvement and Development.
15. Joint Decree among the Board of Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP PERUM JAMKRINDO/XII/2012, dated December 13, 2012 concerning the Code of Conduct, in which one of the articles states that Perum Jamkrindo supports the Government Decision in Developing the Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives (SME and Cooperatives), and putting customer's satisfaction as the primary priority.
16. Regulation of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 29/Per-Dir/VIII/2008 dated August 25, 2008 concerning the System and Procedure, Accounting Manual, and Accounting Software for Partnership Program and Community Development Program of Perum Jaminan Kredit Indonesia.

Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Practitioner of Corporate Social Responsibility Programs

Sesuai arahan dari pemilik modal, Kementerian BUMN, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perum Jamkrindo melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan peraturan tersebut, Perum Jamkrindo berkewajiban untuk menyalurkan dana dari Pemerintah dan menyelenggarakan PKBL yang merupakan sebagian dari keseluruhan komitmen Perum Jamkrindo terhadap pembangunan keberlanjutan.

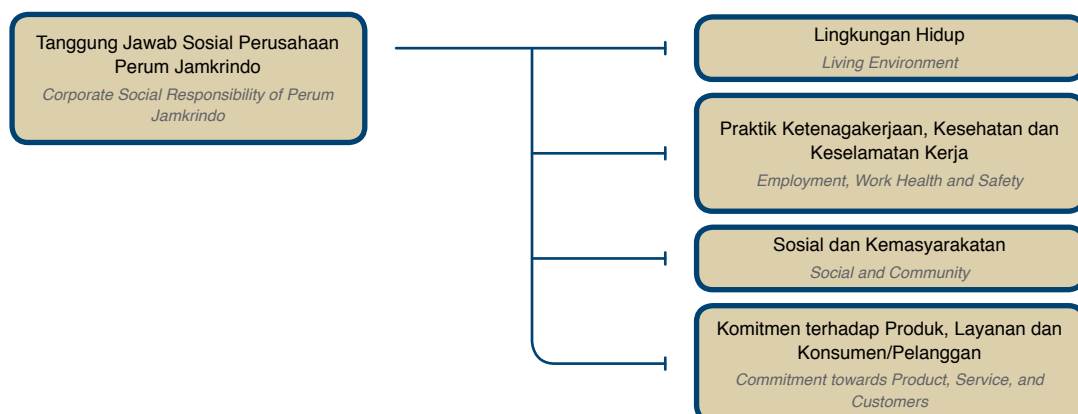
Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan program harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kemampuan Perum Jamkrindo. Pelaksanaan program dilakukan bersama masyarakat, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa dan Perguruan Tinggi, serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya setempat, kondisi geografis dan kepentingan operasional Perum Jamkrindo. Dalam evaluasi program, Perum Jamkrindo melakukan pengukuran atas efektivitasnya program yang dijalankan agar dapat memberikan manfaat nyata dan nilai tambah, baik bagi Perum Jamkrindo sendiri maupun pemangku kepentingan yang disasar oleh program.

Di samping itu, terkait hak pemangku kepentingan lainnya, pengembangan dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Perum Jamkrindo dituangkan dalam beberapa aspek, yang mencakup lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; sosial kemasyarakatan; serta aspek produk, layanan dan konsumen.

Based on the instruction of the shareholders, the Ministry of State Owned Enterprise, which is stated in the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprise No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program of State Owned Enterprise with Small Enterprises and Community Development Program as it was amended by PER-03/MBU/12/2016 concerning the Amendment of the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprise No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State Owned Enterprises, Perum Jamkrindo is conducting its Corporate Social Responsibility through Partnership and Community Development Program (PCDP/PKBL). Based on the regulation, Perum Jamkrindo is obligated to disseminate the budget from the Government and conduct the PCDP which is a part of the whole commitment of Perum Jamkrindo for sustainable development.

The Corporate Social Responsibility Programs are also conducted from the planning stage to evaluation. Program planning should be made based on the real need plans of the stakeholders considering the ability of Perum Jamkrindo. The programs are conducted with the community in coordination with the local Government (PEMDA), Non-Governmental Organization (NGO), mass organization and College, as well as the other related institution, while considering the local social, cultural, and geographic condition as well as the operational interest of Perum Jamkrindo. In the evaluation of the program, Perum Jamkrindo assesses the effectivity of the program conducted so it can give real advantages and added value, both for Perum Jamkrindo and for the targeted stakeholders.

In addition, relating to the rights of stakeholders, the Corporate Social Responsibility dimension development is conducted in several aspects which includes environment; employment, work health and safety; social community; and the aspect of products, services, and customers.

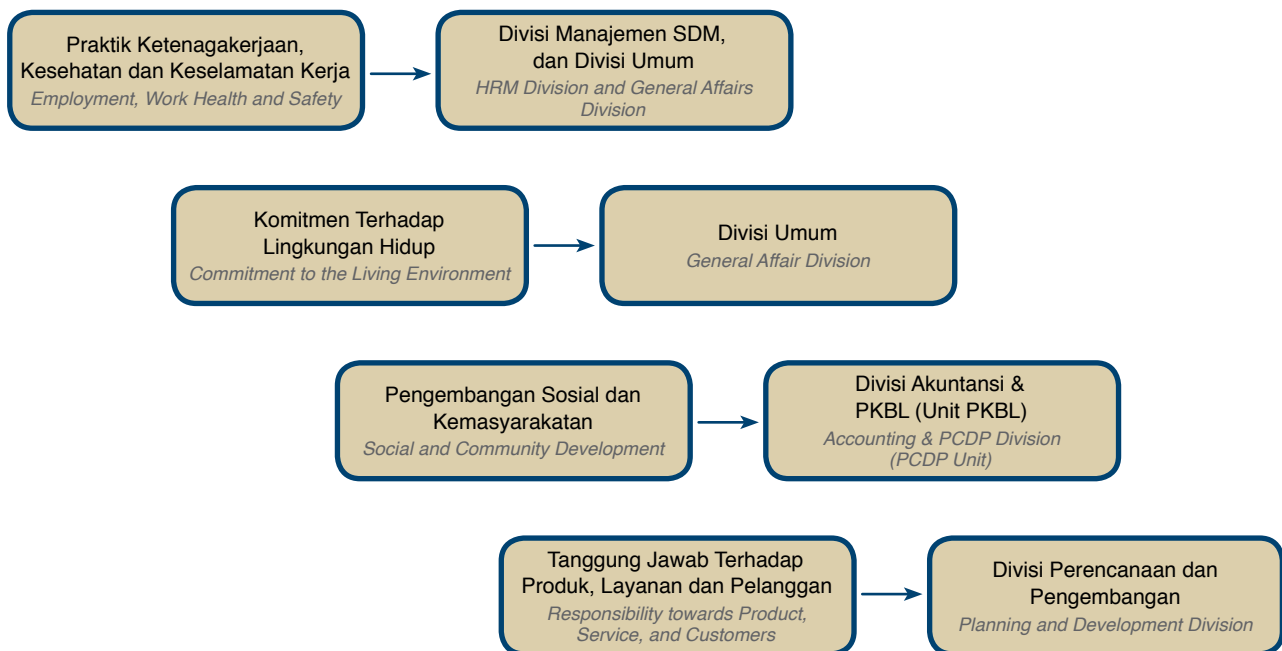


PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lingkup Perum Jamkrindo, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Unit/Divisi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program, seperti yang tergambar di bawah ini:

MANAGER OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

To fulfill the Corporate Social Responsibility programs thoroughly in Perum Jamkrindo, the implementation of the overall program is divided into several Units/Divisions with their own responsibilities based on the program category, as illustrated below:



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility Concerning The Environment

Kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara entitas usaha, masyarakat dan pemerintah, termasuk korporasi seperti Perum Jamkrindo. Walaupun bidang usaha Perusahaan adalah penjaminan kredit, Perum Jamkrindo berkomitmen untuk peduli terhadap lingkungan.

Kepedulian terhadap lingkungan antara lain diwujudkan melalui Program Bina Lingkungan, seperti pembuatan MCK, penyediaan sarana air bersih, saluran air, pengadaan gerobak dan tong sampah, maupun pelestarian alam dengan melakukan kegiatan penanaman pohon. Selain itu, kepedulian lingkungan juga dilakukan Perum Jamkrindo melalui kebijakan yang berkaitan dengan operasional sehari-hari, antara lain penggunaan kertas, energi, air, pengurangan emisi kendaraan operasional, dan penanganan limbah.

Sebagai catatan, data untuk penggunaan sumber daya alam merupakan data dari Kantor Pusat, dan belum mencakup data dari Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun Unit Pelayanan di daerah. Perum Jamkrindo berkomitmen untuk dapat menyajikan data yang lebih lengkap di tahun mendatang, meliputi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun Unit Pelayanan di daerah.

PENGUNAAN KERTAS

Dalam penggunaan kertas, Perum Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan dengan cara lebih banyak menggunakan surat elektronik atau *email* dalam menyampaikan informasi. Penghematan kertas juga dilakukan melalui pemanfaatan kertas bekas untuk konsep surat, atau jika memungkinkan mencetak naskah dalam kertas bolak-balik.

Pengecekan naskah secara paripurna sebelum dicetak agar terhindarkan dari kesalahan juga mendapat perhatian. Dengan demikian, pencetakan ulang yang memboroskan kertas bisa dihindarkan. Penghematan penggunaan kertas penting dilakukan karena Perum Jamkrindo menyadari bahwa pembuatan kertas identik dengan penebangan dan pemanfaatan pohon sebagai bahan baku kertas.

Pada tahun 2017, jumlah penggunaan kertas Perum Jamkrindo mencapai 1.682 rim, meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang membutuhkan kertas sebanyak 834 rim. Kenaikan kebutuhan kertas terjadi karena penambahan jumlah Unit Kerja dan penambahan jumlah karyawan yang cukup signifikan, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan operasional. Dengan penggunaan sebanyak itu, rasio penggunaan kertas tahun 2017 adalah 1,61 rim/

Environmental awareness is a shared responsibility between business entities, communities and governments, including corporations such as Perum Jamkrindo. Although the Company's business is credit guarantee, Perum Jamkrindo is committed to concern towards the environment.

Environmental awareness, among others is realized through the Community Development Program, such as the construction of toilet facilities, clean water facilities, waterways also the procurement of carts and trash cans, as well as natural conservation through planting trees. In addition, Perum Jamkrindo also put an effort of environmental awareness through policies related to daily operations, such as the use of paper, energy, water, reduction of operational vehicle emissions, and waste handling.

It should be considered that the data for natural resource usage is the data from the Head Office, and it does not include the data of Regional Office, Branch Office, and Service Unit in remote areas. Perum Jamkrindo is committed to present a more detailed and completed data in the upcoming years, covering the data from the Head Office, Regional Office, Branch Office, as well as Service Unit in remote areas.

PAPER USAGE

In terms of paper usage, Perum Jamkrindo has the policy of reducing the usage of paper by communicating mainly through email to convey information. Paper usage reduction is also implemented by using used paper to make a draft of a letter, or if possible by printing a document on both sides of the paper.

Thorough document checking before printing is also done to avoid mistakes. By doing that, the act of reprinting jobs which is a waste of paper can be avoided. Reducing the usage of paper is important as Perum Jamkrindo realizes that the usage of papers relates to logging and exploiting trees as the raw material for paper.

In 2017, the paper usage in Perum Jamkrindo reached the number of 1,682 reams of papers, this is an increase when compared to the paper usage of Perum Jamkrindo in 2016 which was 834 reams of paper. The increase in paper usage was due to the addition of a number of Work Units and the addition of a significant number of employees, which lead to increased operational needs. With such usage, paper use ratio of 2017 is 1.61 ream per employee, which is an



pegawai, naik dibanding rasio penggunaan kertas tahun 2016, yakni 0,93 rim per pegawai. Adapun limbah kertas diserahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Dalam operasional sehari-hari, Perusahaan tidak menggunakan kertas hasil daur ulang tersebut.

PENGUNAAN ENERGI LISTRIK

Untuk penggunaan energi listrik, Perum Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan, di antaranya, dengan mengganti lampu perkantoran dengan lampu hemat energi, serta melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur. Perusahaan juga memastikan bahwa semua alat elektronik telah dimatikan saat karyawan usai bekerja dan keluar dari ruangan.

Penghematan penggunaan listrik penting dilakukan karena Perum Jamkrindo menyadari bahwa ketersediaan energi listrik di Indonesia masih terbatas. Hal ini terkait dengan keterbatasan bahan baku untuk menggerakkan pembangkit listrik, yakni bahan bakar minyak. Total penggunaan energi listrik pada tahun 2017 tercatat sebesar 2.494 KWh, meningkat jika dibanding tahun 2016 dengan penggunaan sebesar 2.278 kWh. Kenaikan terjadi karena penambahan unit kerja dan jumlah karyawan sebagai pengguna energi listrik serta mulai digunakannya ruang kerja baru setelah selesainya pekerjaan renovasi.

Dengan penggunaan listrik sebesar itu, rasio per karyawan pada tahun 2017 tercatat sebesar 2,39 kWh, turun dibanding rasio tahun 2016, yakni 2,53 kWh per karyawan.

PENGUNAAN AIR

Untuk penggunaan air, Perum Jamkrindo memanfaatkan air dari PDAM dan tidak menggunakan air tanah. Pada tahun 2017, volume penggunaan air tercatat sebesar 13.573 meter kubik, turun dibanding tahun 2016 dengan penggunaan sebesar 13.690 meter kubik. Penurunan terjadi karena upaya penghematan yang dilakukan Perusahaan.

Upaya Perum Jamkrindo untuk menghemat penggunaan air adalah melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur, serta secara rutin melakukan pengecekan instalasi air dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kerusakan yang menyebabkan kebocoran. Adapun rasio penggunaan air per karyawan pada tahun 2017 adalah 13,00 meter kubik, turun dibanding rasio tahun 2016, yang tercatat sebesar 15,19 meter kubik.

increase in the ratio of paper use in 2016, which is 0.93 rim per employee. The waste paper in Perum Jamkrindo is submitted to third parties for recycling. In day-to-day operations, the Company does not use recycled paper.

ELECTIRCAL ENERGY USAGE

For electrical energy usage, Perum Jamkrindo applies the policy to reduce the usage of electrical energy, such as replacing the lamps in the office area with energy saving lamps, and making the working hour to be efficient by reducing overtime works. The Company also ensures that all electronic devices are turned off when the employees are finished with their works and they are leaving the office.

Reducing the usage of electricity is crucial as Perum Jamkrindo is aware that the availability of electricity in Indonesia is still limited. This is due to the limited number of raw material to operate the power plant, i.e. the fuel. The total energy usage in 2017 was 2,494 KWh, which is an increase by 7.96% compared to the total energy usage in 2016 which was only 2,278 kWh. The increase was due to the addition of work units and the number of employees as users of electrical energy, and the use of new workspace after the completion of renovation work.

With such use of electricity, the ratio per employee in 2017 was recorded at 2.39 kWh, which was a decrease from the 2016 ratio of 2.53 kWh per employee.

WATER USAGE

For water usage, Perum Jamkrindo utilizes water from PDAM (Regional Water Utility Company) and does not use groundwater. In 2017, the water usage reaches the number of 13,573 m3, which was a decrease when compared to the water usage in 2016 which was 13,690 m3. The decline was due to the Company's water saving efforts.

Perum Jamkrindo's effort to save water was by making the working hour to be efficient by reducing overtime works, and by routinely checking the water installation and conducting maintenance if necessary. The ratio of water usage per employee in 2017 was 13.00 cubic meters, which is a decline when compared to the ratio of 2016, which was recorded at 15.19 cubic meters.

PENANGANAN EMISI

Kepedulian Perum Jamkrindo terhadap lingkungan juga ditunjukkan dengan upaya mengurangi emisi udara melalui peremajaan mobil operasional. Pada tahun 2016, Kantor Pusat memiliki 39 unit mobil operasional karena adanya pengurangan mobil operasional sebanyak 17 unit yang telah memasuki usia tidak produktif. Di tahun 2017, Kantor Pusat melakukan peremajaan mobil sebanyak 2 (dua) buah dari total mobil operasional sebanyak 17 buah. Pengurangan emisi udara juga dilakukan Perum Jamkrindo dengan melakukan penyewaan mobil keluaran terbaru dari pihak ketiga untuk Direksi dan Kepala Divisi, serta melakukan penyewaan mobil sesuai dengan keperluan (insidental).

Upaya pengurangan emisi lain yang dilakukan Perum Jamkrindo berkaitan dengan emisi bahan perusak ozon (BPO). Dalam hal ini, Perusahaan berkomitmen untuk mengganti *refrigerant* (zat pendingin) AC yang ramah lingkungan. Pada tahun 2017, Perum Jamkrindo mengganti 6 dari 21 buah AC yang semula menggunakan *refrigerant* yang tidak ramah lingkungan menjadi *refrigerant* ramah lingkungan (dari *refrigerant* R-22 menjadi R-32 dan R-410). Pengurangan emisi bahan perusak ozon patut didukung karena menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya radiasi ultraviolet matahari, terutama UV-B yang mampu mencapai permukaan bumi. Kondisi tersebut memiliki berbagai dampak pada kesehatan tubuh manusia.

PENANGANAN LIMBAH

Dalam operasional sehari-hari, Perum Jamkrindo menghasilkan limbah berupa sampah dan limbah dari WC. Untuk penanganan sampah, Perusahaan menyediakan cukup tempat sampah, selanjutnya sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir bekerja sama dengan Dinas Kebersihan. Adapun limbah dari WC, akan dilakukan penyedotan melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau Dinas Kebersihan.

KEPATUHAN

Upaya dan kesungguhan Perum Jamkrindo untuk kepedulian lingkungan, termasuk melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional keseharian, membuahkan hasil dengan tidak adanya denda moneter maupun sanksi lain sepanjang tahun 2017. Hal itu tak lepas dari kepatuhan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan lainnya selama menjalankan usaha.

EMISSION MANAGEMENT

The awareness of Perum Jamkrindo on the environment is also shown by its efforts to reduce air emissions through the rejuvenation of operational cars. In 2016, the Head Office had 39 units of operational cars. There was a reduction in operational cars of 17 units since they had entered the unproductive age. In 2017, the Head Office rejuvenated 2 (two) out of that 17 (seventeen) operational cars. Air pollution reductions are also conducted by Perum Jamkrindo by renting the latest models from third parties for the Board of Directors and Division Heads, as well as performing incidental car rental.

Another emission reduction effort done by Perum Jamkrindo regarding the emission of ozone-depleting substances (ODS). In this case, the Company is committed to replace refrigerants (cooling agent) with environmentally friendly AC. In 2017, Perum Jamkrindo replaced 6 of 21 air conditioners that originally used non-environment friendly refrigerants to be environment-friendly refrigerants (from R-22 refrigerants to R-32 and R-410). The effort to reduce the emissions of ozone-depleting substances should be supported because the depletion of the ozone layer causes an increase in the sun's ultraviolet radiation, especially UV-B that can reach the earth's surface. These conditions have various effects on the health of the human body.

WASTE MANAGEMENT

In its daily operational activities, Perum Jamkrindo produces waste in the form of garbage and toilet waste. For garbage management, the Corporate has provided sufficient garbage bins. The collected garbage will then be dumped to the landfills, in cooperation with Waste Management Agency. As for the toilet waste, it will be handled through cooperation with a third party or Waste Management Agency.

COMPLIANCE

The effort and commitment of Perum Jamkrindo for environmental sustainability, which include the policies relating to the daily operational activities, has resulted in zero monetary fine or other sanction for the whole 2017 period. It is caused by the compliance of the Company to the Environmental Law and Other Regulation in performing its daily operational activities.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility Relating to Employment, and Work Health and Safety

Kehadiran Perum Jamkrindo di bidang penjaminan kredit tidak sekedar mencari *profit*. Lebih dari itu, Perusahaan memiliki tekad yang kuat agar keberadaannya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan, termasuk bagi karyawan, manajemen, dan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan beroperasi. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo meyakini bahwa semakin besar manfaat sosial dan kemasyarakatan yang diberikan oleh perusahaan, maka hal itu akan berdampak positif pada keberlanjutan usaha di masa-masa mendatang.

KEPEGAWAIAN

Dalam menjalankan usaha, Perum Jamkrindo tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme karyawan serta sistem imbal jasa yang sepadan. Selain itu, Perum Jamkrindo dan perusahaan pemasok, tidak mempekerjakan anak, serta tidak memberlakukan kerja paksa karena jam kerja pegawai mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Hingga 31 Desember 2017, Perum Jamkrindo memiliki karyawan sebanyak 1042² orang, meningkat 15,87% apabila dibandingkan tahun 2016 dengan 901 orang karyawan. Jumlah ini merupakan akumulasi dari rekrutmen karyawan yang dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 172 orang, dan *turnover* atau karyawan yang berhenti sebanyak 27 orang atau 2,59% dari total karyawan. Rekrutmen terdiri dari 165 calon karyawan dari jenjang D3/SMA/SMP, S1/D4 dan S2, karyawan profesional 5 orang, dan dua orang tenaga kontrak waktu tertentu. Sedangkan karyawan berhenti, alasannya adalah pensiun normal sebanyak 5 orang, dan mengundurkan diri 22 orang. Terhadap temuan ini, Perusahaan terus berupaya untuk melakukan perbaikan agar persentase *turnover* bisa semakin kecil. Hal itu dilakukan dengan tiga cara, yakni memperbaiki sistem remunerasi karyawan, mempertimbangkan kondisi karyawan pada saat melakukan promosi dan mutasi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk mengembangkan *hard skill* maupun *soft skill*.

Selain pegawai tetap, Perum Jamkrindo juga memiliki pegawai kontrak dan *outsource*. Hingga 31 Desember 2017, jumlah pegawai dengan status kontrak dan *outsource* tercatat sebanyak 512 orang, turun 103 orang atau 16,75% dibanding tahun 2016 dengan 615 orang pegawai kontrak dan *outsource*. Perbedaan status kepegawaian tersebut ikut menentukan tunjangan yang mereka peroleh selama

The existence of Perum Jamkrindo in credit guarantee service is not only to make profits. The Corporate also has a strong desire for its existence to bring the enormous advantages for all stakeholders, including the employees, management, and community around the operational area of the Corporate. Related to this, Perum Jamkrindo believes that the bigger social and community benefit could be served by the Company, the more positive impact for the continued sustainability of the business in the future.

EMPLOYMENT

In conducting business, Perum Jamkrindo is subservient and obedient to all laws and regulations related to the field of employment. In this case, Perum Jamkrindo gives its highest attention and commitment to gender equality and employment, job training to improve employee professionalism and equal remuneration system. In addition, Perum Jamkrindo and its suppliers, do not employ children and do not adopt forced labor due to employees' working hours following statutory provisions.

As of December 31, 2017, Perum Jamkrindo had 1,042 employees, which is an increase of 15.87% compared to 2016 of 901 employees. This amount is an accumulation of employee recruitment conducted in 2017 as many as 172 people, and employee turnover or employees who stopped working as many as 27 people or 2.59% of the total employees. The Company recruited 165 candidates with Diploma/Highschool/Junior High School/Bachelor Degree or Diploma 4 Degree, and Master Degree, 5 professional employees, and two time-contract workers. The number of retired employees were 5 (five) people, and the number of employees who resigned was 22 people. On these findings, the Company continues to make improvements in order to reduce the turnover percentage. This is done in three ways, namely improving the employee remuneration system, considering the condition of employees during the promotion and mutation, and providing equal opportunities to all employees to develop hard skills and soft skills.

In addition to permanent employees, Perum Jamkrindo also has contract-based and outsourced employees. As of December 31, 2017, the number of employees with contract and outsourced status was 512, which is a decline of 103 people or 16.75% compared to 2016 of 615 contract and outsourced employees. Differences in employment status also determine the benefits they earn during their

bekerja di Perum Jamkrindo. Sementara itu, terkait dengan remunerasi dan tunjangan serta bonus terhadap pegawai tetap dan kontrak, di 2017 mengalami kenaikan. Hal tersebut terkait dengan bertambahnya jumlah karyawan yang naik 15,87% apabila dibandingkan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Perum Jamkrindo membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, dengan semakin bertambahnya kebutuhan Perum Jamkrindo akan pegawai, seiring dengan persaingan yang semakin ketat.

Adapun peningkatan remunerasi dan tunjangan serta bonus terhadap pegawai tetap dan kontrak, di 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

work period in Perum Jamkrindo. Meanwhile, related to the remuneration as well as allowances and bonuses on permanent employees and contracts, in 2017 there was an increase. This is related to the increase in the number of employees who increased by 15.87% when compared to 2016. This shows that Perum Jamkrindo opened the broad opportunity of employment, in accordance with the increasing need of Perum Jamkrindo for employees, along with increasingly tough competition.

The increase in remuneration and benefits as well as bonuses to permanent employees and contracts, in 2017, when compared to the year 2016, is as follows:

Remunerasi dan Tunjangan serta Bonus Pegawai Tetap dan Kontrak

Remuneration and Incentive of Fulltime and Contract Employees

Uraian Description	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Gaji Salary	32.707.617.063	30.042.942.585
Kesejahteraan Welfare	61.648.214.013	52.579.270.202
Tunjangan Jabatan Positional Allowance	19.399.668.186	16.040.657.053
Tunjangan Kesehatan Healthcare Allowance	6.057.775.027	4.565.916.239
Tunjangan Makan Meals Allowance	11.836.637.000	9.073.995.563
Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	868.462.638	721.254.032
Tunjangan Wilayah Regional Allowance	6.553.644.450	6.360.512.403
Jumlah Remunerasi dan Tunjangan Total Remuneration and Allowances	139.072.018.377	119.384.548.076
Bonus Bonous	55.909.879.000	46.796.000.000

Tunjangan pegawai berdasarkan status kepegawaian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Employee benefits based on employment status are presented in the table below.

Tunjangan yang Diberikan Kepada Karyawan Tetap, Kontrak, dan Outsource

Benefits Provided to Permanent, Contracts, and Outsourced Employees

Uraian Description	Karyawan Tetap Permanent Employees	Karyawan Kontrak Contract Employees	Karyawan Outsource Outsourced Employees
Tunjangan Jabatan Tetap (Fix) Outsourced Employees	v	x	x
Tunjangan Jabatan Tidak Tetap (Variabel) Non-Fixed Position's Benefit (Variable)	v	x	x



Uraian Description	Karyawan Tetap Permanent Employees	Karyawan Kontrak Contract Employees	Karyawan Outsource Outsourced Employees
Tunjangan Kesejahteraan Welfare Benefit	v	x	x
Tunjangan Wilayah Regional Allowance	v	x	x
Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	v	x	x
Tunjangan Transportasi Pelatihan Training Transportation Benefit	v	v	x
Tunjangan Kesehatan Health Benefit	v	v	v

v = diberikan | x = tidak diberikan

v = provided | x = not provided

IMBALAN PASCA KERJA

Sebagai korporasi yang bertanggungjawab, Perum Jamkrindo senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan. Salah satunya berkaitan dengan pemenuhan hak karyawan berkaitan dengan imbalan pascakerja/program pensiun. Dalam hal ini, Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Selain program pensiun imbalan pasti, Perusahaan juga memiliki program iuran pasti dimana Perusahaan membayar iuran yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

Pada tahun 2017, Beban Estimasi Imbalan Pasca Kerja tercatat sebesar Rp12,22 miliar, naik Rp6 miliar atau 96,46% dibanding tahun 2016, yang tercatat sebesar Rp6,22 miliar. Adapun pembayaran untuk Premi Asuransi Pensiun pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp6,48 miliar, naik Rp2,99 miliar atau 85,67% dibanding tahun 2016, yang tercatat sebesar Rp3,49 miliar.

POST-EMPLOYMENT BENEFITS

As a responsible corporation, Perum Jamkrindo always adhere to and comply with the regulation concerning employment. One of which is the fulfillment of employees' right concerning post-employment benefits/pension program. Regarding this, the Company has registered its employees into the pension program, namely the Employee Welfare Insurance Program and Employee Welfare Program through Pension Fund of Financial Institution (DPLK). In addition to the pension program, the Company also provides defined post-employment benefit for the employees, in accordance to the Law of Employment.

Defined post-employment benefit is a pension program which determines the amount of pension benefit which will be given, it usually depends on one or more factors such as age, working period, or compensation. In addition to this program, the Company also has defined installment in which the Company pays the installment which is calculated based on a certain percentage of an employee's salary to the pension insurance program provided by pension fund of financial institution. The installment payment is charged to the profit and loss report when it is owed.

In 2017, the Estimated Expenses for Post-Employment Benefits was at IDR12.22 billion, which is an increase of IDR6 billion or 96.46% when compared to 2016, which was at IDR6.22 billion. The payment for Pension Insurance Premium in 2017 was recorded at IDR6.48 billion, which is an increase of IDR2.99 billion or 85.67% when compared to 2016, which was recorded at IDR3.49 billion.

RASIO UPAH STANDAR

Ketaatan Perum Jamkrindo terhadap ketentuan ketenagakerjaan juga ditunjukkan dengan pembayaran upah karyawan baru yang jumlahnya jauh di atas Upah Minimum Regional (UMR). Upah minimal yang diberikan Perum Jamkrindo untuk karyawan baru adalah sebesar Rp5.761.486. Kebijakan ini berlaku untuk semua wilayah operasi. Dalam memberikan upah, termasuk remunerasi, Perum Jamkrindo tidak membedakan berdasarkan gender, melainkan berpatokan pada kompetensi karyawan.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Selain terus berupaya menciptakan kenyamanan dalam bekerja, Perusahaan juga berkomitmen untuk mewujudkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan. Dalam hal ini, Perusahaan bertekad untuk menekan angka kecelakaan sehingga tidak terjadi satupun kecelakaan (*zero accident*).

Untuk mewujudkan target tersebut, Perusahaan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat keselamatan kerja, seperti jalur evakuasi, *sprinkle*, *hydrant*, alat pemadam kebakaran, kotak P3K dan alat keselamatan kerja lainnya di setiap lantai gedung kantor. Selain itu, pelaksanaan program K3 untuk fasilitas kesehatan diwujudkan dengan mengikutsertakan karyawan dan keluarga dalam program asuransi kesehatan BPJS dan Asuransi Mandiri Inhealth.

Untuk kondisi darurat, Perusahaan memiliki Peraturan Direksi No. 45/Per-Dir/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Kebijakan Umum Penanganan Kondisi Darurat di Lingkungan Kerja Perum Jamkrindo. Langkah konkret yang dilakukan untuk kedaruratan, antara lain, Perusahaan memberikan pelatihan dan simulasi tanggap Darurat berupa:

1. Pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar pada 2 Juni 2017, berdasarkan Surat Undangan Pelatihan No. 2970/P/4. I/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.
2. Pelatihan *basic first aid* (P3K) pada 11 Agustus 2017, berdasarkan Surat Undangan Pelatihan No. 4182/P/4. I/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
3. Kegiatan simulasi pelatihan tanggap darurat pada 20 Oktober 2017, berdasarkan Surat Undangan Pelatihan No. 714/UND/1.1/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Dengan berbagai upaya itu, pada tahun pelaporan, Jamkrindo mampu meneruskan pencapaian tahun 2016, yakni mewujudkan angka kecelakaan kerja nol.

STANDARD SALARY RATIO

The compliance of Perum Jamkrindo to the Law of Employment is shown by the payment of new employee salary which amount is far beyond the Regional Minimum Wage (UMR). The minimum salary paid by Perum Jamkrindo to the new employees is IDR5,761,486, and it is applicable in all areas of operation. In giving the salary, including remuneration, Perum Jamkrindo does not discriminate between genders, but it uses employee's competency as a reference.

WORK HEALTH AND SAFETY

In addition to continuously striving to create comfort in the workplace, the Company is also committed to realizing employee health and safety. In this case, the Company is determined to reduce the number of accidents so that no accident occurs (*zero accident*).

To achieve these targets, the Company provides safety and health protection by providing safety equipment, such as evacuation lines, sprinklers, fire hydrants, fire extinguishers, first-aid boxes and other safety equipment in every floor of the office building. In addition, the implementation of OSH program for health facilities is realized by involving employees and families in the health insurance program of BPJS and Asuransi Mandiri Inhealth.

For emergency conditions, the Company refers to the Regulation of the Board of Directors. 45 / Per-Dir / XII / 2012 dated December 21, 2012, on General Policy of Emergency Handling in Perum Jamkrindo Working Environment. Some concrete steps taken by the Company for emergency conditions, among others, are the provision of emergency response training and simulation in the form of:

1. Basic firefighting training on June 2nd, 2017, based on the SUP No. 2970/P/4. I/V/2017 dated May 31, 2017.
2. Basic first aid training (P3K) on August 11, 2017, based on SUP No. 4182/P/4. I/VIII/2017 dated August 10, 2017.
3. An emergency response training simulation exercise on October 20, 2017, based on SUP No. 714/UND/1.1/X/2017 dated October 19, 2017.

With these efforts, in the reporting year, Jamkrindo was able to sustain the achievement of the year 2016, which is to realize zero workplace accidents.



KETERCAKUPAN DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Karyawan Jamkrindo memiliki wadah untuk berserikat dan berkumpul berupa Serikat Pekerja bernama "Sekarya" (Serikat Karyawan). Anggota serikat pekerja saat ini berjumlah 1.042 orang, yang terdiri dari karyawan permanen dan karyawan Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah. Seluruh anggota Serikat Pekerja (100%) tercakup dan terikat dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban karyawan dan manajemen Perum Jamkrindo.

COVERAGE IN COLLECTIVE LABOR AGREEMENT

Jamkrindo employees can associate and assemble in the forum called Labor Unions called "Sekarya" (Unions of Employees). The current union members are 1,042 persons, consisting of permanent employees and assigned employees of the subsidiary, PT Jamkrindo Syariah. All members of the Labor Union (100%) are covered and bound by the Collective Labor Agreement (PKB) which regulates the rights and obligations of employees and management of Perum Jamkrindo.

Jumlah Karyawan yang menjadi Anggota Serikat Pekerja dan Terikat PKB

Number of Employees who become Members of Labor Unions and Bound by the Collective Labor Agreement

Tahun Year	Jumlah Karyawan dalam Serikat Pekerja The Number of Employees in the Labor Union	Persentase Percentage
2016	901	100,00%
2017	1.042	100,00%

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan Perum Jamkrindo melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program mulia ini sejatinya menempatkan BUMN sebagai Agen Pembangunan yang memiliki aspek pengelolaan usaha berbasis laba, sekaligus mendorong perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

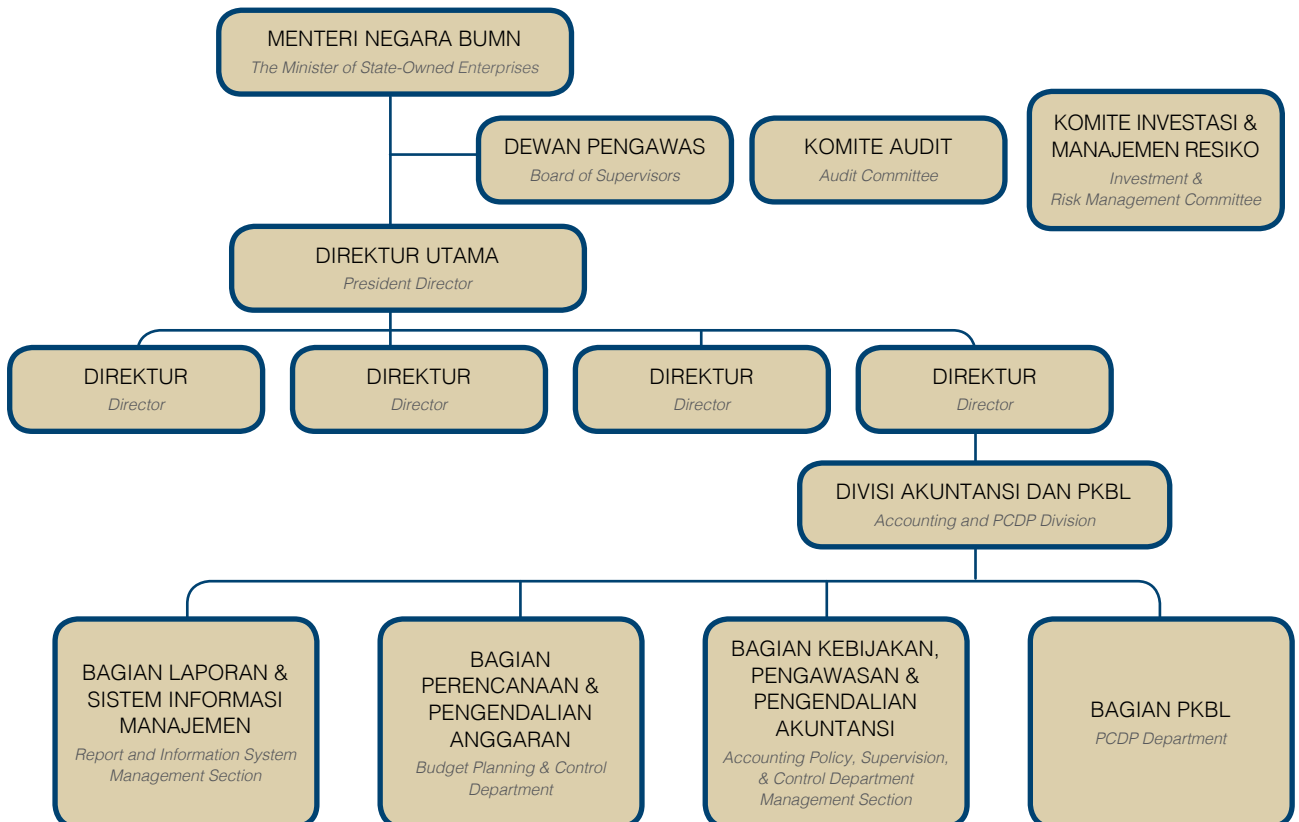
Sebagai BUMN, Perum Jamkrindo mendapatkan penugasan untuk melaksanakan PKBL di wilayah kerjanya. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo. Salah satu bentuk bantuan dalam Program Bina Lingkungan adalah bantuan dana pembinaan (hibah) kepada mitra binaan (usaha kecil dan koperasi) untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan usahanya agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

The implementation of Corporate Social Responsibility related to social and community development is realized by Perum Jamkrindo through the implementation of the Partnership and Community Development Program (PCDP). This noble program actually puts SOEs as Development Agents which have the aspect of profit-based business management, as well as encouraging social change to a better society.

As a SOE, Perum Jamkrindo has been assigned to implement PCDP in its working area. The Partnership Program is a program to increase the capability of small businesses in the form of loans, in order to be resilient and independent. On the other hand, the Community Development Program is a program of community social empowerment in the form of providing assistance to the community around the working area of Perum Jamkrindo. One of the forms of assistance in the Community Development Program is the funding assistance to the assisted partners (small businesses and cooperatives) to encourage and develop their business activities in order to become strong and independent so as to improve the living standard of the community.

PENGELOLA PKBL PERUM JAMKRINDO

Struktur Organisasi PKBL Perum Jamkrindo



MANAGER OF PCDP OF PERUM JAMKRINDO

The Organizational Structure of PCDP of Perum Jamkrindo



Berikut adalah Sumber Daya Manusia yang menangani program PKBL Perum Jamkrindo.

The Person in Charge of the PCDP Program of Perum Jamkrindo is elaborated as follows:

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment, and Risk Management</i>	:	I. Rusdonobanu
Kepala Divisi Akuntansi dan PKBL <i>Head of Accounting and PCDP Division</i>	:	Diana Mayawati
Kepala Bagian PKBL <i>Head of PCDP</i>	:	Lies Nun Heriyatishah
Kepala Seksi PK <i>Head of PK Section</i>	:	Irma Hartati
Kepala Seksi BL <i>Head of Community Development Section</i>	:	Eka Marta Fitria
Staf PKBL <i>PCDP Staff</i>	:	Retno Indriani
		Muhamad Azikri Gumilar

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN PKBL TAHUN 2017

Di setiap awal tahun, Perum Jamkrindo telah melakukan perumusan rencana kerja dan anggaran terkait pelaksanaan PKBL. Berikut disampaikan target dan rencana kegiatan PKBL yang telah dicanangkan di awal tahun 2017.

TARGET AND PLANNING OF PCDP ACTIVITIES IN 2017

In the beginning of every year, Perum Jamkrindo plans its working plan and budget related to PCDP. The target and planning of PCDP activities formulated in the beginning of 2017 is elaborated as follows:

Program Kemitraan *Partnership Program*

Sasaran

- Tersalurkannya dana Program Kemitraan di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo sebesar Rp7.874.000.000.
- Adanya penyebaran penyaluran dana Program Kemitraan ke seluruh Kanca Perum Jamkrindo.

Goals

- *Distribution of Partnership Program funds in all work units of Perum Jamkrindo is IDR7,874 million.*
- *Distribution of Partnership Program funds to all Branch Offices of Perum Jamkrindo.*

Strategi

- Intensifikasi Program Kemitraan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Kemitraan agar mitra binaan menjadi lebih tangguh dan mandiri, antara lain:
 - » Meningkatkan kemampuan manajemen dan produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan manajemen dan keuangan serta memberikan bantuan konsultasi manajemen sesuai dengan kemampuan SDM perusahaan.
 - » Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan promosi/pameran serta melakukan upaya pemasaran hasil produksi mitra binaan melalui peran perusahaan berskala nasional.
 - » Meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha mitra binaan secara kontinyu untuk melakukan evaluasi dan melihat perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi serta membantu memberikan saran/solusi perbaikan, dan mengintensifkan penagihan kepada mitra binaan dengan tetap memperhatikan kondisi mitra binaan.
- Ekstensifikasi Program Kemitraan dengan mencari calon mitra binaan yang potensial, berkualitas dan mempunyai prospek usaha yang menguntungkan melalui organisasi perdagangan dan industri milik pemerintah/swasta atau secara langsung oleh Perum Jamkrindo.
- Melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain atau pihak lain dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan antara lain dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di sektor pertanian.

Strategies

- *Intensification of Partnership Program by optimizing the implementation of Partnership Program so that the partners will become more resilient and self-reliant, such as:*
 - » *Improving management capabilities and production of assisted partners by engaging in management and financial training and providing management consulting assistance in accordance with the company's HR capabilities.*
 - » *Improving marketing access of partners' products by engaging in promotional/exhibitional activities and marketing efforts of coached partners through the role of national companies.*
 - » *Improving sustainable development by conducting continuous on-site visits to partners' business location to evaluate and monitor business developments and problems, and to assist in providing improvement advice/solutions, and to intensify collection to partners by considering the conditions of the assisted partners.*
- *Extensification of Partnership Program, by searching potential, qualified partners candidates which have profitable business prospects, through Government or private trade or industry organization, or directly conducted by Perum Jamkrindo.*
- *Synergize with other SOEs or other parties in the implementation of Partnership Program fund's distribution, among others, with PT Permodalan Nasional Madani (PNM) in the agricultural sector.*

Program Bina Lingkungan

Community Development Program

Sasaran

Terselurnya dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp8.976.855.932 di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo.

Goal

The increment of Community Development Program fund amounting to IDR8,976,855,932 in all work units of Perum Jamkrindo in the form of provision of assistance to the community around the working area of Perum Jamkrindo.

Strategi

Melaksanakan penyaluran dana Bina Lingkungan melalui kerja sama dengan Yayasan, LSM maupun warga masyarakat.

Strategy

Distribution of the Community Development fund through cooperation with Foundations, NGOs and community members.

REALISASI KEGIATAN PKBL DI TAHUN 2017

Pengelolaan Program Bina Lingkungan Perum Jamkrindo di tahun 2017 dilaksanakan 56 Cabang dan Kantor Pusat sedangkan penyaluran Pinjaman Kemitraan dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan 18 Cabang.

Realisasi kegiatan PKBL di sepanjang tahun 2017 telah dilaksanakan dengan pencapaian terhadap anggaran sebesar 74,07% untuk Program Kemitraan, dan 59,85% untuk Program Bina Lingkungan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, penyaluran Program Kemitraan mengalami penurunan 3,33% dan Program Bina Lingkungan turun 38,16%. Kendala yang dihadapi Perum Jamkrindo sehingga RKA PKBL 2017 tidak tercapai adalah adanya beberapa program kegiatan di BUMN Hadir untuk negeri yang tidak dilaksanakan sedangkan Perusahaan telah menganggarkannya, prinsip kehati-hatian dan selektif dalam penyaluran Program Kemitraan karena dari hasil survey terdapat beberapa calon mitra binaan yang masih diragukan, keterbatasan SDM di kantor cabang sehingga tidak ada SDM yang khusus melakukan pekerjaan *monitoring* dan pengawasan PKBL. Untuk mengatasi kendala tersebut, Perum Jamkrindo telah merumuskan langkah-langkah, yakni melakukan sosialisasi PKBL kepada usaha kecil dan UMKM serta perlu menambah SDM yang khusus untuk menangani unit PKBL. Bercermin pada kendala dan solusi pada tahun 2017, Perum Jamkrindo akan berupaya untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan PKBL tahun 2018 sehingga dapat mencapai RKA PKBL 2018.

REALIZATION OF PCDP ACTIVITY BUDGET IN 2017

The management of Community Development Program of Perum Jamkrindo in 2017 was conducted in 56 Branch Offices and Head Office while the Distribution of Partnership Loan was conducted by the Head Office and 17 Branch Offices.

The realization of PCDP activities in 2017 has been implemented with the achievement of the budget of 74.07% for the Partnership Program, and 59.85% for the Community Development Program. When compared to the realization of 2016, the Partnership Program's distribution decreased by 3.33% and the Community Development Program declined by 38.16%. Problems faced by Perum Jamkrindo, resulted in the non-achievement of RKA of PCDP 2017, was the existence of several programs of activities in SOEs was not implemented while the Company has allocated the budget for it. Other problems included the principle of prudence and selective in the channeling of Partnership Program since the survey results indicated that there were still some doubtful potential partners. Another problem was the limitations of human resources in the branch office so that no human resources can be allocated to specifically do the monitoring and supervision work of PCDP. To overcome these obstacles, Perum Jamkrindo has formulated the several steps. The first step is the dissemination of PCDP to small business and SMEs. The other step is by adding human resources with specific skills to handle the PCDP unit. Reflecting on the problems and solutions of 2017, Perum Jamkrindo will strive to make improvements in the implementation of PCDP in 2018 so as to achieve RKA PCDP 2018.



Uraian Description	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease (%)
	(1)	(3)	((1-3):3)
Program Kemitraan Partnership Program	7.874.000.000	8.145.279.000	(3,33)%
Program Bina Lingkungan Community Development Program	8.976.855.932	14.516.985.167	(38,16)%

Berikut disampaikan laporan realisasi kegiatan PKBL Perum Jamkrindo tahun 2017.

1. Realisasi Program Kemitraan

Penyaluran dana Program Kemitraan dan jumlah mitra binaan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

Below are submitted reports of realization of PCDP of Perum Jamkrindo's activities in 2017.

1. Realization of Partnership Program

The channeling of Partnership Program funds and the number of sector-targeted partners is as follows:

**Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2017
Berdasarkan Sektor Usaha Mitra Binaan**

**Realization of budget distribution of Partnership Program in
2017 Based on the Business Sectors of Partners**

No	Uraian Description	2017		2016		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease	
		MB Partners	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	MB Partners	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	MB Partners	Jumlah (Rp) Amount (IDR)
		1	2	(5)	(6)	((1-5)/5)	((2-6)/6)
1	Sektor Industri Industrial Sector	12	640.000.000	19	920.000.000	(36,84%)	(30,43%)
2	Sektor Perdagangan Trade Sector	107	4.218.000.000	127	4.758.000.000	(15,75%)	(11,35%)
3	Sektor Pertanian Agricultural Sector	7	330.000.000	6	715.000.000	16,67%	(53,85%)
4	Sektor Peternakan Livestock Sector	6	250.000.000	8	330.000.000	(25,00%)	(24,24%)
5	Sektor Perkebunan Plantation Sector	20	1.000.000.000	-	-	-	-
6	Sektor Perikanan Fisheries Sector	-	-	2	65.000.000	-	-
7	Sektor Jasa Service Sector	43	1.436.000.000	35	1.357.279.000	22,86%	5,80%
Jumlah Total		195	7.874.000.000	197	8.145.279.000	(1,02%)	(3,33%)

MB = Mitra Binaan/Partners

Dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan, bagian PKBL Perum Jamkrindo melakukan kerja sama dengan PT PNM.

In implementing the distribution of Partnership Program funds, PCDP Division of Perum Jamkrindo cooperates with PT PNM.

2. Realisasi Program Bina Lingkungan

2. Realization of Community Development Program

Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Berdasarkan Jenis Bantuan

Realization of Budget Distribution of Community Development Program based on the Type of Aids

No	Uraian Description	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%) Increase/Decrease (%)
		(1)	(3)	((1-3):3)
1	Bantuan Korban Bencana Alam <i>Natural Disaster Victim Aid</i>	361.975.000	137.959.658	162,38%
2	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan <i>Educational and/or Training Aid</i>	1.885.260.658	2.327.863.609	(19,01%)
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan <i>Health Improvement Aid</i>	40.000.000	139.415.000	(71,31%)
4	Bantuan Pengembangan Prasarana & Sarana Umum <i>Public Infrastructure & Facilities Development Aid</i>	507.611.140	2.963.676.075	(82,87%)
5	Bantuan Sarana Ibadah <i>Worship Facilities Aid</i>	1.157.156.161	824.449.013	40,36%
6	Bantuan Pelestarian Alam <i>Nature Conservation Aid</i>	-	68.500.000	(100,00%)
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan <i>Social Societies Aid in Order to Alleviate Poverty</i>	5.024.852.973	7.973.815.098	(36,98%)
8	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan Mitra Binaan <i>Educational and/or Training Aid for Established Partners</i>	-	81.306.714	(100,00%)
Jumlah Total		8.976.855.932	14.516.985.167	(38,16%)

PROGRAM KEMITRAAN

PARTNERSHIP PROGRAM

Berdasarkan Peraturan No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017, Program Kemitraan BUMN dengan usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Based on the Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 05, 2017, SOE Partnership Program with small enterprises, hereinafter referred to as Partnership Program, is a program to improve the capability of small enterprises to be durable and independent by leveraging the budget from parts of SOE profit. Small enterprises is a small scale people economic activity and it fulfills the criteria of net wealth or annual sales as well as ownership.

Tanggung jawab terhadap mitra binaan diwujudkan dalam bentuk pembinaan mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan dalam tahun berjalan.

Responsibility to the partners is shown by coaching the partners. The budget resource to coach the partners is the budget of Partnership Program Coaching, which is at most 20% of the Partnership Program budget allocated for the ongoing year.



Program Kemitraan yang telah dilakukan antara lain meliputi pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pemberian bantuan dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

Calon Mitra Binaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,-;
2. Milik warga negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Penetapan dana unit PKBL adalah sebagai berikut:

1. Dana Program Kemitraan, yang bersumber dari:
 - a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
 - c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan; dan
 - d. Sumber lain yang sah.
2. Dana Program Kemitraan yang diberikan dalam bentuk pinjaman, yaitu:
 - a. Pinjaman; diberikan untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - b. Pinjaman Khusus; diberikan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan

The Partnership Program which has been conducted involves giving loans to finance the business capital or fixed asset procurement to increase production and sales, giving supports in form of grants to finance education, training, internship, marketing, promotion, and other elements related to improving the productivity of the Partners.

A Potential Partner for SOE Partnership Program with Small Enterprises and Community Development Program should fulfill these criteria:

1. Having net worth at most IDR 500,000,000.00 excluding land and operational buildings, or having annual sales at most IDR 2,500,000,000.00;
2. Belongs to an Indonesian Citizen;
3. Independent, not a subsidiary or branch of a corporation, which is owned, regulated by, or affiliated both directly and indirectly to medium or big enterprises;
4. The status is individual corporation; non-legal entity business entity, or legal business entity, including cooperatives;
5. Having business potential and prospects to be developed;
6. Has been doing the business for at least 1 (one) year;
7. Has not fulfilled the requirements of banking (nonbankable).

The determination of PCDP funds is as follows:

1. Partnership Program Budget, which originates from:
 - a. Provision for net profit after tax as stipulated in the General Meeting of Shareholders/Minister and the approval of the Annual Report of coach SOE with the maximum amount of 4% of the net profit after the tax of the previous financial year;
 - b. Administrative service of loan/margin/share from Partnership Program;
 - c. Deposit interest and/or giro service from Partnership Program Fund and Community Development Program budget placed; and
 - d. Other legitimate resource.
2. Partnership Program Fund that is provided in forms of loan are:
 - a. Loan; granted to finance working capital and / or purchase of fixed assets in order to increase production and sales.
 - b. Special Loans; granted to finance the funding needs of the short-term Partnership business activities in order to fulfill orders from vendor of the Partners.

Mekanisme atau tata cara penyaluran atau pemberian dana pinjaman Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana kegunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina.
2. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh Calon Mitra Binaan.
3. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina bersangkutan.
4. Pemberian pinjaman kepada Calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.
5. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada Calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.

The mechanism to distribute or give loan for Partnership Program is as follows:

1. Potential Partner submits the plan of loan usage to improve their business to be proposed to SOE.
2. SOE evaluates and selects the proposal that is submitted directly by Potential Partner
3. Appropriate Potential Partner should complete the administrative process of loan with the related SOE
4. Giving loan to the Potential Partner, presented in an agreement letter/contract.
5. SOE is not permitted to give loans to a Potential Partner that is the Partner of another SOE.

Dalam pelaksanaannya, Program Kemitraan yang dilakukan Perum Jamkrindo sepanjang tahun 2017 adalah:

1. Program Kemitraan di sektor industri
2. Program Kemitraan di sektor perdagangan
3. Program Kemitraan di sektor pertanian
4. Program Kemitraan di sektor peternakan
5. Program Kemitraan di sektor perkebunan
6. Program Kemitraan di sektor perikanan
7. Program Kemitraan di sektor jasa
8. Program Kemitraan di sektor lainnya

In its implementation, the Partnership Program performed by Perum Jamkrindo in 2017 includes:

1. Partnership Program in Industrial Sector
2. Partnership Program in Trading Sector
3. Partnership Program in Agricultural Sector
4. Partnership Program in Farming Sector
5. Partnership Program in Plantation Sector
6. Partnership Program in Fishery Sector
7. Partnership Program in Service Sector
8. Partnership Program in Other Sectors

Adapun realisasi penyaluran dana terkait Program Kemitraan yang telah disalurkan Perum Jamkrindo sepanjang 2017 adalah sebesar Rp7,87 miliar, atau turun 3,33% dibandingkan realisasi tahun 2016 sejumlah Rp8,14 miliar, yang dialokasikan kepada Mitra Binaan untuk berbagai sektor usaha.

The realization of the distribution of funds related to Partnership Program which has been disseminated by Perum Jamkrindo throughout 2017 amounted to IDR7.87 billion, which is a decline of 3.33% when compared to the realization in 2016 amounting to IDR8.14 billion, which is allocated to Partners for various business sectors.

Realisasi penyaluran dana pembinaan Program Kemitraan berdasarkan Kantor Cabang Perum Jamkrindo selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The realization of the distribution of Partnership Program's Coaching fund based on the Perum Jamkrindo Branch Office during the last 5 (five) years is as follows:

No.	Kantor Cabang Branch Office	2017	2016	2015	2014	2013
1	Jakarta	1.905.000.000	1.435.000.000	1.470.000.000	1.095.000.000	1.030.000.000
2	Bandung	415.000.000	480.000.000	-	50.000.000	170.000.000
3	Semarang	655.000.000	630.000.000	490.000.000	510.000.000	275.000.000
4	Surabaya	200.000.000	790.000.000	780.000.000	590.000.000	180.000.000
5	Makassar	490.000.000	655.000.000	80.000.000	230.000.000	235.000.000
6	Pekanbaru	448.000.000	315.000.000	540.000.000	91.000.000	315.000.000
7	Palembang	730.000.000	1.055.000.000	525.000.000	630.000.000	520.000.000
8	Pontianak	513.000.000	735.000.000	630.000.000	525.000.000	170.000.000
9	Samarinda	635.000.000	490.000.000	305.000.000	285.000.000	290.000.000
10	Denpasar	1.050.000.000	185.000.000	415.000.000	320.000.000	50.000.000



No.	Kantor Cabang Branch Office	2017	2016	2015	2014	2013
11	Medan	190.000.000	460.000.000	495.000.000	360.000.000	280.000.000
12	Banjarmasin	170.000.000	70.000.000	250.000.000	95.000.000	-
13	Palangkaraya	158.000.000	263.000.000	45.000.000	85.000.000	-
14	Mataram	-	15.000.000	-	-	-
15	Kupang	-	97.279.000	-	96.000.000	-
16	Papua	70.000.000	280.000.000	-	80.000.000	-
17	Jambi	80.000.000	60.000.000	50.000.000	102.000.000	-
18	Manado	165.000.000	130.000.000	273.000.000	100.000.000	-
Jumlah Total		7.874.000.000	8.145.279.000	6.348.000.000	5.244.000.000	3.515.000.000

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kesadaran Perum Jamkrindo akan pentingnya keberadaan masyarakat di sekitar lokasi usaha, serta PERMEN BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017.

Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari:

1. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan, hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan; dan
3. Sumber lain yang sah.

Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

The Community Development Program is the community empowerment program around the operation area of Perum Jamkrindo, which is conducted through the utilization of funds from the profit share. This is conducted based on the awareness of Perum Jamkrindo on the importance of the existence of the community around the business location, and the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 05, 2017.

The fund for the Community Development Program is sourced from:

1. Provision for net profit after tax stipulated in the General Meeting of Shareholders/Minister and the approval of the SOE Annual Report for supervising with the maximum amount of 4% of the net profit after the tax of the previous financial year;
2. The loan service administration/ margin/profit sharing of the Partnership Program, the interest of deposit and/ or current account service from the fund of Partnership Program and Community Development Program placed; and
3. Another legitimate source.

The fund for Community Development Program is used for the purpose of providing benefits to the community in the area of operation of State Owned Enterprises in the form of aid for natural disaster victims, education and/or training, health, development of public infrastructure and facilities, worship facilities, nature conservation, social community in the context of poverty alleviation, as well as education, training, internship, marketing, promotion, and other forms of aid related to the efforts to improve the capacity of Partnership Program's Partners.

Tata cara pemberian pinjaman dana Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat.
2. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dilakukan secara langsung oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

Realisasi penyaluran dana terkait Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan Perum Jamkrindo sepanjang 2017 adalah sebesar Rp8,98 miliar, atau turun 38,16% dibandingkan realisasi tahun 2016 sejumlah Rp14,52 miliar.

Adapun kegiatan Program Bina Lingkungan yang telah dilakukan Perum Jamkrindo sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Procedures for granting funds for Community Development Program are as follows:

1. Supervising SOE previously conduct surveys and identification in accordance with the conditions and needs in the business area of local Supervising SOE.
2. The implementation of the Community Development Program is carried out directly by the related coach SOE.

The realization of the distribution of funds related to the Community Development Program which has been distributed by Perum Jamkrindo throughout 2017 amounted to IDR8,98 billion, or a decrease of 38.16% when compared to the realization in 2016 amounting to IDR14.52 billion.

The activities of the Community Development Program Which have been conducted by Perum Jamkrindo throughout the year 2017 is as follows:

Menebar Ilmu Memberdayakan Masyarakat Sekitar

Masjid memiliki posisi sentral bagi Pesantren dan SMP Plus Bina Prestasi-SMA Akmal Budi Luhur, yang berlokasi di Jl. H.Moh Agus Krajan I, Desa Kalensari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selain untuk menunaikan salat wajib lima waktu, masjid juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat para santri belajar, termasuk mendaras kitab. Sebab itu, keberadaan masjid yang representatif menjadi sangat penting.

Becermin pada pentingnya masjid itulah, Yayasan Bina Prestasi (YBP) Almustaqim Berinisiatif untuk membangun masjid dengan memanfaatkan lokasi yang sebelumnya dipakai untuk musala. Setelah rancang bangun selesai, dan perkiraan dana yang dibutuhkan didapat, panitia pembangunan masjid bergerak untuk mengumpulkan dana kepada para donatur. Salah satunya, proposal donasi diajukan ke Perum Jamkrindo, yang dikenal sejak lama memiliki Program Bina Lingkungan berupa bantuan untuk sarana ibadah.

"Alhamdulillah, bantuan tahap pertama dari Perum Jamkrindo sebesar Rp25 juta turun," kata Jarkasih S.E, pengurus Yayasan YBP Almustaqim. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membongkar musala lama dan membangun pondasi masjid yang baru. Menurut dia, kegiatan membongkar bangunan lama dan membangun yang baru sangat penting sebagai "daya tarik" bagi donatur yang lain. Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa rencana pembangunan masjid adalah benar adanya, bukan proyek fiktif. Dengan dimulainya pembangunan ini, donasi mulai berdatangan, termasuk dari warga sekitar.

Warga di sini, ujar Jarkasih melanjutkan, kebanyakan adalah petani, termasuk mereka yang berprofesi sebagai petani penggarap. Oleh karena pekerjaannya sebagai petani, maka donasi diberikan dari hasil panen. Caranya, tiap kali panen, mereka mengumpulkan sekitar dua kuintal, yang jika diuangkan sekitar sejuta rupiah. Dengan pola seperti itu, jumlah donasi yang dikumpulkan warga kampung lumayan besar. "Warga swasembada memberikan donasi untuk pembangunan masjid," katanya.

Setelah dana bantuan tahap pertama dikucurkan, Perum Jamkrindo masih memberikan bantuan dalam tiga tahap lagi. Total dana yang diberikan, menurut Jarkasih, sebesar Rp80 juta. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Yayasan senantiasi melaporkan penggunaan dana tersebut, misalnya untuk membeli bahan bangunan, membayar tukang, dan sebagainya.

"Kami sangat berterima kasih kepada Perum Jamkrindo atas bantuan tersebut," kata Jarkasih, sembari berharap agar Perum Jamkrindo bisa mengalokasikan kembali dana serupa pada tahun-tahun berikutnya. Apalagi, sejauh yang ia ketahui, belum ada perusahaan lain yang memberikan kepedulian terhadap pembangunan masjid di pesantren yang dikelolanya selain Perum Jamkrindo.



Selain pesantren, Yayasan mengelola sekolah plus, yakni pagi hari siswa menjalani pendidikan dengan kurikulum sekolah formal hingga pukul 16.00, kemudian selepas maghrib hingga pukul 22.00, baru mereka mengikuti kegiatan pesantren. Yayasan mengelola sekitar 120 peserta didik, yang mayoritas berasal dari masyarakat sekitar, sedangkan santri yang bermukim di pesantren tercatat sebanyak 30 orang.

Kehadiran pesantren dan sekolah sangat penting karena di wilayah ini sekolah paling dekat berjarak sekitar tujuh kilometer. Saat belum ada angkutan umum, siswa harus menempuh perjalanan dengan sepeda. Dengan adanya fasilitas pesantren dan sekolah yang dikelola Yayasan –yang berdiri sejak tahun 2013, maka anak-anak bisa mencari ilmu di sini. “Lokasi ini memang jauh dari mana-mana. Ke Jalan Pantura, kalau melewati jalan yang bagus, jaraknya sekitar 15 km, kalau mau off road melalui jalan yang rusak, cuma 5 km,” kata ayah empat anak ini.

Selain bantuan untuk pembangunan masjid, selama tahun 2017, Perum Jamkrindo juga pernah memberikan santunan untuk yatim dan dhuafa, dan penyaluran hewan qurban saat Idul Adha. ***

Spreading the Knowledge to Empower the Surrounding Community

The mosque has a central position for Pesantren and SMP Plus Bina Prestasi - SMA Akmal Budi Luhur, which is located on Jl. H.Moh Agus Krajan I, Kalensari Village, Comprang Subdistrict, Subang Regency, West Java. In addition to the obligatory place of worship, the mosque can also be used as a place for students to study, including reciting the book. Therefore, the existence of a representative mosque becomes very important.

Reflecting on the importance of the mosque, Yayasan Bina Prestasi (YBP) Almustaqim took the initiative to build a mosque by utilizing the location previously used for musala. After the design is complete, and the required funding estimates are obtained, the mosque building committee raises funds for by sending proposals to different organizations. One of the proposals was submitted to Perum Jamkrindo, which has long known to have Community Development Program in the form of aid for religious facilities.

“Praise the God, the first phase of assistance from Perum Jamkrindo amounting to IDR25 million has been distributed,” said Jarkasih S.E, the board of YBP Almustaqim. The funds are used to deconstruct old mushala and build a new mosque. According to him, the activities of deconstructing old buildings and building new ones are very important as a form of “attraction” to other donors. The activity is proved clearly that the mosque construction plan is real, not a fictitious project. With the start of this development, donations began to arrive, including from local residents.

The local resident, said Jarkasih, are mostly farmers, including those who work as freelance farmers. Because of their work as farmers, the donation was given from the result of the harvest. Each time there was a harvest, they collected about two hundred kilograms of harvest, which amount to IDR1 million. With such a pattern, the amount of donations collected by local resident is quite large. “The residents also donate for the construction of the mosques,” he added.

After the first phase of the relief funds was disbursed, Perum Jamkrindo was still providing assistance in three more stages. The total fund granted, according to Jarkasih, amounted to IDR80 million. As a form of accountability, YBP always reports the use of such funds, for example, to purchase materials, paying workers, and so on. “We are very grateful for Perum Jamkrindo's assistance,” said Jarkasih. He also hopes that Perum Jamkrindo can reallocate similar funds in the following years. Moreover, as far as he knows, there is no other company which focus its concern to the construction of mosques in the boarding school that he manages other than Perum Jamkrindo.

In addition to a boarding school, YBP manages a plus school, i.e. formal morning school uses formal school curriculum.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, kickback ataupun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para pegawai secara individu dikenai denda dan/atau hukuman penjara. Undang-undang Antikorupsi, termasuk Peraturan Praktik Korupsi, menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana.

Kebijakan ini dibuat untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan undang-undang antikorupsi terkait. Berkaitan dengan komitmen antikorupsi, Kementerian BUMN telah meluncurkan *roadmap* BUMN Bersih sebagai aksi antikorupsi di lingkungan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara, dan itu juga berlaku bagi Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara. Atas komitmen itu, pada tahun pelaporan, tidak ada insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.

Selain antikorupsi, Perum Jamkrindo juga berkomitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Sesuai dengan Memorandum No. 006/M/4.1/1/2018 dari Kepala Divisi MSDM kepada Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan perihal Laporan Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi Tahun 2017. Selama tahun 2017, Divisi MSDM tidak menerima laporan mengenai penerimaan atau pemberian (gratifikasi) dari atau kepada mitra kerja, nasabah, dan rekanan atau calon mitra kerja/nasabah/rekanan berkenaan dengan tugas dan jabatan seluruh jajaran Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perum Jamkrindo.

ANTI-CORRUPTION POLICIES

The laws of the Republic of Indonesia stipulates that paying or offering payment or even accepting bribes, kickbacks, or other forms of corrupt payments is a criminal offense which may allow the Company or individual employees to be subject to fines and/or imprisonment. The anti-corruption laws, including the Corruption Practices Act, make payments, offers, or grants anything to Company's officers for the purpose of influencing actions or decisions of the officers as a criminal offense.

The purpose of this policy is to ensure that all employees, officials, and directors, as well as all of its subsidiaries and affiliates are in compliance with the Company's Anti-Corruption Policy and related anti-corruption laws. In relation with anti-corruption commitments, the Ministry of SOEs has launched a Clean State-Owned Enterprises roadmap as an anti-corruption action within the Ministry of State-Owned Enterprises and state-owned enterprises, and that also applies to Perum Jamkrindo as one of the state companies. On that commitment, in the reporting year, there were no proven corruption incidents and actions taken.

In addition to anti-corruption, Perum Jamkrindo is also committed to rejecting all forms of gratifications. In accordance with the Memorandum no. 006 / M / 4.1 / 1/2018 from the Head of the HRM Division to the Director of HRM, General Affairs, and Compliance regarding the Acceptance or Gratification Report of 2017. In 2017, the HRM Division did not receive reports on acceptance or grant (gratification) from or to partners, customers, and partners or potential partners/ clients/partners regarding the duties and positions of all Board of Supervisors, Board of Directors, and Employees of Perum Jamkrindo.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Corporate Social Responsibility Relating to The Responsibility to Customers

Sebagai institusi keuangan yang bergerak di bidang Penjaminan, Perum Jamkrindo menekankan pada aspek pelayanan kepada para nasabah yang membutuhkan fasilitas Penjaminan Kredit. Penguatan mutu pada aspek pelayanan yang prima dan responsif juga terus dilakukan oleh Perum Jamkrindo agar masyarakat dapat terbantu dalam memanfaatkan layanan-layanan yang disediakan. Perum Jamkrindo meyakini hal tersebut tidak hanya berperan sebagai sebuah fasilitas namun juga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap konsumen yang telah mempercayai Perum Jamkrindo sebagai institusi penjamin.

Salah satu bentuk aktif dari tanggung jawab kepada konsumen diwujudkan melalui penyediaan sarana komunikasi di beberapa media seperti nomor *hotline* untuk wilayah Jakarta, informasi nomor telepon dan faksimili di setiap Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan di seluruh Indonesia, serta kontak *online* yang disediakan pada situs web Perum Jamkrindo.

As a financial institution engaged in the Guarantee industry, Perum Jamkrindo emphasizes the service aspects to customers who need Credit Guarantee facility. Strengthening quality in the aspect of prime service and being responsive also continue to be conducted by Perum Jamkrindo so that society can be assisted in utilizing services provided. Perum Jamkrindo believes that it serves not only as a facility but also as a form of Corporate Social Responsibility for consumers who have trusted Perum Jamkrindo as a guarantee institution.

One of the most active actions of responsibility to consumers is realized through the provision of communication tools in several media such as hotline numbers for the Jakarta area, telephone and facsimile information at every Branch Office or Service Offices throughout Indonesia, and online contacts provided on the Perum Jamkrindo website.

Pengaduan Langsung <i>Direct Complaint</i>	:	Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan di seluruh Indonesia <i>Branch Office or Service Unit Offices in Indonesia</i>
Kontak Situs Web <i>Web Contact</i>	:	http://www.jamkrindo.co.id/kontak
Kontak Surel <i>E-mail</i>	:	sekper@jamkrindo.co.id
<i>Hotline</i>	:	(62-21) 6540335

Melalui penyediaan alamat komunikasi tersebut, Perum Jamkrindo telah melakukan penanganan pertanyaan dan keluhan konsumen terkait layanan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo.

Through the provision of such communications address, Perum Jamkrindo has handled customer inquiries and complaints regarding services provided by Perum Jamkrindo.

TANGGUNG JAWAB PRODUK

Perum Jamkrindo senantiasa melakukan survei guna mengetahui tingkat kepuasan dan engagement pelanggan. Survei kepuasan pelanggan atas layanan dan produk Perum Jamkrindo pada tahun 2017 dibantu oleh Konsultan Independen, yaitu PT Sucofindo. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Nilai kepuasan pelanggan Perum Jamkrindo yaitu 83% dan keterikatan 85%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelanggan sangat puas dan sangat terikat dengan Perum Jamkrindo.

PRODUCT RESPONSIBILITY

Perum Jamkrindo is continuously conducting survey to find out the level of satisfaction and engagement of the customers. The customer satisfaction survey of Perum Jamkrindo's services and products in 2017 was assisted by Independent Consultant, PT Sucofindo. Survey results show a good level of satisfaction. The value of customer satisfaction of Perum Jamkrindo was 83% and engagement 85%. This shows that in general, the customer was very satisfied and very engaged in Perum Jamkrindo.

Selain kepada pelanggan, Perusahaan juga melakukan *assesment* terhadap pemasok. *Assesment* dilakukan berdasarkan pencapaian QCDS (*quality, cost, delivery, service*) dengan *sample* sebanyak 8 (delapan) pemasok melalui Surat Pengantar Lembar Survei No. 5593/P/4.2/XI/2017 tanggal 3 November 2017. Hasil rekapitulasi survei menjelaskan bahwa pemasok merasa puas terhadap *fairness* dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa di Perusahaan.

In addition to customers, the Company also conducts assessment of suppliers. Assessment is based on the achievement of QCDS (quality, cost, delivery, service) with samples of 8 (eight) suppliers which are delivered through Letter of Survey Introduction number 5593 / P / 4.2 / XI / 2017 dated November 3, 2017. The results of the survey recapitulation explained that the suppliers were satisfied with the fairness and transparency of the implementation of the system and procedures for procurement of goods and services in the Company.

Selain melakukan survei, Perusahaan juga membuka akses pengaduan apabila ada pemangku kepentingan yang merasakan ketidakpuasan. Mekanisme penanganan pengaduan pemangku kepentingan (*stakeholders*) disosialisasikan kepada *stakeholders* melalui *website* Perusahaan. Pengaduan dari *stakeholders* disampaikan oleh petugas pengaduan kepada pejabat penanggungjawab atau unit kerja terkait sesuai dengan materi pengaduan untuk ditindaklanjuti oleh pejabat penanggungjawab atau unit kerja yang bersangkutan.

In addition to conducting surveys, the Company also opens access to complaints when there are stakeholders who feel dissatisfied. Mechanisms for handling stakeholder complaints are socialized to stakeholders through the Company's website. Complaints from stakeholders are submitted by the complaint officer to the responsible officer or relevant unit of work according to the complaint material for follow up by the responsible formal or the concerned work unit.

Hasil tindak lanjut pejabat penanggung jawab atau unit kerja disampaikan kembali oleh Perusahaan kepada pemangku kepentingan yang bersangkutan. Selama tahun 2017 tidak terdapat keluhan dari stakeholders mengenai reputasi perusahaan baik yang diterima melalui *email* maupun surat resmi tertulis yang disampaikan langsung ataupun melalui pos.

The results of the follow up of the responsible officer or work unit are resubmitted by the Company to the relevant stakeholders. In 2017 there were no complaints from stakeholders regarding the reputation of the company whether received by email or by official written letter delivered directly or by post.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Dalam rangka membangun perusahaan agar memiliki budaya kinerja yang *excellent*, baik dalam hal kinerja keuangan dan non keuangan, Kementerian BUMN telah mewajibkan seluruh BUMN untuk melaksanakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dalam pengukuran kinerjanya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing BUMN sekaligus meningkatkan profitabilitas perusahaan dan menyehatkan kondisi keuangan perusahaan. Salah satu poin KPKU adalah Indeks Kepuasan Pelanggan, Ketidakpuasan Pelanggan dan *Engagement* Pelanggan.

Perum Jamkrindo sebagai BUMN juga dituntut untuk menciptakan mewujudkan optimalisasi pelayanan terhadap pelanggan. Pelanggan Perum Jamkrindo adalah Penerima Jaminan (Lembaga Keuangan baik Perbankan maupun Non Bank) dan Terjamin (debitur yang kreditnya dijamin oleh Perum Jamkrindo).

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

To ensure that the Corporate have excellent work culture, both for financial and non-financial performance, the Ministry of State Owned Enterprises has obligated all State Owned Enterprises to perform Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) to assess the performance. The main objective is to improve the competitiveness of SOE as well as to improve corporate profitability and to create healthier corporate financial condition. One of the items of KPKU is Customer Satisfaction Index, Customer Dissatisfaction, and Customer Engagement.

Perum Jamkrindo as a State Owned Enterprise is also obligated to establish the realization of service optimization for the customers. The customers of Perum Jamkrindo are the Recipients of Guarantee (Financial Institution, both Bank and Non-Bank) and the Guaranteed (debtors whose credit is guaranteed by Perum Jamkrindo).



Sebagai perusahaan jasa keuangan, pelayanan kepada pelanggan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan perusahaan. Untuk itu, peningkatan pelayanan di semua unit kerja harus ditingkatkan karena merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi kompetisi yang semakin tinggi.

Program kepuasan pelanggan dapat digambarkan sebagai program peningkatan kinerja (*performance improvement*) secara efektif, dalam hal ini adalah program yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan pelanggan. Perum Jamkrindo senantiasa melakukan survei guna mengetahui tingkat kepuasan dan *engagement* pelanggan. Sebelumnya Perum Jamkrindo telah melakukan survei kepuasan pelanggan yang dinilai pada tahun 2016. Selanjutnya, hasil survei tahun 2017 akan dijadikan acuan dalam pembuatan program peningkatan kepuasan dan *engagement* pelanggan.

Pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pelanggan Perum Jamkrindo tahun 2017 dilakukan secara independen oleh PT Sucofindo (Persero), yang merupakan penelitian primer dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengukuran variabel yang diukur dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan bentuk layanan yang diberikan dan disesuaikan dengan 5 (lima) dimensi utama yaitu *Reliability*, *Responsive*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Tangible* (Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, 1990). Dimensi utama tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan yang diukur tingkat kepentingan dan tingkat kinerjanya dengan skala 1-5 (Likert). Untuk memastikan keandalan instrumen yang digunakan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo tahun 2017 dilaksanakan dari bulan Oktober hingga November 2017. Responden yang dipilih dalam survei kepuasan pelanggan Perum Jamkrindo 2017 adalah mitra kerja dari lembaga atau institusi yang memiliki hubungan bisnis dan kerja sama dengan Perum Jamkrindo. Metode *sampling* yang digunakan adalah *Purposive Non-Probability Sampling*, dengan kriteria responden dalam rentang jabatan Kepala Divisi hingga pelaksana/staf. Jumlah sampel tersebar di 19 Kantor Cabang Perum Jamkrindo yang terdiri dari mitra kerja *existing* dan mantan mitra.

Analisis tentang hasil pengukuran indeks kepuasan pelanggan terhadap kinerja Perum Jamkrindo mengacu pada teori *Customer Satisfaction Index* (CSI) yang dikemukakan oleh Keki R. Bhote. Untuk pengukuran CSI digunakan kategori berikut:

As a financial service institution, service to customer is the main factor to be considered for the sustainability of Company's operation. Therefore, service improvement in all working unit should be improved as it is a part of strategy to face tough competition.

Customer satisfaction program can be described as a program of effective performance improvement, which is the program that is based on the market and customer demand. Perum Jamkrindo always conduct the survey to discover the customer satisfaction and engagement rate. Before this, Perum Jamkrindo has done customer satisfaction survey in 2016. Then, the result of the survey of 2017 will be the reference to establish the program in increasing customer satisfaction and engagement

The implementation of Perum Jamkrindo customer satisfaction survey in 2017 was conducted independently by PT Sucofindo (Persero). The survey is a primary research using a quantitative method. Measurements of measured variables in this study were determined based on the service form provided and adjusted to 5 (five) main dimensions of Reliability, Responsive, Assurance, Empathy, and Tangible (Zeithaml, Parasuraman, and Berry, 1990). The main dimension is spelled out in a few questions as measured by the importance and level of performance on a scale of 1-5 (Likert). To ensure the reliability of the instruments used, the validity and reliability were examined.

The implementation of the Customer Satisfaction Survey of Perum Jamkrindo in 2017 was conducted from October to November 2017. Respondents selected in customer satisfaction survey of Perum Jamkrindo 2017 are partners of institutions or organizations which have business relations and cooperation with Perum Jamkrindo. The sampling method used is Purposive Non-Probability Sampling, with a respondent profile ranging from staffs to division heads. The samples were taken from 19 different Jamkrindo Perum Branch Offices consisting of existing and former partner.

The analysis of the customer satisfaction index result of Perum Jamkrindo performance refers to the theory of Customer Satisfaction Index (CSI) proposed by Keki R. Bhote. For CSI measurements the following categories are used:

KATEGORI NILAI KEPUASAN PELANGGAN

CATEGORY OF CUSTOMER SATISFACTION SCORE

Nilai Score	Kategori Kepuasan Categories of Satisfaction
0,00 - 34,99	Sangat Tidak Puas <i>Extremely Dissatisfied</i>
35,00 - 50,99	Tidak Puas <i>Dissatisfied</i>
51,00 - 65,99	Cukup Puas <i>Quite Satisfied</i>
66,00 - 80,99	Puas <i>Satisfied</i>
81,00 - 100,00	Sangat Puas <i>Extremely Satisfied</i>

Berdasarkan hasil survei tahun 2017, nilai CSI yang diperoleh pada survei kepuasan pelanggan Perum Jamkrindo tahun 2017 adalah 83% dan nilai keterikatan pelanggan sebesar 85%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, pelanggan Perum Jamkrindo merasa sangat terikat dan sangat puas dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Jamkrindo selama periode tahun 2017.

Based on the results of the survey in 2017, the CSI score obtained from the customer satisfaction survey of Perum Jamkrindo in 2017 was 83% and customer engagement score of 85%. The score indicates that, overall, Perum Jamkrindo's customers feel very engaged and extremely satisfied with the performance or service provided by Jamkrindo in 2017.

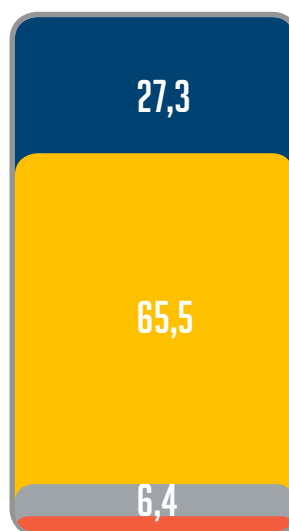
Customer Satisfaction Index



Engagement Index



Overall Satisfaction



T2B 93%

Mean 4.19

- Sangat Puas
Extremely Satisfied
- Puas
Satisfied
- Biasa Saja
Quite Satisfied
- Tidak Puas
Dissatisfied
- Sangat Tidak Puas
Extremely Dissatisfied



Beberapa kesimpulan lainnya dari Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan *Key Driver Analysis* diperoleh bahwa proses dan prosedur klaim, kemampuan analisa dalam penjaminan dan jenis produk Jamkrindo yang sesuai kebutuhan pelanggan menjadi atribut yang dinilai memberikan *impact* terbesar dalam kepuasan pelanggan.
2. Pada atribut proses dan prosedur klaim dan kemampuan analisa dalam penjaminan menjadi hal yang prioritas dalam meningkatkan kepuasan pelanggan namun nilai *performance* Perum Jamkrindo terhadap atribut tersebut masih di bawah rata-rata kinerja secara keseluruhan.
3. Untuk meningkatkan tingkat keterikatan atau loyalitas pelanggan terhadap Jamkrindo, perlunya dipertimbangkan strategi yang inovasi sifatnya “unik” agar dapat bersaing khususnya pada diferensiasi produk dengan kompetitor.
4. Mayoritas responden masih mengharapkan proses dan prosedur klaim dipermudah dan dipercepat. Selain itu responden juga mengharapkan perlu diadakan kunjungan sosialisasi/forum komunikasi untuk menjaga relasi bisnis dengan mitra kerja. Untuk Publikasi mengenai detail produk perlu ditingkatkan khususnya di media elektronik. Mayoritas responden menyarankan perlunya edukasi /sosialisasi terkait produk dan layanan Jamkrindo.

Some conclusions which can be made from the 2017 Customer Satisfaction Survey are as follows:

1. Based on Key Driver Analysis, it was found that claim process and procedure, guarantee capability and Jamkrindo's product types which is in accordance to customer requirement become the attribute which was considered giving the biggest impact in customer satisfaction.
2. The attributes of process, claim procedures and analysis, and capabilities in the guarantee become a priority in increasing customer satisfaction but Perum Jamkrindo performance score of these is still below the average overall performance.
3. To increase the level of customer engagement or loyalty to Jamkrindo, it is necessary to consider innovation strategies which are “unique” in order to compete, especially on product differentiation with competitors.
4. The majority of respondents still expect claims processes and procedures to be facilitated and accelerated. In addition, respondents also expect to have socialization visits/communication forums to maintain business relations with partners. Publication on product details needs to be improved especially in electronic media. The majority of respondents suggested the need for education/socialization related to Jamkrindo's products and services.

halaman ini sengaja dikosongkan
this page is intentionally left blank





LAPORAN KEUANGAN

Financial Report

*Solusi UMKM
menuju SUKSES*



Rp

LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
DISERTAI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Consolidated Financial
STATEMENTS
FOR THE YEARS THEN ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab
Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia**

**Board Of Directors' Statement
Regarding The Responsibility
For The Consolidated Financial Statement
For The Year Ended
As of December 31, 2017
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- Nama : Randi Anto *)
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat Kantor : Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10720

- Name : Randi Anto *)
- Function : President Director
- Office Address : Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10720

- Nama : I. Rusdonobanu
- Jabatan : Direktur Keuangan, Investasi dan
Manajemen Risiko
- Alamat Kantor : Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10720

- Name : I. Rusdonobanu
- Function : Risk Management, Investment and
Finance Director
- Office Address : Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10720

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statement of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia;
2. The consolidated financial statements of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia have been prepared and presented in accordance with Indonesian financial accounting standards, and:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's consolidated financial statements.
 - b. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's consolidated financial statements do not contain false material information or fact, nor do they permit material information or fact.
3. We are responsible for Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's internal control system.

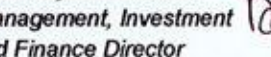
Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which made is truthfully.

**Jakarta, 9 Februari 2018 /
Jakarta, February 9, 2018**

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan, Investasi
dan Manajemen Risiko/
Risk Management, Investment
and Finance Director

Randi Anto* **I. Rusdonobanu**

*) Dalam Proses Fit and Proper Test OJK

*) Subject to Fit and Proper Test by OJK

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 Desember 2017 dan 2016**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
December 31, 2017 and 2016**

Daftar Isi	<i>Halaman / Page</i>	<i>Table of Contents</i>
Laporan Auditor Independen	1 - 4	<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	5 - 6	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	7 - 8	<i>Statements of Profit or Loss And Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Modal	9 - 10	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	11	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	12 - 85	<i>Notes to the Financial Statements</i>
Informasi Tambahan	87 - 90	<i>Supplementary Information</i>

No : 025.01.01/LAI-JMK/HGK.HO-2018

**Laporan Auditor Independen /
Independent Auditor's Report**

Kepada Dewan Pengawas dan Direksi/
To The Boards of Supervisory and Directors

PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

Laporan atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia ("Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2017, and the consolidated statements of profit and loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Audit Standards (SPKN) established by The Supreme Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK-RI). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiary as of December 31, 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2017 and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial Statements taken as a whole. The accompanying additional financial information of Perum Jaminan Kredit Indonesia (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2017 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare accompanying consolidated financial statements.

Hal Lain (Lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, dalam hubungannya dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Other Matters (Continued)

The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedure applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, The Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as a whole.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We also examined the company's compliance to laws and regulations, and internal control. Compliance with laws and regulations, and internal control are the responsibility of the Company's management.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah dengan laporan kami nomor 025.01.01/LK-JMK/HGK.HO-2018 dan 025.01.01/LPI-JMK/HGK.HO-2018 tanggal 9 Februari 2018.

We submit our report regarding compliance with laws and regulations, and internal control separately with our report number 025.01.01/LK-JMK/HGK.HO-2018 and 025.01.01/LPI-JMK/HGK.HO/2017 dated February 9, 2018.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Drs. Hertanto, M.S. Ak., CPA., CPMA., CA.

Registrasi Akuntan Publik No. 0136 / Public Accountant Registration No. AP.0136

9 Februari 2018 / February 9, 2018

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise)**

	Catatan / Notes	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
ASET				ASSETS
Kas dan Setara Kas	2.f, 2u, 3	5.418.222.632.480	5.723.815.518.953	Cash and Cash Equivalents
Surat Berharga	2.f, 2.u, 2.w, 4	4.025.861.247.365	3.209.124.484.337	Marketable Securities
Piutang Imbal Jasa Penjaminan- Bersih	2.f 2.p, 2.u 2.l, 5	2.474.754.220.235	2.347.025.423.821	Guarantee Receivables - Nett
Piutang Penjaminan Ulang - Bersih	2.f, 2.h, 2.l, 6	120.532.396.074	112.345.807.139	Reguarantee Receivables - Nett
Pinjaman yang Diberikan- Bersih	2.f, 2.g 2.l, 7	776.333.533	955.166.363	Loans - Nett
Piutang Lain-Lain	2.f, 8	87.891.596.187	81.727.777.247	Other Receivable
Pajak Dibayar Dimuka	2.o, 17.a	-	81.540	Prepaid Tax
Premi dan Fee Dibayar Dimuka	2.i, 9	1.132.300.438.990	991.153.022.073	Prepaid Premium and Fees
Beban Dibayar Dimuka	2.i, 10	21.689.588.201	25.019.756.237	Prepaid Expenses
Aset tetap - Bersih	2.j, 11	471.169.221.028	441.995.392.921	Fixed assets - Nett
Aset Pajak Tangguhan	2.o, 17.e	177.252.313.228	174.614.384.915	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	2.k, 12	747.693.037.215	300.641.059.506	Other Assets
JUMLAH ASET		14.678.143.024.534	13.408.417.875.052	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise)

	Catatan / Notes	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang Klaim	2.r, 13	75.925.490.383	11.649.581.603	Claim Payable
Utang Pajak	2.o, 17.b	59.549.965.359	72.812.076.712	Tax Payable
Utang Penjaminan Ulang	15	109.686.987.928	66.603.673.011	Co-Guarantee Payable
Pendapatan Ditangguhkan	16	2.638.597.771.550	2.346.246.536.826	Deferred Income
Cadangan Klaim	2.s, 14	427.142.720.164	404.959.428.572	Claims Reserve
Utang Lain-Lain	19	204.457.625.894	178.409.250.860	Other Payable
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.t, 18	38.907.168.785	28.168.339.472	Employee Benefits Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		3.554.267.730.063	3.108.848.887.056	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity
Penyertaan Modal Negara	20.a	7.638.733.365.160	7.638.733.365.160	Government's Share Capital
Cadangan - Cadangan	20.b	2.471.937.444.659	1.828.847.314.243	Reserves
Saldo Laba		801.845.416.484	692.044.895.364	Retained Earnings
Komponen Ekuitas Lainnya	20.c	211.345.269.213	139.930.290.522	Other Equity Component
Jumlah Ekuitas yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		11.123.861.495.516	10.299.555.865.290	Total Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	2.v, 21	13.798.955	13.122.707	Non-controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		11.123.875.294.471	10.299.568.987.997	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		14.678.143.024.534	13.408.417.875.052	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2017	2016	
PENDAPATAN PENJAMINAN				GUARANTEE INCOME
Imbalan Jasa Penjaminan	2.p, 22	2.036.052.574.099	1.854.242.602.032	Guarantee Fee
Pendapatan Komisi	2.p, 22	27.223.787.525	35.017.148.083	Comission Fee
Premi Co Guarantee	2.p, 22	(96.471.972.027)	(166.237.457.658)	Co Guarantee Premium
Premi Re Asuransi	2.p, 22	(154.312.552.154)	(118.610.157.602)	Reinsurance Premium
Restitusi IJP	2.p, 22	(6.805.472.327)	(15.971.543.801)	Guarantee Restitution
Imbalan Jasa Penjaminan Bersih	2.p, 22	1.805.686.365.116	1.588.440.591.054	Net Guarantee Revenues
BEBAN KLAIM				CLAIM EXPENSES
Beban Klaim	2.r, 23	(971.217.594.834)	(764.476.221.782)	Claim Expenses
Penurunan Cadangan Klaim	2.s, 23	(22.614.674.140)	(83.842.316.720)	Decrease in Reserve Claim
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	2.l, 23	(10.777.367.505)	(23.264.905.716)	Impairment Losses of Receivable
Jumlah Beban Klaim		(1.004.609.636.479)	(871.583.444.218)	Total Claim Expenses
PENJAMINAN BERSIH		801.076.728.637	716.857.146.836	OPERATING INCOME - NET
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH	24	601.634.006.083	587.678.040.947	INVESTMENT INCOME - NET
PENDAPATAN LAIN-LAIN	26	328.679.048.443	294.070.091.480	OTHERS INCOME
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban Operasional	25	228.402.367.101	230.343.418.883	Operating Expenses
Beban Sumber Daya Manusia	25	325.822.267.767	269.332.189.035	Human Resource Expenses
Beban Administrasi dan Umum	25	132.938.891.723	128.798.297.931	General and Administrative Expenses
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	25	21.005.555.703	28.677.318.267	System, Technology, and Operating Development Expenses
Jumlah Beban Usaha		708.169.082.294	657.151.224.116	Total Operating Expenses
LABA SEBELUM PAJAK		1.023.220.700.869	941.454.055.147	INCOME BEFORE TAX
Pajak kini		247.360.565.250	235.897.638.707	Current income tax
Beban (Manfaat) pajak tangguhan		(25.986.025.219)	13.511.180.553	Tax Benefit (Deferred) income tax
Beban pajak penghasilan - bersih		221.374.540.031	249.408.819.260	Income tax expenses - net
LABA TAHUN BERJALAN		801.846.160.838	692.045.235.887	CURRENT YEAR INCOME

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2017	2016	
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE)
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi:				<i>Items That Will Not Be Reclassified To Profit And Loss</i>
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	18	(1.234.793.443)	(7.675.976.544)	<i>Remeasurement of Post Employment Benefit</i>
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasti		308.698.361	1.918.994.136	<i>Related Deferred Tax Restatement on Defined Benefits Obligation</i>
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual		3.378.151.513	(2.113.460.000)	<i>Gain (Loss) Financial Assets Available For Sale</i>
Pajak Tangguhan Terkait Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual		(212.192.122)	528.365.000	<i>Deferred Tax Financial Instrument of Available For Sale</i>
Pos-pos Yang Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi Ketika Kondisi Tertentu Terpenuhi:				<i>Items That Will Be Reclassified To Profit and Loss Due to Certain Conditions:</i>
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual		79.035.547.704	(128.291.969.606)	<i>Gain (Loss) Financial Assets Available For Sale</i>
Pajak Tangguhan Terkait Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual		(23.444.603.145)	16.923.789.226	<i>Related Deferred Tax Financial Instrument of Available For Sale</i>
Jumlah Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain		57.830.808.868	(118.710.257.788)	<i>Total Other Comprehensive Income (Expense)</i>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		859.676.969.706	573.334.978.099	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		801.845.416.483	692.044.895.363	<i>Equity Holders of The Parent Entity</i>
Kepentingan Nonpengendali		744.355	340.524	<i>Non-controlling Interest</i>
JUMLAH		801.846.160.838	692.045.235.887	TOTAL
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE INCOME THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		859.676.225.351	573.334.637.575	<i>Equity Holders of The Parent Entity</i>
Kepentingan Nonpengendali		744.355	340.524	<i>Non-controlling Interest</i>
JUMLAH		859.676.969.706	573.334.978.099	TOTAL

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

Saldo 1 Januari 2016

Catatan	Penyertaan Modal Pemerintah	Cadangan Modal	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Cadangan Dana Teknis	Saldo Laba	Pendapatan Komprehensif Lainnya /Other	Jumlah	Kepentingan Non Pengendali /Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas
/Notes	/Government's Share Placement	/Capital Reserve	/General Reserve	/Special Reserve	/Technical Fund Reserve	/Retained Earnings	Comprehensive Income	/Total	Controlling Interest	/Total Equity
20	7.138.733.385.160	904.000.000	1.138.329.276.283	297.707.510.860	78.274.593.035	625.354.338.229	196.885.040.557	9.476.188.124.124	12.849.577	9.476.200.973.701
Penyertaan Modal Negara	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000
Reklasifikasi Laba Atas	-	-	-	-	-	954.764.948	-	954.764.948	-	954.764.948
Revaluasi Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembagian Laba Tahun 2015:	-	-	313.631.934.065	-	-	(313.631.934.065)	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-	-	(312.677.169.113)	-	(312.677.169.113)	(67.394)	(312.677.236.507)
Dividen	-	-	-	-	-	692.044.895.364	-	692.044.895.364	340.524	692.045.235.888
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Komprehensif Lainnya :	-	-	-	-	-	-	(50.243.002.679)	(50.243.002.679)	-	(50.243.002.679)
Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	-	-	-	-	-	-	(954.764.948)	(954.764.948)	-	(954.764.948)
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	(5.756.982.407)	(5.756.982.407)	-	(5.756.982.407)
Imbalan Pasca Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2016	7.638.733.385.160	904.000.000	1.451.961.210.348	297.707.510.860	78.274.593.035	692.044.895.364	139.930.290.522	10.299.555.865.290	13.122.707	10.299.568.987.997

Balance as of January 1, 2016
 Government's Share Placement
 Reclassification of Gain on Revaluation Asset
 Distribution of 2015 profits :
 General Reserve
 Dividend
 Current Year Income
 Other Comprehensive Income: Financial Instruments Available for Sale
 Fixed Assets Revaluation
 Employee Benefit

Saldo 31 Desember 2016

Catatan	Penyertaan Modal Pemerintah	Cadangan Modal	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Cadangan Dana Teknis	Saldo Laba	Pendapatan Komprehensif Lainnya /Other	Jumlah	Kepentingan Non Pengendali /Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas
/Notes	/Government's Share Placement	/Capital Reserve	/General Reserve	/Special Reserve	/Technical Fund Reserve	/Retained Earnings	Comprehensive Income	/Total	Controlling Interest	/Total Equity
20	7.138.733.385.160	904.000.000	1.138.329.276.283	297.707.510.860	78.274.593.035	625.354.338.229	196.885.040.557	9.476.188.124.124	12.849.577	9.476.200.973.701
Penyertaan Modal Negara	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000
Reklasifikasi Laba Atas	-	-	-	-	-	954.764.948	-	954.764.948	-	954.764.948
Revaluasi Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembagian Laba Tahun 2015:	-	-	313.631.934.065	-	-	(313.631.934.065)	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-	-	(312.677.169.113)	-	(312.677.169.113)	(67.394)	(312.677.236.507)
Dividen	-	-	-	-	-	692.044.895.364	-	692.044.895.364	340.524	692.045.235.888
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Komprehensif Lainnya :	-	-	-	-	-	-	(50.243.002.679)	(50.243.002.679)	-	(50.243.002.679)
Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	-	-	-	-	-	-	(954.764.948)	(954.764.948)	-	(954.764.948)
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	(5.756.982.407)	(5.756.982.407)	-	(5.756.982.407)
Imbalan Pasca Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2016	7.638.733.385.160	904.000.000	1.451.961.210.348	297.707.510.860	78.274.593.035	692.044.895.364	139.930.290.522	10.299.555.865.290	13.122.707	10.299.568.987.997

Balance as of December 31, 2016
 Government's Share Placement
 Reclassification of Gain on Revaluation Asset
 Distribution of 2015 profits :
 General Reserve
 Dividend
 Current Year Income
 Other Comprehensive Income: Financial Instruments Available for Sale
 Fixed Assets Revaluation
 Employee Benefit

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE YEARS PERIODS ENDED
 DECEMBER 31, 2017 AND 2016
 (Expressed in Full Rupiah)

Catatan	Penyertaan Modal Pemerintah	Cadangan Modal	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Cadangan Dana Teknis	Saldo Laba	Pendapatan Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income	Jumlah	Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas
/Notes	/Government's Share Placement	/Capital Reserve	/General Reserve	/Special Reserve	/Technical Fund Reserve	/Retained Earnings		/Total		/Total Equity
Saldo 1 Januari 2017	7.638.733.365.160	904.000.000	1.451.961.210.348	297.707.510.860	78.274.593.035	692.044.895.364	139.930.290.522	10.299.555.865.290	13.122.707	10.299.568.987.997
Reklasifikasi Laba Atas Aset Revaluasi	-	-	-	-	-	(954.764.948)	-	(954.764.948)	-	(954.764.948)
Pembagian Laba Tahun 2016 : Cadangan Umum	-	-	643.090.130.415	-	-	(643.090.130.415)	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-	(48.000.000.000)	-	(48.000.000.000)	(68.107)	(48.000.068.107)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	801.845.416.483	-	801.845.416.483	744.355	801.846.160.838
Pendapatan Komprehensif Lainnya : Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	-	-	-	-	-	-	71.386.308.826	71.386.308.826	-	71.386.308.826
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	954.764.948	954.764.948	-	954.764.948
Imbalan Pasca Kerja	-	-	-	-	-	-	(926.095.083)	(926.095.083)	-	(926.095.083)
Saldo 31 Desember 2017	7.638.733.365.160	904.000.000	2.095.051.340.763	297.707.510.860	78.274.593.035	801.845.416.484	211.345.269.213	11.123.861.495.516	13.798.955	11.123.875.294.471

Balance as of January 1, 2017

Reclassification of Gain on Revaluation Asset

Distribution of 2016 profits :
General Reserve
Dividend

Current Year Income :
Other Comprehensive Income :
Financial Instruments Available for Sale
Fixed Assets Revaluation
Employee Benefit

Balance as of December 31, 2017

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
LAPORAN KONSOLIDASIAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOWS CONSOLIDATED
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in Full Rupiah)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI			CASH FLOW
AKTIVITAS OPERASI			FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Imbalan Jasa Penjaminan	2.153.622.469.334	1.547.449.794.216	Receipt from Guarantee Fee
Pembayaran Klaim dari Mitra Co Guarantee	(15.606.448.656)	(50.461.628.972)	Payment to Co Guarantee Partners
Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya	374.783.760.698	334.115.546.662	Receipt from Other Operating Activities
Pembayaran Imbalan Jasa Co Guarantee	(348.848.626.181)	(374.632.983.695)	Payment of Fee Co Guarantee
Pembayaran Klaim	(906.941.686.053)	(766.647.265.732)	Payment of Claims
Pembayaran Biaya	(143.293.209.736)	(252.820.967.336)	Payment of Expenses
Pembayaran Aktivitas Lainnya	(206.858.347.015)	(236.430.333.415)	Payment of Other Activities
Pembayaran kepada Karyawan	(298.911.644.485)	(259.027.305.479)	Payment to Employee
Pembayaran Pajak Penghasilan	(257.345.741.750)	(153.985.341.304)	Payment of Income Tax
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	350.600.526.155	(212.440.485.055)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS
AKTIVITAS INVESTASI			FROM INVESTMENT ACTIVITIES
Penerimaan Hasil Investasi	526.819.353.226	568.070.291.225	Receipt from Return of Investment
Penerimaan Aktivitas Investasi Lainnya	9.924.305.869	9.240.053.200	Receipt from Other Investment
Penempatan Investasi yang Diperkenankan	(1.093.350.454.202)	(346.512.081.306)	Placement of Allowed Investment
Pembelian Aset Tetap	(47.770.981.387)	(59.248.545.965)	Acquisition of Fixed Assets
Pembayaran Aktivitas Investasi Lainnya	(3.815.568.027)	(17.438.213.710)	Payment of Other Investment Activities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(608.193.344.522)	154.111.503.444	Net cash used in investment activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOW
AKTIVITAS PENDANAAN			FROM FINANCING ACTIVITIES
Tambahan Modal Pemerintah	-	500.000.000.000	Paid in Government Capital
Dividen	(48.000.068.107)	(312.677.236.507)	Dividend
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(48.000.068.107)	187.322.763.493	Net cash provided from financing activities
(Penurunan) kenaikan kas dan Setara kas	(305.592.886.473)	128.993.781.883	(Decreased) increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	5.723.815.518.953	5.594.821.737.072	Cash and equivalents at the beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	5.418.222.632.480	5.723.815.518.953	Cash and equivalents at the end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1985 selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 diubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat terletak di Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta dan mempunyai 9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

b. Lingkup Usaha

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah melakukan penjaminan kredit baik bersifat tunai maupun non tunai yang diberikan Bank atau badan Usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

c. Struktur dan Manajemen

Susunan Dewan Pengawas, Direksi dan Komite Audit Perum Jamkrindo untuk per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Keputusan Direksi No. 36/Kep-Dir/IV/2016 Pada tanggal 20 April 2016 tentang Struktur Organisasi Perum Jaminan Kredit Indonesia menetapkan Perubahan Nama dan Fungsi Susunan Organisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum Jamkrindo menetapkan dengan hormat Randi Anto sebagai Direktur Utama Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menetapkan Amin Mas'udi sebagai Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum Jamkrindo menetapkan Kadar Wisnuwarman sebagai Direktur Operasional dan Jaringan Perum Jamkrindo.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of Company

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Company") was established under the name Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, was established based on Government Regulation No. 51 year 1981 which is merged from Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which is formed by 1970. Based on the Government Regulation No. 51 year 1981, which is renewed by Government Regulation No. 27 year 1985, here in after by Government Regulation No. 95 year 2000 dated November 7, 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi was changed by Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, and based on PP No. 41 Year 2008 the name was changed again become Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

The company located in Jakarta, which Head Office located in Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta and have 9 regional offices, 56 branch offices, and 16 unit service offices which spread over in all Indonesia.

b. Scope of Business

Based on Government Regulation No. 41 Year 2008, the main business activity of Company is guarantee of loan either in form of cash or non cash which is provided by Bank or Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives.

c. Organizational and Management Structure

The Board of Supervisor Council, Board of Directors and the Audit Committee of Perum Jamkrindo as of December 31, 2017 as follows:

The Decree No. 36/Kep-Dir/IV/2016 on April 20, 2016 about Organization Structure of Perum Jaminan Kredit Indonesia decided The Changing of Name and Fuction on Organization Structure.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-249 / MBU / 11/2017 dated November 21, 2017 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, Randi Anto appoints as President Director of Perum Jamkrindo.

Based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-187 / MBU / 09/2017 dated September 7, 2017 on Termination, Change of Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of Public Corporation (Perum) Credit Guarantee Indonesia establish Amin Mas'udi as Director of Business Guarantee.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-249 / MBU / 11/2017 dated November 21, 2017 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors Perum Jamkrindo assigns Kadar Wisnuwarman as Director of Operations and Network.

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Struktur dan Manajemen (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menetapkan Sulis Usdoko sebagai Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, memberhentikan dengan hormat Braman Setyo sebagai ketua dewan pengawas dan menetapkan Sri Mulyanto sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, memberhentikan dengan hormat Nasaruddin Umar sebagai anggota dewan pengawas dan menetapkan Diah Natalisa sebagai anggota Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas

Ketua	Sri Mulyanto
Anggota	Dahlan Siamat
Anggota	Subandriyo
Anggota	Noor Ida Khomsiyati
Anggota	Diah Natalisa

Direksi

Direktur Utama	Randi Anto
Direktur Bisnis Penjaminan	Amin Mas'udi
Direktur Operasional dan Jaringan	Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	I. Rusdonobanu

Komite Audit

Ketua	Dahlan Siamat
Anggota	Dody Heriawan Priatmoko

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	Hasanudin
Anggota	Muhammad Syakir Sula

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Organizational and Management Structure (Continued)

Based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-187 / MBU / 09/2017 dated September 7, 2017 concerning Dismissal, Amendment of Nomenclature, and Appointment of Members of the Public Corporation of Indonesia Credit Guarantee stipulates Sulis Usdoko as HRD, General Affair and Compliance Director of HRD, General Affair and Compliance.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-233 / MBU / 10/2017 dated October 27, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Public Corporation (Perum) of Credit Guarantee Indonesia, dismissed with honor Braman Setyo as chairman of the supervisory board and appointed Sri Mulyanto as Chairman of the Board of Supervisors and Independent Supervisory Board.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-88 / MBU / 05/2017 dated May 3, 2017 on Termination, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Supervisory Board of Public Company (Perum) Credit Guarantee Indonesia, dismissed with honor Nasaruddin Umar as a member of the supervisory board and appointed Diah Natalisa as a member of the Supervisory Board.

The Board of Supervisor Council

Chairman
Member
Member
Member
Member

The Board of Directors

President Director
Business Guarantee Director
Operational and Network Director
HRD, General Affair and Compliance Director
Finance, Investment and Risk Management Director

Audit Committee

Chairman
Member

The Board of Supervisor Council Sharia

Chairman
Member

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Struktur dan Manajemen (Lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas, Direksi dan Komite Audit Perum Jamkrindo untuk per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Dewan Pengawas

Ketua	Braman Setyo
Anggota	Noor Ida Khomsiyati
Anggota	Nasruddin Umar
Anggota	Dahlan Siamat
Anggota	Subandriyo

Direksi

Direktur Utama	Diding S. Anwar
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	Nanang Waskito
Direktur Bisnis Penjaminan	Bakti Prasetyo
Direktur Operasional dan Jaringan	R. Sophia Alizsa
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	I. Rusdonobanu

Komite Audit

Ketua	Dahlan Siamat
Anggota	Fajar Karyanto

Jumlah pegawai Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Tahun	Tetap / Permanent	Tidak tetap / Non-permanent	Jumlah / Total	Year
2017	1042	512	1.554	2017
2016	891	199	1.090	2016

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ The Subsidiary	Kegiatan usaha/ Business activity	Tanggal mulai beroperasi komersial / Date started commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Jumlah Aset / Total Assets
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Penjaminan Syariah	19 September 2014	99,995%	Rp354.758.611.638

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 68 tanggal 19 September 2014.

Entitas anak bergerak dalam bidang usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Organizational and Management Structure (Continued)

The Board of Supervisor Council, Board of Directors and the Audit Committee of Perum Jamkrindo as of December 31, 2016 as follows:

The Board of Supervisor Council

Chairman
Member
Member
Member
Member

The Board of Directors

President Director
HRD, General Affair and Compliance Director
Business Guarantee Director
Operational and Network Director
Finance, Investment and Risk Management Director

Audit Committee

Chairman
Member

The number of employees of Perum Jamkrindo are as follows (unaudited):

d. Consolidated Subsidiary

Company has direct ownership in the following Subsidiary:

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah was established based on Notarial Deed No. 68 dated September 19, 2014.

Main business of the subsidiary is guarantee business based on syariah principles.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan konsolidasian Perum Jamkrindo dan Entitas Anak ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Pada tanggal 10 Januari 2017.

Kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, menggunakan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 (Revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No.102, "Akuntansi Murabahah", PSAK No.104, "Akuntansi Istihna", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No.106, "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah", PSAK No.110, "Akuntansi Sukuk".

Laporan keuangan konsolidasian disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah dan bangunan, aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

- 1) Aset yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- 2) Perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang menggunakan dasar kas; dan
- 3) Pendapatan imbalan (ujrah) jasa tertentu dan pendapatan administrasi pembiayaan yang diakui menggunakan dasar kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap melainkan hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements of Perum Jamkrindo and Subsidiaries were completed and authorised for issuance by The Board of Directors on January 10, 2017.

The significant accounting policies, applied consistently in the preparation of the financial statements of the company for the years ended December 31, 2017 and 2016 were as follows:

a. Basis of preparation of the consolidated financial

The Consolidated financial statements for the years ended December 31, 2017 and 2016 were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Indonesian Institute of Accountants.

The Company's financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards in Indonesia, used the historical cost basis, except for financial assets classified as available for sale, financial assets and liabilities held at fair value through profit and loss, and on an accrual basis, including the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 101 (Revised 2011), "Presentation of Financial Statements Sharia", SFAS 102, "Accounting Murabaha", SFAS No.104, "Accounting Istihna" "SFAS No. 105, "Accounting Mudaraba", SFAS 106, "Accounting Musharaka", SFAS No. 107, "Accounting for Ijarah", SFAS 110, "Accounting for Sukuk".

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, as modified by the revaluation of land and buildings, available-for-sale financial assets, and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, and under the accrual basis of accounting, with some exceptions as follows:

- 1) *Foreclosed assets in connection with the completion of the financing are recorded at net realizable value;*
- 2) *Calculation of income available to the results using the cash basis; and*
- 3) *Income benefits (ujrah) certain services and financing revenue administration recognized using the cash basis.*

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows reporting, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits can be withdrawn at any time and short-term liquid investments with original maturities of three months or less, to the extent not used as collateral and unrestricted.

Conventional entity conducting sharia transaction do not need to set up sharia financial statements in full but only report the sharia transaction in accordance with the accounting standards of sharia in conventional financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan beserta Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Perusahaan.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun tertentu, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan kedalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut dimulai diperoleh hingga saat pengendalian atas Entitas Anak itu berakhir.

Pengendalian dianggap ada bilamana Perusahaan menguasai lebih dari lima puluh persen (50%) hak suara di Entitas Anak, atau mempunyai kemampuan untuk memberhentikan atau menunjuk mayoritas anggota Direksi di Entitas Anak.

Seluruh saldo utang piutang serta transaksi antar perusahaan konsolidasian dieliminasi. Hak pemegang saham minoritas dalam ekuitas dan hasil usaha dari Entitas Anak yang dikonsolidasi disajikan secara tersendiri dalam laporan keuangan konsolidasian.

c. Usaha yang Berkelanjutan

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak memperoleh bukti objektif tentang ketidakpastian material yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

d. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Principle of Consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiary are under the control of the Company.

In terms of control to the subsidiary commencing or ending in a particular year, then the results of operations of subsidiaries accounted into the consolidated financial statements only from the date that the control starts up to the date control of the subsidiary ended.

Control is presumed to exist where more than fifty percent (50%) of the voting rights in the Subsidiary, or control the removal or appointment of a majority of the directors in the Subsidiary.

The entire balance of accounts payable as well as transactions between consolidated companies are eliminated. Rights of minority shareholders in the equity and results of operations of consolidated subsidiary are presented separately in the consolidated financial statements.

c. Going Concern

Subsidiary is fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through another subsidiary, more than half of the voting power of an entity unless, in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not constitute control.

Management has conducted an assessment of the Company's ability to continue its business continuity and convinced that the company has sufficient resources to continue its efforts in the future. In addition, the management company does not obtain objective evidence about uncertainties of material that can cause significant losses to the company's ability to continue its business. Therefore, the company's financial statements for the year ended December 31, 2017 have been prepared on the basis of a sustainable business.

d. Use of Judgements, Estimates and Assumptions

In preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standard requires management to make judgments, estimates and assumptions that effect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi (Lanjutan)

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui Pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan secara khusus.

Pertimbangan dan estimasi signifikan adalah sebagai berikut:

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk menggunakan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Dalam mengestimasi arus kas, Perusahaan melakukan penilaian tentang kondisi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih dari agunan.

Penurunan Nilai Piutang

Perusahaan meriviu piutang secara individual pada setiap akhir periode pelaporan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi.

Secara khusus, pertimbangan oleh manajemen diperlukan dalam mengestimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin akan berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai di masa mendatang.

e. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2017, Perum Jamkrindo dan Entitas Anak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak, dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Use of Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

Estimate and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised and future periods affected by the revised estimate.

Figures in these financial statements are rounded to and stated in Rupiah, unless otherwise stated.

The most significant uses of the judgement and estimates are as follows:

Fair value of financial instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the financial position statements cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. In estimating these cash flows, the Company makes judgement about the borrower's financial condition and the net realizable value of collateral.

Impairment Losses on Receivables

The Company reviews its receivable individually at each the end of reporting dates to assess whether an impairment loss should be recorded in the income statement.

In particular, judgement by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may be different, resulting in future changes to the allowance.

e. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting

On January 1, 2017, Perum Jamkrindo and Subsidiaries adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Perum Jamkrindo and Subsidiaries accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substansial changes to Perum Jamkrindo and Subsidiaries accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

- 1) Amandemen PSAK No. 3, Penyajian Laporan Keuangan tentang Laporan Keuangan Interim
- 2) PSAK 24: Imbalan Kerja (Penyesuaian 2016).
- 3) PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan (Penyesuaian 2016).
- 4) PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Penyesuaian 2016). Amandemen PSAK No. 101 (2016), Penyajian Laporan Keuangan Syariah tentang penyajian laporan keuangan asuransi syariah
- 5) Amandemen PSAK No. 102 (2016), Akuntansi Murabahah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar
- 6) Amandemen PSAK No. 103 (2016), Akuntansi Salam tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- 7) Amandemen PSAK No. 104 (2016), Akuntansi Istishna' tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- 8) Amandemen PSAK No. 107 (2016), Akuntansi Ijarah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- 9) Amandemen PSAK No. 108 (2016), Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, surat berharga, piutang *co-guarantee*, pinjaman yang diberikan dan piutang lain-lain.

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014), pada saat pengakuan awal aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:

- 1) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- 2) pinjaman yang diberikan dan piutang;
- 3) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo; dan
- 4) aset keuangan tersedia untuk dijual.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya berdasarkan tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (Continued)

- 1) Amendments to SFAS No. 3, Presentation of Financial Statements regarding Interim Financial Report.
- 2) SFAS 24: Employee Benefit (Improvement 2016).
- 3) SFAS 58: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operation (Improvement 2016)
- 4) SFAS 60: Financial Instrument - Disclosure (Improvement 2016). Amendments to SFAS No. 101 (2016), Presentation of Shariah Financial Statement regarding Presentation of Sharia Insurance Financial Statement.
- 5) Amendments to SFAS No. 102 (2016), Murabahah Accounting regarding adjustment to fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement.
- 6) Amendments to SFAS No. 103 (2016), Salam Accounting regarding adjustment to fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement.
- 7) Amendments to SFAS No. 104 (2016), Istishna' Accounting regarding adjustment to fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement.
- 8) Amendments to SFAS No. 107 (2016), Ijarah Accounting regarding adjustment to fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement.
- 9) Amendments to SFAS No. 108 (2016), Accounting for Sharia Insurance Transaction regarding recognition, measurement, presentation and disclosure sharia insurance transaction.

f. Financial Asset and Financial Liabilities

Classification

The Company classifies its financial instruments into classes that reflects the nature of the information and considering the characteristics of the financial instruments.

Financial Asset

The company financial assets consist of cash and cash equivalent, marketable securities, co-guarantee receivable, loans and other receivable.

Under SFAS No. 55 (Revised 2014), at initial recognition, financial assets are classified into the following categories:

- 1) financial assets at fair value through profit or loss;
- 2) loans and receivables;
- 3) held-to-maturity financial assets; and
- 4) available-for-sale financial assets.

Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

1) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan *non-derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perusahaan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

- yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan dan piutang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai'.

2) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan *non-derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial Asset and Financial Liabilities (Continued)

The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired.

1) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and The Company does not intend to sell immediately or in the short term.

- *those that the Company intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company upon initial recognition designates as available for sale; or*
- *those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the income statement as 'Allowance for impairment losses'.

2) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity investments are non derivative financial assets with fixed or determinable payments and have fixed maturities which is the Company has the positive intention and ability to hold to maturity, and are not specified at fair value through profit loss or available for sale.

- *those that the Company upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company designates as available for sale; and*
- *those that meet the definition of loans and receivables.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan dan piutang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui didalam laporan keuangan sebagai 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai'.

3) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan *non-derivatif* yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

- Pengakuan pendapatan dan beban

- Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan suku bunga efektif.
- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Perubahan nilai wajar dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui pada pendapatan komprehensif lainnya sebagai "keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual".

Ketika aset keuangan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual telah dijual, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang klaim, utang *co-guarantee* dan liabilitas lain-lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial Asset and Financial Liabilities (Continued)

Financial Asset (Continued)

These are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method.

Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

In the case of an impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the investment and recognised in the income statement as "Allowance for impairment losses".

3) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non derivative financial assets that designated as available for sale or are not classified in any of the other categories of financial assets.

- Income and expense recognition

- For available-for-sale securities and financial assets and liabilities held at amortized cost, interest income and interest expense is recognised in the statement of income using the effective interest rate method.
- Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of income.

The change at fair value of financial assets classified as available for sale are recognized in other comprehensive income as "gains or losses from changes at fair value of financial assets available for sale".

When financial assets classified as available for sale have been sold, the accumulated fair value adjustments recognized in equity are included in the income statement. Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

Financial Liabilities

The company classifies its financial liabilities in the category of financial liabilities are measured by amortized cost. Financial liabilities of the Company consists of claim payable, co-guarantee payable and other liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau pada saat Perusahaan memindahkan seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Klasifikasi dan Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Saling Hapus Aset Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Pinjaman yang diberikan merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Termasuk dalam pinjaman yang diberikan adalah Pinjaman Bagi Hasil (PBH) dan pinjaman koperasi pegawai. Pinjaman yang diberikan disajikan dalam jumlah neto setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial Asset and Financial Liabilities (Continued)

Financial Liabilities (Continued)

At the time of initial recognition, financial liabilities are amortized cost category recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate.

Derecognition

The Company terminates recognition of financial assets when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when the Company transferred all rights to receive the contractual cash flows of the financial asset in a transaction in which the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the asset transferred financial. Any rights or liabilities for financial assets that are transferred incurred or that are still owned by the Company is recognized as a separate asset or liability.

The Company terminates recognition of financial liability when the liability specified in the contract are released or canceled or expired.

Classes of Financial Instrument

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount presented in the statement of financial position if, and only if, the Company has a legally enforceable right to offset the recognised amounts and intend to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

Loans are financial assets non-derivatif with fixed or determinable payments and have not quoted in an active market. Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and an additional cost to acquire the asset, and after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Included in loans is the loan-sharing (PBH) and loan cooperative employees. Loans are recorded net of allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (Lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapusbukkan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas pinjaman yang telah dihapusbukkan sebelumnya, dikreditkan ke penyisihan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan.

h. Piutang Co-Guarantee dan Piutang Re-Guarantee

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee* dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee*.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat mitra *co-guarantee* mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan mitra *co-guarantee*), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *reguarantee* pada saat diterbitkannya SOA (*Statement of Account*), namun pembayaran belum dilakukan.

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban *co-guarantee*, beban *re-guarantee*, beban *fee based income* bank pelaksana dan beban komisi agen dibayar dimuka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan /Kafalah.

j. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perum Jamkrindo menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Loans (Continued)

Loans are written off when there is no realistic prospect of the return of the loan. The loans can not be repaid is written off by debiting the allowance for impairment losses. Subsequently repayment on loans previously written off are credited to the allowance for impairment losses in the statement of financial position.

h. Co-Guarantee and Re-Guarantee Receivable

Payment of claims to the sole recipient of a guarantee that partners *co-guarantee* and partners *re-guarantee* are recorded as a receivable in the settlement.

The recognition of receivables in the settlement of claims payments made every occur a dependent partner *co-guarantee* and partner *re-guarantee*.

Receivables in the settlement are recognized as *co-guarantee Receivables* in the completion of when partners *co-guarantee* accept in settlement of the accounts (in accordance with a term of the Agreement of Cooperation between the Perum Jamkrindo with partners of *Co-guarantee*), but payment has not been done.

Receivables in the settlement are recognized as a receivables *re-guarantee* at the time of the SOA (*Statement of Account*), but the payment has not been made.

i. Prepaid Expense

Expenses are allocated according to the useful life of each charge with a straight-line method (*straight-line method*).

Prepaid *co-guarantee* expense, *re-guarantee* expense, *fee based income* of banks implementing and agent commission expense are amortized proportionally to follow the pattern of revenue recognition *Guarantee/Kafalah Fee*.

j. Fixed Assets

On December 31, 2015, Perum Jamkrindo applies revaluation model as accounting policy for land and buildings. For fixed assets other than land and buildings, it applies cost model.

Land and buildings are shown at fair value, less subsequent depreciation for buildings. Valuation of land and buildings are performed by external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Cadangan Revaluasi Aset" dan disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

Jenis Aset (Asset Type)	Masa Manfaat (tahun) Useful Life (year) Annual	Penyusutan Per Tahun (%) Depreciation (%)
Bangunan Gedung (Buildings)	20-30	3,33-5
Kendaraan Bermotor (Vehicle)	5	20
Inventaris (Equipment)	2-10	50-10

Perusahaan memiliki kebijakan kapitalisasi aset tetap dengan nilai minimum sebesar Rp5.000.000,-, kecuali untuk inventaris sebesar Rp3.000.000,-

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya Pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Fixed Assets (Continued)

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land and buildings recorded in "Asset Revaluation Reserve" and presented as "Other Comprehensive Income". Decreasing in carrying amount as the result of revaluation is recorded as expenses in the current year. If the asset does have balance on its "Gain of Revaluation of Fixed Assets", loss from revaluation of fixed asset is charged to "Gain of Revaluation of Fixed Assets" which presented as "Other Comprehensive Income" and the rest of the amount is charged to current year's expenses.

Fixed assets besides land and buildings are stated at historical cost less accumulated depreciation.

Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition.

All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

All fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

The Company has classified fixed assets capitalization policy with a minimum value of Rp5.000.000, -, except for equipment of Rp3.000.000,-

Costs after the initial recognition are recognized as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only if the company is likely to benefit economically in the future with respect to the assets and the cost of the item can be measured reliably. The cost of repairs and maintenance are charged to the income statement in the financial period when these costs occur.

Fixed assets are derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

All cost and expenses incurred in relation with the acquisition of the landright, such as license fee, survey and measurement cost, notarial fees and taxes, are deferred and presented separately from the cost of the landright was presented as part of "Other Assets" in the statements of financial position, and amortized over the period of the related landright using the straight-line method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

k. Aset Tidak Berwujud

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi periodik aset tetap untuk memastikan sisa masa manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Perusahaan menilai apakah umur manfaat aset tidak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tidak berwujud dianggap oleh Perusahaan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Fixed Assets (Continued)

All costs incurred in connection with the acquisition of land right are recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

k. Intangible Assets

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When fixed assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.

The carrying amount of assets immediately reduced by the amount that can be recovered if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

At each reporting date the Company perform periodic reviews of fixed assets to ensure the remaining useful lives, residual values and depreciation method are comparable with previous estimates.

At each reporting date the Company perform conducts a review to determine whether there is any indication of impairment.

Intangible assets are initially recognized at cost. The cost of acquisition of intangible assets consists of the purchase price, including import duties and taxes that can not be restituted on purchase, net of discounts and rebates and all the costs that are directly attributable to preparing the asset so it is ready for use.

After initial recognition, intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

The Company assesses whether the useful life of intangible assets is limited or unlimited and, if limited, period of time or number of production or similar units quantity produced during useful life. Intangible assets are considered by the Company to have an indefinite useful life when, based on an analysis of all relevant factors, there is no limit in sight at the moment over the period the asset is expected to generate net cash flows of the entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Aset Tidak Berwujud (Lanjutan)

Jumlah tersusutkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

1. Lisensi

Lisensi disajikan berdasarkan harga perolehan lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (15-20 tahun).

2. Piranti Lunak Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya *overhead* yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dari tiga tahun).

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi periodik atas aset tak-berwujud untuk memastikan periode amortisasi dan metode amortisasi masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Intangible Assets (Continued)

Total depreciation of intangible assets with finite useful life are systematically allocated during their useful life. Amortization begins when the asset is available for use, ie when the asset is at a location and in a condition to operate in the manner intended by management. Amortization stopped at an earlier date between when the assets are classified as assets held for sale (or included in a loose group of assets classified as assets held for sale. The method of amortization is used illustrates the expected pattern of consumption of the entity over the future economic benefits. If the pattern can not be determined reliably, the straight-line method is used.

1. Licences

Licences are disclosed at historical cost licences have a definite useful life and are carried at cost less accumulated amortization.

Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of licences over their estimated useful lives (15-20 years).

2. Computer Software

Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software. These costs are amortized over their estimated useful lives (3-5 years).

Costs associated with developing or maintaining computer software programmes are recognised as an expense as incurred. Costs that are directly associated with the production of identifiable, and unique software products controlled by company, and that will probably generate economic benefits exceeding costs more than one year, are recognised as intangible assets. Direct costs include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Computer software development costs recognised as assets are amortized over their estimated useful lives (not exceeding three years).

At each reporting date the assets perform periodic reviews to ensure intangibles amortization period and amortization method is in accordance with previous estimates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

I. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

1. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dan aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun penyisihan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit (yaitu berdasarkan proses pemeringkatan Perusahaan yang mempertimbangkan jenis aset, industri, lokasi geografis, jenis agunan, status tunggakan dan faktor-faktor relevan lainnya). Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dan kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

I. Allowances for Impairment of Financial Assets

The company, assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or the company of financial assets is impaired.

A financial asset or the company of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a loss event) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the company of financial assets that can be reliably estimated.

1. Financial Assets carried at amortized cost

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value, of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in the consolidated income statement. If a loan or held-to-maturity investment has a variable interest rate) the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the company may measure impairment on the basis of an instruments fair value using an observable market price.

For the purposes of a collective evaluation of impairment; financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics (that is, on the basis of the company's grading process that considers asset types, industry, geographical location, collateral type, past due status and other relevant factors). Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows from groups of such assets by being indicative of the debtors' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

Future cash flows in a Company of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows of the assets in the Company and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effect of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

I. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Estimasi terhadap perubahan arus kas masa datang dari kelompok aset harus mencerminkan dan memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data terkait yang dapat diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya (seperti perubahan tingkat pengangguran, harga properti, harga komoditas, status pembayaran, atau faktor-faktor lainnya yang merupakan indikasi timbulnya kerugian dalam kelompok aset keuangan tersebut serta besarannya). Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa datang dikaji ulang secara berkala oleh Perusahaan untuk mengurangi perbedaan antara taksiran jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktualnya.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur) maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

2. Aset yang tersedia untuk dijual

Penurunan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti obyektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dibalik melalui laba rugi.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

I. Allowances for Impairment of Financial Assets (Continued)

Estimates of changes in future cash flows for groups of assets should reflect and be directionally consistent with changes in related observable data from period to period (for example, changes in unemployment rates, property prices payment status, or other factors indicative of changes in the probability of losses in the company and their magnitude). The methodology and assumptions used for estimating future cash flows are reviewed regularly by the company to reduce any differences between loss estimates and actual loss experience.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring, after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtors credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognised in the income statement.

Interest income on financial assets is impaired continues to be recognised on the basis of interest rates used to discount the future cash flows in measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss decreases impairment, the impairment loss previously recognised to be restored and the recovery is recognised in the income statement.

2. Assets classified as available for sale

Decrease in fair value of available-for-sale financial assets has been recognized in other comprehensive income and there is an objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial asset has not been derecognized.

The amount of the cumulative loss that is reclassified from equity to profit or loss is the difference between the acquisition cost (net of principal repayment and amortization) and current fair value, less any impairment loss before financial asset has been recognized in profit or loss.

Impairment losses are recognized in profit or loss on investment in equity instruments classified as available for sale are not reversed through profit or loss.

If, in subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through the income statement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan milik Perusahaan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dalam kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau kelompok aset ("unit penghasil kas" atau "UPK").

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset non keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

n. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil

Pendapatan bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umum dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Impairment of Non-Financial Assets

The carrying amount of financial assets that are not assets of the Company, except for deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If such an indication exists, the recoverable value of the asset will be estimated.

The recoverable value of an asset or cash-generating unit is the higher of the amount between its value in use and fair value of an asset or cash-generating unit less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the present cash value and the risks specific to the asset.

For the purpose of impairment testing, assets that can not be tested individually be combined in smaller groups that provide cash inflows of Sustainable use that are largely independent of the cash inflows of other assets or groups over assets ("Cash Generating Unit" or "CGU").

Provision for impairment is recognized if the carrying amount of an asset or UPK exceeds its recoverable value. Provision for impairment loss is recognized in profit or loss for the year.

Recovery of impairment loss, for non-financial assets, are recognized if, and only if, there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount since the last impairment testing. Reversal of impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

n. Interest/ Profit Sharing Income

Interest income are recognized in the statement of income using the effective interest method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future losses. This calculation covers all commission, provision, and other forms accepted by the parties in the contract which are an integral part of effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of loss on impairment, then the interest income subsequently acquired is recognized based on interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

o. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan. Pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

o. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

p. Imbal Jasa Penjaminan/ Kafalah, Pendapatan Komisi *Re-Guarantee*, Pendapatan Jasa administrasi Penjaminan, Beban Komisi Agen, *Fee based Income Bank Pelaksana*, Beban *Co-Guarantee* dan Beban *Re-Guarantee*

Pendapatan imbal jasa penjaminan/ kafalah, pendapatan komisi *re-guarantee* dan beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari IJP, beban *fee based income-bank pelaksana*, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee* diakui sejak bulan Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Pendapatan imbal jasa penjaminan/ kafalah dan pendapatan komisi/ ujarah *re-guarantee* yang besarnya dinyatakan sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya sertifikat penjaminan kecuali sertifikat penjaminan eksisting yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2013 diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan dengan batas waktu maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan.

Pendapatan jasa administrasi penjaminan diakui seluruhnya saat Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Beban *fee based income-bank pelaksana*, beban komisi/ ujarah agen yang besarnya dinyatakan sebagai persentase tertentu dari IJP, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee* yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan/ kafalah disajikan secara bruto sebelum dikurangkan *fee base income-bank pelaksana*, beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee*.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atas pinjaman yang dijamin, jumlah pendapatan imbalan jasa penjaminan dan pendapatan komisi *re-guarantee*, serta beban dibayar dimuka atas *fee based income-bank pelaksana*, beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee* yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

q. Utang Klaim

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah permohonan/ pengajuan klaim yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan.

r. Beban Klaim

Beban klaim dicatat pada saat klaim telah disetujui oleh Komite Klaim. Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

s. Cadangan Klaim

Pada tahun 2016, cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut Cadangan klaim yang wajib dibentuk minimal sebesar 0,25% dari total nilai penjaminan yang ditanggung perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

p. *Guarantee/ Kafalah Service Fee, Re-Guarantee Commission Fee, Guarantee administration Service Fee, Agent Commission Expenses, Fee Based Income-Executive Bank and Co-Guarantee Expenses, and Re-Guarantee Expenses*

Underwriting compensation income, commission income and expenses re-guarantee agency commission in the amount expressed as a certain percentage of the IJP, the burden of fee-based income-bank executive, co-guarantee load and re-load the guarantee recognized since Guarantee Certificate (SP) was published.

Income guarantee/ kafalah compensation and commission/ ujarah income guarantee in the amount of re-guarantee are recognized as deferred revenue and amortized over the period of validity of the certificate unless the certificate of guarantee existing guarantees issued prior to January 1, 2013 is amortized in accordance with the Guarantee Certificate validity period with a maximum time limit of 48 (forty-eight) months.

administrative services revenue assurance is recognized when all of Guarantee Certificates (SP) was published.

Fee-based income expenses for banks, commission/ ujarah expenses for agent calculated based on Guarantee Fee on certain percentage, co-guarantee and re-guarantee expenses that more than one year are recognized as prepayments and amortized in accordance with the Guarantee Certificates validity periods.

Underwriting fee income is presented on a gross basis before the deductible fee income base-bank executive, agent commission expense, Co-Guarantee expense and re-guarantee expense.

If there is an accelerated repayment of the loan collateral, the amount of the guarantee fee income and commission income re-guarantee, as well as prepaid expenses over the bank's fee-based income-executor, agent commission expense, burden of co-guarantee and re-guarantee loads are still suspended entirely recognized to profit or loss for the year.

q. *Claim Payable*

Claim payable is debts of the Company to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claim payable are debts that have been processed and approved but not yet paid. Payables are stated at the amount of claim has been authorization dan paid.

r. *Claim Expenses*

Claims expense is recorded when the claim has been approved by the Claims Committee. Changes in the amount of claims payable, as a result of further review and the difference between the amount of the claim debt and the claim paid, are recognized in the statement of income in the year of the change.

s. *Claim Reserve*

In 2016, claims reserves established by the Regulation of the Financial Services Authority No. 6/POJK.05/2014 about the Credit Guarantee Company and Reguarantee Credit Company. Under this regulation, minimum reserves is 0.25% from the total value of outstanding guarantee.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

s. Cadangan Klaim (Lanjutan)

Pada tahun 2017, cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut pembentukan cadangan klaim dibagi dua metode, 1) Cadangan klaim yang wajib dibentuk minimal sebesar 0,01% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri, 2) penjumlahan dari 100% klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Perusahaan menggunakan metode yang lebih besar dalam penjumlahan.

Kenaikan (penurunan) cadangan klaim merupakan selisih cadangan klaim periode berjalan dan periode sebelumnya.

t. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Program imbalan pasca kerja dilaksanakan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 dengan metode perhitungan aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban manfaat pasti dan biaya jasa kini adalah *Projected Unit Credit*, sebagaimana yang ditetapkan dalam PSAK 24 (Revisi

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang timbul dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu.

Kewajiban program imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung sebesar nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset bersih dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected-unit-credit*.

Ketika imbalan pasca kerja berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan hingga imbalan pasca kerja menjadi hak karyawan. Imbalan pasca kerja yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Claim Reserve (Continued)

In 2017, the claim reserve established by the Regulation of the Financial Services Authority Number 2 / POJK.05 / 2017 on the Guarantee Institution Business Implementation. Under this provision, the methods of claim reserves shall be divided into two methods, 1) The required reserve reserves shall be at least 0.01% of the total value of the underwriting, 2) the sum of 100% of claims already incurred but not yet reported. Companies use larger methods in addition.

Increase (decrease) in reserve claim reserve represents the excess up the claim period and prior periods.

t. Post Employment Benefit

Perum Jaminan Kredit Indonesia have registered their employees into pension plan, that is Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan and Program Kesejahteraan Karyawan through Financial Institution Pension Fund (DPLK). Besides pension plan, company also recognized defined benefit post employment benefit according to Labor Law.

Post employment benefit is executed according to Labor Law No.13 year 2003 use actuarial calculation method which applied to determine present of value defined benefit obligation and current service cost that is Projected Unit Credit method, as stated in SFAS 24 (Revised 2014).

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually based on one or more factors such as age, years of service or compensation.

A defined contribution plan is a pension plan under which The company will pay fixed contributions into a separate entity (a fund) and has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits arising of services provided by employees on the present and the past.

Defined benefit plan obligations are recognized in the statement of financial position is calculated at the present value of the estimated post-retirement benefit obligations in the future arising from services rendered by employees who have been on the present and the past, less the fair value of net assets of the pension fund. The calculation is performed by an independent actuary with the projected-unit-credit.

When the post-employment benefits change, the portion of the increase or decrease in compensation in connection with the services that have been provided by the employee in the past charged or credited to the income statement using the straight-line method over the expected average remaining working lives of the employees until the benefits become vested employment . Post-employment benefits become vested is recognized immediately as an expense in the income statement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

t. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Selain program pensiun imbalan pasti, Perusahaan juga memiliki program iuran pasti dimana Perusahaan membayar iuran yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

u. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2014) tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut :

a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

i memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;

ii memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau

iii personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :

i entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

t. Post Employment Benefit (Continued)

In addition to the defined benefit pension plan, The company also has defined contribution plans in which the Company pays fees calculated based on a certain percentage of the employee's basic salary to the pension insurance program held by the pension funds of financial institutions. Contributions are charged to the income statement when due.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they occurred.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

u. Transactions with Related Parties

In accordance with SFAS No. 7 (Revised 2014) regarding "related party Disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow :

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person :

i has control or joint control over the reporting entity;

ii has significant influence over the reporting entity; or

iii member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

i the entity and the reporting entity are members of the same the Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

u. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (Lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: (Lanjutan)

ii suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

iii kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

iv satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

v entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;

vi entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);

vii orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas pelapor yang berelasi dengan pemerintah tidak mengungkapkan persyaratan pada PSAK 7 (Revisi 2014) paragraf 17 yaitu, jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Pengungkapan sekurang-kurangnya meliputi:

i Jumlah transaksi;

ii Jumlah saldo, termasuk komitmen:

a. Persyaratan dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk penyelesaian;

b. Rincian garansi yang diberikan atau diterima;

c. Penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan

d. Beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

Entitas pelapor yang berelasi dengan pemerintah mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait dengan:

i Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor (misalnya, pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

u. Transactions with Related Parties (Continued)

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (Continued)

ii one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member).

iii both entities are joint ventures of the same third party;

iv one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

v the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;

vi the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

vii a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

Reporting entities are related to the government did not disclose terms of the (Revised 2014) SFAS 7 paragraph 17 that is, if the entity has transactions with related parties during the period covered by the financial statements, the entity shall disclose the nature of the relationship with related parties as well as information about the transactions and balances, including commitments, necessary to understand the potential impact of such relationships in the financial statements. Disclosure shall at least include:

i Total Transaction;

ii Total balances, including commitments :

a Terms and conditions, including whether there is a guarantee, and the nature of the reward that will be given, for completion;

b Details of the warranty is given or received;

c Allowance for doubtful accounts related to the amount of the balance; and

d Expense recognized during the period in terms of doubtful accounts receivable or elimination of related parties.

Reporting entities are related to the government revealed on transactions and balances related to:

i Name of the department or government agency and the nature of its relationship with the reporting entity (eg, control, joint control or significant influence);

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

u. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (Lanjutan)

Entitas pelapor yang berelasi dengan pemerintah mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait dengan: (Lanjutan)

- ii Informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan;
 - a. Sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan
 - b. Untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individu, signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atas luasnya transaksi tersebut.

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2014), transaksi antara Perusahaan dengan pemerintah, BUMN lainnya dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki, atau dikendalikan negara, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan tidak dikategorikan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi.

v. Kepentingan Non Pengendali

Kepentingan non pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak.

Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Investasi pada sukuk dapat diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

- a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual;
- b. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi. Untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari pada jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

u. Transactions with Related Parties (Continued)

Reporting entities are related to the government revealed on transactions and balances related to: (Continued)

- ii The following information with enough detail that enables users of financial statements to understand the impact of transactions with related parties on the financial statements;
 - a The nature and amount of each individually significant transactions; and
 - b For other transactions that are collectively, but not individually, significant, a qualitative or quantitative indication on the extent of such transactions.

Based on SFAS No. 7 (Revised 2014), transaction between the Company and the government, other state owned entities and companies which are owned or controlled by the government, including the deposit insurance corporation is not categorized as transaction with related parties.

v. Non-Controlling Interests

Non-controlling interest is the equity of the subsidiary not attributable, directly and indirectly in subsidiaries.

Non-controlling interests are presented in equity in the consolidated financial statements, separately from the equity owners of the parent.

Investments in sukuk may be classified as measured at cost or fair value.

Investments in sukuk are classified as measured at cost if:

- a. The investments held within a business model whose main aim to obtain contractual cash flows; and
- b. Contractual terms determine the specific date of payment of principal and / or results.

At initial recognition, investments in sukuk are measured at cost, including transaction costs and the difference between the acquisition cost and nominal value is amortized straight-line basis over the term of the sukuk.

Investments in sukuk which are not classified as measured at historical cost, are classified as at fair value. At initial recognition, investments are measured at fair value at acquisition cost excluding transaction costs. To subsequently measured at fair value. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

For investments in sukuk are measured at cost, if there is an indication of impairment, the Company measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than the carrying amount, the Company recognizes an impairment loss. Recoverable amount is the amount that would be obtained from the principal returns without taking into account the present value.

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS

	2017	2016
Kas	9.180.779.514	14.061.501.891
Giro Bank		
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	61.656.800.993	82.537.193.408
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	42.951.237.782	19.664.352.632
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	35.183.051.575	474.826.118
PT Bank Tabungan Negara Syariah	26.499.793.217	45.826.908.276
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	20.928.672.465	49.186.212.266
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	9.788.556.347	30.993.246.498
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	2.853.495.854	700.572.996
PT Bank Negara Indonesia Syariah	108.234.721	104.704.811
Jumlah Giro Pihak Berelasi	199.969.842.954	229.488.017.004

Giro Bank		
Pihak Ketiga		
PT BPD Jawa Tengah	21.485.838.679	14.470.354.894
PT BPD Syariah Aceh	11.917.372.985	368.463.449
PT Bank Syariah Mandiri	8.956.260.181	8.961.935.271
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	7.071.023.558	3.837.171.547
PT BPD Syariah Jawa Barat Banten	5.687.172.840	3.817.452.490
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	4.278.851.236	5.411.504.777
PT BPD Kalimantan Selatan	4.049.044.009	1.208.535.420
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk	3.425.122.563	5.738.000
BPD Syariah Jawa Tengah	3.409.438.657	3.491.096.339
PT BPD Jawa Timur, Tbk	2.322.435.973	3.530.302.903
PT BPD Sulawesi Selatan	2.288.989.896	2.055.625.575
PT BPD Syariah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1.950.676.666	1.154.208.336
PT BPD Kalimantan Timur	1.542.523.720	535.560.767
PT BPD DKI Syariah	1.342.807.541	53.789.294
PT BPD Nusa Tenggara Timur	1.004.408.738	2.123.136.710
PT BPD Syariah Kalimantan Barat	880.583.122	160.485.665
PT Bank Lampung	647.758.225	508.124.819
PT Bank Muamalat Syariah	645.324.079	622.231.349
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	621.535.440	181.040.459
PT BPD Kalimantan Barat	471.970.961	1.295.128.618
PT Bank Bukopin, Tbk	454.897.848	1.250.078.109
PT BPD Papua	433.044.672	3.833.460.447
PT BPD Sulawesi Tenggara	424.995.065	246.927.763
PT BPD Bengkulu	377.200.861	790.014.081
PT BPD Syariah Kalimantan Timur	367.020.821	49.301.438
PT BPD DKI	364.423.802	457.087.696
PT Kospin Jasa	294.074.390	-
PT BPD Banten	266.575.448	44.430.645
PT BPD Syariah DIY	278.632.779	277.200.739
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	270.586.213	1.998.508.674
PT Bank OCBK NISP, Tbk	244.773.172	5.000.000
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	232.585.249	1.669.630.456
PT BPD Sumatera Utara	186.524.150	21.629.544
Total Dipindahkan	88.194.473.538	64.435.156.274

3. CASH AND CASH EQUIVALENT

Cash on hand
Bank Account
Related Parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk
PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Bank Negara Indonesia Syariah
Total Bank Account Related Parties

Bank Account
Third Parties
PT BPD Jawa Tengah
PT BPD Syariah Aceh
PT Bank Syariah Mandiri
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT BPD Syariah Jawa Barat Banten
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk
PT BPD Kalimantan Selatan
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk
BPD Syariah Jawa Tengah
PT BPD Jawa Timur, Tbk
PT BPD Sulawesi Selatan
PT BPD Syariah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT BPD Kalimantan Timur
BPD DKI Syariah
PT BPD Nusa Tenggara Timur
PT BPD Syariah Kalimantan Barat
PT Bank Lampung
PT Bank Muamalat Syariah
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT BPD Kalimantan Barat
PT Bank Bukopin, Tbk
PT BPD Papua
PT BPD Sulawesi Tenggara
PT BPD Bengkulu
PT BPD Syariah Kalimantan Timur
PT BPD DKI
PT Kospin Jasa
PT BPD Banten
PT BPD Syariah DIY
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
PT Bank OCBK NISP, Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT BPD Sumatera Utara
Brought Forward

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

	2017	2016
Giro Bank		
Pihak Ketiga (Lanjutan)		
Saldo Pindahan	88.194.473.538	64.435.156.274
PT Bank Muamalat Indonesia	182.239.935	11.625.261
PT BPD Nusa Tenggara Barat	175.195.404	1.526.037.927
PT BPD Sumatera Utara Syariah	165.137.759	80.098.770
PT BPD Maluku	156.773.502	880.520.511
PT BPD Sulawesi Utara	153.300.785	1.968.012.929
PT Bank Sinar Mas, Tbk	151.633.902	14.141.059
PT BPD Syariah Jawa Timur	145.018.061	789.050.990
PT Bank Permata, Tbk	117.505.177	9.323.916
PT BPD Bali	106.081.858	1.002.510.471
PT BPD Aceh	104.628.133	682.892.802
PT BPD Sumatera Barat (Nagari)	103.071.744	2.251.753.386
PT Bank CTBC Indonesia	96.895.179	-
PT BPD Jambi	96.357.015	47.874.311
PT BPD Kalimantan Tengah	60.195.262	524.986.079
PT Bank Bukopin Syariah	41.881.490	510.417.501
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	41.802.080	33.583.348
PT Bank CIMB Niaga Syariah	23.665.518	60.682.953
PT BPD Sulawesi Tengah	20.490.513	21.599.730
PT BPD Syariah Nusa Tenggara Barat	19.933.638	199.350.721
PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	14.431.500	-
PT BPD Syariah Riau	10.861.216	108.210.090
PT Bank Mandiri Taspen Pos	4.658.110	-
PT Bank Maybank	3.446.950	2.296.000
PT Bank Permata Syariah	3.336.928	13.429.144
BPD Syariah Kalimantan Selatan	10.035.551	6.109.865
BPD Syariah Sulawesi Selatan	1.000.000	17.378.228
PT Bank Sinar Harapan Bali	-	4.957.790
Jumlah Giro Pihak Ketiga	90.204.050.749	75.202.000.057
Jumlah Giro Perusahaan	290.173.893.703	304.690.017.061

Deposito		
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.163.565.977.000	3.250.263.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	212.450.000.000	195.200.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	81.300.000.000	58.950.000.000
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	63.409.972.263	215.160.000.000
PT Bank Syariah Mandiri	61.931.000.000	40.481.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	43.125.000.000	43.625.000.000
PT Bank Tabungan Negara Syariah	34.270.000.000	57.070.000.000
Jumlah Deposito Pihak Berelasi	3.660.051.949.263	3.860.749.000.000

Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin, Tbk	275.000.000.000	276.750.000.000
PT BPD Jawa Tengah	153.675.000.000	161.075.000.000
PT BPD Sumatera Selatan	91.950.010.000	106.850.000.001
PT BPD DKI	91.100.000.000	87.150.000.000
PT BPD Kalimantan Barat	82.490.000.000	95.620.000.000
PT BPD Jawa Barat Banten	46.100.000.000	78.628.000.000
PT Bank Panin Syariah	44.800.000.000	42.000.000.000
PT BPD Sulawesi Selatan	43.015.000.000	40.715.000.000
BPD Syariah Jawa Barat Banten	41.100.000.000	25.850.000.000
PT BPD Nusa Tenggara Barat	40.020.000.000	44.520.000.000
Total Dipindahkan	909.250.010.000	959.158.000.001

3. CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued)

Bank Account	
Third Parties (Continued)	
Carried Forward	
PT Bank Muamalat Indonesia	
PT BPD Nusa Tenggara Barat	
PT BPD Sumatera Utara Syariah	
PT BPD Maluku	
PT BPD Sulawesi Utara	
PT Bank Sinar Mas, Tbk	
PT BPD Syariah Jawa Timur	
PT Bank Permata, Tbk	
PT BPD Bali	
PT BPD Aceh	
PT BPD Sumatera Barat (Nagari)	
PT Bank CTBC Indonesia	
PT BPD Jambi	
PT BPD Kalimantan Tengah	
PT Bank Bukopin Syariah	
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	
Bank CIMB Niaga Syariah	
PT BPD Sulawesi Tengah	
PT BPD Syariah Nusa Tenggara Barat	
PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	
PT BPD Syariah Riau	
PT Bank Mandiri Taspen Pos	
PT Bank Maybank	
PT Bank Permata Syariah	
BPD Syariah Kalimantan Selatan	
BPD Syariah Sulawesi Selatan	
PT Bank Sinar Harapan Bali	
Total Bank Account Third Parties	
Total Bank Account	

Time Deposits	
Related Parties	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	
PT Bank Syariah Mandiri	
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	
PT Bank Tabungan Negara Syariah	
Total Time Deposits Related Parties	

Third Parties	
PT Bank Bukopin, Tbk	
PT BPD Jawa Tengah	
PT BPD Sumatera Selatan	
PT BPD DKI	
PT BPD Kalimantan Barat	
PT BPD Jawa Barat Banten	
PT Bank Panin Syariah	
PT BPD Sulawesi Selatan	
BPD Syariah Jawa Barat Banten	
PT BPD Nusa Tenggara Barat	
Brought Forward	

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

	2017	2016
Deposito (Lanjutan)		
Saldo dipindahkan	909.250.010.000	959.158.000.001
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	39.890.000.000	30.470.000.000
PT BPD Bali	39.220.000.000	31.385.000.000
PT BPD Banten	38.000.000.000	-
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	36.990.000.000	38.862.000.000
PT Bank Kesejahteraan	36.250.000.000	1.250.000.000
PT BPD Nusa Tenggara Timur	34.850.000.000	46.850.000.000
PT BPD Maluku	34.550.000.000	14.540.000.000
PT BPD Kalimantan Selatan	27.950.000.000	34.575.000.000
PT Bank Muamalat Syariah	22.501.000.000	10.000.000.000
PT BPD Jambi	22.500.000.000	-
BPD Syariah Kalimantan Barat	25.000.000.000	46.280.000.000
PT BPD Kalimantan Timur	20.700.000.000	59.725.000.000
PT BPD Sumatera Barat (Nagari)	18.450.000.000	17.400.000.000
PT BPD Jawa Timur	16.310.000.000	18.110.000.000
PT BPD Sumatera Utara Syariah	16.010.000.000	11.250.000.000
PT BPD Sulawesi Utara	15.550.000.000	63.995.000.000
PT BPD Bengkulu	14.450.000.000	13.300.000.000
BPD Syariah Sumatera Selatan	14.250.000.000	8.800.000.000
PT Bank Lampung	11.150.000.000	11.350.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	10.340.000.000	5.750.000.000
PT BPD Maluku Syariah	10.000.000.000	-
BPD Syariah Jawa Timur	8.435.000.000	5.435.000.000
BPD Syariah Aceh	7.040.000.000	9.550.000.000
BPD Syariah Kalimantan Timur	6.700.000.000	7.700.000.000
PT BPD Aceh	6.200.000.000	12.400.000.000
PT BPD Kalimantan Tengah	4.050.000.000	16.550.000.000
BPD Syariah Jawa Tengah	3.100.000.000	1.200.000.000
BPD Syariah Riau dan Kepulauan Riau	2.500.000.000	3.100.000.000
PT BPD Papua	2.400.000.000	1.500.000.000
BPD Syariah Nusa Tenggara Barat	1.800.000.000	800.000.000
PT BPD Sumatera Utara	800.000.000	1.550.000.000
PT Bank Mega, Tbk	600.000.000	5.000.000.000
PT Bank Bukopin Syariah	280.000.000	47.280.000.000
PT Bank ICB Bumiputera, Tbk	500.000.000	500.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	150.000.000	3.600.000.000
PT BPD Sulawesi Tengah	100.000.000	100.000.000
BPD Syariah DIY	-	5.000.000.000
Jumlah Deposito Pihak Ketiga	1.458.816.010.000	1.544.315.000.001
Jumlah Deposito	5.118.867.959.263	5.405.064.000.001
Jumlah Kas dan Setara Kas	5.418.222.632.480	5.723.815.518.953

3. CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued)

Time Deposits (Continued)
Carried Forward
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
PT BPD Bali
PT BPD Banten
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
PT Bank Kesejahteraan
PT BPD Nusa Tenggara Timur
PT BPD Maluku
PT BPD Kalimantan Selatan
PT Bank Muamalat Syariah
PT BPD Jambi
BPD Syariah Kalimantan Barat
PT BPD Kalimantan Timur
PT BPD Sumatera Barat (Nagari)
PT BPD Jawa Timur
PT BPD Sumatera Utara Syariah
PT BPD Sulawesi Utara
PT BPD Bengkulu
BPD Syariah Sumatera Selatan
PT Bank Lampung
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT BPD Maluku Syariah
BPD Syariah Jawa Timur
BPD Syariah Aceh
BPD Syariah Kalimantan Timur
PT BPD Aceh
PT BPD Kalimantan Tengah
BPD Syariah Jawa Tengah
BPD Syariah Riau dan Kepulauan Riau
PT BPD Papua
BPD Syariah Nusa Tenggara Barat
PT BPD Sumatera Utara
PT Bank Mega, Tbk
PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank ICB Bumiputera, Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT BPD Sulawesi Tengah
BPD Syariah DIY
Total Time Deposits Third Parties
Total Time Deposits
Total Cash and Cash Equivalent

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

4. SURAT BERHARGA

4. MARKETABLE SECURITIES

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

	2017	2016
Deposito		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	63.000.000.000	74.150.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000
PT BPD Sulawesi Utara	10.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	5.000.000.000	12.500.000.000
PT BPD Jawa Barat Banten	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPD Sumatera Selatan	1.000.000.000	1.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPD Jawa Timur Syariah	1.000.000.000	-
PT BPD DKI	-	1.050.000.000
PT Bank Negara Indonesia Syariah	-	500.000.000
PT BPD Papua	-	200.000.000
Sub Jumlah Deposito	133.000.000.000	152.400.000.000

Obligasi

Pihak Berelasi

Obligasi Wajib Konversi Reindo Tahun 2014	300.000.000.000	300.000.000.000
Negara RI seri FR0068	40.335.225.071	40.356.296.147
Negara RI seri FR0070	30.307.584.998	30.355.044.530
PNM I Tahun 2012	25.000.000.000	20.000.000.000
Pegadaian II Tahap I Tahun 2013 seri D	24.993.965.517	25.000.000.000
Negara RI seri FR0071	21.086.335.196	21.179.680.887
Negara RI Seri FR0073	20.130.605.159	20.140.250.422
Antam seri B Tahun 2011	20.000.000.000	20.000.000.000
Obligasi I PTPN X Tahun 2013	20.000.000.000	20.000.000.000
Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahun I Tahun 2013	20.000.000.000	20.000.000.000
Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	20.000.000.000	20.000.000.000
Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013	17.000.000.000	17.000.000.000
Bank Lampung III Tahun 2012	-	15.000.000.000
Obligasi Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A	15.000.000.000	15.000.000.000
Berkelanjutan I Utama Karya Tahun 2013 Seri C	12.000.000.000	12.000.000.000
Obligasi I PLN tahap I Tahun 2013 seri A	11.000.000.000	11.000.000.000
Negara RI seri FR0044	11.032.860.160	11.190.977.024
Negara RI seri FR0058	9.858.998.678	9.848.565.319
Obligasi MTN I RNI Tahun 2017	10.000.000.000	-
Obligasi Negara RI Seri FR0072	10.436.352.632	-
Obligasi Negara RI Seri PBS012 Tahun 2013 seri B	9.323.137.126	-
Berkelanjutan Pengadaian Tahap III Tahun 2015 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014	2.000.000.000	1.979.160.920
Berkelanjutan II BTPN Tahap I PNM II Tahun 2013	-	10.000.000.000
	-	25.000.000.000
Saldo Dipindahkan	654.505.064.537	670.049.975.249

Held-To-Maturity

Time Deposits

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	
PT BPD Sulawesi Utara	
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	
PT BPD Jawa Barat Banten	
PT BPD Sumatera Selatan	
PT Bank Tabungan Negara Syariah	
PT BPD Jawa Timur Syariah	
PT BPD DKI	
PT Bank Negara Indonesia Syariah	
PT BPD Papua	
Sub Total Time Deposits	

Bonds

Related Parties

Mandatory Convertible Bonds Reindo Year 2014	
Negara RI Series FR0068	
Negara RI Series FR0070	
PNM I Year 2012	
Pegadaian II Tahap I Year 2013 Series D	
Negara RI Series FR0071	
Negara RI Series FR0073	
Antam Series B Year 2011	
Obligasi I PTPN X Year 2013	
Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahun I Year 2013	
Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	
Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Year 2013	
Bank Lampung III Year 2012	
Obligasi Telkom Tahap I Year 2015 Series A	
Berkelanjutan I Utama Karya Year 2013 Series C	
Obligasi I PLN tahap I Year 2013 Series A	
Negara RI Series FR0044	
Negara RI Series FR0058	
Obligasi MTN I RNI Tahun 2017	
Obligasi Negara RI Seri FR0072	
Obligasi Negara RI Seri PBS012 year 2013 seri B	
Berkelanjutan Pengadaian Tahap III Tahun 2015 Seri B	
Obligasi I Pupuk Indonesia Year 2014	
Berkelanjutan II BTPN Tahap I PNM II Year 2013	
Brought Forward	

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan)

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Lanjutan)

	2017	2016
Pihak Ketiga		
Saldo Pindahan	654.505.064.537	670.049.975.249
Bukopin Tahap I Tahun 2012	83.000.000.000	83.000.000.000
Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	10.000.000.000	10.000.000.000
Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013	10.000.000.000	10.000.000.000
Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013	10.000.000.000	10.000.000.000
Obligasi I Agung Podomoro Land II Tahun 2014	10.000.000.000	10.000.000.000
Berkelanjutan I Smart tahap I Tahun 2012 seri A	-	25.000.000.000
Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012	-	22.000.000.000
Agung Podomoro Land II Tahun 2012	-	10.000.000.000
Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Seri A	-	10.000.000.000
Japfa Tahun 2012	-	8.000.000.000
Jumlah Obligasi	777.505.064.537	868.049.975.249

Reksadana

Pihak Berelasi

RDPT Asanusa Jamkrindo Fund	144.000.000.000	94.000.000.000
RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 Properti 1	55.000.000.000	55.000.000.000
RDPT BNI - Am Mahitala	45.322.209.142	105.000.000.000
RDPT Mandiri Farmasi Terbatas Seri 1	40.000.000.000	40.000.000.000
RDT Danareksa Proteksi 46	35.000.000.000	-
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017	30.000.000.000	-
2016 Infrastruktur 7	25.500.000.000	-
RDT Mandiri SERI 83	15.000.000.000	-
RDPT Perumnas 2016	15.000.000.000	15.000.000.000
RD Terproteksi Mandiri Seri 26	12.000.000.000	12.000.000.000
RDPT Danareksa BUMN Fund 2015 Properti 2	10.100.000.000	10.100.000.000
RDPT PNM Wika Realty	10.000.000.000	10.000.000.000
RDPT PNM Perumnas	10.000.000.000	10.000.000.000
RDPT PNM Proteksi Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000
RDPT PNM Wika Realty 2016	10.000.000.000	10.000.000.000
RDT PNM Perinus	5.000.000.000	-
RDT Danareksa Proteksi 53	5.000.000.000	-
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 Seri II	-	10.000.000.000
RDPT Danareksa BUMN Fund 2013 - Infrastruktur 3	-	9.323.108.527
RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 - Infrastruktur 4	-	30.000.000.000
RDPT Bahana Construction Fund 1	-	25.000.000.000
Sub Jumlah Pihak Berelasi	476.922.209.142	445.423.108.527

4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

Held-To-Maturity (Continued)

Third Parties Carried Forward	
Bukopin Tahap I year 2012	
Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I year 2013	
Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II year 2013	
Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II year 2013	
Obligasi I Agung Podomoro Land II year 2014	
Berkelanjutan I Smart tahap I Year 2012 seri A	
Bumi Serpong Damai Tahap I year 2012	
Agung Podomoro Land II year 2012	
Obligasi I Ciputra Residence year 2014 Seri A	
Japfa year 2012	
Total Bonds	
Mutual Funds Related Parties	
RDPT Asanusa Jamkrindo Fund	
RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 Properti 1	
RDPT BNI - Am Mahitala	
RDPT Mandiri Farmasi Terbatas Seri 1	
RDT Danareksa Proteksi 46	
RDPT PNM Pembiayaan Mikro Fund 2013 - Infrastruktur 3	
Fund 2013 - Infrastruktur 3	
RDT Mandiri SERI 83	
RDPT Perumnas 2016	
RD Terproteksi Mandiri Seri 26	
RDPT Danareksa BUMN Fund 2015 Properti 2	
RDPT PNM Wika Realty	
RDPT PNM Perumnas	
RDPT PNM Proteksi Syariah	
RDPT PNM Wika Realty 2016	
RDT PNM Perinus	
RDT Danareksa Proteksi 53	
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 Seri II	
RDPT Danareksa BUMN Fund 2013 - Infrastruktur 3	
RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 - Infrastruktur 4	
RDPT Bahana Construction Fund 1	
Sub Total Related Parties	

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan)

4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

	2017	2016
Pihak Ketiga		
RD Insight Terproteksi 14	103.000.000.000	-
RD Insight Terproteksi 5	43.012.500.000	48.000.000.000
RDPT PNM Terproteksi		
Dana Investa 2	42.187.354.167	50.187.354.167
RDPT Bahana Primera		
RDPT Bahana Primera		
Protected Fund 87	25.000.000.000	25.000.000.000
RD Simas Gemilang	-	20.000.000.000
RDPT Bahana Core Protected		
Fund 113	20.000.000.000	10.000.000.000
RDPT Syailendra Multifinance	10.000.000.000	-
RDPT MNC Dana Terproteksi XIV	5.000.000.000	-
RD Insight Terproteksi Syariah II	-	3.709.677.420
Sub Pihak Ketiga	248.199.854.167	156.897.031.587
Sub Jumlah Reksadana	725.122.063.309	602.320.140.114
Efek Beragun Aset (EBA)		
Efek Beragun Aset KPR		
PT Bank Tabungan Negara		
(Persero) Tbk	20.419.547.930	21.747.084.323
Efel Beragun Aset SP SMF		
BTN 03 Kelas A Seri A2 2017	9.288.203.145	-
Jumlah Efek Beragun Aset (EBA)	29.707.751.075	21.747.084.323
Jumlah Surat Berharga Yang Dimiliki Hingga Jatuh tempo	1.665.334.878.921	1.644.517.199.686
	2017	2016

Tersedia untuk Dijual

Reksadana

Pihak Berelasi

RD BNI-AM Dana Saham Sektor/		
Saham Inspiring Equity Fund	76.844.062.750	107.414.799.949
RD ITB Harmoni BNI-AM	25.806.322.500	-
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	6.151.637.070	6.538.026.553
Saham Inspiring Equity Fund	5.643.600.000	4.963.100.000
RDPT PNM Pembiayaan Mikro		
BUMN 2012 Seri II	-	-
RD BNI-AM Dana Terencana	-	26.738.803.119
RD BNI-AM DANA Saham Sektor/		
Danareksa Mawar Konsumer	-	4.987.607.416
Jumlah Pihak Berelasi	114.445.622.320	150.642.337.037

Pihak Ketiga

RD Syailendra Dana Ekuitas Dinamis	213.651.504.360	183.324.256.807
RD Maybank Dana Obligasi Plus	155.609.289.870	144.071.492.220
RD Sucorinvest Saham Dinamis	97.912.128.233	87.189.542.425
RD Insight Green (I- Green)	57.133.944.143	50.702.896.455
RD Insight Support (I-Support)	48.460.135.519	43.764.188.112
RD CIMB-Principal Islamic Equity		
Growth Syariah	36.817.486.890	36.768.909.152
RD Maybank Dana Pasti	26.027.187.584	-
RD CIMB-Principal Indo		
Domestic Equity	19.396.753.078	17.390.351.510
RD SAM Indonesian Equity Fund	11.224.301.445	10.765.159.988
RD Insight Government Fund	10.864.989.164	-
RD Simas Saham Unggulan	10.410.869.360	9.482.196.802
RD Sucorinvest Bond Fund	10.234.859.708	-
RD MNC Dana SBN	10.071.838.511	-
RD Panin Gebyar Indonesia II	10.062.981.623	-
Total Dipindahkan	717.878.269.488	583.458.993.470

Third Parties

RD Insight Terproteksi 14	
RD Insight Terproteksi 5	
RDPT PNM Terproteksi	
Dana Investa 2	
RDPT Bahana Primera	
RDPT Bahana Primera	
Protected Fund 87	
RD Simas Gemilang	
RDPT Bahana Core Protected	
Fund 113	
RDPT Syailendra Multifinance	
RDPT MNC Dana Terproteksi XIV	
RD Insight Terproteksi Syariah II	

Sub Third Parties

Sub Total Mutual Funds

Security (Asset Underlying)

Security (Asset Underlying)	
PT Bank Tabungan Negara	
(Persero) Tbk	
Security (Asset Underlying) SP SMF	
BTN 03 Kelas A Seri A2 2017	

Total Security (Asset Underlying)

Total Held-To-Maturity Marketable Securities

Available For Sale

Mutual Funds

Related Parties

RD BNI-AM Dana Saham Sektor/	
Saham Inspiring Equity Fund	
RD ITB Harmoni BNI-AM	
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	
Saham Inspiring Equity Fund	
RDPT PNM Pembiayaan Mikro	
BUMN 2012 Seri II	
RD BNI-AM Dana Terencana	
RD BNI-AM DANA Saham Sektor/	
Danareksa Mawar Konsumer	

Total Related Parties

Third Parties

RD UGM CIMB-Principal Balanced	
RD AAA Balanced Fund	
RD Sucorinvest Saham Dinamis	
RD CIMB Princ. Balanced	
RD Insight Support (I-Support)	
RD CIMB-Principal Islamic Equity	
Growth Syariah	
RD Maybank Dana Pasti	
RD CIMB-Principal Indo	
Domestic Equity	
RD SAM Indonesian Equity Fund	
RD Insight Government Fund	
RD Simas Saham Unggulan	
RD Sucorinvest Bond Fund	
RD MNC Dana SBN	
RD Panin Gebyar Indonesia II	

Brought Forward

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan)

4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

	2017	2016	
<u>Tersedia untuk Dijual (Lanjutan)</u>			<u>Available For Sale (Continued)</u>
Reksadana			Mutual Funds
Pihak Ketiga (Lanjutan)			Third Parties (Continued)
Saklo Pindahan	717.878.269.488	583.458.993.470	Carried Forward
RD Premier ETF Indonesia			RD Premier ETF Indonesia
Sovereign Bonds	8.820.040.000	-	Sec. Rotation
RD SAM Syariah Berimbang	8.672.219.061	9.550.226.207	RD SAM Syariah Berimbang
RD Simas Syariah Unggulan	7.359.687.607	8.175.339.936	RD Simas Syariah Unggulan
RD Makara Prima	5.689.859.606	5.046.822.870	RD Makara Prima
Reksadana Bahana Mes Syariah Fund	5.584.686.469	496.310.000	Reksadana Bahana Mes Syariah Fund
RD Syailendra Equity Opportunity Func	5.205.284.851	4.340.967.600	RD Syailendra Equity Opportunity Fund
RD Panin Dana Maksima	4.834.680.582	4.697.006.263	RD Panin Dana Maksima
RD SAM Sharia Equity Fund	3.929.568.351	4.398.078.578	RD SAM Sharia Equity Fund
RD Manulife Saham SMC Plus	3.864.710.832	3.974.037.941	RD Manulife Saham SMC Plus
RD Millenium Equity	1.834.570.526	2.202.945.855	RD Millenium Equity
RD RHB Opportunity Equity	-	29.336.341.462	Strategic Plus
RD Batavia Dana Saham Optimal	-	19.447.738.515	RD Batavia Dana Saham Optimal
RD SAM Sukuk Syariah Sejahtera	-	11.286.547.734	RD SAM Sukuk Syariah Sejahtera
RD Perdana Saham I-Wealth	-	10.184.280.000	RD Perdana Saham I-Wealth
RD CIMB - Principal Balanced			RD CIMB - Principal Balanced
Growth Syariah	-	9.934.268.997	Growth Syariah
RD Simas Danamas Saham	-	9.928.003.397	RD Simas Danamas Saham
RD CIMB-Principal Equity Aggressive	-	9.285.804.341	RD CIMB-Principal Equity Aggressive
RD Insight Syariah Berimbang (I- Share)	-	5.017.632.847	RD Insight Syariah Berimbang (I- Share)
Jumlah Pihak Ketiga	773.673.577.372	730.761.346.014	Total Third Parties
Jumlah Reksadana	888.119.199.692	881.403.683.051	Total Mutual Funds
Obligasi			Bonds
Pihak Ketiga			Third Parties
Obligasi Subordinasi			Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan II Bank Bukopin			Berkelanjutan II Bank Bukopin
Tahap II Tahun 2017	21.285.040.000	-	Tahap II Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan II Medco			Obligasi Berkelanjutan II Medco
Energi International Tahap IV			Energi International Tahap IV
Tahun 2017	15.954.435.000	-	Tahun 2017
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur			Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur
Tahap I Tahun 2016 Seri B	15.361.200.000	14.853.000.000	Tahap I Tahun 2016 series B
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong			Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong
Damai Tahap II Tahun 2013	15.111.720.000	-	Damai Tahap II Tahun 2013
Obligasi I Moratelindo Tahun 2017			Obligasi I Moratelindo Tahun 2017
Seri A	10.047.070.000	-	Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN			Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN
Tahap III Tahun 2013 Seri B	5.021.115.000	-	Tahap III Tahun 2013 Seri B
Sarana Multi Griya Finance			Sarana Multi Griya Finance
Tahun 2012 Seri B	-	26.865.000.000	Year 2012 Series B
Bumi Serpong Damai Tahap II			Bumi Serpong Damai Tahap II
Tahun 2013	-	14.703.000.000	Year 2013
Bank BTPN Tahap III Tahun 2013			Bank BTPN Tahap III Year 2013
Seri B	-	5.000.000.000	Seri B
Jumlah Pihak Ketiga	82.780.580.000	61.421.000.000	Total Third Parties

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan)

4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

	2017	2016	
<u>Tersedia untuk Dijual (Lanjutan)</u>			<u>Available For Sale (Continued)</u>
Obligasi (Lanjutan)			Bond (Continued)
Pihak Berelasi			Related Parties
Obligasi Negara RI Seri PBS005	280.118.322.000	-	Obligasi Negara RI Seri PBS005
Negara RI Seri FR0072	260.806.686.000	133.000.000.000	Negara RI series FR0072
Negara RI Seri FR0068	78.362.060.000	71.400.000.000	Negara RI series FR0068
Negara RI Seri PBS012	56.371.636.464	46.462.500.000	Negara RI series PBS012
Obligasi SBSN PBS012	55.395.920.928	-	Obligasi SBSN PBS012
Negara RI Seri FR0073	46.648.840.000	42.208.000.000	Negara RI series FR0073
Obligasi Negara RI Seri FR0075	42.000.120.000	-	Obligasi Negara RI Seri FR0075
Negara RI Seri FR0074	35.320.772.168	14.467.550.000	Negara RI series FR0074
Negara RI Seri FR0065	29.263.050.000	25.800.000.000	Negara RI series FR0065
Obligasi Negara RI Seri FR0076	26.825.863.230	-	Obligasi Negara RI Seri FR0076
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B	25.643.100.000	-	Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jawa Barat dan Banten Tahap I 2017 Seri B	25.175.200.000	-	Obligasi Berkelanjutan I Bank Jawa Barat dan Banten Tahap I 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I SMI Tahap II Tahun 2017 Seri B	25.101.375.000	-	Obligasi Berkelanjutan I SMI Tahap II Tahun 2017 Seri B
Obligasi I KAI Tahun 2017 Seri A	15.187.725.000	-	Obligasi I KAI Tahun 2017 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 Seri A	14.975.205.000	-	Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 Seri A
Obligasi Negara RI Seri PBS004	13.776.912.880	-	Obligasi Negara RI Seri PBS004
Negara RI Seri FR0042	12.599.000.000	11.509.500.000	Negara RI series FR0042
Negara RI Seri FR0047	12.473.880.000	11.350.000.000	Negara RI series FR0047
Negara RI Seri FR0052	12.928.280.000	12.165.000.000	Negara RI series FR0052
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B	10.544.860.000	-	Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B
Berkelanjutan II Pengadaan Tahap II Tahun 2014 SERI C	10.403.980.000	10.046.990.000	Berkelanjutan II Pengadaan Tahap II Tahun 2014 series C
Obligasi I KAI Tahun 2017 Seri B	10.146.480.000	-	Obligasi I KAI Tahun 2017 Seri B
Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013	9.813.310.000	9.801.000.000	Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013 Tahun 2013
Negara RI Seri FR0064	9.740.970.000	8.530.800.000	Negara RI series FR0064
Antam Seri A Tahun 2011	6.063.348.000	6.003.000.000	Antam Series A Year 2011
Obligasi SBSN PBS011	5.584.420.000	-	Obligasi SBSN PBS011
Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D	4.037.896.000	3.894.000.000	Perum Pegadaian Year 2012 Series D
Negara RI Seri FR0059	2.796.880.500	2.491.875.000	Negara RI series FR0059
Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri B	1.976.286.000	1.944.600.000	Obligasi I PP Properti Tahun 2016 series B
Berkelanjutan I adhi Tahap II Tahun 2013 SERI B	-	6.003.000.000	Berkelanjutan I adhi Tahap II Tahun 2013 series B
SBSN SERI PBS012	-	30.715.230.000	SBSN SERI PBS012
Jumlah Pihak Berelasi	1.140.082.379.170	447.793.045.000	Total Related Parties
Jumlah Obligasi	1.222.862.959.170	509.214.045.000	Total Bonds

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan)

	2017	2016
Tersedia untuk Dijual (Lanjutan)		
Saham		
Pihak Ketiga		
PT Dua Putra Utama Makmur	45.490.891.400	80.509.059.600
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	7.011.250.000	9.539.250.000
PT Pakuwon Jati Tbk	6.460.000.000	5.650.000.000
PT Kalbe Farma Tbk	5.055.000.000	9.090.000.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	2.710.000.000	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.212.500.000	3.101.724.000
PT Unilever Indonesia Tbk	-	5.369.920.000
PT AKR Corporindo Tbk	-	1.011.500.000
Sub Jumlah Pihak Ketiga	70.939.641.400	114.271.453.600
Pihak Berelasi		
PT GMF Aero Asia (Tbk)	51.213.900.000	-
PT Telekomunikasi Indonesia	14.208.000.000	7.543.000.000
PT Wijaya Karya Gedung Tbk	13.026.000.000	-
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	11.385.000.000	10.302.900.000
PT PP Presisi Tbk	9.441.854.800	-
PT Waskita Karya Tbk	8.800.000.000	10.160.000.000
PT Waskita Beton Precast Tbk	8.526.000.000	2.087.250.000
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.050.000.000	-
PT PP (Persero) Tbk	6.457.776.000	5.930.592.000
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	5.635.000.000	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.492.500.000	6.249.931.000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.945.000.000	2.066.180.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.408.100.000	3.726.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	8.525.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2.310.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	817.250.000
Sub Jumlah Pihak Berelasi	144.589.130.800	59.718.103.000
Jumlah Saham	215.528.772.200	173.989.556.600
Jumlah Surat Berharga Yang Dimiliki Untuk Dijual	2.326.510.931.062	1.564.607.284.651
Efek Beragun Aset (EBA)		
Efek Beragunan Aset Mandiri JSMR01 Kelas A	25.309.075.000	-
Efek Beragunan Aset Danareksa IP PLN I Tahun 2017	8.706.362.382	-
Jumlah Efek Beragun Aset (EBA)	34.015.437.382	-
Jumlah Surat Berharga	4.025.861.247.365	3.209.124.484.337

4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

Available For Sale (Continued)

Shares
Third Parties
PT Dua Putra Utama Makmur
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk
PT Kalbe Farma Tbk
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT AKR Corporindo Tbk
Sub Total Third Parties

Related Parties

PT GMF Aero Asia (Tbk)
PT Telekomunikasi Indonesia
PT Wijaya Karya Gedung Tbk
PT Semen Gresik (Persero) Tbk
PT PP Presisi Tbk
PT Waskita Karya Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk
PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Sub Total Related Parties

Total Shares

**Total Marketable Securities
Available for Sale**

Security (Asset Underlying)

Security (Asset Underlying) Mandiri JSMR01 Kelas A
Security (Asset Underlying) Danareksa IP PLN I Tahun 2017

Total Security (Asset Underlying)

Total Marketable Securities

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan)

4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

Jatuh Tempo	Kupon / Coupon	Rating / Rate	Jatuh Tempo / Maturity Date	Held-To-Maturity
Obligasi				Bonds
Obligasi Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B	9,05%	A	14 Desember 2021	Obligasi Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B
Obligasi I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	9,25%	A	26 Juni 2018	Obligasi I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013
Obligasi I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014	12,25%	A	06 Juni 2019	Obligasi I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014
Obligasi Bukopin Tahap I Tahun 2012	9,25%	A+	06 Maret 2019	Obligasi Bukopin Tahap I Tahun 2012
Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013	9,75%	AAA	20 Nopember 2018	Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013
Obligasi Berkelanjutan II BTPN Tahap I Tahun 2013 Seri B	8,25%	AA+	04 Juli 2018	Obligasi Berkelanjutan II BTPN Tahap I Tahun 2013 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013	9,25%	BBB+	05 Juli 2018	Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013
Obligasi Wajib Konversi Reindo Tahun 2014	12,00%	A+	31 Desember 2017	Obligasi Wajib Konversi Reindo Tahun 2014
Obligasi II PNM Tahun 2013	9,20%	A	09 Juli 2018	Obligasi II PNM Tahun 2013
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Seri B	9,25%	AA+	07 Mei 2018	Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D	8,00%	AA+	09 Juli 2020	Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A	8,00%	AAA	05 Juli 2020	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A
Obligasi I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60%	AAA	10 Desember 2023	Obligasi I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I PT PTPN X Tahun 2013	8,90%	BBB+	05 Juli 2018	Obligasi Berkelanjutan I PT PTPN X Tahun 2013
Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C	9,50%	A-	28 Juni 2020	Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C
MTN 1 RNI Tahun 2017	9,75%	A-	13 April 2020	MTN 1 RNI Tahun 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	8,00%	AAA (sy)	05 Juli 2020	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
Obligasi I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013	10,85%	A+	11 Desember 2018	Obligasi I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A	9,93%	AAA	23 Juni 2022	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0044	10,00%	BBB+	15 September 2024	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0044
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058	8,25%	BBB+	15 Juni 2032	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	8,38%	BBB+	15 Maret 2034	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	8,38%	BBB+	15 Maret 2034	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	8,38%	BBB+	15 Maret 2024	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	8,38%	BBB+	15 Maret 2024	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9,00%	BBB+	15 Maret 2029	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	8,75%	BBB+	15 Mei 2031	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	8,25%	BBB+	15 Mei 2036	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012	8,87%	BBB+	15 Nopember 2031	Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN

	2017
Piutang IJP/IJK KUR	
Piutang IJP/ IJK KUR	1.304.389.738.431
Piutang IJP/ IJK KUR Kepada Bank	1.179.756.847.279
Jumlah Piutang IJP/IJK KUR	2.484.146.585.710
 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	 (11.771.789.372)
 Jumlah Piutang IJP/IJK KUR	 2.472.374.796.338
 Piutang IJP/IJK Eksisting	
Piutang IJP/IJK Existing	
Non Program	2.379.423.897
Piutang IJP Existing Program	-
Jumlah Piutang IJP/IJK Eksisting	2.379.423.897
 Jumlah Piutang Imbal Jasa Penjaminan	 2.474.754.220.235

Piutang IJP KUR merupakan tagihan Perusahaan kepada Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008. Imbal Jasa Penjaminan dibayar oleh Pemerintah dengan tarif imbal jasa penjaminan sebesar 1,5% dan coverage sebesar 70% untuk kredit yang akadnya sebelum 14 Februari 2010. Untuk kredit yang akadnya setelah 14 Februari 2010 tarif imbal jasa penjaminan sebesar 3,25% pertahun dengan coverage sebesar 70%-80% sesuai PMK No.189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010.

Berdasarkan berita acara verifikasi tagihan imbalan jasa penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 19 Desember 2016, untuk periode penagihan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016 jumlah tagihan IJP KUR sebesar Rp36.046.953.884.

Hal-hal yang menyebabkan belum diverifikasinya IJP tersebut adalah sebagai berikut:

- Perpindahan KPA KUR dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM;
- Terbitnya PMK No. 190/PMK.05/2014 perihal Tata Cara Pelaksanaan IJP KUR tanggal 01 Oktober 2014.

Pada PMK 190 pasal 18 menyatakan bahwa dengan berlakunya PMK 190 maka PMK mengenai KUR sebelumnya yaitu PMK 135/PMK.05/2008 dan perubahan yang mengikutinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai besaran IJP KUR.

Telah dilaksanakan rapat Ekspose dan Pembahasan Kriteria Verifikasi IJP KUR Tahap II/2014 Pada tanggal 12 November 2014 antara KPA Kemenkop, SMI Kemenkeu, Perusahaan Penjamin dan BPKP (Verifikator), terdapat beberapa pembahasan terkait pasal-pasal didalam PMK 190 yang masih perlu dibahas lebih lanjut antara lain:

- Pasal 4 dan 16, Perjanjian Kerjasama Penjaminan (PKP) perlu segera direvisi terkait dengan perpindahan KPA.
- Draft PKP Perum Jamkrindo telah disampaikan kepada KPA dan masih dibahas di KPA.
- Pasal 10, Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan BPKP mengacu Pada kriteria yang disepakati antara KPA dan BPKP dan SOP yang ditetapkan oleh KPA. Terkait dengan butir ini maka BPKP baru akan melakukan verifikasi setelah ada SOP dari KPA dan disepakatinya kriteria verifikasi.
- SOP masih dalam proses pembahasan di KPA (Kementerian Koperasi dan UKM).

5. GUARANTEE RECEIVABLES

	2016	
		KUR Guarantee Receivables
	1.163.792.419.705	Guarantee Receivables - KUR
	1.183.380.342.322	KUR Guarantee Receivables - Bank
	2.347.172.762.027	Total KUR Guarantee Receivables
 Allowance for Impairment Losses	 (8.495.783.538)	
 Total KUR Guarantee Receivables	 2.338.676.978.489	
		Existing Guarantee Receivables
		Existing Guarantee Receivables
	3.333.160.893	Non-Program
	5.015.284.439	Existing Guarantee Receivables Program
	8.348.445.332	Total Existing Guarantee Receivables
 Total Guarantee Receivables	 2.347.025.423.821	

KUR IJP receivables represent receivables to the Government in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 135/PMK.05/2008 dated 24 September 2008. Return Guarantee Services paid by the Government to guarantee compensation rates at 1.5% and the coverage is 70% for credit agreement before February 14, 2010. For credit agreement after February 14, 2010 underwriting compensation rates by 3.25% per year with coverage of 70% -80% according PMK No.189/PMK.05/2010 On November 2, 2010.

Based on the verification memorandum of KUR guarantee fee dated December 19, 2016, the billing of KUR guarantee fee period Oktober 2015 until March 2016 is amounted to Rp36,046,953,884.

The things that cause Guarantee Fee has not been verified yet are as follows:

- KUR KPA displacement of the Ministry of Finance to the Ministry of Cooperatives and SMEs;
- Publication of PMK No. 190/PMK.05/2014 concerning the Implementation of the IJP KUR dated October 1, 2014.

PMK 190 Article 18 states that with the validity of the PMK 190, then the PMK about previous KUR, that is PMK No.135/PMK.05/2008 and the changes that followed repealed and declared not applicable unless the provisions regarding the amount of KUR IJP.

Exposure meeting and discussions of Criteria Verification KUR STM Phase II / 2014 hae been held in November 12, 2014 between KPA Kemenkop, SMI Kemenkeu, Guarantee company and BPKP (Verifikator). There are some issues in PMK 90 that need to discuss:

- Article 4 and 16, Guarantee Cooperation Agreement (PKP) needs to be revised associated with the transfer of the KPA.
- Draft Perum Jamkrindo PKP has been submitted to the KPA and is still being discussed in the NAC.
- Article 10, The verification that has been done by BPKP referring to agreed criteria between the KPA and BPKP, and SOPs that assigned by KPA. Related to this point, the new BPKP will verify after the SOP of the KPA and the agreement on verification criteria.
- SOP is still in the process of discussion at the KPA (Ministry of Cooperatives and SMEs).

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG

	2017	2016
Piutang Co-Guarantee :		
- PT Asuransi Syariah Mubarakah	60.884.628.596	60.884.628.596
- PT Heksa Eka Life Insurance	58.562.700.167	43.705.693.362
- PT Asuransi Beringin Sejahtera		
Artamakmur	41.559.873.909	13.070.398.215
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	28.418.115.225	47.875.227.784
- PT Jamkrindo Syariah	5.663.525.788	1.156.155.406
- PT Asuransi Jiwasraya	287.132.230	17.734.702.370
- PT Asuransi Bringin Sejahtera	137.505.561	-
Jumlah Piutang Co-Guarantee	195.513.481.476	184.426.805.734
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
- PT Asuransi Syariah Mubarakah	(60.884.628.596)	(60.884.628.596)
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	(6.836.744.578)	(757.661.003)
- PT Heksa Eka Life Insurance	(15.670.119.570)	(14.329.343.424)
Jumlah Cadangan Kerugian		
 Penurunan Nilai	(83.391.492.745)	(75.971.633.023)
Total Piutang Co-Guarantee	112.121.988.731	108.455.172.710
Piutang Re-Asuransi :		
- PT Re-asuransi Internasional		
Indonesia	4.293.064.088	310.264.489
- PT Re-asuransi Nasional Indonesia	2.427.915.729	3.580.369.939
- PT Igna Asia	1.689.427.526	-
Jumlah Piutang Re-Asuransi	8.410.407.343	3.890.634.429
Total Piutang Penjaminan Ulang	120.532.396.074	112.345.807.139

Piutang Co-Guarantee kepada PT Heksa Eka Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra Co-Guarantee atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan.

Perusahaan bekerjasama dengan mitra Co-Guarantee untuk kredit multiguna dan mikro untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meningkatnya terjamin.

Untuk menghindari tertunggaknya pembayaran Piutang dari mitra Co-Guarantee, sejak tahun 2011 telah ditambahkan ketentuan baru dalam perjanjian kerja sama dengan mitra Co-Guarantee yaitu perusahaan akan memotong pembayaran premi Co-Guarantee maksimal sebesar 50% dari premi Co-Guarantee sebesar 60% dari IJP/IJK yang menjadi hak mitra Co-Guarantee apabila saldo Piutang Co-Guarantee di atas kewajiban, yang dihitung 3 kali dari rata-rata pengajuan pembayaran klaim dalam 1 tahun terakhir atau dengan perhitungan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan mitra Co-Guarantee.

Perjanjian kerjasama terbaru dengan mitra Co-Guarantee sebagai berikut:

- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM) No:37/Jamkrindo/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

6. RE-GUARANTEE RECEIVABLES

Co-Guarantee Receivable:	
PT Asuransi Syariah Mubarakah	-
PT Heksa Eka Life Insurance	-
PT Asuransi Beringin Sejahtera	-
Artamakmur	-
PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	-
PT Jamkrindo Syariah	-
PT Asuransi Jiwasraya	-
PT Asuransi Bringin Sejahtera	-
Total Co-Guarantee Receivables	
Allowance for Impairment Losses	
PT Asuransi Syariah Mubarakah	-
PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	-
PT Heksa Eka Life Insurance	-
Total Allowance for Impairment Loss	
Total Co-Guarantee Receivable	
Re-Insurance Receivable	
PT Re-asuransi Internasional	-
Indonesia	-
PT Re-asuransi Nasional Indonesia	-
PT Igna Asia	-
Total Re-Insurance Receivable	
Total Re-Guarantee Receivable	

Co-guarantee receivables to PT Heksa Eka Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya are reimbursement of claims billed to Co-Guarantee partners for the payment of claims have been paid by the Company.

The company cooperates with Co-Guarantee partners for a multipurpose and micro credit to transfer the risk of claims resulting from the death of the assured.

To avoid the payment of delinquent receivables from Co-Guarantee partners, since 2011 has been added a new provision in the agreement of cooperation with Co-Guarantee partners that the company will cutoff the premium Co. Guarantee a maximum of 50% of the premium Co. Guarantee for 60% of the IJP / IJK the Guarantee Co partner right when the balance in the Accounts Receivable Guarantee Co. fairness, which is calculated 3 times of the average filing claims payments in the last 1 year or with other calculations agreed by the company and partner Co. Guarantee.

New cooperation agreements with partner Co-Guarantee as follows:

- A cooperation agreement with PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM) No: 37 / Jamkrindo / VI / 2012 dated June 27, 2012 regarding the Closure of Credit Life Insurance For Debtor Banks / Financial Institutions Other Receivers Credit / Financing Multiguna.

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

- Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat No. 36/Pdt-Sus/pailit/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 6 September 2016 menyatakan PT Asuransi Syariah Mubarakah Pailit dengan Segala Akibat Hukumnya dan Surat Tim Kurator PT Asuransi Syariah Mubarakah No. 02/TK-CDS/Pailit-ASM/IX/16 tanggal 13 September 2016 perihal Undangan Rapat Kreditur PT Asuransi Syariah Mubarakah (Dalam Pailit).
- Perjanjian kerjasama dengan PT Heksa Eka Life Insurance No. 06/Jamkrindo/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna yang diaddendum dengan perjanjian kerjasama No. 33/Jamkrindo/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.01/Jamkrindo/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, yang kemudian diaddendum lagi dengan perjanjian kerjasama No.38/Jamkrindo/V/2013 – PKS.008/HELI/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, dan terakhir diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.06/Jamkrindo/II/2014 – PKS.003/HELI/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.
- Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur No. 01/Jamkrindo/OP-04/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Penjaminan Bersama (Co-Guarantee) Bagi Debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penerima Kredit Kupedes Rakyat.
- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin No. 4/Jamkrindo/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.02/Jamkrindo/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.39/Jamkrindo/V/2013 – 0011/PKS-AL AMIN/DIR/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.05/Jamkrindo/II/2014 – 006/PKS-AL AMIN/DIR/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna. kemudian diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.07/Jamkrindo/OP-01/II/2015 – 010/PKS-AL AMIN/DIR/II/2015 tanggal 23 Februari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

6. REGUARANTEE RECEIVABLE (Continued)

- Based on Decision of the Central Jakarta District Court No. 36 / Pdt-Sus / bankrupt / 2016 / PN.NIAGA.JKT.PST dated September 6, 2016 stated PT Asuransi Syariah Mubarakah bankrupt with all its legal consequences and letter of receiver team of PT Asuransi Syariah Mubarakah No. 02 / TK-CDS / Bankrupt-ASM / IX / 16 dated September 13, 2016 concerning Invitation to the Meeting of Creditors of PT Asuransi Syariah Mubarakah (In Bankruptcy).
- Cooperation agreement with PT Heksa Eka Life Insurance No.: 06/Jamkrindo/II/2012 date February 28,2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose that has been addendum with cooperation agreement No.: 33/Jamkrindo/V/2012 date May 24, 2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 01/Jamkrindo/II/2013 date January 15, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No. 38/Jamkrindo/V/2013 - PKS.008/HELI/V/2013 date May 17, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, and last that has been addendum with cooperation agreement No.: 06/Jamkrindo/II/2014 - PKS.003/HELI/II/2014 date February 07, 2014 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.
- Cooperation Agreement with PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur. 01 / Jamkrindo / OP-04 / III / 2016 dated March 30, 2016 concerning Co-Guarantee for Debtor of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Credit Receiver Kupedes Rakyat.
- Cooperation agreement with PT Asuransi Jiwa Sharia Al-Amin No.: 4/Jamkrindo/II/2012 date January 31, 2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 02/Jamkrindo/II/2013 date January 15, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No. 39/Jamkrindo/V/2013 - 011/PKS-AL AMIN/DIR/V/2013 date May 17, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 05/Jamkrindo/II/2014 - 006/PKS-AL AMIN/DIR/II/2014 date February 07, 2014 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.that has been addendum with cooperation agreement No.: 07/Jamkrindo/OP-01/II/2015 - 010/PKS-AL AMIN/DIR/II/2015 date February 28, 2015 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya No.07/Jamkrindo/II/2014 -035.SJ.U.0214 tanggal 07 Februari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna dan tahun 2015 diadendum dengan perjanjian kerjasama No.08/Jamkrindo/OP-01/II/2015 -025a.SJU.0215 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.
- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Bina Griya Upakara No.54/Jamkrindo/VI/2014 - 15/PKS/DIR-BINAGRIYA/062014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penempatan Asuransi Kebakaran Rumah Tinggal Bagi Nasabah Bank Yang Dibiayai Dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Bina Griya Upakara No.14/Jamkrindo/OP02VI/2014 -PKS.014-DIR/MKT/06/2015 tanggal 04 Juni 2015 tentang Santunan Asuransi Kebakaran atas Produk Penjaminan Kredit Kreasi PT Pegadaian (Persero).

Pada akhir tahun 2013 dengan tidak tercapainya kesepakatan mengenai pokok-pokok pembaharuan PKS Penjaminan Bersama KUR, sehingga para pihak menyetujui pengakhiran kerja sama penjaminan bersama KUR. Dengan diakhirinya kerja sama penjaminan bersama KUR, hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tetap harus diselesaikan oleh kedua belah pihak untuk akseptasi atas IJP, Klaim dan Subrogasi KUR bank konvensional tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013.

Piutang Re-Asuransi kepada Perusahaan Re-asuransi adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra Re-Asuransi atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan. Perusahaan bekerjasama dengan mitra Re-asuransi untuk semua jenis kredit untuk mengalihkan sebagian risiko klaim.

Dalam kerja sama dengan re-asuransi digunakan metode *treaty*. Metode *treaty* merupakan perjanjian pertanggungan ulang otomatis secara tahunan antara Perusahaan Penjamin dan Re-asuransi dengan kondisi yang disepakati bersama dalam negosiasi *treaty*.

Kerjasama dengan perusahaan Re-asuransi dilakukan melalui perusahaan pialang dengan PKS sebagai berikut:

- PKS antara Perum Jamkrindo dengan PT Re-asuransi Nasional Indonesia dan PT Re-asuransi Internasional Indonesia No. 27/Jamkrindo/OP-01/IV/2016 - 311/DIR/NR/IV/2016-00141/HK.01.01/00/ReINDO/4/2016 tanggal 29 April 2016.

6. REGUARANTEE RECEIVABLES (Continued)

- *Cooperation agreement invitation PT BNI Life Insurance No.07 / Jamkrindo / II / 2014 dated 07 February 2014 -035.SJ.U.0214 about Closing Credit Life Insurance For Debtor Banks / Financial Institutions Other Receivers Credit / Financing Multipurpose and 2015 updated with agreement cooperation No.08 / Jamkrindo / OP-01 / II / 2015 dated February 23, 2015 -025a.SJU.0215 about Credit Life Insurance Closure For Debtor Banks / Financial Institutions Other Receivers Credit / Financing Multiguna.*
- *Cooperation agreement with PT Asuransi Bina Griya Upakara No. : 54/Jamkrindo/VI/2014 - 15/PKS/DIR-BINAGRIYA/062014 date June 26, 2014 about Fire Insurance Placement House Live For Customer Bank Financed With Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) .*
- *Cooperation agreement invitation PT Asuransi Bina Griya Upakara 14 / Jamkrindo / OP02VI / 2014 -PKS.014-DIR / MKT / 06/2015 dated June 4, 2015 on Compensation Insurance Products Credit Guarantee Fire on Creative PT Pegadaian (Persero).*

At the end of 2013 because of disagreement about renewal points of that agreement, so the parties agreed to the end agreement. By the end of the agreement, unfinished rights and obligations must be done by both parties to accept the IJP, claims, and subrogations in 2010, 2011, 2012, and 2013.

Re-Insurance Receivable to Company Indonesian National Re-insurance is reimbursement payments charged to the partners claim for payment of Re-Insurance claims paid by the Company. Re-insurance companies collaborate with partners for all types of credit to shift some of the risk of claims.

In cooperation with the insurance partner treaty methods is being used. Treaty method is an annually automatic re-guarantee agreement and re-insurance partner with the condition agreed concerning treaty negotiation.

Cooperation with companies is done through a re-insurance brokerage firm with PKS as follows:

- *Cooperation Agreement between Perum Jamkrindo with PT Re-asuransi Nasional Indonesia and PT Re-asuransi Internasional Indonesia No. 27 / Jamkrindo / OP-01 / IV / 2016-311 / DIR / NR / IV / 2016-00141 / HK.01.01 / 00 / ReINDO / 4/2016 dated 29 April 2016.*

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

Treaty antara Perum Jamkrindo dan PT Re-asuransi Nasional Indonesia dan PT Re-asuransi Internasional Indonesia, terdiri dari :

- 1) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Multiguna Tahun 2016;
- 2) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Umum Tahun 2016;
- 3) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Mikro Tahun 2016;
- 4) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016;
- 5) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Bank Garansi Tahun 2016;
- 6) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Distribusi Barang Tahun 2016;
- 7) *Quota Share Re-insurance Treaty Surety Bond* Tahun 2016.

Perubahan penyisihan atas Piutang *Co-Guarantee* adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo Awal Tahun	75.971.633.023	61.894.660.227
Penambahan Cadangan	7.419.859.721	14.076.972.796
Pengurangan Cadangan	-	-
Saldo Akhir	83.391.492.744	75.971.633.023

7. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

	2017	2016
Pihak Ketiga		
Piutang Pinjaman Bagi Hasil	17.168.237.689	17.268.238.019
Pihak Berelasi		
Piutang kepada Koperasi Pegawai	814.557.996	994.557.996
Piutang Pinjaman Bagi Hasil	-	-
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan	17.982.795.685	18.262.796.015
Pihak Ketiga		
Penyisihan kerugian nilai pinjaman bagi hasil	(16.880.570.570)	(16.981.738.070)
Pihak Berelasi		
Penyisihan kerugian nilai pinjaman koperasi pegawai	(325.891.583)	(325.891.583)
Penyisihan kerugian nilai pinjaman bagi hasil	-	-
Jumlah penyisihan penurunan nilai	(17.206.462.153)	(17.307.629.653)
Jumlah Pinjaman Yang diberikan Bersih	776.333.533	955.166.363

Piutang Pinjaman Bagi Hasil adalah penyediaan uang/dana oleh Perusahaan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pinjaman bagi hasil antara Perusahaan dengan nasabah yang mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan imbalan bagi hasil yang dihitung dari nilai nominal atau target IRR tertentu. Piutang Pinjaman bagi Hasil diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan No. 42/DIR/IX/2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tidak lagi menyalurkan pinjaman bagi hasil baru.

6. REGUARANTEE RECEIVABLES (Continued)

Treaty between Perum Jamkrindo and PT Indonesian National Re-insurance and PT Re-asuransi Internasional Indonesia, consisting of:

- 1) *Quota Share Re-insurance Treaty of Multiguna Credit Guarantee Year 2016;*
- 2) *Quota Share Re-insurance Treaty of General Credit Guarantee Year 2016;*
- 3) *Quota Share Re-insurance Treaty of Micro Credit Guarantee Year 2016;*
- 4) *Quota Share Re-insurance Treaty of procurement and contruction;*
- 5) *Quota Share Re-insurance Treaty of goods distribution Guarantee Year 2016;*
- 6) *Quota Share Re-insurance Treaty of General Credit Guarantee Year 2016;*
- 7) *Quota Share Re-insurance Treaty of surety bond Year 2016.*

The changes in allowance for Co-Guarantee Receivable is as follows:

*Beginning Balance of The Year
additional Reserves
Reduction in Reserves
Ending Balance*

7. LOANS

Third Parties
Profit Sharing Loan
Related Parties
Employee Cooperative Receivable
Profit Sharing Loan
Total Loans
Third Parties
Profit Sharing Loan for Impairment Losses
Related Parties
Employee Cooperative Receivable for Impairment Losses
Profit Sharing Loan for Impairment Losses
Total Allowance for Impairment Losses
Total Net Loans

Profit Sharing Loan Receivable is the provision of money / funds by the Company to customers under Profit Sharing Loan agreements between the Company with customers who require the customer to repay the debt after a certain period in return for taking into account the results calculated from the nominal value or a specific target IRR. Profit Sharing Loan Receivable regulated in The Decree of Company's Board of Directors No.42/DIR/IX/2001. Based on Government Regulation Number 41 of 2008 and Presidential Regulation Number 2 of 2008, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia are not distributed new Profit Sharing Loan.

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Pinjaman bagi hasil dengan kategori lancar ditetapkan sebagai pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai dan tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Terhadap Piutang bagi hasil yang mengalami penurunan nilai namun Perusahaan tidak dapat memperoleh komitmen pembayaran dari para debitur, maka nilai wajar Piutang bagi hasil ditetapkan nihil. Dengan demikian CKPN yang dibentuk sebesar 100% dari nilai tercatat.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

7. LOANS (Continued)

Profit Sharing Loan with current category defined as loans that are not impaired and no impairment loss reserves established.

For profit sharing loan receivables are impaired but the Company can not obtain payment from the debtor's commitments, the fair values of accounts receivable is set to nihil. Thus allowance for impairment losses formed at 100% of the carrying value.

Management considers that allowance for impairment losses have been adequate to cover losses that may arise from uncollectible loans.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	2017
Piutang Pendapatan Bunga Obligasi	26.545.584.804
Piutang Lainnya	26.253.252.558
Piutang Pendapatan Komisi	17.920.349.773
Piutang Pendapatan Bunga Reksadana	8.858.217.232
Piutang Pendapatan Bunga Deposito	5.685.252.014
Piutang kepada Pegawai	1.585.579.016
Piutang Pendapatan EBA	630.720.801
Piutang kepada Penyewa Gedung	412.639.989
Jumlah Piutang Lain-lain	87.891.596.187

Piutang pendapatan bunga deposito terdiri dari deposito eksisting dan deposito dana KUR.

Piutang pendapatan reksadana merupakan pendapatan reksadana KUR.

Piutang pendapatan bunga obligasi merupakan pendapatan bunga obligasi KUR.

Piutang sewa gedung merupakan tagihan sewa gedung kepada penyewa dan Piutang kepada penyewa gedung merupakan tagihan atas pemakaian telepon oleh penyewa.

Piutang kepada pegawai merupakan tagihan atas akses klaim asuransi kesehatan kepada karyawan dan tagihan atas bantuan uang muka.

Piutang lainnya merupakan rincian Piutang cabang-cabang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Piutang tersebut diatas.

8. OTHER RECEIVABLES

	2016	
	13.552.620.379	<i>Bonds Interest Income Receivable</i>
	28.126.017.015	<i>Others Receivable</i>
	8.537.973.178	<i>Comission Income Receivable</i>
	6.934.190.333	<i>Mutual Fund Interest Income Receivable</i>
	20.231.338.133	<i>Time Deposit Interest Income Receivable</i>
	3.641.441.223	<i>Receivable to Employee</i>
	-	
	704.196.986	<i>Receivable to Tenant Building</i>
Total Other Receivable	81.727.777.247	

Deposit interest income receivable consists of existing deposits and deposits KUR fund.

Mutual fund interest income receivable is interest income KUR mutual fund.

Bond interest income receivable is interest income KUR bonds.

Building Rent Receivable is claim of builing rent to tenant and Receivable to Tenant Building is claim of telephone charges.

Receivables to employee is billed for the excess to the employee health insurance claims and bills for payment assistance.

Other receivables are detailed receivables of the branches that can not be classified as receivables mentioned above.

9. PREMI DAN FEE DIBAYAR DIMUKA

	2017
Premi Co-Guarantee	505.495.314.284
Premi Re-Asuransi	322.510.422.682
Fee Agent	177.614.685.226
Fee Based Income	126.680.016.798
Jumlah Premi dan Fee Dibayar Dimuka	1.132.300.438.990

Beban Premi Co-Guarantee dan Fee Based Income dibayar dimuka diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP).

Beban dibayar dimuka co-guarantee merupakan Pembayaran Premi tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra co-guarantee yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

9. PREPAID PREMIUM AND FEES

	2016	
	475.078.991.985	<i>Co-Guarantee Premium</i>
	244.433.587.546	<i>Re-Insurance Premium</i>
	170.525.965.368	<i>Fee Agent</i>
	101.114.477.174	<i>Fee Based Income</i>
Total Prepaid Premium and Fees	991.153.022.073	

Premiums Co-Guarantee Expenses and Prepaid Fee Based Income are recognized over the term of the guarantee and allocated by month issuance of Certificate of Guarantee (SP).

Prepaid expenses co-guarantee is premium payments of the current year and years ago to co-guarantee partners that will be due in the coming years.

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

9. PREMI DAN FEE DIBAYAR DIMUKA (Lanjutan)

Beban dibayar dimuka re-asuransi merupakan Pembayaran Premi tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra re-asuransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Beban dibayar dimuka *fee bank (fee based income)* merupakan pembayaran *fee bank* tahun berjalan dan tahun-tahun lalu penerima jaminan yang akan menjadi beban di tahun-tahun

Beban dibayar dimuka *fee agen* merupakan pembayaran *fee agen* tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra agen yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

9. PREPAID PREMIUM AND FEES (Continued)

Prepaid expenses re-insurance is premium payments of the current year and years ago to re-insurance partners that will be due in the coming years.

Prepaid expenses fee bank (fee based income) is fee bank payments of the current year and years ago to the insured partners that will be due in the coming years.

Prepaid expenses agent fee is agent fee payments of the current year and years ago to the agent partners that will be due in the coming years.

10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	2017	2016
Beban Operasi	12.697.966.550	1.364.093.200
Uang Muka Supplier	5.311.827.868	5.469.142.539
Beban SDM	1.921.583.447	1.880.528.517
Beban Umum	1.758.210.335	16.305.991.981
Jumlah Beban Dibayar Dimuka	21.689.588.201	25.019.756.237

*Operating Expense
Supplier Prepaid Taxes
Human Resource Expense
General Expense
Total Prepaid Expense*

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat sewa bangunan, asuransi dan premi pensiun sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

10. PREPAID EXPENSES

Expenses are allocated according to the useful life of each cost with a straight-line method. The useful life of building rent, insurance and pension premiums in accordance with the term of the contract or policy.

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

	2017			
	Saldo Awal 1 Januari 2017 / <i>Beginning Balance January 1, 2017</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir 31 Desember 2017/ <i>Ending Balance December 31, 2017</i>
Biaya Perolehan (Cost)				
Tanah (<i>Land</i>)	291.688.000.001	11.004.445.155	-	302.692.445.156
Bangunan Kantor (<i>Buildings</i>)	84.461.201.446	15.309.866.675	-	105.366.496.861
Perumahan Dinas (<i>Houses</i>)	5.980.636.284	-	-	5.980.636.284
Kendaraan Bermotor (<i>Vehicles</i>)	32.857.171.236	10.540.314.695	-	43.397.485.931
Inventaris Kantor (<i>Office Equipment</i>)	68.940.276.723	10.693.428.321	-	79.633.705.044
Inventaris Rumah Dinas (<i>House Equipment</i>)	1.928.256.073	222.926.542	-	2.151.182.615
Bangunan Dalam Penyelesaian/ <i>Contruction on Progress</i>	5.595.428.740	-	-	-
Jumlah Biaya Perolehan (Total cost)	491.450.970.503	47.770.981.387	-	539.221.951.891

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

2017

	Saldo Awal 1 Januari 2017/ <i>Beginning Balance</i> <i>January 1, 2017</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Disposals</i>	Penyesuaian dan Reklasifikasi / <i>Adjustment and</i> <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir 31 Desember 2017/ <i>Ending Balance</i> <i>December 31, 2017</i>
Akumulasi Penyusutan (Accumulated Depreciation)					
Bangunan Kantor (<i>Buildings</i>)	(3.141.535.531)	(2.359.577.016)	-	-	(5.501.112.547)
Perumahan Dinas (<i>Houses</i>)	(117.228.200)	(323.674.897)	-	-	(440.903.097)
Kendaraan Bermotor (<i>Vehicles</i>)	(14.331.787.769)	(4.583.015.613)	-	-	(18.914.803.382)
Inventaris Kantor (<i>Office Equipment</i>)	(30.304.828.553)	(11.153.573.596)	-	-	(41.458.402.149)
Inventaris Rumah Dinas (<i>House Equipment</i>)	(1.560.197.529)	(177.312.159)	-	-	(1.737.509.688)
Total Akumulasi Penyusutan (<i>Total Accumulated</i> <i>Depreciation</i>)	(49.455.577.582)	(18.597.153.281)	-	-	(68.052.730.863)
Nilai Buku (<i>Book Value</i>)	441.995.392.921				471.169.221.028

2016

	Saldo Awal 1 Januari 2016 / <i>Beginning Balance</i> <i>January 1, 2016</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Disposals</i>	Penyesuaian dan Reklasifikasi / <i>Adjustment and</i> <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir 31 Desember 2016 / <i>Ending Balance</i> <i>December 31, 2016</i>
Biaya Perolehan (<i>Cost</i>)					
Tanah (<i>Land</i>)	279.166.000.000	12.522.000.001	-	-	291.688.000.001
Bangunan Kantor (<i>Buildings</i>)	74.484.000.000	9.977.201.446	-	-	84.461.201.446
Perumahan Dinas (<i>Houses</i>)	5.695.000.000	285.636.284	-	-	5.980.636.284
Kendaraan Bermotor (<i>Vehicles</i>)	38.090.590.033	5.437.282.382	10.670.701.179	-	32.857.171.236
Inventaris Kantor (<i>Office Equipment</i>)	43.807.700.995	25.132.575.728	-	-	68.940.276.723
Inventaris Rumah Dinas (<i>House Equipment</i>)	1.629.834.689	298.421.384	-	-	1.928.256.073
Bangunan Dalam Penyelesaian/ <i>Contruction on Prograss</i>	-	5.595.428.740	-	-	5.595.428.740
Total Biaya Perolehan (<i>Total Cost</i>)	442.873.125.717	59.248.545.965	10.670.701.179	-	491.450.970.503
Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)					
Bangunan Kantor (<i>Buildings</i>)	-	(3.141.535.531)	-	-	(3.141.535.531)
Perumahan Dinas (<i>Houses</i>)	-	(117.228.200)	-	-	(117.228.200)
Kendaraan Bermotor (<i>Vehicles</i>)	(21.499.392.474)	(2.853.096.475)	10.020.701.179	-	(14.331.787.769)
Inventaris Kantor (<i>Office Equipment</i>)	(23.916.786.917)	(6.388.041.636)	-	-	(30.304.828.553)
Inventaris Rumah Dinas (<i>House Equipment</i>)	(1.334.063.154)	(226.134.375)	-	-	(1.560.197.529)
Total Akumulasi Penyusutan (<i>Total Accumulated</i> <i>Depreciation</i>)	(46.750.242.545)	(12.726.036.217)	10.020.701.179	-	(49.455.577.582)
Nilai Buku (<i>Book Value</i>)	396.122.883.172				441.995.392.921

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Jumlah beban penyusutan aset tetap sebesar Rp18.597.153.281 dan Rp12.726.036.217 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Perum Jamkrindo dan Entitas Anak selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perum Jamkrindo dan Entitas Anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi.

Penilaian atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yaitu KJPP Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun, dan Rekan.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar, metode biaya dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

- a) Jenis dan hak yang melekat pada properti;
- b) Kondisi pasar;
- c) Lokasi;
- d) Karakteristik Fisik;
- e) Karakteristik dalam menghasilkan pendapatan;
- f) Karakteristik tanah.

12. ASET LAIN-LAIN

	2017
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya	424.140.000.000
Piutang Dalam Proses	170.435.419.379
Klaim Dalam Proses	143.507.025.927
Aset Lainnya	9.442.673.282
Aset Tak Berwujud -Software	167.918.627
Jumlah Aset Lain-Lain	747.693.037.215

Piutang Dalam Proses merupakan Piutang Co-Guarantee yang belum ada persetujuan klaim dari mitra Co-Guarantee.

Aset lainnya merupakan saldo jaminan listrik PLN, dan jaminan telepon.

Deposito yang dimiliki entitas tetapi dibatasi penggunaannya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan mitra bank.

Klaim dalam proses adalah klaim yang sudah diajukan ke Perum Jamkrindo akan tetapi belum ada persetujuan atas klaim tersebut.

13. UTANG KLAIM

	2017
Utang Klaim - Kredit Usaha Rakyat	51.867.380.175
Utang Klaim - Kredit Eksisting	24.058.110.208
Jumlah	75.925.490.383

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada Bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah Utang yang telah disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar persentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang disetujui.

11. FIXED ASSETS (Continued)

The balances of depreciation amounting to Rp18,597,153,281 and Rp12,726,036,217 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Perum Jamkrindo and Subsidiary during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

There were no fixed assets pledged as collateral.

On December 31, 2015, Perum Jamkrindo and Subsidiary changed their accounting policy of land and buildings from cost model to revaluation model.

The valuations of land and building are performed by the external independent valuer that is KJPP Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun, dan Rekan.

Valuations are performed based on Indonesian Valuation Standards based on reference to recent market transactions done on arm's length terms. The valuation method used are market data approach, cost approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets are among others are as follows:

- a) Type and right on property;
- b) Market condition;
- c) Location;
- d) Physical characteristic;
- e) Income producing characteristic;
- f) Land characteristic.

12. OTHER ASSETS

	2016
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya	76.140.000.000
Piutang Dalam Proses	91.946.345.702
Klaim Dalam Proses	117.472.197.942
Aset Lainnya	14.929.666.282
Aset Tak Berwujud -Software	152.849.581
Jumlah Aset Lain-Lain	300.641.059.506

Restricted Deposit
Receivable in Process
Claim in Process
Other Assets
Intangible Asset - Software
Total Other Assets

Receivable in process are co-guarantee's receivables that yet any claim approval from co-guarantee partners.

Other assets is electricity, telephone deposit fund, and deferred expenses.

Time deposit owned entity but are restricted in accordance with an agreement with bank partners.

Claims in process are claims submitted to Perum Jamkrindo but no agreement has been reached.

13. CLAIM PAYABLE

	2016
Utang Klaim - Kredit Usaha Rakyat	4.627.125.342
Utang Klaim - Kredit Eksisting	7.022.456.261
Jumlah	11.649.581.603

Claim Liability - Kredit Usaha Rakyat
Claim Liability - Existing Credit
Total

Claims payable is payable to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claims payable are debts that have been approved but not yet paid. Claims payable are stated at the percentage of underwriting the loans approved discharge tray.

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

14. CADANGAN KLAIM

	2017
Cadangan Klaim KUR	310.837.377.744
Cadangan Klaim - Kredit Eksisting	108.133.891.549
Provisi Kerugian Atas Klaim	
<i>Co-Guarantee</i>	8.171.450.871
Jumlah Cadangan Klaim	427.142.720.164

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim per 31 Desember 2016 ditetapkan sebesar 0,25% dari outstanding penjaminan untuk cadangan klaim eksisting dan 0,50% dari outstanding penjaminan untuk cadangan klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2017, cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut pembentukan cadangan klaim dibagi dua metode, 1) Cadangan klaim yang wajib dibentuk minimal sebesar 0,01% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri, 2) penjumlahan dari 100% klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Perusahaan menggunakan metode yang lebih besar dalam penjumlahan.

Pada Tahun 2016, Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yaitu minimal sebesar 0,25% dari outstanding penjaminan.

Perusahaan membentuk provisi untuk mengantisipasi bahwa kemungkinan akan tertagihnya/terpilihnya Piutang *co-guarantee* serta potensi klaim di masa yang akan datang yang menjadi tanggungan PT Asuransi Syariah Mubarakah sangat kecil. Provisi dibentuk berdasarkan Default Rate (DR) rata-rata ditambah dengan standar deviasi dikalikan dengan outstanding kredit.

14. CLAIM RESERVE

	2016
211.727.839.287	
183.936.606.484	
9.294.982.801	
404.959.428.572	

The claim reserves is the reserve of claim that might occur in the coming years onto the guarantee that has not mature yet.

Claim reserves as of December 31, 2016 was determined at 0.25% from guarantee outstanding for existing claim reserves and at 0.50% from guarantee outstanding for KUR claim reserves.

In 2017, the claim reserve established by the Regulation of the Financial Services Authority Number 2 / POJK.05 / 2017 on the Guarantee Institution Business Implementation. Under this provision, the methods of claim reserves shall be divided into two methods, 1) The required reserve reserves shall be at least 0.01% of the total value of the underwriting, 2) the sum of 100% of claims already incurred but not yet reported. Companies use larger methods in addition.

In 2016, Claim reserves that can be formed is designated on Ministry of Finance Regulation No. 99/PMK.010/2011 about Amendments to the Ministry of Finance Regulation No. 222/PMK.010/2008 about Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company, that is 0,25% from guarantee outstanding.

The company establish provisions to anticipate the uncollectible co-guarantee receivables and also potential future claims dependent on PT Asuransi Syariah Mubarakah is very low. Provisions establish based on average Default Rate plus deviation standard and multiplied with credit outstanding.

15. UTANG PENJAMINAN ULANG

	2017
Utang <i>Co-Guarantee</i> :	
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	17.840.076.355
- PT Asuransi Bringin Sejahtera	
Artamakmur	4.358.076.890
- PT Heksa Eka Life Insurance	1.085.307.364
- PT Asuransi Jiwasraya	1.092.655.947
- PT UAF Jaminan Kredit	113.956.442
- PT Asuransi Binagriya Upakara	-
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	-
Jumlah Utang <i>Co-Guarantee</i>	24.490.072.998
Utang Re-Asuransi:	
- PT Re-asuransi Nasional Indonesia	77.692.403.514
- PT Re-asuransi Internasional	
Indonesia	3.987.720.480
- PT Igna Asia	2.415.287.257
- PT Nasional Reasuransi Syariah	1.101.503.679
Jumlah Utang <i>Re-Guarantee</i>	85.196.914.930
Jumlah Utang <i>Co-Guarantee</i>	109.686.987.928

Utang *co-guarantee* dan re-asuransi merupakan utang premi yang harus dibayarkan perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim.

15. RE-GUARANTEE PAYABLE

	2016
11.978.494.561	
7.434.476.338	
-	
270.058.337	
113.956.442	
2.743.602.065	
654.608.102	
23.195.195.845	
40.412.742.717	
2.995.734.449	
-	
-	
43.408.477.166	
66.603.673.011	

Re-guarantee and re-insurance payables are an insurance premium payable that must be paid by the company to transfer the risk of claim.

<i>Co-Guarantee Payable:</i>	
PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	-
PT Asuransi Bringin Sejahtera	-
Artamakmur	
PT Heksa Eka Life Insurance	-
PT Asuransi Jiwasraya	-
PT UAF Jaminan Kredit	-
PT Asuransi Binagriya Upakara	-
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	-
Total <i>Co-Guarantee Payable</i>	
<i>Re-Insurance Payable</i>	
PT Re-asuransi Nasional Indonesia	-
PT Re-asuransi Internasional	-
Indonesia	
PT Igna Asia	-
PT Nasional Reasuransi Syariah	-
Total <i>Re-Guarantee Payable</i>	
Total <i>Co-Guarantee Payable</i>	

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

	<u>2017</u>
Pihak Berelasi	
Imbal Jasa Penjaminan	2.292.178.011.937
Imbal Jasa Penjaminan Belum Terbit	111.618.292.273
Komisi Penjaminan Ditangguhkan	62.924.644.855
Pihak Ketiga	
Imbal Jasa Penjaminan	167.748.803.310
Komisi Penjaminan Ditangguhkan	3.380.006.362
Sewa dan Servis Gedung	748.012.813
Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	<u>2.638.597.771.550</u>

Imbal Jasa Penjaminan ditangguhkan merupakan pembayaran premi penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Komisi Penjaminan Ditangguhkan merupakan penerimaan komisi dari re-asuransi tahun berjalan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Pendapatan ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP). Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi Imbal Jasa Penjaminan diterima dimuka adalah sesuai jangka waktu.

Sewa dan Service Gedung ditangguhkan merupakan pembayaran sewa dan service dari penyewa gedung yang belum menjadi pendapatan.

16. DEFERRED INCOME

	<u>2016</u>
	2.072.338.540.890
	117.399.053.405
	52.423.813.379
	100.392.515.430
	2.944.600.909
	748.012.813
Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	<u>2.346.246.536.826</u>

Related Parties
Guarantee Fee
Guarantee Fee Unpublished
Deferred Commission Fee

Third Parties
Guarantee Fee
Deferred Commission Fee
Rent and Service Building

Total Deferred Income

Deferred guarantee fee is a guarantee premium payments for current year and previous years from the guaranteed to Perum Jamkrindo which will become income in the coming years.

Deferred guarantee commission is an acceptance of commission from re-insurance in the current year that will become income in the coming years.

Deferred income will be recognized as income during the remaining period of guarantee and allocated based on the issuance month of Guarantee Certificate (SP). By considering the number of accelerated payment credits, management establish maximum time limit of the unearned guarantee fee allocation, that is due to time limit.

Deferred Rent and Service Building is rent and service payment from the lessee that unrecognized as revenue.

17. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

Saldo pajak dibayar dimuka adalah per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari:

	<u>2017</u>
Entitas Induk	
PPh Pasal 28A	-
Jumlah	<u>-</u>

17. TAXES

a. Prepaid Tax

Prepaid Tax as of December 31, 2017 and 2016 consists of:

	<u>2016</u>
	81.540
Jumlah	<u>81.540</u>

Parent Company
Income tax—article 28A
Total

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang Pajak

Saldo utang pajak adalah per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari :

	2017	2016
Entitas Induk		
PPh Badan Pasal. 29	45.937.895.254	57.349.155.592
PPh Pasal 25	8.063.600.333	6.637.598.034
PPh Pasal 21	2.368.492.551	5.059.011.702
Pajak Pertambahan Nilai	2.390.606.389	2.770.794.179
PPh Pasal 23	206.890.293	364.227.792
PPh Pasal 4 Ayat 2	188.269.671	246.724.705
PPh Pasal 22	61.304.581	62.941.404
Pajak Bumi dan Bangunan	26.000.000	-
PPh Pasal 26	16.623.250	-
Jumlah Entitas Induk	59.259.682.322	72.490.453.408
Entitas Anak		
PPh Pasal 21	217.892.388	131.399.854
PPh Pasal 23	69.890.649	66.037.672
Pajak Pertambahan Nilai	2.500.000	-
PPh Pasal 4 Ayat 2	-	124.185.778
Jumlah Entitas Anak	290.283.037	321.623.304
Jumlah Utang Pajak	59.549.965.359	72.812.076.712

c. Beban Pajak Penghasilan terdiri dari :

Entitas Induk		
Beban Pajak Kini	142.982.583.250	137.000.332.000
Beban Pajak Kini Final	100.095.631.526	94.626.148.136
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(26.417.185.125)	13.730.448.472
Jumlah Entitas Induk	216.661.029.651	245.356.928.608
Entitas Anak		
Beban Pajak Kini	4.282.350.474	4.271.158.571
(Manfaat) Pajak Tangguhan	431.159.906	(219.267.919)
Jumlah Entitas Anak	4.713.510.380	4.051.890.652
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	221.374.540.031	249.408.819.260

d. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Entitas Induk	2017	2016
Laba Sebelum Pajak	1.007.317.945.744	941.454.055.147
Perbedaan Temporer:		
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	987.551.020	1.297.006.503
Penyisihan Piutang Bagi Hasil dan Piutang Lain	101.167.500	-
Penyisihan Piutang IJP KUR	3.276.005.834	8.495.783.538
Jasa Produksi Tahun 2015	(36.892.343.817)	(36.414.583.674)
Jasa Produksi Tahun Berjalan	59.951.432.999	36.892.343.817
Estimasi Imbalan Pasca Kerja	12.122.599.855	6.155.619.099
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	7.501.361.671	14.076.972.796
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	24.641.306.629	83.522.615.060
Jumlah	71.689.081.691	114.025.757.139

17. TAXES (Continued)

b. Tax Payable

Tax payable as of December 31, 2017 and 2016 consists of:

Parent Company
Company Income Tax –Article 29
Income Tax –Article 25
Income Tax –Article 21
Value Added Tax
Income Tax –Article 23
Income Tax –Article 4 point 2
Income Tax –Article 22
Income tax - Revaluation of Fixed Assets
Income Tax –Article 26
Total Parent Entity
Subsidiary
Income Tax –Article 21
Income Tax –Article 23
Value Added Tax
Income Tax –Article 4 point 2
Total Subsidiary
Total Tax Payable

c. Income Tax Expense consist of :

Parent Company
Current Tax Expense
Current Tax Expense - Final
Deferred Tax (Benefit) Expense
Total Parent Company
Subsidiary
Current Tax Expense
Deferred Tax (Benefit)
Total Subsidiary
Total Income Tax Expense

d. Tax Expense

The reconciliation between income before tax, as presented in statement of income, and taxable income for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Parent Company
Earnings Before Tax
Temporary Differences:
Depreciation Differences between Fiscal and Commercial
Allowance of profit sharing receivables and Other Receivables
Allowance of IJP KUR Receivables
Incentif Year 2014
Incentif at Current Year
Post Employee Benefit
Allowance for Impairment Losses
Increase (Decrease) in Reserve Claim
Total

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXES (Continued)

d. Beban Pajak (Lanjutan)

d. Tax Expense (Continued)

Entitas Induk (Lanjutan)

Parent Company (Continued)

	2017	2016
Perbedaan Permanen:		
Beban Umum dan Administrasi Lain-lain	22.503.509.329	20.204.266.872
Beban Promosi	13.381.553.312	12.838.230.072
Beban Representasi	11.842.411.985	10.663.908.282
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8.899.676.897	6.704.153.890
Beban Pajak Lainnya	585.460.607	5.918.724.051
Beban Asuransi dan Penggantian Biaya Kesehatan	6.575.884.198	5.515.858.216
Beban Investasi	3.753.769.028	2.939.613.868
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas	2.039.634.928	1.416.792.571
Beban Pemeliharaan dan Inventaris Rumah Dinas	143.922.928	821.003.984
Beban Pemeliharaan Gedung	1.877.863.808	436.283.747
Beban Komunikasi dan Energi Rumah Dinas	332.228.462	270.965.984
Beban Penyusutan Rumah Dinas	157.622.457	194.473.165
Beban Sewa Lain-Lain	4.435.794.599	184.390.314
Beban Komunikasi dan Energi Gedung	-	166.250.453
Jumlah	76.529.332.538	68.274.915.467
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Penghasilan Investasi	(578.966.420.744)	(566.317.910.402)
Pendapatan Jasa Giro	(5.765.541.694)	(9.092.769.077)
Pendapatan Sewa Gedung	-	(342.720.000)
Jumlah	(584.731.962.438)	(575.753.399.479)
Laba kena Pajak	570.804.397.535	548.001.328.275
Laba Kena Pajak (dibulatkan)	570.804.397.000	548.001.328.000
Dasar Pengenaan Pajak	570.804.397.000	548.001.328.000
Pajak Penghasilan		
25% x Dasar Pengenaan Pajak	142.701.099.250	137.000.332.000
Total Beban Pajak Kini	142.701.099.250	137.000.332.000
Dikurangi Pajak Dibayar Dimuka	(96.763.203.996)	(79.651.176.408)
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	45.937.895.254	57.349.155.592

Permanent Differences:
Other General and Administrative Expenses
Promotion Expenses
Representation Expenses
Service Vehicle Maintenance Expenses
Other tax Expenses
Insurance and Health Reimbursement Expense
Investment Expenses
Service Vehicle Depreciation Expense
Maintenance Expense and Inventory Home Office
Building Maintenance Expenses
Communication and Officer Housing
Energy Expenses
Depreciation Home Office Expenses
Other Rent Expenses
Communication and Building
Energy Expenses
Total

Income which charged by final tax:
Penghasilan Investasi
Interest Income on Current Account
Buildings Rental Income
Total

Taxable Income
Taxable Income (Rounded)

Tax Base
Income Tax
25% x Tax Base
Total Current Tax Expenses
Less prepaid Tax
Income Tax Payable

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXES (Continued)

d. Beban Pajak (Lanjutan)

d. Tax Expense (Continued)

	2017	2016	
Entitas Anak			Subsidiary
Laba Sebelum Pajak	15.902.755.126	10.862.363.590	Income Before Tax
Perbedaan Temporer:			Temporary Difference:
Perbedaan Penyusutan antara			Depreciation Difference Fiscal
Fiskal dan Komersil	(32.278.898)	(134.779.368)	and Commercial
Kenaikan (Penurunan) Cadangan			Increase (Decrease) in Claim
Klaim	(2.026.632.489)	1.011.851.042	Reserves
Jumlah	(2.058.911.387)	877.071.674	Total
Perbedaan Permanen:			Permanent Difference:
Beban Promosi	798.835.931	599.335.173	Promotion Expenses
Beban Umum dan Administrasi			Other General and Administrative
Lain-lain	610.964.219	550.422.815	Expenses
Beban Rapat Kerja	416.784.585	498.045.303	Meeting Expenses
Beban Representasi	472.927.164	280.205.285	Representative Expenses
Pendapatan Imbal Hasil Deposito	(22.667.585.339)	(21.360.130.545)	Deposits Return Income
Pendapatan Bonus Giro	(124.559.893)	(147.284.122)	Interest Income
Jumlah	(20.492.633.333)	(19.579.406.091)	Total
Rugi yang Dikompensasi			Loss Carry Forward
Tahun Berjalan	(6.648.789.594)	(7.839.970.827)	Current Year
Akumulasi Rugi Fiskal			Accumulated Fiscal Loss
2015	6.608.367.802	6.608.367.802	2015
2016	7.839.970.827	7.839.970.827	2016
2017	6.648.789.594	-	2017
Jumlah	21.097.128.223	14.448.338.629	Total
Beban Pajak Penghasilan Kini:			Current Tax Income
Kini	-	-	Current
Final	4.282.350.474	4.271.158.571	Final
Beban Kini	4.282.350.474	4.271.158.571	Current Tax Expenses

Sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, Perum Jaminan Kredit Indonesia menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak terhutang (*self-assessment system*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah kewajiban pajak dalam batas 10 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

In accordance with the taxation laws of Indonesia, Perum Jamkrindo calculate, and pay the amount of tax payable (*self - assessment system*). The tax authorities may calculate and amend taxes within 10 years from the date the tax becomes due.

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXES (Continued)

e. Aset Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax Assets

	2017			
	1 Januari 2017 / January 1, 2017	Dikreditkan / (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian / Credited / (Charged) to Consolidated Statement of Comprehensive Income	Dibebankan ke Ekuitas/ Charged to Equity	31 Desember 2017 / December 31, 2017
Entitas Induk/ Parent Company				
CKPN – Piutang Bagi Hasil/ Allowance of Profit Share Receivable	4.245.434.517	(25.291.875)	-	4.220.142.642
Jasa Produksi/Incentive	9.223.085.954	5.764.772.296	-	14.987.858.250
Penyusutan Aset Tetap/ Fixed Assets Depreciation	(3.060.751.203)	246.887.755	-	(2.813.863.448)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim/ Increase (Decrease) in Reserve Claim	97.761.942.876	6.160.326.657	-	103.922.269.533
Provisi atas Kerugian Klaim Co-Guarantee / Provision for Claim Losses	2.150.708.355	(107.845.637)	-	2.042.862.717
CKPN – Piutang Koperasi/ Allowance of Cooperative Receivable	81.472.896	-	-	81.472.895
CKPN – Piutang Co-Guarantee / Allowance of Co-Guarantee Receivable	3.582.335.856	17.265.537.330	-	20.847.873.187
CKPN Piutang IJP KUR/ Allowance for Impairment Losses	2.123.945.885	819.001.458	-	2.942.947.344
Kenaikan (penurunan) nilai pasar Surat Berharga tersedia untuk dijual/ Increase (Decrease) in Marketable Securities - Available For Sale	43.326.371.220	-	(23.444.603.145)	19.881.768.075
Penilaian kembali liabilitas Imbalan kerja/ Remeasurement Of Post Employment Benefit	13.391.827.711	(3.706.202.859)	307.748.064	9.993.372.916
Jumlah/ Total Entitas Induk/ Parent Company	172.826.374.067	26.417.185.126	(23.136.855.081)	176.106.704.111
Entitas Anak/Subsidiary Entity				
Penyusutan Aset Tetap/ Fixed Assets Depreciation	(67.560.064)	35.281.166	-	(32.278.898)
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim/ Increase (Decrease) in Reserve Claim	1.327.205.912	(506.658.122)	-	820.547.790
Kenaikan (penurunan) nilai pasar Surat Berharga tersedia untuk dijual	528.365.000	-	(212.192.122)	316.172.878
Penilaian kembali liabilitas Imbalan kerja/ Remeasurement Of Post Employment Benefit	-	40.217.050	950.297	41.167.347
Sub Jumlah/ Total Entitas Anak /Subsidiary Entity	1.788.010.848	(431.159.906)	(211.241.825)	1.145.609.117
Jumlah Pajak Tangguhan/ Deferred Tax	174.614.384.915			177.252.313.228

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXES (Continued)

e. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

e. Deferred Tax (Continued)

	2016			
	1 Januari 2016 / January 1, 2016	Dikreditkan / (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian / Credited / (Charged) to Consolidated Statement of Comprehensive Income	Dibebankan ke Ekuitas/ Charged to Equity	31 Desember 2016 / December 31, 2016
Entitas Induk/ Parent Company				
CKPN – Piutang Bagi Hasil/ <i>Allowance of Profit Share Receivable</i>	4.282.249.767	(36.815.250)	-	4.245.434.517
Jasa Produksi/ <i>Incentive</i>	9.103.645.919	119.440.036	-	9.223.085.954
Penyusutan Aset Tetap/ <i>Fixed Assets Depreciation</i>	40.027.820.731	(43.088.571.934)	-	(3.060.751.203)
Kenaikan (penurunan) Cadangan klaim/ <i>Increase (Decrease) in Reserve Claim</i>	76.872.078.748	20.889.864.128	-	97.761.942.876
Provisi atas Kerugian Klaim <i>Co-Guarantee / Provision for Claim Losses</i>	2.512.105.683	(361.397.328)	-	2.150.708.355
CKPN – Piutang Koperasi/ <i>Allowance of Cooperative Receivable</i>	81.472.896	-	-	81.472.896
CKPN – Piutang Co-Guarantee / <i>Allowance of Co-Guarantee Receivable</i>	273.268.408	3.309.067.449	-	3.582.335.857
CKPN Piutang IJP KUR/ Allowance <i>for Impairment Losses</i>	-	2.123.945.885	-	2.123.945.885
Kenaikan (penurunan) nilai pasar Surat Berharga tersedia untuk dijual/ <i>Increase (Decrease) in Marketable Securities - Available For Sale</i>	26.402.581.994	-	16.923.789.226	43.326.371.220
Penilaian kembali liabilitas Imbalan kerja/ <i>Remeasurement Of Post Employee Benefit</i>	8.158.815.030	5.233.012.680	-	13.391.827.711
Jumlah/ Total	375.082.421.321	(11.811.454.336)	16.923.789.226	172.826.374.067
Entitas Anak/Subsidiary Entity				
Penyusutan Aset Tetap/ <i>Fixed Assets Depreciation</i>	(33.865.222)	(33.694.842)	-	(67.560.064)
Kenaikan (Penurunan) cadangan klaim/ <i>Increase (Decrease) in Reserve Claim</i>	1.074.243.151	252.962.761	-	1.327.205.912
Kenaikan (penurunan) nilai pasar Surat Berharga tersedia untuk dijual	-	-	528.365.000	528.365.000
Jumlah/ Total	1.040.377.929	219.267.919	1.056.730.000	1.788.010.848
Jumlah Pajak Tangguhan/ Deferred Tax	376.122.799.250			174.614.384.915

18. IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan telah menyelenggarakan program manfaat pasti (JHT dan THT) maupun program iuran pasti (DPLK) untuk seluruh karyawan tetapnya.

Aset program manfaat pasti dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI. Program tersebut memberikan manfaat JHT dan THT yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau berhenti, sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

Program Pensiun Manfaat Pasti

Penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.25/KPTS/PKK.3/XI/1987 tanggal 23 Nopember 1987 jo No. 01/DIR/I/2002 tanggal 7 Januari 2002. Program ini terdiri dari Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Tunjangan Hari Tua (THT). Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang periode kerjanya dimulai sebelum tahun 1995. Jumlah karyawan yang diikutsertakan program tersebut sebanyak 891 orang.

Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan. Kontribusi pendanaan sebesar 5% oleh karyawan dan sisanya ditanggung

Manfaat yang diperoleh dari program pensiun manfaat pasti ialah sebagai berikut:

- Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 30 (tiga puluh) x Gaji Karyawan;
- Program Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar 2,5% x Masa Kerja x Gaji karyawan.

Program Pensiun Iuran Pasti

Penyelenggaraan program pensiun iuran pasti dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.31/DIR/IV/1997 Tanggal 28 April 1997 jo No.14/DIR/V/2002 tanggal 21 Mei 2002. Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang periode kerjanya mulai setelah tahun 1995.

Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan. Kontribusi pendanaan sebesar 4,4% dari gaji pokok karyawan dan sisanya 6,6% ditanggung Perusahaan.

Besarnya asumsi hasil investasi untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ialah 10% per tahun.

Pada tahun 2017 Manajemen menunjuk aktuaris independen PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa untuk melakukan perhitungan beban/manfaat pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013) untuk tahun 2017 dengan laporan bernomor 038/LV/PSGJ/II/2018 tanggal 04 Januari 2018.

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2017 dan 2016 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut :

18. POST EMPLOYED BENEFIT

The company have carried out defined benefit plan (JHT) and THT and also defined contribution program (DPLK) for all permanent employees.

This defined benefit asset program managed by PT Asuransi Jiwasraya which the founding have got endorsement from The Finance Minister RI. The program give JHT and THT benefit which will be paid to employees at the time of employees pension or desist, as according to regulation of the pension fund.

Defined Benefit Pension Plan

Implementation of defined benefit pension plan is declare in Director decision No.25/KPTS/PKK.3/XI/1987 date of November 23, 1987 jo No. 01/DIR/I/2002 dated January 7, 2002. This Program consist of Program Jaminan Hari Tua (JHT) and Program Tunjangan Hari Tua (THT). This programdestine for employees which time line working is started before 1995. Amount of involveed employeeses is the program counted at 891 people.

Funding of pension plan done by employees and corporation with paying monthly fee. Funding contribution equal to 5% by employees and the rest accounted by company.

Benefit which obtained from defined benefit pension program is the following:

- Program Jaminan Hari Tua (JHT) equal to 30 (thirty times) x employees salary;
- Program Tunjangan Hari Tua (THT) equal to 2,5% x Years of Service x employees salary.

Defined Contribution Pension Plan

Implementation of defined contribution pension plan is declared by Director decision No. 31/DIR/IV/1997 dated April 28, 1997 jo No. 14/DIR/V/2002 dated May 21, 2002. This Program destine for employees which time line working is starting after year 1995.

The funding of pension plan done by employees and corporation with paying monthly fee. Funding contribution equal to 4,4% from employees base salary and the rest of 6,6% accounted on company.

The return of investment level assumption for Financial Institution Pension Fund (DPLK) is 10% per year.

In 2017 management hire independent actuary of PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa for calculating post employment expense/benefit post according to SFAS 24 (Revision 2013) for 2017 calculation reports numbered 038/LV/PSGJ/II/2018 on January 04, 2018.

In estimating pension benefit as of December 31, 2017 and 2016 for both programs, Actuary in the calculation use Projected Unit Credit. Actuarial Cost Method the calculation refers to the actual level of financing needed in the period. The key assumptions used in the actuarial calculations are as follows:

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

18. IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

18. POST EMPLOYED BENEFIT (Continued)

	2017	2016	
Asumsi ekonomi:			Economic assumptions:
Tingkat diskonto per tahun	7,00%	8,00%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	7,00%	8,00%	Annual salary growth rate
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	5% per tahun / per year	5% per tahun / per year	Disability rate
Tingkat pengunduran diri			Resignation rate
- Usia 20 - 39 tahun	0.5% per tahun / per year	0.5% per tahun / per year	20 - 39 years old -
- Usia 40 - 44 tahun	0.3% per tahun / per year	0.3% per tahun / per year	40 - 44 years old -
- Usia 45 - 49 tahun	0.2% per tahun / per year	0.2% per tahun / per year	45 - 49 years old -
- Usia 50 - 54 tahun	0.1% per tahun / per year	0.1% per tahun / per year	50 - 54 years old -
- Usia diatas 54 tahun	0.0% per tahun / per year	0.0% per tahun / per year	over 54 years old -
Program Pensiun			Pension Program
Kewajiban (aset) program pensiun manfaat pasti sebagai berikut:			Defined benefit pension program liability (asset) manfaat pasti is as follows.
	2017	2016	
Entitas Induk			Parent Company
Nilai Sekarang Kewajiban akhir periode	61.581.057.673	47.325.900.034	Present value of Obligation ending balance
Nilai Wajar Aset Program	(22.838.558.274)	(19.223.416.196)	Fair value of Program Assets
Status Pendanaan	38.742.499.399	28.102.483.838	Funding Status
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan	38.742.499.399	28.102.483.838	Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position
Rekonsiliasi biaya manfaat yang diakui di Laporan Laba Rugi Komprehensif			Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of comprehensive income
Biaya Jasa Kini	7.629.805.259	4.524.467.351	Current Service Expense
Biaya Bunga	3.786.072.002	3.069.809.728	Interest expense
Pengembalian Aset Program yang diharapkan	(1.537.873.296)	(1.438.657.980)	Required rate of return of Program Assets
Total biaya manfaat karyawan	9.878.003.965	6.155.619.099	Total employee benefit expenses
Rekonsiliasi perubahan pada aset/kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan			Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of Financial Position
(Aset)/Kewajiban pada awal periode	28.102.483.839	18.123.908.316	(Asset)/Liabilities at beginning period
Biaya manfaat karyawan	12.122.599.855	6.155.619.099	Employee benefit expenses
Beban/(Pendapatan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	1.230.992.258	7.675.976.544	Recognized to OCI of actuarial (gain)/loss
luran yang dibayarkan	(2.713.576.552)	(3.853.020.119)	Contribution Paid
(Aset)/kewajiban pada tanggal di Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk	38.742.499.400	28.102.483.839	(Assets)/ Liabilities at Statement of Financial Position Period-Parent Company
Entitas Anak			Subsidiary
Nilai Sekarang Kewajiban akhir periode	164.669.386	65.855.632	Present value of Obligation ending balance
Nilai Wajar Aset Program	-	-	Fair value of Program Assets
Status Pendanaan	164.669.386	65.855.632	Funding Status
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan - Entitas Anak	164.669.386	65.855.632	Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position-Subsidiary

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

18. IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

18. POST EMPLOYED BENEFIT (Continued)

	2017	2016
Rekonsiliasi biaya manfaat yang diakui di Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Biaya Jasa Kini	89.480.694	65.855.632
Biaya Bunga	5.531.873	-
Pengembalian Aset Program yang diharapkan	-	-
Total biaya manfaat karyawan	95.012.567	65.855.632
Rekonsiliasi perubahan pada aset/kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan		
(Aset)/Kewajiban pada awal periode	65.855.632	-
Biaya manfaat karyawan	95.012.567	
Beban/(Pendapatan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	3.801.187	65.855.632
luran yang dibayarkan	-	-
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan-Entitas Anak	164.669.386	65.855.632
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan	38.907.168.786	28.168.339.472

Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of comprehensive income
Current Service Expense
Interest expense
Required rate of return of Program Assets
Total employee benefit expenses

Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of Financial Position
(Asset)/Liabilities at beginning period
Employee benefit expenses
Recognized to OCI of actuarial (gain)/loss
Contribution Paid
Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position-Subsidiary

Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position

19. UTANG LAIN-LAIN

19. OTHER LIABILITY

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari:

Other Payable as of December 31, 2017 and 2016 consists of:

	2017	2016
Beban Pegawai YMH Dibayar	64.065.114.446	43.552.084.169
Akun dalam Penyelesaian	49.679.198.910	36.670.260.426
Lainnya	42.430.128.822	44.602.491.131
Utang Fee Agen	16.462.600.657	10.721.020.767
Beban Operasi YMH Dibayar	11.513.713.020	2.103.751.173
Beban Administrasi dan Umum yang Masih Harus Dibayar	8.794.606.245	26.643.214.769
Utang Fee Bank	2.886.934.931	2.679.307.831
Setoran Jaminan	2.383.872.959	1.152.155.789
Beban SisteK dan Pengembangan yang Masih Harus Dibayar	2.180.564.085	7.747.589.912
Dana Titipan Subrogasi	1.264.928.611	-
Utang Premi Pensiun	1.006.950.411	854.017.173
Titipan IJP	433.262.086	416.455.017
Security Deposit Penyewa	325.004.400	351.393.840
Bagian dana Jaminan Ulang yang Belum Disisihkan	395.317.480	395.317.480
Bagian Dana Penampungan KUT yang Belum Disisihkan	389.177.486	389.177.486
Dana Titipan Klaim	108.135.106	-
Utang Premi Jamsostek	89.581.636	81.087.693
Jaminan Telepon Penyewa	40.128.299	49.452.204
Utang Premi BPJS Kesehatan	7.932.303	-
Bagian DPT yang Belum Disisihkan	474.000	474.000
Jumlah Utang Lain-Lain	204.457.625.894	178.409.250.860

Accrued Employee Expenses
Other Liabilities in Progress
Others
Agent Fee Payable
Operational Expense Accrued
Administrative and General Expenses Accrued
Bank Fee Payable
Deposit Guarantee
Technology System and Development Expenses Accrued
Deposit Subrogation
Retirement of debt premium
Deposit IJP
Tenant Security Deposit
Unappropriate Re-Guarantee Fund
Unappropriate KUT Fund
Deposit Claim
Jamsostek Premiums Payable
Tenant Warranty Deposit
BPJS Kesehatan Premiums Payable
Unappropriate DTP
Total Other Payable

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. EKUITAS

	2017	2016
Penyertaan Modal Negara	7.638.733.365.160	7.638.733.365.160
Cadangan-cadangan :		
Cadangan Modal	904.000.000	904.000.000
Cadangan Umum	2.095.051.340.764	1.451.961.210.347
Cadangan Tujuan	297.707.510.860	297.707.510.860
Cadangan Dana Teknis	78.274.593.035	78.274.593.035
Jumlah Cadangan	2.471.937.444.659	1.828.847.314.243
Komponen Ekuitas Lainnya	211.345.269.213	139.930.290.522
Laba Tahun Berjalan	801.845.416.484	692.044.895.364
Jumlah Ekuitas Dapat Diatribusikan		
kepada Pemilik Entitas Induk	11.123.861.495.516	10.299.555.865.290
Kepentingan Non Pengendalian	13.798.955	13.122.707
Total Ekuitas	11.123.875.294.471	10.299.568.987.997

a. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Pada tahun 2016 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp500.000.000.000 yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016. Pada tahun 2015 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp500.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 134 tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015. Pada tahun 2014 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1.300.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Pada tahun 2013 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 1.120.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Penambahan modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan terkait dengan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Penambahan modal terkait Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ini juga dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2012 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 1.169.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 108 tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, tahun 2011 sebesar Rp1.200.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011, tahun 2010 sebesar Rp900.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, tahun 2009 sebesar Rp250.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 dan tahun 2007 sebesar Rp600.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007.

20. EQUITY

Government Paid-in Capital
Reserves:
Capital Reserve
General Reserve
Purposed Reserve
Technical Fund Reserve
Total Reserves
Other Components Of Equity
Current Year Net income
Net Equity Attributable to Owners
of the Parent
Non - Controlling Interest
Total Equity

a. Government Paid-in Capital

In 2016 there were additional State Capital (PMN) amounted to Rp500.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 92 of 2016 dated December 30, 2016. In 2015 there were additional State Capital (PMN) amounted to Rp500.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 134 of 2015 dated December 28, 2015. In 2014 there were additional State Capital (PMN) amounted to Rp1.300.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 98 of 2014 dated October 17, 2014 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Capital of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. In the year 2013 there were additional State Capital (PMN) was Rp1.120.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 81 of 2013 dated December 10, 2013 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Capital Public Company (Perum) Credit Guarantee Indonesia.

This capital increase is intended to increase the capacity of the business and to strengthen the Company's capital structure related to KUR Guarantee.

Capital increase related to the Kredit Usaha Rakyat Guarantee is also done by the Government in 2012 there were additional State Capital (PMN) was Rp. 1.169.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 108 of 2012 dated December 24, 2012 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Capital Public Company (Perum) Loan Guarantees Indonesia, in 2011 at Rp1.200.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 61 of 2011 dated December 29, 2011, in 2010 amounted Rp900.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 82 of 2010 dated December 20, 2010, in 2009 amounted Rp250.000.000.000 stipulated by Government Regulation 65 of 2009 dated October 31, 2009 and 2007 amounted Rp600.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 67 of 2007 dated December 10, 2007.

20. EKUITAS (Lanjutan)

a. Penyertaan Modal Negara (PMN) (Lanjutan)

Modal awal Perusahaan adalah sebesar Rp21.000.000.000. Pada tahun 1992 dan 1993 terdapat penambahan modal sebesar Rp22.330.000.000 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1994 tanggal 3 Maret 1994.

Pada tahun 1998, terdapat penambahan modal sebesar Rp56.403.365.160 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-33/MK.016/1998 tanggal 22 Januari 1998 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999.

b. Cadangan - cadangan

Saldo cadangan modal merupakan saldo cadangan modal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 383/KMK/011/1982 tanggal 15 Juni 1982 tentang penetapan modal awal Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Jumlah ini telah dimasukkan sebagai cadangan modal per 31 Desember 1981 sesuai dengan tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 tentang pendirian Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Saldo cadangan umum merupakan saldo pencadangan untuk pemupukan modal kegiatan operasional. Pada tahun buku 2002 telah dilakukan koreksi cadangan umum sebagai akibat diterapkannya PSAK 46 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan yang diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2001.

Saldo cadangan tujuan merupakan saldo pencadangan untuk digunakan sebagai sumber dana pembiayaan investasi dan saldo cadangan teknis merupakan saldo pencadangan untuk digunakan sebagai sumber pendanaan jika terjadi klaim.

20. EQUITY (Continued)

a. Government Paid-in Capital (Continued)

Beginning capital of company amounted to Rp21.000.000.000. In 1992 and 1993 there in capital addition amounted to Rp22.330.000.000 and stated with Government regulation No. 5 year 1994 dated March 3, 1994.

In 1998, there in capital additon amounted to Rp56.403.365.160 and have been stated with Finance Minister decision No. S-33/MK.016/1998 dated Januari 22, 1998 and Government Regulation of Republic of Indonesia No. 11 year 1999 dated January 27, 1999.

b. Reserves

Capital reserve balance represent capital reserve balance which specified based on Finance Minister decree No. 383/KMK/011/1982 dated June 15, 1982 concerning pegging of start-up capital Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

This amounts have been classified as capital reserves as of December 31, 1981 according to the implementation date of PP Nomor 51 year 1981 concerning establishment of Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

General reserve balance represent reservation balance for capital accumulating of operational activity. In the 2002 general reserve have been adjusted due to effect of SFAS 46 implementaion concerning Income Tax Accounting, which effective since January 1, 2001.

Purposed reserve is reservation balance to be used as source of fund of investment financing and technical reserve is reservation balance to be used as source of funding in case of claim happened.

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. EKUITAS (Lanjutan)

20. EQUITY (Continued)

c. Komponen Ekuitas Lainnya

c. Other Components of Equity

Merupakan laba rugi belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut:

Is unrealized profit or loss on securities available for sale with the following details:

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Financial Instruments - Available for Sale

Per 31 Desember 2017 / As of December 31, 2017

Produk Investasi / Investment Product	Harga Perolehan / Cost	Nilai Wajar / Fair Value	Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)
Reksadana/Mutual Fund			
RD Dana Syailendra Dana Ekuitas Dinamis	225.000.000.000	213.651.504.360	(11.348.495.640)
RD Maybank Dana Obligasi Plus	155.259.497.600	155.609.289.870	349.792.270
RD Sucorinvest Saham Dinamis	100.000.000.000	97.912.128.233	(2.087.871.767)
RD Dana Insight Green (I-Green)	80.000.000.000	57.133.944.143	(22.866.055.857)
RD BNI – AM Dana Saham Sektoral	68.154.185.052	76.844.062.750	8.689.877.698
RD Insight Support (I-Support)	50.000.000.000	48.460.135.519	(1.539.864.481)
RD CIMB – Pricipal Islamic Equity Growth Syariah	45.000.000.000	36.817.486.890	(8.182.513.110)
Reksadana Insight Government Fund (I-Govt)	10.000.000.000	10.924.989.163	924.989.163
Reksadana Maybank Dana Pasti II	25.000.000.000	26.027.187.584	1.027.187.584
RD CIMB – P Indo Domestic Equity Fund	20.000.000.000	19.396.753.078	(603.246.922)
Reksadana ITB BNI-AM	25.000.000.000	25.806.322.500	806.322.500
Reksadana Sucorinvest Bond Fund	10.000.000.000	10.234.859.708	234.859.708
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	10.000.000.000	6.151.637.070	(3.848.362.930)
RD Sam Syariah Berimbang	10.000.000.000	8.672.219.061	(1.327.780.939)
RD Panin Gebyar Indonesia II	10.000.000.000	10.062.981.623	62.981.623
RD Sam Indonesian Equity Fund	10.000.000.000	11.224.301.445	1.224.301.445
RD Simas Syariah Unggulan	10.000.000.000	7.359.687.607	(2.640.312.393)
RD Simas Saham Unggulan	10.000.000.000	10.410.869.360	410.869.360
RD MNC Dana SBN	10.000.000.000	10.071.838.511	71.838.511
RD Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds	8.798.640.000	8.820.040.000	21.400.000
RD Manulife Saham SMC Plus	5.000.000.000	3.864.710.832	(1.135.289.168)
RD Syailendra Equity Opportunity Fund	5.000.000.000	5.205.284.851	205.284.851
RD Sam Sharia Equiy Fund	5.000.000.000	3.929.568.351	(1.070.431.649)
RD Panin Dana Maksima	5.000.000.000	4.834.680.582	(165.319.418)
RD Millenium Equity	5.000.000.000	1.834.570.526	(3.165.429.474)
RD Dana Makara Prima	5.000.000.000	5.689.859.606	689.859.606
RD Bahana Mes Syariah Fund	5.000.000.000	5.643.600.000	643.600.000
Reksadana Bahana MES Syariah Fund	5.500.000.000	5.584.686.469	84.686.469
Jumlah Reksadana/Total Mutual Fund	932.712.322.652	888.179.199.692	(44.533.122.960)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. EKUITAS (Lanjutan)

20. EQUITY (Continued)

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan)

c. Other Components of Equity (Continued)

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan)

Financial Instruments - Available for Sale (Continued)

Per 31 Desember 2017 / As of December 31, 2017

Produk Investasi / Investment Product	Harga Perolehan / Cost	Nilai Wajar / Fair Value	Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)
Obligasi / Bonds			
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS005	254.728.200.000	270.210.600.000	15.482.400.000
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	228.820.800.000	232.823.136.000	4.002.336.000
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	40.971.520.000	42.000.120.000	1.028.600.000
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	27.975.000.000	27.983.550.000	8.550.000
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	25.671.522.510	26.825.863.230	1.154.340.720
Obligasi Berkelanjutan I SMI Tahap II tahun 2017 Seri B	25.000.000.000	25.101.375.000	101.375.000
Obligasi Waskita III Waskita Karya Tahun 2017	25.000.000.000	25.643.100.000	643.100.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B	25.000.000.000	25.175.200.000	175.200.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	22.350.000.000	22.389.160.000	39.160.000
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012	22.419.840.000	23.010.240.000	590.400.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	21.800.000.000	23.324.420.000	1.524.420.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	21.000.000.000	22.389.160.000	1.389.160.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	20.390.000.000	22.389.160.000	1.999.160.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	20.000.000.000	22.135.868.604	2.135.868.604
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012	16.730.055.000	17.257.680.000	527.625.000
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B	15.000.000.000	15.361.200.000	361.200.000
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I 2017 Seri A	15.000.000.000	14.975.205.000	(24.795.000)
Obligasi II Medco Energi Tahap VI Tahun 2017	15.000.000.000	15.954.435.000	954.435.000
Obligasi I Kereta Api Tahun 2017 Seri A	15.000.000.000	15.187.725.000	187.725.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	14.551.610.940	15.785.021.780	1.233.410.840
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042	12.205.000.000	12.599.000.000	394.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	12.000.000.000	12.473.880.000	473.880.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	11.750.000.000	12.928.280.000	1.178.280.000
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012	10.765.000.000	11.505.120.000	740.120.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	10.700.000.000	11.662.210.000	962.210.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	10.645.000.000	11.662.210.000	1.017.210.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	10.295.000.000	11.194.580.000	899.580.000
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahun 2017	10.000.000.000	10.544.860.000	544.860.000
Obligasi I Kereta Api Tahun 2017 Seri B	10.000.000.000	10.146.480.000	146.480.000
Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A	10.000.000.000	10.047.070.000	47.070.000
Obligasi Berkelanjutan II Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C	10.000.000.000	10.403.980.000	403.980.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	9.837.210.000	10.583.320.000	746.110.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	9.620.000.000	9.754.350.000	134.350.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	9.600.000.000	9.754.350.000	154.350.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	9.600.000.000	9.754.350.000	154.350.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	9.500.000.000	9.740.970.000	240.970.000
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS005	9.240.000.000	9.907.722.000	667.722.000
Obligasi I BSD Tahap II Tahun 2013	9.000.000.000	9.067.032.000	67.032.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	8.465.386.545	8.952.430.388	487.043.843
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS004	8.000.000.000	8.509.520.000	509.520.000
Obligasi Berkelanjutan 1 ANTAM Tahap I Tahun 2011	5.880.000.000	6.063.348.000	183.348.000
Obligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	5.730.000.000	5.887.986.000	157.986.000
Obligasi I BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B	5.000.000.000	5.021.115.000	21.115.000
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS004	4.948.905.000	5.267.392.880	318.487.880
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012	4.316.420.255	4.598.596.464	282.176.209
Obligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	4.000.000.000	3.925.324.000	(74.676.000)
Obligasi Berkelanjutan 1 Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	3.960.000.000	4.029.792.000	69.792.000
Obligasi Berkelanjutan 1 Bumi Serpong Damai			
Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri D	3.924.000.000	4.037.896.000	113.896.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	2.491.484.274	2.796.880.500	305.396.226
Obligasi 1 PP Properti Tahun 2016 Seri B	2.040.000.000	1.976.286.000	(63.714.000)
Tahap II Tahun 2013	2.010.000.000	2.014.896.000	4.896.000

Jumlah Obligasi / Total Bonds

1.117.931.954.524

1.162.733.446.846

44.801.492.322

2017 Annual Report

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

483

20. EKUITAS (Lanjutan)

20. EQUITY (Continued)

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan)

c. Other Components of Equity (Continued)

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan)

Financial Instruments - Available for Sale (Continued)

Per 31 Desember 2017 / As of December 31, 2017

Produk Investasi / Investment Product	Harga Perolehan / Cost	Nilai Wajar / Fair Value	Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)
Saham / Share			
Dua Putra Utama Makmur, Tbk	89.999.965.000	45.490.891.400	(44.509.073.600)
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	64.420.000.000	51.213.900.000	(13.206.100.000)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	19.344.379.310	11.385.000.000	(7.959.379.310)
PT Wijaya Karya Gedung Tbk	14.529.000.000	13.026.000.000	(1.503.000.000)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	14.000.150.000	14.208.000.000	207.850.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	10.973.000.000	8.800.000.000	(2.173.000.000)
PT Waskita Beton Precast Tbk	10.302.774.300	8.526.000.000	(1.776.774.300)
PT PP Presisi Tbk	9.999.994.000	9.441.854.800	(558.139.200)
PP (Persero) Tbk	8.395.489.119	6.457.776.000	(1.937.713.119)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.921.120.125	7.050.000.000	(871.120.125)
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7.123.295.147	7.011.250.000	(112.045.147)
Pakuwon Jati Tbk	6.228.039.450	6.460.000.000	231.960.550
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6.043.167.430	5.635.000.000	(408.167.430)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	5.215.842.342	2.408.100.000	(2.807.742.342)
PT Kalbe Farma Tbk	5.002.250.100	5.055.000.000	52.749.900
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	4.533.703.050	2.945.000.000	(1.588.703.050)
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.402.741.552	4.212.500.000	(190.241.552)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.500.250.000	3.492.500.000	(7.750.000)
PT PP London Sumatera Tbk	2.510.000.000	2.710.000.000	200.000.000
Jumlah Saham/ Total Shares	294.445.160.925	215.528.772.200	(78.916.388.725)
Efek Beragunan Aset / Security (Assets Underlying)			
Efek Beragunan Aset Mandiri Kelas A	25.000.000.000	25.309.075.000	309.075.000
Efek Beragunan Aset Danareksa IP PLN	8.629.798.807	8.706.362.382	76.563.575
Jumlah Efek Beragunan Aset / Total Security (Assets Underlying)	33.629.798.807	34.015.437.382	385.638.575
Jumlah Aset Tersedia Untuk Dijual / Total Financial Instrument - Available for Sale			(78.262.380.788)
Pengaruh Pajak Atas Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / Tax Effect on Financial Instruments - Available for Sale			20.197.940.953
Cadangan Revaluasi Aset / Asset Revaluation Reserve			289.434.424.383
Pengaruh Pajak atas Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti / Tax Effect on Restatement of Post Employee Benefit			(20.024.715.335)
Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya / Total Other Equity Component			211.345.269.213

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

20. EKUITAS (Lanjutan)

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan)

Merupakan laba rugi belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut:

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

20. EQUITY (Continued)

c. Other Components of Equity (Continued)

Is unrealized profit or loss on securities available for sale with the following details:

Financial Instruments - Available for Sale

Per 31 Desember 2016 / As of December 31, 2016

Produk Investasi / Investment Product	Harga Perolehan / Cost	Nilai Wajar / Fair Value	Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)
Reksadana/Mutual Fund			
RD Dana Syailendra Dana Ekuitas Dinamis	225.000.000.000	183.324.256.807	(41.675.743.193)
RD Maybank Dana Obligasi Plus	155.259.497.600	144.071.492.220	(11.188.005.380)
RD BNI – AM Dana Saham Sektoral/ <i>Inspiring Equity Fund</i>	110.000.000.000	107.414.799.949	(2.585.200.051)
RD Sucorinvest Saham Dinamis	100.000.000.000	87.189.542.425	(12.810.457.575)
RD Dana Insight Green (I-Green)	80.000.000.000	50.702.896.455	(29.297.103.545)
RD Insight Support (I-Support)	50.000.000.000	43.764.188.112	(6.235.811.888)
RD CIMB – Pricipal Islamic Equity Growth Syariah	45.000.000.000	36.768.909.152	(8.231.090.848)
RD Dana RHB Equity Opportunity Fun	30.000.000.000	29.336.341.462	(663.658.538)
RD BNI-AM Dana Terencana	25.000.000.000	26.738.803.119	1.738.803.119
RD CIMB – P Indo Domestic Equity Fund	20.000.000.000	17.390.351.510	(2.609.648.490)
RD Batavia Dana Saham Optional	20.000.000.000	19.447.738.515	(552.261.485)
RD CIMB-Principal Equity Aggressive	10.000.000.000	9.285.804.341	(714.195.659)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	10.000.000.000	6.538.026.553	(3.461.973.447)
RD Sam Syariah Berimbang	10.000.000.000	9.550.226.207	(449.773.793)
RD CIMB-P Balanced Growth Syariah	10.000.000.000	9.934.268.997	(65.731.003)
RD Sam Indonesian Equity Fund	10.000.000.000	10.765.159.988	765.159.988
RD Simas Syariah Unggulan	10.000.000.000	8.175.339.936	(1.824.660.064)
RD Simas Saham Unggulan	10.000.000.000	9.482.196.802	(517.803.198)
RD Insight Wealth (I-Wealth)	10.000.000.000	10.184.280.000	184.280.000
RD Dana Simas Danamas Saham	10.000.000.000	9.928.003.397	(71.996.603)
RD Saham Sukuk Syariah Sejahtera	10.000.000.000	11.286.547.734	1.286.547.734
RD Insight Syariah Berimbang (IShare)	5.000.000.000	5.017.632.847	17.632.847
RD Manulife Saham SMC Plus	5.000.000.000	3.974.037.941	(1.025.962.059)
RD Syailendra Equity Opportunity Fund	5.000.000.000	4.340.967.600	(659.032.400)
RD Sam Sharia Equiy Fund	5.000.000.000	4.398.078.578	(601.921.422)
RD Danareksa Mawar Konsumer 10	5.000.000.000	4.987.607.416	(12.392.584)
RD Panin Dana Maksima	5.000.000.000	4.697.006.263	(302.993.737)
RD Millenium Equity	5.000.000.000	2.202.945.855	(2.797.054.145)
RD Dana Makara Prima	5.000.000.000	5.046.822.870	46.822.870
RD Bahana Mes Syariah Fund	5.000.000.000	4.963.100.000	(36.900.000)
Reksadana Bahana MES Syariah Fund	500.000.000	496.310.000	(3.690.000)
Jumlah Reksadana/Total Mutual Fund	1.005.759.497.600	881.403.683.051	(124.355.814.549)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. EKUITAS (Lanjutan)

20. EQUITY (Continued)

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan)

c. Other Components of Equity (Continued)

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan)

Financial Instruments - Available for Sale (Continued)

Per 31 Desember 2016 / As of December 31, 2016

Produk Investasi / Investment Product	Harga Perolehan / Cost	Nilai Wajar / Fair Value	Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)
Obligasi / Bonds			
Negara RI Seri FR0072	142.754.670.000	133.000.000.000	(9.754.670.000)
Negara RI Seri FR0068	74.035.000.000	71.400.000.000	(2.635.000.000)
Negara RI Seri PBS012	49.914.895.000	46.462.500.000	(3.452.395.000)
Negara RI Seri FR0073	43.145.000.000	42.208.000.000	(937.000.000)
SBSN Seri PBS012	32.825.000.000	30.715.230.000	(2.109.770.000)
Negara RI Seri FR0065	28.820.000.000	25.800.000.000	(3.020.000.000)
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri B	27.000.000.000	26.865.000.000	(135.000.000)
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B	15.000.000.000	14.853.000.000	(147.000.000)
I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	14.970.000.000	14.703.000.000	(267.000.000)
Negara RI Seri FR0074	14.551.610.940	14.467.550.000	(84.060.940)
Negara RI Seri FR0052	11.750.000.000	12.165.000.000	415.000.000
Negara RI Seri FR0042	11.125.000.000	11.509.500.000	384.500.000
Negara RI Seri FR0047	10.945.000.000	11.350.000.000	405.000.000
Seri C	10.000.000.000	10.046.990.000	46.990.000
Onligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	9.730.000.000	9.801.000.000	71.000.000
Negara RI Seri FR0064	9.500.000.000	8.530.800.000	(969.200.000)
Antam Seri A Tahun 2011	5.880.000.000	6.003.000.000	123.000.000
I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	5.700.000.000	6.003.000.000	303.000.000
Berkelanjutan II Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2014			
BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D	3.924.000.000	3.894.000.000	(30.000.000)
Negara RI Seri FR0059	2.491.484.274	2.491.875.000	390.726
I PP Properti Tahun 2016 Seri B	2.040.000.000	1.944.600.000	(95.400.000)
Jumlah Obligasi / Total Bonds	531.101.660.214	509.214.045.000	(21.887.615.214)
Saham / Share			
Dua Putra Utama Makmur, Tbk (DPUM)	89.999.965.000	80.509.059.600	(9.490.905.400)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	19.122.379.337	10.302.900.000	(8.819.479.337)
Waskita Karya	10.973.000.000	10.160.000.000	(813.000.000)
Bank Negara Indonesia	9.641.150.040	8.525.000.000	(1.116.150.040)
PT Kalbe Farma Tbk	8.995.818.000	9.090.000.000	94.182.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	8.338.762.492	6.249.931.000	(2.088.831.492)
PT Telekomunikasi Indonesia	7.878.900.050	7.543.000.000	(335.900.050)
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7.123.292.831	6.774.250.000	(349.042.831)
Pakuwon Jati Tbk	6.705.572.000	5.650.000.000	(1.055.572.000)
PP (Persero) Tbk	6.230.489.050	5.930.592.000	(299.897.050)
PT Unilever Indonesia Tbk	6.053.920.000	5.369.920.000	(684.000.000)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	5.215.842.342	3.726.000.000	(1.489.842.342)
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.370.901.948	3.101.724.000	(269.177.948)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	2.609.262.425	2.765.000.000	155.737.575
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.271.222.940	2.310.000.000	38.777.060
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	2.673.208.113	2.066.180.000	(607.028.113)
Waskita Beton Precast (IPO)	1.959.550.148	2.087.250.000	127.699.852
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)	1.094.750.003	1.011.500.000	(83.250.003)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	793.625.000	817.250.000	23.625.000
Jumlah Saham/ Total Shares	201.051.611.719	173.989.556.600	(27.062.055.119)
Jumlah Aset Tersedia Untuk Dijual / Total Financial Instrument - Available for Sale			(173.305.484.881)
Pengaruh Pajak Atas Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / Tax Effect on Financial Instruments - Available for Sale			43.854.736.220
Cadangan Revaluasi Aset / Asset Revaluation Reserve			289.434.424.383
Pengaruh Pajak atas Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti / Tax Effect on Restatement of Post Employee Benefit			(19.098.620.252)
Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya / Total Other Equity Component			140.885.055.470

20. EKUITAS (Lanjutan)

d. Analisis Gearing Ratio

Sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.02/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, bahwa Lembaga Penjamin wajib menjaga *Gearing Ratio* untuk penjaminan bagi usaha Produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali dan wajib menjaga total *Gearing Ratio* paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

Gearing Ratio merupakan perbandingan antara total nilai outstanding Penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih Penjamin pada waktu tertentu. Modal sendiri bersih terdiri dari penempatan modal Pemerintah, cadangan-cadangan, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya dikurangi kerugian.

Gearing Ratio Penjaminan untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi 20 (dua puluh) kali dari ekuitas Perusahaan dan total *Gearing Ratio* ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali dari ekuitas Perusahaan.

Pada posisi 31 Desember 2017, *Gearing Ratio* Produktif Perum Jamkrindo adalah 9,59 kali, sedangkan total *gearing ratio* adalah sebesar 15,27 kali.

Karena *Gearing Ratio* masih berada di bawah ketentuan maksimal yang diperkenankan, maka Perum Jamkrindo masih mempunyai kelonggaran kapasitas untuk melakukan penjaminan. Untuk penjaminan kredit produktif, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp115,824 triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari *outstanding* tahun berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= (20,00 - 9,59) \times \text{Rp}11,123 \text{ triliun} = \text{Rp}115,824 \text{ triliun}$$

Untuk penjaminan kredit secara total, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp275,045 triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari *outstanding* tahun berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= (40,00 - 15,27) \times \text{Rp}11,123 \text{ triliun} = \text{Rp}275,045 \text{ triliun}$$

21. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Bagian yang menjadi hak (beban) pengaruh *non*-pengendali atas laba Entitas Anak adalah sebagai berikut:

20. EQUITY (Continued)

d. Gearing Ratio Analysis

As referred to in Article 28 paragraph (3) and (4) of the Regulation of the Financial Services Authority No.02 / POJK.05 / 2017 on the Guarantee Institution's Business Operation, the Guarantee Institution is obliged to maintain the *Gearing Ratio* for guarantee of Productive business at maximum 20 (twenty) times and shall keep the total *Gearing Ratio* at the most 40 (forty) times.

Gearing Ratio is the ratio between the total outstanding value of a self-assurance with a net worth of Guarantor at any given time. Net worth is total assets minus total liabilities consist of the placement of government capital, reserves, retained earnings and other equity components of net losses.

Gearing Ratio of Guarantee for Productive Enterprises is set at the most 20 (twenty) times of the Company's equity and the total *Gearing Ratio* is set at the maximum 40 (forty) times of the Company's equity.

On December 31, 2017, the *gearing ratio* of Perum Jamkrindo was productive to 9.59 times, while the total *gearing ratio* is to 15.27 times.

Because *Gearing Ratio* is still below the allowed maximum terms, the Perum Jamkrindo still have given the capacity to do the guarantee. To guarantee the productive credit, guarantee concessions amounted to Rp115.824 trillion without taking into account the repayment of outstanding current year, calculated as follows:

For a total credit guarantee, the guarantee allowance amounted to Rp275.045 trillion without taking into account the repayment of outstanding current year, calculated as follows:

21. NON-CONTROLLING INTEREST

The rights part (expense) non-controlling influence on subsidiaries profit are as follows:

31 Desember 2017 / December 31, 2017			
Laporan Posisi Keuangan / Statements of Financial Position			
Entitas Anak / Subsidiaries	%	Aset Bersih/ Net Assets	Kepentingan Non -Pengendali Non-Controlling Interest
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,005%	277.341.231.979	13.798.955
31 Desember 2017 / December 31, 2017			
Laba yang Dapat Diatribusikan / Net - Income Attributable			
Entitas Anak / Subsidiaries	%	Laba Bersih/ Net Income	Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,005%	14.887.091.979	744.356

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

21. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

21. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)

31 Desember 2016 (December 31, 2016)			
Laporan Posisi Keuangan / Statements of Financial Position			
Entitas Anak / Subsidiaries	%	Aset Bersih/ Net Assets	Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,005%	262.454.118.269	13.122.707

31 Desember 2016 (December 31, 2016)			
Laba yang Dapat Diatribusikan /Net - Income Attributable			
Entitas Anak / Subsidiaries	%	Laba Bersih/ Net Income	Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,005%	6.810.472.938	340.524

22. IMBAL JASA PENJAMINAN

22. GUARANTEE FEE

	2017	2016	
IJP Bruto:			Gross Guarantee Fee
IJP Kredit Usaha Rakyat	1.359.768.223.454	1.120.315.055.991	Guarantee Fee – KUR
IJP Kredit Eksisting	676.284.350.645	733.927.546.041	Guarantee Fee – Existing Credit
Pendapatan Komisi Re-Asuransi	27.223.787.525	35.017.148.083	Re-insurance Commission
Jumlah IJP Bruto	2.063.276.361.624	1.889.259.750.115	Total Gross Guarantee Fee
Premi Re-Asuransi	(154.312.552.154)	(118.610.157.602)	Re-Insurance Premium
Premi Co-Guarantee	(96.471.972.027)	(166.237.457.658)	Co-Guarantee Premium
Restitusi IJP	(6.805.472.327)	(15.971.543.801)	Guarantee Restitution
Jumlah IJP Bersih	1.805.686.365.116	1.588.440.591.054	Total Net Guarantee Fee

Pendapatan Imbal Jasa penjaminan (IJP) adalah premi yang diterima oleh perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dihitung dari tarif IJP, plafond kredit dan jangka waktu kredit.

Guarantee Fee (IJP) is the premium received by the company in order to secure credit activities. The amount of IJP is measure from IJP rate, credit limit, and credit period.

Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan. IJP kredit umum dibayar sekaligus di muka.

For existing credits, the amount of IJP rate is determined by considering such as: product of guarantee, guarantee risk, and guarantee period. IJP of general credit is paid in advance.

Tarif IJP Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2014 tanggal 2 November 2010. IJP KUR dibayarkan per tahun oleh pemerintah dengan periode penagihan pada bulan Mei dan November.

Rates of KUR Guarantee Fee is regulated in Minister of Finance Regulation Number 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 concerning KUR Guarantee facility and Ministry of Finance Regulation No.190/PMK.05/2014 dated November 2, 2010. IJP KUR paid once a year by the government with billing period in May and November.

IJP Kredit Usaha Rakyat sudah memperhitungkan sharing IJP ke dan dari Askrindo dengan proporsi 56% untuk Jamkrindo dan 44 % untuk Askrindo sesuai Perjanjian kerjasama No. 95/Jamkrindo/XII/2011 tanggal 1 Desember 2010 tentang penjaminan kredit/ pembiayaan bersama kredit usaha rakyat (KUR) yang di-addendum dengan perjanjian No. 51/Jamkrindo/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan perjanjian No. 38/Jamkrindo/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012. Sharing IJP KUR dengan Askrindo tidak termasuk IJP KUR dengan pola penjaminan syariah.

IJP of KUR has consider about IJP sharing to and from Askrindo with the proportion of 56% for Jamkrindo and 44% for Askrindo in accordance with agreement No. 95/Jamkrindo/XII/2011 dated December 1, 2010 concerning of credit guarantee/ KUR guarantee, which the addendum is No. 51/Jamkrindo/XII/2011 dated December 29, 2011 and agreement No. 38/Jamkrindo/VII/2012 dated July 2, 2012. IJP of KUR with the method of sharia guarantee is not include in sharing with Askrindo.

Pendapatan komisi re-asuransi merupakan komisi yang diterima dari mitra re-asuransi dengan prosentase tertentu dari jumlah premi yang dibayar ke mitra re-asuransi.

Re-insurance commission income is earned commission from re-insurance partner with a certain percentage of the amount of the premium paid to re-insurance partners.

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

22. IMBAL JASA PENJAMINAN (Lanjutan)

Premi Co-Guarantee merupakan premi yang dibebankan kepada terjamin atas kepesertaan asuransi jiwa kredit/ pembiayaan untuk dibayarkan kepada mitra Co-Guarantee melalui Penerima Jaminan (bank/ non bank).

Besaran premi Co-Guarantee yang menjadi hak mitra Co-Guarantee s/d 31 Januari 2013 adalah 60% dan mulai 01 Pebruari 2013 adalah sebesar 54% dari Imbal Jasa Penjaminan yang ditetapkan dalam Sertifikat Penjaminan (SP) yang di dalamnya sudah termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan Perjanjian Khusus atau yang disetarakan dengan itu. Dengan adanya addendum PKS mitra co bulan Mei 2013, hak mitra co menjadi 38% tanpa dipotong biaya administrasi untuk penerbitan SP yang realisasi kreditnya mulai tanggal 01 Mei 2013. Kemudian dilakukan addendum lagi, hak mitra co menjadi 54% tanpa dipotong biaya administrasi untuk penerbitan SP yang realisasi kreditnya mulai tanggal 01 Januari 2014.

Premi re-asuransi merupakan premi yang dibayarkan guna mengalihkan risiko klaim ke mitra re-asuransi. Besaran premi re-asuransi yang menjadi hak mitra re-asuransi ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

22. GUARANTEE FEE (Continued)

Co-guarantee premium is premium charged to guaranteed about their participation in credit life insurance/ financing to be paid to co-guarantee partners through The Insured (bank/ non-bank).

The amount of Co-Guarantee premium which are the right of co-guarantee partners until January 31, 2013 is at 60% and started February 1, 2013 the amount is at 54% from IJP specified in Guarantee Certificate (SP) include administrative costs and other expenses which related to special agreement or that equal. With the addendum of co-guarantee agreement on May, 2013, the rights of co partners become at 38% without reduced of administration costs for issuance of SP which the realization was began on May 1, 2013. Then on the next addendum, rights of co partners become at 54% without reduced of administration costs for the issuance of SP which the realization was began on January 1, 2014.

Re-insurance premium is the premium that paid to reduce the claim risk to re-insurance partner. The amount of the premium is determined based on the type of guarantee products.

23. BEBAN KLAIM

	2017	2016
Beban Klaim Kredit Usaha Rakyat	549.812.308.644	481.493.287.372
Beban Klaim Kredit Eksisting	421.405.286.190	282.982.934.410
Jumlah Beban Klaim	971.217.594.834	764.476.221.782
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	22.614.674.140	83.842.316.720
Kerugian Penurunan Nilai Piutang Co-Guarantee	10.777.367.505	23.264.905.716
Jumlah Beban Klaim	1.004.609.636.479	871.583.444.218

Beban klaim adalah beban yang timbul sebagai akibat macetnya kredit akibat risiko yang ditanggung Perusahaan. Jumlah klaim yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Jaminan terdiri dari hutang pokok, hutang bunga dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh terjamin pada saat kredit jatuh tempo dan kredit tidak dapat diperpanjang lagi atau sebelum kredit jatuh tempo sesuai kesepakatan yang ada.

Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim merupakan selisih Cadangan Klaim tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

23. CLAIM EXPENSE

	2017	2016
KUR's Claim Expenses	549.812.308.644	481.493.287.372
Claim Expense - Existing Credit	421.405.286.190	282.982.934.410
Total Claim Expenses	971.217.594.834	764.476.221.782
Increase (Decrease) Claim Reserves	22.614.674.140	83.842.316.720
Impairment Losses- Co-Guarantee Receivable	10.777.367.505	23.264.905.716
Total Claim Expenses	1.004.609.636.479	871.583.444.218

Claim expenses are expenses incurred as a result of credit loss due to the risks covered by the company. The number of claims that can be paid by the company to the Recipient of Guarantee include of principal payable, interest payable and penalties that can not be met by the Guaranteed at the time of loan maturity and the credit can not be extended again or before the due credit according to existing agreements.

Increase (Decrease) of Claim Reserves represent the difference of the current year with previous year.

24. PENDAPATAN INVESTASI

	2017	2016
Bunga Deposito	345.519.197.963	378.742.730.852
Bunga Obligasi	150.642.568.373	121.515.888.629
Pendapatan Reksadana	69.637.341.530	62.234.693.539
Laba Pelepasan Saham	34.285.580.131	24.500.114.275
Efek Beragunan Aset	3.317.471.032	2.092.735.797
Dividen	1.985.616.083	1.531.491.723
Jumlah Pendapatan Investasi	605.387.775.111	590.617.654.815
Beban Investasi	(3.753.769.028)	(2.939.613.868)
Jumlah Beban Investasi	(3.753.769.028)	(2.939.613.868)
Jumlah Pendapatan Investasi Bersih	601.634.006.083	587.678.040.947

24. INVESTMENT INCOME

	2017	2016
Time Deposit Interest	345.519.197.963	378.742.730.852
Bond Interest	150.642.568.373	121.515.888.629
Mutual Fund Income	69.637.341.530	62.234.693.539
Capital Gain on Stock	34.285.580.131	24.500.114.275
Security (Assets Underlying)	3.317.471.032	2.092.735.797
Dividend	1.985.616.083	1.531.491.723
Total Investment Income	605.387.775.111	590.617.654.815
Investment Expense	(3.753.769.028)	(2.939.613.868)
Total Investment Expense	(3.753.769.028)	(2.939.613.868)
Total Investment Income - Net	601.634.006.083	587.678.040.947

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

25. BEBAN USAHA

25. OPERATING EXPENSES

	2017	2016	
Beban Sumber Daya Manusia			Human Resources Expenses
Kesejahteraan	61.644.714.013	52.481.221.802	Wealthfare
Jasa Produksi	57.597.384.085	47.200.249.383	Production Services
Gaji	35.613.180.004	30.790.046.754	Sallaries
PPh. Pasal 21	23.803.972.737	22.441.437.365	Income Tax Subsidy (art. 21)
Tantiem	21.045.500.000	15.765.510.000	Tantiem
Tunjangan Jabatan	20.763.348.482	17.289.762.779	Officer Subsidy
Tunjangan Hari Raya	18.076.516.713	13.871.396.270	Special Day Subsidy
Pendidikan dan Pelatihan	13.551.409.477	17.067.138.166	Education and Training
Konsumsi	12.583.112.570	9.423.873.079	Meal
Beban Estimasi Imbalan Pasca Kerja	12.217.612.422	6.221.474.731	Employee Benefit Estimation Expense
Beban Cuti	11.418.364.088	6.221.937.541	Leave Expense
Insentif	7.269.388.088	3.382.102.393	Incentive
Asuransi Kesehatan	6.847.844.255	5.714.200.663	Healthcare Insurance
Tunjangan Wilayah	6.553.644.450	6.360.512.403	Area Benefits
Premi Asuransi Pensiun	6.477.836.450	3.490.190.990	Pension Insurance Premiums
Tunjangan Kesehatan	2.659.627.864	2.361.837.037	Healthcare
Tunjangan Perumahan	2.327.996.667	2.322.000.000	Housing Subsidy
Iuran Jamsostek	1.560.607.341	811.430.878	Social Security Premium
Lembur	1.311.287.465	1.325.011.487	Overtime
Tunjangan Komunikasi	981.688.395	827.258.318	Communication
Tunjangan Transport	877.011.200	808.869.000	Transportation Subsidy
Pakaian Kerja	640.221.000	3.101.521.595	Uniform
Tunjangan Perusahaan	-	53.206.400	Company Benefits
Sub Jumlah Beban			Sub Total Human
Sumber Daya Manusia	325.822.267.767	269.332.189.035	Resources Expenses
Beban Operasional			Operating Expenses
Fee Agen	58.757.209.307	50.417.517.387	Fee Agent
Beban Sewa	38.835.086.753	28.046.411.228	Rent Expenses
Beban Promosi	23.886.950.155	25.737.587.961	Promotional Expenses
Fee Based Income	22.110.438.422	24.012.559.777	Fee Based Income
Beban Perjalanan Dinas	20.753.682.565	21.595.606.223	Business Travel Expenses
Beban Pemeliharaan Kendaraan	19.022.795.233	13.794.740.491	Vehicle Maintenance Expenses
Beban Hubungan Kelembagaan & Pemasaran	18.037.794.304	23.293.683.622	Institutional Relation & Marketing Expenses
Beban Penagihan Subrogasi	10.514.914.174	21.500.065.015	Subrogation Collection Expenses
Beban Eksploitasi	9.995.937.468	12.453.486.781	Exploitation Expenses
Beban Sosialisasi dan Rekonsiliasi	6.487.558.720	9.491.760.399	Socialization and Reconciliation Expenses
Sub Jumlah Beban Operasional	228.402.367.101	230.343.418.883	Sub Total Operating Expenses
Beban Administrasi Kantor dan Umum			General and Administrative Expenses
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	29.313.207.601	25.648.792.650	Vehicle Maintenance Expenses
Beban Lain-lain	23.363.380.822	21.603.602.045	Other Expenses
Beban Penyusutan Aset Tetap	18.597.153.281	12.721.224.167	Fixed Asset Depreciation Expenses
Beban Komunikasi dan Energi	14.267.134.988	13.219.753.759	Communication and Energy Expenses
Beban Representasi	12.315.339.149	11.214.331.097	Representation Expenses
Beban PKBL	10.002.712.060	13.069.463.867	PKBL Expense
Beban Pencetakan	6.123.626.284	5.305.655.081	Printing Expenses
Beban ATK	5.896.701.709	5.636.211.814	Supplies Expenses
Beban Rapat Kerja	4.460.660.754	4.950.517.999	Business Meeting Expenses
Beban Konsultasi	4.299.002.551	6.442.431.806	Consultant Expenses
Beban Pemeriksaan	1.391.370.134	765.435.802	Audit Expenses
Beban Bank	1.161.752.980	780.151.632	Bank Expenses
Beban Asosiasi	921.832.082	1.272.635.132	Association Expenses
Beban Pajak-Pajak	597.480.471	5.940.318.212	Tax Expenses
Beban Perijinan	180.806.904	192.021.549	Registration Expenses
Beban Amortisasi	46.729.953	35.751.320	Amortization Expenses
Sub Jumlah Beban			Total General And
Adm. Kantor & Umum	132.938.891.723	128.798.297.931	Administrative Expenses

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN USAHA (Lanjutan)

	2017	2016
Beban Sistem, Teknologi dan Pengembangan Usaha		
Beban Sistem & Teknologi	17.332.814.074	13.498.610.227
Beban Pengembangan Usaha	3.672.741.629	15.178.708.040
Sub Jumlah Beban Sistem, Teknologi dan Pengembangan Usaha	21.005.555.703	28.677.318.267
Jumlah Beban Usaha	708.169.082.294	657.151.224.116

25. OPERATING EXPENSES (Continued)

Technology, System and Development Expense
<i>Technology and System Expenses</i>
<i>Development Expenses</i>
Sub Total Technology, System and Development Expense
Total Operating Expenses

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain bersih merupakan pendapatan diluar usaha setelah dikurangi beban diluar usaha, dengan rincian sebagai

Other income is income beside operating revenue and operating expense, are as follows:

	2017	2016
Pendapatan Lain-Lain		
Pendapatan Subrogasi	285.834.472.729	259.384.339.757
Pendapatan Lainnya	21.887.077.410	17.377.019.881
Pendapatan Subrogasi Lainnya	11.033.192.436	4.620.915.434
Pendapatan Jasa Giro	5.890.101.587	9.240.053.199
Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan	3.815.125.966	3.217.695.717
Pendapatan Administrasi BUM	219.078.317	230.067.491
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	328.679.048.443	294.070.091.480

Other Income
<i>Subrogation Income</i>
<i>Others</i>
<i>Other Subrogation Income</i>
<i>Interest Income</i>
<i>Administration Guarantee Income</i>
<i>BUM Administration Income</i>
Total Other Income

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In its bussiness activities, the company perform certain transactions with related parties, management believes that transaction with related parties performed with the same condition with third parties, which include:

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat dari Transaksi / Nature from The Transaction
Bank Rakyat Indonesia	Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related with The Government</i>	Giro, deposito, efek-efek/ <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
Bank Mandiri	Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related with The Government</i>	Giro, deposito, efek-efek/ <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
Bank Negara Indonesia	Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related with The Government</i>	Giro, deposito, efek-efek/ <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
Bank Tabungan Negara	Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related with The Government</i>	Giro, deposito, efek-efek/ <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
Bank Rakyat Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related with The Government</i>	Giro, deposito, efek-efek/ <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
Bank Syariah Mandiri	Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related with The Government</i>	Giro, deposito, efek-efek/ <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
Bank Negara Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related with The Government</i>	Giro, deposito, efek-efek/ <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
Bank Tabungan Negara Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related with The Government</i>	Giro, deposito, efek-efek/ <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
Menteri Keuangan / <i>Finance Minister</i>	Pemegang Saham/ <i>Share Holder</i>	Piutang IJP KUR/ <i>IJP KUR Receivables</i> , Pendapatan IJP KUR/ <i>IJP KUR Revenue</i>
Dewan Pengawas dan Direksi / <i>Supervisory Council Members</i>	Manajemen Kunci Perusahaan / <i>Key Management of Company</i>	Gaji dan Tunjangan Dewas / <i>Salaries and Allowances</i>

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)**

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Tahun 2008, berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM-K, Perusahaan melaksanakan penjaminan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk merealisasikan program KUR tersebut, Pemerintah telah menambah modal Perusahaan sebesar Rp600 milyar tahun 2007, Rp250 milyar tahun 2009, Rp900 milyar tahun 2010, Rp1,2 triliun tahun 2011 dan Rp1,169 milyar tahun 2012. Imbal Jasa Penjaminan (IJP)/Imbal Jasa Kafalah (IJK) atas KUR tersebut ditanggung oleh pemerintah dan dibayar per tahun. Untuk Sertifikat Penjaminan (SP) yang terbit sebelum 14 Februari 2010 dicatat sebesar Rp 1,5% x 70% dari plafon kredit sedangkan untuk Sertifikat Penjaminan (SP) setelah 14 Februari 2010 dicatat dengan menggunakan tarif 3,25% dengan coverage 70%-80%. Segmentasi operasional penjaminan KUR sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Dana

	2017	2016
Giro	145.762.490.737	129.360.773.566
Deposito	4.045.035.000.000	4.605.040.476.218
Obligasi	1.910.752.408.664	1.377.264.020.249
Saham	215.528.772.200	173.989.556.600
Reksa dana	1.607.656.576.532	1.483.723.823.165
Efek Beragun Aset (EBA)	63.723.188.457	21.747.084.323
Sub Jumlah	7.988.458.436.590	7.791.125.734.121
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi		
Atas Efek Tersedia Untuk Dijual	57.830.808.868	(173.305.484.881)
Jumlah	8.046.289.245.458	7.617.820.249.240

28. GUARANTING ON KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

In 2008, based on President Instruction No. 6 year 2007 dated Juni 8, 2007 concerning Real Sector Acceleration and Strengthening of UMKM-K Policy, Company provide guarantee to citizen business loan (KUR). To realize the program, in the end of 2009 and 2007 Governnet have make addition of company capital amounted to Rp600 billion, Rp250 billion in 2009, Rp900 billion in 2010, Rp1,2 trillion in 2011 and Rp1,169 billion in 2012. Guarantee Fee/Kafalah Fee of KUR is borne by the government and paid per year, for the Certificate of Guarantee (SP), which appeared prior to February 14, 2010 recorded at Rp 1.5% x 70% of the credit limit while for Certificate of Assurance (SP) after February 14, 2010 recorded a marginal 3.25% to 70% -80% coverage. Segmentation KUR underwriting operations as follows:

a. Fund Position Report

Current Accounts
Time Deposit
Bonds
Shares
Mutual Fund
Security (Asset Underlying)
Sub Total
Unralized Gain (Loss) of Marketable
Securities - Avalaible for Sale
Total

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Lanjutan)

28. GUARANTING ON KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Continued)

b. Laporan Laba Rugi

b. Income Statement

2017

2017

	KORPORAT	KUR
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	2.036.052.574.099	1.359.768.223.453
Pendapatan Komisi Re-Asuransi	27.223.787.525	-
Premi Co-Guarantee	(96.471.972.027)	-
Premi Re-Asuransi	(154.312.552.154)	-
Restitusi IJP	(6.805.472.327)	-
Imbal Jasa Penjaminan Bersih	1.805.686.365.116	1.359.768.223.453
BEBAN KLAIM		
Beban Klaim	(971.217.594.834)	(549.812.308.643)
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim	(22.614.674.140)	(99.359.342.968)
Penyisihan Piutang IJP/KUR	(3.276.005.834)	(3.276.005.834)
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(7.419.859.721)	-
Provisi Kerugian Klaim	(81.501.950)	-
Jumlah Beban Klaim	(1.004.609.636.479)	(652.447.657.444)
PENJAMINAN BERSIH	801.076.728.637	707.320.566.009
Pendapatan Investasi Bersih	601.634.006.083	525.393.194.178
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	328.679.048.443	171.810.123.302
Jumlah	930.313.054.526	697.203.317.479
BEBAN USAHA		
Beban Operasional	228.402.367.101	99.780.144.255
Beban Sumber Daya Manusia	325.822.267.767	214.873.082.552
Beban Administrasi dan Umum	132.938.891.723	104.034.724.747
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	21.005.555.703	14.845.770.783
Jumlah Beban Usaha	708.169.082.294	433.533.722.336
LABA SEBELUM PAJAK	1.023.220.700.869	970.990.161.152
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Beban Pajak Kini	247.360.565.250	225.961.078.977
Manfaat Pajak Tangguhan	(25.986.025.219)	-
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	221.374.540.031	225.961.078.977
LABA TAHUN BERJALAN	801.846.160.838	745.029.082.175
Pendapatan Komprehensif	57.830.808.868	54.667.700.367
LABA KOMPREHENSIF	859.676.969.706	799.696.782.542

OPERATING REVENUE
Gross Guarantee Fee
Re Insurance Comission Fee
Co-Guarantee Premium
Re-Insurance Premium
Guarantee Restitution
Net Guarante Revenues
CLAIM EXPENSES
Claim Expenses
Increase (Decrease) in Reserve Claim
Allowance for Impairment Losses
Impairment Losses on Co-Guarantee Receivable
Provision for Claim Losses Co-Guarantee
Total Claim Expenses
GUARANTEE FEE NET
Investment Income- Net
Other Income (Expenses)
Total
OPERATING EXPENSES
Operating Expenses
Human Resource Expenses
General and Administrative Expenses
Technology, System, and Development Expenses
Total Operating Expenses
INCOME BEFORE TAX
INCOME TAX EXPENSE
Current Income Tax
Deferred Tax Benefit
Total Income Tax Expense
CURRENT YEAR NET INCOME
Comprehensive Income
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

2016

2016

	KORPORAT	KUR
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	1.854.242.602.032	1.120.315.055.991
Pendapatan Komisi Re-Asuransi	35.017.148.083	-
Premi Co-Guarantee	(166.237.457.658)	-
Premi Re-Asuransi	(118.610.157.602)	-
Restitusi IJP	(15.971.543.801)	-
Imbal Jasa Penjaminan Bersih	1.588.440.591.054	1.120.315.055.991

OPERATING REVENUE
Gross Guarantee Fee
Re-Insurance Comission Fee
Co-Guarantee Premium
Re-Insurance Premium
Guarantee Restitution
Net Guarante Revenues

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Lanjutan)

28. GUARANTING ON KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Continued)

b. Laporan Laba Rugi (Lanjutan)

b. Income Statement (Continued)

2016

2016

	KORPORAT	KUR	
BEBAN KLAIM			CLAIM EXPENSES
Beban Klaim	(764.476.221.782)	(481.493.287.372)	Claim Expenses
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim	(83.842.316.720)	(79.863.003.873)	Increase (Decrease) in Reserve Claim
Penyisihan Piutang IJP/KUR	(8.495.783.538)	(8.495.783.538)	Allowance for Impairment Losses
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(14.076.972.796)	-	Impairment Losses on Co-Guarantee Receivable
Provisi Kerugian Klaim	(692.149.382)	-	Provision for Claim Losses Co-Guarantee
Jumlah Beban Klaim	(871.583.444.218)	(569.852.074.782)	Total Claim Expenses
PENJAMINAN BERSIH	716.857.146.836	550.462.981.208	GUARANTEE FEE NET
Pendapatan Investasi Bersih	587.678.040.947	515.630.993.725	Investment Income- Net
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	294.070.091.480	182.912.509.457	Other Income (Expenses)
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Beban Operasional	230.343.418.883	113.618.523.434	Operating Expenses
Beban Sumber Daya Manusia	269.332.189.035	191.528.295.816	Human Resource Expenses
Beban Administrasi dan Umum	128.798.297.931	83.581.703.831	General and Administrative Expenses
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	28.677.318.267	22.557.131.328	Technology, System, and Development Expenses
Jumlah Beban Usaha	657.151.224.116	411.285.654.409	Total Operating Expenses
LABA SEBELUM PAJAK	941.454.055.147	837.720.829.982	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAX EXPENSE
Beban Pajak Kini	235.897.638.707	190.426.041.964	Current Income Tax
Manfaat Pajak Tangguhan	13.511.180.553	10.553.907.024	Deferred Tax Benefit
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	249.408.819.260	200.979.948.987	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	692.045.235.888	636.740.880.995	CURRENT YEAR NET INCOME
Pendapatan Komprehensif	(118.710.257.788)	(111.368.180.380)	Comprehensive Income
LABA KOMPREHENSIF	573.334.978.099	525.372.700.614	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

29. MANAJEMEN RESIKO

29. RISK MANAGEMENT

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Some significant relative risks in 2017 are as follows:

1. Risiko Penjaminan Kredit

1. Risk Credit Guarantee

Risiko Penjaminan Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default rate* dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian

Credit Guarantee Risk is the risk arising from the failure to fulfill obligations guaranteed. Risk can be seen in the amount of default risk and a guaranteed level of NPL, and returns subrogation receivables.

Pada posisi 31 Desember 2017, beberapa indikator risiko penjaminan kredit mengalami penurunan, lebih baik dari tahun sebelumnya. *Default Rate* menurun 0,59% dari tahun 2016, demikian pula tingkat NPL yang mengalami penurunan sebesar 0,01% dari tahun 2016. Namun Pencapaian Pengembalian Subrogasi menurun 1,1% dari tahun 2016, demikian pula *Recovery Rate* Piutang Subrogasi mengalami penurunan 0,21% dari tahun 2016.

As of December 31, 2017, several credit guarantee risk indicators are tend to decrease. Default Rate has decreased 0,59% from 2016, the Achievement Level Returns of Subrogation decreased 0,01% from 2016, and the Recovery Rate of Subrogation receivables decreased 1,1% from 2016. However, the NPL rate is decreased 0,21% from 2016.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

1. Risiko Penjaminan Kredit (Lanjutan)

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Pertumbuhan/Growth	Description
Default risk = (Biaya Klaim)/(Volume Penjaminan)	$\frac{871.583.444.218}{125.968.092.619.258} = 0,69\%$	$\frac{1.004.609.636.479}{148.759.236.212.372} = 0,68\%$	-0,02%	Default risk = (Cost of Claim) / (Guarantee Volume)
NPL = (Outstanding Kredit Kol 3+4+5)/(Total Outstanding Kredit)	$\frac{64.608.181.155}{125.571.037.250.413} = 0,05\%$	$\frac{71.497.231.459}{169.909.821.557.704} = 0,04\%$	-0,01%	NPL = (Outstanding Credit Col. 3+4+5) / (Total Outstanding Credit)
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi = (Realisasi Angsuran Subrogasi)/(Target Angsuran Subrogasi)	$\frac{259.384.339.757}{321.768.030.188} = 80,61\%$	$\frac{296.867.665.165}{359.077.995.038} = 82,67\%$	2,06%	Return on Subrogation Achievement = (Realization of Subrogation Installment) / (Target of Subrogation Installment)
Recovery Rate Piutang Subrogasi = (Angsuran Piutang Subrogasi)/(Saldo Piutang Subrogasi)	$\frac{259.384.339.757}{4.351.971.907.308} = 5,96\%$	$\frac{296.867.665.165}{5.037.355.029.413} = 5,89\%$	-0,07%	Recovery Rate of Subrogation Receivables = (Subrogation Receivables Installment)/(Total Subrogation Receivables)

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, dan *Personality*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan / atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem scoring. Berdasarkan score ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

1. Risk Credit Guarantee (Continued)

To minimize the risk of guarantee, then on the process of guarantee, there is a risk identify using the 4Ps, namely *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, and *Personality*. Items that must be considered for each of these aspects are adapted to the characteristics of credit to be secured, and elaborated on in the system and the related guarantee procedures.

The results of the risk identification process and then followed with the establishment of guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In the implementation, risk prediction can be done qualitatively and / or quantitatively to every aspect of the 4P. Quantitative predictions made by the scoring system. Based on score, determined risk prediction of each Guaranteed or a group of Guaranteed, or a new product.

Furthermore, to make a decision whether the submission of guarantee can be approved or not, it is decided in a committee meeting. According to precautionary principle, the members of the committee consists of officials that directly related to guarantee activities (*risk taker unit*) and officials directly related to the cost consequences of potential risk (*risk financing unit*). With decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, then the decision is expected to be more objective and potential risks because decision-making errors can be minimized.

Beside use to help the decision-making process, the result of risk analysis that has been done is also used as one of the basic consideration in monitoring the ongoing credit. For high credit risk, then the monitoring of the credit can be done intensively.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

1. Risiko Penjaminan Kredit (Lanjutan)

Pada 31 Desember 2017, di samping upaya mitigasi tersebut, perusahaan juga melakukan beberapa mitigasi risiko lainnya yaitu:

- Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama dengan menambahkan klausul yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan penyebaran risiko dengan menambah mitra kerja baru dan menambah produk yang dikerjasamakan dengan mitra kerja.
- Menambah produk yang dipasarkan oleh Perusahaan.
- Melakukan penjajakan penyebaran risiko dengan bekerjasama dengan perusahaan re-asuransi.
- Memanfaatkan jasa agen yang dapat membantu menyeleksi calon Terjamin untuk Penjaminan Kredit non
- Melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Program KUR untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul.
- Melakukan pembatasan volume penjaminan untuk produk yang berisiko tinggi.
- Melakukan update data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif.
- Mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.

2. Risiko Co-Guarantee

Co-guarantee adalah kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan perusahaan penjaminan lain atau asuransi dalam bentuk penutupan risiko tertentu. Risiko *co-guarantee* merupakan risiko tidak tertagihnya piutang *co-guarantee* Sesuai dengan Per-Dir nomor 26/Per-Dir/VII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Panduan Manajemen Risiko, risiko *co-guarantee* digolongkan ke dalam kategori risiko operasional dengan sub kategori risiko counterparty.

Salah satu indikasi besaran risiko *co-guarantee* adalah besarnya piutang *co-guarantee* dibandingkan dengan rata-rata pengajuan klaim *co-guarantee* dengan mitra *co-guarantee* yang terkait. Sesuai dengan Per-Dir no. 14/Per-Dir/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, piutang *co-guarantee* dinyatakan wajar apabila saldo piutang *co-guarantee* yang belum diselesaikan oleh mitra *co-guarantee* maksimal 3 (tiga) bulan rata-rata pengajuan penggantian pembayaran klaim periode terakhir.

Pada posisi 31 Desember 2017, *co-guarantee* dilakukan dengan 5 (lima) perusahaan asuransi, yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT Al Amin), PT Jiwasraya, PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM), PT Asuransi Jiwasraya, PT Takaful dan PT CAR. *Performance* mitra *co-guarantee* Perum Jamkrindo tersebut adalah sebagai berikut :

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

1. Risk Credit Guarantee (Continued)

As of December 31, 2017, in addition to mitigation efforts, the company is also doing some other risk mitigation measures are:

- Reform agreement by adding a clause that can be used to minimize the risk.
- Doing spread risk by adding new partners and adding products in cooperation with partners.
- Adding products marketed by the Company.
- Conducting an assessment the spread risk by working with reinsurances.
- Utilizing the services of an agent who can help select candidates for the Guarantee Credit Secured non-KUR
- Coordinate with the National Committee relating to the implementation of the KUR program to anticipate problems that may arise.
- Restricting the volume of guarantees for high-risk products.
- Updating of data, including subrogation receivables collateral as one consideration in making subrogation receivables collection efforts so that these efforts can be carried out effectively.
- Optimizing subrogation receivables collection.

2. Co-Guarantee Risk

Co-guarantee is a collaboration between Perum Jamkrindo with other guarantee or insurance company in the form of closing certain risks. Co-Guarantee Risk is the risk of uncollectible co-guarantee receivables. In accordance with the Director Regulation No.26/Per-Dir/VII/2014 dated August 21, 2014 concerning Risk Management Guide, co-guarantee risk is classified into operational risk with sub categories of counterparty risk.

One indication of the co-guarantee risk is the amount of co-guarantee receivables compared with the average claim co-guarantee with partners related to co-guarantee. In accordance with the Director Regulations No.14/Per-Dir/XII/2011 dated December 22, 2011, co-guarantee receivable declared fair if unsolved co-guarantee receivables a maximum of 3 (three) months of the average filing reimbursement claims of the last period.

As of December 31, 2017, there are co-guarantee cooperation with five (5) insurance companies, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT Al Amin), PT Jiwasraya, PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM), PT Asuransi Jiwasraya, PT Takaful dan PT CAR. *Performance* of co-guarantee partners are as follow:

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

2. Risiko Co-Guarantee (Lanjutan)

2. Co-Guarantee Risk (Continued)

Mitra Co-Guarantee / Co-Guarantee Partner	Saldo Piutang Co-Guarantee / Co- Guarantee Receivables (dalam jutaan/ in million)	Rata-rata Pengajuan Klaim Co- Guarantee per Bulan/ Average Co-Guarantee Claims per Month (dalam jutaan/ in million)	Perbandingan Saldo Piutang terhadap 3 bulan Rata-rata Pengajuan/ Comparative Balance receivable on average 3 months Submissions (%)
PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	102.226.132.154	11.253.949.271	303%
PT Asuransi Syariah Mubarakah	72.707.247.598	-	-
PT Jiwasraya	563.760.675	781.412.278	24%
PT Jamkrindo Syariah	10.364.422.300	2.617.218.112	132%
PT Asuransi Beringin Sejahtera	44.285.402.653	3.118.422.943	473%

Untuk meminimalkan risiko co-guarantee, perusahaan melakukan mitigasi dengan:

- Melakukan evaluasi kinerja mitra co-guarantee untuk meminimalisir risiko.
- Melakukan penyempurnaan perjanjian dengan menambahkan klausul untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan rekonsiliasi dan penagihan piutang co-guarantee secara berkala.

To minimize the risk of co-guarantee, the company do the mitigation with:

- Evaluate the performance of co-partners to minimize risk.
- Improving the agreement by adding clauses to minimize the risk.
- Do the reconciliation and collection of co-guarantee receivables periodically.

3. Risiko Keuangan

3. Financial Risk

Risiko Keuangan dapat tercermin dari risiko likuiditas suatu perusahaan. Sesuai dengan Per-Dir nomor 15/Per-Dir/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Panduan Manajemen Risiko, Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Financial risk can be reflected from company's liquidity risk. In accordance with the Director Regulation No.15/Per-Dir/XII/2010 dated December 29, 2010 concerning Risk Management Guide, Liquidity Risk is the risk caused the company is not able to fulfill the obligations that have matured.

Sesuai dengan PMK No. 99/PMK. 010/2011 rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus). Rasio Likuiditas dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

In accordance with the PMK. No. 99/PMK. 010/2011 guarantor liquidity ratio determined at least 150% (one hundred and fifty percent). Liquidity ratio is calculated using the current ratio which is the ratio between current assets with debt.

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Pertumbuhan/ Growth	Description
Risiko Likuiditas = (aset lancar) / (utang lancar)	10.999.049.838.024 1.544.664.923.325	13.282.028.453.064 1.726.977.867.822	712,07% = 769,09%	57,02%
				Default risk = (Cost of Claim) / (Guarantee Volume)

Berdasarkan indikator tersebut, maka risiko likuiditas Perum Jamkrindo relatif kecil.

Based on these indicators, Perum Jamkrindo's liquidity risk is relatively small.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) penjaminan Perum Jamkrindo, yang dapat mengurangi pasar penjaminan (merugikan) Perusahaan serta pergerakan pasar keuangan yang dapat berpotensi menurunnya return dan nilai investasi. Variabel pasar dalam hal ini yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, trend kredit perbankan, regulasi pasar. Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

4. Market Risk

Market risk is the risk arising from the movement of market variables (*adverse movement*) Perum Jamkrindo guarantee, which can be reduce guarantee market (*adverse*) of the company and the movement of financial market that may potentially decrease the return and investment value. Market variables in this case related to guarantee is the level of competition, bank credit trends, market regulation. Market risk related to investment are interest rates, inflation, and investment portfolio.

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Pertumbuhan/Growth	Description
Pertumbuhan Penjaminan = ((Vol Penjaminan t-Vol Penjaminan t-1))/(Vol Penjaminan t-1)	$\frac{60.377.517.031.615}{65.590.575.587.643} = 92,05\%$	$\frac{148.759.236.212.372}{125.968.089.000.000} = 118,09\%$	26,04%	Growth Guarantee = ((Vol Guarantee t-Vol Guarantee t-1)) / (Vol Guarantee t-1)
Pencapaian Target Penjaminan = (Realisasi Vol Penjaminan) / (Target Vol Penjaminan)	$\frac{125.968.092.619.258}{122.500.000.000.000} = 102,83\%$	$\frac{148.759.236.212.372}{145.998.073.803.131} = 101,89\%$	-0,94%	Achievement of Guarantee Target = (Realization of Vol Guarantee) / (Target of Vol Guarantee)
Pencapaian Pendapatan Investasi = (Realisasi Pendapatan Investasi) / (Target Pendapatan Investasi)	$\frac{587.678.040.947}{724.831.000.000} = 81,08\%$	$\frac{601.634.006.083}{621.456.168.011} = 96,81\%$	15,73%	Achieving of Investment Income = (Realization of Investment Income) / (Target of Investment Income)

Dari indikator-indikator tersebut di atas, dapat dilihat pertumbuhan penjaminan dan pencapaian target penjaminan di tahun 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Of several indicators mentioned above, can be seen the growth of guarantee, guarantee target achievement, and achievement of subrogation are increase.

Secara nominal, pencapaian volume penjaminan Perusahaan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, dan apabila dibandingkan dengan target RKAP 2017, pencapaian tersebut telah melewati target sebesar 101,89 %.

Nominally, the achievement of the company guarantee volume decreased compared with the same period last year, and compared with the target of RKAP 2017 these achievements have already passed the target at 101,89%.

Secara nominal, pendapatan investasi Perusahaan mengalami kenaikan, dan pencapaiannya telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RKAP 2017. Pertumbuhan pencapaian pendapatan investasi mengalami kenaikan sebesar 15,73% dari tahun 2016. Dalam jangka panjang Perusahaan harus lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan investasi sekaligus meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya target investasi.

Nominally, the Company's investment income increased, and their achievement meet the target set in 2017. Growth achievement of investment income increased of 15.73% from 2016. In the long term the Company should further optimize the achievement of investment income and minimized the target pontensial risk which can detain the investment target.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

4. Risiko Pasar (Lanjutan)

Untuk meminimalkan risiko investasi berupa deposito, hal-hal yang dilakukan perusahaan adalah:

- Melakukan pemilihan bank untuk penempatan deposito, dimana deposito ditempatkan di bank-bank yang berkinerja baik.
- Nominal penempatan disesuaikan dengan ekuitas bank yang bersangkutan.
- Penempatan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkan dilakukan rivi apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga.

5. Risiko Tingkat Suku Bunga

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan suku bunga dalam Rupiah yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi Perusahaan. Sensitivitas laporan laba rugi adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel kurva hasil.

2017	
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh Terhadap Laporan Laba Rugi/ Impact to profit or loss (Dalam Jutaan Rupiah)
± 25	± 1.504
±50	± 3.008

2016	
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh Terhadap Laporan Laba Rugi/ Impact to profit or loss (Dalam Jutaan Rupiah)
± 25	± 946
±50	± 1.894

30. REKENING ADMINISTRATIF

Piutang Subrogasi

Piutang subrogasi merupakan tagihan kepada instansi/nasabah yang tidak dapat membayar kredit dan sudah dibayarkan klaimnya kepada bank oleh Perum Jamkrindo.

	2017	2016
Saldo Awal Tahun	4.351.971.907.308	3.846.880.025.284
Pembayaran Klaim Tahun Berjalan	971.217.594.834	764.476.221.782
Pendapatan Subrogasi Tahun Berjalan	(285.834.472.729)	(259.384.339.757)
Saldo Akhir Tahun	5.037.355.029.413	4.351.971.907.308

31. INFORMASI TAMBAHAN

Berdasarkan surat Nomor U-217/DSN-MUI/IX/2006 pada tanggal 15 September 2006 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI memberikan rekomendasi pendirian Divisi Penjaminan Syariah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dalam bekerja sama dengan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

4. Market Risk (Continued)

To minimize the risk of investment in the form of deposits, company do the things as follow:

- Conduct elections for placement of bank deposits, where deposits are placed in banks that performed well.
- Nominal placement determined with the equity of relevant bank.
- Placement is done by a certain time period which possible to do a review if there is a change in interest rates.

5. Interest Rate Risk

The following tables demonstrate the sensitivity to a reasonable possible change in IDR interest rates, with all other variables held constant, in the Company's profit or loss. The sensitivity of profit or loss is the effect of the changes in interest rates assumptions on the profit or loss for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

30. ADMINISTRATIVE ACCOUNT

Subrogation Receivables

Subrogation receivables represent receivables from agencies / customers who can not pay the loan and the bank claims have been paid by the Corporation Jamkrindo.

31. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Based on letter No. U-217/DSN-MUI/IX/2006 on September 15, 2006 the National Sharia Board-Council of Ulama Indonesia (DSN-MUI Assurance Division provides advice on the establishment of the Credit Guarantee Public Company Sharia Indonesia in cooperation with Islamic banks and financial institutions other sharia.

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI TAMBAHAN (LANJUTAN)

a. Dewas Pengawas Syariah

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Nomor 37/Kep-Dir/X/2006 pada tanggal 19 Oktober 2006, tentang pengangkatan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Ketua	Prof. DR.H. Hasanudin AF,MA
Anggota	Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ,FIIS

Chairman
Member

b. Kafalah Pembiayaan Syariah

Produk penjaminan kredit syariah yang ditawarkan adalah kafalah pembiayaan syariah merupakan suatu kegiatan perlengkapan (accessoir bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah yang disalurkan oleh bank umum syariah maupun unit

Dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara terjamin (makfuul'anhu) dengan penerima jaminan (makfuul'lahu). Namun demikian, karena kafalah pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia melalui penerbitan surat persetujuan prinsip kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan, seluruh kegiatan penjaminan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI.

c. Jenis-jenis Produk Penjaminan Syariah

- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Multiguna
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS
- Kafalah Pembiayaan Kontra Bank Garansi

d. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2017 dan 2016

	2017	2016
PENDAPATAN PENJAMINAN		
Imbal Jasa Kafalah	47.253.048.216	60.978.242.623
Pendapatan Komisi Re Asuransi	628.181.202	622.040.986
Premi Co Guarantee	(16.617.906.584)	(14.357.541.581)
Premi Re Asuransi	(940.848.716)	(2.113.711.371)
Imbal Jasa Kafalah Bersih	30.322.474.119	45.129.030.658
BEBAN KLAIM		
Beban Klaim	10.879.935.523	14.013.822.154
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	(3.715.999.761)	(3.308.516.307)
Jumlah Beban Klaim	7.163.935.762	10.705.305.847
PENJAMINAN BERSIH	23.158.538.357	34.423.724.811
Pendapatan Investasi Bersih	605.914.875	910.187.111
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	8.975.580.447	4.983.343.736
BEBAN USAHA		
Beban Operasional	6.281.772.660	6.181.703.189
Beban Sumber Daya Manusia	4.112.749.273	7.025.236.452
Beban Administrasi dan Umum	1.932.386.226	2.446.019.215
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	269.794.984	673.087.485
Jumlah Beban Usaha	12.596.703.143	16.326.046.340
LABA SEBELUM PAJAK	20.143.330.537	23.991.209.318
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Pajak Kini	210.483.055	211.951.913
Jumlah beban Pajak Penghasilan	210.483.055	211.951.913
LABA TAHUN BERJALAN	19.932.847.481	23.779.257.404

31. SUPPLEMENTARY INFORMATION (CONTINUED)

a. Sharia Council

In accordance with the Decree of the Credit Guarantee Company Directors General of Indonesia Number 37/Kep-Dir/X/2006 on October 19, 2006, on the adoption of the Sharia Supervisory Board is as follows:

b. Kafalah Sharia Financing

Sharia credit insurance products offered are kafalah sharia financing is an activity equipment (accessoir for a pattern of sharia financing extended by sharia banks and of sharia business units.

Thus there must be contract / agreement between the secured financing receiver (makfuul'anhu) assurance (makfuul'lahu). Nevertheless, because kafalah serve as substitute collateral for financing the Public Company Credit Guarantee Indonesia through the issuance of a letter of approval kafalah principles could be the basis of an agreement signed financing, the entire sharia refers to underwriting activities DSN-MUI Fatwa.

c. Types of Product Assurance Sharia

- Kafalah Public Financing
- Financing Kafalah Multipurpose
- Kafalah Construction Financing and Supplying of Goods / Services
- Microfinance Kafalah
- Kafalah Financing To BPRS
- Kafalah Counter Financing Bank Guarantee

d. Income Statement Sharia 2017 and 2016

GUARANTEE REVENUES
Gross Guarantee Fee
Re Insurance Commission Fee
Co Guarantee Premium
Re Insurance Premium
Guarantee- Net
CLAIM EXPENSE
Claim Expense
Increase (Decrease) In
Reserve claim
Total Claim Expenses
NET GUARANTEE INCOME
Investment Income - Net
Other Income (Expenses)
OPERATING EXPENSES
Operating Expenses
Human Resource Expenses
General and Administrative Expenses
Technology, System, and
Development Expense
Total Operating Expenses
INCOME BEFORE TAX
INCOME TAX EXPENSE
Current income tax
Total Current income tax
CURRENT YEAR INCOME

32. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2017 untuk tujuan perbandingan.

32. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2016 have been reclassified to the preparation of financial statements as December 31, 2017 for comparative purposes.

		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
		Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	
Laporan Posisi Keuangan				Statement of Financial Statement
Aset Lancar				Current Assets
Kas Setara Kas				Cash and Cash Equivalent
Giro Pihak Berelasi	300.476.882.176	229.488.017.004		Bank Account Related Parties
Giro Pihak Ketiga	4.213.134.885	75.202.000.057		Bank Account Third Parties
Deposito Pihak Berelasi	4.933.269.000.000	3.860.749.000.000		Time Deposit Related Parties
Deposito Pihak Ketiga	471.795.000.001	1.544.315.000.001		Time Deposit Third Parties

33. PERIKATAN PENTING

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.6/2015 berikut perubahannya, Perum Jamkrindo memiliki perikatan dengan beberapa Bank BUMN mengenai kegiatan penjaminan kredit.

33. SIGNIFICANT AGREEMENT

In accordance with Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 6/2015 and its amendments, Perum Jamkrindo had engagements with some of the state-owned bank credit for underwriting activities.

Pada tahun 2017 terdapat perikatan antara Perum Jamkrindo dengan Bank BUMN sebagai berikut:

In 2017, there were engagements between Perum Jamkrindo with state-owned banks as follows:

1. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Retail No.54/Jamkrindo/OP-01/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Perum Jamkrindo melakukan kegiatan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah memperoleh kredit dari PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jangka waktu perikatan selama 3 tahun yang berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018.
1. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk about the Kredit Usaha Rakyat Mikro and Retail Guarantee No. 54/Jamkrindo/OP-01/VIII/2015 dated August 13, 2015 certifying that Perum Jamkrindo conduct giving credit guarantees to micro, small and medium and cooperatives that have obtained loans from PT BANK INDONESIA (PERSERO) Tbk. The term of engagement valid for 3 years from August 13, 2015 until August 12, 2018.
2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat No.40/Jamkrindo/OP-01/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Perum Jamkrindo melakukan kegiatan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah memperoleh kredit dari PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Jangka waktu perikatan selama 3 tahun yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018.
2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk about the Kredit Usaha Rakyat Guarantee No. 40/Jamkrindo/OP-01/VI/2016 dated June 6, 2016 certifying that Perum Jamkrindo activities guarantee the provision of credit to micro, small, medium and cooperatives have obtaining credit from PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. The term of engagement valid for 3 year from October 26, 2015 until October 26, 2018.
3. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat No.25/Jamkrindo/OP-01/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang merupakan Addendum atas perjanjian kerjasama No.B.764-DIR/ADK/10/2015 yang menerangkan bahwa Perum Jamkrindo melakukan kegiatan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah memperoleh kredit dari PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jangka waktu perikatan selama 1 tahun yang berlaku sejak tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017.
3. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK of the PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK of the People's Business Credit Guarantee No.25/Jamkrindo/OP-01/III/2017 dated March 21, 2017 which is Addendum to the collaboration agreement No.B.764-DIR / ADK / 10/2015 explaining that Perum Jamkrindo conduct giving credit guarantees to micro, small and medium enterprises and cooperatives that have obtained loans from PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. The period of validity of 1 year starting from March 21, 2017 until August 13, 2017.

34. PERSETUJUAN DIREKSI

Laporan keuangan ini telah mendapat persetujuan Direksi Perusahaan Umum Jaminan Kredit pada tanggal 9 Pebruari 2018. Manajemen Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap laporan keuangan ini.

34. MANAGEMENTS APPROVAL

The financial statement had been approved by the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's Board of Directors dated February 9, 2018. Management of the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia is fully responsible for the financial statement.

35. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Perum Jaminan Kredit Indonesia menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) (halaman 82– 85) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) dan Entitas Anak.

35. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Perum Jaminan Kredit Indonesia published the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of Perum Jaminan Kredit Indonesia (Parent Entity) which account for investments in Subsidiaries using the cost method, have been prepared in order that the parent entity's results of operations can be analyzed. The following supplementary financial information of Perum Jaminan Kredit Indonesia (Parent Entity) (pages 82 – 85) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiaries.

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise

	<u>31 Desember/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	
ASET			ASSETS
Kas dan Setara Kas	5.146.634.280.666	5.471.702.637.163	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Surat Berharga	3.958.296.219.968	3.177.412.944.337	<i>Marketable Securities</i>
Piutang Imbal Jasa Penjaminan	2.474.754.220.235	2.347.025.423.821	<i>Guarantee Receivables</i>
Piutang Penjaminan Ulang - Bersih	117.687.546.960	112.621.073.475	<i>Reguarantee Receivables - Nett</i>
Pinjaman yang Diberikan - Bersih	776.333.533	955.166.363	<i>Loans - Nett</i>
Piutang Lain-Lain	85.328.255.005	80.394.567.702	<i>Other Receivable</i>
Pajak Dibayar Dimuka	-	81.540	<i>Prepaid Tax</i>
Premi dan Fee Dibayar Dimuka	1.099.806.419.138	978.841.199.191	<i>Prepaid Premium and Fees</i>
Beban Dibayar Dimuka	19.224.188.773	22.628.945.359	<i>Prepaid Expenses</i>
Investasi Pada Anak	249.987.500.000	249.987.500.000	<i>Investment on Subsidiary</i>
Aset tetap - Bersih	468.745.504.406	439.863.537.078	<i>Fixed assets - Nett</i>
Aset Pajak Tangguhan	176.106.704.111	172.826.374.067	<i>Deferred Tax Assets</i>
Aset Lain-lain	708.525.118.588	320.951.314.709	<i>Other Assets</i>
JUMLAH ASET	<u>14.505.872.291.382</u>	<u>13.375.210.764.804</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise)

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
Utang Klaim	75.743.401.429	11.649.581.603	Claim Payable
Utang Pajak	59.259.682.322	72.558.997.409	Tax Payable
Utang Penjaminan Ulang	111.989.430.246	68.889.524.643	Co-Guarantee Payable
Pendapatan Ditangguhkan	2.499.897.924.547	2.295.692.636.049	Deferred Income
Cadangan Klaim	423.860.529.004	399.650.604.923	Claims Reserve
Utang Lain-Lain	196.375.311.893	210.048.015.612	Other Payable
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	38.742.499.399	28.102.483.840	Employee Benefits Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	3.405.868.778.840	3.086.591.844.079	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity
Penyertaan Modal Negara	7.638.733.365.160	7.638.733.365.160	Government's Share Capital
Cadangan - Cadangan	2.460.845.975.578	1.822.249.186.145	Reserves
Saldo Laba	790.656.916.093	686.120.983.897	Retained Earnings
Komponen Ekuitas Lainnya	209.767.255.712	141.515.385.522	Other Equity Component
JUMLAH EKUITAS	11.100.003.512.542	10.288.618.920.725	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.505.872.291.382	13.375.210.764.804	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	2016	
PENDAPATAN PENJAMINAN			GUARANTEE INCOME
Imbalan Jasa Penjaminan	1.982.596.488.931	1.817.511.082.168	Guarantee Fee
Pendapatan Komisi	22.580.223.046	31.816.769.905	Comission Fee
Premi Co Guarantee	(106.531.755.041)	(171.445.826.261)	Co Guarantee Premium
Premi Re Asuransi	(124.465.791.507)	(99.891.191.027)	Reinsurance Premium
Restitusi IJP	(6.805.472.327)	(15.971.543.801)	Guarantee Restitution
Imbalan Jasa Penjaminan Bersih	1.767.373.693.103	1.562.019.290.985	Net Guarantee Revenues
BEBAN KLAIM			CLAIM EXPENSES
Beban Klaim	(959.666.274.809)	(754.091.295.676)	Claim Expenses
Penurunan Cadangan Klaim	(24.641.306.629)	(83.522.615.060)	Decrease in Reserve Claim
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(10.777.367.505)	(22.572.756.334)	Impairment Losses of Receivable
Jumlah Beban Klaim	(995.084.948.943)	(860.186.667.070)	Total Claim Expenses
PENJAMINAN BERSIH	772.288.744.160	701.832.623.915	OPERATING INCOME - NET
PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	578.966.420.744	566.317.910.402	INVESTMENT INCOME - NET
PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH	325.868.775.128	291.602.187.913	OTHERS INCOME - NET
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Beban Operasional	215.942.017.735	220.423.307.765	Operating Expenses
Beban Sumber Daya Manusia	305.554.933.222	255.213.084.574	Human Resource Expenses
Beban Administrasi dan Umum	128.330.281.187	125.118.647.010	General and Administrative Expenses
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	19.978.762.144	28.440.263.324	System, Technology, and Operating Development Expenses
Jumlah Beban Usaha	669.805.994.288	629.195.302.673	Total Operating Expenses
LABA SEBELUM PAJAK	1.007.317.945.744	930.557.419.557	INCOME BEFORE TAX
Pajak kini	243.078.214.776	231.660.752.136	Current income tax
Beban (Manfaat) pajak tangguhan	(26.417.185.125)	13.730.448.472	Tax Benefit (Deffered) income tax
Beban pajak penghasilan - bersih	216.661.029.651	245.391.200.608	Income tax expenses - net
LABA TAHUN BERJALAN	790.656.916.093	685.166.218.949	CURRENT YEAR INCOME

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
 Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2017 dan 2016
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 Years Ended
 December 31, 2017 and 2016
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
PENDAPATAN (BEBAN)			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KOMPREHENSIF LAIN			(EXPENSE)
Pos-pos Yang Tidak Akan			<i>Items That Will Not Be Reclassified</i>
Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi:			<i>To Profit And Loss</i>
Pengukuran Kembali Kewajiban			<i>Remeasurement of Post</i>
Imbalan Kerja	(1.230.992.256)	(7.675.976.544)	<i>Employment Benefit</i>
Pajak Tangguhan Terkait			<i>Related Deferred Tax</i>
Pengukuran Kembali Kewajiban			<i>Restatement on Defined Benefits</i>
Imbalan Pasti	307.748.064	1.918.994.136	<i>Obligation</i>
Pos-pos Yang Akan			<i>Items That Will Be</i>
Direklasifikasi Lebih Lanjut ke			<i>Reclassified To Profit and Loss</i>
Laba Rugi Ketika Kondisi Tertentu			<i>Due to Certain</i>
Terpenuhi:			<i>Conditions:</i>
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan			<i>Gain (Loss) Financial Assets</i>
yang Tersedia Untuk Dijual	79.035.547.704	(128.291.969.606)	<i>Available For Sale</i>
Pajak Tangguhan Terkait Aset			<i>Related Deferred Tax</i>
Keuangan yang Tersedia			<i>Financial Instrument of Available</i>
untuk Dijual	(23.444.603.145)	16.923.789.226	<i>For Sale</i>
Jumlah Pendapatan (Beban)			<i>Total Other Comprehensive</i>
Komprehensif Lain	54.667.700.367	(117.125.162.788)	<i>Income (Expense)</i>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF			TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN BERJALAN	845.324.616.460	568.041.056.161	FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

2017

Laporan Tahunan
Annual Report



Kantor Pusat / Head Office

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa B-9 Kavling 6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Phone : (021) 6540335
Email : sekper@jamkrindo.co.id



www.jamkrindo.co.id